

BAB IV

KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2014

A. KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

URUSAN WAJIB

1. URUSAN PENDIDIKAN

Pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

1.1. DINAS PENDIDIKAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa;
- 2) Menurunnya buta aksara penduduk diatas usia 15 tahun;
- 3) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Terwujudnya fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi;

b. Program

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp. 19.336.621.850,00 dengan realisasi Rp. 18.536.353.811,00 (95,86%), secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Capaian APK PAUD pada tahun 2013 sebesar 71,66% kemudian pada tahun 2014 capaiannya meningkat menjadi sebesar 78,54% hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk usia 3-6 tahun di provinsi Jawa Timur meningkat pada tahun 2014.

- Rasio Jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD pada tahun 2013 sebesar 16,04 sedangkan pada tahun 2014 angka ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,07, hal ini disebabkan karena semakin banyak jumlah PAUD, sehingga membutuhkan jumlah pendidik yang lebih besar dari tahun ke tahun, seiring dengan pertumbuhan jumlah murid dan jumlah lembaga PAUD di Provinsi Jawa Timur.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jawa Timur terus digalakkan diberbagai daerah Kabupaten maupun Kota. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak, selain juga untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak usia dini. Selama dua tahun terakhir jumlah lembaga PAUD terus bertambah 23.940 lembaga tahun 2013 dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 26.984. Begitu pula jumlah siswa PAUD dari 1.410.568 pada tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak 1.410.571 siswa pada tahun 2014.

Tenaga Pendidik PAUD pada tahun 2013 sebanyak 98.548 orang dan mencapai 99.758 orang pada tahun 2014.

Tabel 4.1.1.1
Perkembangan Pendidikan pada Jenjang (PAUD) TK/RA
Tahun 2012-2014

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	Pend Usia 4-6 tahun	Orang	1.973.323	-	
	Pend Usia 3-6 tahun	Orang	-	2.423.240	.2.454.652
2	Siswa	Orang	973.497	1.410.568	1.410.571
	a. TK	Orang	754.094	929.721	929.724
	b. RA	Orang	219.403	480.847	480.847
3	Guru	Orang	86.432	98.548	99.758
	a. TK	Orang	70.121	70.418	70.418
	b. RA	Orang	16.311	28.130	29.340
4	Lembaga	Lembaga	22.347	23.940	26.984
	a. TK	Lembaga	17.691	18.217	20.170
	b. RA	Lembaga	4.656	5.723	6.814
5	Kelas	Kelas	55.286	63.611	67.377
	a. TK	Kelas	46.162	48.731	48.731
	b. RA	Kelas	9.124	14.880	18.646

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2012/2012-2012/2013-2013/2014 Dinas Pendidikan Jawa Timur

Jumlah penduduk usia Taman Kanak-Kanak yaitu usia 4-6 tahun di Provinsi Jawa Timur (menurut BPS) menunjukkan 1.973.323 orang pada tahun 2012, sedangkan untuk pengukuran di tahun 2013, tolak ukur dari BPS telah berubah dari penduduk usia 4-6 tahun menjadi jumlah penduduk usia 3-6 tahun sebanyak 2.423.240 orang dan terus meningkat menjadi 2.454.652 orang pada tahun 2014. Begitu pula jumlah siswa PAUD meningkat dari 973.497 di tahun 2012 menjadi 1.410.568 pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 sebanyak 1.410.571 siswa.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Data dari Kabupaten/Kota kurang lengkap
- Kurangnya fasilitas belajar
- Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Jumlah Guru PAUD dengan kuota kegiatan peningkatan mutu pendidik PAUD masih belum terpenuhi.
- Belum semua Kab/Kota memanfaatkan alumni peserta workshop di provinsi maupun nasional untuk mengembangkan kompetensi yang diperolehnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran di daerahnya.

Upaya pemecahan masalah

- Data dari Kabupaten/Kota lebih dilengkapi
- Menambah fasilitas edukasi untuk lembaga PAUD
- Melakukan Koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tercipta sinkronisasi koordinasi sehingga dapat membuat perencanaan program yang lebih matang.
- Merekrut beberapa orang per Kab/Kota untuk mengikuti pelatihan peningkatan mutu pendidikan PAUD.
- Mengadakan sosialisasi dalam peningkatan kinerja Guru PAUD.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebesar Rp. 61.827.906.380,00 dengan realisasi Rp. 54.608.840.832,00 (88,32%), secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Capaian APK SD/MI pada tahun 2013 sebesar 112,7% sedangkan pada tahun 2014 capaiannya sebesar 112,72% hal ini disebabkan oleh pada tahun 2014 banyak siswa yang berusia dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun yang bersekolah di jenjang SD, sehingga pada tahun 2014 capaian APK meningkat. Demikian pula pada jenjang SMP/MTs Capaian APK SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 102,22% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 102,85% hal ini dikarenakan ada siswa yang berumur kurang dari 13 tahun dan lebih dari 15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs.
- Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI pada tahun 2013 sebesar 97,83% sedangkan pada tahun 2014 capaiannya sebesar 98% hal ini disebabkan karena semakin banyak orangtua siswa yang menyekolahkan anaknya tepat waktu. Hal yang sama terjadi pula pada jenjang SMP/MTs dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 86,36% kemudian meningkat menjadi sebesar 87,60 pada tahun 2014.

Hasil Pelaksanaan Pembangunan pada jenjang pendidikan SD/MI pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terjadi peningkatan ruang kelas, APK dan APM SD/MI seperti rincian tabel berikut :

Tabel 4.1.1.2
Perkembangan Pendidikan pada Jenjang SD/MI
Tahun 2012-2014

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	Pend Usia 7-12 tahun	Orang	3.806.927	4.055.766	3.977.011
2	Siswa Baru Tingkat I	Orang	681.039	724.682	789.141
	a. SD	Orang	532.787	574.790	632.876
	b. MI	Orang	148.252	149.892	156.265
3	Siswa	Orang	4.211.803	4.492.919	4.439.255
	a. SD	Orang	3.384.692	3.647.919	3.578.885
	b. MI	Orang	827.111	845.000	860.370
4	Siswa Usia 7-12 tahun	Orang	3.651.583	3.918.580	3.864.973
	a. SD	Orang	2.919.676	3.148.917	3.093.793
	b. MI	Orang	731.907	769.663	771.180
5	Lulusan	Orang	645.296	647.412	631.898
	a. SD	Orang	522.608	524.182	513.109
	b. MI	Orang	122.688	123.230	118.789
6	Guru	Orang	291.461	345.609	301.735
	a. SD	Orang	214.891	264.869	220.478
	b. MI	Orang	76.570	80.740	81.257
7	Sekolah	Lembaga	26.554	27.066	26.795
	a. SD	Lembaga	19.734	19.900	19.629
	b. MI	Lembaga	6.820	7.166	7.166
8	Ruang Kelas	R.Kelas	174.514	181.504	221.224
	a. SD	R.Kelas	133.174	138.780	175.795
	b. MI	R.Kelas	41.340	42.724	45.429
9	APK SD/MI	persen	112,69	112,70	112,72
10	APM SD+MI	persen	97,23	97,83	98,00

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2012/2012-2012/2013-2013/2014 Dinas Pendidikan Jawa Timur

Memperhatikan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 7-12 tahun meningkat dari tahun 2012 sebanyak 3.806.927 orang menjadi 4.055.766 orang pada tahun 2013 namun pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi sebanyak 3.977.011 orang. Begitu juga dengan jumlah siswa yang meningkat dari 4.211.803 siswa tahun 2012 menjadi 4.492.919 siswa pada tahun 2013 tetapi tahun 2014 jumlah siswa mengalami penurunan menjadi sebanyak 4.439.255 siswa. Peningkatan juga terjadi pada jumlah guru, pada tahun 2012 berjumlah 291.461 guru kemudian

meningkat di tahun 2013 mencapai 345.609 guru tetapi tahun 2014 menurun menjadi 301.735 guru.

Jumlah lembaga sempat meningkat pada tahun 2013 yaitu mencapai 27.066 lembaga yang pada tahun 2012 berjumlah 26.554 lembaga namun pada tahun 2014 menurun menjadi 26.795 lembaga. Kondisi berbeda terjadi pada jumlah ruang kelas yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2012 jumlah ruang kelas mencapai 174.514 meningkat sebanyak 181.504 tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi 221.224 tahun 2014, hal ini disebabkan bertambahnya gedung sekolah baru dan direhabilitasinya ruang kelas yang rusak. Dengan demikian, diharapkan dapat mengakibatkan daya tampung siswa per kelas lebih kecil, dari semula 40 siswa per kelas menjadi 20 – 30 siswa. Kecilnya daya tampung siswa per kelas akan mengakibatkan proses belajar mengajar di kelas menjadi lebih kondusif.

Walaupun sempat terjadi penurunan pada partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anak usia 7-12 tahun jenjang SD/MI dari tahun 2012 hingga 2014 tidak mempengaruhi Angka indikator yang ditunjukkan dengan APK, yang pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan sebesar 112,69 tahun 2012 mencapai 112,70 tahun 2013 dan APK mencapai angka 112,72 tahun 2014. Peningkatan juga terjadi pada prosentase APM yang berkisar pada angka 97,23 pada tahun 2012 menjadi 97,83 pada tahun 2013 dan menjadi 98,00 pada tahun 2014. Dari data perkembangan APK dan APM tersebut, menunjukkan pula bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Jawa Timur sangat efektif dan signifikan terhadap kenaikan angka melanjutkan dari SD ke SMP, hal ini tidak sia-sia bila program sharing bantuan operasional sekolah dari pemerintah Jawa Timur sebagai pendamping Bantuan Operasional (BOS) Nasional yang tetap dipertahankan kelanjutannya demi penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Jika membandingkan kondisi SD dengan kondisi MI pada tahun 2014, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu jumlah siswa SD dibanding MI berkisar 4 : 1, sedangkan jumlah guru berkisar 2 : 1, perbandingan jumlah lembaga berkisar 2 : 1, sedangkan jumlah ruang kelasnya berkisar 3 : 1.

Hal ini terlihat disemua data yang ada, jumlah lembaga SD sebesar 19.629 lembaga, dengan jumlah siswa sebanyak 3.578.885 siswa, ruang kelas sebesar 175.795 ruang dan ditangani oleh guru sebanyak 220.478 orang. Sedangkan untuk jumlah MI sebesar 7.166 lembaga dengan jumlah siswa 860.370, ruang kelas sebanyak 45.429 ruang dan tenaga guru yang mengajar sebanyak 81.257 guru.

Bila ditinjau dari status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SD jika dibandingkan dengan MI. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta, sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan Sekolah.

Sementara itu pada jenjang SMP/MTs selama kurun waktu tahun 2012–2014 terjadi peningkatan pada lulusan, APK, APM sebagaimana rincian pada tabel berikut :

Tabel 4.1.1.3
Perkembangan Pendidikan pada Jenjang SMP/MTs
Tahun 2012 - 2014

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	Pend Usia 13-15 tahun	Orang	1.933.845	1.849.207	1.833.603
2	Siswa Baru Tingkat I	Orang	632.005	610.246	733.196
	a. SMP	Orang	452.105	436.089	521.035
	b. MTs	Orang	179.900	174.157	212.161
3	Siswa	Orang	1.853.100	1.827.277	1.844.571
	a. SMP	Orang	1.343.764	1.306.418	1.306.672
	b. MTs	Orang	509.336	520.859	537.899
4	Siswa Usia 13-15 tahun	Orang	1.575.759	1.562.574	1.576.863
	a. SMP	Orang	1.165.415	1.146.051	1.148.070

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
	b. MTs	Orang	410.344	416.523	428.793
5	Lulusan	Orang	579.604	582.796	582.867
	a. SMP	Orang	426.451	427.840	427.866
	b. MTs	Orang	153.153	154.956	155.001
6	Guru	Orang	156.365	161.409	165.087
	a. SMP	Orang	98.806	101.001	101.896
	b. MTs	Orang	57.559	60.408	63.191
7	Sekolah	Lembaga	6.996	7.200	7.331
	a. SMP	Lembaga	3.983	4.068	4.198
	b. MTs	Lembaga	3.013	3.132	3.133
8	Ruang Kelas	R.Kelas	77.836	62.347	71.644
	a. SMP	R.Kelas	62.170	44.765	55.181
	b. MTs	R.Kelas	15.666	17.582	16.463
9	APK SLTP	persen	102,15	102,22	102,85
10	APM SLTP	persen	86,07	86,36	87,60

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2012/2012-2012/2013-2013/2014 Dinas Pendidikan Jawa Timur

Selama jangka waktu 2012–2014, terjadi penurunan pada jumlah penduduk usia 13-15 tahun, yaitu dari 1.933.845 orang pada tahun 2012 turun menjadi 1.849.207 orang pada tahun 2013 kemudian turun kembali sebanyak 1.833.603 orang pada tahun 2014. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk usia 13-15 tahun tidak berpengaruh pada jumlah siswa, pada tahun 2012 jumlah siswa sebanyak 1.853.100 siswa, tahun berikutnya tahun 2013 terjadi penurunan jumlah siswa menjadi 1.827.277 siswa kemudian meningkat kembali pada tahun 2014 mencapai 1.844.571 siswa.

Jumlah sekolah meningkat baik dari lembaga SMP yaitu sebanyak 3.983 lembaga pada tahun 2012 menjadi 4.068 lembaga pada tahun 2013 terus meningkat menjadi 4.198 lembaga pada tahun 2014, begitu juga dengan lembaga MTs yang berjumlah 3.013 lembaga pada tahun 2012 menjadi 3.132 lembaga pada tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi 3.133 lembaga pada tahun 2014.

Di samping itu, jumlah guru pun menunjukkan peningkatan konstan. Pada tahun 2012, jumlah guru yang mengajar di SMP/MTs sebanyak 156.365 orang meningkat menjadi 161.409

orang pada tahun 2013 dan meningkat menjadi sebesar 165.087 orang pada tahun 2014. Jumlah lulusan di jenjang SMP/MTs juga meningkat dari sejumlah 579.604 siswa pada tahun 2012 menjadi 582.796 siswa pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 582.867 siswa pada tahun 2014.

Perkembangan jumlah ruang kelas di jenjang SMP/MTs menunjukkan penurunan dari 77.836 ruang kelas tahun 2012 menjadi 62.347 ruang kelas pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 71.644 ruang kelas.

Sementara itu, jumlah APK terus menunjukkan peningkatan. APK yang pada tahun 2012 sebesar 102,15% meningkat menjadi 102,22% pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 102,85% pada tahun 2014. Demikian pula dengan APM yang meningkat terus dalam kurun waktu tersebut, yaitu 86,07% tahun 2012 menjadi 86,36% di tahun 2013 dan terus meningkat menjadi 87,60% pada tahun 2014 yang berarti bahwa penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun tidak terhambat.

Berdasarkan peningkatan secara konstan pada nilai APM dan APK pada SD/MI dan SMP/MTs di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan dapat dikatakan bahwa Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Provinsi Jawa Timur telah tuntas paripurna, sehingga bisa dilanjutkan dengan Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun yang sebenarnya di Provinsi Jawa Timur telah dimulai pada tahun 2008.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Peserta kegiatan yang telah ditetapkan ada yang tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan.
- Adanya perubahan harga pasar
- Masih rendahnya tingkat penguasaan IT dan Multimedia

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dan lokasi sekolah yang secara geografis sulit dijangkau
- Belum semua Kab/Kota memanfaatkan alumni peserta workshop di provinsi maupun nasional untuk mengembangkan kompetensi yang diperolehnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran di daerahnya.

Upaya pemecahan masalah

- Ditekankan kepada dinas Kab/Kota agar peserta yang diundang diwajibkan datang.
- Berusaha agar pengaturan akuntansi sesuai
- Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga administrasi agar semakin menguasai IT dan multimedia.
- Perbaiki fisik dan infrastruktur SD/MI beserta penambahan sarana penunjang pembelajaran (Perpustakaan, laboratorium Bahasa dan Komputer/Multimedia, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah, ruang Ekspresi/kreasi siswa dan lain-lain dalam rangka peningkatan mutu proses dan Output pembelajaran.
- Meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah (SD/MI) dalam upaya penguatan akuntabilitas dan pencitraan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan.

d) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

- Penghargaan Tingkat Nasional dari Kemenbud dikdasmen Juara 1 Bina Kualitas Sekolah Dasar
- Juara II Lomba Membatik dalam Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional Tahun 2014
- Juara Harapan II Lomba Cipta Puisi dalam Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional Tahun 2014
- Penyaji Terbaik Cabang Seni Festival Kreativitas Seni Tari dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.

- Penyaji Terbaik Cabang Seni Festival Musik Tradisional dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.
- Juara 1 Cabang Seni Story Telling dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.
- Juara 2 Cabang Seni MTQ Hifz Putri dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.
- Juara Harapan 1 Cabang Seni MTQ Tilawah Putri dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.
- Juara 3 Cabang Seni Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.
- Juara 2 Cabang Seni Poster Putra dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.
- Penghargaan Khusus Cabang Seni Poster Putri dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.
- Juara 2 Cabang Seni Kriya Putra dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.
- Juara 3 Cabang Seni Kriya Putri dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.
- Juara 2 Cabang Seni Tari Kreasi Berpasangan dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.

- Juara Harapan 1 Cabang Seni Drama dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 1-7 Juni 2014 di Semarang, Jawa Tengah.
- Juara 1 Cabang Olahraga Bola Voli Putra dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 2 Cabang Olahraga Bola Voli Putri dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Nomor Lompat Jauh Putri dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Nomor Lompat Jauh Putra dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 2 Cabang Olahraga Pencak Silat Nomor Tunggal Putra dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 3 Cabang Olahraga Pencak Silat Kelas D Putra (tanding) dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 2 Cabang Olahraga Renang gaya kupu-kupu, gaya dada, dan gaya bebas dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 3 Cabang Olahraga Karate Putri dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 1 Cabang Olahraga Catur Putra dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 1 Cabang Olahraga Bulutangkis Tunggal Putra dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.

- Juara 2 Cabang Olahraga Bulutangkis Tunggal Putri dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 3 Cabang Olahraga Bulu Tangkis Ganda Campuran dalam O2SN SMP Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 15-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 2 Mata pelajaran Biologi dalam OSN SMP Nasional Tahun 2014 yang dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat
- Juara 3 Mata pelajaran Biologi dalam OSN SMP Nasional Tahun 2014 dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat

3) Program Pendidikan Menengah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Program Pendidikan Menengah sebesar Rp. 100.583.884.620,00 dengan realisasi Rp. 93.036.971.267,00 (92,50%), secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Capaian APK jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 78,21% sedangkan pada tahun 2014 capaiannya sebesar 78,23% hal ini dikarenakan jumlah siswa SMA/MA/SMK pada tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2013
- Sedangkan capaian APM SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 59,78% sedangkan pada tahun 2014 capaiannya sebesar 65,78% hal ini disebabkan oleh karena jumlah siswa usia 16-18 tahun pada tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2013.

Pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terjadi perkembangan pelaksanaan pembangunan dan juga peningkatan APK dan APM seperti rincian tabel berikut:

Tabel 4.1.1.4
Perkembangan Pendidikan pada Jenjang SMA/MA/SMK
Tahun 2012 –2014

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	Pend Usia 16-18 tahun	Orang	1.810.625	1.742.716	1.763.129
2	Siswa Baru Tingkat I	Orang	473.480	463.162	486.769
	a. SMA	Orang	170.940	156.385	164.536
	b. MA	Orang	89.911	87.414	92.854
	c. SMK	Orang	212.629	219.363	229.379
3	Siswa	Orang	1.300.503	1.312.856	1.348.733
	a. SMA	Orang	495.317	464.721	438.140
	b. MA	Orang	243.517	245.888	253.124
	c. SMK	Orang	561.430	601.879	657.469
	d. SMA TERBUKA	Orang	239	368	368
4	Siswa Usia 16-18 tahun	Orang	987.157	1.021.858	1.138.696
	a. SMA	Orang	383.558	368.039	370.682
	b. MA	Orang	179.222	178.825	188.453
	c. SMK	Orang	424.377	474.994	579.561
5	Lulusan	Orang	384.974	388.439	410.959
	a. SMA	Orang	158.469	157.717	164.897
	b. MA	Orang	61.924	57.291	66.058
	c. SMK	Orang	164.581	173.431	180.004
6	Guru	Orang	114.353	122.791	133.701
	a. SMA	Orang	39.236	39.955	40.350
	b. MA	Orang	29.828	30.813	39.228
	c. SMK	Orang	45.289	52.023	54.123
7	Sekolah	Lembaga	3.928	4.101	4.300
	a. SMA	Lembaga	1.285	1.324	1.347
	b. MA	Lembaga	1.294	1.320	1.339
	c. SMK	Lembaga	1.349	1.457	1.614
8	Ruang Kelas	R.Kelas	36.231	37.217	39.032
	a. SMA	R.Kelas	14.406	14.139	14.905
	b. MA	R.Kelas	7.588	8.221	8.523
	c. SMK	R.Kelas	14.237	14.857	15.604
9	APK SLTA	Persen	74,21	78,21	78,23
10	APM SLTA	Persen	55,94	59,78	65,78
11	Rasio M/G	M/G	13	12	12
12	Rasio M/Kelas	M/Kelas	33	33	33

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2012/2012-2012/2013-2013/2014 Dinas Pendidikan Jawa Timur

Pada kurun waktu tahun 2012-2014, terjadi penurunan pada jumlah penduduk usia 16-18 tahun yakni sebesar 1.810.625 pada tahun 2012 menjadi 1.742.716 tahun 2013 dan kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 1.763.129 orang. Walaupun

terjadi penurunan pada jumlah penduduk usia 16-18 tahun namun secara keseluruhan jumlah siswa jenjang SLTA meningkat dari 1.300.503 siswa di tahun 2012 menjadi 1.312.856 siswa pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 1.348.733 siswa yang akhirnya berdampak pada peningkatan APK SLTA yang mencapai 78,21% di tahun 2013 dari 74,21% di tahun 2012 dan kembali meningkat menjadi 78,23% di tahun 2014.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah guru SMA yang pada tahun 2012 sebanyak 39.236 orang dan pada 2013 meningkat menjadi 39.955 orang dan kemudian pada tahun 2014 jumlah guru SMA meningkat lagi menjadi sebesar 40.350 orang. Begitu juga dengan guru MA dan SMK, guru MA meningkat dari 29.828 orang pada tahun 2012 menjadi 30.813 dan kembali meningkat menjadi 39.228 orang pada tahun 2014 dan guru SMK juga meningkat dari 45.289 orang di tahun 2012 menjadi 52.023 orang di tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 54.123 orang di tahun 2014.

Peningkatan konstan juga terjadi pada jumlah sekolah dan jumlah ruang kelas secara keseluruhan. Jumlah sekolah dari 3.928 tahun 2012 menjadi 4.101 di tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi 4.300 pada tahun 2014. Begitu pula dengan jumlah ruang kelas, dari 36.231 tahun 2012 menjadi 37.217 di tahun 2013 meningkat kembali sebanyak 39.032 tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya program pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas untuk memperluas daya tampung lembaga jenjang pendidikan menengah sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Selain itu, program pembangunan ini juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Dampaknya, peningkatan konstan terjadi pada APK dan APM yang

menunjukkan bahwa Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Wajar Dikmen) 12 Tahun menunjukkan keberhasilan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Undangan kegiatan seringkali tidak sampai ke sekolah, sehingga sekolah banyak yang tidak mengikuti kegiatan yang diadakan;
- Kurangnya Sarana prasarana akademik dan kepelatihan olahraga prestasi;
- Kurangnya Volume Try Out atau uji tanding ke luar provinsi atau luar negeri;
- Tenaga pelatih dan administrasi masih banyak tenaga kontrak (outsourcing).

Upaya pemecahan masalah

- Melakukan Koordinasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- Mengupayakan tempat latihan diluar arena UPT SMANOR Jatim, khususnya cabang olahraga selam, renang dan atletik;
- Memotivasi para atlit untuk menambah sendiri jam latihan;
- Meningkatkan kinerja pelatih dan mengevaluasi program kepelatihan secara berkelanjutan.

d) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

- Juara 1 Cabang Olahraga Voli Pantai Putra dalam PON Remaja 1 Tahun 2014
- Juara 2 Cabang Olahraga Voli Pantai Putri dalam PON Remaja 1 Tahun 2014
- Juara 1 Cabang Olahraga atletik dalam PON Remaja 1 Tahun 2014
- Juara 1 Bidang Studi Matematika dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014

- Juara 1 Bidang Studi Fisika(Absolute winner, Best Theory) dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 1 Bidang Studi Kimia dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 1 Bidang Studi Komputer (Kontestan Wanita Terbaik) dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 1 Bidang Studi Komputer Pria dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 1 Bidang Studi Astronomi (Best Theory) dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 1 Bidang Studi Ekonomi (Simulasi Perdagangan Saham Terbaik 1) dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 1 Bidang Studi Kebumihan dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 2 Bidang Studi Fisika(Kontestan Wanita terbaik dan Kontestan muda Terbaik) dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 2 Bidang Studi Komputer dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 2 Bidang Studi Astronomi dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014

- Juara 2 Bidang Studi Geografi dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 3 Bidang Studi Matematika dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 3 Bidang Studi Fisika dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 3 Bidang Studi Kimia dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 3 Bidang Studi Biologi dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 3 Bidang Studi Ekonomi (Makalah Terbaik 1, Simulasi Perdagangan Saham Terbaik 2) dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 3 Bidang Studi Kebumihan dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 3 Bidang Studi Geografi dalam OSN SMA Tahun 2014 yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1-7 September 2014
- Juara 2 Cabang Olahraga Karate-kata Perorangan Putra dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 3 Cabang Olahraga Karate-kumite-61 Kg Putra dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.

- Juara 1 Cabang Olahraga Karate-kumite-53 Kg Putri dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 1 Cabang Olahraga Atletik – Lari 100 M Putra dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 1 Cabang Olahraga Atletik – Lari 100 M Putri dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara Harapan 1 Cabang Olahraga Atletik-Lompat Tinggi Putra dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 2 Cabang Olahraga Pencak Silat-Tunggal Putra dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 3 Cabang Olahraga Pencak Silat-Tunggal Putri dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 2 Cabang Olahraga Pencak silat-Tanding kelas F Putri dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 2 Cabang Olahraga Tenis Meja-tunggal putri dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 1 Cabang Olahraga Catur-Tunggal Putra dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 3 Cabang Olahraga Catur-Tunggal Putri dalam O2SN SMA Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 16-21 Juni 2014 di Jakarta.
- Juara 1 Lomba Cerdas terampil Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 25-29 Agustus 2014 di Jakarta

4) Program Pendidikan Non Formal

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Program Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 21.955.115.150,00 dengan realisasi Rp. 19.603.597.465,00 (89,29%), secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Capaian Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun pada tahun 2013 mencapai angka 99,36% dan meningkat kembali pada tahun 2014 sebesar 99,69% hal ini disebabkan oleh karena semakin banyaknya penduduk yang bersekolah, sehingga banyak penduduk yang dapat memperoleh pendidikan dengan baik sehingga angka melek huruf meningkat dari tahun ke tahun.

Selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan pula melalui jalur pendidikan non formal dan informal. Penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan keterampilan berwiraswasta/kewirausahaan sebagai bekal dalam bekerja dan berusaha. Program pendidikan non formal dan informal meliputi : (1) Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional; (2) Paket A setara SD/MI; (3) Paket B setara SMP/MTs; (4) Paket C setara SMA/MA; (5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (6) Pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan Keluarga.

Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C Setara SMA adalah untuk menampung siswa putus sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA untuk melanjutkan pendidikan sehingga dapat menyelesaikan jenjang tersebut.

Program Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional diselenggarakan untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan Angka, Buta Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar).

Tabel 4.1.1.5
Perkembangan Pendidikan Kemasyarakatan
Tahun 2012 -2014

No.	Komponen	2012	2013	2014
1	Kejar Paket A (PBH)			
	- Kelompok Belajar	5.150		
	- Warga Belajar	51.500		
2	Kejar Paket A (Setara SD)			
	- Kelompok Belajar	471	335	394
	- Warga Belajar	9.427	9.062	6.070
3	Kejar Paket B (Setara SMP)			
	- Kelompok Belajar	1.541	929	941
	- Warga Belajar	38.358	42.873	22.067
4	Kejar Paket C (Setara SMA)			
	- Kelompok Belajar	1.671	772	755
	- Warga Belajar	41.853	48.877	27.001

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2012/2012-2012/2013-2013/2014 Dinas Pendidikan Jawa Timur

Memperhatikan tabel diatas dapat dilihat bahwa perubahan yang fluktuatif pada semua jumlah kelompok belajar dan warga belajar di setiap paket. Pada tahun 2012, Kejar Paket A (PBH) Kelompok Belajar sejumlah 5.150 orang dan Warga Belajar sebanyak 51.500 orang, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada Program Kejar Paket A (PBH) sehingga tidak dapat didata berapa jumlah Kelompok Belajar maupun Warga Belajarnya.

Berbeda dengan Kejar Paket A (Setara SD), pada tahun 2012 terjadi penurunan Kelompok Belajar berjumlah 471 orang menjadi 335 orang tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 394 orang pada tahun 2014, Warga Belajar dari 9.427 orang tahun 2012 menjadi 9.062 orang tahun 2013 dan kembali menurun menjadi 6.070 orang tahun 2014.

Begitu pula dengan Kejar Paket B (Setara SMP), kelompok belajar yang pada tahun 2012 mencapai 1.541 orang menurun menjadi 929 orang di tahun 2013 namun tahun 2014 meningkat menjadi 941 orang dan Warga Belajar berada pada angka 38.358 orang tahun 2012 meningkat menjadi 42.873 orang tahun 2013 dan menurun menjadi 22.067 orang.

Penurunan juga terjadi pada Kejar Paket C (Setara SMA), Kelompok Belajar tahun 2012 mencapai 1.671 orang menurun menjadi 772 orang tahun 2013 dan terus menurun menjadi 755 orang tahun 2014 dan Warga Belajar terjadi peningkatan, pada tahun 2012 berjumlah 41.853 orang meningkat menjadi 48.877 orang tahun 2013 namun menurun pada tahun 2014 menjadi 27.001 orang.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Koordinasi antar lintas sektoral terkadang kurang berjalan dengan baik
- Kebijakan yang ada di Provinsi dengan Kab/Kota terkadang tidak sinkron
- Tidak semua warga buta aksara terdata oleh petugas instansi setempat dan setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Kabupaten/Kota ternyata ada data verifikasi dari BPS pada tahun 2010 yang tidak valid.
- Kurangnya tenaga tutor

Upaya pemecahan masalah

- Koordinasi dengan lintas Sektoral lebih ditingkatkan lagi di tahun 2014
- Mengadakan Sosialisasi, Sinkronisasi dan Rapat Program PNFI akan lebih diinsentifkan di tahun 2014, sehingga antara Provinsi dengan Kab/Kota ada Sinkronisasi dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan.
- Pendataan dilakukan per Kepala Keluarga mulai dari desa setempat sehingga datanya dapat terinci keseluruhan.
- Merekrut lebih banyak tenaga kependidikan (tutor) yang memenuhi kualifikasi.

5) Program Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus)

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Program Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) sebesar Rp. 9.500.000.000,00 dengan realisasi Rp. 8.981.042.200,00 (94,54%), secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Bentuk Satuan Pendidikan Khusus terdiri atas : Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Terciptanya kreatifitas anak ABK melalui Pameran Pendidikan Khusus
- Terciptanya model pelayanan pendidikan khusus yang sesuai dengan karakteristik anak.
- Peningkatan fungsi center di SLB/C Negeri Pembina Lawang, Malang;
- Penyelenggaraan Pendidikan Olahraga Adaptif bagi siswa PLB;
- Penanganan anak Autis secara meluas dan lebih intensif;
- Pengembangan uji coba Pendidikan Terpadu/Inklusi dengan berbagai model;
- Uji coba Program Percepatan Belajar (Akselerasi);
- Pengembangan program rehabilitasi pada semua jenis kelainan;
- Terciptanya Model Pembelajaran Inklusi yang ada di Jatim;
- Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Jawa Timur.

Pada semua jenjang Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus (PLB/PK) terjadi kondisi yang fluktuatif di semua aspek sejak tahun 2012 s.d. 2014, mulai dari jumlah siswa, jumlah guru, jumlah kelas sampai jumlah lembaga. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.1.6
Perkembangan Pendidikan pada Jenjang
Sekolah Luar Biasa Tahun 2012 -2014

No.	Komponen	2012	2013	2014
1	TKLB			
a	Lembaga	130	130	130
b	Kelas	632	632	202
c	Murid	1.259	1.259	1.248
d	Guru	244	244	253
2	SDLB			
a	Lembaga	263	263	248
b	Kelas	874	874	976
c	Murid	9.222	9.599	10.890
d	Guru	1.399	1.399	2.216
3	SMPLB			
a	Lembaga	184	184	214
b	Kelas	434	434	297
c	Murid	2.321	2.565	2.709
d	Guru	813	813	594
4	SMALB			
a	Lembaga	129	137	130
b	Kelas	136	422	413
c	Murid	1.224	1.245	1.325
d	Guru	517	713	826

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2012/2012-2012/2013-2013/2014 Dinas Pendidikan Jawa Timur

Adapun sekolah inklusif di Jawa Timur senantiasa menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dari semula berjumlah 382 lembaga di tahun 2012, sekolah inklusi kembali mencatatkan peningkatan jumlah di tahun 2013 menjadi sebesar 458 lembaga, tetapi pada tahun 2014 jumlah sekolah inklusi menurun menjadi hanya 351 lembaga, hal ini dikarenakan banyaknya sekolah Luar biasa yang didirikan untuk dapat menunjang pendidikan peserta didik yang memiliki bakat istimewa. Hal ini sesuai dengan amanat Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta Pergub Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur yang menyatakan pada pasal 4 bahwa setiap kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) PAUD dan 1 (satu) sekolah/madrasah

penyelenggara pendidikan inklusi untuk masing – masing jenjang pendidikan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Belum semua guru dari Sekolah layanan inklusif mendapat kesempatan mengikuti pelatihan penanganan ABK
- Belum semua sarana prasarana SLB/SDLB/SMPLB/SMALB memenuhi standart Nasional

Upaya pemecahan masalah

- Pelatihan guru dilaksanakan menggunakan alokasi anggaran daerah
- Usulan bantuan Sosial peningkatan sarana prasarana SLB dari pemerintah pusat melalui Kemendikbud.

6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 76.501.000.000,00 dengan realisasi Rp. 74.323.356.907,00 (97,15%), secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Jawa Timur juga terlihat dari semakin banyaknya guru yang saat ini telah memenuhi standar kualifikasi minimal S1. Perkembangan selama 3 (tiga) tahun terakhir tersaji dalam tabel. Pada tahun 2012, jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi minimal D4/S1 sebesar 419.840 guru atau 74,68% dan meningkat menjadi 523.867 guru atau 83,18% pada tahun 2013 dari jumlah 629.809 guru keseluruhan di Jawa Timur, sedangkan pada tahun 2014 jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi minimal D4/S1

sebesar 526.079 guru atau 83,77% dari jumlah 628.023 keseluruhan guru di Jawa Timur.

Tabel 4.1.1.7
Perkembangan Jumlah dan Kualifikasi Guru menurut Ijazah
di Jawa Timur Tahun 2012- 2014

No.	LEMBAGA	2011/2012			2012/2013			2013/2014		
		≤ D3	≥ D4/S1	JML	≤ D3	≥ D4/S1	JML	≤ D3	≥ D4/S1	JML
1	Sd Negeri	71.112	124.087	195.199	62.123	180.413	242.536	45.045	180.809	197.636
2	Sd Swasta	5.215	14.477	19.692	5.524	16.809	22.333	5.297	16.827	22.124
3	Mi Negeri	551	2.256	2.807	666	2.346	3.012	729	2.525	3.254
4	Mi Swasta	32.178	41.045	73.763	34.562	43.166	77.728	29.588	48.415	78.003
5	Smp Negeri	1.493	56.292	57.785	1.854	57.582	59.436	1.854	57.760	59.614
6	Smp Swasta	4.308	36.713	41.021	4.259	37.306	41.565	4.259	38.023	42.282
7	Mts Negeri	263	7.098	7.361	1.401	6.562	7.963	188	5.183	5.371
8	Mts Swasta	12.146	38.052	50.198	14.637	37.808	52.445	8.337	49.483	57.820
9	Sma Negeri	64	20.445	20.509	496	19.700	20.196	297	20.162	20.459
10	Sma Swasta	562	8.165	18.727	1.142	18.617	19.759	874	19.017	19.891
11	Smk Negeri	80	16.076	16.156	730	22.667	23.397	327	23.527	23.854
12	Smk Swasta	999	28.134	29.133	1.984	26.642	28.626	2.051	28.218	30.269
13	Ma Negeri	59	4.798	4.857	85	4.642	4.727	85	4.847	4.932
14	Ma Swasta	2.769	22.202	24.971	5.513	20.573	26.086	3.013	31.283	34.296
JUMLAH		131.799	419.840	562.179	134.976	494.833	629.809	101.944	526.079	628.023
%		23,44	74,68		21,44	78,57		16,23	83,77	

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2011/2012-2012/2013-2013/2014 Dinas Pendidikan Jawa Timur

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kualifikasi akademik guru yang belum S1 atau D4 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen melalui penyaluran beasiswa S1;
- Peningkatan wawasan, kompetensi dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan di 38 Kab/Kota Se Jawa Timur melalui berbagai kegiatan workshop dan lokakarya seperti, Workshop Kompensatoris Untuk Guru Dengan Layanan Pendidikan Inklusif, Workshop Penyusunan Program Pembelajaran Di Sekolah Individual ABK Di Sekolah Dengan Layanan Pendidikan Inklusif (DID), Workshop Penyusunan Bahan Evaluasi Untuk Guru Di Sekolah Dengan Layanan Pendidikan Inklusif (DID), Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pendidikan Inklusif (DID), Workshop Pengembangan

Manajemen Pusat Sumber Layanan Pendidikan Inklusif (DID) sehingga jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional di Provinsi Jawa Timur dapat terpenuhi;

- c. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui PAK (Penilaian Angka Kredit) meningkat;
- d. Meningkatnya kompetensi dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan diraihnya juara dalam berbagai seleksi tenaga pendidik berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional, di antaranya Guru/Kepala TK Berprestasi, Guru/Kepala/Pengawas SD/SMP Berprestasi, Guru SMA/SMK Berprestasi, Kepala/Pengawas SMA/SMK Berprestasi, Kepala PK Berdedikasi, Guru SMA/SMK Berdedikasi, Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup, Seleksi Forum Ilmiah Guru, Apresiasi (Jambore) PTK PAUDNI, serta Olimpiade Sains Nasional Guru Bidang Studi MIPA.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Permasalahan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan DIKMEN, DIKDAS dan PAUDNI tentang juknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi serta Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Pemberian honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS hanya sebesar Rp.150.000/bulan dan lebih kecil bila dibandingkan dengan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS dari Pusat sebesar Rp. 300.000/bulan.

Upaya pemecahan masalah

- Dinas pendidikan Prov Jatim sering konsultasi ke Direktorat masing-masing jenjang terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi serta Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi.

- Pada tahun 2014 Dinas pendidikan Prov Jatim meningkatkan Pemberian honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS sebesar Rp. 150.000/bulan menjadi Rp. 200.000/bulan bagi 9.363 Guru se Jawa Timur.

7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar Rp. 60.940.420.000,00 dengan realisasi Rp. 56.909.605.573,00 (93,39%), secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tersedianya data dan informasi pendidikan dari Triwulan I sampai Triwulan IV pada 10 Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- Semua komponen yang terkait dengan proses pengelolaan pendidikan memahami tentang arti pentingnya data dan informasi;
- Sistem penyimpanan arsip data dan informasi mengarah ke informasi teknologi;
- Dapat mendayagunakan database pendidikan persekolahan sebagai bentuk analisis dan sebagai pendukung dalam perencanaan pendidikan pada satuan pendidikan;
- Sumber Daya Manusia pendataan pendidikan mampu menguasai dan memanfaatkan Pangkalan Data dan Informasi Teknologi Informasi;

- Penguatan dan meningkatnya fasilitasi program pendidikan untuk perwujudan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan pendidikan terkini.

Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pemerataan pendidikan, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio Siswa, guru, kelas, sekolah dan lainnya.

Tabel 4.1.1.8
Indikator Pemerataan Pendidikan Tahun 2012/2014

No	Indikator	SD + MI	SMP + MTs	SM + MA
1.	APK	112,72	102,85	78,23
2	APM	98,00	87,60	65,78
3	Rasio			
	-Siswa/sekolah	166	252	314
	-Siswa/Kelas	24	30	33
	- Kelas/R.Kelas	1,02	0,98	1,01
	- Siswa/Guru	15	12	12
4	Akses Masuk ke Sekolah			
	- Angka Melanjutkan		98,96	88,36

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2011/2012-2012/2013-2013/2014 Dinas Pendidikan Jawa Timur

Berdasarkan APK, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD+MI yaitu 112,72% dan yang terendah di tingkat Sekolah Menengah 78,23%. Tingginya APK di tingkat SD adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang diprasyarkan di jenjang tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenjang SD mempunyai APK yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat lainnya.

Sementara itu, APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD+MI yaitu 98,00% dan yang terendah di tingkat SM yaitu 65,78%. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD+MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan

tingkat lainnya. Hal ini menunjukkan kinerja yang paling baik terdapat di tingkat SD+MI.

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, kelas per ruang kelas dan siswa per guru. Pada tabel di atas ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin padat sekolah yang diperlihatkan dari Rasio Siswa/Sekolah. Hal ini wajar karena jangkauan anak pada jenjang yang tinggi makin luas sehingga Rasio Siswa/Sekolah di SM paling tinggi (314) sedangkan yang terkecil adalah SD sebesar (166), SMP sebesar (252).

Hal yang sama juga berlaku untuk kepadatan kelas. Ternyata, makin tinggi jenjang pendidikan, makin padat suatu kelas yang ditandai dengan Rasio Siswa/Kelas yang mendekati standar ideal (32), yaitu yang terbesar SM (33) sedangkan SMP (30), SD (24) dan yang terkecil SD (24). Dengan demikian, di SMP dan SM penggunaan kelas yang ada lebih efisien daripada di SD.

Dalam hal pemanfaatan ruang kelas, ternyata SMP yang paling rendah. Ini dapat dilihat dari Rasio Kelas/Ruang Kelas SMP sebesar 0,98 dan SD sebesar 1,02 dan yang tertinggi SM sebesar 1,01. Hal ini menunjukkan bahwa di SMP telah kelebihan ruang kelas, sedangkan di SM dan SD masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah ruang kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali.

Dari segi guru, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan kebutuhan guru per siswa makin sedikit. Rasio Siswa/Guru sebesar 15 di SD dan 12 di SMP dan SM. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut.

Sebagai akses masuk ke sekolah untuk SD digunakan Angka Masukan Kasar (AMK) sedangkan ke jenjang lainnya menggunakan

Angka Melanjutkan (AM). AMK SD merupakan akses pertama kali masuk ke SD, sedangkan AM khusus untuk SMP dan SM merupakan akses lanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, AMK SD tidak harus lulus atau tamat dari TK tetapi dapat langsung dari penduduk usia masuk SD atau dari rumah tangga. Sebaliknya, jika siswa belum lulus SD/MI atau Paket A tidak dapat melanjutkan ke SMP, demikian juga jika belum lulus SMP/MTs atau Paket B tidak dapat melanjutkan ke SM/MA, atau jika belum lulus SM/MA atau Paket C tidak dapat melanjutkan ke PT.

Selain indikator pemerataan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan juga dapat dilihat dari indikator peningkatan mutu pendidikan.

Tabel 4.1.1.9
Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2012/2014

No	Indikator	SD + MI	SMP + MTs	SM + MA + SMK
1.	Rata-Rata UN Mata Pelajaran :			
	Bahasa Indonesia	7,68	7,56	
	Matematika	7,47	7,15	
	IPA	7,88	7,61	
	Bahasa Inggris		7,52	
2.	Angka Putus Sekolah	0,10	0,35	0,65
3.	Angka Mengulang	1,69	0,13	0,15
4.	Angka Lulusan	99,93	99,03	98,52
5.	Angka Kelayakan Guru Mengajar			
	a. Layak	85,83	95,75	94,39
	b. Tidak Layak	14,17	4,25	5,61
6.	Persentase Kondisi Ruang Kelas			
	a. Baik	94,32	90,66	91,32
	b. Rusak Ringan	2,80	6,42	6,44
	c. Rusak Berat	2,89	2,92	2,24
7.	Persentase Fasilitas Sekolah			
	a. Perpustakaan	98,81	88,36	86,82
	b. Lapangan OR	94,31	88,19	72,01
	c. UKS	92,86	90,27	89,62
	d. Laboratorium	-	88,38	93,82
	e. Ruang Komputer	91,94	91,76	93,05

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2011/2012-2012/2013-2013/2014 Dinas Pendidikan Jawa Timur

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada tingkat SD + MI yaitu sebesar 1,69% dan terendah terdapat pada tingkat SLTP + MTs yaitu sebesar 0,13%. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SM + MA + SMK yaitu sebesar 0,65% dan terendah terdapat pada tingkat SD + MI yaitu sebesar 0,10%. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka tertinggi terdapat pada tingkat SD + MI yaitu sebesar 99,93% dan terendah terdapat pada tingkat SM + MA + SMK yaitu sebesar 98,52%. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SD. Hal itu ditunjukkan dengan adanya putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat, ternyata Angka Lulusan (AL) tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara SD dan SM yaitu semakin tinggi jenjang sekolah semakin rendah (SD 99,93 SMP 99,03 sedangkan SM yaitu 98,52).

Dari segi angka kelayakan guru mengajar, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan % guru yang layak mengajar makin tinggi. % guru yang layak mengajar di SD+MI 85,83 di SMP+MTs menjadi 95,75 dan 94,39 di tingkat SM+MA. Hal ini menunjukkan bahwa makin rendah jenjang pendidikan ternyata guru yang berkualifikasi Sarjana atau S1 makin kecil. Hal ini dapat dipahami karena standar guru layak di SD+MI mengalami peningkatan dari Diploma 2 menjadi sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4).

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 94,32% selanjutnya pada jenjang SMA+MA+SMK yaitu sebesar 91,32% sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada jenjang SMP+MTs yaitu sebesar 2,92%. Banyaknya ruang kelas yang rusak

berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah. Melihat kondisi yang demikian, selayaknya jika jenis sekolah SMP+MTs diprioritaskan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi terlebih dahulu dibandingkan jenis sekolah lainnya.

Dari segi sarana prasarana, persentase kondisi Ruang Kelas baik di SD sebesar 94,32% menurun menjadi 90,66% di SMP dan meningkat menjadi 91,32% di SM. Hal ini terjadi karena jumlah SD yang ada di provinsi Jawa Timur lebih banyak dibandingkan jumlah SMP maupun Sekolah Menengahnya sehingga persentase jumlah ruang kelas kondisi baik untuk jenjang SD berada di posisi paling banyak.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 98,81% dan terendah ada pada tingkat SM+MA sebesar 86,82%. Jumlah ruang olahraga terbesar ada pada tingkat SD+MI yaitu 94,31% dan terendah ada pada tingkat SM+MA sebesar 72,01%. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 92,86%.

Prasarana lainnya yaitu laboratorium, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan %Lab makin bagus, yaitu SLTP+MTs sebesar 88,38% dan SM+MA 93,82%. Besarnya %Lab di SLTP maupun SM dikarenakan hampir separuh SLTP memiliki laboratorium lebih dari 1 sedangkan ditingkat SM terutama sekolah negeri hampir memiliki lebih dari 2. Kondisi ini sejalan dengan lokasi SM yang berada di perkotaan atau ibukota kabupaten sehingga fasilitasnya lebih mudah diperoleh.

Dengan melihat indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SD. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka lulusan yang paling tinggi, dan angka putus

sekolah yang rendah, serta dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Murni yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan SLTP/MTs maupun dengan SM/MA.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Komponen yang terkait dengan proses pengelolaan pendidikan masih ada yang belum memahami arti pentingnya data dan informasi yang menyebabkan pendataan komponen pendidikan masih belum baik, sering terlambat dan tidak lengkap.
- Kualitas SDM pendataan pendidikan masih kurang karena sering diganti.
- Belum maksimalnya laporan-laporan dari Bidang dan UPT ke kepala Dinas atau Unit Pelaporan.
- Belum seluruh kabupaten/kota memiliki lembaga yang menyelenggarakan Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun sementara minat peserta didik untuk mengikuti Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun masih relatif rendah sehingga hasilnya pun belum dapat dinikmati oleh seluruh daerah.
- Masih adanya kesalahpahaman pada orang tua siswa bahwa dengan adanya Program BOS, seharusnya sekolah sudah tidak diperbolehkan lagi menarik biaya tambahan (sekolah gratis).
- Belum semua lembaga mengelola dana BOS secara transparan
- Sarana pendistribusian informasi yang kurang merata yang menyebabkan masyarakat umum kurang memahami program – program Dinas Pendidikan Provinsi.

Upaya pemecahan masalah

- Mensosialisasikan pemahaman yang terus menerus tentang arti pentingnya data dan informasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan

- Data yang dikirim ke Provinsi tepat waktu, valid dan dapat dipercaya. Diberi pemahaman tentang arti pentingnya data untuk berbagai perencanaan dan kebijakan pembangunan pendidikan.
- Petugas pendataan jangan sering diganti.
- Memberikan teguran kepada Bidang atau UPT supaya melaporkan tepat waktu dan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- Dalam rangka perluasan dan pemerataan akses untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi maka perlu pengembangan jumlah lembaga yang menyelenggarakan Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun agar minimal tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur secara merata.
- Diperlukan peningkatan pengelolaan lembaga penyelenggara Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun agar lebih diminati oleh calon peserta didik
- Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar pelaksanaan Program BOS dapat dipahami oleh seluruh komponen masyarakat
- Pengelolaan dana BOS harus mengacu Juknis yang sudah ditetapkan, bahwa pengelolaan dana BOS harus transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
- Penggunaan media sosial, web dinas lewat internet untuk keperluan sosialisasi yang intens.

8) Program Pendidikan Tinggi

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Program Pendidikan Tinggi sebesar Rp. 1.902.467.000,00 dengan realisasi Rp. 1.743.640.350,00 (91,65%), secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, telah dilaksanakan beberapa program pendukung seperti :

- Program Rintisan Wajib Belajar 15 Tahun dengan sasaran siswa lulusan SMA/SMK yang melanjutkan sekolah pada Poltek atau Community College.
- Bantuan sarana yang diberikan kepada Community College.
- Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Mutu PT di Jawa Timur dengan mengalokasikan bantuan untuk kegiatan kemahasiswaan, di antaranya Workshop Kewirausahaan mahasiswa, Pameran Karya Cipta Mahasiswa, Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi, dan Work Shop Pengembangan dan peningkatan mutu Poltek di Jawa Timur

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Data lembaga perguruan tinggi Swasta belum akurat dikarenakan kurangnya koordinasi antara Kopertis dengan Dinas Pendidikan
- Data lembaga Poltek/CC di Kab/Kota belum akurat.

Upaya pemecahan masalah

- Meningkatkan koordinasi dengan Kopertis wilayah VII Jatim.
- Meningkatkan koordinasi dengan Poltek/CC.

2. URUSAN KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat.

2.1. DINAS KESEHATAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan
- 2) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya, Balai Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang
- 3) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta keberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ke arah kemandirian
- 4) Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi dan Perbaikan Gizi Masyarakat
- 5) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan
- 6) Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan
- 7) Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
- 8) Meningkatnya Kualitas Air Bersih, Sanitasi Dasar, Higiene Sanitasi Makanan Minuman serta Kualitas Kesehatan Lingkungan
- 9) Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2014, Program Obat dan Perbekalan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran belanja

sebesar Rp. 7.907.640.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 3.178.767.804,00 atau sebesar 40,20%; hal ini salah satunya disebabkan karena kegiatan Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi sebesar Rp. 3.932.640.000,00 tidak bisa ter-realisasi karena disebabkan gagal tender serta persyaratan dalam penganggaran yang belum terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah mengirim telaahan kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Tabel 4.2.1.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran
Strategis Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	Target dan Capaian Program						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di Kabupaten/Kota	95	90	92	95	94	95	100	105.26 %
Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana dan KLB	90	87	80	90	90	90	92	102,22 %
Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan	60	40	30	50	35	70	35	58 %

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	Target dan Capaian Program						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
yang menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar								

Sumber: Data Kegiatan Seksi Farkalkes, 2014

Berdasarkan diatas, dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang belum memenuhi target adalah Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar. Pada Tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 60% dengan capaian 35%. Hal ini antara lain disebabkan oleh kualitas dan kuantitas SDM bidang farmasi, kompetensi tenaga farmasi, dukungan manajemen, kab kota tidak memiliki data based yang akurat sehingga sampai Tahun 2014 belum bisa memenuhi target.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan anggaran untuk penyediaan obat dan alkes habis pakai, dukungan sarana prasarana pengelolaan obat dan vaksin, biaya distribusi obat dan vaksin,
- Penempatan penanggung jawab pengelola obat di beberapa daerah tidak sesuai dengan kompetensi. Adanya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan belum ada pengganti yang sesuai
- Struktur organisasi pengelola obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kefarmasian di era otonomi daerah bervariasi bentuk dan keberadaannya antara lain: dalam

bentuk Bidang, Seksi atau UPTD dengan tupoksi yang tidak seragam.

- Perhatian terhadap pengelolaan obat di Puskesmas masih kurang meliputi penyimpanan yang belum optimal maupun kurangnya SDM.
- Kurangnya koordinasi antara petugas puskesmas dan instalasi farmasi kabupaten/kota menyebabkan kekosongan obat di puskesmas tidak terinformasi ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, sehingga puskesmas mengalami kekosongan obat meskipun dalam waktu yang singkat.
- Biaya operasional instalasi farmasi. Pengadaan obat dan vaksin masih mengandalkan dari dana DAK bidang kefarmasian.
- Kondisi mempengaruhi mutu pelayanan kefarmasian di strata pelayanan kesehatan tersebut ketersediaan tenaga farmasi di pelayanan kesehatan terbagi di Rumah Sakit dan Puskesmas. Jumlah dan kualitas tenaga apoteker di Rumah Sakit masih terbatas, sedangkan di Puskesmas hanya tersedia Asisten Apoteker sekitar 80% dari total jumlah Puskesmas yang ada
- Tenaga kesehatan lain belum sepenuhnya mendapat informasi tentang penggunaan obat rasional, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat secara swamedikasi

Upaya Pemecahan Masalah

Pemecahan permasalahan yang diupayakan pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Advokasi ke Pemerintah Daerah untuk komitmen dan dukungan alokasi anggaran penyediaan obat dan alkes habis pakai, dukungan sarana prasarana pengelolaan obat dan vaksin, serta biaya distribusi obat.

- Meningkatkan kemampuan petugas pengelola obat di Kab/Kota dengan melakukan pembinaan dan TOT Manajemen Obat secara berkelanjutan yang diharapkan akan dilanjutkan dengan pelatihan terhadap pengelolaan obat di Puskesmas.
- Meningkatkan koordinasi antara pengelola obat di Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas, dan Pengelola Program Kesehatan dengan membentuk tim perencanaan obat terpadu.
- Advokasi penambahan jumlah tenaga kefarmasian untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit.
- Meningkatkan lokasi pilot project pelayanan kefarmasian di beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit
- Meningkatkan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat rasional melalui metode CBIA dengan melibatkan tenaga kesehatan dari lintas program, kader kesehatan, dan stake holder terkait

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 5.693.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.665.806.802,00 atau 81,95% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Tabel 4.2.1.2

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	2012		2013		2014		CAPAIAN 2014 (%)
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	29.5	30.5	25.95	30	28.31	29.5	27,23	92.31%

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	2012		2013		2014		CAPAIAN 2014 (%)
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	80	81	97.43	80.5	97.39	80	93.52	116.9
Persentase Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap	95	94	95.71	94	97.06	95	97.42	102.54
Persentase Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes)	95	94	94.1	94	94.83	95	92,45	97,32
Persentase Kunjungan Bayi	90	87	94.1	88	94.83	90	95.43	106.03
Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	94	92	84.38	93	87.35	94	88,66	94.32
Persentase capaian Peserta KB Aktif	70	69	71.02	70	68.02	70	66,48	94,97

Sumber: Data Kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga, 2014

Dari tabel diatas terdapat 7 (Tujuh) indikator kinerja dengan 5 (Lima) indikator kinerja tercapai sedangkan 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai. Indikator kinerja yang belum mencapai adalah persentase kunjungan ibu hamil K4 dan persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (linakes).

Kunjungan ibu hamil K4 merupakan indikator yang terkait dengan kunjungan ibu hamil K1. Kunjungan K1 yang dilakukan setelah melewati usia kehamilan 3 bulan akan menyebabkan indikator K4 tidak tercapai. Masyarakat masih mempunyai budaya tabu untuk memeriksakan kehamilan semenjak awal.

Jumlah proyeksi sasaran program yang berubah-ubah juga merupakan faktor penghambat pencapaian target indikator kinerja. Perubahan target akan menyebabkan perencanaan

kegiatan dan kerja petugas mengalami perubahan. Indikator linakes merupakan salah satu indikator yang mengalami dampak dari perubahan proyeksi sasaran program. Penambahan sasaran program menyebabkan persentase menurun karena jumlah yang dilayani tetap sedangkan sasaran program secara perhitungan bertambah.

Tabel 4.2.1.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

IKU	TARGET 2014	Target dan Capaian Program UKM pada Seksi Yankesdas						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar	24	16	15.61	24	22.22	24	16.3	67.92
Persentase Puskesmas Rawat Inap yg ada menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS	24	16	12.7	24	12.7	24	17.5	72.92
Persentase Puskesmas PONED sesuai Standar	50	35	51	40	50	50	48	96.0
Persentase Pustu yang menjadi Pustu layani Gawat Darurat dan Observasi	10	8	7.76	10	7.7	10	8	80

IKU	TARGET 2014	Target dan Capaian Program UKM pada Seksi Yankesdas						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes sesuai Standar	78	64	48.67	78	55.79	78	55	70.51

Sumber: Data kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa diperlukan upaya yang lebih keras dalam mencapai indikator kinerja Program UKM pada Seksi Yankesdas, karena sebagian besar indikator belum bisa tercapai

Tabel 4.2.1.4
Target dan Realisasi Indikator Pendukung IKU Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

INDIKATOR KINERJA	Target dan Realisasi Kinerja Program UKM pada Seksi Yankesdas					
	2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Puskesmas mempunyai UGD 24 jam	40%	100%	50%	100%	>60	100%
Persentase Puskesmas terlayani mobil bengkel servis alat kesehatan	15%	40%	20%	10%	>25	10%
Persentase Unit transfusi darah (UTD) memenuhi standar mutu	15%	95%	20%	108%	>25	100%
Persentase Keluhan masyarakat miskin berobat gratis di puskesmas tertangani	75%	100%	80%	100%	>80	100%
Persentase Puskesmas di daerah tertinggal	30%	100%	40%	100%	50%	100%

INDIKATOR KINERJA	Target dan Realisasi Kinerja Program UKM pada Seksi Yankesdas					
	2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
dan terpencil melakukan pembinaan keluarga rawan						
Persentase Puskesmas Kab/Kota menerapkan sistem keuangan di Puskesmas berdasarkan kapitasi berbasis kinerja	15%	0%	20%	0%	>20	40%
Persentase Kab/Kota menerapkan standar pelayanan minimal berdasarkan Citizens Charter atau kontrak pelayanan	25%	0%	30	0%	>30	0%

Sumber: Data kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2014

Berdasarkan Tabel diatas, dari 4 (empat) indikator hanya 2 (dua) indikator yaitu Prosentase Puskesmas terlayani mobil bengkel servis alat kesehatan dan Prosentase Kab/Kota menerapkan standar pelayanan minimal berdasarkan *Citizens Charter* atau kontrak pelayanan yang belum mencapai target

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Banyaknya petugas yang memasuki masa pensiun. Sementara perekrutan pegawai baru terkendala dengan adanya moratorium dan ketiadaan formasi karena komposisi biaya pegawai telah melewati pagu yang diperbolehkan.
- Kualitas tenaga pengganti yang belum optimal. Banyaknya institusi pendidikan akan meningkatkan jumlah mahasiswa yang dididik. Namun jumlah mahasiswa tersebut tidak seimbang dengan jumlah sasaran untuk lahan praktek. Baik lahan praktek berupa institusi dan lahan praktek berupa jumlah ibu hamil

- Permasalahan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Yankesdas dalam upaya kegiatan mewujudkan Puskesmas Standar, Puskesmas Plus, Pustu Gadar dan Ponkesdes adalah :
- Terlambatnya MOU mengakibatkan honor/gaji dokter terlambat sehingga Dokter, dokter Sp.OG di beberapa Puskesmas tidak pasti datang, misalnya yang terjadi di Kabupaten Situbondo.
- Berpindahnya pasien Puskesmas ke layanan Klinik Swasta misalnya yang terjadi di Kabupaten Kediri
- Sosialisasi akreditasi Puskesmas belum merata dan Klasifikasi tingkat kemampuan pelayanan yang bervariasi misalnya yang terjadi pada Puskesmas di Blitar
- Kualitas dan kuantitas SDM, sarana, prasarana tiap Kab/Kota berbeda. Misalnya Ponkesdes tidak bermasalah dalam hal SDM dan alatnya, tetapi banyak gedung Ponkesdes dengan status sewa.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya Pemecahan Permasalahan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga adalah

- Mencari alternatif penggantian petugas yang telah memasuki masa pensiun dengan melakukan perekrutan pegawai baru.
- Peningkatan kualitas lulusan tenaga kesehatan melalui peningkatan standar lulusan, penataan lahan praktek dan penataan perijinan pendirian dan operasional institusi pendidikan kesehatan

Upaya pemecahan masalah pada Program UKM yang dilaksanakan oleh Seksi Yankesdas yang kemungkinan bisa diambil adalah sebagai berikut:

- MOU dipersiapkan dengan baik, sehingga range waktu tepat di bulan Desember akhir terlaksana, sehingga Januari dana bisa diberikan pada para nakes.
- Meningkatkan faktor-faktor yang mengakibatkan loyalitas pasien misalnya dengan meningkatkan kualitas layanan
- Meningkatkan Klasifikasi Puskesmas Standar Puskesmas RI Plus, Standar, dan Pustu Gadar dan Observasi menjadi sesuai standar.
- Sosialisasi Akreditasi Puskesmas kepada seluruh SDM di Puskesmas.
- Melatih dan menyediakan Sumber Daya Manusia, sarana, prasarana di Puskesmas yang sesuai dengan standar Puskesmas.

3) Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.130.910.272,00 atau 82.62%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana Tabel di bawah :

Tabel 4.2.1.5
Target dan Capaian Indikator Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014 (%)	Target , Realisasi dan Capaian (2014)						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih	70	60	46,1	65	47,5	70	47.8	68.71

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014 (%)	Target , Realisasi dan Capaian (2014)						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
dan Sehat (PHBS)								
Persentase Posyandu Ber-Strata PURI (Purnama Mandiri)	52	48	60,3	50	62,4	52	66.12	127.15
Persentase Desa Siaga Aktif	75	65	89,4	70	95,5	75	95.7	127.33

Sumber: Data Kegiatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Program Promosi Kesehatan untuk Persentase Posyandu Ber-Strata PURI (Purnama Mandiri) tercapai sebesar 125.15%, dan untuk indikator Persentase Desa Siaga Aktif tercapai sebesar 127.33%. Capaian indikator Kinerja Utama tersebut diatas sudah sangat bagus, dan harus dipertahankan pada periode yang akan datang. Sedangkan capaian indikator Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sebesar 68.71%. Presentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)" belum tercapai karena Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum menjadi kebiasaan di masyarakat, diantaranya adalah belum semua masyarakat mematuhi perilaku tidak merokok dalam rumah, belum semua busui memberikan ASI Eksklusif serta optimalnya jaringan kemitraan PHBS dengan berbagai pihak serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pembinaan PHBS Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu peningkatan upaya dalam rangka meningkatkan indikator Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ditemukan permasalahan diantaranya sebagai berikut:

- Pengembangan Rumah Tangga Sehat dan media promosi dan informasi
 - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum menjadi kebiasaan di masyarakat, seperti perilaku tidak merokok dalam rumah, memberi ASI Eksklusif.
 - Belum optimalnya jaringan kemitraan PHBS dengan berbagai pihak.
 - Masih lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pembinaan PHBS.
 - Keterbatasan tenaga di Seksi Promosi Kesehatan khususnya tenaga media promosi.
- Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
 - Belum optimalnya pembinaan Posyandu secara terpadu oleh Tim Pokjanal Posyandu, karena sektor-sektor yang tergabung dalam tim pokjanal Posyandu tersebut belum melaksanakan tugas pembinaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
 - Belum adanya pembinaan Poskestren terpadu yang melibatkan Stakeholder baik pada level Provinsi dan Kab/Kota
 - Terbatasnya anggaran untuk UKBM sehingga Poskestren belum menjadi prioritas.
 - Komitmen kabupaten/ kota yang untuk membina Poskestren yang telah terbentuk masih lemah.

- Saka Bakti Husada sebagai salah satu wahana dalam menyuarkan program promosi kesehatan belum menjadi prioritas di Kabupaten/Kota
- Profil Promosi Kesehatan lambat disusun karena collecting data yang tidak secara serentak dilaksanakan di tingkat Kabupaten/ Kota begitupun pemahaman DO yang tidak seragam menyebabkan dualisme dalam collecting data profil Promosi Kesehatan
- Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga
 - Pembinaan Posyandu secara terpadu oleh Tim Pokjanal Posyandu belum optimal
 - Peran dan fungsi Tim Pokjanal Posyandu dan Tim Pokjanal Desa Siaga Aktif belum optimal.
 - Pengembangan kualitas Desa Siaga aktif kurang optimal karena kurang maksimalnya dukungan lintas program dan lintas sektor
 - Kurangnya frekuensi Promosi Desa Siaga Aktif di media massa.

Upaya Pemecahan Permasalahan

- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
 - Peningkatan peran serta Lintas Program, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan LSM dalam Pengembangan PHBS.
 - Promosi dan Edukasi PHBS melalui Media Massa (Koran, TV dan Radio) kepada Masyarakat
 - Sosialisasi dan Koordinasi PHBS kepada Kelompok Potensial seperti SKPD Pemprov, Muslimat, Fatayat, Perwanas dan LSM.
 - Pembentukan Desa Percontohan PHBS
 - Melakukan MOU Pembinaan PHBS di Masyarakat dengan ormas/ organisasi profesi : TP PKK, PW Muslimat, PW

Fatayat, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Kwarda Pramuka, PPKMI dan PMI

- Koordinasi dengan seksi terkait dilakukan secara rutin untuk memperoleh bahan yang akan disosialisasikan.
 - Penambahan tenaga promosi kesehatan khususnya tenaga media promosi.
- Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat(UKBM).
- Lomba Poskestren terbaik.
 - Pembentukan Poskestren baru.
 - Meningkatkan koordinasi baik Lintas Program maupun Lintas Sektor dalam pembinaan program Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
 - Kab./ Kota diharapkan melalui Puskesmas dapat membina Poskestren yang sudah terbentuk (terutama yang tidak aktif).
 - Meningkatkan sosialisasi dan advokasi Saka Bakti Husada yang lebih intensif.
 - Meningkatkan upaya pembinaan terhadap Pangkalan Satuan Karya Bakti Husada oleh Pimpinan Saka Bakti Husada dengan memberikan motivasi dan reward melalui penilaian / seleksi terhadap pangkalan Saka Bakti Husada Berprestasi secara berkesinambungan.
 - Sosialisasi dan Fasilitasi pengumpulan data terutama Definisi Operasional Profil pada kesempatan rapat/ pertemuan maupun saat turun langsung ke kabupaten./ kota.
- Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga
- Meningkatkan advokasi dan koordinasi kepada lintas sector terkait untuk memperjelas tupoksi masing-masing
 - Mempersiapkan pembentukan Sektap Desa/Kelurahan Siaga Aktif di Tingkat Provinsi

- Promosi Desa Siaga aktif di media massa lebih ditingkatkan
- Pengembangan Desa Siaga Aktif Percontohan dengan membina desa siaga Aktif yang Madya untuk ditingkatkan menjadi Purnama

4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2014, Program Perbaikan Gizi Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.926.959.036,00 atau sebesar 87.59%; pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Tabel 4.2.1.6

**Target dan Capaian Indikator Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran
Strategis Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	Target dan Capaian Program UKM pada Seksi Yankesdas						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Balita Dipantau Pertumbuhannya	85	75	73.4	80	74.7	85	74.3	87.4
Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2	3	2.3	2,5	2.3	2.2	2	100
Persentase Balita dengan Gizi Kurang	14,870	15,10	12.6	15	12.1	14,80	12.3	83.1

Sumber: Data Program Perbaikan Gizi Masyarakat, 2014

Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita serta usia produktif.

Tabel 4.2.1.7

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2012-2014

NO	INDIKATOR	2012		2013		2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisas	Target	Realisasi
1	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	2012		2013		2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	70	66,1	75	70,3	80	72,6
3	Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium	80	-	85	86,9	90	88,3
4	Persentase Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	80	90,3	83	89,7	85	92,2
5	Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet	90	71,2	93	81,6	95	74,2
6	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	100	100	100	100	100	100
7	Persentase balita ditimbang berat badannya	75	73,7	80	72,0	85	74,3
8	Persentase Penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana	100	100	100	100	100	100

Sumber : LB3 Gizi Tahun 2014

Berdasarkan data Program Gizi Masyarakat sampai dengan bulan November 2014 sebanyak 5448 kasus Balita gizi buruk (L= 2593, P=2855) sudah mendapat perawatan 100 % dan tertangani semua. Berdasarkan PSG (pemantauan status gizi) tahun 2014 persentase status balita gizi buruk sebanyak 2% ini lebih rendah dari target RAD-PG tahun 2014 sebesar 2,1%. Sedangkan persentase status Balita gizi kurang sebesar 10,3% bila dibandingkan dengan target RAD-PG tahun 2014 sebesar 8,4% masih belum mencapai target dan untuk prevalensi Balita gizi kurang sebesar 12,3%. Penanggulangan kasus balita gizi buruk dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu bagi balita gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda komplikasi medis dilakukan penanganan rawat inap di Puskesmas Perawatan, *Theurapeutic Feeding Centre (TFC)* maupun Rumah Sakit. Sedangkan bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi dilakukan melalui rawat jalan dengan pembinaan oleh petugas kesehatan dan kader Posyandu.

Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif tahun 2014 sebesar 72,6% dari jumlah bayi diperiksa sebesar 463.872 dan yang mendapat ASI Eksklusif sebanyak 336.819 bayi, meskipun belum mencapai target nasional sebesar 80 % tetapi bila dibanding tahun 2013 persentase cakupan meningkat sebanyak 2,3%, hal ini di dukung dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ASI Eksklusif serta semakin tanggapnya tenaga pelaksana gizi di lapangan.

Upaya penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dilakukan melalui pemanfaatan garam beriodium. Hasil survey rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium di Jawa Timur tahun 2014 sebesar 86,9 %, jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 90 % berarti belum mencapai target.

Cakupan Balita 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A di Jawa Timur tahun 2014 adalah sebesar 92,2% dari sasaran Balita 3.013.119, yang mendapatkan vitamin A sebanyak 2.776.791. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 ada kenaikan sebesar 2,5% dan bila di bandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 85% maka hasil cakupan vitamin A jawa timur sudah melebihi target.

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Fe (feros /tambah darah) 90 tablet di Jawa Timur tahun 2014 adalah sebesar 74,2 % dari jumlah ibu hamil sebanyak 675.789 orang, yang mendapat Fe3 sebesar 501.616 orang. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 95% berarti belum mencapai target, ini disebabkan antara lain ;

- a) Adanya under reporting, sebab cakupan K1 yang mensyaratkan harus sudah diberi tablet Fe1 dan cakupan K4 yang mensyaratkan harus sudah diberi Fe3.
- b) Belum optimalnya koordinasi dengan lintas program terkait, serta belum terlaporkannya dengan baik cakupan pemberian

TTD pada ibu hamil, baik di BPS (balai pengobatan swasta) /klinik bersalin lainnya.

- c) Kurangnya peran lintas sektoral dan lintas program dalam mendukung program penanggulangan anemia.
- d) Tablet tambah darah yang diberikan secara program kurang menarik, khususnya bagi ibu hamil, sehingga banyak yang tidak mau mengkonsumsinya.

Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Jawa Timur pada tahun 2014 adalah sebesar 74,3% dari jumlah Balita sebesar 3.013.119 dan yang ditimbang sebanyak 2.239.798 Balita. Cakupan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 85 %. Rendahnya cakupan D/S tersebut antara lain berkaitan dengan ;

- a) Orang tua Balita kurang sadar menimbangkan Balitanya ke Posyandu/ pelayanan kesehatan terdekat
- b) Data sasaran S (jumlah bayi/ Balita yang ada di wilayah tertentu) menggunakan data proyeksi yang terlalu tinggi
- c) Minimnya dana operasional dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menggerakkan kegiatan Posyandu
- d) Tingkat pengetahuan kader dan kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling masih kurang karena banyaknya kader baru (regenerasi)
- e) Pembinaan kader yang kurang sehingga perlu diadakan refreasing kader/ revitalisasi Posyandu.

Penyediaan *bufferstock* MP-ASI untuk daerah bencana setiap tahunnya selalu disediakan untuk antisipasi situasi darurat akibat bencana, KLB Gizi dan situasi sulit lainnya. Dana *bufferstock* MP-ASI ini bersumber dari Direktorat Bina Gizi Kemenkes R.I dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga cakupan/ capaian kinerjanya pasti 100 %, karena tenaga gizi di wilayah sasaran bencana, tinggal melaksanakan apabila ada bencana

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Peran dan kerjasama petugas lintas program dan lintas sektor yang tergabung dalam Tim Pangan dan Gizi masih rendah, sehingga pembahasan tentang situasi pangan dan gizi untuk penanganan masalah gizi sering terhambat.
- Validasi data gizi sering terlambat dari Kab/ Kota ke Provinsi (seksi gizi) sehingga capaian indikator kinerja gizi berdasarkan data LB3 gizi kurang maksimal.
- Belum semua tenaga kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit serta sarana pelayanan kesehatan yang lain memahami Kode Etik Pemasaran Susu FormulaPermasalahan bisa dihubungkan dengan pencapaian indikator kinerja program

Upaya Pemecahan Masalah

- Melakukan pendekatan secara khusus terhadap lintas program dan lintas sektor untuk memperlancar jalannya kerjasama serta mendorong agar masing-masing sektor mengadakan kegiatan secara bersama-sama.
- Meningkatkan upaya perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan antara lain ;
 - a) Setelah mengevaluasi dan menganalisis data LB3 gizi yang masuk, sesering mungkin meminta/ menagih data LB3 Gizi dari Kab/ Kota yang belum masuk.
 - b) Pembinaan petugas pengelola data
 - c) Pertemuan koordinasi dan validasi data lintas program baik di tingkat Kab/ Kota atau tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- Perlunya peraturan yang tegas beserta sanksinya terhadap produsen susu yang melanggar peraturan

- Menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, serta organisasi profesi terkait untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif
- Melakukan pendekatan secara khusus terhadap lintas program dan lintas sektor untuk memperlancar jalannya kerjasama serta mendorong agar masing-masing sektor mengadakan kegiatan secara bersama-sama. Harus relevan dengan permasalahan yang ada

5) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2014, Program Upaya Kesehatan Perorangan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 1.700.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.295.442.803,00 atau sebesar 76.2 % pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Tabel 4.2.1.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Program Upaya Kesehatan Perorangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T 2014	Target dan Capaian (%) Program UKP pada Seksi Kesjuksus						CAPAIA N 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Targ et	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targ et	Realisasi	
Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar	80	70	80	75	85	80	85.19	106.49
Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang terakreditasi 5 pelayanan dasar	70	65	95	70	95	70	90.63	129.47

Sumber: Data Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan, 2014

Berdasarkan tabel diatas, IKU untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan sudah dapat tercapai.

Adapun perincian jumlah RS di Jawa Timur yang sudah terakreditasi yaitu sebagai berikut:

- a) RSUD Pemerintah berjumlah 54 RS → 50 RS terakreditasi (92,59%)
- b) RSK Pemerintah berjumlah 10 RS → 8 RS terakreditasi (80,00%)
- c) RS TNI/Polri berjumlah 28 RS → 24 RS terakreditasi (85,71%)
- d) RS BUMN berjumlah 15 RS → 12 RS terakreditasi (80,00%)
- e) RSUD Swasta berjumlah 152 RS → 110 RS terakreditasi (72,37%)
- f) RSK Swasta berjumlah 96 RS → 33 RS terakreditasi (34,38%)

c) Permasalahan Dan Upaya Pemecahan

Permasalahan dan Upaya yang dilakukan terkait Program Upaya Kesehatan Perorangan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan UU RS No. 44 Tahun 2009 yang dijelaskan dalam Permenkes RI Nomor 56/MENKES/PER/2014 tentang Perijinan dan Klasifikasi RS disebutkan bahwa Peran Dinas Kesehatan Provinsi adalah memberikan Rekomendasi Perijinan dan Penetapan Kelas untuk RS kelas B sedangkan rekomendasi perijinan dan klasifikasi RS kelas C dan D diserahkan ke Dinas Kesehatan Kab/ Kota. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengadvokasi kepada Kementerian Kesehatan RI untuk memprioritaskan penetapan kelas Rumah Sakit di Jawa Timur mengingat jumlah RS di Jawa Timur termasuk terbanyak di Indonesia.

- Dengan standar akreditasi baru yang diberlakukan mulai tahun 2012, maka rumah sakit harus menata ulang standarnya karena pada standar akreditasi baru ada 4 (empat) kelompok standar yaitu : Kelompok standar berfokus pada pasien, Kelompok standar manajemen rumah sakit, Kelompok sasaran keselamatan pasien, Kelompok sasaran menuju Milineum Development Goals.
- Sedangkan yang menjadi permasalahan RS Pemerintah belum melaksanakan PONEK sekaligus masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi antara lain karena keterbatasan SDM Spesialistik khususnya dokter spesialis Obgyn dan dokter spesialis anak yang *full timer*. Untuk itu pihak Dinas Kesehatan hendaknya ikut mengadvokasi kepada Kementerian Kesehatan RI dan mengusahakan pelaksanaan pemerataan khususnya tenaga spesialis Obgyn dan spesialis anak ke daerah- daerah Kab/ Kota.
- Adapun permasalahan terkait dengan sistem Pelaporan RS yang belum berjalan optimal antara lain karena belum semua RS mengisi laporan tahunan dengan format yang diupload dalam software data dan analisa laporan RS Dinkes Provisi Jawa Timur, sehingga tidak terekapitulasi dalam software, masih diemukannya data yang tidak sinkron di RS dengan tahun yang sama antara data SIRS online, Laporan Tahunan RS, Profil kesehatan serta masih belum semua Dinas Kesehatan Kab/Kota menggunakan data/pelaporan RS sebagai bahan perencanaan atau evaluasi terkait pelayanan di RS. Untuk itu dirasa perlu update format data/ pelaporan di masing- masing RS

6) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2014, Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran belanja

sebesar Rp. 44.422.876.273,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 40.888.830.260.00 atau sebesar 92.04% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Tabel 4.2.1.9
Target dan Capaian Indikator Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran
Strategis Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan
Kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	Target dan Capaian Program						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penduduk yang Telah Terjamin Pemeliharaan Kesehatan dengan Sisitem Jaminan Kesehatan	70	55	49.84	60	52.51	70	50,84%	72.63

Sumber: Data Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pengembangan SIK sudah berhasil memenuhi target sebesar 100 % pada tahun 2014. Indikator “persentase pengelolaan SIK sesuai standar” adalah Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu system pelaporan satu pintu sehingga data yang didapatkan valid.

Manfaatnya terhadap program kesehatan dengan diperolehnya data yang valid adalah penilaian keberhasilan terhadap pelaksanaan program-program kesehatan bersifat

obyektif dan terukur karena berdasarkan data yang valid serta untuk membuat perencanaan yang baik sesuai penilaian yang berbasis data valid, sehingga kebijakan yang diambil pimpinan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 4.2.1.9 untuk Tahun 2014, persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan mencapai 50.84%. Hal ini belum memenuhi target, dimana sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pada Tahun 2014 diharapkan 70% penduduk Jawa Timur telah terjamin pemeliharaan kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan untuk kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Pra Upaya lebih dikenal dengan nama Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program Jamkesda dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program Jamkesda bertujuan untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran program Jamkesda pada tahun 2014 berkembang meliputi:

- Masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesda yang belum masuk kepesertaan PBI Program JKN.
- Penderita/mantan penderita kusta yang mendapatkan rekomendasi direktur RS Kusta milik Provinsi dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.
- Seniman yang ditetapkan oleh Dewan Kesenian Jawa Timur
Seniman yang memiliki kartu Jamkesda dan peserta

tambahan yang belum memiliki kartu Jamkesda tidak termasuk keluarganya, dijamin oleh Provinsi Jawa Timur.

- Penghuni Panti (milik Provinsi Jawa Timur).
- Gelandangan dan anak terlantar.
- Penghuni Lapas/Rutan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Provinsi dan UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur.
- Penderita Kasus Khusus seperti : Hemofilia, Thalassemia, Kelainan Kongenital dan Gagal Ginjal

Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu, yang tercover dalam program Jamkesda pada tahun 2013 dan 2014 berkurang dari tahun 2012.

Pada Tahun 2013 masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercover Jamkesda sebesar 707.305 jiwa; sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 706.249. Hal ini disebabkan adanya peserta Jamkesda yang masuk ke dalam program Jamkesmas/JKN. Selain itu untuk Kab. Pacitan pada Tahun 2014 mengelola sendiri peserta Jamkesda Kab. Pacitan dengan mendaftarkannya ke BPJS Kesehatan.

Tabel 4.2.1.10
Jumlah Kunjungan dan Kasus Pasien Jamkesda Yang Berobat Ke PPK Yang Ditetapkan

Uraian	Satuan	Realisasi Program Jamkesda				
		2010	2011	2012	2013	2014
Rawat Jalan Tingkat Lanjutan	Kunjungan	122.966	131.928	130.056	90.779	59.618
Rawat Inap Tingkat Lanjutan	Kasus	20.981	23.729	20.486	8.029	5.869

Capaian kinerja program Jamkesda dapat dilihat dari pemanfaatan dana pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercover dalam program Jamkesda, baik pelayanan kesehatan untuk rawat jalan maupun rawat inap.

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa kunjungan peserta Jamkesda dari tahun 2010 – 2011 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada 2009, Jawa Timur baru pada persiapan pelaksanaan Jamkesda, sehingga belum ada kunjungan dari pasien Jamkesda. Program Jamkesda dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2010.

Berdasarkan Tabel 4.2.1.10. terdapat penurunan pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada Tahun 2012 dan Tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 440/14771/031/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna SKTM/SKM/SPM, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sehingga yang tercover dalam pembiayaan program Jamkesda, hanyalah pasien yang memiliki kartu Jamkesda. SE edaran ini efektif berlaku per 1 September 2012. Pemberlakuan SE Gubernur tersebut berdampak pada penurunan jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan program Jamkesda.

Pada tahun 2013 juga terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan program Jamkesda sebesar 30,2% untuk rawat jalan, dan 60,81% untuk rawat inap. Hal ini dikarenakan jumlah sasaran program Jamkesda yang menurun sebesar 43,76%.

Setelah berlangsung pelaksanaan program JKN sejak awal tahun 2014, pemanfaatan pelayanan kesehatan program Jamkesda menurun lagi sebesar 34,33% untuk Rawat Jalan dan 26,9% untuk Rawat Inap.

Tabel 4.2.1.11
Perkembangan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014

NO	KEPESERTAAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jamkesmas/ PBI	10.710.051	10.710.051	10.710.051	12.586.401	14.001.871	14.001.870
2	Jamkesda	1.257.572	1.257.572	1.257.572	1.257.572	707.305	706.249
3	Askes PNS	2.950.395	2.950.395	3.042.829	2.176.478	2.163.139	1.343.429
4	Jamsostek	539.047	539.047	698.482	822.121	922.369	-
5	TNI/POLRI	60.207	60.207	60.427	62.333	243.389	376.974
6	Asuransi Komersial	1.635.763	1.635.763	1.572.112	2.083.939	2.083.939	-
7	Badan Usaha	-	-	-	-	-	1.285.828
8	Peserta Mandiri	-	-	-	-	-	733.509
9	Pejabat Negara/Peg. Pmr Non PNS	-	-	-	-	-	4.814
10	Bukan Pekerja	-	-	-	-	-	822.327
11	Jamkesda Integrasi JKN	-	-	-	-	-	339.605
Jumlah Total Penduduk		37.236.149	37.432.020	37.476.011	38.026.550	38.318.791	38.581.964
Pddk tercover Jamkes		17.098.163	17.098.163	17.281.046	18.988.844	20.122.012	19.614.606
% Pddk tercover Jamkes		45,92%	45,68%	46,11%	49,94%	52,51%	50,84%
Penduduk belum tercover Jamkes		20.137.986	20.333.857	20.194.965	19.037.706	18.196.779	18.967.358
% Penduduk belum tercover Jamkes		54,08%	54,32%	53,89%	50,06%	47,49%	49,16%

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Jatim Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas apabila dibandingkan dengan target pencapaian sesuai rencana strategis Tahun 2009–2014, maka kepesertaan Jaminan Kesehatan untuk penduduk Jawa Timur sampai dengan tahun 2014 belum memenuhi target. Pada Renstra dinyatakan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan diharapkan pada tahun 2011 sebesar 50%, Tahun 2012 sebesar 55%, pada Tahun 2013 sebesar 60% dan pada Tahun 2014 diharapkan minimal 70% penduduk Jawa Timur sudah menjadi peserta jaminan kesehatan. Sampai dengan Tahun 2014 baru 50,84% dari penduduk Jawa Timur yang menjadi peserta jaminan kesehatan. Hal ini salah satunya disebabkan karena tidak diperolehnya data kepesertaan dari asuransi komersial dalam jumlah yang signifikan.

Beberapa hal yang menjadi faktor belum tercapainya target tersebut adalah :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan jaminan kesehatan bagi diri dan keluarganya.
- 2) Perusahaan asuransi kesehatan atau badan pengelola jaminan kesehatan terutama yang bersifat komersial masih belum terbuka dengan data kepesertaan anggotanya.
- 3) Sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum merata ke seluruh lapisan masyarakat.

c) Permasalahan dan Solusi

pelayanan kesehatan yang dihadapi peserta JKN membuat sebagian peserta kecewa dan masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maju mundur untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dalam BPJS Kesehatan.

7) Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2014, Program Sumber Daya Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar

Rp. 2.350.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.941.673.623,00 atau sebesar 82,62% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program

Tabel 4.2.1.12
Capaian Indikator Kinerja Utama Program Sumber Daya Kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	Target dan Capaian Program Sumbre Daya Kesehatan						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikat	95	80	100	90	100	95	100	105
Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat	60	40	100	50	100	60	100	100
Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Ber-izin	100	69	97	80	69	100	93	93
Ratio Dokter per 100.000 Penduduk	40	40	15	40	16	40	16	40

Sumber: Data kegiatan Seksi P3SDMKes, 2014

Berdasarkan tabel diatas, bahwa dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Program Sumber Daya Kesehatan, pada Tahun 2014 3 (tiga) indikator sudah berhasil dicapai. Tiga Indikator tersebut adalah Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikat, Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat, dan Persentase

Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa dengan capaian diatas 100%. Sedangkan untuk indikator Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Ber-izin, pada Tahun 2014 capaiannya adalah 93%.

Untuk indikator Ratio Dokter per 100.000 Penduduk, pada Tahun 2014 baru tercapai 16 dokter per 100.000 penduduk, dimana angka tersebut jauh lebih kecil dari target seharusnya yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk. $10.400.000/pddk \times 10.000$

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Sumber Daya Kesehatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dasar hukum pengangkatan Perawat Ponkesdes masih belum jelas, serta gaji perawat Ponkesdes yang dibawah UMR
- Terdapat 16 (enam belas) RS tipe C yang belum mempunyai standart 4 Spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang
- Ditribusi/penempatan dokter *Interenship* belum terdistribusi secara merata ke Puskesmas yang membutuhkan
- Terdapat perubahan dalam satuan penganggaran keuangan (DPA)

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah:

- Advocacy kepada Kab/kota untuk peningkatan kapasitas SDM di Kab/Kota disertai dukungan anggaran
- Memperkuat peran Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dalam menyaring tenaga kesehatan yang profesional; dengan melaksanakan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan sebelum terjun melayani masyarakat, agar dapat bekerja lebih professional dan kompeten

- Pengiriman peserta PPDS BK yang dari Rumah Sakit klas C yang belum mempunyai Spesialis 4 dasar dan 3 penunjang

8) Program Lingkungan Sehat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.823.158.741,00 atau 91.16% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Lingkungan Sehat sebagaimana berikut:

Tabel 4.2.1.13

Target dan Capaian Indikator Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis Program Penyehatan Lingkungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	Target dan Capaian (%) Program Penyehatan Lingkungan						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Akses Sanitasi Dasar yang Memenuhi Standar	70	68	68.80	69	71.12	70	77,85	111.21
Persentase Akses terhadap kualitas Air Bersih yang memenuhi standar	75	72	70.50	74	80.60	75	81	108

Sumber: Data kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Utama Program Penyehatan Lingkungan adalah persentase akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat sanitasi dan persentase akses terhadap kualitas air bersih yang memenuhi standar. Untuk Tahun 2014, persentase akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat sanitasi mencapai 77,85% atau sebanyak 8.333.464 Kepala Keluarga (KK)

dari target KK yang ada yaitu 10.704.514 KK. Pencapaian ini melebihi target KK 70% atau targetnya adalah sebanyak 7.493.159 KK yang mengakses sanitasi dasar yang memenuhi syarat sanitasi jauh lebih tinggi dibanding targetnya yaitu sebesar 70% = 7.493.159 KK.

Sedangkan indikator persentase akses terhadap kualitas air bersih yang memenuhi syarat sanitasi untuk Tahun 2014 mencapai 81% atau sebanyak 8.670.655 KK yang mengakses air bersih yang berkualitas dan memenuhi syarat sanitasi. Hal ini dapat memenuhi target yaitu sebesar 75% atau 8.028.385 KK menjadi target agar dapat mengakses kualitas air bersih yang memenuhi syarat sanitasi pada Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.1.14
Target dan Realisasi Kinerja Program Penyehatan Lingkungan

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Program					
	2012		2013		2014	
	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Jamban Sehat	56	68.8	58	71.12	60	77.85
Akses Air Bersih Sehat	59	70.5	62	80.6	65	81
Tempat Pengelolaan Makanan Sehat	75	76.3	76	77	77	77.4
Tempat-Tempat Umum Sehat	72	73.26	73	74.23	74	75.06
Pengelolaan limbah M. Syarat	40	61	50	70	65	71

Sumber: Data kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Tahun 2014

Target dan realiasi kinerja diatas, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan (1) Pengembangan Sarana Sapl Melalui *Participatory*, (2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, (3) Penyehatan Lingkungan dan (4) Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat.

Pengembangan Sarana Sapl Melalui *Participatory* bertujuan untuk meningkatkan akses jamban sehat pada masyarakat di Jawa Timur dan menambah jumlah Desa dan Kecamatan bebas ODF (*open defecation free*/bebas buang tinja disembarang tempat); dengan sasaran Desa/Kecamatan yang belum bebas ODF dan Komunitas masyarakat yg masih belum bebas ODF. Dari 7.753 Desa yang ada di Jatim, sebanyak 4.410 Desa yang STBM dan 2.106 Desa yang bebas ODF dan dari 661 Kecamatan, ada 64 Kecamatan yang sudah bebas ODF. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL melalui Partisipatori diantaranya melalui peningkatan akses jamban sehat (STBM Pilar -1), monitoring dan evaluasi peningkatan akses jamban (STBM pilar-1) dan pemicuan di sekolah.

Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bertujuan secara umum untuk meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat dan secara khusus mempunyai tujuan terlaksananya pengawasan sarana air minum (Inspeksi Sanitasi), terlaksana pengawasan kualitas minum (DAM, PDAM dan Non PP) dengan uji petik pemeriksaan secara laboratorium untuk parameter mikrobiologi, terlaksana pertemuan Jejaring sector terkait, Peningkatan Pengetahuan Pengawasan Kualitas Air Minum dan Pertemuan Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT). Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar dengan sasaran akses air minum yang berkualitas, kualitas air minum memenuhi syarat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum tingkat rumah tangga. Berdasarkan Tabel 4.2.1.14, Akses Air Bersih Sehat semakin tahun semakin meningkat dan pada tahun 2014 sudah bisa memenuhi target yaitu sudah 81% atau sebesar 8.670.655 KK. Pencapaian ini dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 75% atau sejumlah 8.028.385 KK.

Kegiatan Penyehatan Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan jumlah Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) laik sehat, meningkatnya jumlah rumah sehat dan meningkatkan jumlah Kab./Kota yang mengadopsi pendekatan program Kab./Kota Sehat; dengan sasaran TTU Laik Sehat, TPM Laik Sehat, Rumah memenuhi syarat kesehatan dan Kab./Kota mengadopsi program Kab./Kota Sehat. Berdasarkan Tabel 4.2.1.14 diketahui bahwa kegiatan penyehatan lingkungan sudah dapat mencapai target yang ditetapkan dengan realiasi sebesar 77.4% untuk Tempat pengelolaan makanan sehat mencapai 77,54 % dari 47.795 TPM yang ada di Jawa Timur. Sedangkan untuk tempat-tempat umum sehat mencapai 75,06 % dari 2.458 TTU yang ada. Kegiatan Penyehatan Lingkungan juga melakukan upaya peningkatan *hygiene* sanitasi TTU pada 5 Kabupaten, *Food security* berbasis masyarakat dengan dan Industri Rumah Tangga Peningkatan sanitasi perumahan dengan pendekatan klinik sanitasi pada 7 Kabupaten/Kota, Peningkatan sanitasi perumahan pada keluarga risiko tinggi penyakit berbasis lingkungan di 10 Kabupaten, Peningkatan Sanitasi Kota Sehat pada 26 Kab./Kota, Terbinanya 26 Kab./Kota yang mengadopsi Kab./Kota Sehat. Kabupaten/Kota sehat adalah program unggulan dalam agenda dua tahunan di Bidang Kesehatan. Kabupaten/Kota sehat mengakomodasi dan mengkoordinasikan berbagai program di tingkat Kabupaten dan Kota (dengan peran aktif masyarakat), sehingga terjadi sinkonisasi dan mempunyai daya ungkit besar terhadap kriteria sehat pada segala sektor dan bidang.

Sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Upaya Pengamanan Limbah Cair dan Padat bertujuan untuk meningkatkan Kab/Kota melakukan pengelolaan limbah cair dan padat serta melakukan pengawasan terhadap keracunan pestisida; dengan sasaran Kab/Kota melakukan program pengelolaan limbah cair dan padat dan Kab/Kota melakukan

pengawasan terhadap keracunan pestisida. Peningkatan Upaya Pengamanan Limbah Cair dan Padat berupaya melakukan Peningkatan pengelolaan limbah padat (sampah) rumah tangga pada 10 Kabupaten/Kota, Peningkatan Pengetahuan SDM (petugas laboratorium) tentang Pemantauan pajanan pestisida pada penjamah pestisida. Pemantauan dampak kualitas lingkungan dan kualitas lingkungan udara pada 10 Kab/Kota

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Permasalahan yang ditemui pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Sarana Sapl Melalui *Participatory*
 - Belum semua Kepala Daerah mengeluarkan Kebijakan tentang STBM.
 - Dukungan anggaran dari Pemkab/Pemkot untuk STBM sangat terbatas.
 - Efektifitas pemicuan belum maksimal.
 - Keterlibatan peran swasta masih rendah khususnya dalam pemasaran sanitasi
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
 - Program Kesehatan Lingkungan, dituntut untuk mendukung pencapaian Goals 7 MDGs. tetapi dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Kota untuk program Penyehatan Lingkungan sangat kurang , bahkan ada beberapa Kabupaten dananya tidak ada (Nol).
 - Kualitas air minum perpipaan (PDAM) masih rendah berdasarkan hasil uji petik pemeriksaaan air PDAM th 2014 dari 670 sampel yang memenuhi syarat baru 72 % sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010 yang mensyaratkan bakteri e-coli = 0, air DAM dari 302 sampel yang memenuhi syarat 77,13 %. Sedangkan target yang harus dicapai tahun 2015 adalah 90 %

- Komitmen bahwa semua PDAM Kabupaten/Kota menjadi air minum masih sulit untuk diwujudkan karena membutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan untuk saat ini hampir seluruh PDAM Kab./Kota baru menghasilkan produk kualitas sebagai air bersih belum air siap minum
- Penyehatan Lingkungan
 - Belum semua Kab./Kota mengadopsi program Kab./Kota Sehat
 - Kabupaten/Kota yang telah mengadopsi program Kab./Kota Sehat tidak semua aktif
 - Penyakit berbasis Lingkungan masih menjadi masalah utama penyakit yang ada dimasyarakat, dan belum semua Kab./Kota melakukan pendekatan klinik sanitasi.
 - Belum semua TTU memenuhi syarat kesehatan
 - Belum semua TPM memenuhi syarat kesehatan dan masih adanya keracunan makanan akibat pengelolaan makanan yang tidak higienis
- Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat.
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - Masih terbatasnya sarana pengolahan limbah yang layak terutama di lokasi industri rumah tangga.
 - Masih terbatasnya kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota untuk menangani sektor pengawasan dampak kualitas lingkungan terhadap kesehatan, padahal pengawasan dampak kualitas lingkungan terhadap kesehatan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/Kota.
 - Sangat variatifnya kebijakan masing-masing daerah, mengakibatkan beberapa program Penyehatan Lingkungan seperti Pembinaan dan Pengawasan Kualitas

Limbah Cair dan Padat Sarana Pelayanan Kesehatan tidak masuk program prioritas sehingga kegiatan ini terabaikan

Upaya Pemecahan Masalah:

Upaya pemecahan permasalahan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Sarana Sapl Melalui *Participatory*.
 - Advokasi kebijakan dan anggaran untuk STBM secara berjenjang dan berkesinambungan.
 - Peningkatan kapasitas fasilitator pemicuan melalui workshop, training, pendampingan, refresh pemicuan.
 - Membuat rencana kerja yang terintegrasi secara berjenjang.
 - Melibatkan sumber dana lain untuk kegiatan STBM (CSR, Lembaga Donor, Project Lainnya).
 - Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan yang melibatkan semua stakeholder.
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
Proporsi rumah tangga akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak upaya upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan :
 - Pembangunan /perbaikan sarana air minum,
 - Pemeriksaan kualitas air minum perpipaan (PDAM) maupun non perpipaan
 - Mendorong Pemerintah Kab/kota untuk mengaktifkan kembali Laboratorium kesehatan Daerah,
 - Melatih SDM yang berkualitas yang dapat mendukung pelaksanaan pemeriksaan air.
 - Mendorong penyediaan Water test Kit untuk kemudahan pemeriksaan kualitas air di Lapangan.
- Penyehatan Lingkungan
 - Memfasilitasi Kab./Kota untuk terbentuknya/mengadopsi Program Kab./Kota Sehat. Kegiatan ini merupakan salah

satu yang mendukung mendukung pencapaian Penghargaan yang diterima 26 Kab/Kota dalam program Kab/Kota Sehat.

- Sosialisasi Prinsip Hygiene Sanitasi Makanan kepada semua masyarakat pengelola TPM dengan pemanfaatan CTPS dan PHBS.
- Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat
 - Advokasi, Sosialisasi, dan *capacity building* peningkatan pengelolaan limbah padat dan cair serta peningkatan pengawasan pestisida dan pemantauan kualitas lingkungan dan udara.
 - Peningkatan peran Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas lingkungan.
 - Orientasi manajemen pengawasan dampak kualitas lingkungan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan laboratorium Kesehatan Lingkungan Kab./Kota.
 - Pemetaan daerah rawan pencemaran dan penyakit berbasis lingkungan oleh Kabupaten Kota dan Provinsi.
 - Peningkatan kemitraan lintas program dan lintas sector

d) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Permasalahan dalam kegiatan Pengembangan SIK diantaranya adalah sebagai berikut:

- SIK masih terfragmentasi (belum terintegrasi) dan dikelola berbagai pihak sehingga terdapat “pulau-pulau informasi”
- Legislasi yang ada belum kuat untuk mendukung integrasi SIK
- Tenaga Pengelola SIK umumnya masih kurang diakui perannya, pengembangan karir tidak jelas dan belum ada jabatan fungsionalnya

- Terbatasnya anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi khususnya untuk pemeliharaan
- Kualitas data masih bermasalah (tidak: akurat, lengkap, tepat waktu)
- Penggunaan data/informasi oleh pengambil keputusan dan masyarakat masih sangat rendah

Permasalahan dalam kegiatan pembiayaan kesehatan pra upaya atau lebih dikenal dengan program Jamkesda adalah:

- Masih terdapat masyarakat miskin yang tidak tercover dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan jaminan kesehatan masih rendah.
- Sistem rujukan terstruktur dan berjenjang belum berjalan secara optimal.
- Sistem pengelolaan keuangan daerah sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program, seperti pelaksanaan sharing dana program Jamkesda dimana dana Jamkesda tidak dapat dipooling tetapi masih ada di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.
- Masih banyak Kabupaten/Kota yang tidak mengirim laporan pelaksanaan program Jamkesda secara rutin, lengkap dan tepat waktu ke Provinsi.
- Laporan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan tidak berjalan secara rutin, lengkap dan tepat waktu tetapi berdasar permintaan.
- Adanya keluhan dari peserta JKN terkait pelayanan kesehatan yang dihadapi peserta JKN membuat sebagian peserta kecewa dan masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maju mundur untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dalam BPJS Kesehatan.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah yang ditemui dalam kegiatan pengembangan SIK adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIK yang terintegrasi, yang dapat menyediakan data secara real time yang mudah diakses dan berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (*Decision Support System*).
- Penguatan manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan dititik-beratkan pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan dan penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran.
- Peningkatan penyelenggaraan sistem pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data/ informasi dalam kerangka kebijakan SIK terintegrasi, sehingga diperoleh data yang berkualitas, yaitu akurat, lengkap, tepat waktu .
- Pengembangan Bank Data Kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan dari para pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, serta memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran.
- Pengembangan SDM pengelola data dan informasi kesehatan dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lintas sektor terkait serta terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan lainnya.
- Peningkatan penggunaan solusi-solusi *eHealth* untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan kekurangan sumberdaya manusia dalam sistem kesehatan

Upaya pemecahan permasalahan pada kegiatan pembiayaan kesehatan pra upaya adalah:

- Update data kepesertaan PBI secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan.
- Pelaksanaan Jamkesda Provinsi berlaku untuk pemegang kartu Jamkesda dengan perbaikan dan sinkronisasi data kepesertaan Jamkesda dengan kepesertaan Jamkesmas baru selanjutnya mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan) paling lambat tahun 2015.
- Menerapkan regionalisasi sistem rujukan dengan meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya manusia secara merata di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur.
- Regulasi sistem pengelolaan keuangan program jaminan kesehatan.
- Meningkatkan kesadaran puskesmas, rumah sakit PPK Jamkesda dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengirim laporan pelaksanaan program Jamkesda secara rutin, lengkap dan tepat waktu ke Provinsi.
- Meningkatkan koordinasi BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dalam mengelola laporan pelaksanaan JKN.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan JKN untuk memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat utamanya peserta JKN.

9) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2014, Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 7.177.800.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp 6.355.591.507,00 atau sebesar 88.55% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Tabel 4.2.1.15

Capaian Indikator Kinerja Utama Target dan Realisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	Target dan Realisasi Penyakit						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	51	53	21.7	52	39.5	51	24.3	48
Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90	90	91	90	90	90	90	100
Persentase Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare sesuai standar	100	100	63	100	94.7	100	91.61	91.61
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80	75	73.1	80	86.3	80	86.3	107.88
Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar	90	90	88.9	90	88.6	90	89	98.89
Persentase ODHA mendapat ART	80	80	70.7	80	73.7	80	72	90

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	Target dan Realisasi Penyakit						CAPAIAN 2014 (%)
		2012		2013		2014		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Angka Capaian API (Annual Parasite Index) Malaria permil	< 1 ‰	< 1 ‰	0.12	< 1 ‰	0,03	< 1 ‰	0.03	> 100

Sumber: Data Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2014

Berdasarkan Tabel diatas dapat dikemukakan indikator- indikator dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

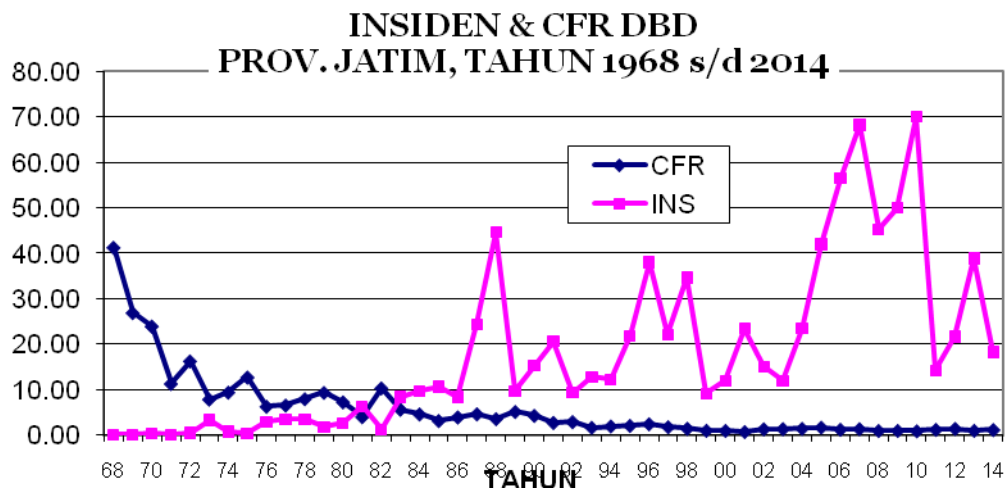
1) Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD dengan Indikator Kinerja Utama Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2014, dari Angka Kesakitan DBD per 100.000 yang ditargetkan sebesar 51 dan terealisasi 24.3 angka kesakitan akibat DBD.

Tujuan program pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit DBD serta mencegah Kejadian Luar Biasa. Dengan sasaran kegiatan:

- a) Minimal 20% Kabupaten/Kota dengan angka kesakitan DBD maksimal 51/100.000 penduduk
- b) Minimal 20% Kabupaten/Kota dengan angka kematian DBD maksimal 1%
- c) Trend angka kesakitan dan kematian DBD mulai tahun 2009 sampai dengan 2014, adalah sebagai berikut

Grafik 4.2.1.1
Insiden Dan CFR DBD Tahun 1968-2014



Sumber: Data kegiatan P2 DBD

Dari grafik 4.2.1.1 dapat disimpulkan sebagai berikut berdasarkan jumlah kasus DBD (Insiden) di Jawa Timur mulai tahun 2009 turun dari tahun sebelumnya, namun masih bersifat berfluktuasi dan cenderung terjadi kenaikan bersamaan dengan datangnya musim penghujan. Hal ini menunjukkan masih adanya vektor/nyamuk penular DBD di masyarakat yang belum di dapat di tanggani secara optimal, meskipun jumlah kasus DBD di Jawa Timur dibawah angka Nasional (51 per 100.000 penduduk).

Peningkatan kasus DBD di Kabupaten/Kota diatas disebabkan karena terjadi penyebaran lokasi terjangkit yang menunjukkan adanya penyebaran atau meluasnya vektor/nyamuk penular DBD. Hal ini dikarenakan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum dijalankan secara optimal di masyarakat.

Tabel 4.2.1.16
Hasil capaian Indikator P2 DBD Tahun 2012-2014

Indikator	2012		2013		2014 (sd Sept)	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Incident Rate (IR)/100.000 pddk	53	21,70	52	39.07	51	20,58
Case Fatality Rate (%) (CFR)	< 1 %	1,44	< 1 %	1,05	< 1 %	1,17
Angkas Bebas Jentik (%) ABJ	95 %	83	95 %	87	95 %	87
Kab/Kota KLB (%)	5 %	11 (29%)	5 %	16 (42%)	5 %	1 (0,03%)

Sumber: Data Kegiatan P2 DBD 2014

Kinerja program penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue tahun 2014 mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan adanya penurunan kasus DBD dibandingkan tahun 2013 dan angka Insiden Rate dibawah angka nasional, demikian juga Kabupaten/Kota yang tercatat mengalami KLBi mengalami penurunan hanya 1 Kota saja. Namun Jawa Timur belum dapat dikatakan Daerah Bebas DBD karena masih banyak vektor/nyamuk penular DBD yang ditunjukkan dengan Angka Bebas Jentik (ABJ) masih belum mencapai 95%

2) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana

Kejadian bencana umumnya memiliki dampak yang merugikan. Rusaknya sarana prasarana fisik, permukiman dan fasilitas umum hanyalah sebagian kecil dari dampak bencana yang dapat langsung terlihat. Dampak lain yang tak kalah pentingnya adalah permasalahan kesehatan seperti kolapnya fasilitas pelayanan kesehatan, adanya korban meninggal dan luka, penurunan status gizi masyarakat, rusaknya sarana air bersih dan lingkungan pemukiman,

stress pasca trauma dan masalah psikososial. Kejadian bencana seringkali diikuti dengan adanya arus pengungsian penduduk ke lokasi yang aman, yang tentunya akan menimbulkan permasalahan yang baru di lokasi pengungsian tersebut.

Berdasarkan Tabel diatas dalam kurun waktu 2009-2014 dapat disimpulkan bahwa pelayanan dan penanggulangan masalah bencana sudah tertangani 100% sesuai standart.

3) Pengendalian Penyakit Paru

Kegiatan Pengendalian Penyakit Paru dengan Indikator Kinerja Utama Angka Keberhasilan Pengobatan TB. Pada Tahun 2014 realisasinya sebesar 90% dengan target yang ditetapkan 90%. Penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TB yang cukup besar (selalu dalam kelompok 5 besar). Penderita tersebut menyebar di semua provinsi, namun dengan prevalensi yang berbeda di beberapa wilayah. Indonesia bagian timur memiliki prevalensi yang terbesar. Angka insidens TB nasional pada tahun 2014 berdasarkan survei prevalensi pada tahun 2004, adalah 107/100.000 penduduk (untuk TB Paru BTA positif baru) dan menurut laporan WHO tahun 2013, angka insiden kasus TB baru BTA positif adalah 185/100.000 penduduk (460.000 kasus) dan angka prevalensi seluruh kasus TB.

Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah kasus TB yang besar. Provinsi ini telah menjalankan strategi *Directly Observed treatment Short course* (DOTS) sudah sejak tahun 1995. Semua Puskesmas telah terlatih adalah 297 per 100.000 (730.000 kasus)

Provinsi Jawa sejak tahun 2004, dan program ini dikembangkan ke rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan

lainnya. Jumlah kasu TB di Jawa Timur menempati urutan kedua setelah Jawa Barat. Jumlah kasus baru pada tahun 2013 tidak kurang dari 42 ribu. Kasus anak sekitar 5% dari total kasus TB yang diobati.

Sasaran dari kegiatan Pengendalian Penyakit TB Paru adalah untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dengan strategi DOTS disemua Puskesmas dan RS pemerintah dengan melibatkan sektor swasta melalui kegiatan kemitraan yang disebut dengan *Public Private Mix DOTS*.

Program pengendalian TB dengan strategi DOTS dimulai pada tahun 2005 dan sampai sekarang telah melibatkan 100% Puskesmas dan 100% RS pemerintah. Diupayakan untuk melibatkan sektor swasta melalui kegiatan kemitraan yang disebut dengan *Public Private Mix DOTS*.

4) Pemberantasan Penyakit Diare dan Infeksi Saluran Pernafasan (ISF)

Kegiatan Pemberantasan Penyakit Diare dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare sesuai standar. Pada Tahun 2014 targetnya ditentukan sebesar 100% dengan Realisasi 91.61%.

Pengendalian diare bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena diare bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Sedangkan tujuan dari tatalaksana diare adalah mencegah dehidrasi, mengobati dehidrasi, mencegah gangguan nutrisi dengan memberikan makan selama dan sesudah diare, memperpendek lamanya diare dan mencegah diare menjadi berat. Prinsip tatalaksana diare adalah Lintas Diare (Lima Langkah Tuntaskan Diare) yang terdiri dari oralit osmolaritas rendah, zinc, pemberian

ASI/makanan, pemberian antibiotika hanya atas indikasi dan pemberian nasihat kepada ibu/pengasuh

Tabel 4.2.1.17

Hasil Cakupan P2 Diare di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2014

INDIKATOR	2012		2013		2014 (sd Sept)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Cakupan Pelayanan (%)	118	63	100	118	100	66
Realisasi (absolut)	-	963.559	-	970.834	-	544.856
Angka penggunaan oralit (%)	81,5	62,9	100	81,5	100	90,82
Angka penggunaan infus (%)	3,9	3,23	<1	3,9	<1	3,9

Sumber : Data kegiatan P2 Diare 2009-2014

Cakupan pelayanan diare dalam 6 tahun terakhir cenderung meningkat, khususnya pada tahun 2013 cakupan pelayanan mencapai 118%. Hal ini terjadi karena ada penurunan angka morbiditas dari tahun 2012 yang 411/1.000 penduduk menjadi 214/1.000 penduduk pada tahun 2013.

5) Peningkatan Imunisasi

Pencegahan/perlindungan terhadap penyakit infeksi dihubungkan dengan suatu kekebalan, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif.

Program imunisasi merupakan salah satu teknologi yang sangat efektif dalam mencegah PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi) yang secara langsung berhubungan dengan menurunkan angka kematian bayi dan balita. Keberhasilan program imunisasi tersebut ditentukan dengan membuat strategi pencapaian, dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan imunisasi.

Berdasarkan Tabel 4.2.1.15 diketahui bahwa untuk tahun 2014 capaian desa/kelurahan *UCI (Universal Child Immunization)* realisasinya 86,3% dan sudah memenuhi target.

6) Pengendalian Penyakit Kusta

Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar. Pada Tahun 2014, mencapai realisasi sebesar 89% dari 90% target yang ditetapkan (angka capaian 98,89%).

Masalah penyakit kusta sangat kompleks, bukan hanya dari segi medis tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Untuk itu diperlukan kemitraan lintas program dan lintas sektor dalam pemberantasan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan ekonomi serta mendorong penderita kusta yang sudah sembuh menjalani kehidupannya yang berkualitas dan berkeadilan di dalam masyarakat secara luas. Dengan penemuan penderita secara dini, pengobatan yang adekuat, pencegahan kecacatan kusta dan rehabilitasi medis diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini.

Pengendalian Penyakit Kusta dengan sasaran menemukan penderita kusta sedini mungkin, mengobati dengan MDT (*multi drug therapy*), melakukan pemeriksaan kontak serumah dan tetangga, melakukan pencegahan kecacatan dan rehabilitasi medis oleh tenaga baik medis maupun paramedic yang telah mendapatkan pelatihan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain indikator tersebut diatas Program Pengendalian Penyakit Kusta juga mempunyai indikator kinerja yaitu penemuan penderita baru sedini mungkin dan prosentase keberhasilan pengobatan di tingkat kabupaten/kota.

Tabel 4.2.1.18
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pengendalian
Penyakit Kusta

Indikator	Target	2012	2013	2014*
Penderita Terdaftar		5.57	4.289	3.913
Prev. Rate per 10.000	< 1	1,46	1,12	1,05
a. Penderita Baru		4.807	4.132	3.601
b. C D R per 10.000	< 5	12,63	10,78	-
c. Proporsi Cacat II (%)	5%	14%	13%	12%
e. Proporsi anak (%)	5%	9%	9%	10%
RFT Rate	90%	89,5%	89,8%	-
% Kab/Kota mencapai RFT	Target	75%	80%	90%
rate sesuai standart	Pencapaian	68%	66%	-

Sumber : Data Program P2 Kusta Prov. Jatim

**) data sampai dengan September 2014.*

Periode 2014 penemuan kasus baru (s/d September) sejumlah 3.601 orang dengan perincian untuk tipe PB sejumlah 462 orang dan 3.139 orang dengan tipe MB. Dari total penderita baru tersebut, 358 penderita baru merupakan usia anak (10%), 415 penderita baru (12%) yang ditemukan dalam kondisi cacat tingkat 2 atau mengalami cacat yang kelihatan dan ada 431 orang (12%) mengalami cacat tingkat I (cacat yang tidak kelihatan) yang potensial untuk menjadi cacat tingkat II. Untuk cakupan pelayanan pengobatan kusta sesuai dengan regimen WHO (MDT) adalah 100% di Unit Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit yang sudah ada kerjasama dan Puskesmas). Dari 989 Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang ada di di Jawa Timur, 695 UPK saat ini ada penderita kusta-nya.

Rata-rata penemuan penderita baru kusta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berkisar 4.000 s/d 5.000, penemuan penderita baru kusta mulai menunjukkan trend penurunan kasus terutama di Kabupaten/Kota endemis. Upaya yang telah dilakukan untuk penemuan kasus baru adalah dengan pemeriksaan kontak serumah dan tetangga setiap kali menemukan kasus baru. Upaya yang lain yang

ditujukan untuk mengurangi penemuan kasus baru adalah dengan kegiatan kemoprofilaksis kusta di Kabupaten Sampang. Selama 3 tahun pelaksanaan kegiatan ini telah menunjukkan hasil yang cukup significant yaitu bisa menurunkan kasus baru + 27% (dari 541 kasus baru pada tahun 2011 menjadi 394 kasus baru pada tahun 2013). Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan ini dalam menurunkan kasus baru di Jawa Timur maka kegiatan serupa juga dilakukan di Kabupaten Sumenep mulai tahun 2015.

1) Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan AIDS

Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan AIDS dengan Indikator Kinerja Persentase Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) mendapat ART. Pada Tahun 2014 dari 80% target terealisasi sebesar 72%. Program pengendalian penyakit Infeksi Menular Sexual dan HIV/AIDS dimaksudkan untuk mengendalikan penyebaran infeksi HIV dan infeksi menular sexual dan meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Program Pengendalian penyebaran infeksi HIV, PMS dan dampak HIV & AIDS dilakukan melalui upaya pencegahan, meningkatkan kualitas pelayanan serta jangkauan ODHA dan masyarakat

Tabel 4.2.1.19
Capaian Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV /AIDS

Indikator	Jml	2012			2013			2014		
		Target %	Capaian		Target %	Capaian		Target %	Capaian	
			Jml	%		Jml	%		Jml	%
% Kab Kota yang memiliki layanan komprehensif	38	65	32	84	75	34	89	100	36	89
% RS Pemerintah yg menyelenggarakan rujukan ODHA	48	40	30	63	70	35	80	90	46	96

Sumber: Data kegiatan P2 IMS dan HIV/Aids

Dalam kurun waktu 2009-2014 masih ada 2 Kabupaten Kota yaitu Kab. Bangkalan dan Kota Blitar, sehingga dari target 38 Kab/Kota baru 36 (89%) yang sudah ada layanan. Hal ini dikarenakan di dua kota tersebut baru mendapatkan pelatihan layanan Konseling dan Testing HIV di Tribulan IV 2014. Diharapkan tahun 2015 sudah bisa memulai layanan.

2) Pengendalian Penyakit Malaria

Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria dengan Indikator Kinerja Utama Angka Capaian API (Annual Parasite Index) Malaria permil dengan realisasi 0.03 dari target yang ditentukan sebesar $< 1 \text{ ‰}$ (0.01). Malaria masih sudah tidak menjadi masalah di 34 kabupaten/kota setelah mendapat sertifikasi dari Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 26 April 2014. Akan tetapi kewaspadaan masih perlu mengingat banyaknya fokus reseptif (daerah dengan vektor malaria) malaria di Jawa Timur yang mengharuskan adanya sistem kewaspadaan yang tinggi terhadap penduduk yang datang dari daerah endemis malaria di luar Jawa Timur.

Program Pengendalian Penyakit Malaria target utamanya adalah menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografi tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta tidak adanya vector di wilayah tersebut. Sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah adanya penularan kembali.

Hasil surveilans rutin malaria sampai dengan bulan November 2014 menginformasikan terdapat penderita malaria sebanyak 483 penderita, dari jumlah tersebut terdapat penderita malaria indigenous (tertular setempat sebanyak 75 penderita). Penularan setempat ini terjadi di Pulau Sadulang Besar dan Pulau Saular Kecamatan Sapeken Wilayah Kabupaten Sumenep. Penularan setempat diduga

berasal dari nelayan yang datang dari daerah endemis malaria di wilayah kepulauan Kalimantan. Penanganan peningkatan penderita malaria sudah dilakukan sesuai dengan standart penanganan kejadian peningkatan penularan malaria setempat

Tabel 4.2.1.20
Capaian Kegiatan Program Malaria Tahun 2009 - 2014

No	INDIKATOR	2012	2013	2014 (s/d nov)
1	Jumlah Sediaan Darah diperiksa (ribuan)	33,02	31,92	23,53
2	ABER	1.8	0,1	0,1
3	SPR	3.3	3,4	2,0
4	Penderita Malaria	1,074	1070	483
5	Proporsi Plasmodium falsiparum (%)	35.7	32,1	37,8
6	Proporsi Kasus <i>Indigenous</i> (%)	0.8	0,1	17,3
7	Proporsi Malaria Import	92.4	99,9	82,7
8	Desa HCI	2	1	1

Sumber: Data kegiatan P2 Malaria 2009-2014

Berdasarkan data tersebut diatas, Jawa Timur sudah memenuhi sebagai wilayah eliminasi malaria, mengingat API sudah dibawah 1 per seribu penduduk. Tetapi belum bisa dinyatakan daerah bebas malaria bila dilihat dari kasus *Indigenous* masih terdapat kasus *indigenous* di 3 tahun terakhir. Wilayah Jawa Timur masih terdapat daerah reseptif yang siap menularkan malaria setempat.

c) **Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah**

Permasalahan

Permasalah-permasalahn yang ditemui pada pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberrnanta Penyakit ditinjau dari kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue

- Obat anti virus dan vaksin belum ada, maka upaya utama yang dilakukan adalah pengendalian vektor dan deteksi dini DBD
 - Adanya Keterlambatan tatalaksana DBD di Rumah Sakit dikarenakan rujukan masyarakat ke Rumah Sakit terlambat
 - Partisipasi masy dalam pemberantasan Sarang Nyamuk DBD rendah, Angka Bebas Jentik < 95%
 - Masyarakat masih minat dengan foging.
 - Kompetensi tenaga penyemprot belum optimal.
 - Uji resitensi terhadap insektisida belum dilakukan secara optimal.
 - Sistem pencatatan dan pelaporan DBD belum optimal.
 - Beberapa Kab/Kota belum komitmen pendanaan dalam pencegahan DBD
- Pengendalian Penyakit TB
- Penemuan kasus TB yang masih di bawah target nasional, yaitu masih mencapai 67 per 100.000 penduduk pada tahun 2014 dengan Case notification rate turun jika dibandingkan tahun 2013 (20 kabupaten masih belum melaporkan dan peralihan sistem laporan dari SITTT-1 ke SITTT-2 yang belum berjalan dengan baik).
 - Hanya 23 kabupaten/kota yang mencapai target keberhasilan pengobatan minimal 90% (15 kabupaten/kota belum melaporkan secara lengkap dan valid).
 - Masalah TB HIV masih belum tertangani dengan optimal, khususnya dari sisi surveilans dan akses layanan untuk tes HIV
 - Masih banyak layanan swasta yang belum mau melaksanakan pengobatan TB dengan strategi DOTS,

sehingga pasien yang ditangani oleh sektor swasta tidak tercatat dalam sistem surveilans program nasional

- Kasus kebal obat (TB MDR) yang semakin meluas dan sudah 38 kabupaten/kota yang melaporkan, dengan jumlah kasus TB MDR diobati sebanyak 642 kasus, terkonsentrasi di 5 kabupaten/kota yang dekat dengan RS Rujukan/Sub Rujukan TB MDR, dengan angka keberhasilan pengobatan berkisar antara (60 – 70)%
- Pemberantasan Penyakit Diare dan ISP
 - Masih banyak Kabupaten/Kota yang cakupan pelayanan diarenya masih rendah, hal ini disebabkan antara lain rendahnya ketepatan dan kelengkapan laporan bulanan dari puskesmas (fasyankes lain seperti RS masing sangat rendah) disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya data untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan masih lemahnya umpan baliknya di setiap tingkat;
 - Kurangnya tenaga pengelola program P2 Diare yang terlatih baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas disebabkan oleh terbatasnya anggaran pelatihan teknis maupun manajemen baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota
 - P2 Diare bukan merupakan program prioritas di daerah, sehingga pendanaan minim bahkan nihil;
 - Petugas Kabupaten/Kota mempunyai tugas rangkap lebih dari dua, sehingga kesulitan dalam memprioritaskan penanganan program bahkan sering terjadi pergeseran pengelola P2 Diare di tingkat puskesmas ataupun Kabupaten/Kota
 - Terbatasnya kegiatan monitoring dan evaluasi, baik berupa pertemuan koordinasi maupun Supervisi ke

layanan, sehingga pelaksanaan program di tingkat layanan tidak sesuai standar

– Peningkatan Imunisasi

- Adanya Keterlambatan pengadaan vaksin dan logistik lainnya sehingga baru diterima di provinsi di pertengahan tahun yaitu sekitar bulan juni.
- Kurangnya kerjasama lintas sector dan lintar program tentang sosialisasi dan mobilisasi masyarakat.
- Kurangnya media penyuluhan yang komunikatif dan informative sehingga petugas hanya memberikan penyuluhan secara lisan saja.
- Kerjasama dengan organisasi masyarakat yaitu PKK, Fatayat, Aisiyah, muslimat, dan lain lain yang belum optimal
- Kurangnya pemanfaatan Minilokakarya baik internal maupun eksternal untuk akselerasi cakupan.

– Pengendalian Penyakit Kusta

- Penderita baru kusta masih terus ditemukan di masyarakat.
- Masih ada keterlambatan penemuan kasus baru.
- Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai RFT (*Release from Treatment*) Rate/angka kesembuhan untuk tipe MB (*Multi Basiler*) masih belum optimal.
- Perhatian dari pemerintah kabupaten/kota masih kurang.
- Masih adanya stigma di masyarakat dan petugas kesehatan

– Pengendalian Penyakit HIV dan IMS

- Kabupaten/kota yang belum mempunyai layanan komprehensif HIV adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar karena pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten/kota tersebut belum

berkomitmen dalam mengembangkan layanan di Rumah Sakit daerahnya

- Jejaring keterlibatan lintas sektor belum optimal dalam hal dukungan dan layanan perawatan dan pendampingan
 - Akses layanan tes pemeriksaan HIV di tingkat puskesmas masih terbatas di beberapa Kabupaten/Kota yaitu di 84 Layanan Konseling dan Testing tingkat Puskesmas yang tersebar di 25 Kabupaten/kota
 - Masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA
- Pengendalian Penyakit Malaria
- Surveilans migrasi malaria belum maksimal
 - Banyaknya tempat prerindukan nyamuk (*Breeding place vektor*) malaria yang tidak tertangani. (*vektor* → *host definitife*)
 - Kelambunisasi desa endemis masih dibawah 80%
 - Minimnya tenaga entomologi di daerah reseptif/daerah dengan vektor malaria dan endemis/daerah dengan kasus penularan setempat.
 - Kurangnya penguatan pada sumber daya manusia yaitu tidak ada pelatihan pengelola program malaria, petugas laboratorium, petugas entomologi malaria dan petugas dokter untuk tatalaksana malaria.
 - Keterlambatan diagnosis dan kurangnya pengetahuan tatalaksana pengobatan malaria pada petugas
 - Masih ada pengobatan malaria diluar ACT/Arthemisinin Combination Therapy (obat yang disarankan WHO dan Kemenkes)
 - Koordinasi lintas sektor masih rendah pada penanganan malaria tenaga kerja musiman

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan permasalahan dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ditinjau dari kegiataya adalah sebagai berikut:

- Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue
 - Menggerakan dan memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan DBD.
 - Meningkatkan dan mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan penemuan Kasus melalui Diagnosis dan Tatalaksana Kasus DBD yang Berkualitas
 - Meningkatkan Sistem Surveilans Epidemiologi Kasus, dan Vektor) DBD.
 - Meningkatkan sumber daya dalam Pengendalian DBD.
 - Monitoring dan evaluasi program DBD
- Pengendalian Penyakit TB
 - Meningkatkan AKMS (Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pengambil kebijakan dalam pengendalian TB.
 - Memperkuat jejaring eksternal di 5 regional dan kabupaten kota untuk menurunkan angka drop out yang pada akhirnya akan meningkatkan angka keberhasilan pengobatan.
 - Penguatan kolaborasi TB-HIV melalui Tim Kolaborasi TB HIV yang melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Memperkuat Public Private Mix sebagai pendekatan untuk memperkuat jaringan pelayanan TB (pengembangan di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kota Blitar dan Kota Malang.
 - Penguatan jejaring layanan untuk TB kebal obat melalui kegiatan pengendalian terpadu TB kebal obat dengan

menambah layanan sub rujukan di 5 wilayah regional dengan didukung layanan laboratorium yang bermutu.

- Penguatan sistim pencatatan dan pelaporan kasus TB melalui SITT-1 yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan dialihkan ke SITT-2 oleh fasyankes secara optimal sehingga tersedia data kasus sesuai dengan jumlah yang diobati dan dievaluasi
- Pemberantasan Penyakit Diare dan ISP
 - Memberikan umpan balik laporan secara rutin dari provinsi ke Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota ke Puskesmas;
 - Advokasi ke stake holder (pemegang kebijakan) tentang usulan anggaran kegiatan;
 - Memberikan saran dalam membagi beban tugas pada staf
- Peningkatan Imunisasi
 - Menguatkan system koordinasi penanggulangan bencana baik secara lintas sector maupun lintas program
 - Memperbaiki system informasi supaya terjadi keseragaman dalam mekanisme informasi data bencana selama masa penanggulangan bencana
 - Meningkatkan system kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana
 - Memenuhi kebutuhan logistik selama masa penanggulangan bencana
- Pengendalian Penyakit Kusta
 - Mengintensifkan penemuan penderita baru melalui kegiatan pencarian secara aktif (pemeriksaan kontak serumah dan tetangga) serta melaksanakan *Rapid Village Survey* (RVS) di desa dengan riwayat penderita kusta yang pernah tercatat lebih dari 3 orang dengan melibatkan peran dari lintas sektor dan lintas program

- Menekankan pentingnya penyuluhan saat sebelum pemberian MDT untuk menghindari terjadinya kasus DO (Drop out) / Default, *defaulter* tracing jika ada kasus DO / default,
- Jika ada kasus dari luar wilayah, maka cross notification kepada petugas kusta setempat sangat penting untuk pelacakan kasus DO/ default.
- Penyuluhan secara aktif untuk mengurangi stigma kusta di masyarakat maupun petugas kesehatan. dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (BOK, DAU, APBD I maupun BLN).
- On the job training bagi petugas yang sudah dilatih untuk mempertahankan ketrampilan yang sudah ada.
- Meningkatkan kepedulian para pemegang kebijakan (Bupati/Walikota, anggota DPRD, Kepala Dinas maupun Kepala Puskesmas) di tingkat Kabupaten/Kota melalui advokasi yang berkesinambungan.
- Meningkatkan mutu pelayanan pada penderita kusta dengan melakukan POD setiap bulan dan *case holding*
- Mengembangkan *research operasional*
- Pengendalian Penyakit HIV dan IMS
 - Koordinasi penanggulangan penyakit HIV/AIDS dalam wadah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk:
 - Meningkatkan komitmen pengambilan kebijakan tingkat provinsi, Kabupaten dan Kota
 - Meningkatkan peran lintas sektor dalam upaya pengendalian HIV
 - Meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat
 - Sosialisasi dan penjangkauan kepada populasi risiko tinggi

- Memfasilitasi layanan pendampingan program, pelatihan Sumber Daya Manusia, pemenuhan buffer logistik reagen IMS dan HIV serta obat Anti-retroviral (ARV)
- Upaya peningkatan capaian kinerja melalui:
 - Penyuluhan terkait dengan layanan HIV yang tersedia
 - Asistensi kunjungan layanan pencegahan penularan melalui harm reduction, pemeriksaan dan pengobatan IMS Terpadu Berkala di lokalisasi, pencegahan penularan HIV dari Ibu ke anak dan kewaspadaan standar
 - Pengembangan klinik IMS, Klinik Konseling dan Testing HIV dan RS rujukan ODHA di kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memudahkan akses layanan kesehatan yang merata di Jawa Timur melalui layanan tanpa stigma dan diskriminasi
- Pengendalian Penyakit Malaria
 - Revitalisasi Pos Malaria Desa
 - Persiapan eliminasi malaria Provinsi Jawa Timur dan mempertahankan 34 kabupaten/kota yang telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria
 - Penguatan sistem surveilans malaria
 - Koordinasi lintas sektor penanganan faktor risiko malaria
 - Penguatan tenaga Juru Malaria Desa
 - Penguatan deteksi dini dan pengobatan malaria sesuai standart

2.2 RS Dr. SOETOMO

Pembangunan bidang kesehatan khususnya rumah sakit ditujukan untuk mewujudkan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan.

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Terpenuhi kebutuhan obat di rumah Sakit
- 2) Perilaku Kesehatan Pasien dan Keluarga Pasien
- 3) Database yang berkualitas
- 4) Peningkatan kinerja pelayanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat
- 5) Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Karyawan
- 6) Peningkatan pendapatan Rumah Sakit
- 7) Peningkatan Mutu SDM

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 249.169.468.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 331.079.264.433,00 atau (132,87%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program)

Alokasi anggaran yang disediakan untuk belanja alat kesehatan pakai habis, belanja obat-obatan, bahan kimia dan gas medis.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Lambatnya proses pengadaan berdampak pada kekosongan obat dan alat kesehatan yang terus menerus

- Kebutuhan penunjang pelayanan di Instalasi Farmasi masih banyak kendala di IT sehingga tidak tepat dan cepat dapat diakomodir oleh IT dan sangat mengganggu
- Jika terjadi kekosongan pihak pengadaan tidak segera untuk menginformasikan mencari alternatif pengganti, justru pihak rumah sakit yang pro-aktif menanyakan karena kebutuhan dipelayanan sangat dibutuhkan supaya tidak mengganggu pelayanan
- Diberlakukannya kebijakan dari SK Menkes No. 328/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional dan pemberlakuan SK Direktur No. 188.4/3470/301/2014 tentang Formularium RSUD Dr. Soetomo. Hal ini berdampak tidak ada peresepan dan mengakibatkan obat Death Moving terutama obat multivitamin dan resep-resep yang diluar formularium rumah sakit

Upaya pemecahan masalah :

- Proses pengadaan agar lebih cepat dan ditertibkan sesuai jadwal.
- IT dapat segera menyelesaikan masalah yang ada di Instalasi Farmasi
- Penanggung jawab dan ULP lebih komunikatif dan segera mencari alternatif
 - Pemberlakuan SK Direktur No. 188.4/3616/301/2014 tentang Pemanfaatan obat death moving RSUD Dr. Soetomo
 - Sosialisasi baik ke SMF/UPF untuk memanfaatkan obat death moving
 - Melakukan upaya retur obat ke penyedia
 - Memanfaatkan obat death moving untuk dipakai pasien JKN

2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 712.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 665.941.908,00 atau (93,53%), pagu dan realisasi masing-

masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program)

Alokasi anggaran yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan antara lain belanja jasa dokumentasi dan publikasi, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman.

Tabel 4.2.2.1
Kegiatan Penyuluhan di Instalasi PKRS dan Humas
RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012 - 2014

No	Topik Penyuluh	Ceramah (kali)			Demonstrasi (kali)			Diskusi kelompok (kali)			Tatap muka (kali)		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Kesehatan Umum	32	157	349	0	19	59	0	19	34	3296	7679	15406
2	KB	123	76	64	4	15	21	0	0	1	3746	410	423
3	KIA	1361	1214	1377	466	562	702	119	117	542	24355	5476	4271
4	GIZI	193	173	216	0	0	0	16345	16366	22239	12300	12537	16025
5	Imunisasi	122	65	57	5	11	11	0	0	1	1662	0	16
6	Jiwa	154	66	154	40	39	135	68	27	80	777	741	1495
7	Lain-lain	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12253	33828	69634
Jumlah		1987	1751	2217	515	646	928	16532	16529	22897	58389	60671	107270

Sumber : Laporan Instalasi PKRS dan Humas Tahun 2014

Untuk meningkatkan perilaku sehat di rumah sakit perlu diadakan kegiatan berupa ceramah, demonstrasi, diskusi kelompok dan tatap muka. Kegiatan penyuluhan dilakukan kepada pasien maupun kepada keluarga pasien.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat secara umum tidak ada masalah prinsip, karena di RSUD Dr. Soetomo ada instalasi khusus yang menangani hal tersebut yaitu instalasi PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit)

Upaya pemecahan masalah :

Namun demikian masih perlu pendanaan setiap tahun yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan kepada masyarakat dan keluarga pasien

3) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 15.595.991.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.824.811.954,00 atau (95,06%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program)

Alokasi anggaran yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan antara lain belanja langganan multimedia, kerjasama dengan pihak ke tiga, cetak dan penggandaan dan belanja modal software.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Kebutuhan operasional internet rumah sakit cukup tinggi
- Integrasi sistem informasi rumah sakit (SIRS) berbasis pelayanan belum optimal
- Kebutuhan administrasi operasional pelayanan semakin meningkat
- Kebutuhan fungsi administrasi dan manajemen rumah sakit semakin meningkat

Upaya pemecahan masalah :

- Pemenuhan kebutuhan internet secara bertahap
- Pengendalian penggunaan internet yang lebih efisien
- Pengawasan dan pengendalian SIRS di unit kerja lebih ditingkatkan
- Sosialisasi berkelanjutan agar dapatnya akselerasi integrasi dan peningkatan kinerja rumah sakit
- Perlu diinisiasi adanya *Smart Card* bekerja sama dengan pihak ke tiga
- Pemenuhan aplikasi / software yang berbasis elektronik sebagai implementasi e-Gov

4) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 149.492.800.921,00 dan terealisasi sebesar Rp. 76.232.393.147,00 atau (50,99%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program)

- Secara fisik kegiatan ini telah menyelesaikan perencanaan konstruksi untuk pembangunan gedung Kemoterapi medis dan talasemia.
- Alokasi anggaran yang disediakan untuk pengadaan alat kedokteran. Alat kedokteran rencananya akan ditempatkan pada Instalasi Radiodiagnostik, IDIK, IBP, IRD dan diharapkan dengan penambahan alat kedokteran tersebut kualitas pelayanan akan meningkat.

Tabel 4.2.2.2
Kinerja Pelayanan Per Kategori Operasi di IBP
RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012 – 2014

No	Jenis Operasi	Jumlah Pasien/Tahun			Jumlah	Rerata
		2012	2013	2014		
1	Sedang	3764	5382	5414	14560	4853
2	Besar	3820	5650	6526	15996	5332
3	Khusus	163	260	291	714	238
4	Canggih	1698	1176	1418	4292	1430
	Jumlah	9445	12468	13649	35562	11853

Sumber : Bulanan IBP tahun 2014

- Tabel di atas menggambarkan bahwa RSUD Dr Soetomo yang memiliki SDM Medik Sub Spesialis bertaraf Internasional yaitu operatif kategori operasi khusus dan canggih dan selama tiga tahun jumlah operasi yang dilakukan di IBP mengalami kenaikan sebesar 15,15%.

Tabel 4.2.2.3
Jumlah Operasi Per Kategori Tindakan Medik di IBP
RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012 – 2014

No	Jenis Tindakan Medik	Tahun			Jumlah	Rerata
		2012	2013	2014		
1	Bedah Orthopaedi	1359	1395	1398	4152	1384
2	Bedah Saraf	615	627	645	1887	629
3	Bedah Plastik	503	493	526	1522	507
4	Bedah Digestif	631	670	717	2018	672
5	Bedah Thoraks Kar	895	944	865	2704	901
6	Bedah Anak	408	401	462	1271	423
7	Bedah Onkologi	411	448	455	1314	438
8	Bedah Kepala Leher	581	601	642	1824	608
9	Urologi	1344	1334	1178	3856	1285
10	THT	561	605	589	1755	585
11	Mata	1088	1104	1254	3446	1148
12	Obsgyn	985	996	937	2918	972
13	Gilut	64	56	171	291	97
	Jumlah	9445	9674	9839	28958	9649

Sumber : Bulanan IBP tahun 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah operasi yang dilakukan selama tiga tahun mengalami kenaikan sebesar 1,97% dan rerata operasi lakukan pertahun sebanyak 9649 operasi. Alat medik yang memadai sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu tindakan operatif.

- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal alat alat angkutan, belanja modal peralatan,perlengkapan kantor dan rumah tangga, belanja modal alat-alat kedokteran.
- Alokasi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit berupa belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja bahan bakar minyak/gas/pelumas alat operasional, belanja peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis dan belanja alat kesehatan pakai habis.
- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja cetak dan penggandaan berupa form rekam medik dan administrasi rumah sakit.

- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat kedokteran untuk menggantikan/memenuhi alat kedokteran yang rusak sehingga proses pelayanan terus berjalan dengan baik.
- Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi peralatan kedokteran di Graha Amerta.
- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat kedokteran untuk penderita paru dan jantung.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Pembangunan gedung PPJT belum selesai
- Banyak peralatan medis yang rusak dan aus
- Kelengkapan form rekam medik berupa terkait dengan persyaratan akreditasi

Upaya pemecahan masalah :

- Pembangunan gedung PPJT diusulkan pembangunannya pada tahun 2015
- Pengadaan peralatan kedokteran untuk menggantikan alat yang rusak atau menambahkan jumlah alat terkait dengan jumlah pasien yang dilayani
- Mencetak form rekam medik yang sesuai dengan persyaratan akreditasi

5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

a) Paagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 40.379.734.805,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.943.411.822,00 atau (93,97%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program)

- Alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan pemeliharaan ringan gedung dan bangunan.

- Alokasi anggaran yang disediakan digunakan untuk belanja jasa perijinan dan administrasi, pemeliharaan ringan jalan, irigasi, instalasi dan jaringan, dan belanja modal alat-alat berat.
- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja pengganti suku cadang alat operasional, belanja sertifikasi dan kalibrasi dan pemeliharaan ringan peralatan dan mesin. Kegiatan sertifikasi dan kalibrasi yang dilakukan bertujuan supaya alat kedokteran dapat berfungsi secara baik dan memperpanjang usia pakai alat tersebut.

Tabel 4.2.2.4
Jumlah alat yang dikalibrasi
RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012-2014

No	Uraian	Jumlah Kalibrasi Per Tahun		
		2012	2013	2014
1	Usulan	710	710	710
2	Realisasi	792	879	954

Sumber : Laporan Instalasi Pemeliharaan Sarana Medis Tahun 2014

Jumlah alat yang diusulkan untuk dilakukan kalibrasi sebanyak 710 alat kedokteran. Dan realisasi alat yang dikalibrasi sebanyak 954 alat kedokteran (134,36%). Fungsi dari kalibrasi adalah supaya alat kedokteran dapat berfungsi secara baik dan memperpanjang usia pakai alat.

- Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pemeliharaan ringan peralatan dan mesin (service mesin ketik, cetak, komputer dan printer).
- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan ringan peralatan dan mesin.
- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja alat listrik dan elektronik, bahan baku bangunan (jaringan air), pengganti suku cadang alat-alat operasional, pemeliharaan ringan jalan, irigasi, instalasi dan jaringan (jaringan air, listrik, telepon).

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Sebagian gedung pelayanan atau managent mengalami kerusakan/ kebocoran.
- Tersumbatnya (rusak) jaringan irigasi akan mengganggu kondisi lingkungan (kotor)
- Tingkat kerusakan alat kedokteran sangat mengganggu pelayanan

Upaya pemecahan masalah :

- Pemeliharaan atau rehab gedung pelayanan atau management serta lingkungan rumah sakit sangat diperlukan supaya pasien merasa nyaman dan kesan kumuh yang selama ini melekat pada rumah sakit pemerintah dapat dihilangkan
- Pemeliharaan dan kalibrasi alat-alat kedokteran bertujuan untuk menjaga kualitas dan keakuratan alat serta memperpanjang usia pakai alat tersebut.

6) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 113.029.452.218,00 dan terealisasi sebesar Rp. 123.632.558.279,00 atau (109,38%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program)

- Alokasi anggaran yang disediakan untuk belanja KSO pelayanan medis.
- Alokasi anggaran yang disediakan digunakan untuk belanja honorarium pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi, jasa dokumentasi dan publikasi dan perjalanan dinas luar daerah.

Tabel 4.2.2.5
Cakupan Pasien Rawat Inap Per Kategori Pasien
RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012 – 2014

No	Unit Kerja	Jumlah Pasien/Tahun			Jumlah	Rerata
		2012	2013	2014		
1	Irna Medik	18586	18459	18650	55695	18565
2	Irna Anak	8611	9561	8432	26604	8868
3	Irna Obsgyn	9694	8931	8446	27071	9023
4	Irna Bedah	14517	16223	15750	46490	15496
5	Irna Jiwa	619	533	429	1581	527
	Jumlah	52027	53707	51707	157441	52479

Sumber : Laporan Irna 2014

Dari tabel di atas terlihat jumlah pasien yang dirawat selama tiga tahun mengalami penurunan sebesar 1,47%. Sementara untuk pasien Irna Medik dan Irna Bedah mengalami kenaikan. Sementara untuk Irna Obsgyn mengalami penurunan hal ini disebabkan pertolongan persalinan / partus normal dapat dilakukan oleh bidan di daerah atau rumah sakit di kabupaten kota, sehingga tidak perlu dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo.

- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasional rawat inap utama (Griu). Cakupan pasien rawat inap utama selama tiga tahun berturut-turut (2012 s/d 2014) mengalami kenaikan sebesar 11,08%.

Tabel. 4.2.2.6
Cakupan pelayanan rawat inap utama di Graha Amerta
RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012-2014

No	Kelas Perawatan	Jumlah pasien / tahun			Jumlah
		2012	2013	2014	
1	V VIP	2370	2971	3232	8573
2	VIP	13218	12026	13951	39195
3	Utama I	16906	18406	22399	57711
4	Utama II	4116	3872	4482	12470
5	Utama III	5986	5793	6300	18079
	Jumlah	42596	43068	50364	136028

Sumber : laporan Graha Amerta Tahun 2014

- Anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasional Dewan Pengawas.

- Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan (DAK). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja alat kedokteran di IGD, tempat tidur kelas III dan alat pengelolaan limbah cair.

Tabel 4.2.2.7
Jumlah Kunjungan Pelayanan Rawat Darurat RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012-2014.

No	Kategori Pasien	Jumlah Pasien/Tahun			Jumlah	Rerata
		2012	2013	2014		
1	Umum	37134	35162	42314	114610	38203
2	Askes	11988	11006	12150	35144	11714
3	Astek	3934	4281	161	8376	2792
4	JPKTH	311	601	241	1153	384
5	PKS	1040	1405	806	3251	1083
6	Maskin	37915	40905	17689	96509	32169
	Jumlah	92322	93360	73361	259043	86345

Sumber : Laporan IRD 2014

Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi untuk wilayah Indonesia Timur, pasien-pasien yang dirujuk ke IRD selama tiga tahun mengalami penurunan sebesar 15,04%, penurunan ini dikarenakan RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit rujukan nasional. Sehingga tidak semua kasus dapat dirujuk ke rumah sakit Dr. Soetomo dan hanya kasus tertentu yang dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo.

- Kegiatan pendampingan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan (DAK) . Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan tempat tidur kelas III.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Alat kedokteran banyak yang rusak dan aus
- Tempat tidur kelas III usia lebih dari 10 tahun

Upaya pemecahan masalah :

- Pengadaan alat kedokteran untuk menggantikan alat yang rusak dan menambah jumlah alat kedokteran supaya penggunaan alat tersebut secara kuantitas mencukupi.
- Untuk memberikan kenyamanan kepada pasien yang dirawat inap terutama kelas III, penggantian tempat tidur sangat diperlukan khusus untuk pasien di Irna Anak dan Irna Obgyn supaya lebih aman.

7) Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 3.052.240.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.676.252.767,00 atau (87,68%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program)

- Alokasi anggaran yang disediakan digunakan untuk belanja honorarium kegiatan, transportasi, akomodasi dan konsumsi, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- Alokasi anggaran yang disediakan digunakan untuk belanja pelatihan HIV AIDS. Rumah sakit yang diundang untuk mengikuti pelatihan HIV AIDS adalah :

Tabel 4.2.2.8
Peserta pelatihan HIV / AIDS Tahun 2014

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah
1	RSUD dr.H. Moh Anwar Sumenep	5
2	RSUD Genteng	5
3	RSUD Kanjuruhan Kepanjen	3
4	RSUD dr. Soebandi Jember	4
5	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	5

Sumber : Bidang DIKLAT Tahun 2014

Dengan diikut sertakan beberapa rumah sakit di wilayah Jawa Timur diharapkan penyebaran dan penanganan penyakit HIV/AIDS dapat dikendalikan.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Peningkatan kualitas tenaga pengajar
- Penyebaran penyakit HIV AIDS

Upaya pemecahan masalah :

- Memberikan ketrampilan kepada tenaga pengajar untuk selalu meningkatkan kemampuan dengan mengikuti kegiatan (workshop) diluar rumah sakit
- Memberikan pelatihan kepada tenaga medis untuk lebih trampil dalam pencegahan penyakit HIV AIDS

2.3 DINAS RSUD Dr.SAIFUL ANWAR MALANG

a. Sasaran tahun 2014

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi dan manajemen Rumah Sakit;
- 2) Meningkatnya efisensi dan mutu pelayanan Rumah Sakit;
- 3) Meningkatnya pengembangan layanan kesehatan terpadu;
- 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian;
- 5) Meningkatnya kompetensi SDM.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 7.035.951.010,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.700.555.425,00 atau 109.45%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

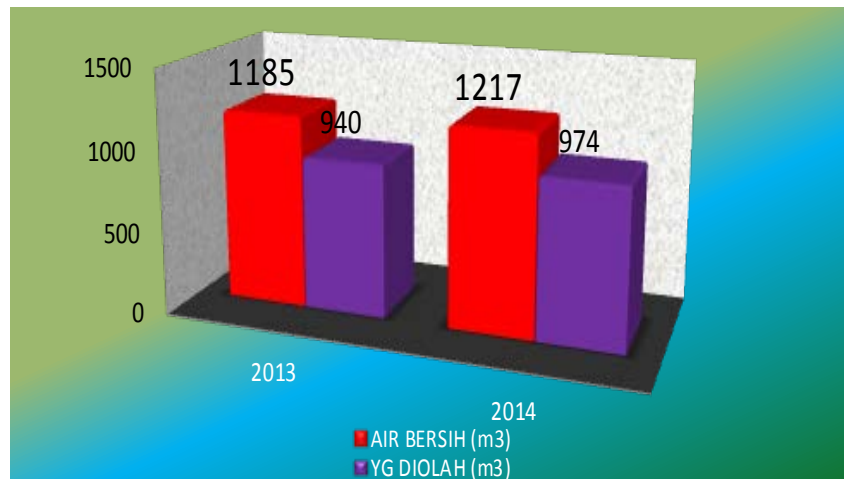
Program Pengembangan Lingkungan Sehat didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Rumah Sakit

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

1. Hasil pelaksanaan program./kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Terciptanya kebersihan ruangan dan lingkungan rumah sakit sehingga tercipta ruangan yang bersih setiap saat telah terealisasi sebesar 100%.
- Terlaksananya pengelolaan air limbah dan emisi gas buang. Kualitas air dan limbah (BOD, COD) di RSSA diperiksa di laboratorium setiap bulan dengan menggunakan 8 (delapan) parameter sedangkan untuk emisi gas buang diperiksa setiap 6 bulan. Kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100%.

Gambar 4.2.3.1
Grafik Pengolahan Air Limbah



- Terlaksananya pengelolaan sampah baik medis maupun non medis. Jenis sampah dibedakan berdasarkan warna kresek atau warna tempat sampah. Sampah medis menggunakan kresek atau tempat sampah berwarna kuning, sedangkan untuk sampah umum menggunakan kresek atau tempat sampah warna hijau. Perlakuan terhadap masing-masing sampah berbeda. Untuk sampah medis akan langsung dibakar ke incinerator, sedangkan sampah umum akan di buang ke TPA. Petugas pengambil sampah harus di lengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai standar. Hal ini dimaksudkan agar petugas tidak terkontaminasi dari sampah tersebut, terutama sampah medis.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Masih banyaknya keluhan baik dari karyawan rumah sakit, keluarga pasien maupun pasien mengenai air yang keruh, baik di kamar mandi maupun di tandon-tandon air.
- Untuk menuju green hospital secara bertahap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang menerapkan prinsip 3 R (*reduce, recycle, reuse*) dimana sampah dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak baik bagi pasien maupun warga disekitar di rumah

sakit. Sampah di rumah sakit telah di kategorikan dalam 2 kategori yaitu sampah medis dan sampah non medis. Saat ini sampah non medis telah dikelola dengan baik, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang telah bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengelola sampah tersebut. Sedangkan untuk sampah medis RSUD. Saiful Anwar Malang masih mempunyai 2 (dua) incenerator yaitu berkapasitas 200 kg dan 400 kg. Volume sampah yang harus dibakar setiap harinya rata-rata sebesar 1.413,88 kg. Meskipun telah ada 2 (dua) incenerator akan tetapi operator untuk alat tersebut masih kurang, karena 1 (satu) incinerator memerlukan waktu 8 (delapan) jam untuk menghancurkan sampah dan 2 (dua) jam untuk mendinginkan sebelum alat dipakai kembali. Saat ini incinerator yang berkapasitas 400 kg memerlukan perbaikan ruang bakar secara menyeluruh, hal ini disebabkan karena *incinerator* telah berusia 12 tahun.

- Masih banyak ditemukan perilaku para petugas pemberi pelayanan di ruangan yang mencampur limbah padat non medis dengan limbah padat medis dalam satu wadah yang sama.

Upaya pemecahan masalah

- Mengenai pengolahan air bersih dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
 - Pengelolaan air bersih yang secara kuantitas bisa digunakan untuk melayani ruang pelayanan
 - Penataan jaringan pipa air
 - Pengadaan water treatment untuk sumber air bawah tanah untuk mengurangi kekeruhan
 - Pengadaan pompa untuk memenuhi tekanan air di ruangan
- Penambahan tenaga operator *incinerator* berguna agar sampah medis bisa dihancurkan secara maksimal. Operator bekerja dengan sistem shift sehingga pembakaran dapat dilakukan

sehari 2 kali agar tidak terjadi penumpukan sampah medis yang berbahaya bagi lingkungan sekitar.

- Mengelola limbah padat medis dengan cara:
 - Melaksanakan pengolahan limbah padat medis sesuai dengan aturan yang berlaku memenuhi proper
 - Penataan gudang TPS B3
 - Penataan jaringan LPG dan gudang LPG
 - Memasang pagar pembatas incinerator dengan tempat abu incinerator

2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 109.026.624.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 92.131.878.267,00 atau 84.50%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program./kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Terlaksananya pengadaan alat kedokteran terealisasi sebesar 100%
- Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan/dinas RS terealisasi sebesar 100%.
- Terlaksananya pembangunan gedung kegawatdaruratan terealisasi sebesar 100%.
- Terlaksananya pengembangan poliklinik paru terealisasi sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- RSUD dr. Saiful Anwar merupakan rumah sakit tipe A, maka IGD yang dimiliki harus level 4. Yang diperlukan dalam menuju IGD level 4 terkendala dengan sarana gedung dan prasarana ruang yang belum memadai, peralatan penunjang yang belum memadai.
- Pembangunan gedung ibu dan anak tidak dapat terlaksana karena gagal lelang yang dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Timur.
- Pembangunan gedung CVCU tidak dapat terlaksana 100% karena pada pelaksanaannya putus kontrak (kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya).

Upaya pemecahan masalah

- Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar IGD.
- Mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan gedung Ibu dan Anak (*Perinatologi*)
- Pengusulan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian pembangunan CVCU.

3) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 9.392.461.874,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.892.917.460,00 atau 94.68%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program./kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Terlaksananya perbaikan gedung dan bangunan RS yang terealisasi sebesar 100%
- Terlaksananya perbaikan peralatan dan mesin di RS telah terealisasi sebesar 100%

c) **Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah**

Permasalahan

- Berdasarkan UU RI No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung bagian ketiga pasal 18 perihal persyaratan keselamatan, bahwa rumah sakit harus dilengkapi dengan Ramp (transport vertikal untuk evakuasi) dengan kemiringan $< 7^{\circ}$.
- Peralatan medis perlu dikalibrasi agar ketepatannya akurat. SDM yang belum terlatih untuk mengkalibrasi sendiri menyebabkan peralatan masih harus dikalibrasi di BPFK (eksternal).

Upaya pemecahan masalah

- Saat ini pembangunan gedung yang dilengkapi dengan Ramp terletak pada gedung CVCU.
- Mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan kalibrasi di BPFK, sehingga peralatan yang bisa di kalibrasi internal di RSSA, tidak perlu lagi dikalibrasi keluar RSSA. Melengkapi peralatan agar dapat mengkalibrasi peralatan secara internal.

4) **Program Upaya Kesehatan Perorangan**

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 209.873.198.320,00 dan terealisasi sebesar Rp 258.000.015.257,00 atau 122,93%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana RS pengadaan tempat tidur pasien terealisasi sebesar 100%
- Terpenuhinya alat kesehatan pakai habis, pakaian kerja lapangan, alat kedokteran, dan alat kesehatan perawatan terealisasi sebesar 100%

- Terpenuhiya pengadaan dan pemeliharaan alat kedokteran rawat jalan, bedah, forensik, Gimu, mata dan rawat inap terealisasi sebesar 100%
- Terpenuhiya kebutuhan alat kesehatan pakai habis dan pemeliharaan alat kedokteran rawat inap terealisasi sebesar 100%
- Terpenuhiya kebutuhan operasional pelayanan R Inap Utama di RS terealisasi sebesar 100%.
- Terpenuhi pengadaan alat kedokteran IGD dan tempat tidur terealisasi sebesar 100%
- Terpenuhiya pengadaan bahan kimia dan laboratorium, pengadaan alat laboratorium
- Terpenuhiya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit terealisasi sebesar 100%
- Terpenuhiya kebutuhan alat kesehatan pakai habis & pemeliharaan alat kedokteran rehabilitasi medik terealisasi sebesar 100%
- Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit terealisasi sebesar 100%
- Terpenuhiya obat-obatan bagi pasien terealisasi sebesar 100%
- Terpenuhiya pengadaan alat rumah tangga pakai habis, kereta makan, modal peralatan rumah tangga, makan minum pasien dan kegiatan terealisasi sebesar 100%.
- Terpenuhiya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat terealisasi sebesar 100%.
- Terpenuhiya pengadaan tempat tidur pasien kelas III terealisasi sebesar 100%.
- Terciptanya kelancaran tugas dewan pengawas BLUD terealisasi sebesar 100

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Permasalahan

- Berdasarkan SPM kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan masih tercapai sebesar 76.42% sedangkan target sebesar 100%.
- Berdasarkan SPM kelengkapan *Informed Consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas yang tercapai sebesar 49.16% dengan target sebesar 100%, faktor-faktor penyebab antara lain ketelitian yang kurang pada petugas pemberi informasi, kurangnya pemahaman faktor legal pada petugas yang bersangkutan, tidak dilengkapinya tanda tangan saksi.

Upaya Pemecahan Masalah

- Menugaskan perawat agar mengingatkan para dokter untuk segera melengkapi Dokumen Rekam Medik (DRM), dan perlu diadakan sosialisasi pengisian dan kelengkapan DRM untuk pasien yang sudah pulang.
- Perlu diadakan sosialisasi tentang pentingnya *inform consent* dalam kaitannya dengan hukum, dan pentingnya dibuatkan tindak lanjut berupa umpan balik ke setiap ruangan dan SMF mengenai kelengkapan *inform consent*.

d) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

Kategori A dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2014 di tingkat regional

5) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 2.527.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.017.247.100,00 atau 79.80%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan, Pengembangan Manajemen Perencanaan dalam Bidang Kesehatan

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Meningkatnya SIM pelayanan RS dengan terealisasinya E-Resep
- Tersedianya gelang pasien dengan menggunakan barcode sebesar 100%
- Tersedianya viewer laboratorium sebesar 100%
- Tersedianya E-Gizi sebesar 100%
- Tersedianya E-Rekam Medik sebesar 100%

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Respon time pasien yang dilayani tidak berdasarkan urutan kedatangan khususnya di Rawat Jalan menyebabkan antrian yang tidak rapi dan terjadi complain karena kesalahan menangani pasien yang datang karena tidak mengetahui waktu kedatangan.
- Kapasitas penyimpanan server terbatas sedangkan back up untuk semua database secara terpusat yang membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Komputer yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar masih banyak yang menggunakan sistem operasi yang tidak berlisensi, dan masih banyaknya PC dengan spesifikasi lama

Upaya pemecahan masalah

- Untuk memperbaiki respon time pasien RSSA melengkapi sistem antrian secara digital di loket-loket pembayaran, di loket pendaftaran serta poliklinik
- Meningkatkan kemampuan server, dengan mengganti komputer jaringan yang out of date, meningkatkan kualitas jaringan, dan menyediakan bandwidth internet yang memadai.

6) Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 6.662.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.141.107.056,00 atau 92.18%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Terpenuhinya pembiayaan tugas belajar bagi karyawan RS terealisasi sebesar 100%
- Terlaksananya kegiatan kursus singkat dan pelatihan terealisasi sebesar 100%
- Terpenuhinya honorarium kegiatan dan pengadaan kebutuhan penelitian terealisasi sebesar 100%
- Terpenuhinya honorarium kegiatan dan pengadaan kebutuhan BLS/BCLS/ATLS terealisasi sebesar 100%

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Tenaga non medis masih kurang mendapatkan pelatihan inhouse training, saat ini pelatihan yang didapatkan masih bersifat perorangan.
- Tuntutan untuk meningkatkan jenjang pendidikan pegawai juga sejalan dengan tuntutan dalam memberikan pelayanan, sehingga apabila harus ditinggalkan oleh pegawai yang sedang tugas belajar, maka seharusnya pelayanan tidak terganggu.

Upaya pemecahan masalah

- Menyelenggarakan inhouse training secara merata terhadap profesi non medis lainnya.
- Upaya meningkatkan kualitas pegawai dengan mengirim pegawai untuk melaksanakan pendidikan, akan tetapi diupayakan agar

pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas, sehingga pegawai yang melaksanakan pendidikan tetap dapat memberikan pelayanan.

d) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

Tabel 4.2.3.1

Penghargaan RSUD Dr. Saiful Anwar dari tahun 2011-2014

No	Nama Penghargaan	Tahun	Pemberi Penghargaan	Ditetapkan dengan Surat/Keputusan
1	Excellent Medal oleh QCC Padi Instalasi Farmasi pada Internasional Convention on Quality Control Circle (ICQCC)Yokohama-Japan, 9-16 September 2011	2011	Organizing Committee ICQCC	Yokohama-Japan, 16 September 2011
2	Medali Emas Oleh QCC Wijaya Kusuma Instalasi Anastesi Balikpapan-Kaltim, 28 November – 2 Desember 2011	2011	Indonesia Quality Convention (IQC)	Madiun, 2 Desember 2011
3	Medali Emas Oleh QCC Sehati Instalasi Gizi Balikpapan-Kaltim, 28 November – 2 Desember 2011	2011	Indonesia Quality Convention (IQC)	Madiun, 2 Desember 2011
4	Three Star Award Oleh QCC Sehati & QCC Wijaya Kusuma, pada Internasional Convention on Quality Control Circle (ICQCC) Malaysia 14-17 Oktober 2012	2012	Malaysia Produktivity Competition	Malaysia, 17 Oktober 2012
5	Gold Medal Award oleh QCC Tarantula & QCC Carabeli Indonesia	2012	PMMI IQMA	Menado, 29 November 2012

No	Nama Penghargaan	Tahun	Pemberi Penghargaan	Ditetapkan dengan Surat/Keputusan
	Convention on Quality Control Circle, Manado 26-29 November 2012			
9	Juara I Hospital Dietetic Contest	2013	Kalbe Akademika, ASDI	Sanur, Bali 23 November 2013
11	Pemenang Terbaik Kategori Patient Sfaety Project pada "Indonesian Hospital Management Award	2014	PERSI- IHMA	Jakarta

2.4 RSUD Dr. SOEDONO MADIUN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi seluruh masyarakat.
- 2) Meningkatnya mutu pendidikan

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata sebesar Rp. 42.370.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.363.122.850,00 atau 36,26%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD realisasi sebesar 97,95%

Terwujudnya ruang premediksi dan post operasi sesuai standar dan tersedianya peralatan kedokteran yaitu :

- Extracorporeal Shock Wave Liptotriksi (ESWL),
- tempat tidur 3 crank,
- Camera system Image I HD + Instrument TUR Set,
- Panoramic dental x ray,
- THT Chair,
- Biological savety cabinet,
- Blood warmer,
- Orthopaedi set,
- Minor Sugery,
- Patient Control Analgesia (PCA),
- Water Silf Drainase (WSD),
- Tensimeter air raksa,

- Tensimeter beroda,
 - Stetoskop,
 - Doppler,
 - Termometer non contact dan tensimeter dinding
- Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan menyediakan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat Dampak Asap Rokok realisasi sebesar 16,27%
- Terpenuhinya gedung dan peralatan kedokteran untuk ruang diagnostic dan perawatan penyakit jantung, paru dan syaraf melalui dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT)
- Peralatan kedokteran yang menggunakan dana bagi hasil cukai (DBHCHT) antara lain :
- X-Ray fluroscopy,
 - Bed Side Monitor,
 - ECG 3 chanel,
 - Ultra Violet Lamp,
 - Roller Mixer.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan dan Kunjungan Rawat Jalan RSUD dr. Soedono Madiun pada tabel berikut :

Tabel 4.2.4.1
Jumlah Kunjungan Klinik Rawat Jalan
Tahun 2012 s.d 2014 RSUD dr. Soedono Madiun

NO	POLIKLINIK	KUNJUNGAN			TREND 2013-2014
		2012	2013	2014	
1	Kebidanan/Kandungan	3.248	3.294	3.036	-258
2	Anak	3.255	4.031	3.391	-640
3	Mata	12.309	12.085	11.309	-776
4	Kulit dan Kelamin	6.441	6.809	5.569	-124
5	Jantung	29.999	28.046	25.483	-2.563
6	THT	6.985	7.830	7.287	-543
7	Interne/Penyakit Dalam	28.665	30.486	38.045	7.559
8	Syaraf	10.778	11.093	10.919	-174
9	Paru	5.433	4.967	4.227	-740

NO	POLIKLINIK	KUNJUNGAN			TREND
		2012	2013	2014	2013-2014
10	Gigi dan Mulut	4.529	4.109	3.923	-186
11	Bedah Orthopaedi	5.743	5.465	6.293	828
12	Bedah Umum	9.695	8.926	8.378	-548
13	Asih	2.288	3.210	2.218	-992
14	Rehabilitasi Medik	19.949	16.585	12.231	-4.354
15	Keluarga Berencana	492	718	529	-189
16	Gizi	563	338	777	439
17	General Check Up	1.487	1.374	1.892	518
18	Onkologi	229	25	-	-
19	Bedah Syaraf	1.440	1.650	1.905	255
20	Bedah Urologi	4.982	5.750	6.532	782
21	Endoscopy	59	121	101	-20
22	Poli Spesialis	24.075	25.408	25.943	535
Total		182.644	182.320	179.988	-2.332
Hari Buka		303	294	294	-
Rata-rata kunjungan/hari		620	640	612	

Tabel di atas menunjukkan bahwa kunjungan di klinik rawat jalan secara umum mengalami sedikit penurunan. Klinik yang mengalami penurunan signifikan adalah : Klinik Rehab Medik (26,25%), Jantung (9,14%), Asih (30,90%) dan Klinik Mata (6,42%). Penurunan kunjungan pasien dimungkinkan lebih tertanya sistem rujukan (lebih terseleksi). Sedangkan klinik yang mengalami kenaikan adalah klinik Interne/dalam (24,29%), klinik Bedah Orthopaedi (15,15%), klinik Gizi (129,88%), klinik General Check Up (37,70%), klinik Bedah Syaraf (15,45%), klinik Bedah Urologi (13,60%) serta klinik Spesialis (2,11%) dari total kunjungan rawat jalan.

Dalam tabel di atas menunjukkan tingkat kenaikan kunjungan di rawat jalan, hal ini masyarakat Madiun dan sekitar masih memandang RSUD dr. Soedono Madiun masih dibutuhkan.

Tabel 4.2.4.2
Jumlah Kunjungan Rawat Inap
Tahun 2012 s.d 2014 RSUD dr. Soedono Madiun

NO	URAIAN	KUNJUNGAN			TREND 2013-2014
		2012	2013	2014	
1	Jumlah Penderita Masuk	28.550	29.156	25.369	-3.787
2	Jumlah Hari Perawatan	89.368	89.016	78.821	-10.195
3	Jumlah Keluar Hidup	26.727	27.307	23.482	-3.825
4	Jumlah Kematian	1.868	1.854	1.938	84
5	Jumlah Tempat Tidur (TT)	370	374	325	-49
6	- ALOS (6-9Hari)	4	4	3	-1
	- BOR (60%-85%)	65,99	65,21	66,63	1,42
	- BTO (40-50 kali)	77	78	78	0
	- TOI (1-3 hari)	2	2	2	0
7	Angka Kematian :				
	- NDR ($\leq 25\%$)	34,80	31,34	38,83	7,49
	- GDR ($\geq 45\%$)	65,33	63,58	76,24	12,66

Sumber data : Seksi Rekam Medik

Pada Tabel di atas menunjukkan pelayanan di Rawat Inap tahun 2014 mengalami sedikit menurun jumlah penderita masuk (12,99%), jumlah hari perawatan (11,45%), jumlah keluar hidup (14,01%) dan jumlah tempat tidur pada tahun 2014 berkurang 49 tempat tidur dari tahun 2013. Tahun 2014 tempat tidur berkurang dikarenakan pada tahun 2014 ada kegiatan pembangunan di rawat inap : Melati (Anak), Unit Stroke, NICU, paviliun Merpati (kelas utama).

Tabel 4.2.4.3
Jumlah Kunjungan Rawat Darurat
Tahun 2012 s.d 2014 RSUD dr. Soedono Madiun

NO	URAIAN	KUNJUNGAN			TREND 2013-2014
		2012	2013	2014	
1	Jumlah Kunjungan	24.287	24.723	24.443	-280
	Kunjungan Baru	16.487	15.683	15.429	-254
	Kunjungan Lama	7.800	9.040	13.357	4.317
	Hari Buka	366	365	366	-
	Rata-rata kunjungan/Hari	66	68	67	-1

Sumber data : Seksi Rekam Medik

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan total kunjungan Rawat Darurat pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,13% dari tahun 2013. Penurunan kunjungan Rawat Darurat pada tahun 2014 disebabkan karena adanya sistem rujukan yang sudah terseleksi dengan baik.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan menyediakan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat Dampak Asap Rokok adalah :

Kegiatan konstruksi bangunan ruang diagnostic dan perawatan penyakit jantung, paru dan syaraf dari dana bagi hasil cukai (DBHCHT) tidak bisa terealisasi karena adanya perubahan pekerjaan dan pertimbangan dari tim perencana, manajemen konstruksi dan PU Cipta Karya bahwa secara fungsi bangunan gedung diagnostic dan perawatan penyakit jantung, paru dan syaraf belum bisa dimanfaatkan.

Upaya pemecahan masalah

- Kegiatan konstruksi bangunan ruang diagnostic dan perawatan penyakit jantung, paru dan syaraf dianggarkan kembali pada anggaran berikutnya.

2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata sebesar Rp. 4.339.384.500,00 terealisasi sebesar Rp. 3.818.696.760,00 atau 88,00%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Terpenuhinya bangunan gedung sesuai standar rumah sakit selama 12 bulan.

Terpenuhinya pemeliharaan instalasi pengolahan limbah padat dan cair sesuai standar rumah sakit selama 12 bulan.

Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit, tersedianya bahan kimia, suku cadang alat-alat operasional, sertifikasi dan kalibrasi sesuai standar rumah sakit selama 12 bulan.

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan rumah sakit

- Disusunnya RBA dan Rencana Kerja,
- Disusunnya LAKIP,
- Kegiatan Analisa Jabatan (ANJAB),
- Disusunnya Laporan Tahunan dan Profil,
- Kegiatan evaluasi kinerja BLUD dan Pelaksanaan APBD,
- Kegiatan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM),
- Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolah Limbah padat dan cair masih terkendala dengan adanya fluktuasi harga BBM, sehingga paket pembelian bahan tidak terlaksana karena anggaran tidak mencukupi.
- Paket pengiriman limbah B3 belum semuanya terserap karena jumlah limbah B3 kurang dari target (efisiensi biaya pengiriman)

Upaya pemecahan masalah

- Efisiensi penggunaan BBM dan koordinasi dengan pihak penyedia agar penyediaan BBM bisa tetap terpenuhi.
- Pengiriman limbah B3 dilakukan sesuai kebutuhan

3) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program Upaya Kesehatan Perorangan sebesar Rp. 91.116.228.218,00 terealisasi sebesar Rp. 77.892.922.731,00 atau 85,49%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Tersedianya peralatan kebersihan, alat rumah tangga pakai habis, pakaian khusus dan inventaris ruangan selama 12 bulan.
- Tersedianya peralatan kedokteran dan inventaris ruangan di rawat jalan selama 12 bulan.
- Terlaksananya kerjasama dengan pihak ketiga, peralatan rumah tangga dan pemeliharaan ringan gedung dan bangunan ruang rawat inap umum selama 12 bulan.
- Terlaksananya rehabilitasi berat gedung rawat inap utama, tersedianya perlengkapan operasional pakai habis dan alat kedokteran, tersedianya jasa loundrey serta pemeliharaan peralatan dan mesin selama 12 bulan.
- Tersedianya bahan laboratorium reagent, belanja sertifikasi dan kalibrasi, serta jasa pengujian laboratorium (rujukan partial) selama 12 bulan.
- Terpenuhinya biaya peningkatan pelayanan publik, belanja publikasi, belanja obat, penggandaan, belanja sewa stand dan pameran pelayanan publik selama 12 bulan.
- Tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai rumah sakit
- Tersedianya makan pasien di rawat inap umum dan rawat inap utama serta makan pasien yang beresiko tinggi selama 12 tahun
- Terlaksananya penyusunan standart pelayanan kesehatan terdiri dari dokumen akreditasi RS dan Dokumen ISO.
- Terlaksananya pengelolaan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

- Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kedokteran pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dana DAK : *Blood Band Refrigerator, Platelet Incubator, Platelet Agogator, Laboratory Refrigerator, Electric Tube Sealer, Plasma Extractor Micromatic, Platelet Box 18 L.*

Terpenuhinya peralatan kedokteran untuk IGD Rumah Sakit dana DAK : Defibrilator.

Terpenuhinya pemeliharaan gedung Bank Darah Rumah Sakit, dana pendamping DAK.

c) Penghargaan Nasional yang diterima

- Penghargaan Profesional Award Tahun 2014 sebagai Juara II
- Penghargaan Pameran Kesehatan Terbesar di Jawa Timur sebagai Juara II BOOTH TERBAIK

4) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp. 3.188.290.637,00 terealisasi sebesar Rp. 3.962.894.509,00 atau 124,30%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Terlaksananya kerjasama operasional SIM-RS, pelayanan medis dan penunjang, pelayanan Haemodialisa, seiring dengan jumlah pasien yang dilayani melebihi target yang ditentukan.
- Terlaksananya pengembangan penelitian program kesehatan dan survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebanyak 2 paket.

Hasil IKM kategori “BAIK”

5) Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program Sumber Daya Kesehatan sebesar Rp. 1.215.570.000,00 terealisasi sebesar Rp. 918.735.650,00 atau 75,58%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Terselenggaranya kegiatan Bakordik (Badan Koordinator Pendidikan) dan pelatihan teknis dan fungsional.
- Terselenggaranya kegiatan Akreditasi Pendidikan dan kegiatan praktek kerja lapang Mahasiswa dan Magang.
- Terselenggaranya pelatihan teknis dan fungsional baik medis, paramedis maupun non medis di dalam/luar rumah sakit sejumlah 658 orang.

2.5. RSU HAJI SURABAYA

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- 2) Meningkatnya kualitas SDM Rumah Sakit Pendidikan
- 3) Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar RS Kelas B Pendidikan

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pada Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata pagu anggaran sebesar Rp. 26.925.613.473,00 dan realisasi program adalah sebesar Rp. 24.562.576.289,00 atau sebesar 91,22%, sampai dengan bulan Desember 2014. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian program)

1. Terpenuhinya alat-alat kesehatan Rumah Sakit, diantaranya:
Pengadaan refrigerator obat dan reagen, bahan habis pakai CPAP, tabung oksigen kecil, handpiece, suction pump, waterbath, apron, tensimeter mobile, almari obat, trolley obat, manometer dan flowmeter 5 set, overbed table 2 buah. Untuk tingkat pemenuhan alat-alat tersebut realisasinya adalah 100% dari target sebesar 100%. Alat – alat kesehatan tersebut mendukung untuk akurasi diagnosa pada pasien akibat dampak rokok terutama yang terkait dengan jantung , saraf, paru dan rehabilitasi medis.
2. Terpenuhinya alat-alat kedokteran (bedah dan penunjang) diantaranya : bedah THT, ultrasound diathermi, centrifuge, ECG 3 channel. Tingkat pemenuhan alat sebesar 100% dari target 100%.

3. Terpenuhinya perlengkapan rumah tangga RS dan gorden. Tingkat pemenuhan alat sebesar 100% dari target 100%.
4. Terbangunnya gedung untuk fasilitas pelayanan (ruang rawat inap VVIP, VIP, kelas I, II, III bagi penderita akibat dampak asap rokok).
5. Terbangunnya gedung ICU, ICCU, NICU untuk pasien akibat dampak rokok dan pengadaan alkes.
6. Tersedianya alat kedokteran bedah sentral, hemodialisa dan alat kedokteran perawatan.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan dari Kunjungan Poli di Instalasi Rawat Jalan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2.5.1
Jumlah Kunjungan Poli Rawat Jalan
RSU Haji Surabaya Tahun 2012 -2014

NO.	Poliklinik	Kunjungan Tahun			Trend 2013 - 2014
		2012	2013	2014	
1	Klinik Tumbuh Kembang	436	435	469	7,82
2	Poli Anak	9.140	9324	7621	- 18,26
3	Poli Bedah	10.866	12015	12299	2,36
4	Poli Bedah Plastik	609	724	871	20,30
5	Poli Bedah Saraf	510	555	737	32,79
6	Poli Dalam	26.947	29004	31046	7,04
7	Poli Endoscopy	1.746	1749	2735	56,38
8	Poli Gigi & Mulut	10.306	10548	10183	-3,46
9	Poli Gizi	660	683	555	-18,74
10	Poli Hamil	3.207	3808	3501	-8,06
11	Poli Jantung	23.241	25967	27566	6,16
12	Poli Jiwa	607	707	764	8,06
13	Poli Kandungan	6.762	6680	8316	24,49
14	Poli Kosmetik	1.537	1489	1346	-9,60
15	Poli Kulit & Kelamin	6.917	6663	6114	-8,24
16	Poli Mata	9.632	10594	11029	4,11
17	Poli Medical Checkup	2.230	2845	2664	-6,36
18	Poli Orthopedi	4.251	4731	5662	19,68
19	Poli Paru	8.561	8784	8834	0,57

20	Poli Pegawai	274	66	22	-66,67
21	Poli Psykology	115	133	170	27,82
22	Poli Respirologi Anak	971	790	948	20,00
23	Poli Syaraf	18.530	20397	20701	1,49
24	Poli THT	7.675	8442	8020	-5
25	Poli Urologi	5.264	5874	7777	32,40
26	Poli Rehabilitasi Medis	27.003	25577	25013	-2,21
27	Poli Paliatif	66	72	70	-2,78
28	Poli Bayi	1.259	1408	1472	4,55
29	Poli Bronscoscopy bayi	3	1	3	200
30	Poli Darul Hafidz	1	68	108	58,82
31	Poli Diabetes	-	-	37	0,00
32	Poli Imunisasi	-	-	93	0,00
33	Poli Hematologi Onkologi	-	-	30	0,00
34	Poli Hemodialisa	-	7940	8915	12,28
Total		189.326	208.073	215.691	3,66
Hari buka		246	245	243	-
Rata-rata kunj/hari		770	849	888	-

sumber : RSUD haji

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kunjungan poli secara umum mengalami kenaikan. Poli yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah : poli penyakit endoscopy (56,38%), poli bedah syaraf (32,79%), dan poli kandungan (24,49%), dan poli urologi (32,40%) dari total kunjungan. Sedangkan kunjungan poli yang mengalami penurunan secara signifikan adalah poli gizi (18,74%) dan poli anak (18,26%) dari total kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Haji Surabaya dengan dukungan peralatan kedokteran penunjang yang semakin lengkap merupakan rumah sakit pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di RSUD Haji Surabaya semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke semua poli secara umum dari tahun ke tahun.

Hasil dari Pengadaan Alat Kesehatan pada Instalasi radiologi sebagai sarana penunjang pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.5.2
Jumlah Tindakan Pemeriksaan
di Instalasi Radiologi RSUD Haji Surabaya Tahun 2010-2014

No	Uraian	Jumlah Tahun					Trend 2013- 2014
		2010	2011	2012	2013	2014	
A	Radiodiagnostik	18.481	19.195	19.771	24.718	22.655	2,5
	a. Foto tanpa bahan kontras	17.860	18.895	19.398	21.774	22.267	2,26
	b. Foto dengan bahan kontras	621	300	373	328	388	18,29
B	Foto Gigi	279	303	582	856	1.148	34,11
	a. Dento alveolar	279	303	582	307	181	-41,04
	b. Panoramic	-	-	-	549	967	76,14
C	CT Scan	1.407	1.539	1.634	1.726	1.514	- 12,28
	a. Di kepala	1.198	1.316	1.425	1.540	1.346	-12,60
	b. Di luar kepala	209	223	209	186	168	-9,68
D	Imaging pencitraan	5.123	3.137	3.654	3.360	3.587	6,76
	USG	5.123	3.137	3.465	3.101	3.238	4,42
	MRI	-	-	189	259	349	34,75
Total		25.290	24.174	25.406	28.078	28.904	2,94

Pada tabel diatas terlihat bahwa kegiatan pemeriksaan pada instalasi radiologi mengalami kenaikan sebesar 2,94 % pada tahun 2014. Untuk alat radiologi yang belum terpenuhi adalah Foto mamografi, namun alat tersebut sudah diusulkan untuk pengadaan alat kesehatan di tahun 2015.

Tabel 4.2.5.3
Jumlah Tindakan Pemeriksaan
di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Haji Surabaya Tahun 2013-2014

No	Jenis Tindakan	Tahun		Trend 2012 - 2014
		2013	2014	
1	Medis	9450	8619	-8,79
2	Fisioterapi	75628	90140	19,19
a	Latihan Fisik	14883	26130	75,57
b	Aktinoterapi	3863	5437	40,75

No	Jenis Tindakan	Tahun		Trend 2012 - 2014
		2013	2014	
c	Elektroterapi	55810	58103	4,11
e	Traksi Lumbal dan Cervikal	741	449	-39,41
f	Lain-lain (Inebulezer dan CF)	331	21	-93,66
3	Okupasi	4351	8078	85,66
4	Terapi Wicara	973	4743	387,46
5	Ortotik Prostetik	218	176	-19,27
	Jumlah	90,620	111,756	23,32

Pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat kenaikan terhadap jumlah tindakan pada Instalasi Rehabilitasi Medik sebesar 23,32 % pada tahun 2014.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Pada pelaksanaan program ini ditemukan permasalahan yaitu ada sedikit keterlambatan pengadaan dari jadwal yang sudah direncanakan karena proses pengadaan melalui lelang yang dilaksanakan oleh ULP Propinsi Jawa Timur.

d) Penghargaan Nasional Yang Diterima

Penghargaan penampilan terbaik lomba KBK Tingkat Nasional di Solo Tahun 2014

2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan pagu anggaran sebesar Rp. 42.017.157.452,00. Realisasinya adalah Rp. 43.904.221.973,00 (104,49%) sampai dengan bulan Desember 2014. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian program)

- Terpenuhiya obat-obatan (depo dan logistik) dan kebutuhan alat kesehatan untuk pasien.
- Peningkatan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Pada pelaksanaan program ini tidak ditemukan permasalahan karena kegiatan sesuai dengan perencanaan.

3) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata pagu anggaran sebesar Rp. 10.592.921.860,00. Realisasinya adalah Rp. 9.592.798.638,00 (90,56%) sampai dengan bulan Desember 2014. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian program)

- Terpeliharanya peralatan kedokteran RS
- Terpeliharanya gedung rumah sakit, gedung rawat inap, dan gedung penunjang terpelihara
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS)
- Terpeliharanya : AC, meubelair rumah sakit, instalasi pengolahan limbah rumah sakit, perlengkapan kantor dan peralatan *billing system*.
- Peralatan medis dapat berfungsi dengan baik
- Pemeliharaan ringan peralatan dan mesin (filter air, incenerator, limbah RS) dan irigasi serta jaringan sehingga kepuasan pasien dan karyawan dapat terpenuhi.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Pada pelaksanaan program ini tidak ditemukan permasalahan karena kegiatan sesuai dengan perencanaan.

4) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada Program Upaya Kesehatan Perorangan pagu anggaran sebesar Rp. 14.815.198.044,00. Realisasinya adalah Rp. 14.355.113.636,00 (96,89%) sampai dengan bulan Desember 2014. Pagu dan realisasi

anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian program)

- Peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
- Perlengkapan pelayanan rawat inap umum terlayani
- Peningkatan upaya kesehatan perorangan
- Linen dan souvenir pasien rawat inap utama terpenuhi
- Kepuasan pasien paviliun
- Bahan kimia reagen laboratorium terpenuhi
- Terlayaninya sterilisasi dan laundry
- Makan minum pasien terpenuhi
- Sertifikasi dan honor kegiatan terlaksana
- Terpenuhinya pelayanan promosi RS (leaflet, poster, spanduk, dokumentasi)
- Terpenuhinya honor pembinaan dewas BLUD
- Peralatan PONEK terpenuhi (Patient monitor with et CO2, CPAP, Pulse Oximeter Neonatus) dan peralatan IGD terpenuhi
- Tersedianya penghangat bayi dan viewer
- Tersedianya syringe pump
- Terpenuhinya peralatan untuk keperluan kegawatdaruratan RS

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Head Box 2 buah tidak direalisasikan karena alat tersebut bisa membahayakan bayi.

5) Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada Program Sumber Daya Kesehatan pagu anggaran sebesar Rp. 3.363.326.527,00, realisasinya sebesar Rp. 2.739.088.290,00 (81,44%) sampai dengan bulan Desember 2014. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian program)

- Peningkatan sumber daya kesehatan
- Terlatihnya karyawan baik tenaga medis, non medis, paramedis setelah adanya pelatihan
- Penelitian kesehatan terlaksana (IKM dan Peta Mikroba, penelitian Handrub) dan studi banding akreditasi pelayanan RS
- Meningkatnya persentase orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

- Ada 2 kegiatan penelitian tidak bisa terlaksana karena keterbatasan tenaga dan kesulitan dalam mengSPJkan biaya/jasa pengujian laboratorium
- Untuk pengadaan buku perpustakaan ada kendala didalam mendapatkan rekanan yang sanggup mendapatkan buku yang sesuai dengan pesanan (DPA), sedangkan rekanan lama tidak bisa dihubungi
- Ada salah satu orang yang mengundurkan diri tidak jadi sekolah
- Honor kegiatan kepaniteraan klinik dari FK UHT untuk bulan Nopember dan Desember 2014 baru dikirimkan bulan Januari 2015.

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pagu anggaran sebesar Rp. 64.017.636.344,00 Realisasinya adalah Rp. 66.477.052.712,00 (103,84 %). Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian program)

- Terpenuhinya dana untuk pembayaran rekening telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran multimedia
- Terpenuhinya persentase jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

- Terpenuhi honor pengelola keuangan, barang daerah dan system informasi
- Terpenuhi jumlah jasa pengujian laboratorium, pemenuhan alat-alat bengkel dan ukur, pemenuhan peralatan, perlengkapan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis, pemenuhan alat listrik dan elektronik, pemenuhan sertifikasi dan kalibrasi, pemenuhan jasa perijinan dan administrasi
- Terpenuhi belanja operasional peralatan rumah tangga
- Terpenuhi belanja makan dan minum
- Terpenuhi jasa pelayanan, honor pegawai tidak tetap BLUD dan lembur pegawai
- Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta narasumber

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Pada pelaksanaan program ini tidak ditemukan permasalahan karena kegiatan sesuai dengan perencanaan.

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pagu anggaran sebesar Rp. 2.890.995.000,00 Realisasinya adalah Rp. 2.251.956.410,00 (77,90%). Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian program)

- Terpenuhi jumlah peralatan, perlengkapan, kantor dan rumah tangga
- Terpenuhi jumlah pakaian dan atribut, peralatan, perlengkapan kantor dan rumah tangga, Terpenuhi peralatan billing sistem
- Terpenuhi honor pengelola keuangan, barang daerah dan system informasi

- Terpenuhiya pemeliharaan lift, genset, hydrant, dan penggantian suku cadang
- terselesaikannya dokumen Renstra, Renja, RKA, RBA, Lakip dan Laporan Tahunan

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

- Pada pelaksanaan program ini ada 1 kegiatan yang penyerapan dananya tidak maksimal sebesar 37,98%, yaitu pada kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan, monitoring, dan evaluasi program kegiatan, Dikarenakan banyak kegiatan yang tidak terlaksana.

2.6. RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di Rumah Sakit yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- 2) Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program program sebagai berikut :

1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Program

Pagu Program adalah sebesar Rp. 8.750.150.000,00 dan Realisasi Program sebesar Rp. 8.205.006.650,00, persentase capaian sebesar 93,77%, pagu dan realisasi serta capaian kinerja perkegiatan dirinci dalam matrik kolom 16.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

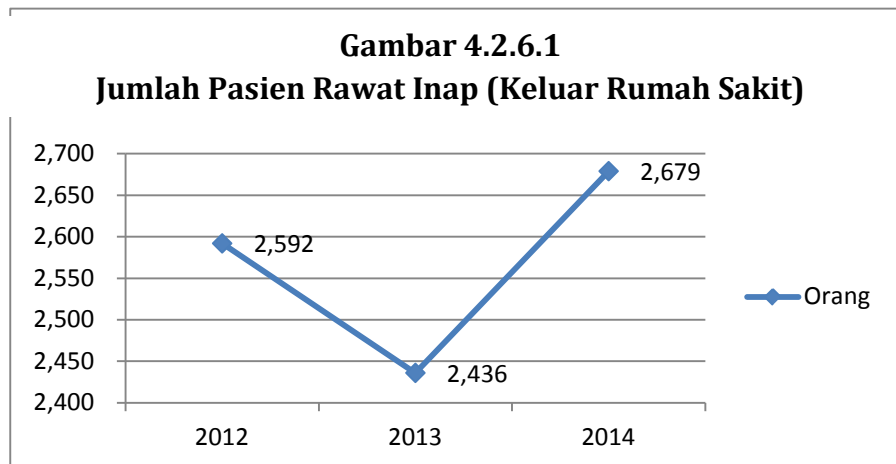
1. Rehabilitasi bangunan rumah sakit,

Hasil/Outcome yang dihasilkan yaitu terpenuhinya kepuasan pelanggan dengan target 85% dan tercapai 78,07% dan persentase capaian sebesar 91,84%. Sedangkan kepuasan pelanggan di ruang rawat inap dari target 85% tercapai 78,87%, persentase capaian sebesar 92,79%. Output yang dihasilkan adalah jumlah gedung yang direnovasi, yaitu dengan target sebanyak 1 gedung dan tercapai 1 gedung yaitu rehabilitasi bangunan Ruang Gelatik.

Ruang Gelatik memerlukan pemeliharaan berat. Hal ini sangat diperlukan mengingat Ruang Kenari adalah ruang perawatan

rawat inap Klas III, dimana pada umumnya pasien di RS Jiwa Menur adalah pasien klas III.

Trend Jumlah pasien Rawat Inap selama 3 tahun adalah fluktuatif, menurun di tahun 2013 dan meningkat di tahun 2014. Trend Jumlah pasien rawat inap selama 3 tahun dapat digambarkan sebagai berikut:



Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah pasien rawat inap baik rawat inap klas 3, klas 2 dan dan kelas 1 adalah adanya program JKN dan program pasung. Namun yang menjadi kendala adalah masih kurangnya kapasitas tempat tidur kelas 2 dan 1.

Sedangkan trend kepuasan pelanggan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah fluktuatif yaitu meningkat di tahun 2013 dan menurun di tahun 2014. Hal ini seiring dengan trend jumlah pasien, semakin tinggi jumlah pasien, kepuasan pelanggan menurun, hal ini berkaitan dengan kurangnya kapasitas tempat tidur klas 2 dan 3.

Selanjutnya trend kepuasan pelanggan di Instalasi Rawat Inap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2.6.1
trend kepuasan pelanggan di Instalasi Rawat Inap

Instalasi	Kepuasan pelanggan 2012 (%)	Kepuasan pelanggan 2013 (%)	Kepuasan pelanggan 2014 (%)
Instalasi Rawat Inap	77,38	82,34	78,87

2. Pengadaan alat kedokteran.

Hasil/Outcome yang dihasilkan yaitu terpenuhinya kepuasan pelanggan dengan target 85% dan tercapai 78,07% dan persentase capaian sebesar 91,84%. Output yang dihasilkan adalah tersedianya peralatan kedokteran RS dengan target sebanyak sebanyak 5 unit yaitu pengadaan bed pasien otomatis, bedside monitor, *Rapid Transcranial Magnetic Stimulator* (TMS) + MEP micro variant 2 (2 channel), dan Ventilator. Pengadaan alat kedokteran dari target 5 unit tercapai 5 unit dengan persentase capaian 100%.

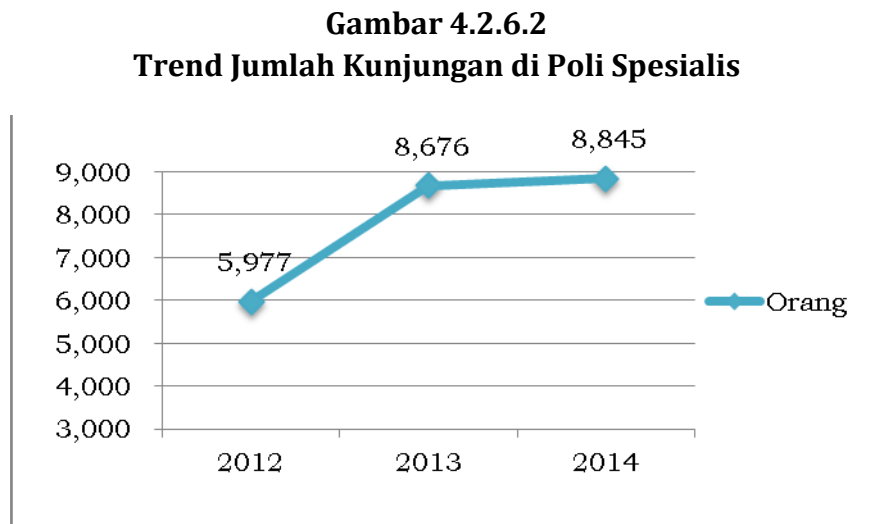
Rapid Transcranial Magnetic Stimulator (TMS) + MEP micro variant 2 (2 channel) merupakan alat yang bekerja dengan mengeluarkan gelombang magnetik yang dapat mempengaruhi fungsi sel – sel saraf otak. Fungsi alat tersebut untuk pengobatan beberapa penyakit jiwa seperti depresi, schizophrenia, dan gangguan obsesi komulsi. Alat ini juga digunakan untuk penyakit saraf seperti stroke dan kelumpuhan. Peralatan ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan di Poli Spesialis Saraf.

Sedangkan Ventilator, maka RSJ Menur telah memenuhi standard Permenkes untuk kategori rumah sakit jiwa tipe A khusus. Hal ini karena ventilator merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki rumah sakit jiwa tipe A khusus.

Dengan memiliki ventilator, maka RSJ Menur telah memenuhi salah satu standard Permenkes untuk kategori rumah sakit jiwa tipe A khusus. Hal ini karena ventilator merupakan

salah satu syarat yang harus dimiliki rumah sakit jiwa tipe A khusus.

Bila dilihat dari sisi kunjungan di Poli Spesialis, menunjukkan adanya trend peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yang ditunjukkan oleh grafik berikut :



Sedangkan trend kepuasan pelanggan dalam kurun waktu 3 tahun menunjukkan adanya trend penurunan. Hal ini seiring dengan trend kunjungan di Poli Spesialis. Semakin meningkat kunjungan pasien, pada umumnya kepuasan pelanggan mengalami penurunan. Dengan penambahan peralatan baru ini, diharapkan kepuasan pelanggan di Poli Spesialis semakin meningkat.

Selanjutnya trend kepuasan pelanggan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2.6.2
Trend kepuasan pelanggan dalam kurun waktu 3 tahun

Instalasi	Kepuasan Pelanggan 2012 (%)	Kepuasan Pelanggan 2013 (%)	Kepuasan Pelanggan 2014 (%)
Poli Umum & Spesialis	75,79	75,56	75,80

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

Masih adanya Indeks Kepuasan Masyarakat yang belum memenuhi target.

Upaya pemecahan masalah

Perlunya perbaikan sarana dan prasarana medis, perbaikan SIM RS.

2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.

a) Pagu dan Realisasi Program.

Pagu Program adalah sebesar Rp. 1.383.000.000,00 dan Realisasi Program sebesar Rp. 1.310.877.760,00 persentase capaian sebesar 94,79% pagu dan realisasi serta capaian kinerja perkegiatan dirinci dalam matrik kolom 16.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil/Outcome yang dihasilkan yaitu terpenuhinya kepuasan pelanggan dengan target 85% dan tercapai 78,07% dan persentase capaian sebesar 91,84%. Output yang dihasilkan adalah jumlah gedung yang terpelihara, yaitu dengan target sebanyak 15 gedung dan tercapai **15** gedung yaitu pemeliharaan (1) Ruang Kenari, (2) Perbaikan dan penyempurnaan gedung apotek baru, (3) Perbaikan dan pembuatan partisi ruangan pasien dan ruang rekam medis, (4) Perbaikan gedung Sekretariat 2, (5) Perbaikan gedung Graha Menur, (6) Perbaikan gedung IGD, (7) Perbaikan Ruang Puri Mitra, (8) Penyempurnaan Poli Spesialis, (9) Perbaikan gedung Sekretariat I, (10) Perbaikan dan penyempurnaan Ruang Flamboyan, (11) Pemasangan keramik tiang selasar, (12) Perbaikan dan penyempurnaan ruang sterilisasi dan laundry, (13) Penyempurnaan tempat pembuangan sampah sementara, (14) Perbaikan gedung gizi dan (15) Perbaikan dan penyempurnaan septictank.

c) Permasalahan dan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan yang terkait program ini tidak ada karena pelaksanaan telah sesuai rencana.

3) Program Upaya Kesehatan Perorangan.

a) Pagu dan Realisasi Program

Pagu Program Upaya Kesehatan Perorangan adalah sebesar Rp. 17.900.401.050,00 dan Realisasi Program sebesar Rp. 15.282.533.544,00 persentase capaian sebesar 85,38%, pagu dan realisasi kegiatan dirinci dalam matrik 16 kolom.

b) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan Program,

– **Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan di RS.**

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (konversi) layanan RS dari target 85 tercapai 78,19, persentase capaian sebesar 91,99%.
- Persentase masyarakat miskin yang dilayani di rawat jalan dari target 100% tercapai 100%, persentase capaian sebesar 100%.
- Proporsi masyarakat miskin yang dilayani di rawat jalan dari target 64% tercapai 42,60%, persentase capaian sebesar 66,56.

– **Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Umum di RS.**

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (konversi) terhadap layanan RS dari target 85 tercapai 78,87, persentase capaian sebesar 92,79%.
- *Bed Occupancy Rate* (BOR) dari target 72 tercapai 73,59%, persentase capaian sebesar 102,21%.
- *Average Length of Stay* (ALOS) dari target 24 hari tercapai 24 hari, persentase capaian sebesar 100%.
- *Bed Turn Over* (BTO) dari target 10 tercapai 10,72, persentase capaian sebesar 107,20%.

- *Turn Over Interval* (TOI) dari target 10 tercapai 8,99 hari, persentase capaian sebesar 110,10%.
 - Persentase masyarakat miskin yang dilayani di rawat inap dari target 100% tercapai 100%, persentase capaian sebesar 100%.
 - Proporsi masyarakat miskin yang dilayani di rawat inap dari target 77% tercapai 67,82%, persentase capaian sebesar 88,08%.
 - Persentase pasien jiwa yang kembali berfungsi sosial di masyarakat dari target 85% tercapai 94,29%, persentase capaian sebesar 110,93%.
- **Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat di RS.**
- Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :
- Indeks Kepuasan Masyarakat (konversi) dari target 85 tercapai 72,81 persentase capaian sebesar 85,66%.
 - Persentase masyarakat miskin yang dilayani di gawat darurat dari target 100% tercapai 100%, persentase capaian sebesar 100%.
 - Proporsi masyarakat miskin yang dilayani di gawat darurat dari target 49% tercapai 35,42%, persentase capaian sebesar 72,29%.
- **Peningkatan Pelayanan Laboratorium di RS**
- Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :
- Indeks Kepuasan Masyarakat (konversi) terhadap layanan RS dari target 85 tercapai 76,51, persentase capaian sebesar 90,01%.
 - Analisa penyebab tidak tercapainya IKM adalah karena faktor komunikasi dari para petugas yang memberi pelayanan, misalnya kejelasan aturan terkait BPJS, dan lain lain.
 - Faktor lain yaitu kurang nyamannya ruang tunggu yaitu belum adanya pendingin ruangan.

– **Peningkatan Pelayanan Radiodiagnostik dan Radioterapi di RS.**

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap layanan RS dari target 85 tercapai 76,58, persentase capaian sebesar 90,09%.
- Analisa penyebab tidak tercapainya IKM adalah karena faktor komunikasi dari para petugas yang memberi pelayanan, misalnya kejelasan aturan terkait BPJS, dan lain lain.

– **Peningkatan Pelayanan Sterilisasi dan Laundry di RS.**

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap layanan RS dari target 85 tercapai 73,66, persentase capaian sebesar 86,66%.

– **Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Keterapian Fisik di RS.**

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap layanan RS dari target 85 tercapai 80,72, persentase capaian sebesar 86,66%.

– **Peningkatan Pelayanan Farmasi RS.**

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) layanan RS dari target 85 tercapai 78,69, persentase capaian sebesar 92,58%.
- Analisa penyebab tidak tercapainya IKM adalah karena faktor komunikasi dari para petugas yang memberi pelayanan, misalnya kejelasan aturan terkait BPJS, dan lain lain.

– **Peningkatan Pelayanan Gizi RS.**

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) layanan RS dari target 85 tercapai 80,37 persentase capaian sebesar 94,56%.

– **Pembinaan Dewan Pengawas pada BLUD.**

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :

- Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD dari target 12 bulan tercapai 12 bulan, persentase capaian sebesar 100%.

– **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK).**

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :

Terbangunnya Gedung IGD dari target 1 paket tercapai 1 paket, persentase capaian sebesar 100%.

– **Pendampingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK).**

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah :

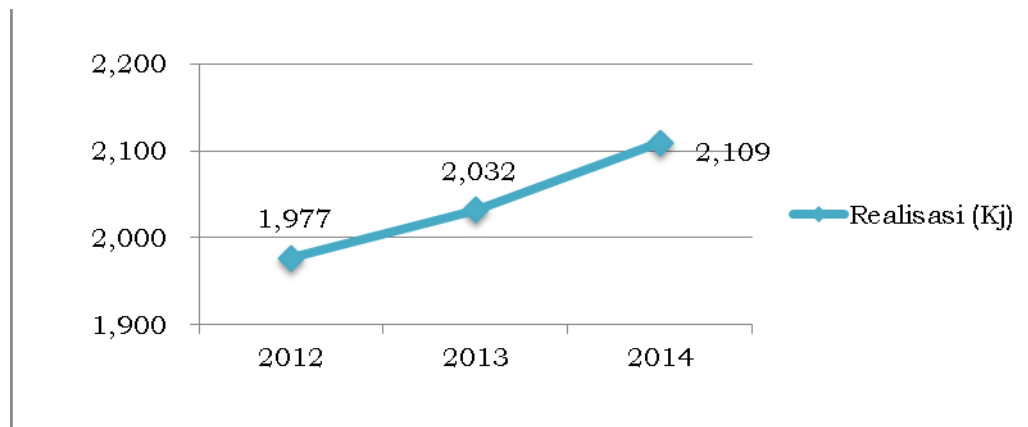
Terbangunnya Gedung IGD (pendamping DAK) dari target tercapai , persentase capaian sebesar.

Hasil/Outcome yang dihasilkan adalah terbangunnya gedung IGD (pendamping DAK) dengan target sebanyak 2 paket, terealisasi 2 paket dan persentase capaian 100%. Paket tersebut yaitu

Bila dilihat dari sisi kunjungan pasien di IGD, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, trend kunjungan di IGD menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan, Program Upaya Kesehatan Perorangan khususnya dalam hal pembangunan IGD akan berdampak positif bagi pelayanan kesehatan di IGD khususnya kesehatan jiwa.

Selanjutnya trend kunjungan pasien di IGD dalam 3 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :

Gambar 4.2.6.3
Jumlah Kunjungan Pasien Gawat Darurat



c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Masih adanya Indeks Kepuasan Masyarakat yang belum memenuhi target.

Upaya Pemecahan Masalah

Perlunya dilakukan pelatihan pelayanan prima, peningkatan sosialisasi kebijakan dan regulasi BPJS baru dan peningkatan komunikasi efektif petugas kepada pelanggan.

2.7 RUMAH SAKIT PARU BATU

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama bagi masyarakat

b. Program

1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 18.930.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.503.519.300,00 atau 92,46%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

1. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya terpenuhinya belanja modal alat-alat kedokteran.

2. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- Terealisasinya jumlah paket pengadaan bahan habis pakai.
- Terpenuhinya alat kesehatan habis pakai.
- Terpenuhinya pengadaan obat-obatan dan bahan kimia.
- Terealisasinya kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan.
- Terlaksananya pemeliharaan Ruang Rawat Inap Anggrek, Seruni, Teratai dan Mawar.
- Terlaksananya pemasangan Vinil Ruang OK Central.
- Terlaksananya pemeliharaan Gedung Instalasi Farmasi
- Terlaksananya pemeliharaan Ruang Rawat Inap Dahlia.
- Terlaksananya pemeliharaan Gedung Rawat Jalan.
- Terlaksananya pemasangan ACP di Instalasi Gawat Darurat.

- Terlaksananya pembuatan Ruang Mengeluarkan Dahak di Laboratorium.
- Terlaksananya pembuatan Lanscape dan Taman
- Terlaksananya penambahan Instalasi Gas Medis di Ruang ICU.
- Terlaksananya kegiatan koordinasi.
- Terlaksananya pengadaan belanja modal peralatan kedokteran.

2) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 2 kegiatan, yaitu Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan Pendampingan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 762.018.000,00 dan realisasi sebesar Rp 733.262.634,00 atau 96,23%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Terlaksananya pembelian 1 unit Ambulance SPGDT.
- Terlaksananya pengadaan alat alat kedokteran berupa blanked warmer, tempat penyimpanan alat dan obat emergency mobile serta 2 unit Bed ICU.

Dalam pelaksanaan program di atas, dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2.7.1

Jumlah Kegiatan Rujukan di Rumah Sakit Paru Batu

Tahun 2013-2014

Rujukan	2013	2014
Instalasi Gawat Darurat	450	497
Instalasi Rawat Jalan	9700	9899

Sumber : Rekam medis RS paru batu

3) Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 1 kegiatan, yaitu Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 268.154.505,00 atau 38,31%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Terlaksananya persiapan akreditasi Rumah Sakit versi 2012.
- Terlaksananya kegiatan jejaring TB, KIA.
- Terlaksananya skrining narkoba.
- Terlaksananya kegiatan kursus singkat/ pelatihan karyawan RS.

c) Permasalahan Dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
- Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan.
- Kurangnya koordinasi antar bagian yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya.
- Membina dan menjaga hubungan antar bagian untuk mempermudah pengkoordinasian.

2.8 UPT. RS PARU JEMBER

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Memberikan pelayanan dan rujukan klinik, preventif, promotif dan rehabilitatif penyakit paru/respirasi dan sistem pembuluh darah yang memenuhi standar medis dan kepuasan pelanggan sesuai standar akreditasi dan ISO 9001-2000
- 2) Meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan prima yang berorientasi kepuasan pelanggan, keselamatan pasien dan keselamatan kerja
- 3) Meningkatkan kinerja layanan dengan biaya efisien dan efektif
- 4) Meningkatkan pelayanan tanggap kedaruratan dan pelayanan intensif
- 5) Meningkatkan peran aktif dalam jaringan pelayanan kesehatan

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 2.020.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.346.434.296,00 atau 66,65%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrix 16 kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Pada tahun 2014, telah terealisasi pembangunan (kegiatan) yang mendukung sarana dan prasarana rumah sakit baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu antara lain :

- Terlaksananya pembayaran kebutuhan listrik, air, dan telepon rumah sakit selama 12 bulan.
- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional antara lain kendaraan roda empat sebanyak 7 unit, perpanjangan STNK dan pemeliharaan kendaraan roda tiga sebanyak 2 unit, serta perpanjangan STNK kendaraan dinas roda dua sebanyak 11 unit selama 1 tahun

- Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang pelayanan administrasi rumah sakit selama 12 bulan meliputi pengadaan alat tulis kantor, alat listrik, alat-alat kebutuhan rumah tangga, belanja pemeliharaan, belanja modal alat-alat perkantoran dan lain-lain

Jika dilihat dari realisasi anggaran keuangan, pelaksanaan program/ kegiatan tidak mencapai 100% akan tetapi dilihat dari realisasi fisik baik dari segi pengadaan barang dan jasa serta belanja modal telah mencapai target 100%.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 129.250.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 123.007,331,00 atau 95,17%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya maintenance ISO (rutin)
- Terlaksananya audit eksternal SGS (rutin)

Jika dilihat dari realisasi anggaran keuangan, pelaksanaan program/ kegiatan Meningkatkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik mencapai tidak mencapai 100% akan tetapi jika dilihat dari realisasi fisik telah mencapai target 100%.

c) Penghargaan yang diterima

Juara I Lomba Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 15.277.479.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14,477.689.535,00 atau 94,76%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan adalah :

Terlaksananya biaya operasional rumah sakit meliputi : honorarium tenaga kontrak, jasa pelayanan, pengadaan obat-obatan, bahan makan minum pasien, pemeliharaan alat, dan lain-lain.

Jika dilihat dari realisasi anggaran keuangan, pelaksanaan program/ kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat tidak mencapai 100% akan tetapi dilihat dari realisasi fisik hampir mencapai target 100%.

c) Penghargaan yang diterima

Juara Umum kegiatan ARSABAPI

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 312.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 253.306.000,00 atau 81,07%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya kegiatan penyuluhan keluarga pasien yang diadakan setiap 1 bulan sekali
- Terlaksananya kegiatan seminar dan pameran kesehatan yang diadakan pihak rumah sakit dengan tujuan mempromosikan pelayanan yang tersedia di rumah sakit kepada masyarakat
- Terlaksananya penerbitan majalah kesehatan rumah sakit 4 kali dalam 1 tahun

Jika dilihat dari realisasi anggaran keuangan, pelaksanaan program/ kegiatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak mencapai 100% karena ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa terealisasi dengan baik.

5) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a) Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 36.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.812.732.900,00 atau 98,12%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya pembangunan gedung OK CSSD (4 lantai)
- Terlaksananya pengadaan alat kedokteran (3 unit)
- Terlaksananya pengadaan alat laboratorium (1 unit)
- Terlaksananya pengadaan alat-alat berat (Mobile Genset 1 Paket)
- Terlaksananya belanja instalasi dan jaringan (Incenerator beserta instalasi 1 Paket)

Jika dilihat dari realisasi anggaran keuangan, pelaksanaan program/ kegiatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata tidak mencapai 100% akan tetapi dilihat dari realisasi fisik telah mencapai target 100%.

6) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 10.717.834.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.088.192.550,00 atau 94,13%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit (rumah dinas)
- Terlaksananya pengadaan belanja modal belanja alat angkut

- Terlaksananya pengadaan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor
- Terlaksananya pengadaan alat-alat berat
- Terlaksananya pengadaan alat-alat kedokteran
- Terlaksananya pengadaan alat-alat laboratorium
- Terlaksananya biaya perencanaan 2 gedung (instalasi Gizi dan IPSRS)
- Terlaksananya pengadaan ambulance (Dana Alokasi Khusus/ DAK)
- Tersedianya peralatan perlengkapan untuk ambulance

Jika dilihat dari realisasi anggaran keuangan, pelaksanaan program/ kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan tidak mencapai 100% akan tetapi dilihat dari realisasi fisik hampir mencapai target 100%.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan :

- Adanya 1 unit pengadaan alat-alat berat (kompessor) yang tidak dapat terealisasi dikarenakan supplier mendadak tidak dapat menyanggupi pengadaan alat tersebut (butuh waktu cukup lama karena alat merupakan produk luar negeri)

Upaya Pemecahan Masalah :

- Memilih suplier yang berkompeten dalam melakukan pengadaan barang

7) Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 591.301.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 346.717.700,00 atau 58,64%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya pelatihan/ kursus tenaga profesi medis dan non medis pada karyawan/ karyawan baik yang dilaksanakan dilingkup rumah sakit sendiri maupun diluar rumah sakit
- Terlaksananya pemberian beasiswa kepada dokter rumah sakit untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis (2 orang)
- Terlaksananya kegiatan penelitian Rumah Sakit yaitu penelitian suplemen ikan gabus

Jika dilihat dari realisasi anggaran keuangan, pelaksanaan program/ kegiatan Sumber Daya Kesehatan tidak mencapai 100% akan tetapi dilihat dari realisasi fisik telah mencapai target 100%.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan :

- Keterlambatan dalam proses SPJ untuk kegiatan penelitian suplemen ikan gabus

Upaya Pemecahan Masalah:

- Mengerjakan SPJ ketika sudah selesai melakukan kegiatan penelitian suplemen ikan gabus supaya SPJ dapat selesai tepat waktu

2.9 RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan
- 2) Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.407.227.008,00 atau 94,07%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Terlaksanannya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana gedung sebanyak 7 paket.
 - 1) Pembangunan Selasar Penghubung Ruang Tindakan dengan Ruang VIP
 - 2) Pembangunan Gedung Pengolahan Limbah Medis Padat.
 - 3) Pembangunan Pagar Keliling RS (lanjutan)
 - 4) Pembangunan Atap Pelindung Instalasi Pengolahan Air Bersih.
 - 5) Perbaikan Gedung Loundry, IPSRS dan Unit Gizi
 - 6) Perbaikan Gedung FOB dan
 - 7) Perencanaan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat
- Terlaksananya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana non gedung sebanyak 8 paket.
 - 1) Pengadaan Alat X-Ray

- 2) Pengadaan Alat kedokteran
- 3) Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor
- 4) Pembangunan Jaringan Interkoneksi Oksigen Sentral
- 5) Pengadaan Sound Sistem (lanjutan)
- 6) Perbaikan dan Penambahan Jaringan Listrik RS.
- 7) Upgrade SIM-RS
- 8) Pengadaan Tanah RS

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.9.1
Hasil Pelaksanaan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Tahun 2014

No.	Komponen	Satuan	2014
1	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana gedung	Paket	7
2	Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana non gedung	Paket	8

Sumber : RS Paru Dungus Madiun

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Sarana dan prasarana rumah sakit sebagai penunjang pelayanan pada masyarakat bila dihubungkan dengan sumberdaya manusia yang ada sampai dengan saat ini dapat dikatakan cukup memadai. Untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kedepan masih perlu untuk penambahan dan perbaikan perbaikan.
- Status kepemilikan tanah yang ditempati Rumah Sakit Paru Dungus sampai dengan saat ini (tahun 2015) masih berstatus Hak Pinjam Pakai dari Perhutani. Pada tahun 2014 telah diupayakan untuk menjadi Hak Milik, dengan status kepemilikan tanah sebagai Hak Milik Sendiri maka sertifikat tanah rumah sakit tersebut dapat dipergunakan dalam pengurusan ijin operasional rumah sakit dan

penetapan kelas nya. Pada akhir tahun anggaran 2014 proses pengurusan tanah rumah sakit sudah pada tahap selesai pembelian/pembebasan tanah sebagai lahan pengganti (di Bondowoso). Tahap lanjut yang harus dilakukan untuk mendapatkan Hak Milik atas tanah yang ditempati Rumah Sakit Paru Dungus Madiun mulai berdiri (1939) sampai sekarang adalah tahap tukar guling dan tahap sertifikasi. Pada tahap tukar guling, dari lahan tanah kita di Bondowoso dengan lahan perhutani yang sekarang ditempati Rumah Sakit Paru Dungus Madiun, ada persyaratan yang harus dilakukan yaitu berupa reboisasi lahan di Bondowoso selama 2 (dua) tahun. Kegiatan reboisasi inilah yang menyulitkan kita dalam segi perencanaan dan penganggaran kegiatan, karena kurang sesuai dengan tupoksi yang ada.

Upaya pemecahan masalah :

- Dalam rangka mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat, untuk sarana dan prasarannya telah dilakukan kegiatan, berupa optimalisasi sarana yang ada dan pengusulan anggaran tiap tahunnya.
- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait tentang pengurusan status tanah dari Hak Pinjam Pakai menjadi Hak Milik atas tanah yang ditempati Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. Untuk proses pada tahap tukar guling dan sertifikasi, maka besar harapan kami agar dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait dan tidak membebankan pada rumah sakit yang dikarenakan kurang sesuai dengan tupoksi yang diberikan pada Rumah Sakit Paru Dungus Madiun

2) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 1.283.167.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.200.258.800,00 atau 93,54%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Upaya Kesehatan Perorangan terdiri dari :

- Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit dan atau rumah sakit khusus.
 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RS Khusus Paru
 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
 - Pendampingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
- Dari kegiatan-kegiatan tersebut didapatkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- Terlaksanannya pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 7 paket.
 - 1) Pengadaan Linen Kamar OK
 - 2) Pengadaan Baju Kerja Kamar OK.
 - 3) Pengadaan Tool Kit IPS RS
 - 4) Pengadaan Laptop.
 - 5) Pengadaan Alat Kalibrasi
 - 6) Pengadaan Alat Kedokteran
 - Terlaksananya kegiatan Pelayanan Kesehatan di RS Khusus Paru khususnya pada pasien TBC sebanyak 5 kegiatan.
 - 1) Penyuluhan Rutin di RS
 - 2) Pelacakan pasien mangkir dan cross cek hasil BTA
 - 3) Pertemuan / Paguyuban Pasien dan Mantan Pasien TB di RS Paru Dungus
 - 4) Deteksi Dini Penyakit Paru Masyarakat di Daerah Resiko
 - 5) Monitoring dan Evaluasi kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan di RS Khusus Paru khususnya pada pasien TBC diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan kegiatan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.9.2
Hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan di RS Khusus Paru
khususnya pada pasien TBC Tahun 2014

No.	Komponen	Satuan	2014
1	Pasien TBC BTA positif yang ditemukan	Orang	160
2	Pasien TBC yang diobati	Orang	120
3	Pasien TBC yang diobati dan sembuh	Orang	105

Sumber : RS Paru Dungus Madiun

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Masih kurang optimalnya angka cakupan / penemuan pasien TBC BTA Pos baru.

Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan kegiatan deteksi dini penyakit paru di masyarakat khususnya TBC melalui kerjasama lintas sektor dengan Kabupaten Madiun dalam wujud kegiatan Bhakti Sosial Terpadu yang dilakukan secara rutin dan terus menerus.
- Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kerja jejaring program TB dengan pemegang dan petugas program TB di Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Madiun dan sekitar.

3) Program Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 120.455.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 81.945.595,00 atau 68,03%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Tersusunnya dokumen Renstra atau RSB (Rencana Startegi Bisnis) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun tahun 2014 - 2019.

- Tersusunnya dokumen Masterplan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun tahun 2015 - 2019.
- Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Rumah Sakit Paru Dungus Madiun tahun 2015.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Kurangnya SDM, tepatnya tenaga Dokter Spesialis dan tenaga kesehatan teknis lainnya merupakan salah satu faktor penyebab kurang optimalnya kinerja pelayanan di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan telah kami lakukan upaya rekrutmen sebagai tenaga BLUD, KSO dengan dokter dari RS lain, dan mengajukan usulan penambahan tenaga / SDM RS baik pada Dinas Kesehatan Prov. Jatim maupun BKD Prov. Jatim.

2.10. UPT. RS. KUSTA KEDIRI

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat dengan kesehatan terpadu, murah dan mudah di akses
- 2) Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
- 3) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen, keuangan, asset, perencanaan dan evaluasi

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.772.000.000,00 atau 92,40%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program /kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di Rumah Sakit Kusta Kediri, sebagai sarana dan prasarana yang melengkapi sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya.
- Terlayannya pasien rawat inap kusta sebanyak 509 orang Rawat jalan kusta 4.146 orang dan non kusta sebanyak 5.564 orang; rawat gawat darurat / emergency kusta sebanyak 219 orang dan non kusta sebanyak 198 orang;
- Terpenuhinya Peralatan dan Mesin penunjang pelayanan.
- Terpenuhinya alat-alat kedokteran

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

Pada tingkat realisasi keuangan pada program ini tidak bisa mencapai 100%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengadaan

pekerjaan ada yang di lelangkan ke ULP, hasil pelaksanaan pemenang lelang dibawah pagu pekerjaan. Dengan demikian capaian kinerja program ini belum sepenuhnya tercapai sehingga tingkat realisasi keuangan masih rendah. Maka tingkat efisien dan efektifitas pada program ini dapat dikatakan belum sepenuhnya tercapai.

Upaya Pemecahan Masalah :

Program ini secara keseluruhan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit. Kegiatan dari program ini secara fisik telah 100% terpenuhi sesuai dengan kontrak dan selesai pengerjaannya meskipun penyerapan keuangan hanya 92,40%, hal ini untuk efisiensi keuangan.

2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 223.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 201.809.865,00 atau 90,19%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program /kegiatan diantaranya sebagai berikut:

Dalam rangka menurunkan Prevalensi dan angka kecacatan akibat kusta, RS Kusta Kediri melakukan berbagai upaya. Sejak tahun 2006, telah dilaksanakan kegiatan Promkes, baik in door maupun Out Door dengan bekerja sama dengan lintas program maupun lintas sektoral dari berbagai kalangan dalam wilayah kabupaten maupun kodya eks karisidenan ediri. Seiring dengan perkembangan program yang terjalin dengan berbagai pihak, maka sejak tahun 2011 kegiatan diperluas dengan kegiatan kusta keliling dengan jejaring pelayanan kusta di 18 kabupaten/kota. Dalam meningkatkan cakupan pelayanan rumah sakit dan menurunkan kecacatan pasien akibat kusta, yang pada akhirnya dapat mempercepat eliminasi penyakit

kusta di Jawa Timur dan mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut bagi penderita kusta sebagai sasaran program ini adalah seluruh penderita kusta di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya di wilayah bagian barat yang tersebar di 18 kabupaten/kota (Kab/Kota. Kediri, Kab/Kota Blitar, Kab. Jombang, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Ponorogo, kab. Ngawi, Kab. Malang, Kab/Kota Madiun, Kab. Tulungagung, Kab. Magetan, Kab. Pacitan, Kab. Tuban).

Hasil pelaksanaan program/kegiatan antara lain:

- Aksesibilitas masyarakat di 18 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur bagian barat kepada rumah sakit menjadi dekat dan mudah.
- Cakupan pelayanan rumah sakit meningkat.
- Penanganan segera kecacatan
- Terpenuhinya honorarium pelaksana kegiatan,
- Tersedianya Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Kusta Keliling di 18 Kota dan Kabupaten
- Tersedianya alkes pakai habis
- Tersedianya obat-obatan
- Tersedianya perlengkapan laboratorium pakai habis
- Tersedianya bahan – bahan kimia laboratorium
- Tersedianya barang – barang cetakan
- Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam daerah

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Geografis/lokasi yang sulit dijangkau transportasi
- Stigma negatif di masyarakat masih tinggi
- Masih ada penderita kusta yang drop out dalam pengobatan karena ketidaktahuan tentang kusta
- Kebijakan dalam mengirim rujukan pasien belum diarahkan ke UPT. RS. Kusta Kediri.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Menindaklanjuti penanganan pasien yang membutuhkan alas kaki (OP).
- Saling bertukar informasi tentang data pasien kusta.
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, khususnya penanganan kusta bagi masyarakat.
- Meningkatkan sistem surveylance dan monitoring.
-

3) Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata.

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 2.959.153.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.701.901.000,00 atau 90,58% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program /kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di Rumah Sakit Kusta Kediri, sebagai sarana dan prasarana yang melengkapi sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya.
- Terlaksanakanya pemeliharaan ringan gedung dan bangunan
- Terlaksanakanya pemeliharaan berat gedung dan bangunan
- Tersedianya gedung tempat kerja dan pelayanan kesehatan.
- Terpenuhinya Peralatan dan Mesin penunjang pelayanan.
- Terpenuhinya alat-alat kedokteran

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

Pada tingkat realisasi keuangan pada program ini tidak bisa mencapai 100%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengadaan pekerjaan ada yang di lelangkan ke ULP, hasil pelaksanaan pemenang lelang dibawah pagu pekerjaan. Dengan demikian capaian kinerja program ini belum sepenuhnya tercapai sehingga tingkat realisasi keuangan masih rendah. Maka tingkat efisien dan efektifitas pada program ini dapat dikatakan belum sepenuhnya tercapai.

Upaya Pemecahan Masalah :

Program ini secara keseluruhan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit. Kegiatan dari program ini secara fisik telah 100% terpenuhi sesuai dengan kontrak dan selesai pengerjaannya meskipun penyerapan keuangan kurang lebih sekitari 90,58%, hal ini untuk efisiensi keuangan.

4) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 5.038.013.500,00 yang terdiri dari Anggaran Fungsional sebesar Rp. 4.072.246.500,00 dan Eks Pembangunan sebesar Rp. 965.767.000,00

Rerealisasi Fungsional sebesar Rp. 3.225.286.217,00 atau 79,20% dan realisasi anggaran Eks Pembangunan sebesar Rp. 927.069.000,00 atau 97,47% masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program /kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit meningkat 40%.

- Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di Rumah Sakit Kusta Kediri, sebagai sarana dan prasarana yang melengkapi sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya.
- Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengolahan limbah padat rumah sakit.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

Pada tingkat realisasi keuangan pada program ini tidak bisa mencapai 100%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengadaan pekerjaan ada yang di lelangkan ke ULP, hasil pelaksanaan pemenang lelang dibawah pagu pekerjaan. Dengan demikian capaian kinerja program ini belum sepenuhnya tercapai sehingga tingkat realisasi keuangan masih rendah. Maka tingkat efisien dan efektifitas pada program ini dapat dikatakan belum sepenuhnya tercapai.

Upaya Pemecahan Masalah :

Program ini secara keseluruhan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit. Kegiatan dari program ini secara fisik telah 100% terpenuhi sesuai dengan kontrak dan selesai pengerjaannya meskipun penyerapan keuangan kurang lebih sekitari 95,66%, hal ini untuk efisiensi keuangan.

5) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 107.880.000,00 dan sebesar Rp. 79.883.700,00 atau 74% masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program /kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Tersedianya pelayanan informasi dan dokumentasi kessehatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi dan dokumentasi rumah sakit.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

Pada tingkat realisasi keuangan pada program ini tidak bisa mencapai 100%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan Maka tingkat efisien dan efektifitas pada program ini dapat dikatakan belum sepenuhnya tercapai.

Upaya Pemecahan Masalah :

Program ini secara keseluruhan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit. Kegiatan dari program ini secara fisik telah 100% terpenuhi sesuai dengan kontrak dan selesai pengerjaannya meskipun penyerapan keuangan kurang lebih sekitar 73,99%, hal ini untuk efisiensi keuangan.

2.11 UPT. RUMAH SAKIT KHUSUS KUSTA SUMBERGLAGAH

a. Sasaran Tahun 2014

Terselenggarakannya pelayanan kusta paripurna di Rumah Sakit dan deteksi dini kusta pada anak sekolah di daerah endemis kusta di Jawa Timur.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran pada Program Upaya Kesehatan Perorangan sebesar Rp. 10.906.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.378.163.125,00 (95,16%), Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program/Kegiatan) :

Dalam Pelaksanaan kegiatan *Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit dan atau rumah sakit khusus tersebut* dapat dilihat dari indikator utama pelayanan pada perkembangan tabel mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

- Pelayanan Gawat darurat

Jumlah pasien pelayanan gawat darurat tahun 2013 sebanyak 9735 orang atau rata-rata 26 pasien perhari.

Tabel 4.2.11.1
Data Kunjungan IGD tahun 2010 - 2014

Data Kunjungan IGD	Data Kegiatan				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kunjungan	6.227	7.325	8.779	9.735	9.499

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Tabel 4.2.11.2
Segmen Pasar IGD

Segmen Pasar UGD	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Kunjungan	6.227	7.325	8.779	9.735	9499
Rata-Rata perbulan		610,4	731,5	811,2	791,6
% rata2 perbulan	-	15,00%	19,85%	10,90%	-2,4
Trend	-	Naik	Naik	Naik	Turun

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Tren Kunjungan Instalasi Gawat Darurat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 19,85%. Hal ini membuktikan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap UPT Rumah Sakit Sumberglagah. Namun pada tahun 2014 diperkirakan terjadi sedikit penurunan.

- **Pelayanan Rawat Jalan**

Jumlah pasien rawat jalan Kusta tahun 2013 sebanyak 7205, sedangkan non Kusta sebanyak 15.323.

Tabel 4.2.11.3
Kunjungan Rawat Jalan 2010 - 2014

DATA KUNJUNGAN RAWAT JALAN					
KUNJUNGAN	2010	2011	2012	2013	2014
KUSTA	5.416	4.561	6.871	7.205	6936
NON KUSTA	11.173	8.505	14.396	15.323	19.383
Jumlah	16.589	13.066	21.267	22.528	26.319
Rata-Rata perbulan	1.382,4	1.581,8	1.772,2	1.877,3	2.193,25
%	-	14,43%	12,04%	5,90%	16,83%
Trend	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Tabel 4.2.11.4
Segmen Pasar Rawat Jalan

Segmen Pasar Rawat Jalan	Data Kunjungan					Vol. Kegiatan Rata - rata/ Th
	2010	2011	2012	2013	2014	
Kunjungan						
a. Kusta	5.416	4.561	6.871	7.205	6936	6197,8
b. Non Kusta	11.173	8.505	14.396	15.323	19.383	13.756
Jumlah	16.589	13.066	21.267	22.528	26.319	19.953,8
(%) kenaikan	-	26,96%	38,56 %	5,60%	16,83 %	-
Trend	-	Turun	Naik	Naik	Naik	-

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Trend Kunjungan Instalasi Rawat Jalan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 38,56%. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan kunjungan. Segmentasi pasar rawat jalan adalah pasien kusta dan non kusta

- **Pelayanan Rawat Inap**

Secara rinci jumlah pasien rawat inap berdasarkan indikator pelayanan dapat dilihat sebagai berikut :

Data Indikator Pelayanan Rawat Inap Kusta dan Non Kusta

Tabel 4.2.11.5
Data Kegiatan Rawat Inap Non Kusta
Keseluruhan (Klas I,II, ICU dan R. Anak)

NO	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
1	JUMLAH PASIEN	3.735	4.258	4.555	4.987	4.808
2	HARI PERAWATAN	14.514	15.741	14.705	16.451	14.928
3	BOR	75,1	70,7	65,8	74	67,05
4	LOS	4	3,8	3,5	3,4	3,2
5	TOI	1,3	1,5	1,7	1,2	1,5
6	BTO	70,5	69,8	74	81,1	78,23
7	NDR	19,5	15,3	17,7	15,8	17,4
8	GDR	34,8	36,2	42,8	34,8	40,65

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Jumlah pasien rawat inap non kusta selalu meningkat pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Indikator rawat inap sesuai dengan standar Depkes 2005. Hal ini menunjukkan efektifitas pelayanan rawat inap yang baik.

Tabel 4.2.11.6
Data Kegiatan Rawat Inap Non Kusta
Kelas I

NO	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
1	JUMLAH PASIEN	901	839	867	983	1.015
2	HARI PERAWATAN	3.533	3.278	3.136	3.822	3.662
3	BOR	74,5	69,1	65,9	80,5	77,2
4	LOS	3,2	3,2	3,1	3,3	3,1
5	TOI	1,1	1,5	1,6	0,8	0,9
6	BTO	86,6	79,7	78,5	90,1	93
7	NDR (‰)	15,1	10,6	16,7	20,5	19
8	GDR (‰)	22,2	20,3	31,4	33,3	32,3

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Jumlah pasien rawat inap non kusta kelas 1 rata-rata meningkat pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan. Indikator rawat inap umum kelas 1 telah sesuai dengan standar Depkes 2005. Hal ini menunjukkan efektifitas pelayanan rawat inap yang baik.

Tabel 4.2.11.7
Kegiatan Rawat Inap Non Kusta
Kelas II

NO	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
1	JUMLAH PASIEN	2.682	2.608	2.615	3.011	3.063
2	HARI PERAWATAN	10.184	9.664	8.795	9.774	9.102
3	BOR	77,5	73,5	66,8	74,4	69,3
4	LOS	3,4	3,5	3,2	3	2,8
5	TOI	1	1,2	1,5	1	1,2
6	BTO	85,4	81,6	80,7	91,6	92,9
7	NDR (‰)	15,9	16	16,2	12,1	14,35
8	GDR (‰)	26	30,3	34,1	24,9	31,7

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Jumlah pasien rawat inap non kusta kelas II rata-rata meningkat pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan. Indikator rawat inap umum kelas II telah sesuai dengan standar Depkes 2005. Hal ini menunjukkan efektifitas pelayanan rawat inap yang baik.

Tabel 4.2.11.8
Kegiatan Rawat Inap Kusta
Kelas III

NO	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
1	JUMLAH PASIEN	556	547	544	629	509
2	HARI PERAWATAN	12.250	12.030	10.067	9.958	9.839
3	BOR	67,1	65,9	55	54,4	53,8
4	LOS	19,1	21,6	20,8	18,6	20,9
5	TOI	10,8	11,4	16,1	13,9	17,4
6	BTO	11,1	10,9	10,2	12	9,7
7	NDR (‰)	41,4	27,5	25,4	21,7	28,7
8	GDR (‰)	45	34,8	29,3	31,7	37

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Rawat inap Kelas III merupakan rawat inap untuk Pasien kusta. Jumlah pasien rawat inap kusta rata-rata menurun pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Indikator rawat inap kusta tidak sesuai dengan standar Depkes 2005. Hal ini dikarenakan penyakit kusta merupakan penyakit kronis yang membutuhkan waktu penyembuhan lama.

Tabel 4.2.11.9
Data Kegiatan Icu

NO	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Pasien	152	156	176	158	141
2	Hari Perawatan	797	769	735	603	671
3	Bor	54,6	52,7	50,2	41,2	45,8
4	Los	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5
5	Toi	1,1	1,3	1,4	1,9	1,7

NO	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
6	Bto	145,5	137,8	129,3	112,5	118,8
7	Ndr (‰)	12,0	12,7	25,1	31,1	25,26
8	GDR (‰)	43,0	72,6	106,4	113,3	103,16

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Pelayanan ICU baru dimulai pada tahun 2010. Jumlah pasien ICU rata-rata meningkat pada kurun waktu 4 tahun terakhir. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan. Indikator ICU tidak sesuai dengan standar Depkes 2005. Hal ini dikarenakan ICU merupakan tempat pelayanan untuk Pasien-pasien dengan penyakit yang membutuhkan perawatan dan observasi intensif.

Tabel 4.2.11.10
Data Kegiatan OBGYN

NO	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
1	JUMLAH PASIEN	0	657	897	835	589
2	HARI PERAWATAN	0	2.030	2.039	2.252	1.493
3	BOR	0	69,5	69,6	77,1	51
4	LOS	0	2,8	2,5	2,7	2,5
5	TOI	0	1,2	0,9	0,8	2,3
6	BTO	0	90,1	119,0	107,1	76,25
7	NDR (‰)	0	0,0	3,2	0,0	0
8	GDR (‰)	0	5,5	7,4	0,0	0

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Pelayanan Obgyn baru dimulai pada tahun 2011. Jumlah pasien Obgyn meningkat pada tahun 2012 dan menurun pada tahun 2013. Indikator Rawat Inap Obgyn sesuai dengan standar Depkes 2005. Hal ini menunjukkan pelayanan di rawat inap Obgyn cukup efektif.

Tabel 4.2.11.11
Segmen Pasar Rawat Inap

Segmen Pasar Rawat Inap	Data Kegiatan					Vol. Kegiatan Rata - rata/ Th
	2010	2011	2012	2013	2014	
Hari Perawatan Kelas I	3.533	3.278	3.136	3.822	3.662	3.486,2
Kelas II	10.184	9.664	8.795	9.774	9.102	9.503,8
Kelas III (Kusta)	12.250	12.030	10.067	9.958	9.839	10.828,8

Segmen Pasar Rawat Inap	Data Kegiatan					Vol. Kegiatan Rata - rata/ Th
	2010	2011	2012	2013	2014	
ICU	797	769	735	603	671	715
Obgyn dan Anak	0	2.030	2.039	2.252	1.493	1.953,5
Perinatologi	0	0	0	178	156	167
Jumlah Hari perawatan	26.764	27.771	24.772	26.587	24.923	26.163,4
%		3,63	-12,11	6,83	-6,26	-
Trend		Naik	Turun	Naik	Turun	-

Sumber : Kusta Sumber Glagah

Segmentasi pelayanan rawat inap meliputi pasien kusta dan non kusta. Pada tahun 2010 dibuka pelayanan intensif care unit (ICU) dan pada tahun 2011 dibuka pelayanan obgyn dan anak.

Dalam Pelaksanaan kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RS Khusus Kusta adalah Menurunkan Prevalensi rate (Jumlah Pasien baru), Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan terbentuknya komunikasi dengan pemangku kepentingan serta menurunkan lepropobia, stigma kusta dan masyarakat.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah.

Permasalahan :

- Permasalahan Program Serologi :

Dari hasil kegiatan pemeriksaan serology kusta subklinik yang dilakukan di Kepulauan RAAS dan Kecamatan Nguling ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- Untuk mendapatkan hasil yang maksimal masih perlu adanya peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor baik yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi maupun yang ada di Kabupaten/Kota.
- Kegiatan pemeriksaan serologi yang dilaksanakan oleh pihak TDC membutuhkan waktu yang lama, hal ini mempengaruhi rencana waktu kegiatan intervensi di daerah.

- Permasalahan Program Kegiatan Screning dan Monitaring Evaluasi Prothesa di Kabupaten/ Kota :
 - Jarak rumah penderita yang jauh menuju Rumah sakit Kusta Sumberglagah untuk melakukan pengepasan/Fitting.
 - Tidak Alokasi dana daerah setempat

Dari hasil kegiatan pemeriksaan serology kusta subklinik yang dilakukan di Kepulauan RAAS dan Kecamatan Nguling ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

 - Untuk mendapatkan hasil yang maksimal masih perlu adanya peningkatan koordinasi lintas sektor baik yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi maupun yang ada di Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan pemeriksaan serologi yang dilaksanakan oleh pihak TDC membutuhkan waktu yang lama, hal ini mempengaruhi rencana waktu kegiatan intervensi di daerah.
 - Melakukan koordinasi dengan TDC untuk ketepatan target waktu untuk kegiatan serologi tersebut

Upaya Pemecahan Masalah :

- Kegiatan Screning dan Monitoring Evaluasi Prothesa di kabupaten/Kota:
- Aktif melakukan program evaluasi ke daerah.

2) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran pada Program Upaya Kesehatan Perorangan sebesar Rp. 93.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 88.182.500,00 (94,39) bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di rumah sakit. Pagu dan realisasi anggaran

masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Tersusunnya dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahunan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

Masih adanya beberapa kegiatan yang belum terakomodir diprogram kegiatan karena menyesuaikan kemampuan anggaran .

Upaya Pemecahan Masalah :

Mengusulkan kembali melalui program kegiatan tersebut.

2.12. RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

a. Sasaran tahun 2014

Meningkatnya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas kepada masyarakat

b. Program

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Olahraga, batra dan Kesehatan Kerja) sebesar Rp. 13.576.570.400,00 dan terealisasi sebesar 103,82% atau Rp. 14.095.039.031,00. Sumber dana program ini dari Dana Fungsional. Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matriks 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capain Program)

1. Peningkatan Status Balai menjadi Rumah Sakit

- a. Surat Ijin Pendirian Rumah Sakit Nomor : P2T/2/03.21/01/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013
- b. Surat Ijin Operasional Sementara Rumah sakit Nomor P2T/7/03.22/01/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tanggal 17 Oktober 2014

Harapan RSMM Jawa Timur adalah adanya dukungan dari pemerintah untuk melengkapi kekurangan SDM, sarana dan prasarana menjadi RS khusus Mata Type B sesuai Permenkes No. 56 tahun 2014 tentang perijinan dan klasifikasi Rumah Sakit.

2. Kerja sama dengan Kabupaten Kota Jawa Timur untuk Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan. Kerjasama /MOU pelaksanaan Program Penanggulangan

Gangguan Penglihatan dan Kebutaan tahun 2014 adalah sebanyak 7 kab/kota, meliputi :

- a. Kota Pasuruan
- b. Kabupaten Ngawi
- c. Kabupaten Mojokerto
- d. Kota Mojokerto
- e. Kabupaten Sampang
- f. Kota Probolinggo
- g. Kabupaten Situbondo

Tabel 4.2.12.1
Hasil kegiatan PGPK yang dilakukan RSMM Jawa Timur
Tahun 2012, 2013 dan 2014

NO	URAIAN	2012	2013	2014
1	Jumlah kegiatan dengan kabupaten yang bekerjasama untuk program PGPK	35 kegiatan	8 kabupaten	7 Kabupaten
2	Pasien Operasi Katarak Luar Gedung	3.003	774	1.031
3	Cakupan penjangkaran kesehatan mata (screening)	3.492	1.330	1.670

Sumber : RSMM Jawa Timur

Jumlah Masyarakat yang terlayani dalam kegiatan PGPK dengan kabupaten/kota pada tahun 2014 terdiri dari 81 mata (7,86%) dari dana CBM, 46 mata (4,46%) dari dana Kab/Kota dan 904 mata (87,68%) dari dana Swadana.

3. Kerja sama dengan LSM, (*Hellen Keller Internasional, CBM, Orbis*)
 - a. Kegiatan-kegiatan dengan Hellen Keller International lebih terfokus pada kesehatan mata anak yaitu dengan menambah layanan POLI MATA ANAK (PEDIATRIC OPHTHAMOLOGY) di RSMM Jawa Timur dan Penanganan penderita *low vision*.

- b. Kerjasama dengan CBM lebih berfokus pada pengurangan angka kebutaan dengan pemberian Bahan Habis Pakai untuk layanan operasi katarak terutama pada pasien tidak mampu.
- 4. Kegiatan Promosi dan Pengenalan RSMM ke Masyarakat
 - a. Promosi yang dilakukan melalui pameran yang dilakukan dua kali selama tahun 2014
 - Tanggal 9 sd 19 Oktober di Grand city pada acara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur
 - Tanggal 27 sd 31 Oktober di Grand city pada pameran kesehatan
 - b. Pembuatan Leaflet-leaflet

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Belum terpenuhinya SDM, sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Khusus Mata Kelas B
- Belum semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang bekerjasama dengan RSMM
- Layanan RSMM belum dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Surabaya
- Kegiatan screening belum maksimal

Upaya Pemecahan Masalah:

- Advokasi ke stakeholder terkait
- Membentuk Tim PGPK Provinsi Jawa Timur
- Koordinasi dengan lintas sektor terkait
- Melakukan promosi dengan menggandeng puskesmas yang ada di Kab/Kota di Jawa Timur.
- Melakukan screening bekerjasama dengan kab/kota di Jawa Timur

2) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran program Upaya Kesehatan Perorangan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 terealisasi sebesar 84,26% atau Rp. 7.161.928.175,00.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Melanjutkan Pembangunan Gedung Bedah.

Harapan RSMM adalah dukungan anggaran untuk penyelesaian gedung (finishing dalam gedung) dan melengkapi sarana pendukung gedung bedah tersebut baik sarana medis maupun non medis agar Gedung bisa segera berfungsi.

Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur memiliki beberapa jenis layanan kesehatan mata yaitu :

- a. UGD RSMM, untuk menangani kasus darurat mata dan umum. Sesuai dengan persyaratan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur telah mengaktifkan UGD 24 Jam untuk memberikan pelayanan darurat/emergency mata dan umum.
- b. Poli Refraksi merupakan unit Rawat Jalan untuk memeriksa tajam penglihatan, dilengkapi dengan alat canggih phoropter, autorefraktometer, Lensometer Digital
- c. Instalasi Rawat Jalan Mata, dengan pelayanan spesialisik mata untuk katarak, glaucoma, retina, pediatric, tumor, okuloplasti dll
- d. Instalasi Rawat Inap, merupakan pelayanan rawat inap dengan Kapasitas 40 tempat tidur terdiri dari :
 - Kelas I Laki Laki : 5 TT
 - Kelas I Perempuan : 5 TT
 - Kelas II Laki-Laki : 5 TT
 - Kelas II Perempuan : 5 TT
 - Kelas III Laki Laki : 10 TT
 - Kelas III Perempuan : 10 TT
- e. Instalasi Invasif / Tindakan Kamar Operasi : Operasi Katarak SICS (*Small Incision Cataract Surgery*) dan Phaecoemulsifikasi

- f. Instalasi Laboratorium, secara keseluruhan mampu melayani pemeriksaan :
 - Hematologi (Darah Lengkap, Golongan Darah dll)
 - Kimia klinik (Renal Fungsi Test, Liver fungsi Test, Kolesterol, Trigliserida, Gula Darah, Kolesterol HDL dan LDL)
 - Urinalisa
 - Immunologi / serologi : test Widal
 - *Elektrolit dan Blood Gas Analyzer*
- g. Instalasi Farmasi / Apotik.
- h. Optik RSMM memberikan pelayanan resep kacamata dengan didukung bengkel kacamata, sehingga bisa memberikan pelayanan kacamata dengan cepat.
- i. *Pediatric Ophtalmology*, memberikan pelayanan kesehatan mata pada anak, melakukan screening sedini mungkin untuk menemukan kelainan mata anak.

Hasil Kinerja Pelayanan :

- a. Pelayanan Rawat Jalan

Tabel 4.2.12.2
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2012 - 2014

No	URAIAN	Jumlah Kunjungan Tahun 2012	Jumlah Kunjungan Tahun 2013	Jumlah Kunjungan Tahun 2014
1.	Jumlah pasien baru	12.648	12.577	11.768
2.	Jumlah pasien lama	20.984	22.029	25.261
Jumlah		33.632	34.606	37.029

Sumber : RSMM Jawa Timur

Jumlah kunjungan pasien lama RSMM pada tahun 2014 lebih banyak dibandingkan kunjungan pasien baru. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan RSMM terhadap layanan RSMM sangat baik.

b. Pelayanan Rawat Inap

Tabel 4.2.12.3
Jumlah Pasien Masuk Dan Hari Perawatan
Tahun 2012 - 2014

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Jumlah pasien masuk	1.904	1.582	2.749
2	Jumlah Hari Perawatan	3.808	3.164	2.763

Sumber : RSMM Jawa Timur

Jumlah hari perawatan di RSMM rata-rata 1 hari per pasien. Pelayanan rawat inap rata-rata bagi pasien yang mau operasi tapi mempunyai penyakit lain, misalnya diabetes, hipertensi, jantung dll.

c. Pelayanan Operasi Katarak

Tabel 4.2.12.4
Jumlah pasien operasi katarak dalam dan luar gedung
Tahun 2012, 2013 dan 2014

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Pasien Operasi Katarak Dalam Gedung	3.330	3.582	3.261
2	Pasien Operasi Katarak Luar Gedung	3.003	774	1.031

Sumber : RSMM Jawa Timur

Terdapat sedikit penurunan jumlah operasi dalam gedung Rumah Sakit Mata Masyarakat, karena pembatasan jumlah rujukan yang bisa dilayani yaitu hanya 3 kabupaten (Sidoarjo, Gresik dan Surabaya). Padahal sebelumnya jangkauan rujukan RSMM seluruh Jawa Timur.

Pelayanan operasi katarak selain dilaksanakan di dalam gedung juga dilakukan diluar gedung (dengan kabupaten-kabupaten yang mengadakan kerjasama dengan RSMM). Pelayanan luar gedung pada tahun 2014 mengalami peningkatan.

Tabel 4.2.12.5
Jumlah pasien Operasi Mata di RSMM Tahun 2012 - 2014

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Total Pasien Operasi Katarak Dalam Gedung dan Luar Gedung	6.333	4.356	4.292
2	Pasien Operasi Kecil Pterigium dan Hordeolum	627	719	456

Sumber : RSMM Jawa Timur

Pelayanan operasi di RSMM terdiri dari operasi Katarak dan operasi kecil (*Pterigium dan Hordeolum*). Pelayanan operasi kecil juga mengalami sedikit penurunan karena pembatasan rujukan dari BPJS (hanya 3 wilayah yaitu Kab/Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo).

d. Pelayanan Farmasi

Tabel 4.2.12.6
Jumlah Resep yang dilayani di instalasi farmasi RSMM Tahun 2012 - 2014

NO.	JENIS LAYANAN	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Resep	25.679	33.796	34.436

Sumber : RSMM Jawa Timur

Pelayanan farmasi adalah pelayanan penunjang yang melengkapi unit raat jalan dan rawat inap. Pelayanan instalasi ini meliputi penjualan obat untuk pasien umum dan juga penyediaan obat bagi pasien Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)

e. Pelayanan Optik

Tabel 4.2.12.7
Jumlah pelayanan di optik RSMM Tahun 2012 - 2014

NO.	JENIS LAYANAN	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Kacamata	766	810	495

Sumber : RSMM Jawa Timur

Pelayanan optik/kacamata di RSMM awalnya ditangani oleh koperasi dan sejak tahun 2012 mulai ditangani oleh BLUD. Layanan meliputi penjualan lensa, frame, kacamata lengkap, kacamata hitam yang dilengkapi dengan peralatan optik yang lengkap /bengkel optik, sehingga pelayanan kacamata menjadi lebih cepat. Penurunan layanan optik disebabkan karena Optik RSMM belum bekerjasama dengan BPJS, sehingga Optik hanya melayani pasien swadana saja, sedangkan pengunjung sebagian besar adalah pasien BPJS.

Tabel 4.2.12.8
Data Penyakit Mata Tahun 2012 - 2014

NO	NAMA PENYAKIT	2012	2013	2014
1	Acute Atopic Conjunctivitis	411		
2	Astigmatism	154	220	5435
3	Cataract, unspecified			4625
4	Conjunctivitis unspecified		207	1161
5	Corneal Ulcer	124		
6	Glaucoma Suspect	209		1067
7	Glaucoma Unspecified	116	420	
8	Keratitis Unspecified		164	
9	Myopia	783	358	2063
10	Postprocedural disorder of eye and adnexa, unspecified			986
11	Presbiop	345	103	2763
12	Presence of Intraocular Lens	5869	2.776	1522
13	Pterigium		267	
14	Senile Incipient Cataract	3378	654	2874
15	Senile Nuclear Cataract	85	449	1697

Sumber : BKMM Surabaya Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Kurangnya SDM di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
- Ruang Bedah masih menyatu dengan instalasi rawat jalan sehingga rawan adanya kasus Infeksi Nosokomial. Pembangunan Gedung Bedah masih dalam pengerjaan.

- Pelayanan Rawat Inap belum bisa maksimal karena kurangnya tenaga perawat dan sarana prasarana pendukung.
- Billing system belum berjalan maksimal
- Peralatan Medis di Layanan Poli Mata anak belum lengkap
- Belum adanya Sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk Gedung Bedah, misalnya : paving jalan menuju Gedung Bedah, kursi tunggu, hipafilter dan sebagainya.
- Belum bekerjasamanya OPTIK dengan BPJS sehingga pelayanan kepada pasien BPJS belum bisa paripurna.

Upaya Pemecahan Masalah

- Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur agar bisa mendapatkan tambahan tenaga sesuai dengan bezetting yang diajukan.
- Berkoordinasi dengan BPJS agar Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang merupakan satu-satunya institusi pelayanan kesehatan mata bisa menerima rujukan dari seluruh Jawa Timur
- Berkoordinasi dengan BPJS agar OPTIK RSMM bisa melayani pasien BPJS.
- Mengusulkan melalui APBD maupun APBN untuk pembelian alat-alat canggih, sarana dan prasarana pendukung yang memang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan mata masyarakat.

2.13. UPT RUMAH SAKIT PARU SURABAYA

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya pelayanan kesehatan di RS Khusus Paru Surabaya

b. Program

1) Program Upaya Kesehatan Perorangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 15.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.002.630.480,00 atau 90,34%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Penambahan alat kedokteran di ruang OK (operasi) sebanyak 13-15 unit;
- Penambahan perlengkapan kantor dan rumah tangga rumah sakit pada ruang rawat inap/ruang tunggu pasien/kantor.
- Penambahan alat kedokteran pada IGD/ambulan/OK
- Pembangunan gedung rawat inap 4 lantai
- Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Koordinasi dengan 60 Puskesmas di 4 Kabupaten Binaan.
- Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Koordinasi dengan 63 Puskesmas di Kota Surabaya
- Terlaksananya penyediaan susu bubuk bagi pasien TB

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Pembangunan gedung rawat inap 4 lantai bernilai Rp. 17 milyar. Pelaksanaan dikerjakan dengan menggunakan alokasi pagu anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 10 milyar yang terdiri dari Perencanaan/ pembuatan DED; Pengawasan; Pelaksanaan dan Pengelolaan. Saat ini gedung belum operasional.

Upaya pemecahan masalah :

- Pembangunan gedung rawat inap 4 lantai direncanakan diselesaikan pada tahun 2015 dengan menggunakan alokasi anggaran tahun 2015.

2.14 BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU PAMEKASAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur rumah sakit dalam mendukung kualitas pelayanan

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BP4 Pamekasan pagu sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sebesar 80,44% atau Rp. 402.204.530,00. Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matriks 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Pada tahun 2014, tercapainya target jumlah kunjungan untuk pelacakan pasien sebanyak 63 kunjungan ke rumah pasien TB yang berobat ke BP4 Pamekasan di wilayah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 4.2.14.1
Jumlah kunjungan ke rumah pasien TB yang berobat ke BP4 Pamekasan

No	Bulan	Jumlah Kunjungan
1	Januari	2 kunjungan
2	Februari	5 kunjungan
3	Maret	2 kunjungan
4	April	12 kunjungan
5	Mei	0 kunjungan
6	Juni	15 kunjungan

No	Bulan	Jumlah Kunjungan
7	Juli	0 kunjungan
8	Agustus	11 kunjungan
9	September	6 kunjungan
10	Oktober	0 kunjungan
11	November	3 kunjungan
12	Desember	7 kunjungan

Sumber : UPT Paru Pamekasan

- Untuk lebih jelasnya mengenai hasil laporan kunjungan monitoring dan evaluasi pasien TB dapat dilihat dari Laporan Kegiatan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) Tahun 2014 yang telah kami susun berupa makalah.
- Pada tahun 2014, terlaksananya kegiatan kunjungan ke puskesmas-puskesmas se-wilayah Madura. Antara lain: Kabupaten Sumenep sebanyak 6 puskesmas, Kabupaten Sampang sebanyak 2 puskesmas. Hasil dari pelaksanaan kunjungan puskesmas ini adalah peningkatan koordinasi dan kerja sama serta sebagai bahan monitoring dan evaluasi program TB antara petugas kesehatan Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan dengan petugas kesehatan (wasor TB) puskesmas se-wilayah Madura dalam penanggulangan penyakit tuberculosis sehingga sistem rujukan dari dan ke puskesmas se-wilayah Madura. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil laporan kunjungan puskesmas dapat dilihat dari Laporan Kegiatan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) Tahun 2014 yang telah kami susun berupa makalah.
- Pada tahun 2014, terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi antara pemegang program TB di masing-masing puskesmas se-wilayah Madura dengan pemegang program TB BP4 Pamekasan yang diadakan pada setiap kabupaten di wilayah Madura sehingga terjalannya komitmen bersama untuk memberantas dan mencegah penyakit TB.

- Dengan adanya tiga kegiatan UKM BP4 Pamekasan yang antara lain : monev pasien TB, kunjungan puskesmas, rakor P2TB maka keberhasilan program TB dapat mencapai target indikator program TB nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas maka berikut laporan hasil capaian kinerja program TB serta dokumentasinya.

Tabel 4.2.14.2

Laporan hasil capaian kinerja program TB

No	Uraian	Standar Nasional	Tahun		
			2012	2013	2014
1	Jumlah suspek	Tidak punya wilayah kerja	3325	3831	1080
2	Ditemukan BTA (+)		528	585	586
3	Ditemukan BTA (-)		440	448	456
4	Dikirim ke PKM	>95%	93,3%	94,9%	95,7%
5	Diobati di BP4	<5%	6,7%	5,3%	4,3%
6	Konversi	>80%	77,4%	82,5%	75%
7	Kesembuhan	>85%	63,3%	80,0%	100%
8	Succes Rate	>90%	66,7%	85,7%	100%
9	Default (DO)	<10%	6,7%	5,7%	0%
10	Monitoring Pasien TB	Tidak ditentukan	64	84	63
11	Jumlah kunjungan PKM		28	15	8

Sumber : UPT Paru Pamekasan

- Jumlah kehadiran peserta pada masing-masing kegiatan :

Tabel 4.2.14.3

Jumlah Kehadiran Peserta

No	Kegiatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Peserta
1	Rakor P2TB Sumenep	23 puskesmas	56 orang
2	Rakor P2TB Sampang	21 puskesmas	49 orang
3	Rakor P2TB Bangkalan	22 puskesmas	46 orang
4	Penyuluhan Kelurahan Bartim	-	24 orang
5	Rakor P2TB Pamekasan	20 puskesmas	32 orang

Sumber : UPT Paru Pamekasan

2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata dengan kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Asap Rokok pagu sebesar Rp. 14.000.000.000,00 terealisasi sebesar 91,35% atau Rp. 12.788.786.470,00. Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matriks 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Pada tahun 2014, dengan total pagu untuk belanja modal alat pengolahan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 terealisasi sebesar 99,00% atau Rp. 1.287.000.000,00. Belanja modal alat pengolahan yang dimaksud adalah pembelian alat incinerator. Incinerator adalah alat yang dapat menghancurkan limbah organik melalui pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungannya. Seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan pasien rawat inap serta pemenuhan syarat akreditasi rumah sakit maka BP4 Pamekasan perlu mengadakan alat incinerator tersebut. Berikut adalah gambar incinerator yang telah dilaksanakan dan letaknya disamping IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah).
- Pada tahun 2014, dengan total pagu untuk belanja modal alat laboratotium sebesar Rp. 1.540.000.000,00 terealisasi sebesar 98,56% atau Rp. 1.517.780.000,00. Alat laboratorium yang telah terpenuhi antara lain Hematology Analyzer, Centrifuge, dan Biosafety Cabinet. Berikut adalah alat laboratorium yang sudah dipenuhi dan peningkatan capaian kinerja instalasi laboratorium berupa peningkatan pemeriksaan laboratorium antara lain :

Tabel 4.2.14.4**Capaian kinerja instalasi laboratorium**

No	Jenis Pemeriksaan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Mikrobiologi	3.622	4.191	4.395
2	Kimia klinik	16.056	21.435	27.416
3	Urinalisa	4.872	6.376	7.955
4	Hematologi	4.932	7.108	8.224
5	Serologi	240	171	698
6	Urine lengkap	76	142	292
7	Kreatinin	167	462	811
8	BJ. Plasma	75	119	178
7	Bakteriologi	Belum melakukan pemeriksaan	33	28
8	NS1		7	4
9	Feaces lengkap		10	0
10	Na/K/Cl		35	78
12	Jumlah pasien	7.972	10.738	12.755

Sumber : UPT paru Pamekasan

- Pada tahun 2014, dengan total pagu untuk belanja modal gedung tempat kerja sebesar Rp. 4.454.650.000,00 terealisasi sebesar 90,89% atau Rp. 4.048.934.000,00. Secara rinci anggaran tersebut berikut tujuh unit terlaksananya pembangunan gedung antara lain :
 1. Pembangunan gedung dapur dan laundry tahun 2014
 2. Pembangunan instalasi sentra oksigen
 3. Pembangunan selasar penghubung antara rawat inap dan rawat jalan tahap I
 4. Pembangunan ruang tunggu pasien rawat inap untuk kelas III
 5. Pembuatan taman rawat inap
 6. Pembuatan pagar pembatas untuk rawat inap
 7. Pembuatan penangkis air hujan rawat inap tahap I
- Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut maka berikut capaian peningkatan kinerja rawat inap, unit gawat darurat, dan instalasi gizi yang berupa laporan kunjungan yang telah tercapai.

Tabel 4.2.14.5
**Capaian peningkatan kinerja rawat inap, unit gawat darurat,
dan instlasi gizi**

NO	URAIAN	STANDAR	TAHUN		
			2012	2013	2014
1	Rawat Inap				
	Jumlah pasien masuk	Tidak ada	1.748	2.831	3.762
	BOR	60-85%	69,05	75,31	94,35
	ALOS	6-9 hari	3,89	3,68	3,48
	BTO	40-50 kali	64,74	74,50	99,00
	TOI	1-3 hari	1,74	1,21	0,21
	NDR	Tidak ada	32,04	38,86	34,29
	GDR / CDR		32,04	17,66	20,47
2	Unit Gawat Darurat	Tidak ada	2.167	3.454	4.029
3	Konsul Gizi	Tidak ada	Belum	Belum	2.139

Sumber : UPT paru pamekasan

- Selain itu, belanja modal lainnya pada tahun 2014 BP4 Pamekasan berupa alat kedokteran dengan pagu sebesar Rp. 5.107.750.000,00 terealisasi sebesar 92,43% atau Rp 4.721.211.000,00 yang berupa CR (computer radiography), bed pasien, ventilator, dan stretcher hydrolic. Alat studio dengan pagu sebesar Rp. 39.160.450,00 terealisasi sebesar 99,59% atau Rp. 39.000.000,00 yang berupa CCTV (*Closed Circuit Television*), dan perlengkapan kantor dengan pagu sebesar Rp. 1.049.250.000,00 terealisasi sebesar 90,89% atau Rp. 898.260.000,00 yang berupa perlengkapan di ruang pertemuan, AC untuk pelayanan dan manajemen, rak berkas rekam medik, dan kursi tunggu pasien.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

Ijin operasional dari incinerator BP4 Pamekasan sampai saat ini belum ada dikarenakan masih dalam proses kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan kepada Kemenkes Pusat. Selain itu, CR (*computer radiography*) masih belum digunakan sampai saat ini dikarenakan operasional berupa film hasil rontgen belum tersedia.

Upaya Pemecahan Masalah :

Untuk ijin operasional dari incinerator BP4 Pamekasan segera diberlakukan dengan batas maksimal tahun 2015. Untuk CR (*computer radiography*) segera dianggarkan pada perubahan anggaran belanja fungsional tahun 2015.

2.15. BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU (BP4) MADIUN

a. Sasaran Tahun 2014

Terlaksananya kegiatan UKM di BP4 Madiun

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program ini dengan total anggaran sebesar Rp 2.489.555.425,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.276.181.757,00 atau 91,43%, Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan pokok peningkatan kualitas pelayanan publik dimaksudkan untuk pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terstandar dan pengadaan obat-obatan untuk penunjang kebutuhan di BP4 Madiun. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 68 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun berubah fungsi dari Balai Menjadi Rumah Sakit Paru Manguharjo (RSPM) Madiun. RSPM Madiun merupakan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. RSPM Madiun secara substansi memberikan pelayanan umum di bidang kesehatan kepada masyarakat di wilayah Jawa timur dalam hal promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative penyakit paru. Berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru dan pernapasan serta berdasarkan hasil studi kelayakan pendirian RS Khusus Paru, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyetujui perubahan BP4 Madiun menjadi RSPM Madiun.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.15.1
Jumlah SDM BP4 Madiun Tahun 2014

No	Ketenagaan	Jumlah Pegawai	PNS	Non PNS	Ket
1	Kepala BP4	1	1	0	
2	Kasubag TU	1	1	0	
3	Dokter Spesialis	5	0	5	KSO
4	Dokter Umum	8	6	2	
5	Perawat	22	8	12	
6	Pranata Laboratorium	6	2	4	
7	Radiografer	3	2	1	
8	Atem	1	1	0	
9	Sanitarian	1	1	0	
10	Apoteker	1	0	1	
11	Asisten Apoteker	6	2	4	
12	Rekam Medis	2	2	0	
13	Gizi	5	3	2	
14	Fisioterapi	1	0	1	
15	Penata Laporan Keuangan	1	0	1	
16	Administrasi Umum	17	13	4	
17	IPS	2	1	1	
18	Tenaga Keamanan	6	0	7	
19	Sopir	2	0	2	
JUMLAH		92	44	42	

Sumber : Data Kepegawaian BP4 Madiun

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Belum adanya Dokter Spesialis terutama spesialis paru yang dimiliki oleh BP4 Madiun, yang ada saat ini adalah dokter KSO;
- Dokter yang dimiliki BP4 Madiun saat ini masih mengikuti PPDS sebanyak 3 Dokter
- Kebutuhan SDM yang masih perlu di tambah.

Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan kerjasama dengan menyediakan dokter spesialis (KSO) untuk menunjang kebutuhan di BP4 Madiun;
- Merekrut tenaga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki oleh BP4 Madiun.

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 6.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.303.071.780,00 atau 92,69%, Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program P2TB merupakan Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan dan pencegahan penyakit tuberculosis di Indonesia. Dalam program ini BP4 Madiun sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selain sebagai unit fasyankes pelaksana program TB juga sebagai pembina di wilayah kerjanya. Untuk tugas dan fungsi tersebut, BP4 Madiun melaksanakan kegiatan antara lain :

- Koordinasi lintas sektor dengan dinas kesehatan kabupaten/kota daerah binaan;
- Pemberdayaan masyarakat di wilayah binaan;
- Bimbingan teknis kepada petugas pengelola program.

Program P2TB ini dirancang oleh pemerintah agar bisa dilaksanakan oleh unit fasyankes di Indonesia. Agar kualitasnya terjamin maka dilakukan uji silang untuk pemeriksaan mikroskopis TB secara berjenjang. Laboratorium BP4 Madiun ditunjuk sebagai rujukan uji silang mikroskopis TB tingkat I dan II / RUS I dan II. Wilayah kerja untuk RUS I adalah kabupaten/kota di wilayah sekitar Madiun, sedangkan untuk RUS II wilayah kerjanya adalah seluruh Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 443.2/498/101.2/2013 tentang Penunjukan BP4 Madiun sebagai Laboratorium Rujukan Uji Silang Mikroskopis TB/RUS II. Kegiatannya sudah dilaksanakan dengan menggunakan dana Bantuan Luar Negeri melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sebagai RUS II dari sekian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menjalankan tupoksinya yang bisa dibiayai dari APBD adalah dengan melaksanakan kegiatan Koordinasi

P2TB se Bakorwil Madiun, Pembinaan P2TB, Paguyuban Paru, Paguyuban Asma, Pelatihan Kader TB, Deteksi Dini Kasus TB, Sosialisasi ISTC TB, Sosialisasi TB Anak, Pertemuan Koordinasi Laboratorium Intermediate Provinsi Jawa Timur.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Program P2TB adalah luas wilayah daerah binaan BP4 Madiun serta kemampuan petugas dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan program TB masih perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dimaksudkan agar semua penderita TB bisa ditemukan dan diobati hingga tuntas sehingga tidak menimbulkan resisten OAT (TB MDR) serta rantai penularan TB bisa diputus.

Upaya pemecahan masalah :

- Melaksanakan bimbingan teknis/supervisi pada petugas terkait;
- Pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kader TB, Paguyuban Paru dan pembinaan P2TB daerah binaan;
- Promosi Kesehatan.
- BP4 Madiun sebagai RUS I sebagai berikut :
- Melaksanakan uji silang untuk daerah binaan;
- Supervisi pada daerah binaan;
- On the job training pada petugas terkait.
- BP4 Madiun sebagai RUS II sebagai berikut :
BP4 Madiun sebagai Laboratorium rujukan uji silang TB memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan kurangnya laboratorium RUS I Provinsi Jawa Timur yang sementara ini masih 16 laboratorium intermediate agar ditingkatkan menjadi 38 laboratorium intermediate;
Melaksanakan supervisi pada laboratorium *intermediate* di Provinsi Jawa Timur.

Namun, pada pelaksanaannya kegiatan BP4 Madiun sebagai RUS I dan RUS II masih didanai oleh bantuan luar negeri. Guna peningkatan pengembangan Program P2TB serta Laboratorium Rujukan Uji Silang TB, maka dapat diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan alokasi anggaran guna menunjang kegiatan tersebut.

3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 6.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.592.009.812,00 atau 86,03%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dengan kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok digunakan sebagai sarana Revitalisasi dan Rehabilitasi Bangunan Tempat Kerja yang telah di sesuaikan dengan master plan dan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

Pembangunan gedung pelayanan kesehatan sudah terlaksana sesuai dengan pentahapan pada Masterplan. Masalahnya adalah sarana pada gedung tersebut masih belum lengkap belum dapat di gunakan secara optimal

Upaya pemecahan masalah :

Melengkapi sarana tersebut sehingga bisa digunakan untuk melayani masyarakat secara maksimal.

2.16 UPT AKPER MADIUN

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a) Pagu dan realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 3.111.413.000,00 dan terealisasi Rp. 2.611.288.611,00 atau 83,93%, pagu dan anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Capaian kinerja pada kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipensimaru) tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan 2014, hal ini disebabkan pada tahun 2014 kegiatan Sipensimaru alokasi anggaran jadi satu dan jadwal kegiatan lebih dipadatkan sehingga tidak terjadi lembur
- Jumlah mahasiswa yang diterima lebih banyak di tahun 2014 sehingga capaian kinerja lebih meningkat hal ini dikarenakan untuk meningkatkan target PAD
- Proses belajar mengajar terdiri dari pembelajaran kelas dan laboratorium, pada tahun 2014 capaiannya menurun dibanding tahun 2013, ini disebabkan pada tahun 2013 banyak membeli alat-alat untuk pembelajaran laboratorium
- Praktik klinik keperawatan capaian ditahun 2014 menurun ini karena efisinesi penggunaan anggaran
- Pelatihan PPGD capaian kinerja di tahun 2014 lebih sedikit atau menurun, hal ini karena tahun 2014 kita hanya membayar biaya kepesertaan pelatihan.

- Penyusunan KTI tahun 2014 lebih rendah dari tahun 2013 atau menurun karena di tahun 2013 untuk hasil ujian/penetapan nama-nama lulusan harus dikonsultasikan di Dinas Kesehatan Prov. Jatim sedangkan tahun 2014 tidak.
- Wisuda mahasiswa dilaksanakan setiap tahun, tahun 2014 menurun dibanding 2013 untuk capaiannya, hal ini karena perubahan peraturan pada tahun 2014.
- Bimbingan akademik untuk mahasiswa tahun 2014 menurun dibanding 2013. hal ini karena di tahun 2014 mengingat jumlah mahasiswa yang bertambah sehingga bimbingan lebih dipadatkan
- Penelitian bidang kesehatan oleh dosen di tahun 2013 dibiayai anggaran dari kegiatan Peningkatan pengembangan Akper Madiun dan tahun 2014 capaian kinerja rendah hal ini dikarenakan penelitian dilakukan satu kali.
- Untuk pengembangan poliklinik capaian kinerja tahun 2014 meningkat, hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak pengadaan alat-alat kedokteran untuk menunjang kegiatan di poliklinik
- Diklat teknis administrasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Latkesmas tidak mempunyai referensi untuk penyelenggaraan diklat tersebut
- Pengadaan master plan dilaksanakan tahun 2014 guna rencana pengembangan Akper Madiun
- Akreditasi merupakan salah satu syarat untuk pengembangan institusi di tahun 2013 capaian kinerja lebih tinggi dikarenakan untuk persiapan pelaksanaan akreditasi dibutuhkan data/ dokumen pendukung akreditasi, dan di tahun 2014 pelaksanaan akreditasi dan menunggu hasil.
- Pengadaan buku di tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan Stok buku sesuai kebutuhan tidak tersedia di pasaran penyedia buku di Indonesia, dan untuk pemesanan dibutuhkan waktu yang lama sehingga waktu tidak mencukupi.

Tabel 4.2.16.1
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Fungsional Tahun 2013 – 2014

No	Komponen	Satuan	2013	2014
1	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Kegiatan	63.479.671	36.730.000
2	Pengenalan Program Studi	Kegiatan	48.733.500	56.165.000
3	Proses Belajar Mengajar	Kegiatan	410.546.064	388.378.811
4	Praktik Klinik Keperawatan	Kegiatan	563.055.000	486.315.000
5	Pelatihan PPGD	Kegiatan	166.800.000	148.500.000
6	Penyusunan KTI	Kegiatan	152.899.600	120.387.500
7	Wisuda	Kegiatan	133.554.200	108.478.150
8	Bimbingan Akademi	Kegiatan	34.177.920	24.360.000
9	Penelitian Bidang Kesehatan oleh Dosen	Kegiatan	0	24.890.000
10	Pengembangan Poliklinik	Kegiatan	14.144.900	450.835.050
11	Workshop Pembentukan Prodi Baru	Kegiatan	0	32.372.500
12	Diklat Teknis Administrasi	Kegiatan	0	0
13	Master Plan	Kegiatan	0	48.780.600
14	Akreditasi	Kegiatan	159.697.379	44.814.000
15	Pengadaan Buku Perpustakaan	Kegiatan	7.098.300	0

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Dari sisi akademik lulus dan sudah mengikuti uji kompetensi dan hasil belum keluar
- Untuk pengadaan barang praktek dan percontohan, harga dipasaran terjadi kenaikan harga di DPA sehingga tidak dapat direalisasikan
- Diklat teknis administrasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Latkesmas tidak mempunyai referensi untuk penyelenggaraan diklat tersebut
- Pengadaan buku di tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan Stok buku sesuai kebutuhan tidak tersedia di pasaran penyedia buku di Indonesia, dan untuk pemesanan dibutuhkan waktu yang lama sehingga waktu tidak mencukupi

Upaya Pemecahan masalah

- Menunggu hasil uji kompetensi oleh penyelenggara
- Dianggarkan kembali ditahun 2015 baik dari anggaran murni maupun PAK

2) Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pagu dan realisasi anggaran

Pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 Realisasi program sumber daya kesehatan kegiatan peningkatan pengembangan Akper Madiun sebesar Rp. 447.101.080,00 atau dengan prosentase 89,42%.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat tahun 2014 meningkat hal ini dikarenakan kegiatan pengabdian pada masyarakat lebih banyak yaitu 6 kali
- Capaian program ditahun 2014 anggaran lebih banyak dikarenakan terjadi kenaikan harga bahan-bahan material dibanding tahun 2013 dampak dari kenaikan BBM
- Penyusunan Renstra 2014–2019 di tahun 2014 banyak tidak terserap karena kegiatan penyusunan renstra dilaksanakan di lingkungan kantor sehingga perjalanan dinas tidak terserap
- Pemeliharaan gedung kantor tahun 2013 dianggarkan dari anggaran Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran untuk pemeliharaan kantor dan rumah dinas, sedangkan tahun 2014 untuk pengecatan ruang kantor

Tabel 4.2.16.2

**Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Akper
Tahun 2013 – 2014**

No	Komponen	Satuan	2013	2014
1	Pengabdian pada masyarakat	Kegiatan	22.605.250	23.963.000
2	Pembangunan gedung laboratorium keperawatan	Kegiatan	375.822.500	384.694.750
3	Penyusunan Renstra 2014 – 2019	Kegiatan	0	17.391.330
4	Pemeliharaan gedung kantor	Kegiatan	69.448.850	21.052.000

c) Permasalahan dan Upaya pemecahannya

Permasalahan

Pembangunan gedung laboratorium keperawatan perlu penambahan dikarena jumlah mahasiswa yang bertambah

Upaya Pemecahan Masalah

Dianggarkan kembali ditahun 2015

2.17. UPT AKADEMI GIZI SURABAYA

Untuk mewujudkan salah satu tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 adalah meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar, maka ditetapkan :

a. Sasaran Tahun 2014:

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar, dengan indikator keberhasilan adalah Minimal 70% lulusan Akademi Gizi Surabaya Tahun 2014 mempunyai IPK ≥ 3.00 .

b. Program

1) Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program sumber daya kesehatan didukung 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pengembangan AKZI Surabaya.

Program sumber daya kesehatan dengan pagu sebesar Rp 500.000.000,00 terealisasi sebesar 91,60% atau Rp 458.236.000,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Format 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Kegiatan peningkatan pengembangan AKZI Surabaya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan institusi Akademi Gizi Surabaya.
- Sebanyak 300 mahasiswa Akademi Gizi Surabaya mendapatkan sistem pembelajaran yang berbasis pada kompetensi dalam suasana akademik yang kondusif melalui kerja sama yang baik dan kekeluargaan antar Civitas Akademika melalui penerapan standar-standar pelayanan minimal yang dilengkapi dengan standard operating prosedur.
- Sebanyak 40 orang pendidik dan kependidikan di Akademi Gizi Surabaya mendapatkan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya.
- Terlaksananya sarana pembelajaran yang memadai sebanyak 80 buah.
- Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan sebanyak 5 kegiatan.

- Terlaksanya kerjasama dan kemitraan dengan sektor terkait sebanyak 2 kegiatan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Meningkatnya masalah-masalah yang timbul akibat transisi epidemiologi di bidang gizi, pesatnya pertumbuhan industri pangan, jumlah dan tuntutan mutu institusi pelayanan gizi dan makanan disamping peningkatan prevalensi penyakit baik infeksi maupun degeneratif yang berakar pada kurang gizi sejak masa kehamilan, dan timbulnya masalah obesitas sejak usia dini meningkatkan beragam problematika gizi kini dan akan datang sehingga memerlukan penanganan yang professional kurang dibarengi dengan jumlah anggaran yang cukup.
- Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya (Laboratorium, dll) belum dapat diberdayakan dengan baik melalui kerjasama dengan lintas sektor untuk kepentingan penelitian maupun pengabdian masyarakat.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Akademi Gizi Surabaya dapat mengembangkan diri menjadi Penyelenggara Pelatihan dan Konseling Penanganan berbagai Masalah Gizi baik bagi praktisi di bidang kesehatan maupun masyarakat umum.
- Akademi Gizi Surabaya dapat melakukan pengembangan dengan menghasilkan berbagai produk gizi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya (Laboratorium, dll) dapat diberdayakan melalui kerjasama dengan lintas sektor untuk kepentingan penelitian maupun pengabdian masyarakat.
- SDM yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya dapat berperan dalam kerjasama dengan lintas sektor untuk berbagai kegiatan, antara lain : pelatihan, seminar, workshop, dll.
- Penyelenggaraan Pendidikan Diploma III Akademi Gizi Surabaya dapat dikembangkan menjadi Program Diploma IV Sarjana Gizi Terapan.

2.18 UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI

a. Sasaran Tahun 2014

Sasaran UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Tahun 2014 antara lain :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Publik Aparatur Dinas Kesehatan dan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati
- 2) Meningkatkan Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Fasilitas pendukung Program Diklat
- 3) Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, dan Meningkatkan Pelayanan Publik.

b. Program

1) Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pagu dan Realisasi Program

Program sumber daya kesehatan memiliki pagu sebesar Rp. 1.794.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.419.150.715,00 atau 79,08%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matriks 16 kolom.

b) Hasil Kegiatan Pembangunan

- 1) Peningkatan Keterampilan sumber daya manusia di Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur dan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati terselenggara dengan jumlah peserta sebanyak 132 orang.
- 2) Pengembangan Institusi UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati terlaksana dengan 5 kegiatan.
- 3) Pengembangan sarana-prasarana UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati terlaksana dengan 4 kegiatan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Bimbingan Pemantapan BLUD tidak dapat terealisasi karena instansi pembina sudah menganggarkan sendiri (terjadi double penganggaran). Sedangkan untuk Pelatihan Public Relation bagi Pegawai UPT Latkesmas Murnajati tidak dapat terealisasi karena dianggarkan untuk pelaksanaannya di luar instansi pemerintah, namun di tengah tahun anggaran terdapat kebijakan bahwa kegiatan harus dilaksanakan di instansi pemerintah.

Upaya Pemecahannya

Kegiatan tidak dilaksanakan.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan cepat, aman, dan nyaman
- Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat.
- Percepatan penyelesaian pembangunan ruas Jalan Lintas Selatan dengan indikator yang diukur berupa :
 - Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap
 - Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer
 - Persentase Penyelesaian Pembangunan Jalan Lintas Selatan
 - Persentase Penyelesaian Pembangunan Jembatan Lintas Selatan

Hasil pengukuran indikator kinerja urusan infrastruktur jalan tahun 2013 – 2014 dapat dilihat pada tabel 4.3.1.1

Tabel 4.3.1.1

Sasaran, indikator sasaran, dan capaian 2013 & 2014

SASARAN		INDIKATOR	2013	2014
1	Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan cepat, aman, dan nyaman.	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap.	88,40%	89,27 %
2	Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat.	Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam system jaringan jalan primer.	54,15%	55,01 %
3	Penyelesaian Pembangunan Ruas Jalan Lintas Selatan	Persentase Penyelesaian Pembangunan Jalan Lintas Selatan	0,00%	0,00 %

SASARAN		INDIKATOR	2013	2014
		Persentase Penyelesaian Pembangunan <u>Jembatan</u> Lintas Selatan	3,53%	3,85 %

Sumber : Dinas PU Bina Marga

Dari tabel diatas, nilai kemantapan jalan tahun 2014 sebesar 89,27% dan tahun 2013 sebesar 88,40 % ini berarti mengalami terjadi peningkatan kemantapan sebesar 0,87 % atau capaian sebesar 43,5 % dari target peningkatan kemantapan di rentra 2%. Kemantapan ini berupa kerataan permukaan perkerasan sehingga nyaman untuk berkendara namun tidak memperhitungkan kekuatan struktur jalannya. Kemantapan ini diperoleh dari pelaksanaan pemeliharaan rutin tambal sulam dan pemeliharaan berkala serta peningkatan jalan. Pemeliharaan jalan rutin dan berkala hanya untuk lapisan permukaan perkerasan saja sehingga tidak menambah nilai struktural jalan. Sehingga kemantapan jalan yang didapat dari pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala berupa kemantapan marjinal dan kemantapan struktural jalan didapat dari pelaksanaan peningkatan. Untuk persentase penyelesaian jalan dan jembatan lintas selatan Jawa Timur mengalami fluktuasi seiring dengan kesiapan lahan dan besaran anggaran yang tersedia tiap tahunnya. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur merupakan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 8 Pemerintah Kabupaten yang meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi yang dimulai sejak tahun 2002. Pelaksanaan pembangunan fisik jalan dan jembatan di Jalan Lintas Selatan (JLS) dibiayai melalui APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur, sedangkan biaya pembebasan lahan oleh APBD masing-masing kabupaten.

Kendala utama dari proyek ini adalah keterbatasan anggarandari tahun ke tahun, dari hal tersebut pada tahun 2011 – 2014 seluruh alokasi pembangunan Jalan Lintas Selatandari pemerintah provinsi Jawa Timur

digunakan untuk pembangunan jembatan lintas selatan, sehingga capaian kinerja indikator pembangunan jalan lintas selatan adalah 0,00%.

b. Program

Untuk mencapai sasaran diatas dilaksanakan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sasaran Program pembangunan jalan dan jembatan dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi serta meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah selatan jawa timur. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri atas kegiatan berikut :

- Perencanaan Pembangunan Jembatan
- Pembangunan Jembatan
- Peningkatan Jalan Provinsi
- Perencanaan Peningkatan Jalan
- Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur
- Supervisi Pembangunan Jembatan
- Supervisi Peningkatan Jalan
- Supervisi Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur
- Penyusunan Program
- Peningkatan Jalan Khusus DAK

Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan ditujukan untuk mendukung kemantapan jalan serta penyelesaian jalan lintas selatan Jawa Timur. Kemantapan jalan diperoleh dari kegiatan peningkatan jalan dan penggantian jembatan, dimana nilai struktural jalan pada kegiatan ini ditingkatkan. Disamping itu dilakukan pula kegiatan pembangunan jalan dan jembatan lintas selatan. Pencapaian program pembangunan jalan dan jembatan tahun 2014 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3.1.2
Pencapaian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Th 2014

KEGIATAN	SATUAN	2014
Perencanaan Pembangunan Jembatan	Buah	2
Pembangunan Jembatan	Buah	6
Peningkatan Jalan Provinsi	Km	28,66
Perencanaan Peningkatan Jalan	Dokumen	12
Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	M'	240
Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	Dokumen	1
Supervisi Pembangunan Jembatan	Buah	2
Supervisi Peningkatan Jalan	Lokasi	8
Supervisi Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	Lokasi	4
Penyusunan Program	Dokumen	2
Peningkatan Jalan Khusus DAK	Km	3,85

Sumber : Dinas PU Bina Marga

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ini dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 216.545.950.000,00 terealisasi sebesar Rp186.333.523.558,00 atau 86,05% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matriks 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pada program pembangunan jalan dan jembatan ini terdapat 3 outcome, yaitu :

1. Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer.
2. Penyelesaian Pembangunan Jalan Lintas Selatan
3. Penyelesaian Pembangunan Jembatan Lintas Selatan
 - Program pembangunan jalan dan jembatan melalui kegiatan peningkatan jalan dan penggantian jembatan, dilaksanakan guna mencapai target memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan

primer sesuai Renstra yaitu 79,73% tetapi tercapainya memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer TA 2014 sebesar 55,01% dengan capaian kinerja 68,99%. Sedang pada kebutuhan anggaran pada program ini di Renstra tahun 2014 sebesar Rp 597.338.460.000,00 tetapi terealisasi Rp 216.545.950.000,00 dengan capaian kinerja 36,25%

- Program pembangunan jalan dan jembatan melalui kegiatan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan, dilaksanakan guna mencapai target Pembangunan Jembatan Lintas Selatan sesuai Renstra tahun 2014 yaitu 110M' yang teralisasi sebesar 240 M' dengan capaian kinerja 218,18%. Sedang pada kebutuhan pendanaan di Renstra Rp 132.000.000.000,00 terealisasi Rp 43.286.000.000,00 dengan capaian kinerja 32,79%
- Dua Tahun terakhir perkembangan yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di tahun 2013 dan tahun 2014 seiring dengan Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah sebagaiberikut :

Tabel 4.3.1.3

Perkembangan Pembangunan Jalan dan Jembatan

NO	KEGIATAN	SAT.	RENSTRA		REALISASI		CAPAIAN %	
			2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Peningkatan Jalan	Km	176,07	176,07	73,141	28,45	41,54	16,16
2	Penggantian Jbt	M'	518,60	143,00	61,00	117,70	19,30	82,31
3	Pemb. Jln Linsel	Km	78,52	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pemb. Jbt Linsel	M'	265,0	110,00	240,00	240,00	90,57	218,18

Sumber : Dinas PU Bina Marga

c) Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Keterbatasan Dana, menyebabkan:
 - Hasil pelaksanaan s/d tahun 2014 belum fungsional.
 - Pelaksanaan berupa pekerjaan bukalahan dan mengutamakan pembangunan jembatan.
 - Alinemen jalan (*grade dan alinemen horizontal*) belum tercapai sesuai desain kriteria jalan arteri
 - Keterbatasan dana untuk pembangunan jalan Lintas Selatan sementara tidak terealisasi, sehingga prioritas hanya pada pembangunan jembatan untuk menghubungkan wilayah antar kabupaten
- Kondisi Topografi
 - Sekitar 65% panjang JLS berada di daerah pegunungan dan dekat dengan pantai sehingga memiliki grade > 12%
- Aksesibilitas Rendah
 - Karena adanya kesulitan dalam hal suplay material/bahan, mobilitas peralatan, keamanan yang kurang, dsb sehingga jalan yang sudah dibuka tidak dapat segera difungsikan secara optimal.
- Biaya Pemeliharaan Besar
 - Pembangunan dengan sistem buka lahan sesuai dengan dana yang tersedia (minimal/tidak tuntas) menyebabkan rumput dan semak tumbuh kembali, sehingga diperlukan biaya pemeliharaan.
 - Perlu adanya percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan dengan peran serta Pemerintah Pusat, mengingat lahan yang sudah siap untuk pembangunan jalan sepanjang 251,58 Km dan pembangunan jembatan sebanyak 32 buah, dengan total 1.655 M'.

Pemecahan Masalah

- Pada tahun mendatang pemilihan jasa lebih selektif lagi
- Penyempurnaan perencanaan anggaran.
- Mengupayakan dan mendorong agar peran serta Pemerintah Pusat, dalam hal pendanaan segera terealisasi sehingga potensi-potensi yang terdapat pada wilayah selatan pulau Jawa dapat tergali secara maksimal.

2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a) Pagu dan realisasi

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp 135.862.412.000,00 terealisasi sebesar Rp 127.651.998.486,00 atau 93.96% sedangkan realisasi fisik mencapai 100.00%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matriks 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pencapaian program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.1.4

Pencapaian Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun 2013 - 2014

KEGIATAN	SATUAN	2013	2014
Pemel. Rutin Jalan	Km	1.760,9129	1.760,9129
Pemel. Berkala Jalan	Km	0	32,002

Sumber : Dinas PU Bina Marga

c) Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan :

Keterbatasan biaya untuk mencapai target sesuai Renstra

Solusi :

Peran serta Pemerintah dalam hal pendanaan segera terealisasi untuk tercukupi sesuai Renstra

3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

a) Pagu dan realisasi Anggaran

Program Inspeksi Kondisi Jalan Jembatan ini dengan pagu Anggaran sebesar Rp 4.135.000.000,00, terealisasi sebesar Rp 3.793.203.650,00 atau 91.73% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matriks 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil dari kondisi jalan dan jembatan ini, kondisi kemantapan jalan dapat diketahui. Perkembangan kondisi jalan dan jembatan tahun 2013 – 2014 dapat dilihat pada tabel 4.3.1.5

Tabel 4.3.1.5

Perkembangan Kondisi Jalan Tahun 2013 – 2014

KONDISI JALAN		2013	2014
Baik	Km	717,553	893,422
Sedang	Km	839,068	678,520
Mantap	Km	1.556,621	1.571,942
	%	88,40	89,27
Rusak ringan	Km	181,791	178,470
Rusak berat	Km	22,500	10,500
Tidak Mantap	Km	204,291	188,970
	%	11,60	10,731

Sumber : Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke Binamargaan

a) Pagu dan realisasi Anggaran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp 56.426.951.000,00 terealisasi sebesar Rp 53.763.842.136,00 atau 95,28% sedang realisasi fisiknya 100%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matriks 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana ke Binamargaan adalah :

Tersedianya alat-alat kebinamargaan yang siap pakai sebagai pendukung kemantapan jalan yang ingin dicapai sebesar 100% terealisasi 57,07% dengan capaian kinerja 57,07%.

3.2 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Terlayannya kebutuhan air untuk irigasi;
- 2) Terpeliharanya kondisi jaringan irigasi;
- 3) Tersedianya air baku untuk berbagai keperluan;
- 4) Penurunan luas genangan banjir untuk debit periode ulang tertentu.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 19.997.760.410,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.715.213.489,00 atau 83,59%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Capaian Indikator Kinerja Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku pada tahun 2014 sebesar 87,372% meningkat dibanding dengan tahun 2013 sebesar 87,370%. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan waduk secara regular;
- Peningkatkan kemampuan layanan Irigasi Air Tanah melalui Rehabilitasi/Perbaikan/Penggantian pompa/mesin penggerak dan Perbaikan Jaringan Irigasi Air Tanah di 78 lokasi tersebar di Jawa Timur;
- Pembangunan waduk lapangan dengan teknologi geomembran di 58 lokasi tersebar di Jawa Timur;
- Pengadaan tanah seluas 1,085 Ha untuk pembebasan tanah embung geomembran; dan
- Pembangunan Embung di 6 lokasi tersebar di Jawa Timur.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Sejalan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, pertanian maupun industri juga semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan air baku yang tidak seimbang dengan kemampuan penyediaan diperkirakan akan memicu konflik antar pengguna air. Perkembangan daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam daya dukung lingkungan dalam menyediakan air. Selain itu, kapasitas infrastruktur penampung air, seperti waduk dan bendungan semakin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan intensitas kegiatan operasi dan pemeliharaan yang belum mampu secara optimal menekan laju penurunan tingkat layanan prasarana sumber daya air, sehingga kondisi prasarana sumber daya air semakin menurun;
- Defisit ketersediaan air baku di Jawa Timur sebesar 2,90 milyar m³, dimana :
 - Jumlah kebutuhan air baku = 22,20 milyar m³
 - Jumlah ketersediaan air baku = 19,30 milyar m³
 - Jumlah potensi air baku = 52,20 milyar m³
- Sulitnya pembebasan lahan milik masyarakat/Perhutani untuk pembangunan tampungan air baku sebesar 579.560.000 m³, diantaranya :
 1. Waduk Gongseng (Bojonegoro) seluas 493,24 Ha
 2. Waduk Bendo (Ponorogo) seluas 294,61 Ha
 3. Waduk Tukul (Pacitan) seluas 77,34 Ha
 4. Waduk Tugu (Trenggalek) seluas 95,54 Ha
 5. Jabung Ring Dike (Tuban dan Lamongan) seluas 1.400,00 Ha
 6. Tanggul Bengawan Solo Hilir seluas 75 Ha
 7. Kali Wonokromo (Surabaya) seluas 0,60 Ha

- Penolakan masyarakat setempat;
- Peningkatan alih fungsi lahan dari lahan basah menjadi lahan industri/perumahan;
- Meningkatnya laju sedimen akibat kerusakan lingkungan;
- Terbatasnya ketersediaan air irigasi pada musim kemarau; dan
- Kekurangan air domestik pada daerah rawan bencana kekeringan.

Upaya pemecahan masalah :

- Perubahan tata guna lahan pada hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menyebabkan peningkatan laju sedimentasi yang berdampak pada semakin berkurangnya kapasitas dari infrastruktur sumber daya air (waduk dan embung). Usaha-usaha yang dapat dilakukan mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan pengerukan sedimen di waduk dan embung sebagai salah satu upaya mempertahankan kapasitas tampungan waduk, karena pembangunan waduk/embung baru relatif sulit terealisasi dengan adanya kendala sosial khususnya pengadaan lahan;
- Normalisasi waduk/embung secara rutin dengan peralatan sendiri (17 unit ekskavator, 2 unit Bulldozer, 5 unit Dump Truck);
- Melanjutkan Pengadaan Tanah untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang didanai APBN;
- Pembangunan waduk lapangan kapasitas kecil dengan lapisan geomembran; dan
- Rehabilitasi pompa dan jaringan irigasi air tanah di 1.570 sumur pompa dalam (kedalaman > 80 m) tersebar di seluruh Jawa Timur.

2) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 23.104.734.011,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.047.403.739,00 atau 91,10%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Capaian Indikator Kinerja Penurunan luas genangan banjir untuk debit periode ulang tertentu pada tahun 2014 sebesar 16.150 Ha meningkat dibanding dengan tahun 2013 sebesar 10.150 Ha.

Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Normalisasi dengan peralatan sendiri dan pembangunan tanggul sungai pada daerah rawan banjir, diantaranya Kali Welang dan Kali Rejoso (Kab. Pasuruan); Kali Pancarglagas (Kab. Probolinggo); Kali Sampean, Kali Deluwang, Kali Basiyan, Kali Lobawang (Kab. Situbondo); Kali Tanggul (Kab. Jember); Kali Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik); dan Kali Kemuning (Kab. Sampang).

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Morfologi sungai yang berkelok-kelok, kemiringan memanjang relatif datar dan adanya pengaruh pasang surut air laut;
- Meningkatnya koefisien run off dan laju erosi;
- Terdapat beberapa infrastruktur pengendali banjir yang belum selesai dibangun dikarenakan permasalahan pembebasan tanah dan sosial;
- Sebagian besar kegiatan masyarakat (permukiman, industri, aktivitas ekonomi, transportasi) berada pada wilayah dataran banjir;
- Melanjutkan normalisasi dengan peralatan sendiri dan pembangunan tanggul sungai pada daerah rawan banjir, diantaranya Kali Welang dan Kali Rejoso (Kab. Pasuruan); Kali Pancarglagas (Kab. Probolinggo); Kali Sampean, Kali Deluwang, Kali Basiyan, Kali Lobawang (Kab. Situbondo); Kali Tanggul (Kab. Jember); Kali Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik); dan Kali Kemuning (Kab. Sampang).

Upaya pemecahan masalah :

- Melaksanakan normalisasi sungai secara reguler dengan peralatan sendiri pada sungai-sungai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi;

- Kajian dan penanganan secara bertahap pengendalian pada daerah rawan banjir diantaranya Kali Welang dan Kali Rejoso (Kab. Pasuruan); Kali Pancarglagas (Kab. Probolinggo); Kali Sampean, Kali Deluwang, Kali Basiyan, Kali Lobawang (Kab. Situbondo); Kali Tanggul (Kab. Jember); Kali Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik); dan Kali Kemuning (Kab. Sampang);
- Melanjutkan Pengadaan Tanah untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang didanai APBN; dan
- Peningkatan kapasitas floodway Plangwot-Sedayu Lawas dari 640 m³/dt menjadi 1.400 m³/dt.

Penanganan WS Bengawan Solo Jangka Pendek :

- Melakukan pemeliharaan secara rutin pada Saluran Floodway Plangwot-Sedayu Lawas di Lamongan;
- Melakukan pemeliharaan secara rutin pada anak-anak sungai yang bermuara di Bengawan Solo untuk memperbesar daya tampung sungai;
- Melakukan normalisasi pada waduk-waduk misalnya Waduk Pacal, Nglambangan, Prijetan, Gondang;
- Khusus pada daerah depresi dilakukan Management Flood Prone Area/Pengelolaan pada Daerah Yang Rentan Bencana Banjir yaitu dengan melakukan :
 - Membangun *Flood Evacuation Center* yaitu daerah yang mempunyai elevasi tinggi digunakan sebagai Pusat Evakuasi saat Banjir untuk mempermudah akses pemberian bantuan pangan, kesehatan dll;
 - Mempertahankan tradisi masyarakat yaitu Living Harmony with Flood (membiasakan hidup bersama banjir), misalnya Pola Tanam : Banjir-Padi-Polowijo, membangun rumah panggung, keterampilan membuat perahu sederhana, meliburkan sekolah saat terjadi banjir dll;
 - Menambah kapasitas *Floodway Plangwot-Sedayu Lawas* dari 640 m³/dt menjadi 1.400 m³/dt (sesuai dengan kapasitas maksimum)

dengan membangun penambahan pintu *Inlet Flood Way* dan memperlebar saluran *floodway Plangwot*;

- Mempercepat penyelesaian Jabung Ring Dike sebagai Retarding Basin sekaligus sebagai tampungan air baku;
- Membangun pintu-pintu air pada muara anak-anak sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungai Kali Madiun, dengan tujuan menahan masuknya aliran air Bengawan Solo jika elevasi muka air Bengawan Solo tinggi dan sebaliknya;
- Normalisasi dan pembangunan tanggul Kali Lamong di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya;

Penanganan WS Bengawan Solo Jangka panjang :

- Melakukan reboisasi hutan di DAS Bengawan Solo oleh BP DAS Bengawan Solo;
- Membangun waduk pengendali banjir di daerah hulu anak-anak sungai Bengawan Solo, untuk menampung aliran air permukaan sehingga mengurangi debit aliran air masuk ke sungai. Antara lain: membangun Waduk Pejok (vol. 6 jt m³), Waduk Gongseng (20 jt m³) dan embung-embung Solo Valley (50 jt m³), Waduk Tugu Madiun (20 jt m³), Waduk Kresek Madiun (1,5 jt m³), dan Waduk Bendo Ponorogo (33 jt m³);
- Membangun chekdam-chekdam pada hulu anak-anak sungai;
- Membangun tanggul-tanggul sungai Bengawan Solo khusus pada daerah yang padat penduduk; dan
- Merevitalisasi sistem drainase Bengawan Jero (Lamongan).

3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 100.046.819.003,00 dan terealisasi sebesar Rp. 95.333.867.197,00 atau 95,29%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Capaian Indikator Kinerja Luas areal pertanian yang diairi/terpenuhi kebutuhan airnya pada tahun 2014 sebesar 2.207.583 Ha meningkat dibanding dengan tahun 2013 sebesar 2.135.307 Ha dan Rasio/kinerja jaringan irigasi pada tahun 2014 sebesar 69,07 % meningkat dibanding dengan tahun 2013 sebesar 69,06 %.

Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pemantapan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi seluas 164.823 Ha melalui peningkatan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP);
- Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi dengan sumber dana APBD dan Loan melalui Dana Alokasi Khusus dan WISMP II; dan
- Penyuluhan kepada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) mengenai efisiensi pemakaian air irigasi.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Terjadinya penurunan pelayanan akibat umur bangunan dan fungsi layanan jaringan irigasi;
- Pola pemakaian air irigasi di tingkat petani masih cukup tinggi, serta terjadi penyimpangan pengambilan air yang telah disepakati dalam rencana tata tanam dan pola alokasi air; dan
- Pemanfaatan sumur air dangkal untuk irigasi yang berlebihan sehingga berpengaruh terhadap penurunan muka air tanah dan menyebabkan kekeringan pada sumur-sumur penduduk.

Upaya pemecahan masalah :

- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi : kegiatan pengaturan dan pembagian air, perawatan pintu, babat rumput, gali sedimen, pemeliharaan/perbaikan saluran dan bangunan, menyediakan tenaga kerja;
- Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mengembalikan fungsi;
- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi di 169 DI seluas 164.823 Ha secara rutin untuk mempertahankan kinerja jaringan;
- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Pusat di 35 DI seluas 289.508 Ha secara rutin untuk mempertahankan kinerja jaringan;
- Mengembangkan jaringan irigasi air permukaan direncanakan seluas 37.100 (Jabung Ring Dike di Lamongan sebesar 2.300 Ha, Bojonegoro Barrage di Bojonegoro sebesar 12.000 Ha, Bengawan Jero di Lamongan sebesar 12.000 Ha, Waduk Bajulmati di Banyuwangi sebesar 1.800 Ha, Waduk Gonggang di Magetan sebesar 1.500 Ha, Papar Peterongan di Kediri sebesar 7.000 Ha dan Rowo Paras di Kediri sebesar 500 Ha);
- Melaksanakan studi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi yang sudah ada dan mengaktifkan kembali tampungan-tampungan yang sudah tidak berfungsi; dan
- Penyuluhan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) mengenai efisiensi pemakaian air irigasi.

4) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 45.183.503.396,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.874.601.862,00 atau 86,04%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pembangunan *gully plug* pada sungai orde 4 dan 5 sebanyak 635 titik;
- Pengadaan dan penanaman pohon sebanyak 30.907 pohon dengan tinggi bibit sekitar 1,5 s/d 2 m dengan harapan hidup sebesar 75%; dan
- Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan sumber daya air.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kerusakan lingkungan yang semakin luas diakibatkan oleh alih fungsi lahan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air; dan
- Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Selain itu, kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah. Kerusakan air tanah sangat sulit dipulihkan, sehingga apabila hal tersebut terjadi terus menerus secara pasti akan berujung pada terjadinya bencana lingkungan yang berimplikasi luas.

Upaya pemecahan masalah :

- Mengendalikan laju erosi dan menambah tampungan alami di daerah hulu dengan pembangunan *gully plug* pada sungai orde 4 dan 5;
- Penanaman pohon di DAS kritis dan sempadan irigasi guna mengembalikan fungsi daerah resapan air dan sebagai upaya pengawetan air; dan
- Melaksanakan studi/kajian serta penyediaan data dan dokumen-dokumen perencanaan untuk penatagunaan sumber daya air.

5) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 10.355.194.780,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.327.606.963,00 atau 90,08%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan ketatausahaan UPT PSDA se-Jawa Timur;
- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA se-Jawa Timur; dan
- Penguatan lembaga kordinasi yang sudah ada seperti TKPSDA, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata pemerintahan, peran masyarakat, peran BUMN/BUMD dan peran swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Penguatan peran masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan swasta diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkuat basis sumber daya; dan
- Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antar instansi dan antar daerah otonom telah menimbulkan pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

Upaya pemecahan masalah :

- Memperkuat koordinasi antar pengelola sumber daya air di setiap level pemerintahan dan kewenangan melalui lembaga koordinasi yang sudah ada seperti TKPSDA, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

3.3. DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

URUSAN PEKERJAAN UMUM

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatkan cakupan pelayanan air minum, sanitasi, dan drainase secara optimal, efisien dan berkelanjutan

b. Program

Untuk Mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut

1) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.12.636.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.906.443.250,00 (94,23%) yang secara rinci realisasi anggaran serta indikator, target dan realisasi kinerja per kegiatannya dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Cakupan pelayanan Sanitasi atau air limbah sampai saat ini sebesar 78,09%, untuk wilayah perkotaan, dan 46,59% untuk daerah pedesaan, pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan akan ditingkatkan menjadi 79,60% dan cakupan pelayanan wilayah pedesaan akan ditingkatkan menjadi 63,83% Target MDG's 2015.
- Cakupan pelayanan air bersih saat ini sebesar 66,76%, untuk wilayah perkotaan, dan 57,97% untuk daerah pedesaan, pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan akan ditingkatkan menjadi 76,05% dan cakupan pelayanan wilayah pedesaan akan ditingkatkan menjadi 70,07% Target MDG's 2015

akan mengurangi separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan yang berkelanjutan.

- Meningkatnya sarana prasarana lingkungan untuk menunjang kesehatan permukiman dengan telah terbangunnya mck 6 unit di tahun 2014.
- Telah terlayannya masyarakat perdesaan akan air bersih sebanyak Pemasangan Pipa saluran air bersih 47.567 meter, hidran umum 15 unit, kran umum 10 unit, sambungan rumah 50 unit dan bangunan produksi 20 unit dan bangunan pelengkap 30 unit di tahun 2014.
- Telah tersusunnya dokumen pendataan dan pemetaan daerah rawan air sebanyak 7 dokumen di tahun 2014.
- Pelaksanaan Lomba HIPAM.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Permasalahan

Permasalahan :

- Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.
- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.
- Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
- Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun
- Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.
- Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.

- Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah hingga tahun 2015 di perkotaan dan perdesaan
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat
- Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku)
- Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan

2) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 957.200.000,00 dan dengan Realisasi sebesar Rp. 918.130.100,00 atau sebesar 95,92 %. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik kolom 16.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Tujuan dari program ini adalah meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan dan percepatan perencanaan RTRW dimasing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta perencanaan detail wilayah/kawasan sehingga mendukung mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya dokumen

identifikasi perencanaan pengembangan insfrastruktur wilayah perbatasan di 7 Kabupaten/Kota dengan hasil Dokumen identifikasi perencanaan pengembangan insfrastruktur wilayah perbatasan di 7 Kabupaten/Kota.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Masih terbatasnya data perencanaan program penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan tertinggal, di kepulauan terpencil dan di kawasan perbatasan.

Upaya Pemecahan Masalah

Menyediakan data perencanaan yang memadai untuk program penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan perbatasan.

3) Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini adalah sebesar Rp. 1.843.798.000,00 dengan Realisasi program sebesar 1.773.671.500,00 atau sebesar 96,20%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik kolom 16.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan cepat tumbuh dan kawasan pesisir dan percepatan perencanaan RTRW dimasing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta perencanaan detail wilayah/kawasan sehingga mendukung mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya dokumen identifikasi perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah cepat tumbuh di 12 Kabutapen/Kota dan pesisir di 4 Kabupaten/Kota yang menghasilkan 12 dokumen identifikasi perencanaan pengembangan insfrastruktur wilayah cepat tumbuh dan 4 dokumen Identifikasi kebutuhan infrastruktur permukiman sebagai antisipasi perkembangan kawasan pesisir.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Masih terbatasnya data perencanaan program penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Upaya Pemecahan Masalah

Menyediakan data perencanaan yang memadai untuk program penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan strategis dan cepat tumbuh.

4) Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 6.301.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.223.628.800,00 atau sebesar 98,77 %. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik kolom 16.

b) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Cakupan pelayanan drainase diperkotaan dari 79,87% di tahun 2013 meningkat menjadi menjadi sebesar kurang lebih 79,96%, pada tahun 2014 dan mencapai Target MDG's 2015 pada 87,46%.
- Telah meningkatnya kualitas bangunan drainase dengan berkurangnya genangan air melalui pembangunan sepanjang saluran 9.821,22 meter.
- Cakupan pelayanan persampahan diperkotaan dari 82,78% di tahun 2013 menjadi sebesar kurang lebih 82,96%, pada tahun 2014 dan Target MDG's 2015 adalah 88,29%.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai patus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakkan hukum

khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.

- Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.
- Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak

Upaya Pemecahan Masalah :

- Peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS)
- Kinerja pengelolaan sampah dan drainase serta perbaikan saluran drainase primer dan sekunder guna pengendalian banjir di perkotaan Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.

URUSAN PERUMAHAN

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatkan pengembangan, sarana prasarana serta pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin

b. Program

Pada Urusan Perumahan ini didukung oleh 1 program kegiatan, yaitu Program Pengembangan Perumahan.

1) Program Pengembangan Perumahan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 71.676.252.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 65.793.356.759,00 (91,79%) yang secara rinci realisasi anggaran serta indikator, target dan realisasi kinerja per kegiatannya dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pembangunan/Perbaikan Gedung bangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur seluas 145.375 m² yang terdiri dari Renovasi Gedung *Guest House* Provinsi Jawa Timur, Taman Kantor Gubernur, Renovasi gedung VVIP Juanda, Renovasi Gedung Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang provinsi Jawa Timur, Rehab Gedung Grahadi Sayap Timur dan Sayap Barat, Gedung Korpri, Rumah Dinas, Gudang Arsip BPKAD.
- Pelaksanaan Renovasi RTLH dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2009 dan telah mencapai 10 (Sepuluh) tahap. Tabel di bawah menunjukkan data perkembangan pelaksanaan renovasi RTLH tahun 2009-2014 dengan lokasi yang tersebar di kab/kota di Jawa Timur. Sampai dengan tahun 2014, jumlah rumah yang telah direnovasi melalui program bakti TNI di Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 78.460 unit rumah.

- Pembangunan jalan Agropolitan / Usaha Tani sepanjang 1.334,55 m
- Pembangunan jalan/ saluran lingkungan permukiman pada kawasan tertinggal, perbatasan dan kawasan cepat tumbuh sepanjang 11.433,6 m.
- Pembangunan jalan dan saluran prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sepanjang 6.768,10 m.
- Pematangan (urugan) lahan untuk rusunawa di Gununganyar Surabaya seluas 5.000 m².

Tabel 4.3.3.1
Perkembangan Pelaksanaan Renovasi RTLH
di Provinsi Jawa Timur

NO	KEGIATAN	Tahun pelaksanaan	Jumlah kab/kota	Jumlah rumah yang direnovasi per kab/kota (unit)	Total jumlah rumah yang direnovasi (unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RTLH Tahap I	2009	10	1.000	10.000
2.	RTLH Tahap II	2009	10	1.000	10.000
3.	RTLH Tahap III	2010	10	1.000	10.000
4.	RTLH Tahap IV	2010	10	500	5.000
5.	RTLH Tahap V	2011	10	1.000	10.000
6.	RTLH Tahap VI	2011	10	500	5.000
7.	RTLH Tahap VII	2012	10	1.000	10.000
8.	RTLH Tahap VIII	2012	5	280	1.400
9.	RTLH Tahap IX	2013	12		9.400
10.	RTLH Tahap X	2014	10	766	7660
TOTAL					78.460

Sumber: Dinas PU Cipta Karya Prov. Jatim

- Adapun data pelaksanaan renovasi RTLH oleh TNI di Provinsi Jawa Timur tersebar di berbagai Kab/Kota pada tahun 2014 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3.3.2
Jumlah Renovasi RTLH di Kab/Kota di Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014

No	Nama Kab/ Kota	Jumlah Rumah yang direnovasi Tahun 2014 (unit)
		RTLH Tahap X (APBD)
1.	Kab. Jember	766
2.	Kab. Kediri	766
3.	Kab. Blitar	766
4.	Kab. Ngawi	766
5.	Kab. Lumajang	766
6.	Kab. Bojonegoro	766
7.	Kab. Tuban	766
8.	Kab. Banyuwangi	766
9.	Kab. Gresik	766
10.	Kab. Sidoarjo	766
	TOTAL	7660

sumber: Dinas PU Cipta Karya Prov. Jatim

- Pada tahun 2014, Renovasi RTLH dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh TNI dari Kodam V/ Brawijaya. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang melalui konsultannya melakukan tugas pendampingan pelaporan yang dilakukan dalam menyajikan data dan dokumentasi pelaksanaan bakti TNI tersebut. Dari laporan ini dapat diketahui lokasi rumah dan kondisi rumah sebelum dan sesudah direnovasi beserta keterangan selama pelaksanaan.
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman:
- Berkembangnya Laboratorium Perumahan dan Permukiman PU Cipta Karya dan Tata Ruang dengan semakin majunya sumber daya manusia dan peralatan laboratorium. (1 unit alat atomic

absorbtion, 1 unit spektrometer, 1 unit glas lab dan 1 set reagen lab)

- Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman. Tersedianya data dan informasi teknologi perumahan dan permukiman di Jawa Timur dengan publikasi bidang keciptakaryaan, event pameran, lomba dan juga 3 dokumen penelitian.
- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi. Sosialisasi Undang-undang dan peraturan bangunan gedung, Pembekalan penanggungjawab teknik badan usaha undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja lomba tukang konstruksi nasional

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, yang disebabkan oleh :
 - Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman
 - Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan
 - Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan
 - Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak
 - Lemahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya kunci perumahan
 - Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan
 - Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh, yang disebabkan oleh :
 - Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman

- Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman
 - Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan
 - Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan tertinggal, di kepulauan terpencil dan di kawasan perbatasan.
 - Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba.
 - Kurang ditegakkannya aturan keselamatan bangunan dalam pembangunan gedung
 - Masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung, terutama di daerah rawan gempa yang berpenghuni.
 - Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas lingkungan kawasan Tradisional/Bersejarah.
 - Masih belum efektifnya pelaksanaan teknis dan administratif pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara (GRN).

Upaya Pemecahan Masalah

- Merealisasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa, serta menyediakan prasarana dan sarana dasar permukiman, dengan melibatkan semua stakeholders
- Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan/pembangunan gedung negara
- Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pembangunan bidang perumahan permukiman.

URUSAN PENATAAN RUANG

a. Sasaran tahun 2014

Meningkatkan efektifitas perencanaan tata ruang serta meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Program

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah meliputi :

1) Program perencanaan tata ruang wilayah provinsi

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 3.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.293.904.265,00 atau 89,02%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matriks 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan (8 Paket)
- Peningkatan Sumber Daya Manusia
- Tersusunnya rencana tata ruang kawasan strategis (2 Paket)

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 324.075.970,00 atau 81,02%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matriks 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Jumlah aparat yang mendapat pelatihan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang (100 Orang)
- Tercapainya Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota
- Tercapainya Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota (38 Kab/Kota)
- Tercapainya Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (50 Orang)

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

Aparat yang menangani pengendalian pemanfaatan ruang di Kab/Kota sering terjadi mutasi ke Dinas lain sehingga ditangani oleh aparat baru.

Upaya Pemecahan Masalah

Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap aparat Kab/Kota yang baru.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Sasaran Tahun 2014

1. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif;
2. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tata Ruang

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program Perencanaan Tata Ruang sebesar Rp 107.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 89.720.000,00 atau 83,75% sampai akhir tahun anggaran 2014, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Matriks 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan pembangunan Program Perencanaan Tata Ruang yang dicapai selama tahun 2014 adalah tersedianya Dokumen Kebijakan Perencanaan Tata Ruang, yang berisi Inventarisasi Permasalahan, Analisa, dan Rencana Penanganan Permasalahan Penataan Ruang Wilayah.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional sudah kurang relevan dengan dinamika pembangunan saat ini, sehingga diperlukan adanya revisi peraturan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur Tahun 2011-2031. Disisi lain, revisi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur belum ditetapkan. Sehingga

upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada beberapa kawasan pengendalian ketat belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena belum ditetapkan secara hukum;

- Belum optimalnya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan sektoral sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.

Upaya pemecahan masalah

- Melaksanakan percepatan proses penetapan revisi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur, yang muatan substansinya telah diperbaharui sesuai dengan kebutuhan pengendalian tata ruang pada kawasan pengendalian ketat dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur menggantikan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2006;
- Melaksanakan Fasilitasi dan Sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan sektoral sebagai upaya percepatan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.

d) Penghargaan Nasional yang Diterima

Penghargaan yang diterima terkait dengan pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang adalah Juara 1 PKPD-PU tahun 2014. Untuk mencapai prestasi tersebut, BAPPEDA Prov. Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam persiapan substansi serta hal lainnya terkait keikutsertaan pada lomba tersebut.

2. Program Pemanfaatan Ruang

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program Pemanfaatan Ruang sebesar Rp 712.441.320,00 dan terealisasi sebesar Rp 679.887.780,00 atau

95,43% sampai akhir tahun Anggaran 2014, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Matriks 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan pembangunan Program Pemanfaatan Ruang yang dicapai selama tahun 2014 adalah tersedianya Dokumen Optimalisasi Kelembagaan Penataan Ruang.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Tingkat partisipasi dan pemahaman substansi penataan ruang dalam Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal. Sehingga penyelenggaraan dan pengendalian penataan ruang masih belum efektif;
- Belum ditetapkannya lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di masing-masing Kabupaten/Kota menimbulkan alih fungsi lahan produktif pertanian;
- Belum adanya kesepakatan dalam proses rescoring perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung.

Upaya Pemecahan masalah

- Meningkatkan koordinasi dan pemahaman (edukasi) dalam internal tim BKPRD terkait program perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Koordinasi dan fasilitasi terkait penetapan lokasi LP2B di masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- Melakukan koordinasi dan fasilitasi terkait percepatan penyelesaian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam proses penyusunan/revisi RTRWP.

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar Rp 210.394.880,00 dan terealisasi sebesar Rp 146.899.895,00 atau

69,82% sampai akhir tahun Anggaran 2014, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Matriks 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan pembangunan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dicapai selama tahun 2014 adalah tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang Jawa Timur secara online.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Tidak semua data yang dimiliki SKPD berupa data spasial (peta);
- Terdapat beberapa SKPD yang belum mengumpulkan data inputan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Jawa Timur;
- Kurangnya publikasi tentang SITR Jawa Timur kepada masyarakat.

Upaya pemecahan masalah

- Melakukan konversi data tabular yang memiliki informasi lokasional menjadi data spasial;
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD dalam rangka pengembangan SITR berbasis website Jawa Timur;
- Melakukan promosi dan sosialisasi ke masyarakat tentang SITR Jawa Timur.

4. Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 27.076.745.600,00 terealisasi sebesar Rp. 24.433.579.660,00 atau 90,24%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian program)

Hasil Pelaksanaan Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan pada tahun 2014 sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pembangunan dengan 38 kabupaten/kota dan seluruh SKPD pada tahun 2014;
2. Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) Jawa Timur;
3. Koordinasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP);
4. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);.
5. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur;
6. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur;
7. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Rencana Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur;
8. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Kelembagaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur;
9. Terlaksananya koordinasi dan monitoring yang menunjang pelaksanaan pembangunan jalan lintas selatan;
10. Terlaksananya fasilitasi Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dalam : penyusunan Memoranda Program Sanitasi Kab./Kota (11 kab./kota), Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) / Memorandum Program Sanitasi (MPS) di 3 Kab./Kota, penjaminan mutu dokumen PPSP, serta fasilitasi pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) II sebagai implementasi dari Program PPSP;

11. Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Water Resources and Irrigation Sector Management Programme 2 (WISMP 2);
12. Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder terkait guna sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana program pembangunan prasarana sumber daya air, prasarana perhubungan dan prasarana keciptakarya;
13. Terlaksananya koordinasi dan monitoring yang menunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Water Resources and Irrigation Sector Management Programme 2 (WISMP 2);
14. Terlaksananya koordinasi dan monitoring yang menunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM);
15. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi dalam rangka penyiapan program konservasi mata air umbulan untuk mendukung pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan;
16. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD-MDGs) Provinsi Jawa Timur;
17. Dokumen Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah - Millenium Development Goals (RAD - MDGs);
18. Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG);
19. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
20. Koordinasi permasalahan dan Issu Strategis pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan tahun 2014;
21. Dokumen Inventarisasi Permasalahan dan Issue-Issue Strategis bidang pemerintahan dan kemasyarakatan Jawa Timur tahun 2014;

22. Dokumen kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
23. Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional - Hak Asasi RANHAM Tahun 2014;
24. Fasilitasi Pelaksanan TNI Manunggal Desa (TMMD) tahun 2014;
25. Koordinasi percepatan pencapaian target-target MDGs dengan hasil adanya saran dan masukan dalam rangka pencapaian target indikator Millenium Development Goals (MDGs) di Jawa Timur, sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kab/Kota serta stakeholder dalam rangka pencapaian target indikator Millenium Development Goals (MDGs) di Jawa Timur, pemecahan masalah pencapaian target indikator Millenium Development Goals (MDGs) di Jawa Timur;
26. Koordinasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dengan melibatkan SKPD dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab/Kota untuk:
 - Revitalisasi Sekretariat TKPKD dan Penguatan Kelembagaan TKPKD Dalam Pelaksanaan Siklus Perencanaan Dan Penganggaran Tahunan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
 - Pelatihan Monitoring dan Evaluasi untuk tim teknis TKPKD dalam program-program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Outcome;
27. Untuk percepatan pembangunan lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan maka dilaksanakan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi serta inventarisasi isu-isu strategis dan permasalahan yang ada, dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan program strategis dan prioritas. Hasil yang diperoleh adalah terinventarisasinya isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan lingkup pemerintahan dan

- kemasyarakatan serta program prioritas penanganan masalah lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan;
28. Terlaksananya koordinasi rencana pembiayaan pembangunan di Jawa Timur tahun 2015;
 29. Terlaksananya koordinasi rencana Kemitraan Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur Tahun 2015;
 30. Terlaksananya koordinasi Rancangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan RKPD Tahun 2015;
 31. Terlaksananya koordinasi perencanaan Kemitraan pembiayaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015;
 32. Bahan masukan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Tahun 2015;
 33. Tersusunnya dokumen kebijakan Bidang Pembiayaan Pembangunan;
 34. Terlaksananya koordinasi rencana program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) di Jawa Timur Tahun 2015;
 35. Tersedianya Data Spasial Tematik di Jawa Timur yang terintegrasi dalam satu referensi secara online;
 36. Tersedianya Dokumen Rumusan Kebijakan dan Rencana Program Tata Ruang yang diakomodir dalam RKPD. Dokumen tersebut berisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), inventarisasi permasalahan pengembangan wilayah sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kebijakan strategi pengembangan wilayah sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rencana program dan kegiatan pengembangan wilayah sumberdaya alam dan lingkungan hidup, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Jawa Timur;
 37. Tersedianya Dokumen Rumusan Kebijakan dan Rencana Program Tata Ruang, yang berisi juga tentang kluster kewilayahan.

c) **Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah**

Permasalahan:

- Belum terintegrasinya kebijakan sektoral dalam kegiatan-kegiatan tematik seperti Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya realisasi penyerapan yang disebabkan tertundanya beberapa kegiatan pemantauan dan monitoring karena ketidaksiapan daerah Kabupaten/Kota, sampai dengan ketidakhadiran beberapa narasumber dari Pusat pada beberapa acara yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur;
- Terdapat beberapa sub kegiatan pada kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kelembagaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Jawa Timur yang mampu dilaksanakan melalui kegiatan lain seperti kegiatan perencanaan pembangunan dan kegiatan inventarisasi permasalahan pembangunan sehingga berdampak pada efisiensi pencapaian target realisasi penyerapan anggaran;
- Masih terdapat target-target MDGs di Jawa Timur yang belum tercapai;
- Masih lemahnya koordinasi dalam rangka pencapaian target-target MDGs di Jawa Timur;
- Masih banyak kabupaten/kota yang belum menyusun matrik RAD MDGs dan Laporan Monev MDGs;
- Masih kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas terkait isu-isu strategis, perencanaan prioritas pembangunan lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Permasalahan pembangunan lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan tidak dapat selesai dalam waktu singkat;
- Masih belum optimalnya pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender (PUG);

- Belum optimalnya pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan di SKPD ;
- Belum semua Kabupaten/Kota melaksanakan Laporan Rencana Aksi Nasional – Hak Asasi Nasional (RANHAM) Tahun 2014;
- Belum optimalnya pelaksanaan TNI Manunggal Desa (TMMD) di Jawa Timur;
- Validitas data PPLS 2011 yang masih rendah, sehingga banyak di keluhkan oleh masyarakat;
- Lemahnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan antar SKPD;
- Belum adanya sinkronisasi dan integrasi antara berbagai program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- Belum semua masyarakat tercover dalam jaminan perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan;
- Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan;
- Masih Kurangnya upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam rangka mencapai target pemenuhan swasembada beras nasional, karena belum ditetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penetapan LP2B, penetapan insentif/disinsentif penetapan LP2B, dan pendataan lahan pertanian;
- Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Timur tergolong sangat rendah;
- Masih adanya Gab pembiayaan pembangunan pada pelayanan dasar (pendidikan dan Kesehatan);
- Belum terkoordinasinya pembiayaan dari non pemerintah dan Lembaga Donor;
- Belum sinerginya beberapa program pemerintah Jawa Timur dengan program TSP/CSR perusahaan.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Perlu diintegrasikan kembali kebijakan sektoral yang melibatkan sinergitas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga terjadi komitmen yang jelas dalam melaksanakan setiap kegiatan. Bentuk komitmen ini dapat diintegrasikan melalui penyusunan perencanaan yang sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terutama pada kegiatan-kegiatan tematik;
- Lebih mengutamakan penyusunan perencanaan program kegiatan yang benar-benar dapat dilaksanakan, membuat prioritas-prioritas pada beberapa sub kegiatan sehingga memenuhi target realisasi;
- Mengupayakan percepatan pencapaian target-target MDGs yang belum tercapai melalui pelaksanaan prioritas kegiatan yang berdampak langsung terhadap target MDGs;
- Meningkatkan koordinasi antar pihak yang berkompeten dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs di Jawa Timur;
- Mengkoordinasikan dengan pemerintah kab/kota terkait penyusunan Matrik RAD MDGs dan Monev MDGs;
- Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas terkait isu-isu strategis, perencanaan prioritas pembangunan lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan PUG;
- Meningkatkan advokasi kepada SKPD terkait integrasi gender dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- Fasilitasi provinsi dalam penyusunan Laporan kabupaten/kota Rencana Aksi Nasional – Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2014;
- Fasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Desa (TMMD) di Jawa Timur;

- Validasi Data PPLS 2011 oleh TNP2K dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di Jawa Timur melalui forum konsultasi data;
- Sosialisasi Jaminan Perlindungan Sosial ke masyarakat, sehingga muncul kesadaran untuk menjadi peserta jaminan sosial, baik jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian maupun Jaminan Hari Tua.
- Mengupayakan Integrasi Program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/kota;
- RTRW Kab./Kota perlu segera dilengkapi dengan rencana yang lebih rinci, yakni Rencana Detail Tata Ruang. Maka perlu untuk dilakukan percepatan penyusunan dan penetapan perda RDTR kawasan perkotaan di kab./kota;
- Perlu untuk dilakukan percepatan pembahasan dan penetapan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penetapan LP2B, penetapan insentif/disinsentif penetapan LP2B, dan pendataan lahan pertanian;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan program pembiayaan pembangunan dan melakukan FGD dengan pemerintah kabupaten/kota, *Corporate*, dan stakeholders di Jawa Timur.

5. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran program ini pada tahun sebesar Rp. 1.853.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.459.437.481,00 atau mencapai 78,74%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program).

Hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dicapai sebagai berikut :

1. Dokumen pelaksanaan dana APBN Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
2. Dokumen Laporan pelaksanaan DAK di Jawa Timur;
3. Dokumen Rencana Aksi Provinsi dan Kab/Kota se Jatim dalam mendukung INPRES 2 Tahun 2014;
4. Laporan hasil verifikasi UKP4 pelaksanaan INPRES 2 Tahun 2014 di Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
5. Rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan SKPD Provinsi dan Kab/ Kota se Jawa Timur.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota belum seluruhnya tepat waktu dalam menyampaikan laporannya, sehingga penyusunan dokumen evaluasi pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan dengan Sumber Dana APBN/APBD untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mejadi terhambat.

Upaya Pemecahan Masalah :

Koordinasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara periodik agar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang sama sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

6. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

a) Pagu dan Realisasi Program.

Pagu Anggaran program ini pada tahun sebesar Rp. 3.456.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.048.018.365,00 atau mencapai 88,19%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan.

Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Terealisasinya Program AIPD (*Australia Indonesia Partnership for Decentralization*) di Provinsi Jawa Timur dan 4 Kabupaten, Situbondo, Sampang, Malang dan Trenggalek yang berupa:
 - Modeling BLU RSUD Rujukan di BP4 Pamekasan sampai status meningkat menjadi RSUD; 10 Puskesmas di Malang telah menjadi BLUD dan 10 Puskesmas di Situbondo telah dinilai layak menjadi BLUD;
 - Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bappeda Provinsi, Kab. Sampang, Situbondo dan Trenggalek telah menghasilkan SOP dan Workshet serta pembentukan Satgas Pengendalian Internal;
 - Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - Pelaksanaan fungsi Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim yang baru dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berjalan lancar dengan tersedianya instrument dan pedoman Penanganan Sengketa.
2. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan United Nation dengan lembaga Donor, yang bertujuan :
 - Mengetahui perkembangan Kota Layak Anak (KLA) Provinsi di 3 (tiga) lokasi Kabupaten/Kota kerjasama dengan UNICEF (Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kota Pasuruan);
 - Mengetahui perkembangan dukungan UNICEF sesuai dengan kesepakatan pada tujuan tengah program;
 - Rekomendasi upaya-upaya perbaikan capaian program.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

Permasalahan yang ditemukan pada Koordinasi KHPPIA Kemitraan antara Pemerintah Provinsi dengan UNICEF di Jawa Timur, sebagai berikut :

- Program Keberlangsungan Hidup Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) masih belum terlaksana secara optimal dan belum fokus pada sektor;
- Belum adanya pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan KHPPIA;
- Pemahaman SKPD dari Kabupaten/Kota sampai dengan Desa/Kelurahan tentang KLA belum optimal;
- Tugas dan Fungsi Tim Advokasi masih belum dipahami;
- Keberadaan Gugus Tugas KLA belum dioptimalkan;
- Belum semua Kab/Kota mencanangkan Kab/Kota Layak Anak (KLA);
- Perlunya pemahaman tentang perlindungan anak yang komprehensif;
- Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal;
- Belum maksimalnya kinerja kemitraan Parlemen dan Badan pemerintah lainnya di tingkat Pusat dan Daerah tentang pemahaman hak anak, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, UU dan peraturan serta dukungan pembiayaan publik untuk mengurangi kesenjangan;
- Kemitraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian di tingkat regional dan Internasional tentang wacana isu-isu anak dan fasilitasi pengembangan kebijakan pro anak belum optimal;
- Pelaksanaan kegiatan di daerah terhambat karena adanya kebijakan pemerintah yang mengatur bahwa penyaluran hibah tidak boleh langsung ke daerah (*Fund Chanelling*);
- Distribusi pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan tidak dilaporkan secara teratur dan berjenjang dari Kabupaten/Kota-Provinsi-Pusat) karena Sekretariat KHPPIA tidak berfungsi secara maksimal;
- Pelaksanaan kegiatan cenderung dilakukan pada akhir tahun anggaran, sehingga output atau kualitas kegiatan belum optimal.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Koordinasi *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan program Keberlangsungan Hidup Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA);
- Dilakukan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan program Keberlangsungan Hidup Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA);
- Perlu penyamaan persepsi terhadap pelaksanaan program KHPPIA;
- Mengadakan sosialisasi oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada *stakeholders*;
- Perlu dilakukan pemahaman terhadap tugas dan fungsi dari Tim Advokasi;
- Optimalisasi peran dari Gugus Tugas KLA;
- Perlunya dilakukan percepatan dalam pencaangan KLA di seluruh Kab/Kota di Jawa Timur;
- Mengefektifkan koordinasi Gugus tugas KLA di tingkat kota dan memperkuat kapasitas forum advokasi;
- Perlu koordinasi yang intens antara *stakeholders* dengan pihak kepolisian dalam pengurangan tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- Menyusun strategi Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang sesuai dan terintegrasi;
- Mengadakan kerjasama kemitraan dengan Media untuk membentuk kepedulian masyarakat khususnya dalam persoalan kerentanan dan kesenjangan pemenuhan hak anak, peran serta aktif anak dalam pembangunan, serta meningkatkan perlindungan anak dari media yang tidak mendidik.

7. Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 4.306.081.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.743.336.454,00 atau 86,93 %, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian program)

Program ini bertujuan agar tersedianya Data dan Informasi sebagai bahan pendukung kebijakan pembangunan daerah serta menginformasikan kepada pemerintah pusat dan stakeholder tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dicapai sebagai berikut :

1. Buku Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
2. Buku Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur;
3. Buku Data Dinamis Triwulanan;
4. Buku Potensi Jawa Timur;
5. Tersusunnya analisa data hasil pelaksanaan pembangunan;
6. Visualisasi selayang pandang hasil pelaksanaan pembangunan Jawa Timur;
7. Sosialisasi dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan melalui media TV;
8. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir tahun 2013 beserta lampirannya;
9. Buku laporan capaian kinerja SKPD Provinsi Tahunan dan Triwulanan;
10. Buku Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur;

11. Pusat data dan pengelolaan website Bappeda Provinsi Provinsi Jawa Timur;
12. Laporan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur;
13. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2013.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

Terhambatnya penyusunan laporan atau informasi baik berupa dokumen maupun audio visual dikarenakan oleh masih ada SKPD dalam penyampaian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan, laporan capaian kinerja dan bahan Reses DPRD tidak tepat waktu.

Upaya Pemecahan Masalah :

Koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu lebih ditingkatkan.

8. Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan

a) Pagu dan Realisasi Program

Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 19.599.043.200,00 terealisasi sebesar Rp. 17.903.617.800,00 atau 91,35%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dicapai sebagai berikut :

1. Dokumen Optimalisasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan di Jawa Timur;

2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RAD-GRK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
3. Dokumen Kajian Kebijakan Penataan Ruang Jawa Timur dalam Mengantisipasi Dinamika Pembangunan;
4. Dokumen Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pelabuhan Teluk Lamong dan Sekitarnya di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya;
5. Dokumen Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Timur;
6. Dokumen Penyusunan Daya Dukung Ruang untuk Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Pantura Jawa Timur;
7. Dokumen Penyusunan Instrumen Pendukung Implementasi Penataan Ruang di Jawa Timur;
8. Dokumen Penyusunan KLHS Wilayah Manyar Gresik dan Sekitarnya;
9. Dokumen Kajian Penyusunan Strategi Kelembagaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) di Jawa Timur;
10. Dokumen Background Study Pembangunan Wilayah Terpadu di Jawa Timur;
11. Dokumen Perumusan Sistem Pusat Kegiatan Ditinjau Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan dan Pelayanan Wilayah di Jawa Timur;
12. Dokumen Pengembangan Tenaga Angin Sebagai Sumber Energi Alternatif Di Jawa Timur;
13. Dokumen Analisis Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh di Pulau Madura dan Kepulauan;
14. Tersusunnya Dokumen Indikator Daya Saing Industri Jawa Timur dalam Menghadapi AEC 2015;
15. Survey Penyediaan dan Penggunaan Barang Industri Jawa Timur Tahun 2014 yang belum dapat dilaksanakan;

16. Tersusunnya strategi pemanfaatan nilai ekonomi air irigasi sebagai basis pengambilan keputusan pengalokasian sumber daya air irigasi yang semakin terbatas;
17. Tersusunnya sebuah kerangka umum rencana induk pembangunan infrastruktur sumber daya air yang dapat mendukung tercapainya ketahanan pangan di Jawa Timur secara lestari;
18. Tersusunnya kerangka strategi pembangunan infrastruktur hijau di wilayah Gerbangkertasusila, Jawa Timur;
19. Tersusunnya arahan pengembangan dan strategi penanganan pengelolaan sumber daya air yang dikaitkan dengan target pasca MDGs 2015 yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur;
20. Tersusunnya strategi dan program pembangunan infrastruktur pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat;
21. Tersusunnya sebuah kerangka strategi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dengan menggunakan konsep ekohidrologi untuk mendukung program konservasi sumber daya air;
22. Tersusunnya sistem operasi dan pemeliharaan irigasi secara komprehensif pada daerah irigasi multiguna kewenangan pemerintah provinsi sehingga dapat memberikan jaminan bagi pengelolaan infrastruktur irigasi serta keberlanjutan produksi pangan di Jawa Timur;
23. Tersusunnya sebuah kerangka strategi antisipasi dan jalan keluar dari fenomena el-nino terhadap berbagai persoalan sumber daya air yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan di Jawa Timur;
24. Tersusunnya rekomendasi kelayakan aspek teknis, ekonomis, finansial, lingkungan dan aspek sosial ekonomi untuk rencana

- pengembangan (FS) SPAM Regional Wilayah Malang Raya (Kab./Kota Malang dan Kota Batu);
25. Tersusunnya rekomendasi kelayakan aspek teknis, ekonomis, finansial, lingkungan dan aspek sosial ekonomi untuk rencana pengembangan (FS) SPAM Regional Wilayah Pantura (Kab Lamongan, Bojonegoro, Tuban dan Gresik);
 26. Tersusunnya rekomendasi kelayakan aspek teknis, ekonomis, finansial, lingkungan dan aspek sosial ekonomi untuk rencana pengembangan (FS) SPAM Regional Wilayah Madura (Kab. Bangkalan, Sampang, pamekasan, dan Sumenep);
 27. Tersusunnya Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur;
 28. Tersusunnya identifikasi lokasi untuk rencana pengembangan SPAM Regional Wilayah Lintas Timur (Kab. Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi);
 29. Tersusunnya identifikasi lokasi untuk rencana pengembangan SPAM Regional Wilayah Lintas Selatan (Kab. Ponorogo, Trenggalek dan Tulungagung);
 30. Tersusunnya Strategi Pengelolaan Air Minum Pasca Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sebagai dukungan terhadap upaya pembangunan berkelanjutan;
 31. Tersusunnya strategi kebijakan transportasi orang, barang, dan jasa antar kabupaten/kota di Jawa Timur yang semakin efisien, efektif, ramah manusia, dan ramah lingkungan serta bisa mendorong terciptanya jaringan distribusi barang dan jasa menjadi semakin kompetitif;
 32. Tersusunnya panduan pengembangan system transportasi di Jawa Timur yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta mampu menjadi tulang punggung system logistic di Jawa Timur yang semakin kompetitif;

33. Tersusunnya strategi meningkatnya produk-produk unggulan dari Jawa Timur dan kian menyempitnya disparitas antar daerah yang selama ini menjadi persoalan serius di Jawa Timur;
34. Tersusunnya tersusunnya strategi pengembangan infrastruktur maritime di Jawa Timur yang dapat meningkatkan konektivitas inter wilayah Jawa Timur maupun antar wilayah Jawa Timur dengan wilayah kepulauan lainnya;
35. Tersusunnya kebijakan yang komprehensif terkait transportasi dari dan menuju Jawa Timur dari wilayah Indonesia Bagian Timur yang bisa mendorong terciptanya jaringan distribusi barang dan jasa menjadi semakin kompetitif;
36. Tersusunnya pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan jalan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan akibat perkembangan perekonomian di Jawa Timur;
37. Tersusunnya rumusan potensi dan program pengembangan kereta api di kawasan Gerbangkertasusila;
38. Tersusunnya rumusan indikasi program pengembangan pelayanan barang pada pelabuhan untuk menunjang perkembangan perekonomian wilayah di Jawa Timur;
39. Tersusunnya rumusan indikasi program pengembangan bandara untuk menunjang perkembangan perekonomian wilayah di Jawa Timur;
40. Tersusunnya rumusan indikasi program pengembangan infrastruktur prioritas di kawasan perhatian investasi di Jawa Timur;
41. Tersusunnya kerangka strategi pengembangan infrastruktur jalan yang dapat mendukung peningkatan daya saing produk pangan di Jawa Timur;
42. Tersusunnya strategi peningkatan layanan transportasi antar wilayah di Jawa Timur seiring dengan implementasi MEA 2015;

43. Tersusunnya kerangka strategi pengembangan infrastruktur transportasi darat di kawasan selatan Jawa Timur yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan;
44. Dokumen Penyusunan Data Statistik Pelaksanaan Pembangunan Povinsi Jawa Timur Tahun 2014;
45. Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2104;
46. Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2104;
47. Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
48. Dokumen Analisis Potensi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2015;
49. Dokumen Analisis Belanja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Perencanaan Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
50. Dokumen Analisis Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Daerah Tahun 2015;
51. Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Pengembangan Infrastruktur di Jawa Timur;
52. Dokumen Analisis Pemetaan UMKM dalam rangka Optimalisasi Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Jatim;
53. Dokumen Analisis Pendapatan BLUD Provinsi Jawa Timur.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Belum terlaksananya kegiatan Survey Penyediaan dan Penggunaan Barang Industri Jawa Timur Tahun 2014 lebih dikarenakan persoalan teknis dimana pada saat yang bersamaan antara Bulan September-Desember 2014 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur sebagai pihak ketiga yang

akan melaksanakan survey, juga dituntut penyelesaian sensus pertanian dan survey-survey lainnya yang harus selesai pada waktu yang bersamaan;

- Belum optimalnya hasil kajian sehingga tidak dapat diakomodir dalam perumusan kebijakan pembangunan;
- Terdapat masukan hasil rapat pembahasan yang tidak diakomodasi oleh pihak ketiga pelaksana kegiatan dalam laporan akhir kajian;
- Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen RPJMD dilengkapi dengan dokumen KLHS;
- Pengumpulan data primer dan skunder dari kabupaten/kota maupun SKPD masih belum sesuai dengan harapan karena masih adanya ego sektoral;
- Sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian hasil akhir sehingga kurang optimal dalam memberikan masukan perencanaan pada penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur;

Upaya Pemecahan Masalah:

- Dokumen Survey Penyediaan dan Penggunaan Barang Industri Jawa Timur Tahun 2014 yang belum dapat direalisasikan, diupayakan dapat dipenuhi dengan melakukan analisis atau kajian yang disusun dan direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun 2015. Kajian-kajian ini nantinya akan menghasilkan dokumen yang mendukung pembangunan ekonomi di Jawa Timur, juga masih dalam rangka persiapan menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA);
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak ketiga pelaksana kegiatan dengan cara mengirim surat kepada pihak ketiga yang bersangkutan agar hasilnya sesuai dengan keluaran yang terdapat dalam KAK pekerjaan yang dilaksanakan;
- Perlu adanya rapat klarifikasi dokumen laporan akhir yang sebelum dilakukan pencairan pembayaran termin terakhir;
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur merencanakan melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai Penyusunan dokumen

- KLHS sebagai dokumen pelengkap Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen RPJMD Kabupaten/Kota;
- Dilakukan antisipasi dalam awal penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan sehingga dapat memberikan masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur.

9. Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 8.021.476.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.941.803.510,00 atau 86,54%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian program)

Hasil pelaksanaan program/kegiatan di dalam Tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi Usulan Prioritas rencana kegiatan untuk bahan Pelaksanaan Musrenbang Nasional Tahun 2014;
2. Sosialisasi Sistem E-Musrenbang terkait usulan APBN Pendanaan Dekon dan Tugas Pembantuan;
3. Sinkronisasi data bahan penyusunan RKPD dan RKP dalam Musrenbang Propinsi Tahun 2014;
4. Data bahan masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan RKP Tahun 2015;
5. Koordinasi dan sinkronisasi data isue-isue yang berkembang di Regional se Jawa - Bali Tahun 2014;
6. Kesepakatan data isue-isue di regional Jawa-Bali Tahun 2014 untuk rekomendasi ke tingkat pusat;
7. Dokumen Perubahan KUA serta PPAS P-APBD Tahun 2014;
8. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Prov Jatim Tahun 2015;
9. Dokumen RKPD Prov. Jatim Tahun 2015;
10. Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
11. Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Prop. Jawa Timur Tahun 2015;
12. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka menunjang

- Musrenbang Kab./Kota Tahun 2014;
13. Tersedianya sistem informasi penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan P-APBD Tahun 2014 dan APBD 2015;
 14. Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pengolahan data hasil musrenbang provinsi Tahun 2014;
 15. Tersedianya data hasil musrenbang provinsi dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2015;
 16. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Rancangan RPJMD 2014-2019;
 17. Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 18. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2015;
 19. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2015;
 20. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Tahun 2014;
 21. Dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
 22. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2015;
 23. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan P-APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;
 24. Konsultasi Rancangan akhir RPJPD dan RPJMD Kab/Kota di Jawa Timur.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Masih terdapat beberapa kendala pada saat indput data e-musrenbang data untuk usulan program kegiatan ke pusat;
- Masih belum diakomodirnya isu-isu strategis yang dihasilkan dari rekomendasi pelaksanaan musrenbang regional Jawa Bali di tingkat pusat;

- Masih banyaknya usulan kabupaten/kota yang tidak sinkron dengan program-program prioritas SKPD propinsi;
- Sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian hasil akhir sehingga kurang optimal dalam memberikan masukan perencanaan pada penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur;
- Masih terdapat dokumen RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota yang belum sesuai dengan sistematika dan substansi sebagaimana Permendagri No. 54 Tahun 2010.

Upaya Pemecahan Masalah:

- Rekomendasi hasil pelaksanaan Musrenbang Regional Jawa Bali dapat diusulkan pada saat agenda rakorbangpus dan musrenbangnas di Bappenas;
- SKPD kabupaten/kota sebaiknya mencermati dulu program dan kegiatan yang akan diusulkan ke propinsi agar match/sinkron dengan program kegiatan prioritas yang ada/tersedia di SKPD propinsi;
- Dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD terkait;
- Perlu sosialisasi Permendagri No.54 Tahun 2010 terutama untuk dokumen RPJPD dan RPJMD yang belum sesuai dengan peraturan dimaksud;
- Perlu review terhadap dokumen RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota yang belum sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010.

d) Penghargaan Nasional yang Diterima

Penghargaan yang diterima terkait penilaian terhadap proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah Terbaik III Anugerah Pangripta Nusantara Utama Kategori A.

7. URUSAN PERHUBUNGAN

7.1 DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi.
- 2) Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur.
- 3) Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi.
- 4) Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani.
- 5) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 86.061.502.000,00 terealisasi sebesar 94,52% atau Rp. 81.346.057.037,00 secara rinci realisasi per-kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Jembatan timbang sebagai etalase sistem pelayanan di Jawa Timur merupakan salah satu prasarana fasilitas perhubungan yang mendapat perhatian lebih, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk lebih baik dan transparan.

Hasil pelaksanaan pembangunan dari Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan diantaranya adalah kegiatan Peningkatan sarana prasarana fasilitas perhubungan yaitu Optimalisasi Platform JT Trosobo, Perawatan Genset Silent Jembatan Timbang pada 20 lokasi Jembatan timbang, Pembangunan Rumah Genset Jembatan Timbang pada 5 lokasi Jembatan Timbang, Pemeliharaan Link Repeater pada 5 wilayah,

Pengadaan dan Pemasangan Link Repeater Radio Komunikasi pada 3 lokasi Jembatan timbang, Revitalisasi Radio Komunikasi pada 2 wilayah, Rehabilitasi Rumah Genset JT Talun, Rehabilitasi Ruang Pelayanan Jembatan Timbang pada JT. Guyangan dan JT. Socah, Perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di areal Jembatan Timbang di 20 Lokasi Jembatan timbang, Rehabilitasi Gorong-Gorong pada 5 Jembatan Timbang, Pengadaan Genset Silent JT sejumlah 2 unit, Pengadaan dan Pemasangan AVR (Automatic Voltage Regulator) sejumlah 4 unit, Pengadaan dan Pemasangan Penangkal Petir pada 20 lokasi Jembatan Timbang, Pembangunan Pos Locket Operasional Penimbangan di 5 lokasi Jembatan Timbang, Pembangunan Pagar di Jembatan Timbang Pojok, dan Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya di Jembatan Timbang sejumlah 56 unit.

Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang DI 9 LOKASI Jembatan Timbang. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Gudang Serta Lapangan Penumpukan Jembatan Timbang di 3 lokasi Jembatan Timbang yaitu Jembatan Timbang Kalibarumanis dan Jembatan Timbang Baureno serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang di 20 Lokasi Jembatan Timbang

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas bertujuan untuk mendukung terlaksananya sistem informasi Jembatan Timbang yang transparan serta memperlancar kecepatan transfer informasi / data dari Jembatan Timbang ke server utama atau pada masyarakat sehingga menjadikan proses Pengawasan dan Pengendalian muatan angkutan barang di Jawa Timur yang transparan dan terbebas dari praktek-praktek pungli.

Selama empat tahun terakhir peningkatan prasarana Jembatan Timbang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.7.1.1
Peningkatan Prasarana Jembatan Timbang
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 – 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang					
	- Pagar Keliling	m2	422,3	-	1.580,81	-
	- Lahan Parkir	m2	945,89	-	-	-
	- Peralatan dan perlengkapan penimbangan	lokasi	7	-	3	1
	- Penerangan JLn Umum (PJU)	Unit	-	50	50	56
	- Papan Nama di Jembatan timbang	Lokasi	-	20	-	-
	- Plengsengan Jembatan Timbang	Lokasi	-	1	-	-
	- Rehabilitasi Ruang pelayanan	lokasi	-	-	5	2
	- Perawatan PJU JT	Lokasi	-	-	11	20
	- Rehabilitasi Rumah Genset	Lokasi	-	-	2	1
	- Pembangunan Rumah genset	Lokasi	-	-	9	5
	- Rehabilitasi Genset	lokasi	-	-	-	20
	- Pengadaan pemasangan genset	Lokasi	-	-	6	2
	- Pembangunan Tower Repeater	unit	-	-	2	-
	- Pengadaan link repeater	lokasi	-	-	-	3
	- Pemagaran lahan tower repeater	lokasi	-	-	4	-
	- Perbaikan penangkal petir	unit	-	-	1	20
	- Penggantian platform JT Trowulan	unit	-	-	1	-
	- Pemeliharaan Link Repeater	Wilayah	-	-	-	5
	- Revitalisasi Radio Komunikasi	Wilayah	-	-	-	2
	- Rehabilitasi Gorong - Gorong	Lokasi	-	-	-	5
	- Pengadaan dan Pemasangan AVR (Automatic Voltage Regulator)	unit	-	-	-	2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
	- Pembangunan Pos Loret Operasional Penimbangan	lokasi	-	-	-	5
2	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang	lokasi	6	4	2	9
3	Pembangunan dan Peningkatan Gudang Jembatan Timbang	lokasi	4	4	4	3
4	Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang	lokasi	20	20	20	20

Sumber: Dishub & LLAJ

Penyediaan data-data kebutuhan pasarana dan fasilitas perhubungan, kinerja transportasi saat ini dan kompetensi para petugas bidang transportasi sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan sistem, sarana dan prasarana transportasi kedepannya hal ini diantaranya dilakukan dengan pendataan data karakteristik lalu lintas pada ruas jalan nasional dan ruas jalan provinsi utama yaitu, melalui kegiatan Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di Jawa Timur yang dilaksanakan pada ruas jalan nasional 1 (satu) paket dan ruas jalan Provinsi 1 (satu) paket. Pendataan informasi / data tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan Sektor Transportasi di Jawa Timur melalui kegiatan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada 13 lokasi pelayanan. Pendataan data *load factor* di wilayah 11 UPT se-Jawa Timur melalui kegiatan Survei load factor dan evaluasi kebutuhan armada angkutan AKDP di Jawa Timur serta penyusunan dokumen perencanaan sektor perhubungan melalui kegiatan Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan.

Pengelolaan Penyusunan Program dilaksanakan melalui Rapat Evaluasi & Penyusunan Program Kerja, penyusunan Dokumen penyusunan program & dokumen data transportasi, Pengelolaan Media Transportasi Januari-Desember 2014 sebanyak

6 buletin, Peningkatan SDM melalui Pembekalan dan Intensifikasi Tupoksi Dinas Perhubungan dan LLAJ dengan peserta 52 orang.

Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan dilaksanakan melalui Penyusunan 54 Dokumen perencanaan Teknis Sektor Perhubungan, Pelaksanaan Rapat Koordinasi, workshop dan FGD sebanyak 18 kali.

Selama empat tahun terakhir Penyediaan data kebutuhan pasarana dan fasilitas perhubungan dan kompetensi petugas di bidang transportasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.7.1.2
Penyediaan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di Jawa Timur	Ruas Jalan	4	2	2	2
2	Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	-	1	1	13
3	Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan					
	- Dokumen Perencanaan Pengembangan Transportasi	Dokumen	45	33	69	80
	- Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan transportasi	Rapat	13	13	9	7
	- FGD	Rapat	0	4	10	6
4	Evaluasi manfaat prasarana fasilitas LLAJ	Dokumen	1	15	8	-
5	Survei load factor dan evaluasi kebutuhan armada angkutan AKDP di Jawa Timur	dokumen	1	1	1	1
6	Pengelolaan Penyusunan Program					
	- Dokumen perencanaan dan evaluasi program kerja	dokumen	1	1	1	1
	- Dokumen data transportasi	dokumen	-	-	-	1
	- Sertifikasi Aset Tanah	dokumen	3	1	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	- Media Transportasi	edisi	6	6	6	6
	- Pembekalan & Intensifikasi Tupoksi	peserta	-	-	50	52
	- Kendaraan operasional Dinas	unit	5	1	-	-

Sumber: Dishub & LLAJ

Pembinaan/Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota dilaksanakan di 38 kab/kota di Jawa Timur dalam rangka untuk mendorong dan memotivasi pemerintah kab/kota dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan yang mendorong terwujudnya budaya tertib lalu lintas dan angkutan di kabupaten/kota. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian Wahana Tata Nugraha yang diselenggarakan pada tingkat kab/kota. Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik.

Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Terminal dilaksanakan di Terminal Bangkalan dengan melakukan pematangan lahan berupa urugan tanah peninggian lokasi 6.000 m³ dan Terminal Ponorogo dengan pembangunan area parkir seluas 1.369,36m² dan jalan keluar masuk dengan konstruksi beton seluas 273,87 m²

Tabel 4.7.1.3
Pembangunan Prasarana LLAJ Dan Pembinaan Lalu Lintas Angkutan Kota Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui	Lokasi / tahun	38	38	38	38

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan/Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota					
2	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Lokasi	-	2	2	2

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program di atas sehingga semua target dapat direalisasikan 100%.

d) Penghargaan Nasional yang diterima

Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama atas penilaian dalam kegiatan Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota tahun 2013 yang diumumkan dan diserahkan pada tahun 2014. Pada Tahun 2014 untuk keempat kalinya penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama (WTN Wiratama) diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama merupakan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi yang dinilai mempunyai komitmen yang kuat terhadap pembangunan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan di Jawa Timur, serta konsisten memberikan pembinaan dan bantuan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Kabupaten/Kota

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

a) Pagu dan Realisasi Program

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ mendapat pagu Rp. 27.957.541.200,00 terealisasi sebesar 98,25% atau Rp. 27.469.667.141,00 secara rinci realisasi per-kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan keselamatan pengguna jalan dan peningkatan kelancaran, ketertiban lalu lintas melalui perawatan sarana prasarana fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan diantaranya :

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas 662 buah dengan rincian 210 buah di wilayah UPT LLAJ Lamongan, 214 buah di Wilayah UPT LLAJ Tulungagung, dan 238 buah di wilayah UPT LLAJ Banyuwangi.

Kegiatan Pemeliharaan dan perawatan pagar pengaman jalan 1.116 m' dengan rincian UPT Tulungagung 112 m', UPT Probolinggo 116 m', UPT Jember 108m'; Kab. Sidoarjo 120 m'; Kab. Mojokerto 120 m', Kab. Kediri 100 m', Kab. Magetan 140 m', Kab. Ngawi 150 m' dan Kab. Ponorogo 150 m'.

Kegiatan Pemeliharaan dan perawatan 4 unit RPPJ dengan rincian UPT Jember 2 unit, Kediri 1 unit, Mojokerto 1 unit. Pemeliharaan & perawatan Traffict Light sebanyak 22 Unit di Kab/Kota Sidoarjo (7), Mojokerto (5), Blitar (6), Ponorogo (4) dan LPJU sebanyak 72 unit di Kab/Kota Nganjuk (20), Madiun (5), Ngawi (9), Tuban (9), Ponorogo (10), Jember (10), Banyuwangi (9).

Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Warning Light sebanyak 5 buah dengan rincian Kab. Lamongan 3 unit dan Kab. Bangkalan 2 unit.

Kegiatan Pemeliharaan dan perawatan patok tikungan (delineator) sebanyak 500 buah yang dipasang Kab. Probolinggo 200 buah, Kab. Lumajang 100 buah, Kab. Jember 100 buah, Situbondo 100 buah. Rehabilitasi dan peningkatan Sarana Gedung Operasional berupa pemeliharaan 32 lokasi gedung kantor.

Selama empat tahun terakhir perawatan sarana prasarana fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam rangka Peningkatan keselamatan pengguna jalan dan peningkatan kelancaran, ketertiban lalu lintas serta gedung operasional dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.7.1.4
Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Dan Gedung Operasional
Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 – 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas	buah	285	200	700	662
2	Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail)	meter	220	100	348	1.116
3	Pemeliharaan dan perawatan RPPJ	buah	4	4	4	4
4	Pemeliharaan dan perawatan Traffic Light	Unit	1	2	26	94
5	Pemeliharaan Deliniator	Buah	500	450	500	500
6	Pemeliharaan Warning Light	buah	5	4	5	5
7	Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Sarana Gedung Operasional Dishub dan LAJ	lokasi	16	35	30	32

Sumber: Dishub & LLAJ

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas tidak terdapat permasalahan sehingga kegiatan dapat terealisasi 100%

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan pagu Rp. 3.656.510.000,00 terealisasi sebesar 91,61% atau Rp. 3.349.628.017,00 secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pewujudan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal yang didukung oleh peningkatan mobilitas manusia, barang dan jasa melalui keterpaduan antar-moda dan efisiensi transportasi dilakukan dengan pelaksanaan Kegiatan rapat koordinasi untuk harmonisasi/kesamaan persepsi pelaksanaan program kerja antar kab/kota dan provinsi yang diikuti 296 peserta. Pelaksanaan rapat koordinasi yang diikuti oleh 125 orang pengusaha angkutan umum AKDP/AKAP di Jawa Timur. Pembinaan pengemudi angkutan penumpang umum di Jawa Timur dan pengiriman delegasi awak kendaraan umum teladan Jawa Timur untuk mengikuti pembinaan di tingkat nasional. Dan pembinaan yang diikuti oleh 300 orang pengemudi angkutan penumpang umum di Jawa Timur.

Selama empat tahun terakhir pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.1.5
Koordinasi Teknis Dan Pembinaan Dalam Rangka
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 – 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan dan LLAJ antar Kabupaten/Kota dan Provinsi	Orang	280	320	320	296
2	Koordinasi dengan pengusaha angkutan	Orang	250	250	125	125
3	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	Orang	50	50	50	50
4	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang	Orang	750	200	300	300

Sumber: Dishub & LLAJ

Dalam rangka standarisasi pengendalian dan pengawasan angkutan barang di jembatan timbang dilaksanakan Audit di 6 jembatan timbang (Sedarum, Trowulan, Klakah, Watudodol, Kalibarumanis dan Baureno) dan Sertifikasi ISO 9001 : 2008 di 2 Jembatan Timbang (Socah dan Talun). Pemantauan pemberlakuan besaran tarif angkutan AKDP di Jawa Timur. Dan Monitoring Evaluasi guna menunjang operasional kegiatan

Tabel 4.7.1.6
Evaluasi Peningkatan Pelayanan Angkutan
Tahun 2011 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Standarisasi ISO 9001; 2000 Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang	Lokasi	2	4	12	8
2	Evaluasi Tarip Angkutan AKDP di Jawa Timur	Dokumen	1	1	1	1
3	Monitoring Evaluasi guna menunjang operasional kegiatan	bulan	12	12	12	12

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas tidak terdapat permasalahan sehingga kegiatan dapat terealisasi 100%

d) Penghargaan Nasional yang diterima

Dalam Lomba Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Di tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, Perwakilan dari Provinsi Jawa Timur mendapat peringkat 9 atas nama SUBAGYO UTOMO dari Kota Madiun dan peringkat 14 atas nama BUDIONO ARIF SUNANDAR dari Kab Situbondo

4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

a) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan pagu Rp. 88.836.167.000,00 terealisasi sebesar 96,11% atau Rp. 85.381.454.235,00 secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pemilihan pelajar pelopor Tertib Lalu Lintas se-Jawa Timur yang diikuti oleh 38 x @2 peserta dari perwakilan di penyaringan kab/kota yang dilaksanakan oleh Dishub kab/kota. Kegiatan kampanye keselamatan lalu lintas yang terdiri atas berupa sosialisasi keselamatan untuk buruh 400 orang, cetak buku tata cara berlalu lintas sebanyak 500 eksemplar dan pengadaan Helm keselamatan utk Sosialisasi Keselamatan pada Buruh Pabrik sebanyak 500 buah. Kegiatan operasi sadar keselamatan ketertiban di 11 UPT masing-masing 13 kali kegiatan, In house training petugas JT 320 orang (4x80 orang), Sosialisasi Perda melalui media radio 200 kali, dan penayangan media iklan masyarakat 100 kali.

Selama empat tahun terakhir kegiatan program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.1.7
Peningkatan Kualitas SDM Petugas dan Pemahaman Masyarakat
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 – 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur	orang	76	76	76	76
2	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui	orang	586	400	400	400

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Jalan					
3	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas di Jatim	jumlah operasi	132	115	187	143

Sumber: Dishub & LLAJ

Meningkatkan ketersediaan dan kelaikan sarana dan prasarana LLAJ dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan RPPJ model F sebanyak 54 unit di Kabupaten Pacitan, Kediri, Malang, dan Bojonegoro.

Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando sebanyak 1 unit di Kabupaten Jember.

Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 1.050 buah di Kabupaten Lumajang (850) dan Sumenep (200).

Pelaksanaan pengadaan traffic light sebanyak 27 unit (PCTL di Magetan, Ponorogo sebanyak 7 unit; PCTL Kota Madiun 1 unit; ATCS Sidoarjo dan Kediri 5 unit; Trafic Light Trenggalek, Sampang, Mojokerto, Jember dan Kediri 6 unit; PCTL Lamongan 1 unit; PCTL Bojonegoro 1 unit; PCTL Kota Blitar dan Madiun 2 unit; Trafic Light Kota Blitar dan Kab.Blitar 2 unit; PCTL Gresik, Kota Batu 2 unit, simpang 4 Terminal Ponorogo 1 unit dan PTCL Kab Gresik 1 unit. Serta pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) sebanyak 9 unit di wilayah UPT LLAJ Surabaya, Mojokerto, Probolinggo, Mojokerto.

Pelaksanaan Pengadaan dan pemasangan flashing light sebanyak 43 unit (Kab/Kota Surabaya 2 unit, Gresik 6 unit, Sidoarjo 1 unit, Mojokerto 1 unit, Banyuwangi 5 unit, Magetan 1 unit, Ponorogo 2 unit, Nganjuk 5 unit, Trenggalek 3 unit, Tulungagung 5

unit, Malang 5 unit, Probolinggo 4 unit, Lumajang 3 unit, Bojonegoro 4 unit).

Pelaksanaan pemeliharaan Papan Informasi elektronik (VMS) 4 unit di terminal Tawangalun Jember, Bayuangga Probolinggo, Arjosari Malang, Purabaya Surabaya.

Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan marka jalan sebanyak 96.900 m (UPT Surabaya 10.000 m, UPT Malang 30.000 m, Kab Magetan 6000 m, Trenggalek 5000 m, Lumajang 6000 m, Bojonegoro 4500 m, Ponorogo 4800 m, Sampang 3000 m, Gresik 6000 m, Ngawi 5000 m, Kediri 5800 m, Nganjuk 5000 m, dan Banyuwangi 5800 m).

Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sebanyak 3.876 m di UPT Probolinggo (2700) Kab/Kota Ponorogo (80), Trenggalek (84), Mojokerto (88), Sidoarjo (40), Jombang (60), Sampang (52), Sumenep (88), Madiun (44), Tulungagung (84), Pacitan (80), Magetan (88), Kediri (44), Jember (84), Banyuwangi (52), Lumajang (64), Pasuruan (56), Malang (88).

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 2.952 buah dengan rincian UPT LLAJ Surabaya 150 unit, UPT LLAJ Tulungagung 165 unit, UPT LLAJ Kediri 165 unit, UPT LLAJ Madiun 165 Unit, UPT LLAJ Malang 165 Unit, Kab Bangkalan 150 unit, Kab Sampang 212 Unit, Kab Sumenep 135 Unit, Kab Lumajang 265 Unit, Kab Pasuruan 160 Unit, Kab Bojonegoro 140 Unit, Kab Sidoarjo 100 Unit, Mojokerto 166 Unit, Kab Ponorogo 160 Unit, Kab Malang 100 Unit, Kab Gresik 60 Unit, Kab Jombang 75 Unit, Kab Nganjuk 70 Unit, Blitar 24 Unit, Kab 160 Unit dan Kediri 165 Unit.

Pengadaan dan pemasangan papan himbauan sebanyak 83 unit terdiri dari Kab/Kota Malang 6 unit, Banyuwangi 6 unit, Lumajang 6 unit, jombang 20 unit, Mojokerto 25 unit, dan Lamongan 20 unit Pengadaan dan pemasangan patok tikungan sebanyak 180 unit dengan rincian Kab. Magetan 70 unit, Kab. Lumajang 55 unit dan Kab. Banyuwangi 55 unit.

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sejumlah 1.101 meliputi pemasangan di Wilayah UPT LLAJ Madiun (150), Kediri (170), Malang (150); di Wilayah Kabupaten/Kota Trenggalek (78), Banyuwangi (78), Bojonegoro (78), Jember (78), Probolinggo (50), Tulungagung (50), Blitar (5), Lamongan (5), Sampang (4), Magetan (4), Ngawi (5), Nganjuk (5), Trenggalek (4), Ponorogo (5); Pada Jalan Umum Bandara Abd. Saleh Malang (50), JT Widang (4), JT Socah (5), JT. Lamongan (4), JTIJrengik (5), JT. Trosobo (4), JT Sedarum (5), JT Rejoso (5), JT Pojok (5), JT Widodaren (5), JT Talun (4), Guyangan (5), JT Besuki (5), JT Klakah (5), JT Watudodol (4), JT Kalibarumanis (5), JT Singosari (5), JT Trowulan (5), JT Mojoagung (4), pada Ruas Jalan Mojoagung (4), Pada Black Spot Kab Pasuruan (5), Kab Kediri (5) Rambigundam (4), Kab Sirubondo (4), Kab Banyuwangi (5), Kab Mojokerto (5), Kaota Mojokerto (5).

Untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK dan Pendampingan) Dinas perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan pemasangan guardrail sepanjang 692 m' di Kabupaten Probolinggo

Selama empat tahun terakhir kegiatan peningkatan ketersediaan dan kelaikan sarana dan prasarana LLAJ dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.1.8
Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas LLAJ
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan dan pemasangan RPPJ model F	unit	5	5	5	54
2	Pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando	unit	3	1	1	1
3	Pengadaan dan pemasangan paku marka	buah	1.500	300	350	1.050
4	Pengadaan dan	unit	4	8	12	27

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	pemasangan traffic light					
5	Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light	unit	3	8	2	43
6	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	meter	23.000	18.300	40.000	96.900
7	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	meter	200	1.400	3.572	3.876
8	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	buah	225	960	1.750	2.952
9	Pengadaan dan Pemasangan Papan Hibauan	unit	50	20	18	83
10	Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan (delineator)	buah	500	200	180	180
11	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	unit	8	122	304	1.101
12	Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK)					
	- Marka	Meter	-	-	323	-
	- Guardrai	Meter	-	-	748	636
13	Pendampingan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK)					
	- Marka	Meter	-	-	219	-
	- Guardrail	Meter	-	-	72	56

Sumber: Dishub & LLAJ

Peningkatan kualitas pelayanan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan terutama pada periode mudik dan balik lebaran dilakukan dengan pelaksanaan angkutan mudik balik gratis pada moda transportasi jalan dengan jumlah penumpang 22.275 penumpang termasuk penyediaan bingkisan perjalanan dan petugas pendamping di setiap kendaraan dan penyelenggaraan rest area pada masa angkutan lebaran di 20 Jembatan timbang se-Jawa Timur.

Selama empat tahun terakhir kegiatan atau upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam hal keselamatan, ketertiban, keamanan dan nyaman transportasi jalan terutama pada saat mudik dan balik Lebaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.1.9
Pelayanan Angkutan Lebaran Transpotasi Jalan
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 – 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Pelayanan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Orang	330	330	680	510
2	Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis (termasuk penyediaan bingkisan perjalanan dan petugas pendamping di setiap kendaraan)	orang	7.500	15.000	16.500	22.275
3	Pengadaan Penyelenggaraan Rest Area	lokasi	20	20	20	20

Sumber: Dishub & LLAJ

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas tidak terdapat permasalahan sehingga kegiatan dapat terealisasi 100%

5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan pagu Rp. 2.091.645.000,00 terealisasi sebesar 87,40% atau Rp. 1.828.061.540,00 secara rinci realisasi per-kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia sektor perhubungan terutama dalam hal Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek dilakukan dengan pelaksanaan pembinaan PPNS sebanyak 100 org dari Dinas Perhubungan Kab/Kota se-jatim dan seluruh UPT Dishub LLAJ Prov. Jatim. Pembinaan penguji kendaraan bermotor untuk meningkatkan pengetahuan & keterampilan yang diikuti 400 orang. Pencapaian kesepahaman, pengetahuan dan keterampilan para pengusaha karoseri dan konstruksi kendaraan bermotor yang diikuti 200 pengusaha. Pelaksanaan rakornis yang diikuti oleh 75 orang petugas angkutan dan terminal di Jawa Timur.

Selama empat tahun terakhir Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia sektor perhubungan terutama dalam hal meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.1.10
Pembinaan Teknis SDM Angkutan Jalan
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ dengan kabupaten / kota se Jawa Timur	Orang	100	100	100	100
2	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pertemuan/Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor	Orang	300	200	300	400
3	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor	Orang	180	90	200	200

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
4	Rapat Koordinasi Teknis dengan Petugas Angkutan dan Terminal	Orang	200	200	200	75

Sumber: Dishub & LLAJ

Kegiatan evaluasi manfaat dan kondisi fasilitas perlengkapan jalan dilaksanakan pada tiga lokasi yang menghasilkan 3 dokumen evaluasi di Simpang 3 Kletek dan simpang Medaeng di Kabupaten Sidoarjo dan simpang Legundi di Kabupaten Gresik.

Tabel 4.7.1.11
Evaluasi Prasarana Fasilitas LLAJ
Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 – 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Evaluasi manfaat prasarana fasilitas LLAJ	Dokumen	1	15	8	3

Sumber: Dinas Perhubungan dan LLAJ

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas tidak terdapat permasalahan sehingga kegiatan dapat terealisasi 100%

6) Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian

a) Pagu dan Realisasi Program

Program Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian dengan pagu Rp. 60.074.285.000,00 terealisasi sebesar 98,71% atau Rp. 59.299.362.350,00 secara rinci realisasi per-kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan jumlah prasarana penunjang keselamatan yang terpasang pada pintu perlintasan sebidang kereta api yang tidak terjaga dilakukan melalui kegiatan pemasangan *Alarm Early Warning System* sejumlah 43 titik yang terbagi atas 3 wilayah DAOP (DAOP VII 11 titik, DAOP VIII 14 titik, DAOP IX 18 titik). Pemasangan rambu-rambu KA (269 lokasi @ 4 rambu) pada perlintasan sebidang (DAOP VII 200 lokasi, DAOP VIII 424 lokasi, DAOP IX 452 lokasi) serta pemeliharaan dan perawatan pada 40 unit AEWS yang telah terpasang di perlintasan sebidang di wilayah Kab. Mojokerto 1, Kab. Nganjuk 1, Kab. Ngawi 4, Kab. Tulungagung 9, Kab. Pasuruan 8, Kab. Blitar 2, Kab. Kediri 1, Kota Malang 1, Kab. Malang 8, Kota Probolinggo 2, Kab. Probolinggo 2 dan Kab Sidoarjo 1.

Selama empat tahun terakhir pemasangan dan peningkatan kinerja pelayanan, dan peralatan keamanan operasi perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.1.12
Peningkatan Fasilitas Keselamatan Kereta Api
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan dan Pemasangan Alarm Early Warning System di Perlintasan Sebidang Kereta Api se-Jawa Timur	Unit	17	25	25	43
2	Pengadaan dan Pemasangan Rambu pada Perlintasan Sebidang KA se Jawa Timur (1 lokasi dipasang 4 rambu)	Lokasi	25	100	146	269
3	Pemeliharaan dan Perawatan Alarm Early Warning System	Unit	2	15	25	40

Penyelenggaraan Sosialisasi keselamatan Perkeretaapian sejumlah 600 peserta (6 x 100 peserta). Pelaksanaan angkutan mudik balik gratis moda Kereta Api sejumlah 83.905 orang dengan jurusan Surabaya-Bojonegoro, Surabaya-Madiun, Surabaya-Blitar, Surabaya-Banyuwangi.

Tabel 4.7.1.13
Peningkatan Pelayanan Angkutan Moda Kereta Api
Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 – 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian	Kali	2	2	3	-
2	Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian	kali	-	-	-	6
3	pelaksanaan angkutan mudik balik gratis moda Kereta Api	orang	15.912	18.480	98.000	83.905

Sumber: Dishub & LLAJ

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas tidak terdapat permasalahan sehingga kegiatan dapat terealisasi 100%

7) Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

a) Pagu dan Realisasi Program

Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan pagu Rp. 33.182.275.000,00 terealisasi sebesar 96,13% atau Rp. 31.897.406.505,00 secara rinci realisasi per-kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melalui Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dilakukan dengan Pemeliharaan prasarana dermaga penyeberangan di Jawa Timur di pelabuhan penyeberangan Bawean berupa pembangunan Breasting Dolphin 1 unit, Mooring Dolphin 2 unit, catwalk 44 m² dan Pondasi Mercusuar 3 titik. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi berupa Pekerjaan beaching plate 84 x 18 m², Pembangunan Breasting Dolpin 3 unit dan Mooring Dolphin 4 unit. Pekerjaan di Pelabuhan Penyeberangan Paciran berupa pengadaan dan pemasangan Pompa Hidran Air Bersih 5 titik berupa Electric hydrant pump (EHP) 1 unit, Diesel Hydrant pump (DHP) 1 unit, Jockey Hydrant Pump (JWP) 1 unit, Clean water pump to building (CWP) 2 unit dan pengadaan & pemasangan Header pipe dia, 500 mm sch 40 cement lining 1 unit.

Selama empat tahun terakhir meningkatkan kinerja pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melalui Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.1.14
Peningkatan Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 – 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemeliharaan, rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan (Bawean)					
	- Rehabilitasi fender	Set	3	-	-	
	- Rumah genset dan gudang	Unit	2	-	-	
	- Gedung terminal	m ²	455	-	-	
	- Pos jaga	Unit	1	-	-	
	- Rumah dinas	Unit	1	-	-	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	- Sarana prasarana dan gapura	m2	20	-	-	
	- Frontal Frame	Unit	-	4	-	
	- Pengerukan Kolam pelabuhan	M3	-	-	9.028,50	
	- Breasting Dolphin	Titik	-	-	-	1
	- Mooring Dolphin	Titik	-	-	-	2
	- Catwalk	m ²	-	-	-	44
	- Pondasi Mercusuar	Titik	-	-	-	3
2	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi					
	- Perkuatan Beaching Plate Tengah&Utara	Paket	1	-	-	
	- Pebangunan Talud dan jalan penghubung antara Dermaga MB dan LCT	M	-	6.419	-	
	- Pembangunan Site Pile Beton	Titik	107	-	-	
	- Pembangunan areal parkir	m2	5.026,73	-	-	
	- Reklamasi	m2	-	9.732,00	-	
	- Perkerasan Beton	m2	-	862,00	2.634,27	
	- Pemancangan (beaching plate, mooring dolphin)	Titik	-	-	144	
	- kansteen beton	m'	-	-	76,11	
	- saluran air U - gutter (500mm x 500mm x 15mm)	m'	-	-	21	
	- saluran air U - gutter (400mm x 400mm x 10mm)	m'	-	-	28,56	
	- PJU solar cell	Unit	-	-	12	
	- beaching plate	m ²	-	-	-	84 x 18
	- Pembangunan Breasting Dolpin	Titik	-	-	-	3
	- Pembangunan Mooring Dolphin	Titik	-	-	-	4
3	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran					
	- upper structure break water	meter lari	75.5	89	-	
	- Pemancangan Breakwater	titik	-	18	-	
	- Pembangunan Terminal Penumpang	Paket	1	-	-	
	- Rumah Dinas (L = 36m2)	unit	-	-	2	
	- Jembatan timbang	unit	-	-	1	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	- Tandon Air Bawa Tanah (Ground Reservoir)	m3	-	-	160	
	- PJU Solar Cell	unit	-	-	73	
	- Taman / landscape	m2	-	-	1.865	
	- Pembangunan pagar portal	unit	-	-	2	
	- Pagar BRC	m'	-	-	285	
	- Pasang baru Instalasi Penerangan (PLN)	unit	-	-	1	
	- Pembuatan dudukan Rampdoor	unit	-	-	1	
	- Pengadaan dan Pemasangan SBNP	unit	-	-	1	
	- Pompa Hidran Air Bersih	Unit	-	-	-	5
	- Header pipe dia, 500 mm sch 40 cement lining	Unit	-	-	-	1

Sumber: Dishub & LLAJ

Penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi angkutan penyeberangan di 4 lintasan di Jawa Timur (Ketapang-Gilimanuk, Ujung - Kamal, Gresik-Bawean, Jangkar-kalianget) Januari s/d Desember 2014 serta pembangunan dermaga sungai di lintasan Srengat-Ngunut, Wonodadi-Ngunut, Purwokerto-Rejotangan

Tabel 4.7.1.15
Pemantauan Dan Evaluasi Angkutan Penyeberangan Dinas
Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Penyeberangan	Lintasan / tahun	4	4	4	4
2	Pembangunan Prasarana Penyeberangan Angkutan Sungai di Jawa Timur	Lokasi	-	-	-	6

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas tidak terdapat permasalahan sehingga kegiatan dapat terealisasi 100%

8) Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut

a) Pagu dan Realisasi Program

Program Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut dengan pagu Rp. 53.500.000.000,00 terealisasi sebesar 93,05% atau Rp. 49.779.892.256,00 secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kinerja pelayanan transportasi laut untuk mendukung pengembangan perekonomian Jawa Timur dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas prasarana transportasi laut dilakukan dengan Pelaksanaan pekerjaan pembangunan causeway Pelabuhan Laut di Gilimandagin 90m² (Causeway 15m X 6m). Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten Lamongan berupa pelaksanaan pekerjaan reklamasi 1.760 m² (20m x 88m) dan pembangunan dermaga 368,28 m³ (3m x 39,6m x 3,1m). Pembangunan Pelabuhan laut Boom Kabupaten Banyuwangi berupa breakwater A = 92m' dan breakwater B = 28,7m'. Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Probolinggo berupa jalan beton 4.920 m² (328m x 15m), Lapangan penumpukan 15.990 m² (61,5m x 260m) dan pemasangan LPJU tenaga surya 25 unit. Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep berupa Causeway sepanjang 12m x 3m. Pemasangan 2 unit SBNP di Kabupaten Lamongan (1 unit) dan Kabupaten Sumenep (1 unit). Pekerjaan pembangunan perpanjangan causeway Pelabuhan Laut Giliraja Kabupaten Sumenep sepanjang 61,2m² (20,4m x 3m).

Selama empat tahun terakhir Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi laut untuk mendukung pengembangan perekonomian Jawa Timur melalui peningkatan fasilitas prasarana transportasi laut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7.1.16
Peningkatan Prasarana Sektor Perhubungan Laut
Dinas Perhubungan Dan LlaJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin					
	- Pembangunan lapangan penumpukan	m ²	658.725	-	-	
	- Causeway	m ²	-	70	81	90
2	Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kab. Lamongan	m ²	6.579	6.42,85	7.747,68	2.128,28
3	Pengadaan dan Pemasangan Marine Automated Weather System (MAWS)	unit	1	1		-
	- Pemeliharaan MAWS	unit	-	-	2	-
4	Pengadaan dan Pemasangan SBNP	unit	-	-	-	2
	- Pemeliharaan SBNP	unit	-	-	4	-
5	Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kab Banyuwangi					
	- Break water	M	71	32	47,8	-
	- Pengerukan alur pelayaran	m ³	4.610	-	-	-
6	Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Probolinggo (reklamasi)	m ²				
	- Lapangan Penumpukan	m ²	14.040	10.101	-	15.990
	- causeway	m ²	-	-	11.424	-
	- pembangunan jalan beton	m ²	4.554	1.305	1.798,50	4.920
	- penanaman mangrove	m ²	-	-	18.166	-
	- LPJU tenaga surya	unit	-	-	6	25
	- ganti santun obyek bangunan = 36 unit	unit	-	-	36	-
7	Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep (lapangan penumpukan)					

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	- lapangan penumpukan	m ²	660.000	-	-	-
	- Perpanjangan Causeway	m ²	-	87,50	61,2	36

Sumber: Dishub & LLAJ

Pelaksanaan bantuan angkutan Lebaran mudik balik gratis pada moda transportasi laut bagi masyarakat khususnya daerah kepulauan perintis sebanyak 6.003 orang dengan rincian lintas Surabaya - Masalembo pp, lintas Tanjung Wangi - Sapeken pp dan Lintas Kalianget - Kangean pp termasuk pemberian bingkisan dan petugas pendamping di tiap kapal. Pelaksanaan kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran (3 kegiatan @ 100 orang), pembinaan kesyahbandaran (2 kegiatan @100 orang), pembinaan pengusaha angkutan laut (1 kegiatan @200 orang) dan Sosialisasi pengukuran dan pengurusan dokumen kapal (4 kegiatan @75 orang).

Tabel 4.7.1.17

**Pembinaan Dan Pelayanan Masyarakat Sektor Perhubungan Laut
Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 - 2014**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis Kepulauan (termasuk penyediaan bingkisan perjalanan dan petugas pendamping di setiap kendaraan)	orang	2.400	5.100	5.100	6.003
2	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Keselamatan Pelayaran					
	- Kampanye Peningkatan Keselamatan Pelayaran	orang	492	300	600	300
	- Pembinaan kesyahbandaran	orang	-	200	400	200

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembinaan pengusaha angkutan laut	orang	-	200	200	200
	- Workshop Kinerja Sarana dan Prasarana Angkutan Laut	orang	-	320	-	-
	- Sosialisasi pengukuran dan pengurusan dokumen kapal	orang	-	-	-	300

Sumber: Dishub & LLAJ

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas tidak terdapat permasalahan sehingga kegiatan dapat terealisasi 100%

9) Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

a) Pagu dan Realisasi Program

Program Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara dengan pagu Rp. 39.650.000.000,00 terealisasi sebesar 96,83% atau Rp. 38.393.054.130,00 secara rinci realisasi per-kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan jaminan keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara, baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional, maupun perintis serta Peningkatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara di daerah-daerah Jawa Timur, terutama daerah yang memiliki potensi wisata dan perdagangan yang tinggi dilakukan dengan pembangunan fasilitas penunjang operasional bandara Banyuwangi berupa Pembangunan Ponds (penampungan air) 5899.66 m³, Pembangunan Jalan inspeksi 4.020 m² (3m x

1340m), Pembangunan saluran terbuka MOC 1 (panjang : 247 m'; Volume : 1.255,55 m³), MOC 2 (Panjang : 271 m'; Volume : 1.179 m³), Pembangunan Pagar (untuk Ponds 1) Panjang : 265 m' dan Pagar (untuk Ponds 2) Panjang : 256 m'. Pelaksanaan peningkatan fasilitas operasional Bandara Abd. Saleh malang berupa pembangunan Interior Gedung Terminal lantai 1 (luas : 2.008 m²), Interior Gedung Terminal lantai 2 (luas : 2.368 m²), Penyambungan catu Daya PLN (555KVA), Pengadaan Genset 500KVA dan Pembangunan gedung VVIP.

Selama empat tahun terakhir Peningkatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara di daerah-daerah Jawa Timur untuk meningkatkan jaminan keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara serta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.1.18
Peningkatan Prasarana Sektor Perhubungan Udara
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Bandara Udara Banyuwangi					
	- Shoulder	m ²	57.500	-		
	- pagar keliling	m'	5.220	-		
	- Lapangan Parkir Kendaraan	m ²	-	10.883		
	- Jalan Inspeksi	m ²	-	26.410		
	- Drainase	M	-	-	3.428,01	
	- Pengurukan tanah (sisi darat)	m ³	-	-	51.185,58	
	- Pekerjaan struktur beton bertulang (box culvert jalan)	m ³	-	-	4,34	
	- Ponds (penampungan air)	m ³	-	-	-	5.899,66
	- Jalan inspeksi	m ²	-	-	-	4.020
	- saluran terbuka MOC1	m ³	-	-	-	1.255,55
	- saluran terbuka	m ³	-	-	-	1.179,3

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	MOC2					
	- Pagar (untuk Ponds 1)	m'	-	-	-	265
	- Pagar (untuk Ponds 2)	m'	-	-	-	265
2	Peningkatan Fasilitas Operasional Bandara Abd. Saleh Malang					
	- Runway	m ²	-	1.818	-	
	- Apron	m ²	-	2.145	-	
	- Gedung terminal	m ²	33.000	33.000	3.420	
	- Pemeliharaan Gedung terminal	m ²	-	1.100	-	
	- Pemeliharaan Gedung Operasional/Kantor	m ²	-	350	-	
	- Pemeliharaan Gedung NDB	m ²	-	90	-	
	- Pemeliharaan Gedung Genset	m ²	-	24	-	
	- Pemeliharaan Gedung Jaga	m ²	-	50	-	
	- Pemeliharaan Jalan akses	m ²	-	1.818	-	
	- Peralatan perlengkapan kantor UPT dan sarana prasarana terminal penumpang	Paket	1	-	-	
	- Interior Gedung Terminal lantai 1	m ²	-	-	-	2.008
	- Interior Gedung Terminal lantai 2	m ²	-	-	-	2.368
	- Genset	Unit	-	-	-	1
	- Pembangunan gedung VVIP	Unit	-	-	-	840

Sumber: Dishub & LLAJ

Selain itu juga dilaksanakan Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bandar Udara dan Heliport dengan dilaksanakan rapat koordinasi dengan para penyelenggara bandara dan heliport sebanyak 2 kali kegiatan yang diikuti 100 orang setiap kegiatan.

Tabel 4.7.1.19
Pembinaan Sektor Perhubungan Udara
Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembinaan Perusahaan Penunjang Angkutan Udara	Orang	400	400	-	-
2	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bandar Udara dan Heliport	Orang	200	200	200	400

Sumber: Dinas Perhubungan dan LLAJ

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas tidak terdapat permasalahan sehingga kegiatan dapat terealisasi 100%

8.1. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

a) Sasaran tahun 2014

Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemar serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dengan uraian sasaran :

- 1) Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemar serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan melalui :
 - a. % penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD
 - b. % penurunan beban pencemaran parameter kunci COD
 - c. Prosentase ketaatan industri ditinjau dari kelengkapan perizinan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPL dll
- 2) Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat didalam Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui :
 - a. Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri)
 - b. Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata)
 - c. Prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan
 - d. Jumlah Kabupaten / kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA

b) Program

Untuk pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemar serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan”** dilakukan program sebagai berikut:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tahun 2014 adalah sebesar Rp. 14.724.682.500,00 dengan realisasi sebesar (91.44%), atau Rp. 13.464.302.263,00. Secara rinci masing – masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Berbagai kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan didalam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ini dengan hasil adalah sebagai berikut:

- Penurunan Pencemaran Kualitas Air di DAS Brantas

RENSTRA BLH Provinsi Jawa Timur menetapkan konsentrasi BOD dan COD sebagai indikator perubahan kualitas air sungai di DAS Brantas. Kedua parameter ini dapat mewakili keterukuran cemaran material organik yang dihasilkan oleh berbagai jenis sumber pencemar seperti: domestik, industri, pertanian, dan kegiatan usaha lain. Semakin besar nilai BOD dan COD berarti semakin besar pula tingkat pencemarannya. Konsentrasi BOD di DAS Brantas dari tahun 2010 sampai dengan 2014 telah memenuhi target yang ditetapkan didalam RENSTRA. Pada tahun 2014 target penurunan beban pencemar adalah sebesar 21% dari tahun 2010.

Berdasarkan hasil pengujian kualitas air DAS Brantas yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Perum Jasa Tirta, BBWS sungai Brantas dan Dinas PU Pengairan maka capaian kualitas DAS Brantas pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 8% telah dapat terpenuhi dengan baik dengan capaian penurunan BOD sebesar 24,68% dan COD 38,61%, melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 21%. Namun demikian, dapat dilihat bahwa kisaran nilai konsentrasi BOD pada tahun tahun tersebut masih lebih tinggi dari baku mutu air sungai untuk kelas II (3 mg/l) yang berarti memiliki level kualitas air yang lebih rendah dari kelas II.

Tabel 4.8.1.1
Kualitas Air DAS Brantas Tahun 2010 dan 2014

Parameter		2010	2014
BOD	Target	8%	21%
	Capaian Target Penurunan	8%	24,68%
	Konsentrasi (mg/l)	5.12	4.27

Parameter		2010	2014
COD	Target	8%	21%
	Capaian Target Penurunan	8%	38.61%
	KONSentrasi (mg/l)	17.94	12.45

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

- Pemantauan dan Pengawasan Udara Kualitas Udara

Dalam rangka menetapkan rencana strategis dan rencana aksi pengelolaan kualitas udara maka BLH Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa pemantauan dan pengawasan kualitas udara, diantaranya ;

- Pemantauan Ambien Perkotaan dilaksanakan di 38 Kab/Kota, pada 3 lokasi (permukiman, road side, permukiman dekat industri)
- Pemantauan dan pengawasan kualitas udara emisi industri

Tabel 4.8.1.2
Kabupaten/Kota yang pada saat pengukuran melebihi baku mutu udara ambien tahun 2014

Kab.	Lokasi	Tanggal Pemantauan I	Debu	O3	Tanggal Pemantauan II	Debu
Blitar Kota	Jl. Bengawan Solo Kota Blitar	11 Juni 2014/14:10	172,48	10,99	03 Oktober 2014/09:00	314,5
Blitar Kota	Jl. Tanjung (Depan Sma Yp Kotamadya) Kota Blitar	11 Juni 2014/14:10	95,09	9,47	03 Oktober 2014/09:00	293,9
Jember	Pabrik Semen Puger, Kab. Jember	13 Agustus 2014/16:25	79,7	4,33	10 Oktober 2014/06:40	463,4
Jember	Perempatan Mangli, Kab. Jember	13 Agustus 2014/16:25	200,2	33,43	10 Oktober 2014/06:40	288
Jombang	Jl Merdeka (Depan Stadion) Kab. Jombang	15 Agustus 2014/14:10	65,4	16,9	13 Oktober 2014/09:10	389,8
Lamongan	Area Griya Made Karya	16 Juni 2014/11:00	34,2	257,2	14 Oktober 2014/09:30	126,7
Madiun Kab.	Depan Balai Desa Ngepeh, Kab. Madiun	09 Juni 2014/14:30	94,85	16,37	15 Oktober 2014/11:00	383
Madiun Kab.	Depan Pasar Caruban, Kab. Madiun	09 Juni 2014/14:30	105,9	28,69	15 Oktober 2014/11:00	655,3
Malang Kab.	Jl Pungkur Argo Kec. Lawang Kab. Malang	12 Agustus 2014/13:35	200,7	9	23 Oktober 2014/09:55	544,3

Kab.	Lokasi	Tanggal Pemantauan I	Debu	O3	Tanggal Pemantauan II	Debu
Malang Kab.	Jl. Raya Surabaya-Malang, Bedali, Lawang, Kab. Malang	12 Agustus 2014/13:35	437,6	15	23 Oktober 2014/09:55	630,3
Mojokerto Kab.	Jl Erlangga Depan Apotik Mojosari, Kab. Mojokerto	10 Juni 2014/08:45	209,24	17,36	07 Oktober 2014/11:45	638,1
Mojokerto Kab.	Jl Diponegoro, Kab. Mojokerto	10 Juni 2014/08:45	178,43	18,44	07 Oktober 2014/11:45	294
Mojokerto Kota	Jl Gajah Mada (Depan Kantor Walikota, Kota Mojokerto)	06 Agustus 2014/09:20	135,02	19,58	28 Oktober 2014/08:20	314,2
Pacitan	Jl. Arjosari AREA Sekitar Pabrik Aspal Ds Kedung Bendo Kab. Pacitan	13 Agustus 2014/15:45	212,9	3,77	23 Oktober 2014/16:30	658,2
Probolinggo Kab.	Depan Gedung Dprd, Kab. Probolinggo	13 Juni 2014/10:20	323,49	29,9	07 Oktober 2014/12:00	116
Probolinggo Kota	Jl. Soekarno Hatta, Kota Probolinggo	08 Agustus 2014/11:55	492,3	25,1	17 Oktober 2014/13:10	372,8
Ponorogo	Jl. Raya Madiun Ponorogo Dpn Ppn Gudang Pupuk Organik	14 Agustus 2014/10:10	108,9	2	22 Oktober 2014/10:30	732,8
Ponorogo	Perumahan Jl Parikesit Kab. Ponorogo	14 Agustus 2014/10:10	38,6	6,8	22 Oktober 2014/10:30	323,6
Situbondo	Jl. Raya Asembagus (Depan Pg Panji), Kab. Situbondo	04 Juni 2014/12:50	451,63	15,78	17 Oktober 2014/08:00	282,3
Sumenep	Perumahan Bumi Sumekar Asri (Depan Chanel Madura 44 Uhf) Kab. Sumenep	09 Juni 2014/12:45	960	8,03	16 Oktober 2014/17:05	173,5
Sumenep	Perum Pondok Mutiara Harum Jl Kali Mook-Kalianget (Lap. Bola Wika Putra) Kab. Sumenep	09 Juni 2014/12:45	47,4	2,486	16 Oktober 2014/17:05	264,6
Surabaya	Perum Medokan Asri Utara Surabaya (Depan Masjid)	11 Agustus 2014/12:25	61,5	63,5	29 Oktober 2014/12:15	261,7
Surabaya	Jl A. Yani Surabaya (Depan Ubhara)	11 Agustus 2014/12:25	170,8	38,4	29 Oktober 2014/12:15	363,4

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

Dari hasil pengukuran kualitas ambien pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, nampak bahwa parameter partikulat/debu masih menjadi permasalahan utama khususnya di lokasi roadside dan industri.

Pemantauan udara emisi pada tahun 2014 dilaksanakan pada 18 titik cerobong industry yang terdiri dari :

Tabel 4.8.1.3

Pemantauan kualitas udara emisi tahun 2014

No	PERUSAHAAN	Kab./Kota	SUMBER EMISI	PARAMETER			
				NO2	Op	SO2	CO
				mg/Nm3	%	mg/Nm3	mg/Nm3
1	PT. Sasa Inti	Probolinggo Kab.	Turbin Gas	175,4	< 20%	5,24	
2	PT. Ecco Tannery Indonesia	Sidoarjo	Boiler Gas	9,88		5,24	
3	PT. Tjagrindo Mas	Gresik	Genset Solar	230			627
4	PT. Cort Indonesia	Mojokerto Kab.	Genset Solar	932,6			692,2
5	PT. Agel Langgeng	Pasuruan Kab.	Boiler Batubara	49,7	< 20%	3271	
6	PT. Bumi Menara Internusa	Malang Kab.	Genset Solar	354,9		230,5	702
7	PT. Amarta Carragenan Indonesia	Pasuruan Kab.	Boiler minyak	0,581	< 20%	1362	
8	PT. Indofood CBP Sukses Makmur	Pasuruan Kab.	Boiler Gas	2,2		5,24	
9	PT. Asindo Karya Jaya	Malang Kab.	Genset Solar	721,7			1388
10	PT. Liman Jaya Anugerah	Pasuruan Kab.	Boiler Batubara	65,5	< 20%	115,9	
11	PT. Universal Jasa Kemas	Pasuruan Kab.	Boiler Batubara	6,78	< 20%	310,8	
12	PT. Sinar Sosro Gresik	Gresik	Boiler Gas	2,41		5,24	
13	PT. Manna Jaya Makmur	Mojokerto Kab.	Pengolahan logam/Elektrik	0,564		5,24	
14	PT. Turindo Unimetal Utama	Mojokerto Kab.	Peleburan	234,4	< 20%	127,9	
15	PT. Satelit Sriti unit I	Pasuruan Kab.	Boiler cangkang sawit	45,2	< 20%	7,19	
16	PT. Meiji Indonesia	Pasuruan Kab.	Boiler Gas	3,24		5,24	
17	PT. Kemasan Ciptatama Sempurna	Pasuruan Kab.	Boiler Batubara	77,4	< 20%	1441	
18	PT. ALP Petro Industry	Pasuruan Kab.	Boiler Gas	3,54		5,24	

Berdasarkan hasil evaluasi masih ditemukan sebagian kecil industri yang kualitas emisinya melebihi baku mutu. Dalam upaya tersebut BLH Jawa Timur terus berupaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- **Inventariasasi Gas Rumah Kaca tahun 2014**

Pada tahun 2014 BLH Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca tahun 2014 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Laporan di tahun 2014 ini merupakan laporan ke-2 yang dikirimkan BLH Provinsi Jawa Timur ke KLH yang meliputi 4 (empat) sektor yaitu: sektor pengadaan dan penggunaan energi, sektor proses industri dan penggunaan produk, sektor pertanian, peternakan dan kehutanan dan penggunaan lahan lainnya serta sektor pengelolaan limbah.

Hasil perhitungan dan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Jawa Timur sejak tahun 2013 diperoleh antara lain :

1. sektor pengadaan dan penggunaan energi adalah sebesar 63.818 Gg CO₂e ;
2. sektor proses industri dan penggunaan produk (IPPU) sebesar 20.987 Gg CO₂e;
3. sektor pertanian, peternakan sebesar 14.042,47 Gg CO₂e.
4. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sebesar 58 Gg CO₂e. dan,
5. sektor pengelolaan limbah sebesar 4.822,84 Gg CO₂e.

- **Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)**

Limbah domestic mempunyai andil yang cukup besar dalam kontribusi pencemaran di kali Surabaya. Dalam rangka upaya pengendalian tersebut sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 sudah ada 17 IPAL (4 unit dibangun PU dan 2 unit PJT). Pada tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur hanya membangun 1 unit IPAL domestic komunal (IPAL dan MCK) di Karangpilang dan

lanjutan dari tahun 2013 berupa 1 unit MCK beserta plengsengan di Krikilan.

Dari setiap IPAL yang terbangun direncanakan mampu untuk mengolah limbah domestik dari pemukiman (+94 Kepala Keluarga/KK), sehingga akan dihasilkan kualitas buangan air limbah domestik yang memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke badan air/sungai.

Tabel 4.8.1.4
Pembangunan IPAL Domestik Tahun 2014

No	Lokasi	IPAL Unit	Kapasitas IPAL (M ³)	System yang digunakan
1.	RT 02/RW 02 Kel. Warugunung – Kec. Karangpilang - Surabaya	1 unit	25	Anaerobic Biological Reactor (ABR) + MCK
2.	Desa Krikilan RT 12 Kec. Krikilan – Kab. Gresik (Lokasi IPAL lama)	1 unit	25	MCK dan plengsengan

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

- **Kajian Lingkungan Hidup**

Dalam rangka peningkatan/pengembangan kapasitas kelembagaan terkait pengelolaan lingkungan hidup maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa Kajian/ Penelitian / Perencanaan Lingkungan Hidup yang diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan Materi Raperda RPPLH Jatim
2. Inventarisasi Pemanfaatan dan Pencadangan Potensi Sumber Daya Lahan untuk RPPLH Jatim
3. Inventarisasi Pemanfaatan dan Pencadangan Potensi Sumber Daya Mineral untuk RPPLH Jatim
4. Inventarisasi Pemanfaatan dan Pencadangan Potensi Sumber Daya Air untuk RPPLH Jatim
5. Perhitungan dan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Timur

6. Inventarisasi Pemanfaatan dan Pencadangan Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perkebunan untuk RPPLH Jatim
7. Inventarisasi Pemanfaatan dan Pencadangan Potensi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Perikanan Kelautan dan Keanekaragaman Hayati
8. Perhitungan Beban Pencemaran DAS Brantas
9. Inventarisasi Potensi Limbah B3 Rumah Sakit
10. Inventarisasi Potensi Limbah B3 Industri Skala UKM Sektor Peleburan Logam
11. Inventarisasi Potensi Limbah B3 Industri Skala UKM Sektor Peleburan Aki
12. Identifikasi Mata Air di Hulu DAS Brantas
13. Dampak Pengembangan Sekolah Adiwiyata Dalam Penurunan Beban Pencemaran
14. Strategi Pengembangan Pondok Pesantren Ramah Lingkungan (Ecopesantren) Dalam Penurunan Beban Pencemaran
15. Pekerjaan Kajian Kerusakan Tanah/ Lahan Akibat Kegiatan Biomassa untuk Data SLHD

- **Perizinan Lingkungan Hidup**

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Selain dari pada itu suatu usaha harus dilengkapi izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri :

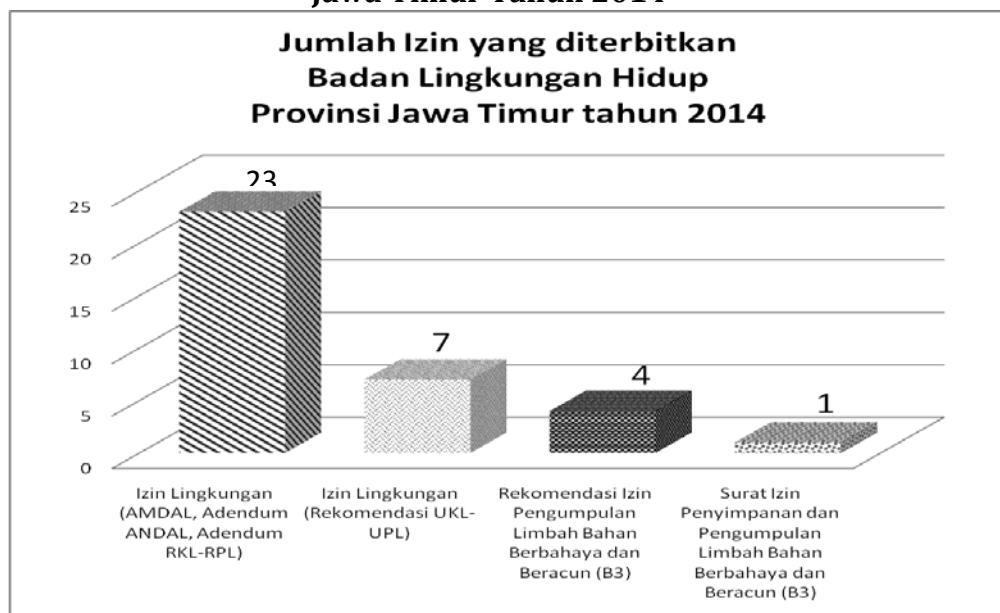
1. Izin pembuangan air limbah
2. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah
3. Izin penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
4. Izin pengumpulan Limbah B3

5. Izin pengangkutan limbah B3
6. Izin pemanfaatan limbah B3
7. Izin pengolahan limbah B3
8. Izin penimbunan limbah B3
9. Izin pembuangan air limbah ke laut
10. Izin dumping ke laut
11. Izin reijeksi ke dalam formasi
12. Izin venting ke udara

Proses dan Prosedur Izin Lingkungan di Jawa Timur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/ 62 / KPTS / 207 / 2014. Hal ini merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan beserta turunan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Pada tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan 30 izin lingkungan dan 5 izin PPLH serta 24 permohonan masih dalam proses, yang secara detail ada pada gambar dan table di bawah.

Gambar 4.8.1.1
Perizinan Lingkungan Hidup yang di Terbitkan BLH
Jawa Timur Tahun 2014



Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

Tabel 4.8.1.5
Perizinan Lingkungan Hidup yang di Terbitkan BLH Jawa Timur
Tahun 2014

NO	IDENTITAS PERUSAHAAN/INSTANSI	DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT/LOKASI
1	5	6	7
1.	PT. Wahana Citra Gemilang Jl. Gajah Mada No.175 Jember	AMDAL Kegiatan Pembangunan Gedung Jember Icon Bid. Pekerjaan Umum (Kawasan Terpadu Perdagangan dan Jasa Mall, Rumah Sakit, Hotel dan Sekolah)	Kel. Jember Kidul - Kec. Kaliwates Kab. Jember
2.	PT.PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan VIII Jl. Ketintang Baru I No.1-3 Surabaya	ADENDUM ANDAL,RKL-RPL PLTU-3 Jawa Timur Tanjung Awar- Awar 2x350MW Bid.Sumber Daya Energi dan Mineral (PLTU)	Desa Wadung & Kaliuntu Kec. Jenu - Kab. Tuban
3.	<i>PT. Bayu Buana Gemilang</i> <i>Plaza Asia Lt.16</i> <i>Jl. Jend.Sudirman Kav.59 Jakarta Selatan</i>	<i>UKL-UPL Pemasangan dan Pengoprasian Pipa Gas Bumi Diameter 6" Sepanjang +/- 3.280 Meter dari End Valve PT. Platinum Ceramics Indutry di Kota surabaya sampai PT. Keramik Diamond Industries Kab. Gresik Bid.Sumber Daya Energi dan Mineral (Migas)</i>	<i>Kel.Warugunung dan Desa Bambe Kec.Karangpilang dan Kec. Driyorejo Kota Surabaya dan Kab. Gresik</i>
4.	PT.Bumi Suksesindo Jl. Jend.Sudirman Kav.25 Karet-Setiabudi	AMDAL Pertambangan Emas DMP di Tujuh Bukit (Tumpang Pitu) Bid.Sumber Daya Energi dan Mineral (Pertambangan Emas DMP)	Desa Sumberagung Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi
5.	<i>PT. Pertamina (Persero)</i> <i>Jl. Medan Merdeka Timur 1A- Jakarta</i>	<i>UKL-UPL PIPANISASI Avtur Tanjung Perak-DPPU Juanda dan Pembangunan Hydrant System dan Topping Up DPPU Bandara Juanda Surabaya-Sidoarjo</i>	<i>Kec. Krembangan-Pabean Cantikan, Asem Rowo, Suko manunggal, Wiyung,</i>

NO	IDENTITAS PERUSAHAAN/INSTANSI	DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT/LOKASI
1	5	6	7
			<i>Jambangan dan Kec. Taman, Waru, Sedati</i>
6.	PT. Terminal Petikemas Surabaya Jl. Tanjung Mutiara No.1 Surabaya	ADENDUM ANDAL, RKL-RPL Pengerukan Alur dan Kolam Dermaga dengan Lokasi Dumping Baru Pelabuhan PT. Terminal Petikemas Surabaya (Bid. Perhubungan)	Kel. Perak Barat - Kec. Krembangan Kota Surabaya
7.	Pemerintah Kabupaten Blitar Jl. Sudaco Supriadi No. 17 Blitar	AMDAL Pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar (Bid. Pekerjaan Umum) (Bid. Perindustrian)	Kel. Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar
8.	PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa Desa Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. Jember	ADENDUM ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Pabrik Semen Puger di Jember	Desa Puger Kulon Kec. Puger Kab. Jember
9.	CV. Logam Abadi Ds. Kendalsari, Kec.Sumobito, Kab. Jombang	AMDAL Industri Peleburan Logam (Bid. Perindustrian)	Desa Kendalsari Kec. Sumobito Kab. Jombang
10.	BBWS-Solo Pabelan, Kertasura, Sukoharjo	AMDAL Pembangunan Waduk Tugu di Kabupaten Madiun (Bid. Pekerjaan Umum Sumber Daya Air)	Desa Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun
11.	Badan Pengatur Jalan Tol,Kementerian PU Jl.Iskandarsyah Raya No.35, RT.005/004, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	AMDAL Pembangunan Jalan Tol Pandaan - Malang (Bid. Pekerjaan Umum)	35 Desa/Kelurahan : Kec.Kedung Kandang, Lawang, Pakis, Singosari,Purwodadi, Purwosari, Sukorejo(Kota/Kab. Malang, Kab.Pasuruan)
12.	Ka. Badan Lingkungan Hidup Kab. Jombang	AMDAL Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Aluminium	19 Desa/Kelurahan Kec.Sumobito dan Kec.Kesambe Kab.

NO	IDENTITAS PERUSAHAAN/INSTANSI	DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT/LOKASI
1	5	6	7
	Jl. Presiden KH.Abdurrahman Wahid Jombang	(Bid. Pengelolaan Limbah B3) Pemanfaatan Daur Ulang Slag Aluminium	Jombang
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya	AMDAL Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta sistem Penyediaan Air Minum (KPS SPAM) Umbulan Bid.Pekerjaan Umum Pembangunan dan Pengoperasian Unit Produksi SPAM Umbulan, Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi SPAM Umbulan	101 Desa/ 13Kelurahan-26 Kecamatan ; Kab (Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik) Kota (Surabaya, Pasuruan , Mojokerto)
14.	PT. Smelting Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.9-11 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan	Perubahan RKL-RPL Penambahan Kegiatan Baru PT. Smelting Gresik Bid.Perindustrian (Peleburan dan Pemurnian Tembaga)	Desa Roomo Kec. Manyar Kab. Gresik
15.	PT. Berdikari Jaya Bersama Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo	AMDAL Pengumpulan dan Pemanfa tan Limbah B3 (Minyak Pelumas Bekas) PT. Berdikari Jaya Bersama Bid.Perindustrian, Limbah B3 (Minyak Pelumas Bekas)	Kel.Kedungasem Kec. Wonoasih - Kota Probolinggo
16.	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Jl. Perak Barat No.610 Surabaya	ADENDUM ANDAL,RKL-RPL Pelebaran, Pendalaman, dan Pengoperasian Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) di Selat Madura Bid.Perhubungan (Kepelabuhan)	54 Desa/Kelurahan-16 Kecamatan Kab.Gresik, Bangkalan, dan Kota Surabaya
17.	PT. Daun Daun	AMDAL Pembangunan Daun daun Unique Hotel Bid.Pekerjaan Umum (Jasa Penginapan)	Kel. Semampir

NO	IDENTITAS PERUSAHAAN/INSTANSI	DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT/LOKASI
1	5	6	7
	Kel.Semampir, Kec.Kota, Kota Kediri		Kec.Kota - Kota Kediri
18.	PT.Metro Abadi Raya Jl.Raya Banyuwangi KM.13,Manyar,Gresik	AMDAL Pengumpulan dan Pemanfaatan Minyak Pelumas Bekas Bid. Perindustrian (Minyak Pelumas Bekas)	Desa Banyuwangi Kec. Manyar - Kab.Gresik
19.	<i>But Techwin Energy Northeast Madura Ltd Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta</i>	<i>UKL-UPL Survei Seismic 2D Wilayah Kerja Northeast Madura Prov.Jatim Bid.Sumber Daya Energi dan Mineral (Eksplorasi Minyak dan Gas di Lepas Pantai)</i>	<i>Wilayah Perairan Laut Lepas Pantai (Offshore) dan Pesisir Pulau-pulau Kecil, Kabupaten Sumenep</i>
20.	<i>PT. Surya Cipta Internusa Gd. Graha Niaga Lt. 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Kebayoran Baru, Jaksel, Jakarta</i>	<i>UKL-UPL Kegiatan Pemasangan dan Pengoperasian Jaringan Pipa Gas Alam Bid.Pekerjaan Umum (Distribusi Gas Melalui Jaringan Pipa)</i>	<i>Kec. Kebomas dan Kec. Benowo Kab. Gresik dan Kota Surabaya</i>
21	<i>PT. Darma Pratama Sejati Jl. Mampang Prapatan Raya No. 27-J, Duren Tiga, Pancoran, Jaksel</i>	<i>UKL-UKL Kegiatan Pembangunan/Penempatan dan Pengoperasian Bangunan Jaringan Utilitas (Pipa Gas Bumi Diameter 8 inci) sepanjang 15,750 Km dari MRS Sidoarjo-Ngoro Industri Mojokerto Prov. Jatim Bid.Pekerjaan Umum (Pipa Penyalur Gas Bumi)</i>	<i>Kec. Porong, Ngoro Kab. Sidoarjo dan Kab. Mojokerto</i>
22.	PT. PLN (Persero) UIP VIII Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya	ADENDUM ANDAL, RKL-RPL Pembgn PLTU 1 Jatim Pacitan (2X300-400 MW) dan Jaringan Transmisi SUTT 150KV (Tapak Proyek GI Pacitan) Bid. Sumber Daya Energi dan Mineral (Ketenagalistrikan)	Ds. Sukorejo Kec. Sudimoro - Kab. Pacitan

NO	IDENTITAS PERUSAHAAN/INSTANSI	DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT/LOKASI
1	5	6	7
23	Dinas Perikanan dan Kelautan Jl. Jend. A. Yani No. 152-B Surabaya	ADENDUM ANDAL, RKL-RPL Keg Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Kab. Pacitan Bid. Perhubungan	Ds. Sidoharjo Kec. Pacitan - Kab. Pacitan
24	<i>Saka Indonesia Pangkah Limited Ged. The Energy, Lt. 11-12, SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta</i>	<i>UKL-UPL Pemboran Sumur Eksplorasi Ronggolawe-2 dan Sidayu-3 di Blok Pangkah, Kab. Gresik Prov. Jatim Bid. Sumber Daya Energi dan Mineral (Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi)</i>	<i>Kab. Gresik</i>
25	Politeknik Negeri Madura Ds. Taddan, Kec. Camplong Kab. Sampang	AMDAL Pembangunan Gedung Kampus Politeknik Negeri Madura Bid. Pekerjaan Umum	Desa Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang
26	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kel. Mojopanggung Kec. Giri, Kab. Banyuwangi	AMDAL Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Tipe A Bid. Pekerjaan Umum	Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi
27	Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Jl. Anggrek No. 15 Probolinggo	AMDAL Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Bestari Kota Probolinggo Bid. Pekerjaan Umum	Kel. Sukabumi Kec. Mayangan - Kota Probolinggo
28	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi Jl. KH. Agus Salim No. 106 Banyuwangi	AMDAL Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Grajagan Bid. Perhubungan (Kelautan dan Perikanan)	Desa Grajagan Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi
29	<i>PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat</i>	<i>UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas Gresik-Lamongan-Tuban Bid. Pekerjaan Umum</i>	<i>Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Tuban</i>

NO	IDENTITAS PERUSAHAAN/INSTANSI	DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT/LOKASI
1	5	6	7
		<i>(Distribusi dan Transmisi Gas Bumi)</i>	
30	Satker. Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi, Dirjen. Perhubungan Udara, Kemen. Perhubungan, Kab. Banyuwangi	AMDAL Pengembangan Bandar Udara Blimbingsari Kab. Banyuwangi Bidang Perhubungan	Desa Blimbingsari, Desa Karangbendo dan Desa Badean Kec. Rogojampi dan Kab. Banyuwangi

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

Tabel 4.8.1.6
Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tahun 2014

NO	IDENTITAS PERUSAHAAN/INSTANSI	DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT/LOKASI
1	5	6	7
1.	PT. PPLi Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Sudirman Square Office Tower Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan	Fasa Cair: Olie Bekas, Pelarut Bekas Limbah Alkali Limbah Asam, Bahan Kimia Kadaluwarsa, Limbah Laboratorium, Limbah Cair Cooland, Limbah Farmasi Limbah Intectium, dll Fasa Padat: Aki Bekas, Spent Katalis, Sludge, Fly/Bottom Ash, Incinerator Ash, Bahan Terkontaminasi B3, Kerak dan Slurry Cat, PCB, Used Sand Blasting, Produk Konsumen, Kemasan Bekas, Produk Elektronik, Resin	Kel. Warugunung dan Desa Bambe Kec. Karangpilang dan Kec. Driyorejo Kota Surabaya dan Kab. Gresik
2.	PT. Sumber Anugerah Utama Jl. Bumi Indah No. 21 Kec. Tandes - Surabaya	Fasa Cair: Olie Bekas	Desa Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik
3.	PT. Sidomulyo Patukpulo Jl. Mawar, Ds. Sidomulyo Kec. Krian Sidoarjo	Fasa Cair: Olie Bekas	Desa Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo

NO	IDENTITAS PERUSAHAAN/INSTANSI	DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT/LOKASI
1	5	6	7
4.	PT.Sagraha Satya Sawahita	Fasa Cair:Olie Bekas	Kel. Kelatak
5.	Jl.Jaksa Agung Suprpto No.39-41 Ketabang, Genteng, Surabaya PT.Petrogas Jatim Utama Intiland tower,Lantai 7 Ruang 703B Jl.PB. Sudirman 101-103 - Surabaya	Fasa Cair:Minyak Kotor	Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi Desa Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

- **Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan (RKL/RPL atau UKL/UPL) di Jawa Timur**

Pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan wujud tanggung jawab, ketaatan, dan konsistensi pemegang izin lingkungan dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berdasarkan prinsip-prinsip perbaikan secara menerus (*continual improvement*).

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL merupakan upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan. Sedangkan, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL merupakan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan. Dokumen RKL-RPL sebagai pedoman dalam pengendalian dampak lingkungan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Izin Lingkungan, BLH Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan RKL/RPL dan UKL/UPL dari usaha/kegiatan di Jawa Timur selama tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.8.1.7
Pantauan RKL/RPL dan UKL/UPL Tahun 2014

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Laporan RKL-RPL dan UKL/UPL
1	Sektor Agro	22
2	Sektor Pertambangan Energi Mineral (PEM)	19
3	Sektor Manufaktur Perdagangan danJasa (MPJ)	106
	Jumlah	147

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaporan yang diterima telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan hasil pemantauan kualitas lingkungan diwajibkan memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Evaluasi pelaporan RKL/RPL dan UKL/UPL yang terbaik diberikan reward/penghargaan terhadap kepatuhan perusahaan dalam peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan setiap tahun oleh Gubernur Jawa Timur pada peringatan Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur.

Tabel 4.8.1.8
Industri Penerima Penghargaan Pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terbaik:

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT Petrokimia Gresik
2	PT Gasuna Federal Indonesia
3	PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu
4	PT Pertamina PHE WMO
5	PT Dunia Kimia Jaya
6	PT ISPAT WIRE PRODUCTS

7	PT Heinz ABC INDONESIA- Pasuruan
8	PT Ispatindo
9	PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. - Pabrik Tuban
10	PT. Unilever Indonesia, Tbk - Pabrik Rungkut
11	PT. Jawa Power
12	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. Div. Noodle
13	PT. Indonesia Power UBP Perak - Grati PLTGU Grati
14	PT. Pertamina - Terminal BBM Tanjung Wangi
15	PT. Amerta Indah Otsuka - Pasuruan
16	PT. Pertamina (Persero) S&D Region III - Terminal BBM Malang
17	PT. Pertamina (Persero) DPPU Juanda
18	PT. Pertamina (Persero) S&D Reg. III - Terminal BBM Tuban
19	PT. Pertagas Area Jawa Bagian Timur

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

- **Pembinaan dan Pengawasan Industri dan/atau kegiatan usaha**

Pembinaan dan pengawasan industri dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Timur dalam rangka mencapai penurunan beban pencemar. Sasaran pengawasan pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan adalah industri dan/atau kegiatan usaha lainnya yang berpotensi memberikan pencemaran terhadap lingkungan di Jawa Timur. Industri dan/atau kegiatan usaha yang diawasi pada tahun 2014 berjumlah 267, meliputi sektor manufaktur, agro industri, pertambangan, energy, minyak dan gas bumi serta rumah sakit. Aspek pengawasan pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan meliputi kepemilikan dan pelaksanaan dokumen serta izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah padat dan badan beracun dan berbahaya (B3). Berdasarkan evaluasi capaian ketaatan terhadap dokumen lingkungan sudah mencapai 73%.

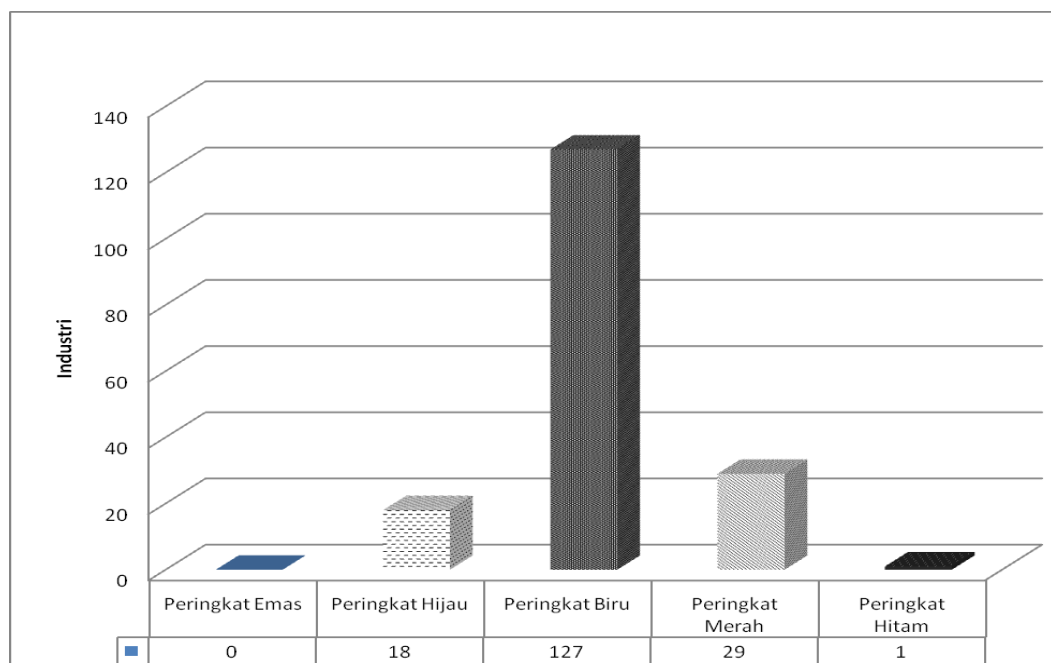
Dalam upaya untuk mendorong penerapan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup melakukan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Program ini

bertujuan: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production).

Pada tahun 2014 ada sebanyak 175 perusahaan di Jawa timur yang ikut dalam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Ada 57 industri dan/atau kegiatan usaha yang langsung di evaluasi oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan sisanya langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil penilaian pelaksanaan proper 2013-2014 sebagaimana gambar dan tabel di bawah.

Gambar 4.8.1.2

Hasil Penilaian PROPER Tahun 2014



Keterangan :

Emas	Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan
Hijau	Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

	undangan yang berlaku
Biru	Untuk usaha dan atau kegiatan yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
Merah	Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
Hitam	Untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

Tabel 4.8.1.9
Perusahaan di Jawa Timur Yang Memperoleh Peringkat
PROPER Hijau Tahun 2014

NO.	Nama Perusahaan	Bidang Industri	Sub Bidang Industri	Kabupaten / Kota
1	PT. Unilever Indonesia, Tbk - Pabrik Rungkut	Manufaktur, Prasarana dan Jasa	Consumer Goods	Kota Surabaya
2	PT. PJB UP Gresik	Pertambangan, Energi dan Migas	Energi PLTGU	Kota Gresik
3	PT. Indonesia Power UBP Perak - Grati PLTGU Grati	Pertambangan, Energi dan Migas	Energi PLTGU	Kab. Pasuruan
4	PT. Jawa Power	Pertambangan, Energi dan Migas	Energi PLTU	Kab. Probolinggo
5	PT. PJB UP Paiton	Pertambangan, Energi dan Migas	Energi PLTU	Kab. Probolinggo
6	PT. Tirta Investama – Pandaan	Agroindustri	Makanan dan Minuman	Kab. Pasuruan

NO.	Nama Perusahaan	Bidang Industri	Sub Bidang Industri	Kabupaten / Kota
7	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Noodle Division - Plant Pasuruan	Agroindustri	Makanan dan Minuman	Kab. Pasuruan
8	PT. Pertamina (Persero) S&D Regional III TBBM Malang	Pertambangan, Energi dan Migas	Migas Distribusi	Kota Malang
9	PT. Pertamina (Persero) S&D Reg III -Instalasi Tg. Perak	Pertambangan, Energi dan Migas	Migas Distribusi	Kota Surabaya
10	PT. Pertamina (Persero) S&D Regional III -TBBM Tanjung Wangi	Pertambangan, Energi dan Migas	Migas Distribusi	Kab. Banyuwangi
11	PT. PERTAMINA (PERSERO) S&D REGION III TERMINAL BBM TUBAN	Pertambangan, Energi dan Migas	Migas Distribusi	Kab. Tuban
12	PT. Pertamina (Persero) DPPU Juanda	Pertambangan, Energi dan Migas	Migas Distribusi	Kab. Sidoarjo
13	PT. Pertamina Gas Area Jawa Bagian Timur	Pertambangan, Energi dan Migas	Migas Distribusi	Kab. Sidoarjo
14	PT. Pertamina Hulu Energi – West Madura Offshore	Pertambangan, Energi dan Migas	Migas EP	Kab. Gresik
15	PT. Smelting	Manufaktur, Prasarana dan Jasa	Peleburan Logam	Kab. Gresik
16	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk-FID Division - Pasuruan Plant	Agroindustri	Sawit	Kab. Pasuruan
17	PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. -Pabrik Tuban	Manufaktur, Prasarana dan Jasa	Semen	Kab. Tuban
18	PT. Nestle Indonesia -Kejayan Factory	Agroindustri	Susu	Kab. Pasuruan

- **UPT Laboratorium Uji Kualitas BLH Jawa Timur**

UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan BLH Provinsi Jawa Timur adalah Laboratorium yang sudah terakreditasi sebagai Laboratorium Penguji dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor : LP-508-IDN pada Tanggal 26 Mei 2011 dan sudah ditunjuk sebagai Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 188/360/KPTS/013/2011 pada Tanggal 08 Juli 2011 serta telah mendapatkan registrasi sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan Nomor : 0037/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH.

Dalam menjalankan kegiatannya, UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan mempunyai kebijakan mutu yaitu mengimplementasikan *Good Professional Practice*, pelayanan prima terhadap semua pelanggan, serta sistem manajemen laboratorium sesuai dengan ISO / IEC 17025 : 2005 yang dipahami oleh seluruh personel laboratorium dengan melakukan peningkatan secara berkelanjutan guna menghasilkan mutu pengujian yang tinggi.

Selama tahun 2014 UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan telah melakukan sampel kualitas lingkungan yang terdiri:

- 1) Sampel air dan padatan/slurry sebanyak 3458 sampel
- 2) Sampel udara (ambient dan emisi) sebanyak 489 sampel

Capaian target UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8.1.10

Capaian Target Uji Kualitas Lingkungan

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	KET
2014	850.000.000,-	1.594.015.500,-	187,5	Terpenuhi

- **Pelaksanaan Anggaran Cukai**

Pembinaan dan Penerapan Produksi Bersih dan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Industri Rokok dan Industri Skala UMKM

1. Pendampingan Penerapan Produksi Bersih Industri Hasil Tembakau (PR. ANGKLING DARMO BAROKAH - Kabupaten Bojonegoro)
2. Pendampingan Penerapan Produksi Bersih Industri Hasil Tembakau (PR. INDOKRETEK - Kabupaten Malang)
3. Pendampingan Penerapan Produksi Bersih Industri Hasil Tembakau (PR. TOP TEN TOBACCO - Kabupaten Kediri)
4. Pendampingan Penerapan Produksi Bersih Industri Hasil Tembakau (PR. ALAINA - Kabupaten Tulungagung)
5. Pendampingan Penerapan Produksi Bersih Industri Hasil Tembakau (PR. DELTA MAKMUR - Kabupaten Sidoarjo)
6. Pendampingan Penerapan Produksi Bersih Industri Hasil Tembakau (PR. PURA PERKASA - Kota Mojokerto)
7. Pendampingan Penerapan Produksi Bersih Industri Hasil Tembakau (PR. SEMANGGI MAS - Kabupaten Kediri)
8. Penerapan Produksi Bersih dan Bantuan Teknis Demplot Pengolahan Limbah Industri Skala UKM (Peleburan Logam - Jombang)
9. Penerapan Produksi Bersih dan Bantuan Teknis Demplot Pengolahan Limbah Industri Skala UKM (Peleburan Aki - Lamongan)
10. Penerapan Produksi Bersih dan Bantuan Teknis Demplot Pengolahan Limbah Industri Skala UKM (Industri Tahu - Kediri)
11. Penerapan Produksi Bersih dan Bantuan Teknis Demplot Pengolahan Limbah Industri Skala UKM (Sidoarjo)

- **Pengambilan Contoh Uji (Sampling) Industri Hasil Tembakau**

Pada tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur melakukan pantauan uji kualitas lingkungan di sector industri hasil tembakau. Jumlah sampel yang diambil berjumlah 275 contoh uji yang meliputi 95 contoh uji untuk kualitas air limbah dan 180 contoh

uji kualitas udara ambient. Hasil pantauan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di industri tembakau secara umum masih baik dan memenuhi baku mutu.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya.

Permasalahan

- Semakin meningkatnya pencemaran sungai oleh limbah domestik (rumah tangga) dan limbah industri, terutama masih tingginya konsentrasi bakteri coli.
- Kurangnya jumlah fungsional lingkungan hidup baik sebagai Pengendalia Dampak Lingkungan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Keterbatasan intensitas pengawasan dan masih memfokuskan diri pada upaya untuk mengendalikan pencemaran air dari sektor industri dan kegiatan usaha lain.
- Masih adanya pemahaman sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat, dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah lingkungan memerlukan biaya mahal.
- Keterbatasan data dari instansi lingkungan hidup di Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman IPCC *Guideline*.

Upaya Pemecahannya

- Membuat demplot Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal serta mendorong kabupaten/kota dan mitra dunia usaha dengan *Community Social Responsibility (CSR)* untuk berperan aktif dalam pembangunan IPAL.
- Meningkatkan jumlah pegawai untuk melakukan Diklat fungsional lingkungan hidup dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk pengangkatannya.
- Meningkatkan intensitas pengawasan baik disektor industri dan domestic
- Meningkatkan pemahaman kepada pemerintah kabupaten/kota dan pelaku kegiatan usaha dan skala rumah tangga (UKM) dalam bentuk

sosialisasi dan pelatihan agar melakukan produksi yang ramah lingkungan.

- Peningkatan kapasitas inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi instansi pemerintah dan yang terkait.

Untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat didalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” dilakukan program – program sebagai berikut

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a) Pagu dan Realisasi Program

Anggaran Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya tahun 2014 adalah sebesar Rp 3.029.345.000,00 dan terealisasi sebesar 92,55% atau Rp. 2.803.768.110,00, secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

– Desa Berseri

Program Berseri (Bersih dan Lestari) adalah salah satu program Pemerintah Propinsi Jawa Timur di bidang Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat Desa/ Kelurahan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat terwujud desa/ kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri.

Kriteria penilaian dan prosentase masing-masing komponen:

1. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Titik pantau kriteria ini adalah pada pembentukan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, program kerja kader dalam bidang lingkungan, aksi advokasi dan provokasi lingkungan dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kelembagaan/ *capacity building*, pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan dan sanksi yang diberikan, penghargaan/ prestasi yang diperoleh Desa/ Kelurahan, serta adanya keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Titik pantau kriteria ini adalah upaya pengelolaan sampah, penyediaan Fasilitas Pengolahan Sampah, Kegiatan Daur Ulang Sampah, proses pengolahan dan pemanfaatan sampah untuk kompos, pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan sanitasi, upaya mengurangi pencemaran udara misal dengan tidak membakar sampah, kemitraan dengan pihak luar (Pemerintah, Institusi Pendidikan, LSM, Swasta dll) dalam Pengelolaan Sampah, Pengelolaan TPS.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Titik pantau kriteria ini adalah upaya pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat dalam ikut menjaga dan melestarikan sumber daya alam, upaya penghematan sumber daya alam, peraturan tertulis dan tidak tertulis tentang penyelamatan SDA, upaya tanggap darurat bencana, penghargaan dalam upaya penyelamatan sumber daya alam, upaya penyelamatan sumber daya alam di desa/ kelurahan, pemakaian teknologi ramah lingkungan dalam upaya penyelamatan sumber daya alam.

4. Presentasi

Penghargaan BERSERI kategori Pratama, Madya dan Mandiri diberikan kepada Kepala Desa/ Lurah yang sudah memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan. Penghargaan yang diperoleh berupa :

Trophy Gubernur Jatim, Pembinaan Fasilitas Barang Stimulan. Hasil Akhir penilaian (non fisik dan fisik) didasarkan passing grade prosentase nilai maksimal yang sudah ditetapkan yaitu :

Berseri Tingkat Mandiri : $\geq 80\%$

Berseri Tingkat Madya : $70 \leq x < 80$

Berseri Tingkat Pratama : $60 \leq x < 70$

Rintisan Kab/ Kota : < 60

Disamping berdasar hasil penilaian dengan passing grade, penentuan kategori penghargaan dengan mempertimbangkan tingkat sebaran RW yang terlibat dalam kegiatan Desa/ Kelurahan Berseri, yaitu :

1. Mandiri : minimal 4 RW atau semua RT bila jumlah RW kurang dari 4
2. Madya : minimal 3 RW atau 50% dari jumlah RT bila kurang dari 4
3. Pratama : minimal 2 RW

Keterangan : dalam 1 RW bisa hanya 1 RT yang dinilai.

Pada tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup provinsi Jawa Timur memberikan sebanyak 75 penghargaan pada desa/kelurahan yang dinilai cukup berhasil dalam program Berseri.

Tabel 4.8.1.11

Penghargaan Desa/kelurahan BERSERI tahun 2014

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Kategori Mandiri	Desa/Kel.	12
2.	Kategori Madya	Desa/Kel.	25
3.	Kategori Pratama	Desa/Kel.	38
	Total	Desa/Kel.	75

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

– **Keanekaragaman Kehati (KEHATI)**

Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Pusat Keanekaragaman Hayati didunia karena merupakan kawasan terluas di Pusat Indomalaya. Kaya akan keanekaragaman hayati tetapi laju kemerosotannya juga sangat tinggi. Sejalan dengan menipisnya cadangan migas, keanekaragaman hayati akan merupakan sumber daya alam yang penting yang memegang tongkat estafet pembangunan nasional Indonesia pada masa mendatang. Namun sayangnya, keanekaragaman hayati tersebut terancam punah akibat kerusakan habitat, jenis asing invasif, serta pencurian sumber daya genetic.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian keanekaragaman

hayati, terutama atas banyaknya ancaman kepunahan maupun dari pencurian sumber daya genetik *“biopiracy”*, Badan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan kerjasama dengan Kabuapeten/Kota dalam pengendaliannya.

Pada tahun 2014 kegiatan baru difokuskan pada penguatan forum kehati dalam upaya peningkatan data genetik *“biopiracy”* dan pembuatan taman kehati di kabupaten/Kota.

– **Kalpataru**

Dalam rangka mendorong dan memotivasi peran aktif masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup di Jawa Timur, sebagai bentuk apresiasi pemerintah dan atas dasar berbagai kepeloporan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat, Pemerintah memberikan Penghargaan Kalpataru. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melakukan penjaringan dan pendampingan calon – calon penerima kalpataru.

Secara rinci perolehan penghargaan tahun 2014 adalah sebagaimana berikut.

Satya Lencana Pembangunan Lingkungan Hidup

- Mukarim dari Desa Penunggul, Jawa Timur, penerima Kalpataru 2005 yang menanam mangrove seluas 150 ha, membina 12 kelompok nelayan, serta melatih berbagai kegunaan mangrove kepada kelompok masyarakat.

Nominator Kalpataru

- TUNAS HIJAU (TH) ialah organisasi lingkungan hidup non-profit, *kids & young people do actions for a better earth* yang bermarkas di Surabaya. TH berawal dari pengiriman 5 orang pemuda dari Jawa Timur ke Australia, Maret 1999. Sejak itu, TH terus konsisten dalam melakukan upaya sederhana, nyata dan berkelanjutan untuk membantu lingkungan hidup menjadi lebih baik. Tunas Hijau juga sering menjadi patner Pemerintah Provinsi Jawa

Timur/Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur untuk beberapa pelaksanaan program lingkungan hidup

- Sugiarto warga Surabaya dibantu masyarakat kampungnya berhasil membuat alat penjernih air atau water treatment. Air yang dijernihkan adalah air sisa yang sudah dipakai warga dan mengalir ke selokan. air selokan itu kemudian melalui sejumlah tahap akhirnya bisa dijernihkan untuk menyiram tanaman
- Sri Partiyah seorang bidan yang mau berjualan sampah-sampah kardus, plastik dan lalu uangnya dikumpulkan untuk diberikan pada anak gizi buruk. Melalui pendirian bank sampah dia berupaya meningkatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat

Tabel 4.8.1.12
Perolehan Kalpataru 2014

NO	KATEGORI	PENERIMA	ALAMAT
1	Satya Lencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	Mukarim	Kec. Nguling - Kab. Pasuruan
2	Nominasi Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan	LSM Tunas Hijau - M. Zamroni	Kel. Semolowaru-Surabaya
3	Nominasi Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan	Sugiarto	Jl. Margorukun VI/35, Kel. Bubutan-Surabaya
4	Nominasi Kalpataru Kategori Pengabdian Lingkungan	Sri Partiah	Ds. Duwet, Kec. Lambean -Magetan

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

– **Program Kampung Iklim**

Program kampung iklim adalah program kementerian lingkungan hidup dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Menteri Lingkungan Hidup dalam acara National Summit Perubahan Iklim Ke-1 di Bali, pada bulan Oktober 2011, telah meluncurkan Program

Kampung Iklim (ProKlim). Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat pada lokasi minimal setingkat RW/Dusun/Dukuh dan maksimal setingkat Kelurahan/Desa yang secara berkesinambungan telah melakukan aksi lokal terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat lokal mencakup antara lain:

- a. Pengendalian banjir, longsor atau kekeringan
- b. Peningkatan ketahanan pangan
- c. Penanganan kenaikan muka air laut
- d. Pengendalian penyakit terkait iklim
- e. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah/limbah
- f. Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi
- g. Budidaya pertanian rendah emisi GRK
- h. Peningkatan tutupan vegetasi
- i. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur telah melakukan pembinaan dan mengusulkan Desa Kampung Iklim sebanyak 16 desa seperti pada table dibawah

Tabel 4.8.1.13
Usulan lokasi Desa Kampung Iklim

No.	Usulan Lokasi	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1.	Desa Kramatinggil	Desa Kramatinggil	Gresik	Kabupaten Gresik
2.	Desa Banyuurip	Desa Banyuurip	Ujung Pangkah	Kabupaten Gresik
3.	Dusun Ngiprak	Desa Butungan	Kalitengah	Kabupaten Lamongan
4.	Dusun Butungan	Desa Butungan	Kalitengah	Kabupaten Lamongan
5.	Dusun Mungli	Desa Mungli	Kalitengah	Kabupaten Lamongan
6.	Desa Janggan	Desa Janggan	Poncol	Kabupaten Magetan

No.	Usulan Lokasi	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
7.	Kelompok Tani Hargo Seto	Desa Sampung	Sampung	Kabupaten Ponorogo
	Dusun Sampung Kidul			
8.	Kelompok Tani Pletuk Jaya	Desa Jurug	Sooko	Kabupaten Ponorogo
9.	Kelompok Tani Mulyo	Desa Canggu	Badas	Kabupaten Kediri
10.	Dusun Semanding	Desa Bajulan	Loceret	Kabupaten Nganjuk
11.	Desa Ngliman	Desa Ngliman	Sawahan	Kabupaten Nganjuk
12.	Desa Sumber Taman	Desa Sumber Taman	Wonoasih	Kota Probolinggo
13.	Kelurahan Karangsari	Kelurahan Karangsari	Sukorejo	Kota Blitar
14.	Desa Semen	Desa Semen	Gandusari	Kabupaten Blitar
15.	Desa Sumbermujur	Desa Sumbermujur	Candipuro	Kabupaten Lumajang
16.	Kelurahan Ditotrunan	Kelurahan Ditotrunan	Lumajang	Kabupaten Lumajang

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya.

Permasalahan

- Masih rendahnya peran perempuan dalam pendidikan dan pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat.
- Keterbatasan lahan dan anggaran di daerah dalam membuat taman kehati sehingga upaya menjaga dan melindungi potensi kahati sulit dilakukan
- Adanya pergeseran penilaian Kalpataru dimana lebih ditekankan pada inovasi dan kondisi daerah

Upaya Pemecahannya

- Perlunya peningkatan sosialisasi, pendampingan peran perempuan dalam pendidikan dan pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat, serta pemberian reward.
- Meningkatkan pemahaman bagi pengambil kebijakan dan masyarakat tentang manfaat perlindungan kehati dan
- Meningkatkan pembinaan dan lebih selektif dalam penjangkaran calon-calon penerima kalpataru dalam jenis kegiatan dan inovasinya

d) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

- Satya Lencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup atas nama Mukarim (Kec. Nguling - Kab. Pasuruan)
- Nominasi Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan atas nama LSM Tunas Hijau - M. Zamroni (Kel. Semolowaru-Surabaya)
 - Nominasi Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan atas nama Sugiarto (Jl. Margorukun VI/35, Kel. Bubutan- Surabaya)
 - Nominasi Kalpataru Kategori Pengabdian Lingkungan atas nama Sri Partiah (Ds. Duwet, Kec. Lambean –Magetan)

3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

a) Pagu dan Realisasi Program

Anggaran Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.370.044.000,00 terealisasi sebesar 92.30% atau Rp. 1.264.570.400,00 secara rinci masing – masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan

– Menuju Provinsi Hijau (MPH)

Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*) dimaksudkan untuk mensinergikan program dan kegiatan serta potensi masyarakat dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi

Jawa Timur. Kegiatan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup berupa pembinaan dan penilaian Kabupaten/Kota dalam mendukung Menuju Indonesia Hijau (MIH).

Tujuan Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*) adalah :

- a. Menggalang dan memperkuat potensi masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mempercepat upaya peningkatan penutupan vegetasi dan rehabilitasi lahan berbasis masyarakat;
- c. Perbaikan tata air dan kualitas atas pada sumber air;
- d. Menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Meningkatkan konservasi energi, penggunaan energi alternative dan teknologi ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap lapisan atmosfer;
- g. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pada tahun 2014 Kabupaten Jombang memperoleh penghargaan Trophy Raksaniyata yaitu berupa penghargaan tertinggi bidang luas tutupan vegetasi.

– **Perlindungan Mata Air (PERMATA)**

Program Permata atau Perlindungan Mata Air bertujuan untuk

1. Mendorong peran serta para pihak untuk meningkatkan upaya perlindungan mata air dengan perbaikan kualitas DAS melalui penanaman lahan kritis dengan MPTS (tanaman buah-buahan)
2. Mendorong pelestarian kearifan lokal
3. Melakukan kesepakatan zonasi perlindungan mata air
4. Mengurangi tekanan kerusakan kawasan resapannya dan beban pencemaran di mata air.
5. Mendorong upaya adaptasi perubahan iklim. Strategi penyelenggaraan melalui Action Learning Perlindungan Mata Air.

Pada tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan action learning di 4 kabupaten, diantaranya : Kabupaten Kediri, Blitar, Jombang dan Malangn

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya.

Permasalahan

- Kurangnya koordinasi antar instansi khususnya Dinas Kehutanan terkait pendataan dan kegiatan konservasi lahan
- Masih tingginya alih fungsi lahan yang berakibat penurunan kuantitas mata air
- Masih sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang teknik konservasi yang baik dan benar

Upaya Pemecahannya

- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama data tutupan lahan
- Melakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap resiko perubahan alih fungsi lahan yang kurang tepat, serta resiko bencana yang dimungkinkan.
- Melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang pentingnya konservasi tanah dan air serta teknik konservasi yang baik

d) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

Kabupaten Jombang memperoleh penghargaan Trophy Raksaniyata

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informatika Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a) Pagu dan Realisasi Program

Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 1.612.264.000,00 terealisasi sebesar (89.01%), atau Rp. 1.435.127.150,00 secara rinci masing-masing, realisasi anggaran kegiatan serta ukuran keberhasilan dapat dilihat Lampiran Matrik 16.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

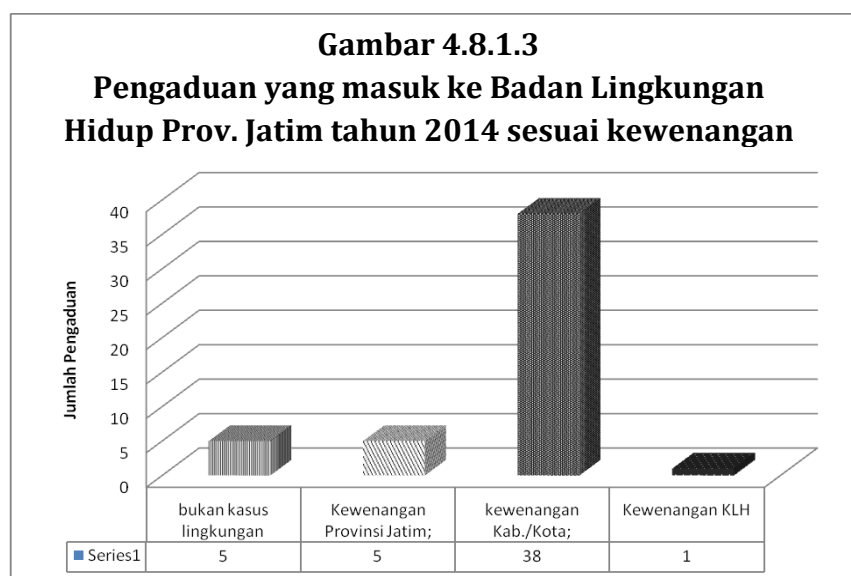
- Penanganan Pengaduan lingkungan :

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari pengaduan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatan.

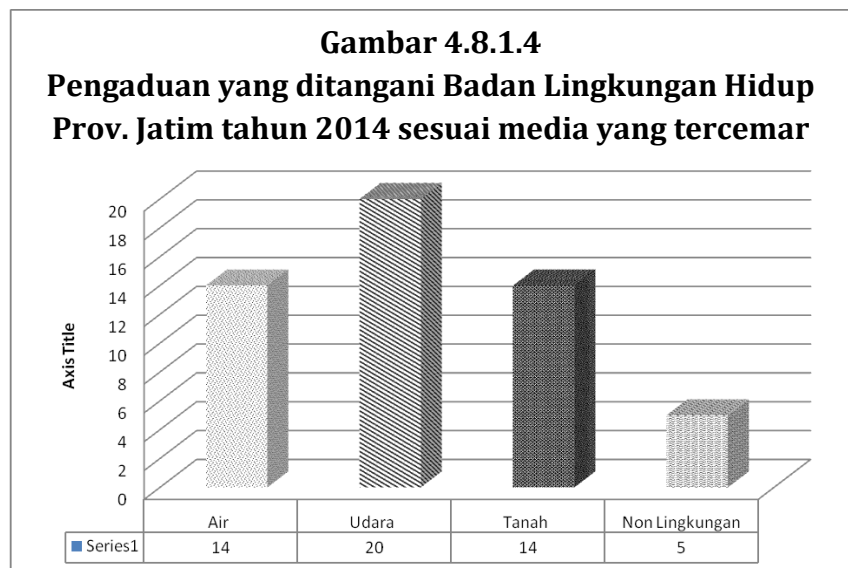
Pengaduan lingkungan dapat disampaikan melalui media :

- SMS di nomor 08 123 5555 123;
- Telepon di nomor 031 855 2072; atau
- Email di adublhjatim@yahoo.com

Selama Tahun 2014 jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 49 sesuai hasil penelaahan untuk mengklasifikasi jenis pengaduan dan kewenangannya, maka sebanyak 5 pengaduan termasuk bukan kasus lingkungan dan sudah diteruskan kepada instansi yang terkait. Sedangkan sisanya sebanyak 45 pengaduan termasuk pengaduan lingkungan, selanjutnya apabila ditinjau berdasar kewenangan, maka sebanyak 1 pengaduan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup, 5 pengaduan merupakan kewenangan Provinsi dan 38 pengaduan merupakan kewenangan Kab/ Kota. Hingga akhir tahun 2014 seluruh pengaduan sudah ditindak lanjuti.



Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015



Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

- **Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)**

Tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak merupakan salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) merupakan salah satu wujud dalam penyediaan data dan informasi lingkungan agar mudah diakses.

SLHD menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

SLHD juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola Pemerintahan yang baik sesuai semangat Reformasi Birokrasi.

SLHD Provinsi Jawa Timur selalu disusun dalam setiap tahunnya yang menggambarkan Kondisi Lingkungan yang ada pada tahun (*state*), tekanan terhadap lingkungan (*Pressure*) dan upaya pengelolaan lingkungan (*Response*). Disamping itu di dalam laporan tersebut ditampilkan juga kotak (*Box*) yang menerangkan terhadap

kondisi lingkungan hidup tertentu, tekanan yang mempengaruhi kondisi dimaksud, upaya pengelolaan lingkungan hidup (*output*), *benefit* (manfaat) serta dampaknya (*Impact*) terhadap suatu kegiatan tersebut.

Sebagai pengharagaan bagi pemerintah daerah yang telah menyusun SLHD secara baik, setiap tahunnya Presiden Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang terbaik. Dan pada tahun 2014 diberikan oleh Wakil Presiden di Jakarta pada malam penghargaan Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni 2014.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Masih kurangnya koordinasi antar sektor dalam pengolahan data informasi lingkungan hidup di Jawa Timur
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai profesional dan anggaran

Upaya pemecahan masalah/solusi

- Perlu penguatan data dan informasi antar sektor dengan membentuk forum komunikasi untuk updating data.
- Meningkatkan kemampuan (SDM) yang ada melalui diklat teknis terkait lingkungan **hidup dan penguatan penganggaran**.

d) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

- Gubernur Jawa Timur memperoleh penghargaan Asasta Buana Kepemimpinan Lingkungan Hidup Kepala Daerah Provinsi
- Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2014 terbaik ke 3 (tiga) Tingkat Nasional untuk laporan SLHD 2013

5) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 4.063.664.500,00 terealisasi sebesar atau Rp. 3.855.657.066,00 (94.88%), secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Matrik Matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Produk Hukum Lingkungan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya

- Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu cara atau strategi dalam mendorong penataan terhadap standar, baku mutu dan peraturan perundang2an lingkungan hidup. Dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dan keperdataan, penegakan hukum administrasi walaupun ada unsur paksaan (*force*), namun jenis penegakan hukum ini memiliki fungsi pencegahan (*preventive*). Melalui pengawasan yang konsisten dan teratur maka berbagai bentuk pelanggaran izin dan peraturan perundang-undangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Dengan demikian pengawasan merupakan "jantung" dari penegakan hukum administratif. Perangkat pengelolaan lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin (terutama izin lingkungan atau izin yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup) dapat dijadikan tolok ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam kemasn penegakan hukum administrasi. Hasil pengawasan inilah yang dapat ditindaklanjuti dengan pembinaan

dan atau penjatuhan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berbentuk peringatan, paksaan pemerintah, pembekuan kegiatan, bahkan penutupan kegiatan. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberi porsi yang besar bagi penegakan hukum administrasi.

Dalam proses penegakan hukum, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Hal ini diharapkan adanya penekanan dalam upaya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha. Pada tahun 2014 ada 2 (dua) sanksi administrasi yang diberikan kepada PT. Petrokimia Gresik dan PT. Gaya Baru Paper dan hingga saat ini masih dalam pengawasan khusus.

Tabel 4.8.1.14

Penegakan Hukum berupa Sanksi Administrasi Tahun 2014

NO	NAMA INDUSTRI	JENIS INDUSTRI	LOKASI	KETERANGAN	TGL. KEP
1.	PT. Petrokimia Gresik	Pupuk	Kab. Gresik	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah	25-Agust-14
2.	PT. Gaya Baru Paper	Kertas	Kab. Malang	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah	01-Okt-14

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

Tabel 4.8.1.15

Penegakan Hukum berupa Proses Pidana Tahun 2014

NO	NAMA INDUSTRI	JENIS INDUSTRI	LOKASI	KETERANGAN	TGL. KEJADIAN
1.	PT. QL Hasil Laut	Pengolahan hasil perikanan	Kab. Lamongan	Proses Penyidikan	05-Mar-14
2.	PT. Sun Nur Logam Jaya	Pengelolaan Limbah B3	Kab. Mojokerto	Proses Penyidikan	30-Mei-14
3.	PT. Prima Talim Abadi	Dakron	Kab. Mojokerto	Proses penyidikan	05-Jun-14
4.	PT. Karunia Catur Perkasa	Penyamakan Kulit	Kab. Malang	Proses Penyidikan	08-Okt-14

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

- ***Adiwiyata***

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dari program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Tujuan Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Pelaksanaan program Adiwiyata didasarkan pada norma-norma Kebersamaan, Keterbukaan, Kejujuran, Keadilan, dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Prinsip Program Adiwiyata:

1. Partisipataif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab.
2. Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berkerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Kanwil. Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi terus berupaya untuk meningkatkan capaian jumlah sekolah adiwiyata. Pada tahun 2014 ada 19 sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Mandiri, 69 sekolah Adiwiyata Nasional dan 117 calon adiwiyata/adiwiyata provinsi. Hingga akhir 2014 total sekolah di provinsi Jawa Timur yang memperoleh penghargaan Adiwiyata berjumlah 334 sekolah.

Tabel 4.8.1.16**Perolehan Adiwiyata Tahun 2014**

No	Uraian	2014
1	Adiwiyata Mandiri	19
2	Adiwiyata Nasional	69
3	Adiwiyata Provinsi	117

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

Dalam upaya peningkatan pendidikan lingkungan hidup juga dikembangkan melalui kegiatan Kemah Hijau dengan tujuan :

1. Mengenalkan dan memberi wawasan lingkungan dan permasalahannya sedini mungkin ke anak-anak dan remaja.
2. Mengembangkan sikap positif dan peduli lingkungan pada anak dan remaja melalui pengembangan kerjasama tim, disiplin, tanggung-jawab, potensi diri, dan kemampuan manajerial.
3. Melatih dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya masyarakat memiliki lingkungan yang diawali melalui pengembangan kegiatan peduli lingkungan dan kebiasaan hijau di sekolah
4. Mengembangkan jaringan diantara anak dan remaja sehingga sedini mungkin muncul kader yang peduli tentang lingkungan

- **Adipura**

ADIPURA merupakan salah satu program prioritas dalam pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik dan penghargaan bagi Kota/Kabupaten yang memiliki komitmen dalam mewujudkan Kota Bersih dan Hijau (*Clean and Green City*).

Pogram ADIPURA merupakan program yang direncanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota dan Kabupaten serta Propinsi untuk meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*). Sasaran dari Program ADIPURA adalah

terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan lingkungan yang baik (*good environment*).

Program Adipura diberlakukan bagi kota-kota dengan jumlah penduduk sama dengan atau lebih dari 20.000 jiwa di wilayah kabupaten/kota. Peserta Program Adipura dikelompokkan berdasarkan kategori :

- Kota metropolitan dengan jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 – 1.000.000 jiwa
- Kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 – 500.000 jiwa
- Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 – 100.000 jiwa

Penghargaan Adipura diberikan dalam bentuk :

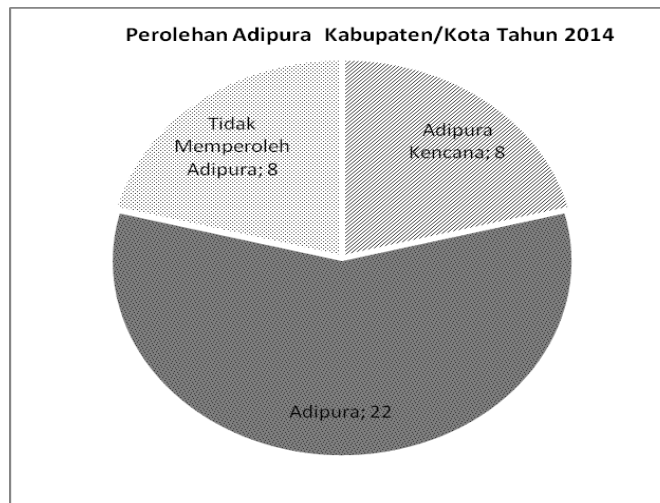
- Anugerah adipura yang terdiri atas :
 1. Adipura kencana; dan
 2. Adipura
- Piagam adipura
- Plakat adipur

Kriteria penilaian saat ini lebih diperketat lagi dengan bertambahnya indikator penilaian, tidak hanya masalah sampah saja, tapi juga air, udara, dan ruang terbuka hijau. Pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura meliputi penilaian non fisik dan pemantauan fisik. Secara garis besar penilaian non fisik dan pemantauan fisik tersebut dilakukan terhadap :

1. Pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
2. Pengendalian pencemaran

Melalui kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten/Kota selama tahun 2013-2014 diperoleh 8 Kabupaten /Kota yang mendapatkan penghargaan **Adipura Kencana** dan 22 Kabupaten/Kota yang mendapat **Adipura**. Jumlah penghargaan ini merupakan yang tertinggi diperoleh diantara seluruh provinsi di Indonesia.

Gambar 4.8.1.5
Perolehan Adipura Kab/Kota tahun 2014



Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

- ***Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kelembagaan***

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah Provinsi yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di daerah Kabupaten/Kota terutama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan pengawasan, jenis pelayanan bidang lingkungan hidup daerah Provinsi lebih ditekankan pada penyampaian informasi antara lain informasi status mutu air; status mutu udara ambien dan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tahun 2014 jumlah **sumber air yang dipantau** kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya sejumlah 5 (**lima**) **sumber air** dan jumlah sumber air yang telah ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi Provinsi adalah sejumlah 5 (lima) Sumber Air. Jumlah Kab./Kota **yang dipantau kualitas udara ambiennya** dilokasi/kawasan padat lalulintas, kawasan permukiman dan kawasan industri diinformasikan status mutu udara ambiennya **sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota** dan jumlah Kab./Kota yang ada

di wilayah Provinsi sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota. **Tahun 2014** Jumlah **pengaduan masyarakat** akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang **ditindak lanjuti** dan Jumlah pengaduan yang diterima instansi LH provinsi dalam setahun yang akan diinformasikan sebanyak **49 (empat puluh sembilan)** pengaduan.

Dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan lingkungan hidup pemerintah provinsi Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan bentuk kelembagaan instansi lingkungan hidup di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2014 ada 1 peningkatan bentuk instansi dari Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup di Kota Blitar. Hingga akhir tahun 2014 masih ada 11 instansi lingkungan hidup yang masih berbentuk kantor.

- ***Garda Lingkungan***

Dalam peningkatan peran masyarakat dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan sumberdaya manusia dalam pengawasan lingkungan pada tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah mendidik 40 orang sebagai Garda Lingkungan yang berada di sekitar Kali Surabaya dan DAS Brantas. Peran Garda Lingkungan nantinya akan mendukung kegiatan dalam pengawasan lingkungan khususnya dari tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Program Adipura masih dirasa belum efektif dalam rangka mewujudkan Kota Bersih dan Hijau, karena sering ditemukan baik pada saat penilaian saja.
- Masih sedikitnya peran aktif masyarakat yang berperan dalam penegakan hukum lingkungan khususnya apabila kasus masuk di pengadilan

- Rendahnya penegakan hukum berupa pemberian sanksi terhadap perusahaan/industry yang membuang limbahnya tidak sesuai dengan baku mutu *effluent* yang telah ditetapkan

Upaya Pemecahannya

- Meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan sarana dan prasarana kebersihan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang lingkungan hidup dan hukum lingkungan
- Perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan/industry yang membuang effluent limbah tidak sesuai bakumutu limbah yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.8.1.17
Perolehan Penghargaan Adipura Kabupaten/Kota
di Jawa Timur Tahun 2014

Adipura Kencana		Adipura	
Kota Metropolitan	1	Kota Metropolitan	-
Kota Besar	1	Kota Besar	-
Kota Sedang	4	Kota Sedang	7
Kota Kecil	2	Kota Kecil	15
TOTAL	8	TOTAL	22

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

Tabel 4.8.1.18
Perolehan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2014

Penghargaan	Jumlah Sekolah
Adiwiyata Mandiri	19
Adiwiyata/Adiwiyata Nasional	69
Adiwiyata Provinsi	117

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur tahun 2015

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

11.1. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TIMUR

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur dengan Indeks Pembangunan *Gender* (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- 2) Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak;

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu sebesar Rp. 2.276.728.500,00 terealisasi sebesar Rp. 2.265.331.310,00 dengan capaian 99,50%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program)

- Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 66,24 dan Realisasinya sebesar 66,56 atau naik sebesar 0,95. Pada tahun 2013 ditargetkan 67,00 dan realisasinya 67,85 atau naik sebesar 1,29 Sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 67,78 dan estimasi realisasinya sebesar 68,53 sehingga capaiannya adalah 101,11 persen.
- Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 68,85 dan realisasinya sebesar 69,29. Dan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar

69.50 dan realisasinya sebesar 70,77 atau naik 1,48. Sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 70.50 dan estimasi realisasinya sebesar 71,56 sehingga capaiannya adalah 101,50 persen.

Tabel 4.11.1.1
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender dan
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2012-2014

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Target	Realisasi
		2012	2013	2014 *	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66,56	67,85	67.78	68.53 (estimasi sementara)
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,29	70,77	70.50	71.56 (estimasi sementara)

Sumber : Tahun 2012-2013 dari BPS Prov. Jawa Timur

Ket : *) Tahun 2014 dari BPPKB Prov. Jawa Timur

Kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut adalah :

1. Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender antara lain melaksanakan :
 - Workshop Pengelolaan Data Terpilah Gender dan Anak;
 - Penyusunan Buku Profil Anak, Buku Statistik Gender dan Buku Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender.
2. Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA) anatara lain melaksanakan :
 - Pemantapan Strategi Percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi SDM Penggerak PUG Kab/Kota se Jawa Timur;
 - Fasilitasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
 - Fasilitasi/Sosialisasi Bina Keluarga Setara;
 - Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

c) **Permasalahan dan Upaya Pemecahan :**

Permasalahan :

- Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama perihal belum seluruh para pimpinan pengambil kebijakan berkomitmen untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender dan anak kedalam dokumen pelaksanaan pembangunan daerah.
- Belum optimalnya SDM Pengelolaan Data Terpilah Gender dan anak Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan dan Sistematis dan Berkala.

Upaya Pemecahan masalah :

- Provinsi melakukan pendampingan pada Kabupaten/Kota dalam penyusunan program kegiatan pembangunan yang responsif gender, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi .
- Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Data Terpilah Gender dan Anak di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

d) **Penghargaan Nasional**

Untuk penghargaan tingkat Nasional pada Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA** bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dari Presiden RI yang ke-9 (sembilan) kalinya dengan Kategori **MENTOR**.

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 5.916.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.446.329.977,00 atau 92,05%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matriks 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Capaian Indikator Kinerja Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT dan Trafiking Yang Ditangani dan Diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Jatim Sedangkan pada tahun 2012 tercapai sebanyak 357 orang dari target sebanyak 360 orang. Dan turun sebesar 0,6 persen dibanding capaian tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013 tercapai sebanyak 399 orang dari target 400 orang naik sebesar 11,76 persen dibanding tahun 2012. Capaian pada tahun 2014 sebanyak 349 orang atau turun 12,53 persen dari capaian tahun 2013.

Tabel 4.11.1.2

Capaian Kinerja Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT dan Trafiking Yang Ditangani dan Diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014

No	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	
		Capaian	Capaian	target	capaian
1	Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT dan Trafiking Yang Ditangani dan Diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Jatim	357	399	350	349

*Sumber Data : Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Prov Jatim
(Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur)*

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh PPT Provinsi Jawa Timur dari sisi kuantitas menunjukkan penurunan, hal ini tidak dapat dijadikan ukuran menurunnya tingkat pelayanan yang dilakukan oleh PPT Provinsi Jawa Timur, namun ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan jumlah kasus korban kekerasan yang ditangani oleh PPT Provinsi Jawa Timur, yaitu :

- Tingkat kesadaran masyarakat makin tinggi dengan adanya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang

Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pornografi secara rutin oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur.

Masih banyaknya kasus korban kekerasan yang tidak dilaporkan oleh para korban, disebabkan karena malu dan tidak adanya keberanian bagi korban untuk melaporkan.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui :

- ❖ Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang dengan melaksanakan :
 - Menyusun Perda Perlindungan Anak sebagai payung hukum terhadap perlindungan anak;
 - Sosialisasi Berbagai produk Hukum tentang Perlindungan Anak, KDRT, TPPO dan Pornografi.
 - Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Kab/Kota Layak Anak di Prov. Jatim;
- ❖ Pelaksanaan Forum Anak dan Lokakarya Pengukuran Capaian Indikator Kota Layak Anak antara lain melaksanakan :
 - Pemilihan Delegasi Forum Anak Jatim yang akan mengikuti Forum Anak Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas, peran (partisipasi) dan perlindungan anak;
 - Meningkatkan kapasitas Tim Fasilitator Kab/Kota Layak Anak dalam memfasilitasi pengembangan KLA di Kab/Kota.
 - Kegiatan Fasilitasi Peningkatan peran Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan;

- Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kepala Keluarga dan Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam mengelola usaha;
- Sosialisasi Pemahaman Pentingnya Air Susu Ibu (ASI);
- Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI);
- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur sudah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, namun belum semuanya berfungsi secara optimal. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya fungsi PPT di Kabupaten/Kota adalah : (1) Masih minimnya sarana dan prasarana pelayanan korban, (2) SDM pengelola PPT banyak yang belum dilatih, (3) Masih minimnya alokasi anggaran terhadap penanganan kasus kekerasan di Kabupaten/Kota;
- Banyaknya materi-materi bermuatan pornografi yang membawa dampak buruk bagi masyarakat terutama generasi muda sehingga berpotensi terjadinya kekerasan seksual dan dekadensi moral di masyarakat;
- Belum maksimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender dari fungsi reproduksi (maternal) mengakibatkan perempuan bekerja mengalami kesulitan dalam pemberian ASI;
- Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang;

- Kurangnya komitmen dan pemahaman dari Kab/Kota tentang hak-hak anak ataupun Konvensi Hak Anak (KHA) serta pembentukan forum anak di tingkat Kab/Kota;
- Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di daerah belum maksimal karena kondisi dan lingkungan pada masing-masing daerah tidak sama;
- Masih kurangnya ketrampilan perempuan dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif ketrampilan;
- Masih kurangnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan.

Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, KDRT, TPPO dan Pornografi secara rutin;
- Memberikan advokasi kepada pengelola PPT di Kabupaten/Kota;
- Memberikan pelatihan kepada SDM pengelola PPT;
- Menginformasikan kepada dunia usaha, tempat kerja, fasilitas/sarana umum tentang pentingnya manfaat Air Susu Ibu (ASI) dan guna menyediakan tempat/ruang khusus untuk menyusui/memerah serta menyimpan ASI;
- Melakukan koordinasi secara intens terhadap instansi lintas sektor melalui implementasi program yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah yang ada dalam Gugus Tugas Trafficking dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA);
- Bersama-sama dengan Swadaya Masyarakat melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekolah baik di tingkat SMU dan SLTP dan juga melakukan advokasi/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- Melakukan koordinasi secara intens terhadap instansi lintas sektor melalui Gugus Tugas Kab/Kota Layak Anak (KLA);

- Melakukan sosialisasi kepada Kab/Kota tentang kab/Kota Layak Anak (KLA);
- Mengkoordinasikan semua unsur sehingga dapat tertampung dan terkondisi untuk keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) pada tahun-tahun mendatang;
- Memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, kecakapan dan perempuan dalam meningkatkan usahanya;
- Mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di daerah yang didukung oleh Badan/Dinas/Instansi terkait.

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

a. Sasaran

- Pelayanan Keluarga Berencana yang Responsif Gender dengan indikator kinerja Persentase Pasangan Usia Subur yang Mengikuti Program KB di BPPKB.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Keluarga Berencana

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu sebesar Rp. 2.232.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.965.473.320,00 dengan capaian 88,04%. pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matriks 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Tabel 4.11.1.3

Capaian Kinerja persentase pasangan usia subur yang mengikuti program KB di BPPKB tahun 2012-2014

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		CAPAIAN TAHUN 2014	
	Tahun 2014	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	(%)
3	4	8	9	10	11
1 Persentase Pasangan Usia Subur yang Mengikuti Program KB di BPPKB	0,016% 1.279 Akseptor	0,052 % (4.258 Akseptor)	0,016 % (735 Akseptor)	0.013% (1031 Akseptor)	$= \frac{0.013\%}{0,016 \%} \times 100\%$ $= 81.25\%$

Sumber Data : Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Prov Jatim dan BKKBN perwakilan Jawa Timur

- capaian indikator persentase pasangan usia subur yang mengikuti program KB di BPPKB Pada Tahun 2012 dengan target 0.053 % atau 4.258 akseptor KB terhadap 8.065.835 PUS capaiannya 100% atau 4.258 akseptor terlayani semua, alasannya karena

banyaknya permintaan dari Kab/Kota dan meningkatnya jumlah pasangan usia subur pada setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh PUS lebih memahami informasi tentang kontrasepsi jangka pendek (Pil, Suntik, dan kondom). Pada Tahun 2013 untuk program KB karena ada perubahan kebijakan dari Pusat, Provinsi hingga Daerah untuk menggalakkan program metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOP, MOW dan Implant) yang lebih efektif dan efisien baik untuk umum maupun KB pasca persalinan, Sehingga 735 akseptor KB yang terlayani adalah akseptor KB peserta MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yaitu menjadi 0,01 % atau 735 akseptor KB terhadap 8.065.835 PUS. Dari target tersebut terealisasi atau pencapaian kinerja sebesar 100 % atau 735 Akseptor. Pada Tahun 2014 pencapaian akseptor meningkat dari 735 akseptor (2013) menjadi 1031 akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) pada tahun 2014 atau 0,013% terhadap 7.999.479 PUS. Namun jika dipandang dari target *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* yang sudah ditentukan 0,016% maka pencapaiannya 81,25 % (Kategori : Baik)

Kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana adalah :

- ❖ Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan program KB dan Kesehatan reproduksi yang berkualitas antara lain melaksanakan :
 - Lomba Simulasi KB Responsif Gender
 - Orientasi Konseling KB dengan menggunakan Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK) bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)
 - Orientasi Reproduksi *Health Cost* Bagi SKPD KB Kab/Kota
 - Penyusunan Pergub Keluarga Berencana

- ❖ Kegiatan Sosialisasi dan fasilitasi tentang program Keluarga Berencana dengan melaksanakan:
 - Sosialisasi Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan untuk Pondok Pesantren;
 - Lomba KB Award.

c) Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- KIE KB dengan metode Simulasi KB Responsif Gender belum memasyarakat.
- PLKB dan PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) belum seluruhnya memahami cara penapisan atau menyaring calon AKseptor KB dalam pemanfaatan alat kontrasepsi dan Obat (ALOKON) KB yang sesuai dengan kondisi fisik kesehatan masing-masing calon akseptor.
- Masih adanya PUS yang menikah dibawah usia 19 tahun dan masih adanya Pasangan usia subur yang ingin menunda kehamilan/untuk tidak hamil lagi tetapi tidak menggunakan alat/obat kontrasepsi (*unmetneed*).
- Masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang (Non MKJP)
- Dengan bebasnya arus informasi global yang masuk baik yang positif maupun yang negatif mempengaruhi perilaku kehidupan dan pergaulan antar remaja, sehingga penyebaran IMS dan Penyalahgunaan Narkoba semakin tidak terkontrol.
- Masih tingginya angka perkawinan usia dini (rata-rata 18,9 tahun) di Jawa Timur karena stigma negatif di Masyarakat bahwa bila anak perempuan terlambat menikah menjadi aib keluarga.

Upaya Pemecahan Masalah

- Membentuk Kelompok-kelompok permainan Simulasi KB Responsif Gender pada Tenaga PLKB, PPKBD, kader PKK,

Kelompok Dasa Wisma dan Kader Posyandu Kab/kota dengan hasil Meningkatnya Kreatifitas dan kompetensi Tenaga PLKB, PPKBD, kader PKK, Kelompok Dasa Wisma dan Kader Posyandu di 38 Kab/Kota se Jawa Timur.

- Memberikan Pelatihan atau meningkatkan SDM PLKB dan PPKBD dalam memberikan Pelayanan dan penyuluhan kepada Masyarakat.
- Memberikan pemahaman cara penghitungan besaran anggaran antara jumlah penduduk, Pasangan Usia Subur (PUS) dengan target penurunan TFR, LPP, AKI dan AKB yang diinginkan.
- Gerakan untuk membentuk keluarga kecil yang sehat dan sejahtera dengan mengendalikan kelahiran dan perencanaan jumlah keluarga dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi Jangka panjang yang efektif dan efisien seperti implant, IUD, MOP, MOW dan sebagainya.
- Memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa Pernikahan di usia dini (sebelum usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria) akan memberikan beberapa dampak negative diantaranya belum matang secara fisik, psykis, kurang menguasai emosi belum memiliki kemampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga yang di bentuk.

13. URUSAN SOSIAL

Urusan wajib pembangunan bidang Sosial merupakan urusan pembangunan yang harus disediakan pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan pada masyarakat khususnya dalam pencapaian taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Urusan wajib tersebut pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terdiri dari berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial seperti Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Perlindungan Sosial, Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti.

13.1. DINAS SOSIAL

a. Sasaran Tahun 2014

Adapun sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2009 s/d Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 3) Optimalnya pemanfaatan sumber pelayanan kesejahteraan sosial melalui penguatan jaringan kerja
- 4) Meningkatnya intensitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanaman nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2014 didukung anggaran sebesar Rp. 1.217.560.000,00

terrealisasi sebesar 92,24% atau Rp. 1.123.052.927,00 pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Penyelenggaraan Kegiatan pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial tahun 2014 difokuskan pada upaya penggalian pendayagunaan, dan pengembangan potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial, yang berasal dari kalangan masyarakat. Tahun 2014 penguatan jaringan pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) menjangkau 10 WKSBM yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. WKSBM yang mendapatkan penanganan mulai tahun 2012 menjangkau 10 WKSBM, tahun 2013 sebanyak 10 WKSBM dan tahun 2014 menjangkau sebanyak 10 WKSBM, secara kuantitas tidak mengalami kenaikan namun secara kualitas mengalami kenaikan terutama dalam hal pelayanan sosial yang diberikan.

Sedangkan terkait dengan pembinaan organisasi sosial juga telah mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bergerak di bidang panti asuhan anak, panti lanjut usia maupun pemberdayaan masyarakat, yang penanganannya dilakukan dengan memberikan pelatihan, agar dapat meningkatkan pelayanannya pada PMKS. Untuk Pembinaan TKSK sampai dengan tahun 2014 dapat mencapai 654 TKSK atau dapat menjangkau di seluruh Kecamatan di Jawa Timur. Secara fungsional seluruh TKSK aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya. Selanjutnya Pembinaan PSM tahun 2014 dalam hal teknis pendampingan juga telah dilaksanakan melalui pemantapan dan kegiatan pelatihan pendampingan bagi 75 PSM sehingga mereka dapat secara aktif

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 yaitu sejumlah 40 PSM.

Kegiatan pembinaan Karang taruna mengalami kenaikan karena di tahun 2012 sebanyak 20 KT, sampai dengan sedangkan tahun 2013 berjumlah 30 KT, dan hingga tahun 2014 telah membina sebanyak 40 Karang Taruna. Begitupula dengan Dunia Usaha Peduli Sosial yang telah memberikan kontribusi dalam pelayanan PMKS dan bantuan sosial lainnya serta telah melaksanakan CSR dengan baik di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ada 15 perusahaan. Tahun 2014 Perusahaan yang secara aktif melakukan CSR bidang kesejahteraan sosial sebanyak 43 perusahaan. Untuk Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan telah dilaksanakan sesuai dengan target program yang telah ditetapkan sehingga capaian program mencapai 100% yang diarahkan untuk pemeliharaan TMP 10 Nopember Surabaya. Kegiatan Penghargaan Bagi Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Pejuang telah menjangkau bagi 60 orang Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang. Sedangkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pada tahun 2014 ini telah mencapai sebanyak 1.325 orang generasi muda.

Adapun jumlah pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13.1.1
Perkembangan Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

No	Kegiatan	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	orsos	10	10	10
2	Pembinaan Organisasi Sosial	orsos	19	30	30
3	Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jiwa	74	74	75

No	Kegiatan	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
4	Pemberdayaan Karang Taruna	KT	20	30	10
5	Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Jiwa	1.320	1.320	1.325
6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	lokasi	1	1	1
7	Pengembangan Kerjasama Dunia Usaha Peduli Sosial	Perusa Haan	15	25	15
8	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jiwa	654	654	654
9	Penghargaan Bagi Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Pejuang	Jiwa	87	87	60

Sumber data : Dinsos Prov. Jatim 2014

Capaian fungsional Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut: Secara keseluruhan WKSBM, Karang Taruna, Organisasi Sosial sangat aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan beberapa kegiatan pelayanan sosial yang dilaksanakan di tahun 2014 melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maupun pendataan PMKS serta pendampingan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).

Kegiatan optimalisasi kelembagaan WKSBM dalam pelayanan kesejahteraan sosial diarahkan kepada masyarakat lokal yang berada di akar rumput, sedangkan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Organisasi Sosial difokuskan pada bimbingan pelayanan dan penyampaian informasi tentang program kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur agar dapat diakses dan diterima oleh masyarakat, serta berkembangnya sarana prasarana dan sistem pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilaksanakan organisasi sosial di masyarakat.

Kegiatan Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dilaksanakan agar masyarakat mengetahui dan memahami pola penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayahnya yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong masyarakat ikut serta dalam proses pelayanan kesejahteraan sosial serta mendorong semangat pengabdian Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di masyarakat.

Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial menjadikan Generasi muda mampu memahami informasi nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sehingga mengarah pada pembentukan karakter inovatif dan kreatif serta nilai-nilai pantang menyerah.

Selanjutnya untuk kegiatan penyelenggaraan dunia usaha akan mampu mendorong keikutsertaan dunia usaha dalam program CSR yang akan memberi kontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di masyarakat. Penghargaan bagi pahlawan dan perintis kemerdekaan diharapkan mampu memberikan kontribusi pada mereka agar turut merasakan hasil pembangunan serta memperoleh bantuan bagi perintis kemerdekaan dan pahlawan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Kurangnya pembinaan lanjut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait dengan keberadaan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai pilar partisipan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- Sebagian besar kelembagaan dalam menjalankan fungsinya kurang didukung dana operasional.

Upaya Pemecahan Permasalahan

- Meningkatkan peran Dinas Sosial Kab./Kota dalam menindak lanjuti keberadaan lembaga kesejahteraan sosial untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial di daerah melalui sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial.
- Mendorong Pemerintah Daerah dan keswadayaan masyarakat dalam mendukung operasional kelembagaan kesejahteraan sosial di masyarakat.

2) Program Pemberdayaan Sosial

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pemberdayaan Sosial dengan pagu sebesar Rp. 3.200.000.000,00 terealisasi sebesar 84,99% atau Rp. 2.719.831.000,00 pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Kinerja Program Pemberdayaan Sosial diarahkan untuk memberi Kontribusi dalam mencegah, menekan dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan dan penghidupannya melalui upaya penggalan potensi diri dan lingkungannya, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Adapun Hasil Pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial tahun 2014 yang diindikasikan dengan meningkatnya kesejahteraan baik secara ekonomi dan sosial serta semakin meningkatnya keberfungsian sosial bagi keluarga Fakir Miskin, yang mencapai 1.200 KK. Pemberdayaan Keluarga Rentan menjangkau 90 jiwa, sedangkan Wanita Rawan Sosial Ekonomi dengan kegiatan pembentukan KUBE maupun kegiatan pemberdayaan sosial lainnya mencapai 49 jiwa. Selanjutnya

warga di daerah terpencil dan tertinggal mendapatkan bantuan KUBE maupun kegiatan rehabilitasi rumah, sehingga kelompok sasaran program pemberdayaan sosial ini menjadi berdaya dan mampu berperan serta berpartisipasi aktif di masyarakat mencapai 230 KK.

Adapun secara kuantitas program Pemberdayaan Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13.1.2
Perkembangan Pemberdayaan Sosial

No	Kegiatan	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Pemberdayaan fakir miskin	Jiwa/KK	1200	2000	1.200
2	Pemberdayaan Keluarga Rentan	Jiwa	40	40	90
3	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	75	82	49
4	Pemberdayaan Pembangunan Daerah Terpencil dan Tertinggal (P2DT2)	Jiwa	120	120	230

Sumber data : Dinsos Prov. Jatim 2014

Adapun capaian fungsional pemberdayaan sosial sebagai berikut : Kegiatan pemberdayaan fakir miskin diharapkan dapat meningkatkan peluang dan kesempatan usaha ekonomis produktif melalui KUBE. Program pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE pada tahun 2014 telah dibentuk di 10 Kabupaten. Dengan adanya KUBE ini, keluarga fakir miskin diharapkan mempunyai pekerjaan tetap sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan modal dan menabung serta mampu berfungsi sosial dengan baik.

Kegiatan pemberdayaan keluarga rentan mendapatkan bimbingan dan ketrampilan serta bantuan sosial sehingga secara fungsi sosial dan kesejahteraan mereka meningkat.

Kegiatan pemberdayaan bagi Wanita rawan sosial ekonomi melalui KUBE telah menjangkau sebanyak 49 orang. Dampak yang muncul dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha bagi WRSE agar mampu menopang kekuatan ekonomi keluarga serta mengantisipasi dampak masalah sosial lainnya. Hal ini menunjukkan trend positif dari program penanganan kemiskinan.

Sedangkan kegiatan P2DT2 merupakan kegiatan yang membantu terpenuhinya kebutuhan dasar serta memudahkan para warga komunitas tertinggal memperoleh aksesibilitas pelayanan sosial dasar meskipun di daerah terpencil dan tertinggal. Selanjutnya Bagi keluarga rentan juga diberikan program pemberdayaan bagi keluarga rentan melalui KUBE dengan jumlah peserta 90 KK.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Jangkauan penanganan keluarga miskin masih belum memenuhi capaian target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial. Hal ini disebabkan masih tingginya jumlah keluarga miskin dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang disediakan pemerintah.

Secara teknis pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) memang memberikan tambahan aset bagi keluarga miskin dan bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, akan tetapi bantuan berupa ternak dan budidaya ikan air tawar sangat rentan terhadap iklim dan penyakit.

Upaya Pemecahan Masalah

- Optimalisasi Bimbingan Teknis terkait dengan budi daya ternak
- Peningkatan kualitas pendampingan

- Memperbaiki sistem droping bantuan terutama timing penyaluran
- bantuan dengan iklim yang terjadi.

3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan pagu sebesar Rp. 3.513.000.000,00 terealisasi sebesar 98,63% atau Rp. 3.464.712.700,00 pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial diarahkan pada penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan hasil pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.13.1.3
Perkembangan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

No	Kegiatan	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Deteksi Dini Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat	Jiwa	134	134	134
2	Pelayanan Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	225	225	150
3	Pelayanan anak terlantar	Jiwa	40	20	12
4	Pembinaan anak jalanan	Jiwa	150	120	65
5	Penanganan HIV/AIDS	Jiwa	50	65	65
6	Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/Korban NAPZA	Jiwa	60	20	20
7	Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	Jiwa	30	15	15

No	Kegiatan	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
8	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, eks gelandangan psikotik	Jiwa	280	120	150
9	Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Kusta	Jiwa	225	225	150
10	Rehabilitasi Sosial eks tuna susila dan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)	Jiwa	30	60	50
11	Anak Berhadapan dengan Hukum	jiwa	10	10	10

Sumber: Dinsos Prov. Jatim 2014

Capaian fungsional Kegiatan deteksi dini merupakan kegiatan pelayanan sosial yang memberikan informasi tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat mencapai 120 jiwa. Sedangkan pelayanan bagi lanjut usia terlantar melalui upaya pemberian bantuan berupa bahan makanan bagi lanjut usia

sehingga kebutuhan dasar lansia terpenuhi sesuai amanat pemerintah mencapai 60 jiwa. Pelayanan anak terlantar dengan memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga secara fisik terjamin dan terlindungi, biopsikososial serta mendapat ketrampilan otomotif dan bantuan Usaha Ekonomis Produktif kepada 12 anak terlantar ditahun 2014.

Sedangkan pembinaan anak jalanan adalah sebagai upaya untuk menjadikan anak jalanan bisa kembali ke rumah dan tidak hidup di jalanan dengan memenuhi kebutuhan dasar anak serta memberikan ketrampilan produktif agar anak jalanan memiliki kegiatan yang produktif yang menjadikan mereka mandiri sebanyak 65 jiwa.

Kegiatan pencegahan HIV/AIDS sebagai upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HIV AIDS sehingga mampu mencegah penyebaran HIV/AIDS mencapai 65 jiwa.

Kegiatan rehabilitas sosial bagi anak nakal/korban NAPZA dengan memberikan ketrampilan, konsultasi serta meningkatnya pemahaman bahaya penyalahgunaan NAPZA bagi 20 jiwa korban.

Dengan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks warga binaan maka perubahan perilaku warga eks warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan norma kemasyarakatan serta meningkatnya kemampuan dan potensi ketrampilan serta kepercayaan dirinya bagi 15 orang eks warga binaan pemasyarakatan.

Kegiatan Rehabilitasi sosial gelandangan pengemis dan eks psikotik dilakukan dengan memberikan ketrampilan sesuai bakat dan minat serta potensi sehingga dapat meningkatkan penghasilan serta bantuan sosial yang diperoleh agar mampu mandiri serta bersosialisasi dengan masyarakat mencapai 150 jiwa.

Selanjutnya kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan ekonomi penyandang cacat dan kusta serta meningkatkan kepercayaan diri dalam bersosialisasi dengan masyarakat mencapai 150 jiwa. Kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks tuna susila serta ESKA ditujukan untuk meningkatkan perilaku sosial yang normative serta meningkatnya motivasi diri dan ketrampilan pengganti dari profesi sebelumnya mencapai 50 jiwa.

Kegiatan Perlindungan Sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, yang beranggotakan Instansi terkait baik Pemerintah maupun lembaga antara lain

BPPKB, Kepolisian, Kumham, LPA, Pengadilan Tinggi, Bapas, Kemenag, Embun, LP2A, Tesa, Hotline SCCC dan telah dapat menjangkau terhadap 10 ABH untuk mendapatkan perlindungan sosial.

Rehabilitasi sosial bagi eks tuna susila, rehabilitasi sosial gelandangan dan eks psikotik serta pengemis, pembinaan anak jalanan Pelayanan lansia terlantar jalanan mengalami peningkatan sasaran hal ini dikarenakan munculnya program Gubernur Jawa Timur yaitu Program Percepatan Penanganan 5 PMKS Jalanan dalam bentuk *sheltered* dan *need assessment* serta pemberian bantuan KUBE serta pemulangan ke daerah asal, sedangkan Rehabilitasi sosial cacat disinergikan dalam bentuk kegiatan pemberian alat bantu dan program KUBE. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring di lapangan diperoleh gambaran capaian fungsional program/kegiatan tahun 2014 sebagai berikut:

- Deteksi Dini Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat sebanyak 120 orang penyandang cacat telah dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat;
- Pelayanan terhadap Lanjut Usia Terlantar, sebanyak 60 orang lansia terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik;
- Sebanyak 12 anak terlantar dalam kategori terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosialnya;
- Penanganan terhadap HIV/AIDS, sebanyak 65 orang dengan HIV/AIDS (ODHA) telah memperoleh rehabilitasi dan bimbingan sosial serta terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik;

- Sebanyak 65 anak jalanan telah mendapatkan bimbingan sosial, mental dan ketrampilan sehingga mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya serta berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosialnya;
- Sebanyak 15 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, telah memperoleh bimbingan rehabilitasi, mental dan ketrampilan, sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya serta berkembang dengan baik dalam menjalankan kembali fungsi sosialnya ;
- Penanganan Anak Nakal/Korban NAPZA luar panti melalui pelayanan rehabilitasi, bimbingan sosial, mental dan ketrampilan diperoleh hasil bahwa 20 orang AN/KN terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosialnya;
- Sebanyak 150 orang Gelandangan dan Pengemis serta eks Gelandangan Psikotik dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik;
- Sebanyak 150 orang penyandang cacat kusta mendapatkan bimbingan sosial dan ketrampilan, sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosial;
- Penanganan terhadap 50 eks tuna susila dan Korban Eksploitasi Seksual Anak (ESKA) melalui pemulangan ke daerah asal maupun KUBE.
- Perlindungan Sosial bagi 10 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan kegiatan Perlindungan Sosial.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Implementasi penanganan PMKS jalanan masih terkendala oleh permasalahan belum tersedianya shelter penampungan di daerah.

- Komitmen Kabupaten/Kota dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial belum merata, apalagi ditunjang dengan persoalan bahwa PMKS yang ada, bukan merupakan penduduk setempat. Sehingga Kabupaten/Kota merasa bukan merupakan tanggung jawabnya.
- Belum optimalnya Komite Penanggulangan PMKS yang telah dibentuk.
- Masih relatif tingginya mobilitas PMKS Jalanan (Anak Jalanan, WTS, Gelandangan, Pengemis dan Gelandangan Psikotik)

Upaya pemecahan permasalahan

- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka implementasi program percepatan penanganan PMKS jalanan dengan menjalin kerjasama penanganan PMKS dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- Mendorong Kabupaten/Kota menyediakan Shelter penanganan PMKS jalanan.

4) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 1.225.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.148.680.480,00 (93,77%) pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Bantuan dan Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan modal sosial di masyarakat melalui pembinaan pengumpulan uang dan barang serta pelaksanaan undian gratis berhadiah, memberikan perlindungan sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah, Orang Terlantar, Pekerja Migran bermasalah, penguatan pelaksanaan PKH serta untuk pengembangan Sistem Jaminan Sosial melalui ASKESOS.

Selama dua tahun terakhir perkembangan masyarakat rentan dan kurang beruntung yang mendapatkan bantuan dan perlindungan Sosial berupa Bantuan Tunai Bersyarat dari Kementerian Sosial RI (PKH) tahun 2012 sebanyak 320.468 KSM pada 21 Kabupaten, meningkat tahun 2013 menjadi 515.034 KSM pada 24 Kabupaten.

Sementara itu dari sumber dana APBD mendukung untuk penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Teknis PKH dan Kesekretariatan UPPKH Provinsi pada 21 Kabupaten tahun 2012, 24 Kabupaten pada Tahun 2013 dan telah menjangkau di 38 Kabupaten /Kota di Tahun 2014. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13.1.4
Masyarakat Kurang Beruntung Yang Mendapatkan
Bantuan dan Perlindungan Sosial
Tahun 2012 - 2014

No	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Org/Kab	320.468/21	515.034/24	/38
2	Korban Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah	orang	40	60	50
3	Orang Terlantar	orang	1.825	1.070	775
4	Pekerja Migran Terlantar	orang	38	20	20

Sumber: Dinsos Prov. Jatim 2014

Adapun capaian fungsional pelaksanaan Program Bantuan dan Perlindungan Sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan secara fisik, sosial maupun psikologis kepada anak, wanita maupun lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan. Pekerja migran yang terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga bermasalahan sosial budaya, keluarga cerai miskin, serta keluarga di lingkungan sosial yang tidak

menguntungkan dengan memprioritaskan kepada keluarga yang mempunyai masalah ganda, Korban Bencana, Orang Terlantar.

Beberapa kegiatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung telah dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2014 penanganan Korban Tindak kekerasan dan Perlakuan Salah melalui kegiatan advokasi litigasi dan non litigasi sosial telah dilaksanakan pada 50 orang yang mengalami kekerasan dan perlakuan salah baik anak-anak maupun perempuan. Model Pendampingan langsung kepada korban dalam bentuk kegiatan psikososial ataupun trauma healing merupakan kegiatan pokok bagi korban yang umumnya dialami perempuan dan anak. Kegiatan advokasi litigasi bekerjasama dengan LBH guna mendampingi korban saat proses pengadilan berlangsung.
- Penanganan Orang Terlantar dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Reunifikasi dan reintegrasi (pemulangan dan pengembalian ke keluarga asal) yang dilaksanakan langsung kepada orang terlantar yang membutuhkan proses pemulangan ke tempat asal sejumlah 775 orang.
- Penguatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional juga mengalami peningkatan dari segi kuantitas dimana pada tahun 2014 ini menjangkau sebanyak RTSM di 38 Kabupaten/Kota. Sasaran PKH diberikan kepada keluarga muda yang tidak mampu dimana mereka memiliki anak usia sekolah dasar dan hamil yang perlu mendapatkan bantuan langsung untuk menjamin kelangsungan pendidikan dan kesehatan. Bagi penerima program juga diberikan pendampingan dalam rangka memperkuat komitmen kesejahteraan bagi anak-anak mereka.

- Sedangkan penanganan Pekerja Migran di tahun 2014 meliputi kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran sejumlah 20 jiwa. Program kegiatan mempunyai kontribusi terhadap penurunan pengangguran terbuka.
- Kegiatan Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang dilaksanakan oleh badan usaha dan Organisasi Sosial dilakukan sebagai upaya pemupukan modal sosial di masyarakat. Melalui kegiatan ini dapat dicapai peningkatan pendayagunaan sumber dana sosial melalui UGB dan PUB.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Masyarakat dan korban masih menganggap tabu jika harus membuka informasi terhadap kasus yang dialami kepada pihak lain khususnya kasus tindak kekerasan dan perlakuan salah yang dialaminya.
- Secara kuantitas dan kualitas belum tersedia Rumah Perlindungan Sosial Trauma Center di Kabupaten/Kota untuk perlindungan Korban Tindak Kekerasan
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program ASKESOS, hal ini berpengaruh pada belum optimalnya jangkauan
- Masih sering dijumpai di masyarakat melaksanakan pengumpulan uang dan barang untuk kegiatan keagamaan belum memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang

Upaya pemecahan permasalahan

- Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan peran RPTC di daerah dalam memberikan pelayanan terhadap Korban Tindak Kekerasan
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas akan pentingnya program pelayanan ASKESOS sebagai bentuk jaminan diri dan keluarga.

- Melakukan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota terkait dengan penertiban pelaksanaan pengumpulan Sumbangan.

5) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program ini di dukung anggaran sebesar Rp. 3.140.000.000,00 dengan ralisasi Rp. 3.114.256.225,00 (99,18%), pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah diperolehnya pengetahuan dan ketrampilan penanggulangan bencana serta dalam rangka meminimalisir korban bencana alam. Capaian pelaksanaan program ini secara rinci sebagai berikut :

Tabel 4.13.1.5
Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
Tahun 2012 – 2014

No	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana	Orang/ Kab	140/2	1.719/38	1.600/38
2	Mitigasi Penanggulangan Bencana	orang	280	280	360
3	Pemulihan Sosial eks Korban Bencana	Orang	112	60	60
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Bencana dan Logistik	Orang/ Kab	134/38	134/38	134/38

Sumber: Dinsos Prov. Jatim 2014

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat ditujukan dalam rangka meminimalisir terjadinya korban ketika terjadi bencana alam maupun sosial. Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan program penanggulangan bencana berbasis

masyarakat telah dilaksanakan, yaitu seperti Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana, Mitigasi Penanggulangan Berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dan Sosial, Pemulihan Sosial eks Korban bencana Alam dan Sosial. Selain itu juga didukung dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelola Bencana dan Logistik yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat diutamakan bagi daerah-daerah rawan bencana alam dan sosial di Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan program ini diarahkan dalam menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran pada Taruna Penanggulangan Bencana (TAGANA) sebanyak 1.600 orang, dengan prioritas utama di daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur.

Secara fungsional jumlah Taruna Siaga Bencana di Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan Dinas Sosial Provinsi adalah sejumlah 1.719 orang. TAGANA sangat aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana adalah 1.600 orang sedangkan yang kurang aktif sejumlah 119 orang.

Selanjutnya kegiatan Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana dilaksanakan di 38 Kabupaten/Kota dengan peserta kegiatan sebanyak 1.600 orang. Kegiatan ini ditujukan agar masyarakat di daerah rawan bencana terlatih dan siap siaga jika terjadi bencana. Kegiatan berupa kampung siaga bencana (KSB) serta peningkatan kesiapsiagaan bagi

petugas juga merupakan bagian dari kegiatan ini. Latihan mitigasi bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana dengan pemberian lauk-pauk dan family kit bagi 360 orang sedangkan pemulihan eks korban bencana sejumlah 60 orang. Adapun

peningkatan kapasitas pengelola lembaga kebencanaan melalui KSB dan logistik juga dilaksanakan di 38 kabupaten/Kota.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Permasalahan

Permasalahan

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun sosial.

Upaya Pemecahan Permasalahan

Melakukan sosialisasi dan koordinasi secara intensif dengan tujuan agar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana selalu siap dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana yang tidak diharapkan.

6) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program ini di dukung anggaran sebesar Rp. 3.258.040.000,00 dengan realisasi Rp. 2.879.533.095,00 (88,38%) pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Pelaksanaan program pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat, meningkatkan profesionalisme pilar-pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial serta memberi penguatan pada para eks klien juga peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur. Selama dua tahun terakhir pengembangan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13.1.6
Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
Tahun 2012 – 2014

No	Komponen	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Pendataan PMKS dan PSKS	Kab/Kota	-	1	38
2	Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota	38	38	38
3	Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota	38	38	38
4	Pengembangan Eks Klien	Orang	70	40	60
5	Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota	30	20	8
6	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM Kesos dan Fungsional UPT PTKS Malang	orang	543	203	150

Sumber: Dinsos Prov. Jatim 2014

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat, meningkatkan profesionalisme pilar-pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial serta memberi penguatan pada para eks klien juga peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur. Oleh karena itu mengingat pentingnya program tersebut serta untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan kesejahteraan sosial, maka pengembangan usaha kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun dilakukan secara konsisten dengan melibatkan *stakeholder* terkait baik yang ada di tingkat Kabupaten maupun Provinsi bahkan dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. Selama 3 (tiga) tahun terakhir ini proses perencanaan dan evaluasi telah melibatkan seluruh instansi sosial

di 38 Kabupaten/Kota atau 100%; Penyuluhan Program Kesejahteraan Sosial telah menjangkau 8 lokasi; sedangkan pengembangan eks klien telah menjangkau 60 orang; dan telah meningkatkan kualitas profesionalisme bagi orang pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan permasalahan

Permasalahan

- Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas Pelaksana di Satuan kerja Kabupaten/Kota, tidak sesuai dengan bidang tugas atau kompetensinya khususnya dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
- Kurangnya Koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam penanganan PMKS, sehingga berdampak terhadap rendahnya aktifitas dan responsibilitas pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penanganan PMKS.
- Belum optimalnya pemahaman tentang Otonomi daerah, sehingga pemerintah Kabupaten/Kota menganggap bahwa kewenangan penanganan PMKS hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi.

Upaya pemecahan permasalahan

- Perlu ada Uji coba model penanganan PMKS sehingga dapat diketahui kekurangan/kelemahan dalam memberikan pelayanan/pendataan kepada penyandang masalah sosial.
- Meningkatkan kualitas SDM pelaksana di Satuan kerja Kabupaten/Kota agar memiliki keahlian ilmu pekerjaan sosial.
- Meningkatkan pemahaman pada pemerintah Kabupaten/Kota bahwa penanganan PMKS menjadi tanggung jawab bersama.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan PMKS.

7) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program ini di dukung anggaran sebesar Rp. 43.803.754.000,00 dengan realisasi Rp. 42.237.688.552,00 (96.42%) pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui peningkatan pelayanan panti sosial ditujukan untuk membantu klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memberikan jaminan terhadap perkembangan fisik dan psikisnya, memberikan rasa aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan fungsi sosial dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara wajar.

Hasil Pelaksanaan program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi panti sosial adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan perkembangan bagi 50 anak balita terlantar di UPT Pelayanan Sosial Anak Balita Sidoarjo atau 100% dari target penanganan sebanyak 50 anak.
- Adanya solusi atas permasalahan 1200 anak baik di sekolah maupun di masyarakat melalui UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu atau 100% dari target penanganan sebanyak 1200 anak.
- Terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan perkembangan bagi 450 anak terlantar di UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek, Nganjuk, Situbondo dan Sumenep atau 87,37% dari target penanganan sebanyak 515 anak.
- Terpenuhinya kebutuhan dasar dan terlaksananya bimbingan sosial dan peningkatan ketrampilan bagi 704 remaja terlantar di UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Bojonegoro,

Jombang, Blitar dan Pamekasan atau 89,11% dari target penanganan sebanyak 790 orang.

- Terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan sosial bagi 872 orang Lansia nterlantar di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Banyuwangi, Bondowoso, Blitar, Magetan, Jember, Pasuruan, dan UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Jombang atau 93,06% dari target yang ditetapkan dalam Renstra sebanyak 937 orang.
- Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 105 penyandang cacat netra di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang atau 100% dari target penanganan sebanyak 105 orang.
- Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 90 eks Kusta di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks kusta Tuban atau 100% dari target penanganan sebanyak 90 orang.
- Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 180 orang eks Tuna Susila di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks Tuna Susila Kediri atau 128,57% dari target penanganan sebanyak 140 orang.
- Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 100 Anak nakal dan 80 Korban Penyalahgunaan Napza di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Surabaya atau 100% dari target penanganan sebanyak 180 orang.
- Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 60 orang Cacat Rungu Wicara Rungu Wicara Pasuruan atau 100% dari target penanganan sebanyak 60 orang.
- Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 50 penyandang cacat Grahita di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Grahita Tuban atau 100% dari target penanganan yang telah ditetapkan dalam Renstra sebanyak 50 orang.

- Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 90 orang penyandang cacat tubuh di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat tubuh Pasuruan atau 81,81% dari target penanganan sebanyak 110 orang
- Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 374 Eks Psikotik di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Kediri dan Pasuruan atau 80% dari target penanganan sebanyak 465 orang.
- Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 305 orang Gelandangan dan Pengemis di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis Madiun, Sidoarjo dan Pasuruan.

Secara terperinci hasil pelaksanaan program selama dua tahun terakhir ini adalah sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13.1.7
Peningkatan Pelayanan Sosial Panti
Tahun 2012 – 2014

No	Komponen	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Pelayanan Sosial Balita Terlantar	anak	45	45	50
2	Pelayanan Sosial Anak Terlantar	Anak	450	450	450
3	Pelayanan Sosial Anak yg mengalami hambatan fungsi sosial	anak	1.200	1.200	1200
4	Pelayanan Sosial Remaja Terlantar	orang	714	714	714
5	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar	orang	872	872	872
6	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra	orang	105	105	105
7	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Rungu Wicara	orang	60	60	60
8	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh	orang	90	90	90
9	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Grahita	anak	50	50	50
10	Pelayanan Rehabilitasi	anak	180	180	180

No	Komponen	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
	Sosial Anak Nakal/ Korban Napza				
11	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks Kusta	anak	90	90	90
12	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks Tuna Susila	orang	180	180	180
13	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik	orang	374	374	374
14	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis	orang	305	305	305
Jumlah		orang	4.675	4.675	4.675

Sumber: Dinsos Prov. Jatim 2014

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan diperoleh informasi capaian fungsional sebagai berikut :

- Pelayanan sosial terhadap Balita terlantar tahun 2014 di Sidoarjo dapat menjangkau sebanyak 75 anak balita. Dimana sebanyak 47 anak atau 63,52% memiliki perkembangan fisik dan mental sangat baik, sebanyak 28 anak atau 36,48% tergolong cukup baik dalam perkembangan fisik dan mentalnya. Sedangkan penanganan dari tahun 2009 hingga tahun 2014 telah memberikan pelayanan terhadap anak balita terlantar sebanyak 170 anak dengan perkembangan sebanyak 86 anak telah diadopsi, sebanyak 35 anak diambil keluarga, 2 anak dirujuk ke Panti anak.
- Sedangkan pelayanan terhadap Anak Terlantar di PSAA Trenggalek, PSAA Sumenep, PSAA Nganjuk dan PSAA Situbondo pada tahun 2014 telah dapat menjangkau 490 anak, dimana sebanyak 351 anak atau 71,63% tergolong memiliki perkembangan fisik, mental dan sosial yang sangat baik, 104 anak atau 21,22% tergolong memiliki perkembangan fisik, mental dan sosial cukup baik dan sebanyak 35 anak atau 7,14% masih memerlukan bimbingan fisik, mental dan sosial lanjutan.

- Pelayanan tetirah anak pada tahun 2014 telah memberikan pelayanan terhadap 1.200 anak, dimana hasil pelaksanaan bimbingan dan hasil pemantauan pekerja sosial diperoleh gambaran bahwa sebanyak 863 anak atau 76,50 % tergolong dengan perkembangan fisik, mental dan sosial sangat baik, dan sebanyak 250 anak atau 22,16% memiliki perkembangan fisik, mental dan sosial cukup baik, sedangkan 15 anak atau 1,34% memiliki perkembangan fisik, mental dan sosial yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
- Pelayanan sosial terhadap Remaja terlantar pada tahun 2014 telah dapat menjangkau sebanyak 714 orang. Berdasarkan hasil pemantauan pekerja sosial diperoleh gambaran bahwa sebanyak 559 orang atau 79,40% dapat mengikuti proses pelayanan dengan baik, sebanyak 114 orang 16,19% tergolong cukup baik dalam mengikuti proses pelayanan, dan 31 orang atau 4,40% masih memerlukan pendampingan dan bimbingan lanjutan.
- Pelayanan sosial terhadap lanjut usia terlantar tahun 2014 telah dapat menjangkau pada 775 orang, dimana hasil pantauan pekerja sosial sebanyak 343 orang atau 44,25% sangat nyaman didalam UPT, sebanyak 49 orang atau 6,32% merasa cukup nyaman dengan suasana dan pelayanan di UPT, dan sebanyak 9 orang atau 1,16% merasa tidak nyaman selama di UPT.
- Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Wanita Tuna Sosial sampai tahun 2014 mencapai 180 jiwa. Selama di Unit Pelayanan *Output* yang dicapai yaitu 141 jiwa atau 78,33% dari 180 jiwa mampu berubah sikap dan perilaku baik, dan sebanyak 39 jiwa atau 21,67% yang cukup baik dalam bersikap atau perilaku.
- Rehabilitasi sosial Eks Kusta kurun waktu tahun 2014 mencapai 90 jiwa. Dari pantauan pekerja sosial sebanyak 79

jiwa atau sekitar 87,88% dari 90 jiwa mengalami perkembangan baik dalam penerimaan diri serta selama di panti dan 11 jiwa atau sekitar 12,33% yang mengalami penerimaan diri yang rendah.

- Rehabilitasi sosial Grahita dalam kurun waktu tahun 2014 telah merehabilitasi 50 jiwa dengan rincian 17 jiwa atau 34% yang mengarah pada kemajuan sosialisasi dengan lingkungan dan memiliki tanggungjawab diri serta kemandirian sedangkan sisanya sekitar 33 jiwa atau 66 % yang rendah dalam sosialisasi dengan lingkungan dan rendah dalam tanggungjawab diri serta kemandirian.
- Rehabilitasi Eks Psikotik Pasuruan dan kediri memberikan pelayanan pada 374 jiwa, dengan perkembangan 189 jiwa atau 50,53% yang mampu mandiri , mudah bersosialisasi dan bertanggungjawab. Sedangkan sisanya 185 atau 49,47% dalam kondisi lambat bersosialisasi, masih tergantung dan rendah dalam tanggung jawab pribadi.
- Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan pengemis di Sidoarjo, Madiun, Pasuruan sebanyak 1.368 jiwa selama kurun waktu tahun 2009 s/d 2014. Sebanyak 118 jiwa atau 8,62% berhasil bekerja mandiri, sebanyak 94 jiwa atau 6,87% transmigrasi, sebanyak 243 jiwa atau 17,78% bekerja ikuti orang serta 84 jiwa atau sekitar 6,24% yang kembali ke daerah asal.
- Rehabilitasi penyandang cacat baik cacat rungu wicara Pasuruan, cacat netra Malang serta cacat tubuh Pasuruan menunjukkan perkembangan selama di panti sebagai berikut 166 jiwa atau 65,09% memiliki sikap penerimaan diri dan motivasi sosial yang tinggi dan 89 jiwa atau 64,11% memiliki sikap penerimaan diri dan motivasi sosial yang cukup. Dari segi perkembangan setelah pelayanan selama kurun waktu 2009 s/d 2014 telah ditangani sebanyak 880 jiwa dengan rincian 102 jiwa atau 11,59 yang bekerja mandiri, sebanyak 608 jiwa atau 69,09% yang bekerja ikut orang, serta 144 jiwa atau 16,39% yang kembali ke keluarga untuk bekerja membantu keluarga.

- Sebanyak 180 Anak Nakal/Korban NAPZA telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi, bimbingan sosial, mental, fisik dan ketrampilan dengan indikator hasil penanganan sebanyak 56 anak atau 29,47% dikategorikan sangat baik dalam mengikuti pelayanan, 57 anak atau 30% dapat mengikuti pelayanan dengan baik, 66 anak atau 34,74% cukup baik dalam mengikuti pelayanan dan 11 anak atau 5,79% berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Pekerja Sosial dikategorikan masih memerlukan pendampingan intensif.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT (panti) Dinas Sosial Provinsi. Jawa Timur sangat memerlukan perhatian khususnya fisik bangunan, sehingga proses pelayanan dan rehabilitasi sosial klien menjadi kurang optimal.
- Ketidak seimbangan rasio Pekerja Sosial Fungsional dengan jumlah klien yang dilayani, dimana secara ideal 1 orang pekerja sosial menangani 5-10 klien. Sehingga dengan jumlah klien yang ditangani di UPT sebanyak 4.765 orang membutuhkan 476 pekerja sosial, namun saat ini hanya tersedia 75 orang.
- Indek SOSH klien yang masih kurang memenuhi standar gizi, dimana sampai saat ini indek SOSH klien UPT sebesar Rp. 15.000,-/orang/hari.

Upaya Pemecahan Masalah

- Mengusulkan peningkatan sarana dan prasana UPT (panti) dalam proses pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemeliharaan gedung dan asrama UPT
- Mengusulkan penambahan tenaga pekerja sosial fungsional di masing-masing UPT.

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN, KEPENDUDUKAN DAN KETRANSMIGRASIAN

14.1. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

URUSAN KETANAGAKERJAAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya tenaga kerja yang terampil/kompeten, tenaga kerja yang dimagangkerjakan, produktivitas kerja dan pelayanan pelatihan dan produktivitas.
- 2) Meningkatnya penempatan tenaga kerja di sektor formal, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja di sektor informal.
- 3) Menurunnya perselisihan hubungan industrial, meningkatnya perbaikan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja, dan pelayanan pembinaan hubungan industrial.
- 4) Meningkatnya K3 yang kondusif, kepesertaan jamsostek aktif, lingkungan kerja yang aman, higienis dan nyaman serta tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif, dan meningkatnya pelayanan K3

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Perluasan Dan Penempatan Tenaga Kerja

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 6.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.061.958.024,00 atau 94,72%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan serta capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Penyerapan tenaga kerja dilaksanakan melalui mekanisme penempatan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), ditambah kontribusi

penempatan tenaga kerja dari PPJP (Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja). Target penyerapan tenaga kerja tahun 2014 sebanyak 400.000 orang, realisasi 389.120 orang (97,28%). Dibandingkan tahun 2013, penyerapan tenaga kerja tahun 2014 turun 12,04%. Secara terinci, penyerapan tenaga kerja berikut faktor-faktor penyebabnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penempatan tenaga kerja AKL (Antar Kerja Lokal) tahun 2014 sebanyak 264.660 orang (68,02% dari total penempatan tenaga kerja). Penempatan AKL turun 18,55% dibanding tahun 2013 karena :
 - Turunnya kontribusi penempatan dari LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta), akibat jumlah LPKS berkurang dari 903 LPKS menjadi 790 LPKS. Adanya penurunan jumlah LPKS karena ijin operasionalnya sudah tidak berlaku dan terlambat mengurus perpanjangan.
 - Turunnya kontribusi penempatan dari LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta), karena diberlakukannya Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Peraturan Daerah Prov. Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, berdampak mengurangi jumlah LPTKS yang aktif sebanyak 50%. LPTKS dihadapkan pada pilihan untuk tetap menempatkan tenaga bersifat kontrak atau menempatkan tenaga yang bersifat tetap.
 - Kendala pendataan angka penempatan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) Perguruan Tinggi, karena belum tingginya kesadaran alumni yang sudah bekerja untuk melaporkan. Dampaknya, BKK Perguruan Tinggi sulit melacak dan melaporkan penempatan tenaga kerja kepada instansi pembina ketenagakerjaan. Selain itu data

penempatan BKK Perguruan Tinggi belum terdokumentasikan dengan alasan masih sebatas membantu memberi informasi lowongan dan pendampingan saja.

- Kendala efisiensi anggaran APBN di tahun 2014 sebanyak 35% berdampak penurunan target binaan dan dampak perluasan kesempatan kerja sektor informal di Kab./Kota.
- Penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) tahun 2014 sebanyak 5.297 orang (1,36% dari total penempatan tenaga kerja). Penempatan AKAD turun 6,11% dibandingkan tahun 2013. Turunnya penempatan AKAD karena permintaan tenaga kerja asal Jawa Timur berkurang. Sebelumnya, permintaan tenaga kerja AKAD di tahun 2013 lebih dari 10.100 orang, sedangkan di tahun 2014 sekitar 8.800 orang. Disamping itu, animo pencari kerja asal Jawa Timur untuk bekerja di luar Jawa Timur masih rendah sehingga menjadi kendala dalam mendorong penempatan tenaga kerja AKAD.
- Penempatan tenaga kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara) tahun 2014 sebanyak 49.985 orang (12,85% dari total penempatan tenaga kerja). Penempatan AKAN turun 21,95% dibandingkan tahun 2013. Turunnya penempatan tenaga kerja AKAN karena Pemerintah melakukan pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja ke luar negeri. Upaya pembenahan Pemerintah dalam bentuk :
 - Pengetatan penerbitan sertifikasi uji kompetensi calon TKI sebagai salah satu syarat utama agar bisa bekerja ke luar negeri;

- Pemberlakuan Sisko KTKLN (Sistem Komputerisasi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) sebagai mekanisme pendataan TKI yang bekerja di luar negeri.
 - Pengetatan pengiriman TKI ke luar negeri khususnya untuk sektor *domestic worker* (TKI informal).
- Penyerapan tenaga kerja kontrak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) pada tahun 2014 sebanyak 69.178 orang (17,78% dari total penempatan tenaga kerja). Penyerapan tenaga kerja dari PPJP naik 114,21% (lebih dua kali lipat) dibandingkan tahun 2013. Setelah dilakukan pengetatan perijinan bagi operasional PPJP di Jawa Timur untuk menekan penyimpangan terhadap penempatan tenaga kerja kontrak yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka PPJP di Jawa Timur melakukan perbaikan dalam sistem pendataan maupun pendokumentasian penempatan tenaga kerja kontrak.
- Perkembangan seluruh capaian penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14.1.1
Capaian Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2012 - 2014

NO	JENIS PENEMPATAN	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014	
		JML (Org)	%	JML (Org)	%	JML (Org)	%
1	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	5,292	1.12	5,642	1.32	5,297	1.36
2	Antar Kerja Lokal (AKL) :	259,091	54.78	324,938	76.11	264,660	68.02
	Antar Kerja Lokal (AKL) Kab/Kota	55,499		59,071		75,467	
	Antar Kerja Khusus (AKSUS) TKI Bermasalah (wirausaha)	433		453		488	
	Bursa Kerja di Provinsi (Bulanan dan JMF)	2,379		545		815	

NO	JENIS PENEMPATAN	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014	
		JML (Org)	%	JML (Org)	%	JML (Org)	%
	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	13,444		5,773		2,887	
	Bursa Kerja Khusus (BKK) di UPT Prov/SMK/Perguruan Tinggi :	18,609		58,086		63,667	
	– Bursa Kerja Khusus (BKK) UPT-PK	6,342		7,522		8,289	
	– Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK	484		5,700		21,462	
	– Bursa Kerja Khusus (BKK) PT/Universitas	11,783		44,864		33,916	
	Penempatan pemagangan tenaga kerja dlm negeri	1,512		3,991		5,025	
	Perluasan kesempatan kerja sektor informal	155,320		99,076		54,584	
	– Binaan Provinsi	365		435		4,097	
	– Binaan Kab/kota	154,955		98,641		50,487	
	Penempatan melalui LPKS di 38 kab/kota	11,895		97,943		61,727	
3	Antar Kerja Antar Negara (AKAN) :	96,088	20.32	64,045	15.00	49,985	12.85
	PPTKIS Embarkasi Bandara Juanda	68,003		52,571		45,663	
	Cab.PPTKIS Embarkasi Bandara Juanda	3,705		5,894		4,020	
	Embarkasi non Juanda	24,230		5,339			
	Penempatan pemagangan TK luar negeri	150		241		302	
4	Penempatan sebagai tenaga kerja kontrak	112,511	23.79	32,295	7.56	69,178	17.78
JUMLAH		472,982	100.00	426,920	100.00	389,120	100.00

Sumber : Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan & Produktivitas, Bidang Hub. Industrial & Syarat Kerja, UPT P3TKI
Disnakertransduk Prov. Jatim

Tabel berikut menunjukkan perkembangan penempatan TKI ke luar negeri melalui embarkasi Bandara Juanda berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan formal – informal, serta penerimaan remitansi TKI :

Tabel 4.14.1.2
Capaian Kinerja Penempatan TKI Ke Luar Negeri Berdasarkan
Jenis Kelamin Melalui Embarkasi Bandara Juanda
Tahun 2012 - 2014

NO	JENIS KELAMIN	THN 2012		THN 2013		THN 2014	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Laki-laki	17,184	25.27	14,958	28.45	11,966	26.21
2	Perempuan	50,819	74.73	37,613	71.55	33,697	73.79
JUMLAH		68,003	100.00	52,571	100.00	45,663	100.00

Sumber : UPT P3TKI Disnakertransduk Prov. Jatim

- Berdasarkan jenis kelamin, penempatan tenaga kerja ke luar negeri tahun 2014 masih didominasi oleh perempuan. Pada tahun 2014 komposisi tenaga kerja perempuan meningkat menjadi 73,79% (semula 71,55% di tahun 2013) dibandingkan tenaga kerja laki-laki yang komposisinya sebesar 26,21% (semula 28,45% di tahun 2013). Masih dominannya penempatan tenaga kerja perempuan ke luar negeri disebabkan peluang kerja terbanyak adalah Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang menurut syarat jabatan mengarah kepada perempuan.
- Berdasarkan jenis jabatan formal – informal, komposisi penempatan tenaga kerja pada jabatan formal turun dari 35,49% di tahun 2013 menjadi 33,25% di tahun 2014. Sebaliknya, komposisi jabatan informal tahun 2013 sebesar 64,51%, naik menjadi 66,75%. Hal ini disebabkan masih tingginya permintaan negara tujuan terutama pasar Asia untuk jabatan informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Tingginya penempatan TKI informal juga terkait tingkat pendidikan calon TKI/TKI yang didominasi lulusan SLTP. Secara bertahap, Pemerintah Prov. Jawa Timur mengarahkan PLRT menjadi TKI nonformal profesional melalui peningkatan pelatihan, uji kompetensi calon TKI, dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan.

- Penerimaan remitansi TKI pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.688.686.333.760,00 atau turun 13,32% dari penerimaan tahun 2013 sebanyak Rp. 3.101.915.406.912,00. Turunnya nilai remitansi TKI tahun 2014 disebabkan turunnya penempatan TKI ke luar negeri sebesar 21,95%. Pemanfaatan remitansi TKI di Jawa Timur diarahkan pada kegiatan produktif usaha mandiri atau pembentukan Koperasi Purna TKI sehingga menggerakkan perekonomian di daerah asal TKI.

Tabel 4.14.1.3
Capaian Kinerja Penempatan TKI Formal – Informal ke Luar Negeri Melalui Embarkasi Bandara Juanda Beserta Nilai Remitansinya Tahun 2012 – 2014

NO	URAIAN	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Jenis Jabatan :							
1	Formal	20,981	30.85	18,660	35.49	15,181	33.25
2	Informal	47,022	69.15	33,911	64.51	30,482	66.75
JUMLAH		68,003	100.00	52,571	100.00	45,663	100.00
Remittance (Rp)		4,054,151,252,928		3,101,915,406,912		2,688,686,333,760	

Sumber : UPT P3TKI, Disnakertransduk Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Peluang/lowongan kerja yang tersedia belum terisi secara optimal, dan perusahaan kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan. Kondisi ini dikarenakan kualifikasi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja (*mismatch* antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja).
- Masih relatif rendahnya jumlah pencari kerja yang bekerja di luar Jawa Timur melalui program AKAD (lintas Provinsi).
- Masih banyak tenaga kerja yang bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal.

- Angkatan kerja (terutama angkatan kerja muda) yang berminat untuk berusaha mandiri masih relatif kecil dan cenderung untuk mencari peluang kerja di sektor formal.

Upaya pemecahan masalah :

- Meningkatkan program penyuluhan dan bimbingan jabatan di dunia pendidikan. Penyuluhan dan bimbingan jabatan dilakukan agar lulusan dunia pendidikan yang ingin langsung bekerja lebih siap untuk memasuki pasar kerja.
- Mendorong pendidikan formal maupun nonformal (pelatihan kerja) yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (*training for placement*).
- Memperkuat jejaring informasi pasar kerja melalui 'Pusat Layanan Karir Terpadu' dan melaksanakan job fair secara berkala untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.
- Rintisan Bursa Kerja Bersama Lintas Provinsi (untuk mendorong penempatan AKAD) yang mudah diakses oleh pencari kerja melalui www.infokerja-jatim.com.
- Mengoptimalkan sosialisasi penempatan AKAD secara langsung hingga ke tingkat Kelurahan/Kecamatan, yang dilakukan secara sinergis oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi dengan Kab./Kota.
- Pembentukan Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural yang melibatkan instansi lintas sektoral;
- Mendorong Pemerintah Kab./Kota untuk memfasilitasi angkatan kerja muda yang berminat untuk berusaha mandiri, serta melakukan inovasi program pembinaan usaha mandiri, antara lain melalui pembinaan ekonomi kreatif untuk menumbuhkan minat angkatan kerja muda.

d) Penghargaan

Tabel 4.14.1.4
Penghargaan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja
Tahun 2012 - 2014

NO	NAMA PENGHARGAAN	DALAM RANGKA	PIHAK YG MENYERAHKAN	WAKTU
1	Outstanding Partner in Knowledge Sharing	Sebagai mitra/institusi/lembaga yang telah memberikan informasi berbagi pengalaman dan kerjasama dalam pengembangan Bursa Kerja, pendampingan wirausaha dan program trafficking serta migrant worker.	Rektor Universitas Surabaya (Ubaya), disaksikan Bpk. Gubernur Jatim	22 Juni 2012
2		NIHIL		2013
3	Program Penghargaan Unit Pelayanan Publik Percontohan	Unit Pelayanan Publik Percontohan, melalui program 'Ayo Kerja' di Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT)	Pemerintah Prov. Jatim	Nopember 2014

Sumber : Bidang Penempatan Kerja, Disnakertransduk Prov. Jatim

2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 82.328.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.577.013.238,00 atau 95,44%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan serta capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Pada tahun 2014 secara keseluruhan jumlah pelatihan, baik pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*), Pelatihan Berbasis Masyarakat, Pelatihan Swadana, maupun Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan sebanyak 9.364 siswa atau turun 63,31% dibandingkan tahun 2013. Turunnya jumlah pelatihan disebabkan :

- Berkurangnya alokasi paket Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang bersumber dari dana APBN secara signifikan. Pada tahun 2013 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalokasikan 530 paket (8.480 siswa), sedangkan di tahun 2014 alokasi turun menjadi 125 paket (2.000 siswa).
- Berkurangnya alokasi Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) maupun Pelatihan Berbasis Masyarakat (PBM) melalui dana APBD, karena di saat bersamaan sektor ketenagakerjaan perlu melaksanakan uji/sertifikasi kompetensi teknis bagi siswa UPT yang telah mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (tahun 2014 dilaksanakan sertifikasi kompetensi teknis terhadap 802 orang siswa). Di samping itu, untuk menambah volume dan kualitas uji/sertifikasi kompetensi, perlu ditambah sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK) di 16 UPT Pelatihan Kerja (BLK) agar semakin banyak tenaga kerja di Jawa Timur yang dapat difasilitasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi.
- Pada tahun 2014 fokus sektor ketenagakerjaan lainnya di bidang pelatihan adalah merevitalisasi sarana-prasarana UPT Pelatihan Kerja (BLK), termasuk revitalisasi mesin-mesin/peralatan pendukung pelatihan agar sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan dunia usaha, agar ke depan *output* pelatihan berupa tenaga kerja dengan kompetensi memadai akan bertambah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel 4.14.1.5
Capaian Kinerja Pelatihan dan Produktivitas
Tahun 2012 - 2014

NO	JENIS PELATIHAN	THN 2012	THN 2013	THN 2014
1	Institusional, termasuk <i>Competency Based Training</i> (CBT) atau Pelatihan Berbasis Kompetensi	13,000	15,851	4,556
2	Non Institusional atau Mobile Training Unit (MTU), termasuk Pelatihan Berbasis Masyarakat	3,008	6,529	2,320
3	Swadana (Pihak-III)	912	2,130	1,648
4	Pelatihan Produktivitas & Kewirausahaan	1,764	1,010	840
JUMLAH		18,684	25,520	9,364

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Disnakertransduk Prov. Jatim

- Program magang kerja sangat mendukung proses pelatihan kerja karena memberikan peluang lebih besar kepada lulusan pendidikan dan pelatihan kerja agar lebih cepat terserap di dunia kerja. Secara keseluruhan, pada tahun 2014 jumlah peserta magang kerja 5.327 orang, atau naik 25,87% dari tahun 2013 (4.232 orang). Secara terinci, peserta magang dalam negeri berjumlah 5.025 orang atau naik 25,91% dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 3.991 orang. Sedangkan peserta magang ke Jepang berjumlah 302 orang atau naik 25,31% dari tahun 2013 yang berjumlah 241 orang.

Tabel 4.14.1.6
Capaian Kinerja Magang Dalam Negeri dan Magang ke Jepang
Tahun 2012 - 2014

NO	JENIS MAGANG KERJA	JUMLAH PESERTA		
		THN 2012	THN 2013	THN 2014
1	Magang dalam negeri	1,512	3,991	5,025
2	Magang ke Jepang	150	241	302
JUMLAH		1,662	4,232	5,327

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Disnakertransduk Prov. Jatim

- Pengakuan kompetensi kerja sangat penting karena mempengaruhi posisi tawar di pasar kerja. Salah satu uji kompetensi yang mutlak dilaksanakan adalah uji kompetensi bahasa negara tujuan bagi calon TKI, sebagai prasyarat bagi

calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Dibandingkan tahun 2013, jumlah uji kompetensi calon TKI di tahun 2014 turun 41,57%. Di tahun 2013 calon TKI yang mengikuti uji kompetensi bahasa negara tujuan sebanyak 17.766 orang, dan di tahun 2014 turun menjadi 10.381 orang. Kondisi ini seiring dengan turunnya penempatan tenaga kerja ke luar negeri di tahun 2014. Dilihat dari komposisinya, uji kompetensi bahasa Mandarin paling banyak diikuti oleh calon TKI. Pada tahun 2014, 4.332 orang calon TKI (41,73%) mengikuti uji kompetensi bahasa Mandarin. Selanjutnya diikuti 29,14% untuk uji kompetensi bahasa Inggris dan 27,28% untuk uji kompetensi bahasa Kantonis. Banyaknya peserta uji kompetensi pada bahasa Mandarin dan Kantonis sejalan dengan tingginya penempatan tenaga kerja asal Jawa Timur di negara-negara Asia.

Tabel 4.14.1.7
Capaian Kinerja Uji Kompetensi Bahasa Negara Tujuan
Bagi Calon TKI ke Luar Negeri Tahun 2012 - 2014

NO	UJI KOMPETENSI BAHASA	THN 2012		THN 2013		THN 2014	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Kantonis	15,225	38.06	7,291	41.04	2,832	27.28
2	Inggris	5,393	13.48	1,729	9.73	3,025	29.14
3	Mandarin	18,774	46.93	8,563	48.20	4,332	41.73
4	Melayu	612	1.53	183	1.03	192	1.85
JUMLAH		40,004	100.00	17,766	100.00	10,381	100.00

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Disnakertransduk Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Berkurangnya volume kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- Belum teridentifikasinya secara optimal jumlah lulusan pelatihan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pemerintah maupun Swasta.

- Peserta pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pada umumnya berpendidikan SLTP atau SLTA sehingga belum siap untuk masuk ke dunia kerja.
- Belum maksimalnya pemahaman dunia kerja tentang pentingnya Pelatihan Berbasis Kompetensi maupun sertifikasi kompetensi, sehingga pemanfaatan tenaga kerja yang telah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi ataupun telah memiliki sertifikat kompetensi belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan untuk diterima di dunia kerja.

Upaya pemecahan masalah :

- Penambahan volume kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang relevan dengan bidang jabatan atau kebutuhan pasar kerja melalui berbagai sumber dana.
- Peningkatan koordinasi dan kesadaran Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Swasta serta dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab./Kota tentang pentingnya pendokumentasian data dan melaporkan hasil pelatihan maupun penempatan tenaga kerja.
- Sistem seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan lebih disesuaikan dengan minat, bakat peserta pelatihan serta kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan pelatihan bisa terserap secara maksimal di pasar kerja.
- Sosialisasi kepada dunia kerja tentang pentingnya dan manfaat dari Pelatihan Berbasis Kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap kompetensi tenaga kerja. Tenaga kerja yang telah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi telah memiliki kemampuan sesuai kebutuhan jabatan di pasar kerja sehingga tidak perlu lagi diragukan kualitasnya oleh dunia kerja.

d) Penghargaan

Tabel 4.14.1.8
Penghargaan di Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Tahun 2012 – 2014

NO	NAMA PENGHARGAAN	DALAM RANGKA	PIHAK YG MENYERAHKAN	WAKTU
1	PWI Jatim Award	Komitmen dan kepedulian terkait kompetensi tenaga kerja.	Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jatim	16 Maret 2012
	BNSP Competency Award 2012	Komitmen dan peran Pemprov. Jatim dalam membangun dan meningkatkan kompetensi SDM Indonesia.	Ketua BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)	21 Nop 2012
	Pelayanan Publik Kategori Baik untuk UPT Pelatihan Kerja Kediri	Pelayanan Publik	Gubernur Jawa Timur	Thn 2012
2	NIHIL			THN 2013
3	NIHIL			THN 2014

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Disnakertransduk Prov. Jatim

3) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebesar Rp. 5.791.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.448.630.686,00 atau 94,07%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan serta capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- PPA-PKH merupakan program penarikan pekerja anak yang putus sekolah dari rumah tangga sangat miskin/RTSM untuk dikembalikan ke dunia pendidikan. Program PPA-PKH terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan. Program PPA-PKH bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan dan

dikembalikan ke dunia pendidikan. Pada tahun 2014, pekerja anak yang mengikuti Program PPA-PKH berjumlah 2.940 orang di 17 Kab./Kota dan melibatkan 98 *shelter*. Jumlah ini bertambah 28,95% dibanding tahun 2013 (2.280 anak). Sedangkan jumlah *shelter* lokasi pendampingan sebanyak 98 *shelter*, naik 28,95% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 76 *shelter*.

Tabel 4.14.1.9
Capaian Kinerja Program PPA-PKH (Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan)
Tahun 2012 – 2014

TAHUN	JUMLAH		
	KABUPATEN	SHELTER	PEKERJA ANAK
2012	16	67	2,010
2013	17	76	2,280
2014	17	98	2,940
JUMLAH			7,230

Sumber : Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakertransduk Prov. Jatim

- Upaya mendorong pembudayaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di dunia industri sekaligus menekan kasus-kasus kecelakaan kerja di perusahaan antara lain dilakukan melalui pemberian penghargaan di bidang K3, yang meliputi Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*) dan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Jumlah perusahaan yang diberikan penghargaan Kecelakaan Nihil pada tahun 2014 sebanyak 405 perusahaan, naik 17,05% dibandingkan tahun 2013. Sedangkan yang mendapatkan penghargaan Sistem Manajemen K3 di tahun 2014 sebanyak 56 Perusahaan, naik 47,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun penghargaan kepada Bupati/Walikota sebagai Pembina K3 pada tahun 2014 sama seperti tahun sebelumnya, yakni 10 Bupati/Walikota.

Tabel 4.14.1.10
Capaian Kinerja Pemberian Penghargaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Tahun 2012 - 2014

NO	JENIS PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN	TAHUN PENILAIAN		
		2012	2013	2014
1	Pembina K3	10 Bupati/Walikota	10 Bupati/Walikota	10 Bupati/Walikota
2	Kecelakaan Nihil (<i>Zero Accident</i>)	275 perusahaan	346 perusahaan	405 perusahaan
3	Sistem Manajemen K3 (SMK3)	32 perusahaan	38 perusahaan	56 perusahaan

Sumber : Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakertransduk Prov. Jatim

- Pengujian dan pemeriksaan di bidang hiperkes (higiene perusahaan, kesehatan) dan keselamatan kerja semakin dirasa penting, karena (1) kesadaran sebagian kalangan industri di Jawa Timur untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan di bidang hiperkes masih rendah, (2) masih kurangnya penyerasian antara pekerja dengan lingkungan dan gizi kerja, (3) kurangnya pengawasan terhadap barang kimia berbahaya, serta pelayanan kesehatan kerja, dan (5) terbatasnya pemahaman SDM industri tentang pentingnya hiperkes. Pemeriksaan dan pengujian hiperkes dan keselamatan kerja meliputi pengujian kualitas udara emisi dan ambien, lingkungan kerja, serta pemeriksaan tenaga kerja. Pada tahun 2014, perusahaan yang diuji kualitas udara emisi dan ambien sebanyak 628 perusahaan atau turun 2,33% dibandingkan tahun 2013 (643 perusahaan). Sedangkan perusahaan yang meminta dilakukan pemeriksaan tenaga kerja pada tahun 2014 sebanyak 810 perusahaan, atau turun 29,50% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.149 perusahaan. Adanya penurunan capaian dari tahun sebelumnya karena permintaan dari perusahaan/industri tidak dapat terpenuhi secara optimal, sementara di sisi lain permintaan kalangan industri semakin tinggi. Hal ini antara lain karena semakin minimnya SDM yang melakukan pengujian/pemeriksaan, serta beberapa alat uji

kualitas udara dan lingkungan industri tidak optimal fungsinya dan belum ada peremajaan.

Tabel 4.14.1.11
Capaian Kinerja Pemeriksaan dan Pengujian di Bidang
Hiperkes dan Keselamatan Kerja Tahun 2012 - 2014

NO	URAIAN	JML PERUSAHAAN YANG DIPERIKSA/DIUJI		
		THN 2012	THN 2013	THN 2014
1	Pengujian kualitas udara emisi dan ambien	752	643	628
2	Pemeriksaan tenaga kerja	414	1,149	810

Sumber : UPT K3, Disnakertransduk Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Data pekerja anak yang bersumber dari TNP2K memerlukan proses validasi data yang memakan waktu, namun data yang cocok/sesuai sasaran program hanya 15 - 20%.
- Tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua, pekerja anak calon penerima manfaat program, aparat desa maupun *stakeholder* tentang program PPA-PKH masih sangat minim. Akibatnya banyak pekerja anak yang tidak mau dan tidak siap direkrut untuk dilakukan pendampingan di *shelter* selama 1 bulan.
- Bagi pekerja anak yang sudah berhasil dikembalikan ke dunia pendidikan melalui jalur formal maupun non formal, tidak menjamin keberlangsungan mereka untuk tetap bersekolah. Meski sudah kembali ke dunia pendidikan, posisi mereka sebagai tulang punggung keluarga menjadikan mereka masih tetap diandalkan oleh keluarganya untuk mencari penghasilan. Ketiadaan biaya untuk keperluan sekolah juga menjadi salah satu alasan untuk tidak melanjutkan sekolah dan kembali sebagai pekerja anak.
- Jumlah pejabat fungsional Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sangat tidak memadai dibandingkan jumlah perusahaan di Jawa Timur sehingga implementasi sistem pengawasan

ketenagakerjaan tidak berjalan optimal. Untuk menambah kuantitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Jawa Timur, melalui dana APBD Pemerintah Prov. Jawa Timur menyelenggarakan Diklat Fungsional Pengawas pada tahun 2013 dan 2014, namun terkendala oleh minimnya minat PNS Kab./Kota untuk mengikuti Diklat Fungsional Pengawas.

- Minimnya SDM yang melakukan pengujian/pemeriksaan kualitas udara dan lingkungan industri, serta beberapa alat uji kualitas udara dan lingkungan industri yang sudah tidak optimal fungsinya dan belum ada peremajaan.
- Jumlah perusahaan yang telah bersertifikasi SMK3 masih sedikit dikarenakan biaya audit SMK3 yang tinggi. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, SMK3 wajib diterapkan di perusahaan dengan resiko tinggi dan/atau perusahaan yang memiliki di atas 100 tenaga kerja.

Upaya pemecahan masalah :

- Pemenuhan data yang sesuai dengan sasaran program diambil dari data RSTM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang mempunyai pekerja anak dan putus sekolah di daerah setempat per kelurahan/kecamatan dan diketahui aparat setempat. Dengan demikian target pekerja anak calon penerima manfaat dapat terpenuhi dan program dapat dilaksanakan tepat sasaran.
- Memberikan pemahaman/penjelasan program PPA-PKH dengan melakukan home visit ke rumah para calon penerima manfaat, hingga orang tua maupun anak siap dan berminat untuk dilakukan pendampingan di shelter.
- Untuk menjaga keberlangsungan pekerja anak agar tetap bersekolah baik melalui jalur formal maupun nonformal, antara lain dilakukan melalui dukungan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan, dilakukan koordinasi antar

SKPD terkait, serta penggalangan dana dari masyarakat dan bekerjasama dengan LSM Peduli Anak.

- Meningkatkan pemahaman Pemerintah Kab./Kota (Bupati/Walikota) akan pentingnya keberadaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan sistem pengawasan ketenagakerjaan di Kab./Kota.
- Secara bertahap, telah dilakukan pengadaan alat uji kualitas udara dan lingkungan industri melalui dana APBD. Sedangkan pemenuhan kebutuhan SDM yang melakukan pengujian/pemeriksaan dilakukan dengan menambah tenaga ahli penguji K3 (tenaga kontrak).
- Mengoptimalkan sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan agar memiliki kesadaran untuk menerapkan SMK3 di perusahaan termasuk proses sertifikasinya.

4) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebesar Rp. 5.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.781.571.399,00 atau 91,95%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan serta capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Perselisihan hubungan industrial yang tidak bisa diselesaikan melalui Perjanjian Bersama di tingkat Kab./Kota masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pada tahun 2014, kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 139 kasus, atau turun 6,08% dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 148 kasus. Dilihat dari jenis perselisihannya, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) masih mendominasi, yaitu sebanyak 117 kasus di tahun 2014 atau 84,17%. Sedangkan kejadian

mogok/unjuk rasa di tahun 2014 naik menjadi 15 kasus dari sebelumnya 11 kasus di tahun 2013.

Tabel 4.14.1.12
Capaian Kinerja Keadaan Perkara Perselisihan Hubungan
Industrial yang Masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial
serta Kasus Mogok/Unjuk Rasa Tahun 2012 - 2014

NO	JENIS PERSELISIHAN	TH 2012		TH 2013		TH 2014	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Perselisihan Hak	11	7,86	15	10,14	16	11,51
2	Perselisihan Kepentingan	4	2,86	5	3,38	5	3,60
3	Perselisihan PHK	125	89,29	128	86,49	117	84,17
4	Perselisihan Antar SP/SB dlm 1 Perusahaan	0	0,00	0	0,00	1	0,72
JUMLAH		140	100,00	148	100,00	139	100,00

URAIAN	TH 2012	TH 2013	TH 2014
Mogok / Unjuk Rasa	22	11	15

Sumber : Bidang Hub. Industrial dan Syarat Kerja, Disnakertransduk Prov. Jatim

- Terkait kelembagaan hubungan industrial, pada tahun 2014 Serikat Pekerja di perusahaan berjumlah 2.451, tidak mengalami penambahan dari tahun 2013. Sedangkan LKS Bipartit di perusahaan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.210 LKS Bipartit atau naik 7,94% dibanding tahun 2013 yang jumlah LKS Bipartitnya sebanyak 1.121. Sementara itu perkembangan kelembagaan LKS Tripartit di Kab./Kota di Jawa Timur berjalan sangat lambat. LKS Tripartit pada tahun 2014 berjumlah 29 untuk tingkat Prov. dan Kab./Kota, atau tidak terdapat penambahan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 23,68% atau 9 Kab./Kota yang belum memahami pentingnya fungsi kelembagaan LKS Tripartit sehingga sulit didorong untuk membentuk kelembagaan LKS Tripartit di daerahnya.

Tabel 4.14.1.13
Capaian Kinerja Kelembagaan Hubungan Industrial
Tahun 2012 - 2014

NO	JENIS KELEMBAGAAN	THN 2012		THN 2013		THN 2014	
1	Serikat Pekerja	2,370	perusahaan	2,451	perusahaan	2,451	perusahaan
2	LKS Bipartit	1,081	perusahaan	1,121	perusahaan	1,210	perusahaan
3	LKS Tripartit	28	Prov./Kab./Kota	29	Prov./Kab./Kota	29	Prov./Kab./Kota

Sumber : Bidang Hub. Industrial dan Syarat Kerja, Disnakertransduk Prov. Jatim

- Upah Minimum di 38 Kab./Kota di Jawa Timur seluruhnya telah melebihi 100% KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Pada Tahun 2014 rata-rata UMK Jawa Timur sebesar Rp. 1.314.941,76,- dan rata-rata KHL Rp. 1.257.456,- (rata-rata UMK = 104,57% dari rata-rata KHL). Rata-rata UMK di Jawa Timur tahun 2014 naik 15,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan yang terbaru yaitu UMK tahun 2015, rata-rata UMK Jawa Timur Rp. 1.547.596,- dan rata-rata KHL Rp. 1.345.984,- (rata-rata UMK Jawa Timur = 114,98% dari rata-rata KHL) (Kota Surabaya). Dengan demikian, rata-rata UMK di Jawa Timur tahun 2015 naik 19,13% dari tahun 2014, dan ini merupakan kenaikan tertinggi. Dengan nilai UMK seluruh Kab./Kota saat ini yang seluruhnya telah melebihi 100% dari nilai KHL, menunjukkan bahwa secara bertahap dunia usaha di Jawa Timur semakin memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerjanya. Di sisi lain, perlu diperhatikan dampak kenaikan UMK yang signifikan terhadap iklim investasi di Jawa Timur. Dinamika hubungan industrial di Jawa Timur harus tetap mampu menjaga iklim investasi yang kondusif, karena keberlangsungan dunia usaha berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal di Jawa Timur.

Tabel 4.14.1.14
Capaian Kinerja Upah Minimum Kab./Kota (UMK) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2012 – 2015

NO	URAIAN	UMK THN 2012			UMK THN 2013			UMK THN 2014			UMK THN 2015		
		UMK (Rp)	KHL (Rp)	% dari KHL	UMK (Rp)	KHL (Rp)	% dari KHL	UMK (Rp)	KHL (Rp)	% dari KHL	UMK (Rp)	KHL (Rp)	% dari KHL
1	UMK Terendah	745,000	762,514.00		866,250	825,465.00		1,000,000	825,465.00		1,150,000	1,004,363	
2	UMK Tertinggi	1,257,000	1,257,000.00		1,740,000	1,567,000.00		2,200,000	1,567,000.00		2,710,000	2,517,583	
RATA-RATA JATIM		933,120	973,828.00	96.27	1,139,730	1,072,959	106.49	1,314,941.76	1,257,456	104.57	1,547,596.00	1,345,984	114.98
% Kenaikan UMK dari tahun sebelumnya (Rata-rata Jatim)		8.08			22.14			15.37			19.13		

Sumber : Bidang Hub. Industrial dan Syarat Kerja, Disnakertransduk Prov. Jatim

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

Pendataan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) :

- Terdapat perbedaan pendataan jumlah Unit Kerja dan keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah dicatat oleh petugas pencatat di dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab./Kota dengan data keanggotaan yang dibuat oleh DPD/DPW/KORWIL/ PK/SP dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Provinsi. Dengan demikian, pencatatan SP/SB belum dikelola secara optimal oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab./Kota serta belum ada keseragaman dalam format pencatatan SP/SB.
- Adanya kendala yang dihadapi petugas verifikasi data dikarenakan masih ada perusahaan yang tidak kooperatif terhadap data karyawan yang menjadi anggota SP/SB.
- Minimnya personil untuk melakukan verifikasi data anggota SP/SB ke perusahaan.

LKS Bipartit :

- Masih banyak pengusaha yang kurang memahami manfaat keberadaan LKS Bipartit sehingga enggan membentuk LKS Bipartit di perusahaannya.
- Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi tentang LKS Bipartit di perusahaan.

LKS Tripartit :

- Masih ada 9 Kab./Kota yang belum membentuk LKS Tripartit dikarenakan tidak adanya dukungan dari Pemerintah Kab./Kota dalam pembentukan LKS Tripartit. Hal ini disebabkan oleh kurang pahamnya Pemerintah Kab./Kota tentang pentingnya keberadaan LKS Tripartit di Kab./Kota.

Upaya pemecahan masalah :

Pendataan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) :

- DPD/DPW/Korwil/PK Serikat Pekerja/Serikat Buruh melakukan pembenahan terhadap sistem pendataan keanggotaan di tingkat Provinsi hingga tingkat perusahaan.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pengurus Serikat Pekerja di tingkat perusahaan dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab./Kota.

LKS Bipartit :

- Sosialisasi kelembagaan hubungan industrial secara langsung ke perusahaan dalam rangka peningkatan dan efektivitas peran, fungsi kelembagaan hubungan industrial di perusahaan.
- Membangun komunikasi antara Pemerintah dengan pengusaha dalam upaya mendorong pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial di perusahaan

LKS Tripartit :

- Sosialisasi kelembagaan hubungan industrial secara langsung kepada Bupati/Walikota dalam rangka peningkatan dan efektivitas peran, fungsi kelembagaan hubungan industrial di Kab./Kota.

URUSAN KEPENDUDUKAN

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui :

1) Program Kependudukan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Program Kependudukan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.759.741.825,00 atau 95,19%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan serta capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) melakukan penertiban data kependudukan terhadap data yang masih anomali (data ganda) sehingga banyak data penduduk wajib KTP telah dibersihkan/dihapus. Berdasarkan hasil penertiban data penduduk tersebut, jumlah penduduk wajib KTP di Jawa Timur sebanyak 29.606.800 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 26.552.479 orang (89,68%), sedangkan penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP berjumlah 3.054.321 orang (10,32%).

Tabel 4.14.1.15
Capaian Kinerja Kepemilikan KTP di Jawa Timur
Tahun 2012 – 2014

NO	STATUS KEPEMILIKAN KTP	THN 2012		THN 2013		THN 2014	
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
1	Wajib memiliki KTP	33.056.176		29.606.800		29.606.800	
2	Memiliki KTP	25.407.769	76,86	26.068.959	88,05	26.552.479	89,68
3	Belum memiliki KTP	7.648.407	23,14	3.537.841	11,95	3.054.321	10,32

Sumber : Bidang Kependudukan, Disnakertransduk prov. Jatim

- Pada tahun 2014, penduduk Jawa Timur yang wajib memiliki akta kelahiran berjumlah 9.597.980 orang. Jumlah wajib akta kelahiran ini semakin menurun seiring makin banyaknya penduduk yang telah mengurus akta. Penduduk yang memiliki akta kelahiran berjumlah 7.752.239 orang atau 80,77% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran, sedangkan penduduk yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 1.845.741 orang atau 19,23%. Di tahun 2013, dari 11.504.950 penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran, penduduk yang telah memiliki akta baru mencapai 65,67%, dan penduduk yang belum memiliki akta kelahiran masih 34,33%. Pendataan terhadap kepemilikan akta kelahiran banyak terkendala dikarenakan adanya kendala pada penduduk wajib Akta Kelahiran yang sedang dalam proses pengurusan. Di samping itu, masih banyak anak di panti-panti asuhan yang tidak diketahui orang tuanya ataupun asal usulnya sehingga tidak bisa melengkapi persyaratan terkait dokumen kependudukan, antara lain akta kelahiran.

Tabel 4.14.1.16
Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran
di Jawa Timur Tahun 2012 – 2014

NO	STATUS KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	THN 2012		THN 2013		THN 2014	
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
1	Wajib memiliki Akta Kelahiran	11,565,722		11,504,950		9,597,980	
2	Memiliki Akta Kelahiran	6,935,493	59.97	7,555,157	65.67	7,752,239	80.77
3	Belum memiliki Akta Kelahiran	4,630,229	40.03	3,949,793	34.33	1,845,741	19.23

Sumber : Bidang Kependudukan, Disnakertransduk Prov. Jatim

- Penerapan KTP-elektronik mulai dilaksanakan pada tahun 2011, dan hingga saat ini (tahun 2014) dari 29.606.800 orang penduduk wajib KTP, realisasi perekaman data KTP-

elektronik telah mencapai 26.552.479 orang atau 89,68%, sedangkan sisa yang belum terekam sebanyak 3.054.321 orang atau 10,32%.

Tabel 4.14.1.17
Capaian Kinerja Perekaman Data KTP-elektronik di Jawa Timur
Tahun 2013 - 2014

TAHUN	KAB./KOTA	JML WAJIB KTP	REALISASI PEREKAMAN DATA		SISA YG BELUM TEREKAM	
			JML	%	JML	%
2013	Kabupaten : Pcitan, P. rogo, T. galek, T. agung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, S. bondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, M. kerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, B. negoro, Tuban, Lmongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pmekasan, Smenep. Kota : Kediri, Blitar, Malang, P. linggo, Pasuruan, M. kerto, Madiun, Surabaya, Batu.	29,606,800	26,068,959	88.05	3,537,841	11.95
2014	38 Kab./Kota	29,606,800	26,552,479	89.68	3,054,321	10.32

Sumber : Bidang Kependudukan, Disnakertransduk Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

KTP-elektronik :

- Adanya edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/6626/SJ tanggal 18 Nopember 2014 perihal Klarifikasi Pemberitaan Media Massa terkait Kolom Agama di KTP-elektronik sehingga pencetakan KTP-elektronik dihentikan.
- Terbatasnya alat cetak/printer KTP-elektronik sehingga tidak optimal dalam pencetakan KTP-elektronik (hanya 2 unit per Kab./Kota).

- Jaringan konsolidasi data hasil perekaman KTP-elektronik seringkali mengalami *trouble*/berjalan lambat.

Akta kelahiran :

- Dari 1.845.741 orang atau 19,23% penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, sebagian diantaranya terdiri dari anak-anak yang terdapat di panti-panti asuhan, pondok pesantren dan lembaga sosial lainnya termasuk anak terlantar/gelandangan. Anak-anak tersebut tidak bisa melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada.

Upaya pemecahan masalah :

KTP-elektronik :

- Pemerintah Prov. Jawa Timur melalui Disnakertransduk Prov. Jawa Timur melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri : (1) Nomor 470/2825/106.06/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang pelayanan penerbitan KTP-elektronik, dan (2) Nomor 470/2960/106.06/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pemberlakuan KTP-non elektronik.

Akta Kelahiran :

- Dilakukan sosialisasi secara terus-menerus terhadap pentingnya akta kelahiran dalam memenuhi hak dasar anak untuk memberikan perlindungan status hak sipil anak.
- Perlu dilakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk menetapkan asal-usul anak dan menunjuk perwalian dari anak yang bersangkutan.

URUSAN KETRANSMIGRASIAN

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya realisasi pemberangkatan transmigrasi dan kemandirian transmigran

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui :

1) Program Mobilitas Penduduk

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Program Mobilitas Penduduk sebesar Rp. 5.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.492.996.763,00 atau 93,10%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan serta capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Secara keseluruhan, penempatan transmigrasi mengalami penurunan 58,97% untuk jumlah Kepala Keluarga (KK), dari semula 797 KK di tahun 2013 menjadi 327 KK di tahun 2014. Secara terinci, penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dari semula sebanyak 31 KK dan 100 jiwa, pada tahun 2014 menjadi 15 KK (turun 51,61%) dan 44 jiwa (turun 56%). Demikian pula dengan penempatan Transmigrasi Umum (TU), dimana semula di tahun 2013 telah menempatkan 766 KK dan 2.250 jiwa, pada tahun 2014 menjadi 312 KK (turun 59,27%) dan 919 jiwa (turun 59,16%). Penempatan Transmigrasi Umum tersebut sebagian besar merupakan kontribusi dari penempatan transmigran asal Jawa Timur di *Food Estate* kawasan Tanjung Buka, Delta Kayan Kab. Bulungan. Penempatan ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Prov. Jawa Timur dengan Prov. Kalimantan Timur dan Kab. Bulungan terkait kerjasama penempatan sejumlah 600 KK, yang ditempatkan mulai tahun 2012 s.d 2014, dengan jumlah penempatan sebanyak 200 KK per tahun.

Tabel 4.14.1.18
Capaian Kinerja Penempatan Transmigrasi Asal
Jawa Timur Tahun 2012 - 2014

NO	JENIS PENEMPATAN	THN 2012				THN 2013				THN 2014			
		KK		JIWA		KK		JIWA		KK		JIWA	
		JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)	50	7.47	146	7.27	31	3.89	100	4.26	15	4.59	44	4.57
2	Transmigrasi Umum (TU)	619	92.53	1,861	92.73	766	96.11	2,250	95.74	312	95.41	919	95.43
JUMLAH		669	100.00	2,007	100.00	797	100.00	2,350	100.00	327	100.00	963	100.00

Sumber : Bidang Mobilitas Penduduk, Disnakertransduk Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Tidak terealisasinya penempatan transmigran sebanyak 18 KK di tahun 2014, karena Lahan Usaha II belum berstatus "clear" sehingga Surat Perintah Penempatan (SPP) terbit sampai akhir bulan Desember 2014.
- Transmigran yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum didukung fasilitas bantuan baik dalam bentuk uang maupun perbekalan transmigrasi.

Upaya pemecahan masalah :

- Sisa penempatan transmigrasi sebanyak 18 KK akan diluncurkan pada tahun 2015.
- Agar transmigran dapat memperoleh bantuan perbekalan, Pemerintah Prov. Jawa Timur melalui Disnakertransduk Prov. Jawa Timur mengajukan permohonan bantuan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

d) Penghargaan

Tabel 4.14.1.19
Penghargaan di Bidang Mobilitas Penduduk
Tahun 2013 - 2014

NO	NAMA PENGHARGAAN	DALAM RANGKA	PIHAK YG MENYERAHKAN	WAKTU
1	Transmigration Award	Keberhasilan daerah berkenaan dengan kebijakan yang unggul dari daerah	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3 Desember 2013
2	Transmigration Award	Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang difasilitasi oleh Pemerintah Prov. Jawa Timur tanpa adanya bantuan dari Pusat	Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi	15 Desember 2014

Sumber : Bidang Mobilitas Penduduk, Disnakertransduk Prov. Jatim

15. URUSAN KOPERASI DAN UMKM

Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM ditujukan untuk mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.

15.1. DINAS KOPERASI DAN UMKM

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam koperasi serta kompetensi SDM Koperasi dan UMKM
- 2) Meningkatnya kinerja usaha Koperasi
- 3) Tumbuhnya Wirausaha Baru
- 4) Meningkatnya akses pemasaran bagi UMKM
- 5) Meningkatnya kualitas KSP/USP

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 26.407.963.242,00 terealisasi sebesar Rp 24.884.203.914,00 atau 94,23%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Program ini bertujuan memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, sehingga dapat mengurangi, hambatan usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha, dan partisipasi *stakeholders* dalam pengembangan kebijakan UMKM.

Tabel 4.15.1.1
Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akses
Pemasaran bagi UMKM

Indikator Kinerja	Realisasi					Target	Realisasi	Capaian
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Pertumbuhan omset UMKM yang telah difasilitasi pemasarannya	3	3,2	3,7	3,4	3,6	3,6%	6,3 %	175 %

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Timur

Dengan tumbuhnya omset UMKM maka akan menambah nilai barang dan jasa tersebut dan diharapkan akan menambah kontribusi PDRB UMKM. Pertumbuhan omset UMKM yang telah difasilitasi pemasarannya tercapai 6,3% dari jumlah omset UMKM yang telah difasilitasi pemasarannya tahun 2014 sejumlah Rp 1.375.925.474,- mengalami peningkatan sebesar Rp 81.674.105,- dari jumlah omset UMKM yang telah difasilitasi pemasarannya tahun 2013 sejumlah Rp 1.294.251.370,-. Dari target yang telah ditentukan sebesar 3,6 % dan realisasi 6,3 % sehingga diperoleh capaian 175 %.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta praktik bisnis dan persaingan usaha yang semakin ketat dan terkadang mengarah pada persaingan tidak sehat.

Upaya pemecahan Masalah

Peningkatan kualitas pelayanan kepada Koperasi dan UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap.

d) Penghargaan Nasional yang Diterima Terkait Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Penghargaan nasional pada tahun 2014 terkait Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif adalah Penghargaan Profesional Award Tahun 2014 Dalam Rangka HUT Ke-43 Korpri Provinsi Jawa Timur.

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah didukung dengan pagu anggaran Rp 60.841.222.258,00 dan pada akhir tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 55.353.016.451,00 atau 90,98%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dimaksudkan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Dengan semakin bertambahnya minat serta kemampuan untuk berwirausaha dan daya saing koperasi dan UMKM, maka diharapkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian berbasis kemasyarakatan di Jawa Timur.

Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan program ini antara lain Fasilitasi pemberdayaan UMKM melalui Inkubator bisnis sebanyak 120 calon pelaku UMKM, kegiatan pelatihan ketrampilan UMKM sebanyak 5.355 calon pelaku UMKM, sehingga pada akhir Tahun 2013 telah dilakukan penumbuhan jiwa kewirausahaan sebanyak 12.195 calon pelaku UMKM. Diproyeksikan bahwa sekitar 5% dari jumlah calon pelaku UMKM yang telah ditumbuhkembangkan jiwa kewirausahaannya sehingga menjadi wirausaha baru maka di Tahun 2014 diproksikan jumlah Wirausaha baru sekitar 635 UMKM dan pada Tahun 2013 diproksikan jumlah Wirausaha baru sekitar 610 UMKM. Sehingga pertumbuhan wirausaha baru pada Tahun 2014 adalah 4 % didapat dari penambahan WUB di tahun 2014 sebesar 35 WUB dibagi jumlah WUB tahun 2013.

Tabel 4.15.1.2
Target dan Capaian Sasaran Tumbuhnya Wirausaha Baru

Indikator Kinerja	Realisasi					Tar get	Realis asi	Capai an
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Pertumbuh an Wirausaha baru	3	3,3	3,6	4	4	4%	4 %	100 %

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Timur

Pada Tahun 2013 dilakukan kegiatan penyuluhan kewirausahaan dan keterampilan masyarakat UMKM di lingkungan hasil tembakau dengan sasaran 6.650 calon pelaku UMKM. Selain itu juga didukung kegiatan peningkatan kapasitas usaha koperasi di berbagai sektor, antara lain sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, serta pertambangan dan industri. Di Tahun 2014 dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam inkubator bisnis bagi UMKM sebanyak 60 calon pelaku UMKM, Terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan UMKM sebanyak 12.640 calon pelaku UMKM, sehingga pada akhir Tahun 2014 jumlah calon pelaku usaha yang telah diberikan pelatihan untuk menumbuh kembangkan jiwa wirausaha sebanyak 12.700 calon pelaku UMKM.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Kemampuan Koperasi dan UMKM untuk dapat mengoptimalkan sumber dayanya masih rendah.

Upaya Pemecahan Masalah

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi koperasi dan UMKM untuk dapat mengidentifikasi serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan, pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Koperasi dan UMKM di Jawa Timur, pengembangan jaringan usaha, dan pembangunan trading house produk KUMKM.

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 65.015.819.500,00 terealisasi sebesar Rp 56.201.865.714,00 atau 86,44%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada **lampiran matrik 16 kolom**.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM ini dimaksudkan untuk secara berkelanjutan memberikan fasilitasi bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Beberapa kegiatan prioritas yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan program ini, antara lain perkuatan permodalan bagi 1.000 koperasi wanita berprestasi dan 100 koperasi karyawan. Di mana masing-masing koperasi tersebut mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 25 Juta, dengan adanya bantuan permodalan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha serta mendorong produktivitas usaha koperasi dan anggotanya, terutama bagi koperasi wanita yang sebagian besar anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga.

Di sisi lain, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dilakukan pula melalui penguatan koperasi simpan pinjam sebagai alternatif pendukung pembiayaan bagi UMKM. Selain itu telah dilakukan pula berbagai bentuk pembinaan manajemen serta pelaporan keuangan bagi koperasi simpan pinjam serta penyelenggaraan expo pembiayaan KSP/USP-Koperasi yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait pembiayaan yang disediakan oleh KSP/USP-Koperasi serta secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam perkoperasian.

Selama tahun 2014, galeri cinderamata yang menyediakan berbagai jenis souvenir produk UMKM Jawa Timur dapat menghasilkan omset sebesar Rp 199 Juta. Sedangkan galeri batik yang menyediakan berbagai produk batik khas Jawa Timur menghasilkan omset sebesar Rp 1,1 Miliar. Galeri cinderamata dan batik ini menjadi wadah pemasaran bagi produk yang telah dihasilkan oleh koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Selain fasilitasi pemasaran melalui kedua gedung tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UMKM juga memfasilitasi UMKM di Jawa Timur untuk ikut serta dalam berbagai event pameran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama tahun 2014, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi 763 UMKM dalam 67 event pameran. Adapun produk-produk yang dipamerkan antara lain meubel, batik, bordir serta berbagai bentuk handycraft lainnya

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Masih banyaknya KSP/USP-Koperasi yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip perkoperasian dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Upaya Pemecahan Masalah

Mengoptimalkan keberadaan KPKS (Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam), baik yang ada di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kab./Kota. Selain itu, terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman tentang Koperasi Simpan Pinjam. Di samping itu, terus dilakukan pula penguatan fasilitasi *linkage program* antara KUMKM dengan perbankan untuk mengatasi permasalahan utama KUMKM dalam hal permodalan dan meningkatkan kemampuan serta kemandirian KUMKM dalam mengakses permodalan pada lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan.

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 49.633.440.000,00 terealisasi sebesar Rp 45.039.440.994,00 atau 90,74%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Kelembagaan dan organisasi Koperasi ditingkat primer dan sekunder diharapkan akan tertata, dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri, serta praktik berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang dikalangan masyarakat luas.

Tabel 4.15.1.3
Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Koperasi

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target	Realisasi	Capaian
	2009	2010	2011	2012	2013			
Persentase Koperasi Aktif	78	83	86	87	88	83%	87,98%	106 %
Pertumbuhan jumlah anggota Koperasi	2	3,85	3,36	2,78	2,5	2,6%	3,77%	145 %

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Timur

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah persentase koperasi aktif. Pada tahun 2014, persentase koperasi aktif mencapai 87,89 persen atau mencapai 106 persen dari

yang ditargetkan. Pada tahun 2014 jumlah koperasi aktif sejumlah 27.156 unit dari total 30.866 unit koperasi.

Pertumbuhan jumlah anggota koperasi tahun 2014 ditargetkan meningkat 2,6 persen dari tahun sebelumnya. Pada akhir tahun ini, pertumbuhan jumlah anggota koperasi sebesar 3,77 persen sehingga capaian realisasinya mencapai 145 persen dari target yang ditetapkan. Di mana pada tahun 2014 jumlah anggota koperasi mencapai 7.522.356 orang dari sebelumnya tahun 2013 sebesar 7.248.543 orang, sehingga terjadi peningkatan jumlah anggota sebanyak 273.813 orang atau tumbuh sebesar 3,77 persen dari 7.248.543. Hal ini menunjukkan besarnya animo masyarakat untuk berkoperasi.

Tabel 4.15.1.4
Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi SDM
Koperasi dan UMKM

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target	Realisasi	Capaian
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Persentase peserta Diklat UPT Diklat KUMKM yang lulus	75	77	77	78	79	80%	80%	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Timur

Pada tahun 2014 ini ditargetkan jumlah peserta diklat yang lulus diklat sebanyak 80% dari total peserta diklat. Dari realisasi yang dihasilkan, dapat pula menjadi evaluasi bagi pelaksanaan diklat. Semakin banyak jumlah peserta yang lulus materi diklat, mengindikasikan bahwa pelaksanaan diklat tersebut telah berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2014 telah terselenggara berbagai macam diklat, dengan total jumlah peserta diklat sebanyak 763 orang. Dari jumlah tersebut 611 orang diantaranya mampu memahami materi diklat dengan lulus ujian (minimal nilai 70 dari skala 100). Sehingga persentase peserta yang lulus materi diklat mencapai 80 persen, dan capaian kinerjanya 100 persen.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Masih rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi.

Upaya Pemecahan Masalah

Penguatan nilai-nilai dalam kelembagaan Koperasi menuju Koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan serta pendampingan, baik bagi para pengurus dan pengelola Koperasi maupun bagi anggotanya.

5) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 24.892.530.000,00 terealisasi sebesar Rp 23.080.259.330,00 atau 92,72%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain perkuatan permodalan bagi 600 Koperasi pondok pesantren yang mempunyai sektor usaha simpan pinjam. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat perekonomian di daerah pondok pesantren dengan meningkatkan peran serta dari santri-santri di pondok pesantren. Selain itu, telah dilakukan pula pengembangan usaha mikro berbasis sentra / klaster. Dengan pengembangan klaster ini diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar UMKM.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi terkait program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro sebagian besar merupakan akses terhadap sumberdaya produktif terutama permodalan. Untuk mengatasi hal ini, usaha skala mikro maupun Koperasi telah difasilitasi melalui bantuan permodalan, baik hibah maupun melalui dana bergulir dan kredit usaha rakyat (KUR). Selain itu, akan terus dikembangkan *linkage program* antara Koperasi dan UMKM dengan pihak perbankan, untuk menumbuhkan kemandirian Koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan dari lembaga perbankan.

16. URUSAN PENANAMAN MODAL

16.1. BADAN PENANAMAN MODAL

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya informasi peluang investasi yang prospektif dan meningkatnya kualitas promosi dan kerjasama bidang usaha baik dalam negeri maupun luar negeri serta meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu yang prima;
- 2) Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berkelanjutan dan meningkatnya kualitas sistem informasi di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi serta meningkatnya realisasi penanaman modal yang inklusif.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 12.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.268.817.234,00 atau 74,15% pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Capaian program berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dijabarkan sebagai berikut:

Capaian persentase peningkatan nilai izin prinsip PMA dan PMDN pada Tahun 2014 sebesar -2,65% atau Rp. 110,63 Trilyun menurun jika dibandingkan Tahun 2013 sebesar 48,1% atau Rp. 113,64 Trilyun. Terjadi penurunan minat investasi di Jawa Timur disebabkan oleh kondisi perekonomian dunia yang belum stabil dengan inflasi di Indonesia mencapai 6,5% dan harga minyak dunia yang mencapai \$ 50 per barrel serta kondisi politik di Indonesia yang menghadapi penyelenggaraan Pilkada Anggota Legislatif tingkat Pusat sampai Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden, sehingga investor menunda investasinya di Indonesia

dan juga disertai menurunnya kegiatan promosi investasi di luar negeri. Secara rinci PMA mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 74,69 Trilyun (Tahun 2013) menjadi Rp. 74,91 Trilyun (Tahun 2014) sedangkan PMDN mengalami penurunan yaitu dari Rp. 38,95 Trilyun (Tahun 2013) menjadi Rp. 35,72 Trilyun (Tahun 2014). Dengan rincian sebagai berikut:

- PMA sebanyak 183 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 74,91 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 24.720 tenaga kerja;
- PMDN sebanyak 514 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 35,72 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 37.832 tenaga kerja.

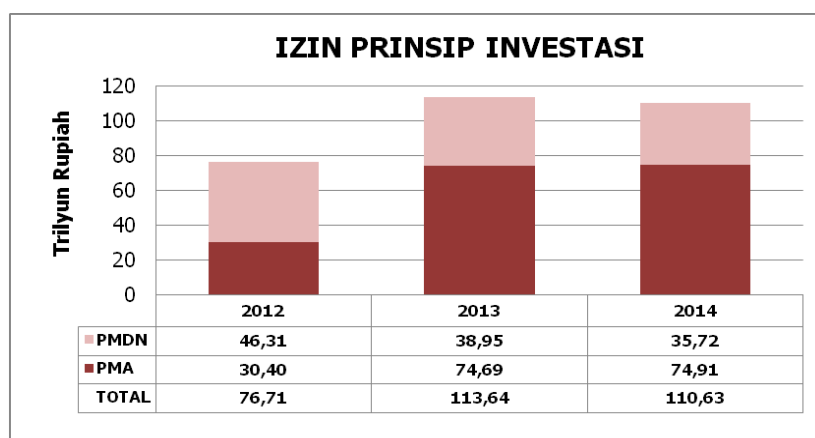
Perkembangan investasi berdasarkan izin prinsip dari Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel dan *barchart* di bawah ini:

Tabel 4.16.1.1
Capaian Kinerja Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi Tahun 2012 – 2014

	2012			2013			2014		
	Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja	Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja	Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja
PMA	185	30,40	18.099	174	74,69	25.213	183	74,91	24.720
PMDN	312	46,31	41.266	252	38,95	46.879	514	35,72	37.832
TOTAL	497	76,71	59.365	426	113,64	72.092	697	110,63	62.552

Sumber Data : BPM Prov. Jatim

Gambar 4.16.1.1
Perkembangan Persetujuan Nilai Izin Prinsip Investasi
PMA dan PMDN dari Tahun 2012 – 2014



Sumber Data : BPM Prov. Jatim

Capaian UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BPM Provinsi Jawa Timur dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Persentase terbitnya izin dan non izin sesuai SOP pada Tahun 2014 sebesar 100%;

Pada Tahun 2014 capaian kinerja UPT P2T adalah: menerbitkan 35.153 izin/non izin meningkat 8,18% dibandingkan Tahun 2013 sebesar 32.496 izin/non izin dari 17 sektor, dengan nilai investasi Rp. 20,88 Trilyun menurun 21,62% dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp. 26,64 Trilyun dan menyerap 49.345 tenaga kerja menurun 13,20% dibandingkan Tahun 2013 sebesar 56.850 tenaga kerja.

Di sektor penanaman modal izin prinsip yang diterbitkan UPT P2T 156 izin pada Tahun 2014 sama dengan Tahun 2013 namun nilai investasi sebesar Rp. 16,88 Trilyun pada Tahun 2014 menurun 27,52% dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp. 23,29 Trilyun dan jumlah tenaga kerja sebesar 39.057 pada Tahun 2014 menurun 15,35% dibandingkan Tahun 2013 sebesar 46.140.

- Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu pada Tahun 2014 mencapai nilai sebesar 85,20 yang meliputi 14 unsur pelayanan yang ditetapkan dalam peraturan Kemenpan.

Perkembangan izin P2T dari Tahun 2012 – 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16.1.2
Perkembangan Realisasi Izin P2T Tahun 2012 – 2014

NO	SEKTOR / BIDANG USAHA	TH. 2012			TH 2013			TH 2014		
		JML IZIN	INV. (Rp.Milyar)	TK (Orng)	JML IZIN	INV. (Rp.Milyar)	TK (Orng)	JML IZIN	INV. (Rp.Milyar)	TK (Orng)
1	BAPPEDA	32	-	-	34	-	-	71	-	-
2	PENANAMAN MODAL	161	23.173,05	42.412	156	23.286,67	46.140	156	16.878,08	39.057
3	KESEHATAN	31.970	171,59	32.980	24.316	131,66	323	27.066	600,25	626
4	PU BINA MARGA	82	-	-	58	-	-	25	-	-
5	PU PENGAIRAN	132	-	-	141	-	-	97	-	-

NO	SEKTOR / BIDANG USAHA	TH. 2012			TH 2013			TH 2014		
		JML IZIN	INV. (Rp.Milyar)	TK (Orng)	JML IZIN	INV. (Rp.Milyar)	TK (Orng)	JML IZIN	INV. (Rp.Milyar)	TK (Orng)
6	PERHUBUNGAN & LLAJ	573	-	-	541	-	-	456	-	-
7	SOSIAL	427	-	-	537	-	-	502	-	-
8	NAKERTRANSDUK	1.944	-	-	1.873	-	-	1.996	-	-
9	KOPRASI & UMKM	70	49,56	1.400	77	38,53	840	92	44,01	1.160
10	KEBUD & PERIWISATA	148	-	-	147	-	-	178	-	-
11	PERTANIAN	71	-	-	63	-	-	89	-	-
12	PETERNAKAN	1.452	-	-	1.684	-	-	1.722	-	-
13	PERIKANAN	680	-	-	1.342	-	-	1.158	-	-
14	KEHUTANAN	31	174,65	4.324	77	482,01	2.676	112	2.125,59	3.144
15	ESDM	974	-	-	915	-	-	852	-	-
16	PERINDAG	61	2.361,13	10.382	501	2.701,73	6.871	545	1.229,48	5.358
17	LINGKUNGAN HIDUP	35	-	-	34	-	-	36	-	-
JUMLAH		38.843	25.929,98	91.498	32.496	26.640,60	56.850	35.153	20.877,42	49.345

Sumber Data : UPT P2T

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama kemitraan antara PMA dan PMDN dengan UMKMK;
- Masih terbatasnya penyediaan lahan di kawasan industri dalam rangka menampung beralihnya perusahaan diluar kawasan industri dan perusahaan baru;
- Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan penanaman modal di daerah (Kabupaten/Kota);
- Kurangnya informasi peluang penanaman modal secara detail yang dituangkan dalam project profile;
- Kurang memadainya kapasitas dan kualitas SDM dan infrastuktur penunjang investasi.

Upaya Pemecahan Masalah:

- Mendorong pelaksanaan kerjasama dengan pola kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKMK agar lebih optimal;
- Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan lahan pembangunan di sektor kawasan industri;
- Meningkatkan daya saing daerah dalam rangka menarik penanaman modal ke daerah;
- Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota guna mendapatkan data yang dapat mendukung project profile;
- Meningkatkan SDM aparatur bidang penanaman modal dengan melakukan pelatihan di bidang penanaman modal.

d) Penghargaan Nasional Yang Diterima

Peringkat I Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Provinsi Terbaik Tahun 2014 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta tanggal 07 Oktober 2014

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 18.007.755.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.056.586.471,00 atau 89,16% pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Capaian program berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dijabarkan sebagai berikut:

Capaian persentase peningkatan realisasi investasi PMA, PMDN & PMDN Non Fasilitas pada Tahun 2014 sebesar -0,02% atau Rp. 145,03 Trilyun menurun jika dibandingkan Tahun 2013 sebesar 8,7% atau Rp. 145,06 Trilyun. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian dunia yang belum stabil dengan inflasi di Indonesia mencapai 6,5% dan harga minyak dunia yang mencapai \$ 50 per

barrel serta kondisi politik di Indonesia yang menghadapi penyelenggaraan Pilkada Anggota Legislatif tingkat Pusat sampai Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden, sehingga investor menunggu merealisasikan investasinya di Indonesia. Secara rinci PMA mengalami penurunan yaitu dari Rp. 33,63 Trilyun (Tahun 2013) menjadi Rp. 19,29 Trilyun (Tahun 2014) sedangkan PMDN mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 34,85 Trilyun (Tahun 2013) menjadi Rp. 42,55 Trilyun (Tahun 2014) dan PMDN Non Fasilitas mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 76,58 Trilyun (Tahun 2013) menjadi Rp. 83,19 Trilyun (Tahun 2014). Dengan rincian sebagai berikut:

- PMA sebanyak 245 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 19,29 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 36.725 tenaga kerja;
- PMDN sebanyak 192 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 42,55 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 41.203 tenaga kerja;
- PMDN Non Fasilitas sebanyak 124.714 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 83,19 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 413.325 tenaga kerja.

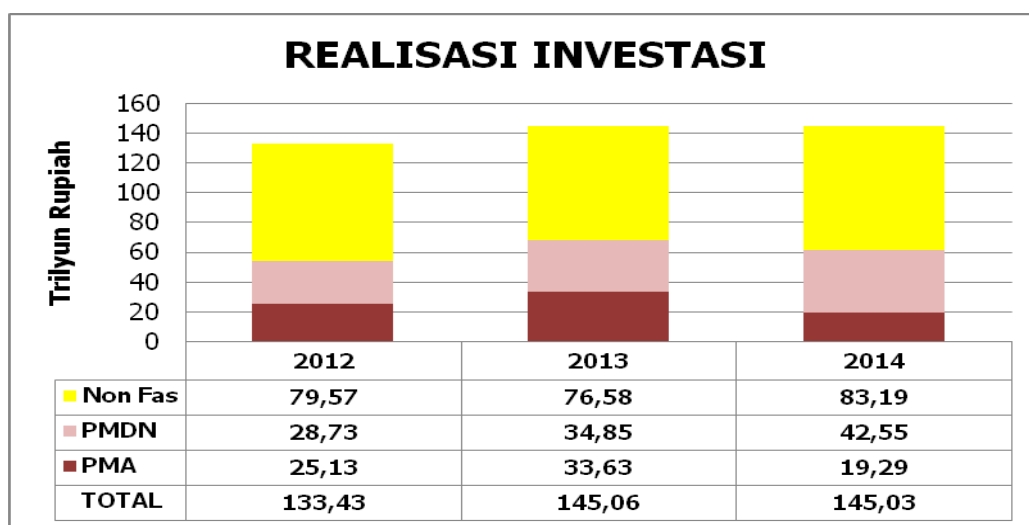
Perkembangan realisasi investasi berdasarkan LKPM dari Tahun 2012 – 2014 dapat dilihat pada tabel dan barchart di bawah ini:

Tabel 4.16.1.3
Capaian Kinerja Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Invetasi Tahun 2012 – 2014

	2012			2013			2014		
	Proyek (Unit Usaha)	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja	Proyek (Unit Usaha)	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja	Proyek (Unit Usaha)	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja
PMA	264	25,13	39.952	278	33,63	47.466	245	19,29	36.725
PMDN	213	28,73	48.642	234	34,85	52.530	192	42,55	41.203
PMDN NON FAS	67.508	79,57	319.225	66.488	76,58	501.768	124.714	83,19	413.325
TOTAL	67.985	133,43	407.819	67.000	145,06	502.205	125.151	145,03	491.253

Sumber Data : BPM Prov. Jatim

Gambar 4.16.1.2
Perkembangan Nilai Realisasi Investasi
PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas dari Tahun 2012 – 2014



Sumber Data : BPM Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Masih tingginya lag (kelambatan) investasi antar izin prinsip dan realisasi investasi;
- Masih kurangnya tingkat kepatuhan perusahaan PMA dan PMDN dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- Kurangnya koordinasi PDKPM Kabupaten/Kota Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan inventarisasi realisasi penanaman modal daerah (PMA dan PMDN) sebagai realisasi kinerja penanaman modal di Jawa Timur;
- Inkonsistensi peraturan penanaman modal antar kementerian sehingga berdampak pada pelaksanaan di daerah.

Upaya Pemecahan Masalah:

- Meningkatkan pelayanan dan konsultasi permasalahan-permasalahan di bidang penanaman modal melalui helpdesk;
- Meningkatkan pemahaman bagi penanam modal akan kewajibannya setelah mendapatkan perizinan;

- Melakukan koordinasi dan pembinaan yang lebih intensif dengan instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dalam rangka memperlancar pelaksanaan penanaman modal;
- Memberikan masukan terhadap kementerian terkait.

c. Capaian Kinerja UPT Pengadaan Barang/Jasa Badan penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Pada Tahun 2014 telah dibentuk UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 16 UPT P2BJ merupakan UPT yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional layanan pengadaan barang/jasa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPM Provinsi Jawa Timur. Pada tahun pertama capaian kinerja UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah:

1. Jumlah paket pemilihan penyedia barang/jasa Tahun 2014 yang diserahkan oleh SKPD kepada UPT P2BJ sebanyak 1304 paket dan dapat diselesaikan sebanyak 1300 paket sehingga capaiannya 99,69% sedangkan 4 paket dikembalikan ke SKPD karena terlambatnya pengajuan paket-paket tersebut sehingga waktu pelaksanaannya dirasa kurang oleh SKPD terkait. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16.1.4

Jumlah Paket Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun 2014

No.	Jenis Pengadaan	Jumlah Pengajuan Paket	Jumlah Paket Dalam Proses	Jumlah Paket Selesai Proses
1	Barang	490	0	486
2	Konstruksi	373	0	373

No.	Jenis Pengadaan	Jumlah Pengajuan Paket	Jumlah Paket Dalam Proses	Jumlah Paket Selesai Proses
3	Jasa Konsultansi	288	0	288
4	Jasa Lainnya	153	0	153
	TOTAL	1304	0	1300

Sumber Data : UPT P2BJ

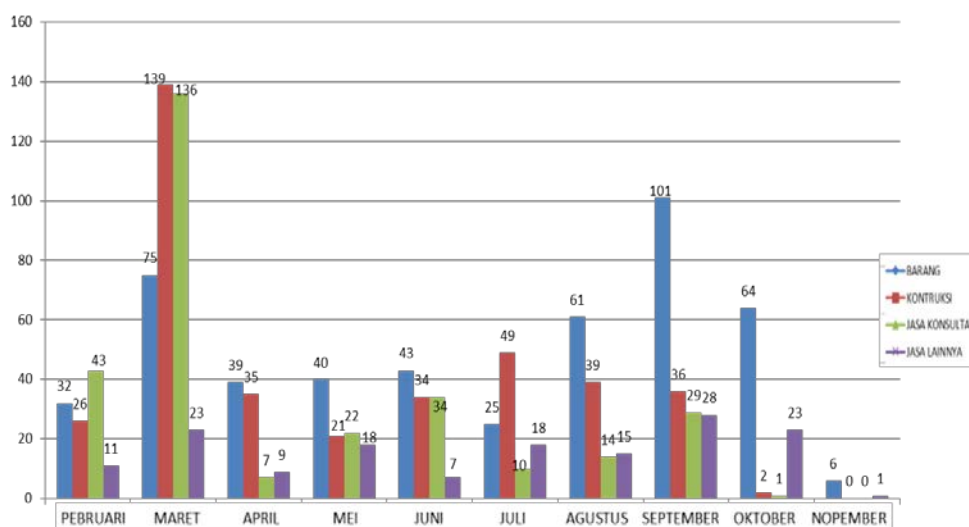
2. Jumlah anggaran dari paket pekerjaan tersebut total anggaran berdasarkan HPS sebesar Rp. 1.908.413.719,00 dan sedangkan nilai penawaran sebesar Rp. 1.699.904.474,00 sehingga terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 208.509.245,00 atau 10,93% Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16.1.5
Perbandingan Antara Nilai HPS dan Nilai Penawaran
Tahun 2014

NO	JENIS PENGADAAN	NILAI HPS	NILAI PENAWARAN	PENGHEMATAN
1	Barang	827.267.033,00	666.954.570,00	67.296.052,00
2	Konstruksi	920.040.608,00	790.272.094,00	127.235.284,00
3	Jasa Konsultansi	72.925.321,00	61.515.487,00	10.062.488,00
4	Jasa Lainnya	88.180.757,00	75.959.325,00	3.915.421,00
	TOTAL	1.908.413.719,00	1.699.904.474,00	208.509.245,00

Sumber Data : UPT P2BJ

Gambar 4.16.1.3
Progres pengajuan paket per bulan Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat dalam Grafik



Sumber Data : UPT P2BJ

17. URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

17.1. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URUSAN KEBUDAYAAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya
- 2) Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian nilai sejarah, peninggalan kepurbakalaan dan Benda Cagar Budaya
- 3) Meningkatnya pengelolaan museum daerah

b. Program

Capaian pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui 3 program, yaitu : 1) program pengembangan nilai budaya, 2) program pengelolaan kekayaan budaya, serta 3) program pengelolaan keragaman budaya. Tingkat capaian per program dapat uraikan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Nilai Budaya

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 1.445.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.439.676.600,00 atau 99,63%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan seni budaya lokal
- fasilitasi kegiatan kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui kegiatan sarasehan budaya
- pemberian anugerah terhadap seniman dan budayawan melalui penghargaan seniman/budayawan berprestasi, dan Lembaga peduli seni yang dilaksanakan setiap tahun
- pelestarian kesenian tradisional melalui pemberian dukungan kepada seniman/budayawan dalam bentuk taliasih

Hasil dari program ini adalah fasilitasi pelaku/kelompok budaya dalam menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi nilai-nilai

budaya lokal dalam bentuk sarasehan budaya. Disamping itu juga pemberian anugerah/penghargaan terhadap seniman dan budayawan berprestasi, serta pemberian dukungan dalam bentuk taliasih kepada seniman/budayawan yang peduli terhadap pelestarian kesenian tradisonal.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17.1.1
Capaian Program Pengembangan Nilai Budaya

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pelaku/kelompok budaya yang berpartisipasi dalam menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi nilai-nilai budaya lokal	orang	150	100	50	75	75
2.	Seniman/budayawan yang diberi penghargaan/dukungan dalam pelestarian seni budaya lokal	orang	513	513	513	513	513

sumber : Disbudpar Prov. Jatim

c) **Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah**

Permasalahan:

- Masih belum optimalnya kegiatan dokumentasi dan inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal sebagai bahan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal
- Belum optimalnya aktualisasi kesenian tradisional

Upaya pemecahan masalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan dewan kesenian Kab/Kota dan Instansi terkait dalam pendokumentasian dan pedataan seni tradisi dan budaya lokal
- Optimalisasi penampilan kesenian tradisional

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 12.850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.541.023.562,00 atau 97,60%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

1. meningkatnya pengelolaan museum daerah
2. meningkatnya pelestarian benda cagar budaya
3. meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat dalam pemahaman nilai sejarah dan wawasan kebangsaan.

Hasil dari pengelolaan museum daerah meliputi benda/koleksi museum yang direstorasi/dikonservasi, pengenalan koleksi museum melalui pameran dan peragaan koleksi, pengunjung museum

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17.1.2
Pengelolaan Museum Tantular

No	URAIAN	Satuan	Tahun				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah koleksi museum	buah	15.028	15.051	15.074	15.081	15.095
	Jml yang sudah dikonservasi/direstorasi	buah	470	715	965	1220	1925
	Persentase yang dikonservasi/restorasi	%	3,13	4,75	6,40	8,09	12,75
2.	Pameran, peragaan koleksi museum	kali	21	30	26	26	25
3.	Pengunjung Museum	orang	40.471	55.166	67.785	67.929	70.207

Hasil dari pelestarian benda cagar budaya diukur melalui persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 4.17.1.3**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Jawa Timur**

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diestarkan	7.056	7.056	7.056	7.138	7.141
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki Daerah	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
Persentase Benda Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	69,09	69,09	69,09	69,89	69,92

sumber : BPCB Trowulan diolah

Hasil dari peningkatan partisipasi dan apresiasi masyarakat dalam pemahaman nilai sejarah dan wawasan kebangsaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.17.1.4**Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan**

No	URAIAN	Satuan	Tahun				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jml masyarakat yang mengapresiasi pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan (Lawatan sejarah, Jelajah museum bagi siswa, Visualisasi fragmen kesejarahan, workshop penulisan naskah kesejarahan untuk siswa,)	Orang	480	352	478	460	558
2.	Jml masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan kekayaan budaya (sosialisasi sadar lestari situs/percandian, pameran kepurbakalaan, peningkatan wawasan BCB terhadap siswa SLTA)	Orang	400	300	360	757	352

Sumber : Disbudpar Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya masih belum berkembang
- Kemampuan teknis pengelola museum dari masih kurang, baik dalam teknik perawatan maupun penataan.

Upaya pemecahan masalah :

- Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang melibat masyarakat sekitar dan generasi muda, melalui kegiatan lawatan sejarah, jelajah museum bagi siswa, visualisasi fragmen kesejarahan, workshop penulisan naskah kesejarahan untuk siswa, sosialisasi sadar lestari situs/percandian, pameran kepurbakalaan, peningkatan wawasan BCB terhadap siswa SLTA
- Peningkatan kemampuan teknis pengelola museum daerah melalui bimbingan teknis, workshop agar warisan budaya bisa berfungsi optimal sebagai sarana edukasi dan rekreasi

d) Penghargaan yang diterima :

- Museum Provinsi Terbaik Tahun 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diserahkan oleh Wakil Mendikbud
- Festival dalang Muda Tingkat Nasional oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai 5 Penyaji Terbaik atas nama Ki Purnawan dari Kab. Mojokerto, Gaya Pakeliran : Jawa Timuran dengan lakon : Bisma Gugur
- Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional oleh Museum Bank Indonesia Jakarta sebagai 5 Penyaji Terbaik atas nama Ike Nur Kumalasari dari Kab. Mojokerto dengan lakon : Jamuskalimosodo

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a) Pagu Anggaran dan Realisasi

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 26.220.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.554.725.076,00 atau 97,46%, pagu dan

realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap kesenian dan budaya daerah

Pagelaran/Penampilan Kesenian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mencerminkan semakin meningkatnya apresiasi dan kreativitas para seniman terhadap kesenian dan budaya daerah ditunjang dengan sarana yang memadai. Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

Tabel 4.17.1.5

Jumlah Pergelaran/Penampilan kesenian di Jawa Timur

Uraian	Satuan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
Pergelaran/Penampilan Kesenian	Kali	75	129	131	158	170

sumber : Disbudpar Prov. Jatim

Tabel 4.17.1.6

Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Jawa Timur

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1.258	1.260	1.260	1.315	1.322

sumber : Disbudpar Prov. Jatim

Tabel 4.17.1.7

Jumlah Kelompok Kesenian di Jawa Timur

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Seni Lukis	39	39	39	39	167
Tari	313	313	313	306	712
Teater	911	911	911	911	924
Musik	1.545	1.545	1.545	1.545	4.234
Jumlah	2.808	2.808	2.808	2.801	6.037

sumber : Disbudpar Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Masih terbatasnya ruang-ruang publik pengembangan kesenian di daerah untuk mendorong perkembangan dan apresiasi kesenian tradisional/lokal daerah

Upaya pemecahan masalah :

- Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan budaya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas gelar seni budaya lokal pada event regional, nasional, internasional

d) Penghargaan yang diterima :

- Pawai Seni dan Budaya Kreatif oleh Wakil Presiden RI di Istana Negara sebagai Penampil Terbaik Tanpa Jenjang
- Parade Tari Nusantara oleh Kemenparekraf di TMII Jakarta menampilkan Tari Sesandhuran dari Kab. Tuban sebagai 13 Penyaji Unggulan, 5 Penata Tari Unggulan dan 5 Penata Rias dan Busana Unggulan
- Parade Lagu Daerah Tingkat Nasional oleh Direktur TMII Jakarta di TMII Jakarta dengan judul lagu Keraton Sumenep dari Kab. Sumenep sebagai Penyanyi Unggulan Tanpa Jenjang, Pencipta Unggulan Tanpa Jenjang, Penata Musik Unggulan Tanpa Jenjang dan Penyaji Unggulan Tanpa Jenjang
- Lomba Nyinden Tingkat DIY, Jateng dan Jatim oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya di Yogyakarta sebagai Nominator
- Festival dalang Muda Tingkat Nasional oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai 5 Penyaji Terbaik atas nama Ki Purnawan dari Kab. Mojokerto, Gaya Pakeliran : Jawa Timuran dengan lakon : Bisma Gugur
- Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional oleh Museum Bank Indonesia Jakarta sebagai 5 Penyaji Terbaik atas nama Ike Nur Kumalasari dari Kab. Mojokerto dengan lakon : Jamuskalimosodo

URUSAN PARIWISATA

a. Sasaran Tahun 2014 (Renstra SKPD 2009-2014)

- 1) Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Jawa Timur
- 2) Meningkatnya perolehan devisa dari wisatawan mancanegara dan pengeluaran wisatawan nusantara di Jawa Timur
- 3) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur
- 4) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 12.556.888.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.142.232.867,00 atau 96,70%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
- Meningkatnya kontribusi PDRB pariwisata
- Meningkatnya promosi Luar Negeri

Hasil pelaksanaan program ini dicerminkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sekitar 54,07% yaitu dari 300.909 wisman pada tahun 2013 menjadi 463.596 wisman pada tahun 2014. Pasar Utama wisatawan mancanegara yang ke Jawa Timur didominasi oleh Wisatawan dari Malaysia, Singapura, Cina, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Australia

Tahun 2014 wisatawan nusantara di Jawa Timur sebanyak 45.251.383 meningkat 14,03% dari tahun 2013 yaitu sebanyak 39.682.337 wisnus. Kunjungan atau pergerakan wisatawan nusantara di Jawa Timur memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap

perkembangan wisatawan nusantara secara nasional, bahkan Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar dibanding provinsi lainnya. Segmen pasar ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda ekonomi pariwisata. Untuk itu perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan pariwisata nusantara.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17.1.8
Perkembangan Kunjungan Wisatawan 2010-2014

Uraian	Satuan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1. Jml wisman	orang	218.709	224.317	269.943	300.909	463.596
Pertumbuhan	%	0,90	2,56	20,34	11,47	54,07
2. Jml wisnus	orang	25.148.283	27.297.828	33.224.659	39.682.337	45.251.383
Pertumbuhan	%	8,49	8,55	21,71	19,44	14,03

Sumber : Disbudpar Prov. Jatim

Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara berdampak pada kinerja industri pariwisata yang diukur melalui PDRB sektor pariwisata. PDRB ADHB (seri 2000) sektor pariwisata tahun 2014 mencapai 101,97 triliun rupiah, naik 15,56% dari tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB ADHB Jawa Timur tahun 2014 sebesar 7,89% pertahun.

Tabel 4.17.1.9
Perkembangan PDRB-ADHB (seri 2000)

PDRB-ADHB seri 2000	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1. Sektor Pariwisata	T Rp	57,02	66,52	75,61	88,16	101,97
2. PDRB ADHB Jatim	T Rp	778,56	884,50	1.001,72	1.136,33	1.292,00
3. Kontribusi pariwisata	%	7,32	7,52	7,55	7,76	7,89

Sumber : BPS Prov. Jatim diolah Disbudpar Prov. Jatim

Hasil promosi dalam dan luar negeri melalui pelayanan informasi dan penyebaran bahan promosi pada pengunjung stand Jawa Timur pada event promosi berskala nasional maupun internasional. Juga penjualan paket melalui *direct selling*/promotion, travex.

Tabel 4.17.1.10
Hasil Promosi Pariwisata

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014
1.	Promosi dalam negeri				
	- kontrak bisnis / appointment	Pax	1.038	1.171	5.300
	- nilai transaksi	Milyar Rp.	31	37,2	44,5
2.	Promosi luar negeri				
	- kontrak bisnis / appointment	Pax	46	-	125
	- nilai transaksi	Milyar Rp.	US \$ 355,7	5,4	0,65

sumber : Disbudpar Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Kinjungan wisman ke Jawa Timur walaupun telah menunjukkan kinerja yang membaik namun masih belum optimal, baru mencapai 5% dari total wisman ke Indonesia
- Semakin ketatnya persaingan antarnegara, antarprovinsi dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, yang berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Upaya pemecahan masalah :

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan pengembangan destinasi pariwisata sangat penting mengingat strategi tersebut mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas dan meningkatkan promosi luar negeri terutama pada pasar potensial
- Meningkatkan promosi luar negeri, terutama pada pasar potensial

d) Penghargaan yang diterima :

- **Lomba Pokdarwis Tingkat Nasional** oleh Kemenparekraf di Tanah Toraja Sulawesi selatan

PERINGKAT	NAMA POKDARWIS	NILAI
Juara I	Gubugklakah (Kab. Malang)	89,34
Harapan I	Podang Lestari (Kab. Kediri)	83,44

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 9.143.112.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.904.614.468,00 atau 97,39%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Meningkatnya usaha pariwisata
- Meningkatnya penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara, dan pengeluaran wisatawan nusantara
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kerja bidang pariwisata

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

Daya Tarik Wisata (DTW) di Jatim tahun 2013 sebanyak 767 dtw, bertambah 5 (dtw buatan) menjadi 772 DTW, yang terdiri 265 dtw alam, 308 dtw budaya, dan 199 dtw buatan. Jumlah akomodasi (hotel bintang dan non bintang) sebanyak 1.511 unit (naik 9,8% dr th 2013 sebanyak 1.376 unit) dengan kapasitas 41.374 kamar (naik 13,02% dr th 2013 sebanyak 36.607 kamar). 102 hotel bintang sudah terkalsifikasi, yang terdiri Hotel Bintang 1 sebanyak 19 unit 820 kamar, Bintang 2 sebanyak 12 unit 882 kamar, Bintang 3 sebanyak 40 unit 4.132 kamar, Bintang 5 sebanyak 7 unit 1.649 kamar. Restoran dan rumah makan sebanyak 1.728 unit, terdiri restoran 571 unit dan rumah makan 1.157 unit. Dari 571 restoran, sebanyak 77 unit (13,5%) sudah klasifikasi dan 494 unit belum klasifikasi.

Tabel 4.17.1.11

perkembangan Usaha Pariwisata

No	Usaha Pariwisata	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Daya Tark Wisata (DTW)	Obyek	763	763	765	767	772
	- DTW Alam	Obyek	264	264	264	265	265
	- DTW Budaya	Obyek	307	307	308	308	308

No	Usaha Pariwisata	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
	- DTW Buatan	Obyek	192	192	193	194	199
2.	Akomodasi	Unit	1.275	1.288	1.309	1.376	1.511
	a. Hotel Bintang	Unit	71	71	75	90	102
	b. Hotel /non bintang	Unit	1.204	1.217	1.234	1.286	1.409
3.	Makanan dan minuman	Unit	1.775	1.759	1.902	2.045	2.425
	a. Restoran	Unit	48	32	48	191	571
	b. Rumah makan	Unit	1.727	1.727	1.854	1.854	1.854
4.	Usaha Perjalanan Wisata	Unit	533	530	532	532	717

sumber : Disbudpar Prov. Jatim

Penerimaan devisa dari pengeluaran wisman sebesar US\$ 409,90 juta naik 84,8% dari tahun 2013 sebesar US\$ 221,81 juta. Sedangkan total pengeluaran wisnus sebesar 18,70 triliun rupiah, naik 35,18% dari tahun 2013 sebesar 13,84 triliun rupiah.

Tabel 4.17.1.12

Perkembangan Penerimaan Devisa dan Pengeluaran Wisnus

Uraian		Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Devisa dari wisman	juta US\$	164,98	212,90	176,06	221,81	409,90
	Pertumbuhan	%	2,23	29,05	-17,30	25,98	84,80
2	Pengeluaran wisnus	T Rp	5,30	7,24	14,31	13,84	18,71
	Pertumbuhan	%		36,70	97,60	-3,32	35,27

Sumber : BPS Prov. Jatim diolah Disbudpar Prov. Jatim

Tenaga kerja yang terserap pada usaha/industri pariwisata sampai dengan tahun 2014 tercatat 200.893 orang naik sekitar 3,3% dari tahun 2013 sebanyak 194.479 orang. Tenaga kerja yang sudah memilikisertifikasi profesi bidang pariwisata sampai dengan tahun 2014 sebanyak 4.990 orang.

Tabel 4.17.1.13
Perkembangan Tenaga Kerja Pariwisata

Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1. Tenaga kerja usaha pariwisata	orang	186.807	188.358	192.153	194.479	200.893
Pertumbuhan	%	3,40	0,83	2,01	1,21	3,30
2. Jml TK yg bersertifikasi profesi	orang	650	2.150	3.930	4.940	4.990

sumber : Disbudpar Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Rata pengeluaran wisman dan wisnus perkunjungan masih dibawah rata-rata nasional
- Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi masih kurang
- Kualitas layanan usaha pariwisata belum optimal.

Upaya pemecahan masalah :

- Meningkatkan kemampuan tenaga kerja industri pariwisata dalam pelayanan sehingga meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan melalui pelatihan dan bimtek peningkatan kemampuan teknis
- Meningkatkan fasilitasi uji kompetensi melalui sertifikasi profesi bidang pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
- Meningkatkan kordinasi strategis dengan instansi terkait dalam penyediaan sarana dan parasara pariwisata

d) Penghargaan yang diterima :

- Lomba Desa Wisata Tingkat Nasional oleh Kemenparekraf

JUARA	DESA WISATA
Juara 3	Desa Gubugklakah, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang
Juara 8	Desa Poncokusumo, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang

- *Travel Club Tourism Awards (TCTA)* oleh L John Tourism dengan Penghargaan *Best Achievement* oleh L John Tourism

4) Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 21.377.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.678.801.573,00 atau 96,73%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan
- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
- Tersedianya database kebudayaan dan pariwisata
- Meningkatnya kualitas SDM aparatur
- Meningkatnya layanan informasi dan publikasi

Hasil pelaksanaan program manajemen kebudayaan dan pariwisata meliputi penyediaan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA termasuk perubahannya), pelaporan hasil evaluasi (LAKIP, LKPJ, LPPD, UKP4), laporan keuangan yang akuntabel (LRA, Neraca, CALK), database kebudayaan dan pariwisata, peningkatan kualitas SDM aparatur serta dukungan teknis lainnya terhadap bidang dan UPT antara lain layanan informasi dan publikasi.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.17.1.14

Capaian Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata

Uraian	Satuan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran	dok	4	4	4	4	5
jumlah pelaporan evaluasi	dok	4	4	4	4	4

Uraian	Satuan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
jumlah pelaporan keuangan yang akuntabel	dok	3	3	3	3	3
jumlah dokumen database kebudayaan dan pariwisata (Budpar Jatim dalam angka)	dok	1	1	1	1	1
jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	-	-	800	775	1.100
jumlah pendukung layanan informasi dan publikasi (media cetak, media elektronik, pagelaran wayang kulit, pagelaran ludruk)	kali	-	-	7	11	30

Sumber : Disbudpar Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Sinkronisasi program kegiatan antar Provinsi dengan Kab/Kota dengan SKPD Provinsi terkait belum optimal
- Pelaporan kinerja kegiatan maupun keuangan bidang dan UPT belum sepenuhnya tepat waktu
- Database kebudayaan dan pariwisata penyajiannya masih belum sepenuhnya tepat waktu
- Pelayanan informasi dan publikasi masih kurang optimal

Upaya pemecahan masalah :

- Meningkatkan koordinasiteknis dengan instansi terkait melalui forum FGD, Rakernis dll
- Mendorong bidang dan UPT untuk meningkatkan kinerja pelaporannya
- Meningkatkan koordinasi untuk merumuskan sistem dan mekanisme pengumpulan data yang cepat
- Meningkatkan ketersediaan bahan informasi dan publikasi

18. BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan ditujukan untuk meningkatkan pemuda dan olahragawan yang berprestasi

18.1 DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya pemuda pelopor yang berprestasi
- 2) Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Pemasalan Olahraga

b. Program

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dengan pagu Rp 1.441.800.000,00 terealisasi sebesar 92,45% atau Rp 1.332.951.879,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan telah menghasilkan informasi yang akurat dan objektif untuk penyusunan kebijakan dalam membuat keputusan demi penyempurnaan program kepemudaan dan keolahragaan agar lebih baik dan berkualitas dimasa yang akan datang yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD
- Perencanaan Program Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 telah menghasilkan komitmen bersama Kab/Kota untuk menyamakan persepsi program untuk saling bersinergi. Dibidang kepemudaan adanya komitmen bersama untuk mendukung dan mensukseskan program Jambore Pemuda Indonesia Daerah Jawa Timur (JPID), Paskibraka dan Pemuda Pelopor. Dibidang keolahragaan adanya komitmen dari Kab/Kota yang atletnya

mewakili kontingen Jawa Timur dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) yang akan diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat untuk lebih ditingkatkan persiapannya dan latihannya agar Jawa Timur dapat merebut kembali juara umum setelah tahun 2013 direbut DKI Jakarta.

- Terlaksananya fasilitasi test pengukuran minat dan bakat anak terhadap cabang olahraga sesuai dengan potensi yang dimiliki yang diikuti sebanyak 654 pelajar SD dan SMP dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke 69.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah :

Permasalahan :

- Kurang selarasnya pelaksanaan program kegiatan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Pentingnya Rapat penyelarasan program kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan pagu sebesar Rp 7.987.600.000,00 terealisasi sebesar 96,66% atau Rp 7.720.575.063,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian program)

- Sosialisasi pembentukan PASKIBRAKA provinsi dan seleksi pemuda pelopor, sehingga terbentuknya Paskibraka tingkat Provinsi dan Nasional, serta terpilihnya pemuda yang mandiri dan produktif.
- Dengan meningkatnya pengetahuan pemuda sesuai fungsi, tanggungjawab dan perannya dalam masyarakat sebagai

bagian dari upaya perbaikan kondisi masyarakat sehingga mewujudkan tenaga muda yang handal dan cakap untuk memimpin lembaga kepemudaan yang dapat mengembangkan organisasi dan menggerakkan SDM yang ada didalamnya.

- Meningkatkan wawasan dan kreatifitas bagi anak dan remaja; Dalam bentuk Inisiator Kelompok Pemuda Sebaya, Seleksi dan pengiriman Pertukaran Pelajar antar Negara (PPAN), Jambore Pemuda Daerah (JPD), dan Pelatihan Multimedia bagi Pemuda.
- Bertambahnya kader-kader/aktivis organisasi kepemudaan yang mampu menganalisa, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengambil keputusan secara obyektif dan efisien agar mampu berperan aktif dalam pembangunan dengan sifat kekhususan organisasi dan dapat meningkatkan taraf hidup wirausaha muda dengan menambah pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan administrasi bagi wirausaha muda dan Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP)

Tabel 4.18.1.1
Peningkatan Peranan Pemuda di Jawa Timur

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014
1	Pelatihan Organisasi Pemuda	Orang	821	228	732
2	Pemuda Produktif	Orang	-	-	-
3	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Orang	250	120	180
4	Bhakti Pemuda Antar Provinsi	Orang	12	24	15
5	Pertukaran Pemuda Antar Negara	Orang	5	5	5
6	Pelatihan bagi Pemuda Ponpes / Lembaga Non Islam	Orang	300	300	230
7	Pemuda PASKIBRAKA	Orang	78	78	78
8	Pemuda SP-3	Orang	100	-	-
9	Jumlah OKP				

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014
	- Ormas Pemuda	Organisasi	329	76	62
	- Ormas Agama	Organisasi	38	15	37
	- Ormas Wanita	Organisasi	49	15	49
	- Ormas Profesi	Organisasi	69	15	92

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Belum adanya wadah yang menaungi para pemuda prestasi hasil pembentukan PASKIBRAKA dan Pemuda Pelopor, sehingga belum adanya optimalisasi prestasi dan kompetensi yang mereka miliki untuk kesejahteraan rakyat.
- Belum adanya wadah yang menaungi para pemuda terampil yang telah mendapatkan pelatihan dan pembekalan, sehingga proses menuju kemandirian pemuda terhambat. Masih minimnya generasi muda yang memiliki kompetensi dalam berorganisasi untuk berkiprah lebih jauh dalam memajukan organisasi dan berperan didalam bermasyarakat.
- Kurangnya Pemahaman tentang tanggungjawab dan wawasan kebangsaan bagi pemuda sehingga berpengaruh terhadap kecilnya peran serta pemuda dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya Pemecahan Masalah

- Membentuk suatu wadah atau mengoptimalkan wadah pemuda yang sudah ada, guna menajamkan eksistensi pemuda dalam berperan dimasyarakat.
- Menciptakan wadah yang mampu mengayomi pemuda untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang sudah diperoleh selama pelatihan, hingga mampu mendorong berputarnya roda perekonomian masyarakat.
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan sebagai modal dasar untuk memperkuat mentalitas pemuda

dan meningkatkan kemandirian pemuda melalui program kegiatan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna.

- Pentingnya kuantitas dan kualitas pelatihan tentang pemahaman pengelolaan lembaga dan organisasi kepemudaan yang mandiri dan profesional
- Menciptakan forum diskusi bagi pemuda guna membahas dan menelaah lebih lanjut tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan dan kepeloporan, serta pengembangan organisasi kepemudaan, kepelajaran dan kemahasiswaan,
- Menjembatani para pemuda yang berminat pada bidang kewirausahaan untuk dapat bersinergi dengan instansi atau pihak lain yang terkait.

d) Penghargaan Nasional :

Juara umum pemuda pelopor tingkat nasional Tahun 2014 :

- Juara I tingkat Nasional bidang Pendidikan a/n MUKARAOM SALASA, S.Si dari Kabupaten Blitar
- Juara III tingkat Nasional bidang Sosial Budaya dan Pariwisata a/n JOKO IWAN PRIYANTO, ST dari Kab. Gresik

Tabel 4.18.1.2
Juara Umum Pemuda Pelopor Jawa Timur
di Tingkat Nasional

No	Nama & Asal	Bidang	Juara Tahun 2012	Juara Tahun 2013	Juara Tahun 2014
1	Th. Deka A Putri (kab.Gresik)	Kewirausahaan	Juara I	-	-
2	Ardiyono (Kab.Jember)	Teknologi Tepat Guna	Juara I	-	-
3	M. Frenky Faizal (Surabaya)	Seni Budaya dan Pariwisata	Juara III	-	-
4	Fais Muarifan (Kab.Gresik)	Kelautan	Juara III	-	-
5	Ikhwan Arief (Kab.Banyuwangi)	Kelautan	-	Juara I	-
6	Solimin, S.Pd (Kab.Blitar)	Teknologi Tepat Guna	-	Juara II	-
7	Abdul Ghofur (Kab.Pasuruan)	Sosial Budaya dan Pariwisata	-	Juara IV	-

No	Nama & Asal	Bidang	Juara Tahun 2012	Juara Tahun 2013	Juara Tahun 2014
8	Mukarom Salasa, S.Si (Kab.Blitar)	Pendidikan	-	-	Juara I
9	Joko Iwan Priyanto, ST. (Kab.Gresik)	Sosial Budaya dan Pariwisata	-	-	Juara III

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga dengan pagu sebesar Rp 15.155.800.000,00, terealisasi sebesar 96,38% atau Rp 14.607.650.386,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan pada Lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian program)

- Meningkatnya prestasi olahraga pelajar usia SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi melalui pembinaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan didalam wadah pembinaan sesuai masing-masing cabang olahraga yang terdiri dari 20 atlet, 1 Pengurus dan 2 pelatih (memfasilitasi kegiatan PPLPD di Jawa Timur) serta memlalui pembinaan atlet pelajar di Klub Olahraga yang terdiri dari 10 atlet dan 2 pelatih.

Tabel 4.18.1.3

Pemberdayaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (15 PPLPD) di Jawa Timur

No	Cabor	Kab/Kota	No	Cabor	Kab/Kota
1	Atletik	Kab. Jombang	9	Panahan	Kab. Lamongan
2	Atletik	Kab. Nganjuk	10	Renang	Kab. Tuban
3	Bola Basket	Kota Madiun	11	Senam	Kota Probolinggo
4	Bola Voli	Kab. Banyuwangi	12	Sepak Takraw	Kota Blitar
5	Bola Voli	Kab. Jember	13	Taekwondo	Kab. Sidoarjo
6	Bulutangkis	Kab. Ngawi	14	Tenis Meja	Kota Kediri
7	Gulat	Kab. Malang	15	Tenis Meja	Kab. Magetan
8	Karate	Kab. Mojokerto			

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

Tabel 4.18.1.4
10 Klub Olahraga di Jawa Timur

No	Klub/Cabor	Kab/Kota	No	Klub/Cabor	Kab/Kota
1	Klub Pencak Silat "SINGO DJATI"	Kota Malang	6	Klub Renang "SIDOARJO AQUATIC CLUB"	Kab. Sidoarjo
2	Klub Judo "CENDANA"	Kota Surabaya	7	Klub Wushu "SERUMAI CITO"	Kab. Sidoarjo
3	Klub Gulat "GREGOS WRESTLING"	Kota Madiun	8	Klub Atletik "IPAM"	Kota Malang
4	Klub Tenis Lapangan "PATRIA"	Kota Blitar	9	Klub Senam "GYMNASTIC ALL STAR"	Kab. Gresik
5	Klub Bola Voli "JAYABAYA"	Kota Kediri	10	Klub Atletik "BANGKIT ATLETIK SURABAYA"	Kota Surabaya

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

- Tumbuhnya pemberdayaan pada jalur pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi serta meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kegiatan olahraga tradisional (38 Kab/Kota).
- Meningkatnya kompetisi kuantitas dan kualitas olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat Jawa Timur dan Nasional serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani bagi masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pembina/pelatih dan atlet olahraga prestasi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan prestasi sehingga memiliki kemampuan mencetak atlet potensial yang mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional, adapun perkembangan jumlah Wasit, Pelatih dan Atlet berprestasi ada pada rincian tabel berikut.
- Tersosialisasinya penanganan cedera olahraga yang diselenggarakan Dispora Prov. Jatim dengan sasaran para guru pendidikan Jasmani ditingkat SD, SMP dan SMA yang ada di Kab/Kota se-Jawa Timur. Serta terpeliharanya kesehatan,

rehabilitasi dan hambatan degenerasi bagi seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia atau berhenti bekerja, serta peningkatan kesegaran jasmani bagi penyandang cacat

Tabel 4.18.1.5
Data Guru Pendidikan Jasmani di Jawa Timur

No	Nama	Jumlah		
		Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Guru Penjaskes SD/MI (Guru OR SD/MI)	10599	3397	13996
2	Guru Penjaskes SMP/MTs (Guru OR SMP/MTs)	3161	910	4071
3	Guru Penjaskes SMA/MA (Guru OR SMA/MA)	1941	404	2345
JUMLAH		15701	4712	20413

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Menurunnya prestasi olahraga dari tingkat Nasional sampai tingkat daerah, yang disebabkan oleh program pembinaan prestasi yang tidak berkelanjutan dan tuntas.
- Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan minimnya pelatihan olahraga tradisional dimasyarakat.
- Kurangnya sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran diseluruh lapisan masyarakat.
- Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK olahraga untuk program pembinaan prestasi atlet, khususnya dikalangan pelajar
- Belum adanya pelatihan khusus untuk para atlet berkebutuhan khusus (cacat) dan penyediaan pelatih olahraga cacat.

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlu dibentuk perancangan konsep pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh dan berkesinambungan yang didukung dengan pemanfaatan IPTEK olahraga dan keterlibatan berbagai pihak yang terkait dengan prestasi olahraga.
- Optimalisasi program pencarian bibit dan bakat atlet pelajar berprestasi dan mengarahkan untuk pengembangan di PPLPD
- Sosialisasi optimal tentang keberadaan olahraga tradisional dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan festival olahraga tradisional
- Peningkatan pemahaman pentingnya olahraga bagi kesehatan dan kebugaran masyarakat melalui berbagai event yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat.
- Mengoptimalkan IPTEK olahraga dengan melibatkan pakar olahraga baik dari kalangan akademisi maupun praktisi olahraga, yang didukung dengan dukungan pembekalan dari pelatih asing yang sudah lebih profesional.
- Meningkatkan pelatihan - pelatihan tentang kebugaran bagi lanjut usia dan pelatihan olahraga bagi penyandang cacat

d) Penghargaan Nasional :

- Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) IV di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jawa Timur meraih Juara Umum dengan memperoleh Medali : 22 Emas, 8 Perak dan 3 Perunggu.

Tabel 4.18.1.6
Daftar Perolehan Medali
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) Provinsi Jawa Timur

No	TAHUN	TEMPAT PELAKSANAAN	JUMLAH PEROLEHAN MEDALI			JUMLAH TOTAL	JUARA
			EMAS	PERAK	PERUNGGU		
1	JATIM (2010)	NTB	25	6	1	32	I
2	JATIM (2012)	MAKASAR	22	3	1	26	I
3	JATIM (2014)	NTT	22	8	3	33	I

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

- Festival Olahraga Tradisional tahun 2014 di DKI Jakarta Jawa Timur yang di beri nama “Suro Lan Boyo” memperoleh juara I Tingkat Nasional.

Tabel 4.18.1.7
Daftar Perolehan Juara
Festival Olahraga Tradisional Provinsi Jawa Timur

No	PROVINSI	TEMPAT	NAMA OLAHRAGA TRADISIONAL	TAHUN	JUARA
1	JAWA TIMUR	Kota Ambon, Maluku	Kerap Pesapean	2010	II
2	JAWA TIMUR	Ternate Selatan, Maluku	Atraksi Pring Geprak	2012	II
3	JAWA TIMUR	DKI Jakarta	Suro Lan Boyo	2014	I

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

19.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol.
- 2) Meningkatnya penghormatan HAM.
- 3) Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 820.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 771.017.150,00 atau 94,03%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi elemen masyarakat serta pengembangan, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Dengan sasaran meningkatkan pembauran kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara keseluruhan hasil Pelaksanaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dapat disampaikan sebagai berikut :

- Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, rasa cinta tanah air dan nasionalisme dikalangan elemen masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- Meningkatnya pemahaman elemen masyarakat akan keanekaragaman suku, etnis, bangsa, bahasa, adat bahkan agama.
- Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dikalangan elemen masyarakat khususnya generasi muda.

Capaian Kinerja Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan untuk indikator kinerja Persentase terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kab/Kota pada tahun 2013 sebesar 44,74 % dan di tahun 2014 sebesar 68,42%. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diadakan cukup efektif untuk menjelaskan pentingnya FPK kepada aparatur dan elemen masyarakat di Kab/Kota se-Jatim.

Tabel 4.19.1.1
Capaian Kinerja Persentase Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan Kab/Kota Tahun 2013 - 2014

URAIAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		
	SATUAN	2013	2014
Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota	Persentase	44,74 % (17)	68,42 % (26)

Sumber: Bakesbangpol Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

Belum optimalnya pemahaman masyarakat terkait Keberadaan FPK, masalah pembauran menjadi penting mengingat latar belakang bangsa Indonesia yang sangat pluralistik terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnik, bahasa dan kebudayaan daerah. Bahwa salah satu sasaran strategis dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah melalui proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya pemecahan permasalahan diatas melalui :

- Dalam setiap kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol (Bidang Integrasi Bangsa) selalu disosialisasikan tentang pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan bagi

masyarakat, baik kepada Aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota maupun elemen masyarakat lainnya.

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur) secara berkala mengkomunikasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) terkait pasal (8) PERMENDAGRI No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah agar segera membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan jenjang/tingkatannya.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.824.933.987,00 atau 91,25%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan, dengan sasaran kegiatan guna peningkatan SDM dan Partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Jatim Kondusif. Secara keseluruhan hasil Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dapat disampaikan sebagai berikut :

- Meningkatnya kepekaan aparat terkait dalam menyikapi masalah-masalah sosial politik di masyarakat.
- Meningkatnya keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas.
- Meningkatnya pemantauan dan perkembangan situasi-kondisi dan ketertiban masyarakat di Jatim.

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan melalui Persentase terbentuknya Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tahun 2014 mencapai 84,2% di Tingkat Kab/Kota, 19,88% ditingkat Kecamatan dan tercapai 12,4 % di tingkat Desa/Kelurahan di Wilayah Jatim, Hal ini artinya bahwa ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kab/Kota di Jawa Timur secara umum dapat dipahami betapa pentingnya peran FKDM. Kedepan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya sehingga hasil capaian lebih maksimal.

Tabel 4.19.1.2
Capaian Kinerja Persentase terbentuknya FKDM
Tahun 2013 - 2014

Uraian	Capaian Kinerja Program		
	Satuan	2013	2014
Persentase terbentuknya FKDM	% (Kab/Kota)	81,5 %	84,2 %
	% (Kec.)	19,88 %	19,88 %
	% (Ds/kel)	12,4 %	12,4 %

Sumber: Bakesbangpol Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Koordinasi dengan Instansi terkait yang belum maksimal.
- Kondisi masyarakat saat ini cenderung kritis dan emosional (irrasional).
- Belum semua Kecamatan, Kelurahan/Desa membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- Keterbatasan Anggaran di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Upaya pemecahan

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- Meningkatkan penggalangan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Mendorong Pemkab/Kota untuk segera membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan (yang belum membentuk).

3) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 80.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.529.380,00 atau 97,31%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, dengan sasaran kegiatan guna menyamakan persepsi dan pemahaman antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik & Perlindungan Masyarakat Kab/Kota. Secara keseluruhan hasil Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara Sinergis dalam implementasi program dan kegiatan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dan Badan/Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kab/Kota.
- Mencari solusi bersama terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat teknis maupun administrasi sehingga program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Badan/Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kab/Kota se Jawa Timur dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- Meningkatkan sinkronisasi program kegiatan Bakesbang dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam rangka mendukung Jawa Timur Kondusif.

Capaian Kinerja Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat pada tahun 2013 sebesar 38 Kab/Kota sebanding dengan tahun 2014 sebesar 38 Kab/Kota.

Tabel 4.19.1.3

**Capaian Kinerja Jumlah Kab/Kota yang berpartisipasi
dalam kegiatan sinkronisasi Tahun 2013 - 2014**

Uraian	Capaian Kinerja Program		
	Satuan	2013	2014
Jumlah Kab/Kota yang berpartisipasi dalam kegiatan sinkronisasi.	Kab/Kota	38	38

Sumber: Bakesbangpol Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

Yang dihadapi masih adanya lembaga Kesbang di Kab/Kota yang berbentuk Kantor, sehingga keberadaan lembaga Kesbang di Kab/Kota belum banyak diperhitungkan. Adapun

Upaya pemecahan

Meningkatkan koordinasi yang intensive antara Bakesbangpol Prov Jatim dengan Badan/Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota se-Jatim.

4) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 835.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 807.335.390,00 atau 96,68%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak azasi Manusia dengan sasaran kegiatan untuk meningkatkan kembali kesadaran hukum bagi masyarakat maupun aparatur.

Secara keseluruhan hasil Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia dapat disampaikan sebagai berikut :

- Meningkatnya pemenuhan dan penguatan kesadaran Hukum dan HAM bagi Masyarakat.
- Meningkatnya wawasan dan kesadaran hukum dan HAM bagi aparatur, dan elemen masyarakat.
- Meningkatnya Pemahaman dan kesadaran akan peran Panitia RANHAM Kab/Kota se Jatim.
- Menciptakan Budaya Hukum yang baik disegala lapisan Masyarakat.

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Indikator Kinerja Persentase penurunan kejadian terkait HAM Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 24,07 %. Hal ini karena telah terjalin komunikasi yang instensif untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan antara Kemenkumham, Bappeda, Bakesbangpol dan Biro Hukum sesuai Perpres 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2011-2014, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 518 tahun 2011 tentang Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur 2011-2014. Selanjutnya dengan RANHAM telah terjadi harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat, ada peningkatan pemahaman mengenai penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan ham, sehingga ada efektivitas penyelenggaraan diskusi dan kegiatan HAM, dan perlunya konsistensi dalam komunikasi dan koordinasi antar elemen pemerintah dan elemen masyarakat.

Tabel 4.19.1.4
Capaian Kinerja Persentase Penurunan Kejadian terkait HAM
Tahun 2013 - 2014

Uraian	Capaian Kinerja Program		
	Satuan	2013	2014
Penurunan Kejadian terkait HAM	Persentase	40 % (54)	24,07% (41)

Sumber: Bakesbangpol Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Belum optimalnya peran institusi-institusi demokrasi, peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.
- Lemahnya penegakan supremasi hukum.
- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
- Kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM (KDRT).
- Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait, serta belum maksimalnya implementasi Hak Asasi Manusia.

Upaya pemecahan

- Meningkatkan Sinkronisasi kegiatan RANHAM dengan SKPD terkait agar lebih berperan dan membantu mengembangkan peningkatan wawasan sadar hukum dan HAM kepada Aparatur dan masyarakat secara menyeluruh, serta mampu menciptakan harmonisasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan RANHAM dengan tujuan meningkatkan perkembangan kepribadian dan wawasan serta kesadaran sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pelaku sosial dalam masyarakat.

5) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 2.914.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.769.528.135,00 atau 95,04%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi bertujuan untuk mengembangkan system politik dalam rangka kualitas kehidupan sosial politik yang demokratis, dengan sasaran kegiatan untuk meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga politik dan publik.

Secara keseluruhan hasil Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dapat disampaikan sebagai berikut :

- Terjalannya komunikasi antar fungsionaris parpol/ormas/LSM dengan pemerintah Provinsi Jatim.
- Meningkatnya harmonisasi Sosial Politik Masyarakat bagi Supra dan Infra Struktur Politik.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat berpolitik dalam pilkada.
- Meningkatnya pemahaman LSM/Ormas dan Elemen Masyarakat dalam pembangunan politik di Jatim.
- Terasilinasinya komunikasi lintas Parpol di Jatim.
- Tersedianya data Parpol maupun Ormas/LSM yang terdaftar.

Sedangkan capaian Kinerja Program Peningkatan Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi melalui indikator Persentase peningkatan Ormas/LSM yang terdaftar tahun 2013 ditargetkan 5% terealisasi 3,31% atau tercapai 873 Ormas/LSM yang terdaftar dan tahun 2014 ditargetkan 5% terealisasi 1,15 % atau tercapai 883 Ormas/LSM yang terdaftar, Hal ini terjadi karena kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi terhadap UU yang baru yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dimana sangat penting untuk segera disosialisasikan kepada segenap elemen masyarakat. Sementara yang masih dipahami baru UU yang lama yaitu UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu pengganti UU yang mengatur Ormas sesuai dengan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tabel 4.19.1.5
Capaian Kinerja Persentase peningkatan Ormas / LSM yang
terdaftar Tahun 2013 - 2014

Uraian	Capaian Kinerja Program		
	Satuan	2013	2014
Persentase peningkatan Ormas / LSM yang terdaftar	Persentase	3,31% (873)	1,15 % (883)

Sumber: Bakesbangpol Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Ada sebagian Ormas/LSM yang diundang tidak hadir dikarenakan ormas tersebut telah pindah alamat dan tidak memberitahukan keberadaannya ke Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.
- Belum semua Ormas/LSM yang terdaftar melakukan her regerestrasi ulang sehingga perubahan kepengurusan belum diketahui dan dicatat oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.
- Aktifitas Ormas/LSM belum semua melaporkan kepada Bakesbangpol Jatim
- Masih belum signifikannya bantuan dana fasilitasi.

Upaya pemecahan

- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan sampai dengan tingkat Kab/Kota di Jawa Timur
- Dilakukan identifikasi dan inventarisasi data terhadap keberadaan Ormas/LSM
- Meningkatkan fasilitasi kepada Ormas/LSM
- Meningkatkan Monitoring kegiatan Ormas/LSM

6) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.770.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.556.700.180,00 atau 87,95%, pagu dan

realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran kolom 16.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertujuan untuk memantau kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing yang ada di Jawa Timur, menciptakan efektifitas jaringan informasi konflik, meningkatkan dan mengembangkan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat, dengan sasaran terciptanya rasa aman dan tertib di Masyarakat. Secara keseluruhan hasilnya dapat disampaikan sbb :

- Teridentifikasinya jumlah orang asing, kegiatan, keberadaan, dan lembaga asing di Jatim.
- Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap potensi kerawanan gangguan Kamtramtibmas di Jawa Timur.
- Meningkatnya peran dan efektifitas pemantauan perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengantisipasi permasalahan yang berpotensi konflik di Jawa Timur.

Sedangkan Capaian Kinerja Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator kinerja Penurunan Kejadian terkait POLEKSOSBUD dan TIBMAS pada tahun 2013 sebesar 4,05% mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 76,44%, sehingga dapat disimpulkan jaringan informasi dalam upaya mengantisipasi terjadinya konflik, untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat dilaksanakan secara terpadu dan intensif dengan instansi lintas sektoral seperti BIN, KODAM, POLDA, dan KEJATI.

Tabel 4.19.1.6

Capaian Kinerja Persentase Penurunan Kejadian terkait POLEKSOSBUD dan TIBMAS Tahun 2013 - 2014

Uraian	Capaian Kinerja Program		
	Satuan	2013	2014
Penurunan Kejadian terkait POLEKSOSBUD dan TIBMAS	Persentase	4,05 % (450)	76,44 % (106)

Sumber: Bakesbangpol Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

Kurangnya kerjasama dalam pertukaran informasi antara aparat dan masyarakat serta terbatasnya jaringan informasi tentang pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

Upaya pemecahan

Mengadakan berbagai kegiatan sebagai wadah pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintah serta membentuk forum untuk memperkuat jaringan informasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.

7) Program Perbaikan Proses Politik.

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 495.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 474.076.190,00 atau 95,77%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Perbaikan Proses Politik bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat, dengan sasaran guna peningkatan efektifitas proses politik. Secara keseluruhan hasil Program sebagai berikut :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam rangka Pemilu dan Pilkada.
- Meningkatkan kesadaran akan kesetaraan dan keadilan dalam Politik.
- Meningkatnya kepekaan aparat terkait dalam menyikapi masalah-masalah sosial politik di masyarakat.
- Meningkatnya pemahaman aparatur dan elemen masyarakat terhadap budaya politik yang demokratis dan beretika.

Capaian Kinerja Program Perbaikan Proses Politik dengan indikator Kinerja Penurunan Kejadian terkait Politik pada tahun 2013 sebesar

30,16 % menurun dibanding dengan tahun 2014 sebesar 61,59%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya pemahaman masyarakat akan proses politik serta kesetaraan hak – hak politik untuk membangun etika dan budaya politik yang santun. Adapun beberapa permasalahan yang terkait antara lain : Tuntutan Pilkada ulang, Tuntutan Pemilu Nasional ulang, Netralitas Penyelenggara Pemilu, Perhitungan Perolehan Suara dan Penolakan RUU Pilkada.

Tabel 4.19.1.7
Capaian Kinerja Persentase Penurunan Kejadian terkait Politik
Tahun 2013 - 2014

Uraian	Capaian Kinerja Program		
	Satuan	2013	2014
Penurunan Kejadian terkait Politik	Persentase	30,16 % (164)	61,59 % (63)

Sumber: Bakesbangpol Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti proses politik (berdemokrasi).
- Pemahaman dalam proses politik masih relatif kurang.
- Kurangnya kesadaran akan pentingnya etika dan budaya politik yang santun pada aparatur maupun elemen masyarakat.

Upaya pemecahan

Mengadakan sosialisasi, diseminasi, seminar tentang budaya politik yang demokratis, santun dan beretika melalui forum–forum dan harmonisasi sosial politik bagi aparatur dan elemen masyarakat.

8) Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 735.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 715.955.135,00 atau 97,38%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi hidup dan kerukunan antar umat beragama. Secara keseluruhan hasil Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama adalah meningkatnya komunikasi antar dan inter umat beragama agar tercipta saling pengertian, toleransi, solidaritas dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan indikator kinerja Penurunan Kejadian terkait Keagamaan pada tahun 2013 sebesar 12,5 % kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 71,43 % hal ini disebabkan adanya peningkatan peran dan sinergitas dari lintas sektoral terkait dengan keagamaan, sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Adapun beberapa permasalahan yang terkait antara lain : Pendirian rumah ibadah, Gerakan ISIS dan Aqidah.

Tabel 4.19.1.8
Capaian Kinerja Persentase Penurunan Kejadian terkait
Keagamaan Tahun 2013 - 2014

Uraian	Capaian Kinerja Program		
	Satuan	2013	2014
Penurunan Kejadian terkait Keagamaan	Persentase	12,5 % (91)	71,43 % (26)

Sumber: Bakesbangpol Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Kualitas pemahaman dan pengamalan terhadap agamanya masih belum optimal.
- Masyarakat Jawa Timur sangat pluralistik sehingga mudah terjadi gesekan.
- Belum maksimalnya komunikasi untuk menyatukan pemahaman guna mewujudkan kerukunan umat beragama menuju kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemecahan

- Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan berbangsa pada masyarakat Jawa Timur.
- Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya masing-masing agar tidak mudah terjebak pada eksklusivisme negatif dalam beragama.
- Meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi suku, Agama, Ras dan antar golongan.

19.2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

Sasaran yang hendak dicapai peningkatan keamanan dan ketertiban, masyarakat adalah meningkatnya peran serta masyarakat, profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dimana gangguan keamanan dan ketertiban serta tindak kriminal dapat dikendalikan pada tingkat yang serendah-rendahnya, yang tercermin dari antara lain :

1. Persentase penurunan gangguan terhadap kegiatan pemerintahan
2. Persentase menurunnya pelanggaran peraturan daerah
3. Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat dan masyarakat yang sigap dan tanggap dalam pengamanan Swakarsa dan penanggulangan bencana
4. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.392.385.000,00 dengan realisasi Rp. 1.378.859.275,00 atau 99,03%, pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom,

b) Hasil Pelaksanaan Pembagunan (capaian Program):

- Hasil kegiatan penjagaan tempat-tempat penting dan pengamanan asset milik Pemprov. Jatim pada tahun 2013 dan tahun 2014 realisasi 100% dikarenakan asset yang di jaga oleh personil Satpol PP merupakan aset obyek vital yang keberadaannya terjangkau dan dapat dipantau setiap saat, untuk kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa realisasi pada tahun 2013 sebanyak 48

kali dan pada Tahun 2014 sebanyak 57 kali, sehingga capaian sebesar 237%, melebihi target yang terdapat pada DPA, di karenakan pada Tahun 2014 terjadi pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Presiden sehingga banyak mengundang demonstrasi/unjuk rasa untuk mempertahankan calon pilihannya masing-masing sesuai dengan partainya, dengan adanya unjuk rasa dan kerusuhan massa satpol PP selalu berkoordinasi dengan TNI/Polri dan instansi terkait

- Terlaksananya penjagaan tempat-tempat penting dan aset milik Pemprov Jatim dengan aman, tenteram dan terlaksananya penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa secara kondusif dan tertib dengan meminimalisir gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tabel pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.19.2.1

Program kegiatan target, Realisasi dan capaian kinerja

No	Program / Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi		Capaian %
				2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					
	Penjagaan tempat - tempat penting dan pengamanan aset milik Pemprov Jatim	Terwujudnya keamanan tempat - tempat penting dan aset Pem-prov. Jatim	10 tempat/ lokasi	8 tempat/ lokasi	8 tempat/ lokasi	80 %
	Kegiatan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Terkendalinya unjuk rasa dan kerusuhan massa	24 kali	48 kali	57 kali	237 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan merupakan bagian upaya memberikan kepada masyarakat merasa aman, tentram, dan nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya. Satpol PP Prov. Jatim melalui program ini berupaya untuk mensinergikan antara masyarakat dan pemerintah agar dapat melakukan kegiatan pembangunan dan pemerintahan secara bersama-sama. Adapun perkembangan capaian kinerja program dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.19.2.2
Capaian Kinerja Program

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program						
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah pengamanan aset Pemprov Jatim	Tempat	6	6	8	8	8	8
Jumlah Pamwal Pejabat VVIP	Kali	268	300	279	177	183	190
Jumlah Penanganan Unras	Kali	35	28	43	62	48	57

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

Hasil / Outcome Pelaksanaan Program

- Terlaksananya penjagaan tempat-tempat penting dan aset milik Pemprov Jatim dengan aman,
- Terlaksananya pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting dalam rangka kunjungan kerja maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kondisi aman, tentram dan tertib,
- Terkendalinya penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa secara kondusif dan tertib,
- Terciptanya kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan kamtramtibmas Pemilukada dan Pilpres,

Beberapa tabel data kegiatan dapat kami tampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.19.2.3
Kegiatan penjagaan tempat-tempat penting & aset milik Pemprov Jatim.

NO.	LOKASI	KET
1.	Kantor Gubernur Jl. Johar dan Jl. Pahlawan	38 orang anggota Pol PP
2.	Gedung Negara Grahadi	23 orang anggota Pol PP
3.	Kediaman Gubernur Jl. Kertajaya	2 orang anggota Pol PP
4.	Rumah Dinas Gubernur Jl. Imam Bonjol	6 orang anggota Pol PP
5.	Rumah Dinas Wakil Gubernur Jl. Puncak Permai	6 orang anggota Pol PP
6.	Kantor Satpol PP Jl. Jagir Wonokromo	6 orang anggota Pol PP
7.	Kantor PKK Prov. Jatim Jl. Gayungsari	6 orang anggota Pol PP
8.	Kantor BKOW Jl. Bungurasih	6 orang anggota Pol PP

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

Tabel 4.19.2.4
Kegiatan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

NO.	URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	KET
	LOKASI	JUMLAH		Petugas Pengamanan
1.	Unjuk Rasa di Gedung Negara Grahadi	28 kali	43 kali	POL PP = 38 Peleton (1 tahun) POLRI = 15 Kompi (1 tahun)
2.	Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Jl. Pahlawan	20 kali	14 kali	POL PP = 24 Peleton (1 tahun) POLRI = 10 Kompi (1 tahun)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

Tabel 4.19.2.5
Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan

NO.	Pejabat VVIP	Ket
1.	Gubernur Jawa Timur	12 orang personil Pangaman dan Pengawalan Satpol PP Prov Jatim
2.	Wakil Gubernur Jawa Timur	
3.	Sekretaris Daerah Prov Jatim	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan diantaranya yaitu :

- Terbatasnya pemantauan dan penjagaan aset Pemprov Jatim yang ada di daerah;
- Masih kurangnya personil Pamwal dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
- Kurikulum pelatihan kesamaptaa masih mengacu terhadap TUM, protap pelatihan kesamaptaa Pol PP belum ada;
- Sarana dan Prasarana Mobilitas masih kurang memadai

Upaya pemecahan masalah yaitu berupa :

- Perekrutan personil Satpol PP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemetaan terhadap aset-aset Pemprov Jatim;
- Peningkatan kualitas aparatur Satpol PP ;
- Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional.
- Perlu disusun berbagai sistem-sistem yang menopang penyampaian pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, seperti sistem informal ketenteraman dan ketertiban, sistem operasional penertiban, sistem administrasi dan dukungan logistik ;
- Penambahan sarana prasarana mobilitas Pengamanan dan pengawalan.

2) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.781.534.000,00 dengan realisasi Rp. 1.767.435.190,00 atau 99,21%, pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian Program):

Hasil kegiatan operasional patroli wilayah ketentraman masyarakat dan ketertiban umum tahun 2013 dengan realisasi 53 kegiatan dan tahun 2014 sebanyak 67 kegiatan sehingga terjadi kenaikan kinerja dengan capain antara tahun 2013 dengan tahun 2014 sebesar 83 %, hal tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan patroli dalam kota dalam rangka pengamanan hari-hari besar, patroli obyek vital, patroli rawan tramtibum, patroli pengamanan serta pengamanan dan patroli di 38 kabupaten/ kota yang tidak semua kab/ kota terlampaui. Untuk kegiatan Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur merupakan aparatur Pemerintah yang tupoksinya adalah salah satunya sebagai penegakan Peraturan daerah, adapun Perda yang dimiliki oleh SKPD/ Instansi Provinsi Jawa Timur sangat banyak sehingga untuk mengimplementasikan Tupoksi Satpol PP Perda yang bersanksi Pidana diprioritaskan, sehingga kegiatan operasional penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya pada tahun 2013 sebanyak 23 kegiatan dan pada tahun 2014 sebanyak 26 kegiatan, hal tersebut mengalami kenaikan sehingga capain sebesar 86%, dikarenakan banyaknya pelanggaran Perda.

Terlaksananya operasional Patroli wilayah tramtibum untuk Operasional Patroli wilayah Tramtibum secara insedentil maupun berkala yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya gangguan tramtibum di Jawa Timur, terlaksananya penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya untuk meningkatkan Operasional Penegakan perda secara preemtif, preventif dan represif non yustisial.

Tabel 4.19.2.6
Program kegiatan target, Realisasi dan capaian kinerja

No	Program / Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi		Capaian %
				2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
2	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					
	• Operasional Patroli wilayah Tibumtranmas	patroli wilayah terpadu Tibumtranmas	80 kali	53 kali	67 kali	83
	• Penegakan Peraturan daerah	Operasional Penegakan perda secara preemtif, preventif dan represif non yustisial	30 kali	23 kali	26 kali	86

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

Capaian Kinerja Program

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dimaksudkan untuk meminimalisir bentuk ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan operasi dan patroli wilayah terpadu dengan instansi terkait baik secara insidentil maupun berkala. Untuk mengukur keberhasilan program tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.19.2.7
Kegiatan Operasional Patroli Wilayah Tibumtranmas

No.	Kab / Kota	Kegiatan Patroli	Kab / Kota	Kegiatan Patroli
		2013		2014
1.	Kab. Sidoarjo	Patroli Penambang Pasir	Kab. Bojonegoro dan Kab.Blora	Wilayah Perbatasan RATUBANGNEGORO
2.	Kab. Mojokerto	Patroli Penambang Pasir	Kab. Magetan	Wilayah Perbatasan KARSMAPAWIROGO
3.	Kota Mojokerto	Patroli Penambang Pasir	Kab. Bojonegoro dan Kab.Blora Desa Ngroto Kab. Pati Provinsi Jawa	Wilayah Perbatasan RATUBANGNEGORO

No.	Kab / Kota	Kegiatan Patroli	Kab / Kota	Kegiatan Patroli
		2013		2014
			Tengah	
4.	Kab. Jombang	Patroli Penambang Pasir	Kab. Bojonegoro dan Kab. Blora Desa Sidorejo Kec. Padangan	Wilayah Perbatasan RATUBANGNEGORO
5.	Kab. Kediri	Patroli Penambang Pasir	Taman Seribu Lampu Jl. Ronggolawe Kec. Cepu Kab. Blora	Wilayah Perbatasan RATUBANGNEGORO
6.	Kota Kediri	Patroli Penambang Pasir	Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi, Ponorogo	Wilayah Perbatasan KARSMAPAWIROGO
7.	Kab. Nganjuk	Patroli Penambang Pasir	Ponorogo - Pacitan	Wilayah Perbatasan KARSMAPAWIROGO
8.	Kab. Probolinggo	Patroli Reklame, Rumija dan Damija		

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

Tabel 4.19.2.8
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah

NO.	Lokasi	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan
		2013		2014
1.	Kec. Tarik Kab Sidoarjo; Kec. Mlirip Kota Mojokerto; Kab. Mojokerto; Kab. Kediri; Kab. Bojonegoro	Penertiban Penambang Pasir Liar	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Badal Pandean Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri; - Kab. Mojokerto; - Desa Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto - Ds Brenggolo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro - Tulungagung di Ds Banjarsari Kec. Ngantru 	<ul style="list-style-type: none"> - penertiban penambang pasir liar yang menggunakan mesin/mekanik - Patroli penambang pasir liar - penertiban penambang pasir liar menggunakan mesin/mekanik
2.	Kab. Probolinggo ; Kab. Banyuwangi	Penertiban Rumija dan Damija	<ul style="list-style-type: none"> - Asset di Jalan Jakarta Nomor 2 Malang - Asset Jalan Lohor Batu yang terletak di Komplek UPT Materia Medica 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembongkaran aset - Pembongkaran aset

NO.	Lokasi	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan
		2013		2014
			Dinas Kesehatan Prov. Jatim - Penertiban Penghuni Rusunawa Gunungsari Surabaya Pemasangan Plang pada Aset milik Pemprov. Jawa Timur yang berada di Dupak Interchange Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya	- Penertiban Penghuni Rusunawa Gunungsari - Pemasangan Plang Asset
3.	Kota Surabaya	Penertiban Disiplin PNS Pemprov Jatim	- Kota Surabaya	- Operasi Penertiban Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov. Jatim. - Penertiban Pemakaian Kendaraan Dinas (SKPD) di Lingkungan Pemprov. Jatim
4.	Kota Surabaya, Kab Sidoarjo, Kab Gresik	Operasi Mamin kadaluwarsa, tera timbang, mobil dinas Pemprov Jatim dan objek vital	Kabupaten Gresik.	- penertiban jenis minuman beralkohol dari Penjual yang tidak memiliki izin. - Di Ds Prambangan, Gulo Mantu, Ngipek, Kebomas, Desa Abar Abir Bungah, Desa Pongangan dan Desa Suci Manyar, Desa Tirem Duduksampeyan
5.	Kab Bondowoso, Kab Situbondo, Kab Magetan, Kab	Penanggulangan penanganan HIV/AIDS	- di Pertemuan Lokalisasi Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk	Penanggulangan penanganan HIV/AIDS

NO.	Lokasi	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan
		2013		2014
	Nganjuk, Kab Ponorogo, Kab Pacitan, Kab Tulungagung, Kab Madiun			
6.	Kota Surabaya	Penertiban PSK, PKL	- Kab. Sidoarjo. - Desa Teguhan Kec. Jiwan Kab. Madiun - Kab. Tuban	- Operasi penertiban cafe/warung remang-remang yang menempati Stand Pasar Baru Krian - Patroli wilayah Bangunan Liar di Jalan Provinsi/ Nasional - Pengamanan Penutupan dan pemulangan WTS di Lokalisasi Gude - Sosialisasi pengendalian dan pengawasan peredaran minuman
7.	Kab. Sidoarjo	Penertiban Gelandangan, PKL	- Kab. Malang	- Deklarasi Penutupan 7 (Tujuh) Lokalisasi WTS
8.	Kab. Mojokerto	PenertibanPeng amen, Gelandangan dan PKL		

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan diantaranya yaitu :

- Masih kurangnya personil Satpol PP dalam pelaksanaan tugas operasional;
- Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu perintah;

- Ruang lingkup operasional yang begitu luas sehingga kurangnya sarana prasarana transportasi dalam melakukan kegiatan patroli;
- Pelanggar perda Provinsi yang terjadi di Kab/Kota belum sepenuhnya terpantau;
- Pemberdayaan PPNS belum optimal oleh masing – masing SKPD Provinsi dan Satpol PP Kabupaten/Kota ;
- PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan RI.
- Daerah-daerah rawan HIV/AIDS yang masih kurang terpantau.

Upaya pemecahan masalah yaitu berupa :

- Adanya SOP Patroli sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan pelaksanaan tugas patroli maupun lapangan;
- Peningkatan kualitas SDM Pol PP dan PPNS bekerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan Diklat Polda Jawa Timur (SPN Bangsal Mojokerto);
- Pengadaan sarana mobilitas dan komunikasi;
- Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional;
- Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- Perlu merevitalisasi peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga Tibumtranmas;
- Dalam penyusunan produk – produk Perda Provinsi Jawa Timur yang bersangsi pidana hendaknya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegak Perda dan Peraturan Perundang–undangan lainnya dilibatkan agar tumbuh *sense of belonging* (rasa memiliki) dan pengertian yang benar – benar jelas tentang isi isi pasal Peraturan Daerah.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 750.000.000,00 dengan realisasi Rp. 662.701.100,00 atau 88,36%, pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom

b) Hasil kegiatan:

Hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan Pam sawakarsa (*community policing*) Tahun 2013 sebanyak 3 kali dan Tahun 2014 sebanyak 2 kali, dari hasil kegiatan pertahun terjadi 4 kali tidak sesuai dengan target yang direncanakan, dengan realisasi capaian sebesar 40% dikarenakan kurang optimalnya personil Satlinmas, dan diharapkan adanya kolaborasi dengan masyarakat dalam pengamanan di masyarakat dan penanganan bencana, untuk kegiatan pelatihan dan koordinasi potensi anggota linmas dalam rangka penanganan bencana Tahun 2013 sebanyak 3 kali dan Tahun 2014 sebanyak 1 kali dengan realisasi 20%, dengan di keranakan lebih di upayakan terhadap pemantauan peran linmas yang terlatih agar meningkatkan anggota linmas dan masyarakat lebih yang lebih peduli dan tanggap/terlatih dalam penanggulangan bencana tanggap darurat bencana baik dalam situasi bencana dan pasca.

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan Pam sawakarsa (*community policing*) diharapkan adanya rasa tanggung jawab dan tanggap dalam pengamanan masyarakat serta deteksi dini penanganan bencana, kegiatan pelatihan dan koordinasi potensi anggota linmas dalam rangka penanganan bencana maupun tanggap darurat bencana ini merupakan faktor pendukung dari anggota Satlinmas untuk mengemban tugasnya sebagai pelindung masyarakat dari segi kamtrantibmas dan kebencanaan.

Tabel 4.19.2.9
Capaian Kinerja Program
Program kegiatan target, Realisasi dan capaian kinerja

No	Program / Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi		Capaian %
				2013	2014	
1	2	3	4	5		6
3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengamalan Pam Swakarsa (Community Policing)	Pelaksanaan sistramtibmas Pam Swakarsa (Community Policing)	5 kali kegiatan	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	40
	Pelatihan dan kordinasi potensi anggota linmas dalam rangka penanganan bencana	Peningkatan kemampuan ketrampilan dan daya tanggap anggota linmas serta masyarakat	5 kali kegiatan	3 kali kegiatan	1 kali kegiatan	20

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

Capaian Kinerja Program

Program ini dimaksudkan mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum oleh aparaturn Linmas dan warga masyarakat yang ada di setiap kampung/kecamatan untuk melindungi diri dari gangguan tibumtranmas serta kesiapsiagaan/tanggap masyarakat akan terjadinya bencana dengan sasaran Meningkatkan peran linmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa (*community policing*) dan tanggap darurat bencana. Hasilnya bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.19.2.10
Capaian Kinerja Program

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
	SATUAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anggota Linmas yg terlatih dlm Pamswakarsa dan tanggap darurat bencana	Org	50	75	100	150	200	250

Hasil / Outcome Pelaksanaan pembangunan

- Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan anggota linmas dalam penanganan bencana di Jawa Timur;
- Terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat serta suasana yang kondusif, tenteram dan tertib di Jawa Timur;
- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan potensi masyarakat dan aparat linmas dalam meningkatkan sistramtibmas (*Community Policing*)
- Terwujudnya kemampuan anggota Satpol PP/ Linmas dalam tindak penanggulangan bencana di daerah.

Tabel 4.19.2.11

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan swakarsa (*community policing*).

NO.	KEGIATAN	TEMPAT	KET
1.	Simulasi Pam Swakarsa		
2.	Pembinaan Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur dalam Bidang Kelinmasan	Surabaya	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

Tabel 4.19.2.12

Kegiatan Pelatihan dan koordinasi potensi linmas dalam rangka pengamanan bencana.

NO.	KEGIATAN	TEMPAT	KET
1.	Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Tanggap Darurat Bencana	Tretes Raya Jl. Malabar 168 – 169 Tretes, Prigen Pasuruan	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan diantaranya yaitu :

- Kurangnya analisis mendalam terhadap penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan SDM serta volume tugas yang ada;

- Disiplin moril, motivasi, kreativitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja lembaga secara keseluruhan;
- Belum terintegrasinya sistem pelaporan kegiatan operasional di bidang kebencanaan;
- Sarana prasarana transportasi untuk menjangkau wilayah rawan bencana belum ada;
- Belum tersedianya posko permanen dengan dukungan logistik yang memadai bagi personil Pol PP dan Linmas sebagai pendukung operasional kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Upaya pemecahan masalah

- Evaluasi terhadap kuantitas dan kualitas staf yang ada yang ditindaklanjuti dengan penataan ulang terhadap penempatan para staf berdasarkan kemampuan SDM yang bersangkutan serta kebutuhan dan volume kegiatan masing-masing unit kerja ;
- Penerapan reward and punishment system secara obyektif dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kreativitas staf ;
- Kecerdasan intelektual, kemampuan konseptual, kemampuan teknis, kecerdasan emosional, dan dilengkapi dengan nilai-nilai spiritual perlu dimiliki setiap aparatur Satuan Polisi Pamong Praja/Linmas, sehingga menguasai Tupoksinya masing-masing;
- Perlu dilakukan redesign sistem, metode maupun kurikulum pelatihan dan pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
- Setiap pelaksanaan program diharapkan dapat menciptakan nilai, manfaat bagi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
- Perlu dialokasikan dan didistribusikan dukungan-dukungan sumber daya yang cukup bagi keperluan tercapainya shared value tersebut melalui pelaksanaan program;

- Perlu peningkatan dalam sistem informasi yang terintegrasi antara Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat Provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat Kabupaten/Kota;
- Perlu disusun berbagai pedoman-pedoman berupa petunjuk-petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan operasional dilapangan bagi aparat Linmas.

4) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.101.081.000,00 dengan realisasi Rp. 964.423,200,00 atau 87,59%, pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom

Tabel 4.19.2.13
Capaian Kinerja Program

Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah	
		2013	204
Rakor MPU	Kali	1	-
Rakor Kinerja Satpol PP	Kali	1	1
Rakor Sistem Informasi Manajemen (SIM) Satpol PP	Kali	1	1
Bintek Operator Sistem Informasi Manajemen (SIM) Satpol PP	Kali	1	1

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

b) Hasil Pelaksanaan pembangunan

- Terlaksananya Rakor Peningkatan Kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) serta validasi data kegiatan Satpol PP Prov. Jatim dan Satpol PP Kab/ Kota.
- Terselenggaranya Bimbingan Teknis Operator SIM Satpol PP
- Terlaksananya Rakor Sinkronisasi dan evaluasi program kegiatan satpol PP dalam persamaan persepsi kegiatan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Penyelenggaraan Tibumtranmas

Tabel 4.19.2.14**Kegiatan Peningkatan Kinerja Program Satpol PP.**

NO.	KEGIATAN	TEMPAT	KET
1.	Rakor Sinkronisasi dan Evaluasi program kegiatan satpol PP	Hotel Tretes View Pasuruan	
2.	Bintek Operator Sistem Informasi Manajemen (SIM) Satpol PP Kab/Kota Se Jatim	Hotel Aria Gajayana – Kota Malang	
3.	Rakor Peningkatan dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Satpol PP Kab/Kota Se Jatim	Hotel Utami Sidoarjo	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah**Permasalahan diantaranya yaitu :**

- Program dan kegiatan terkadang masih rancu atau tumpang tindih dengan kegiatan yang lainnya;
- Kelembagaan Satpol PP Kabupaten/Kota bervariasi serta eselonnya lebih rendah dari SKPD lainnya ;
- Kuantitas maupun kualitas anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas di Jawa Timur perlu ditingkatkan;
- Kualitas sarana dan prasarana pengadministrasian serta operasional perlu peningkatan.

Upaya pemecahan masalah

- Peningkatan kualitas SDM Pol PP dengan pembekalan melalui bintek, rakor dan operasional lapangan;
- Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional;
- Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Polisi Pamong Praja

19.3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Menurunnya Resiko Bencana di Jawa Timur;
- 2) Peningkatan responsifitas dalam menangani bencana pada saat Pra, Tanggap dan Transisi Bencana di Jawa Timur;
- 3) Meningkatkan pemulihan kawasan daerah pasca bencana di Jawa Timur.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 2.700.000.000,00 Realisasi sebesar Rp. 2.482.147.662,00 atau 91,93%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik kolom 16.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Tabel 4.19.3.1
Capaian program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Menurunnya resiko bencana di Jawa Timur	Bintek penyusunan rencana kontijensi	50 orang	40 orang	56 orang
	Fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah	40 orang	40 orang	
	Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana BPBD Kab / Kota dan lintas sektoral	65 orang	57 orang	76 orang
	Bintek fasilitator desa tangguh	-	53 orang	56 orang
	Gelar Kesiapan Gladi posko Banjir, longsor, tsunami	178 orang	284 orang	306 orang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
	dan gunung api			
	Bintek fasilitator edukasi penanggulangan bencana di sekolah	50 orang	57 orang	57 orang

Capaian Program

- Gladi Posko Bencana Tsunami, Banjir Longsor dan Gunung Api di BAKORWIL;
- Inisiasi KKN Tematik Bencana dalam rangka penanggulangan Bencana;
- Edukasi Penanggulangan Bencana Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah;
- Pengembangan Desa Tangguh;
- Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon);
- Operasional PUSDALOPS PB.

c) Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) pelaksanaan di sebagian Kab/Kota masih belum optimal dikarenakan pemahaman masyarakat di Kab/Kota pada daerah rawan bencana terhadap dampak bencana masih kurang, serta 4 Kab/kota yang belum membentuk dan 34 Kab/kota yang sudah terbentuk.

Pemecahan Masalah

- Melaksanakan sosialisasi penyusunan PRB di Daerah Kab/Kota di Daerah rawan bencana;
- Mendorong Kabupaten/Kota untuk segera membentuk BPBD.

2) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 2.670.000.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 2.491.942.725,00 atau 93,33%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik kolom 16.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Tabel 4.19.3.2
Capaian Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Peningkatan responsifitas dalam menangani bencana pada saat Pra, Tanggap dan Transisi Bencana di Jawa Timur	Pelatihan optimalisasi manajemen suplai logistik	-	40 orang	40 orang
	Sosialisasi peran gender tanggap darurat bencana	60 orang	70 orang	85 orang
	Pelatihan konsep operasi tanggap darurat	60 orang	40 orang	40 orang
	Rapat koordinasi Tim Reaksi Cepat	48 orang	60 orang	40 orang
	Pemenuhan kebutuhan dasar pd saat tanggap darurat bencana kekeringan, banjir longsor, angin puting beliung dan gn. berapi.	Masker : 15.000 lbr Sembako : 6.200 paket	Sembako : 2.240 paket	Sembako : 3.200 paket

Capaian Program

- ❖ Terlatihnya Aparatur dalam menangani bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- ❖ Meningkatkan Peranan Perempuan dalam penanganan tanggap darurat bencana di kawasan rawan bencana;
- ❖ Meningkatkan Aparatur dalam Penanganan Korban Bencana yang secara cepat, tepat dan efisien;
- ❖ Terpenuhinya kebutuhan Dasar pada status keadaan Darurat.

c) Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Belum ada aspek legal organisasi dan Protap Penanggulangan Bencana;
- Kurangnya aparatur yang terampil dalam mengoperasikan peralatan PB pada saat Tanggap Darurat Bencana;
- Belum tersedianya Elektronik Logistik (E-Logistik);
- Kelengkapan peralatan individu dan tim masih kurang, pelatihan yang diberikan masih merupakan pelatihan dasar.

Pemecahan Masalah

- Peningkatan Pelatihan baik aparatur maupun relawan dalam Penanggulangan Bencana (Pelatihan manajemen logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana sesuai dengan spesifikasi peralatan).

3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.740.000.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.694.905.440,00 atau 97,41%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik kolom 16.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Tabel 4.19.3.3
Capaian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Meningkatnya pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana di Jawa Timur	Pelatihan Damage and Losses Assesment	60 orang	70 orang	97 orang
	Workshop Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang sosial dan ekonomi	-	70 orang	95 orang
	Penyusunan standard operasional prosedur (SOP) penanganan pasca bencana di Jawa Timur	-	1 dokumen	-
	Pembuatan Aplikasi Kerusakan dan Kerugian Saran dan Prasarana Pasca Bencana di daerah rawan bencana	-	-	1 paket
	Kajian Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana (Kab. Bojonegoro, Kab. Kediri, Kab. Blitar dan Kab. Malang)	3 paket	3 paket	4 paket

Capaian Program

- Tersedianya Aplikasi Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasarana Pasca Bencana;
- Pelatihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Workshop Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana;
- Kajian pemulihan ekonomi pasca bencana banjir (Kab. Bojonegoro, Kab. Kediri, Kab. Blitar dan Kab. Malang).

c) Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Kurang Efektifnya Tim Penyusun verifikasi untuk menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana;
- Lemahnya koordinasi antar Instansi Pemerintah maupun antar Instansi Pemerintah dengan komponen masyarakat lain;
- Pola Pembangunan yang masih mengabaikan Bencana.

Pemecahan Masalah

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan dan upaya penanggulangannya;
- Merekrut tambahan Petugas dalam upaya penanggulangan bencana;
- Perlunya diselenggarakan Rapat Koordinasi antar Instansi Pemerintah maupun antar Instansi Pemerintah dengan komponen masyarakat lain.

4) Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.520.000.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.348.121.500,00 atau 88,69%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik kolom 16.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Capaian Program

- Rapat kerja daerah penanggulangan bencana Kabupaten / Kota se Jawa Timur;
- Penyusunan profil BPBD Provinsi Jawa Timur;
- Pemetaan Kekeringan di Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep dan Kab. Pacitan;
- Penyusunan SOP Peringatan Dini Banjir;
- Penyusunan SOP PUSDALOPS Penanggulangan Bencana.

c) Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal Penanggulangan Bencana di Jawa Timur;
- Belum tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi di daerah rawan bencana.

Pemecahan Masalah

- Sosialisasi dan Informasi kepada masyarakat tentang Penanggulangan Bencana di Jawa Timur;
- Segera menyusun Rencana Kontijensi seperti Renkon Tsunami, Renkon Gunung api dan Renkon Banjir longsor.

20.1. BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

a. Sasaran tahun 2014

- 1) Terselenggaranya pemerintah desa/kelurahan yang efektif dan efisien serta terfasilitasinya penyelesaian permasalahan administrasi serah terima P3D pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- 2) Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan

b. Program

1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.647.970.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.859.910.764,00 atau (78,40%) secara rinci masing masing anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan program pembangunan

- Penataan batas antar daerah, perselisihan, kode dan data administrasi wilayah pemerintahan
 - Untuk meminimalisir konflik terkait batas Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka tahun 2014 mengalami peningkatan dengan menambah 1 kabupaten yaitu pacitan menjadi 6 daerah karena tahun 2013 hanya 5 daerah.
 - Tahun 2014 telah melaksanakan prapatan pilar batas di 6 daerah antara lain :
 1. Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Rembang.
 2. Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Blora.
 3. Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Sragen.
 4. Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar.
 5. Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Wonogiri.
 6. Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Wonogiri.

- Pada Tahun 2014, telah terbit dua Permendagri yaitu:
 1. Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri;
 2. Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Trenggalek;
- Perselisihan Batas Kawasan Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, upaya penyelesaian terakhir dilakukan pada Tanggal 10-11 Nopember 2014, dengan dilaksanakan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di Kawasan Gunung Kelud, yang intinya mengharap Bp. Gubernur dapat memfasilitasi pertemuan kedua Bupati bersama Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) kedua kabupaten selanjutnya menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri.
- Gubernur Jawa Timur mencabut Keputusan Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 dan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas daerah Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur.
- Penyelenggaraan rapat kerja forum mitra praja utama (MPU)
 - Program ini juga memfasilitasi kegiatan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang merupakan forum kerja sama antar SKPD antar Provinsi. Adapun anggota FKD-MPU adalah provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.
- Penyelenggaraan rapat kerja gubernur forum asosiasi pemerintah propinsi seluruh Indonesia (APPSI)

- Pada Tahun 2014 Jawa Timur menjadi tuan rumah Rapat Kerja Seluruh Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia dengan hasil memberikan rekomendasi kepada Pusat mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemelihan gubernur, dana hibah untuk setiap provinsi dan lain lain.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah :

- Ketidakjelasan UU Pembentukan. Salah satu penyebab yang menonjol terdapat pada UU pembentukan Pemda, klausul tentang batas hanya disebutkan sebagai berbatasan dengan daerah tetangganya. Misalnya disebelah utara berbatasan dengan daerah A; di sebelah selatan berbatasan dengan daerah B dst. (sehingga muncullah perbedaan penafsiran antar UU, perbedaan pasal-pasal dengan peta lampiran, ketidakjelasan peta lampiran).
- Perebutan SDA. Kalau di daerah itu ada sumber SDA maka batas bisa jadi rebutan. Masing-masing pihak biasanya akan berlomba melayani dan itulah awal sengketa.
- Pelayanan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada warganya. Diharapkan warga yang ada di daerah batas tersebut lebih dekat dengan pusat-pusat pelayanan.
- Kurang optimalnya kesepakatan kerja sama antar SKPD antar Provinsi yang disepakati dalam rapat kerja Mitra Praja Utama (MPU).

Upaya Pemecahan Masalah

- Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang harus dipakai dalam mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi.
- Mediasi yang terus dilakukan dan komunikasi dengan kabupaten/kota.
- Meminimalisir munculnya ego daerah sebagai imbas dari kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan daerahnya.

- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah, terutama dalam mengatasi problem keterbatasan APBD dan sumber daya alam.
- Efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan publik.
- Meningkatkan daya saing daerah.
- Sinergitas antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Menyusun, menyeleksi dan mengusulkan kegiatan prioritas SKPD yang memerlukan kerja sama antar provinsi.

2) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

a) Pagu dan Realiasi anggaran

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi sebesar Rp. 1.302.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.193.084.764,00 (91,58%) secara rinci masing-masing anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan program pembangunan

Hasil/Outcome program ini adalah terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kondisi aman dan tertib serta terfasilitasinya pelaksanaan Pilkada dan pelantikan Kepala Daerah, dengan rincian:

Tabel 4.20.1.1
Pelantikan Kepala Daerah

URAIAN	2013	2014
Pelantikan	15	4
Pemilihan	19	-

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan Umum

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan pelaksanaan pilkada, hal ini mudahnya terkena hasutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan demikian perbuatan anarkis ada dimana-mana jika terjadi pilkada;

- Luasnya jangkauan wilayah dalam pelaksanaan pemilukada, khususnya Kabupaten Sumenep, ada beberapa kepulauan yang harus difasilitasi dalam pelaksanaan pemilukada;

Upaya Pemecahan Masalah

- Sosialisasi dan koordinasi tentang administrasi dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pilkada;
- Kerjasama dengan TNI dalam distribusi logistik dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kerawanan keamanan dan ketertiban yang timbul dalam pelaksanaan pilkada.

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15.540.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.338.374.043,00 atau (79,39%), secara rinci masing-masing anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada **lampiran matrik 16 kolom**.

b) Hasil pelaksanaan program

- Terlaksananya Sosialisasi UU 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ke-69 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dilaksanakan dengan berbagai kegiatan diantaranya : Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-69 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 bertempat di Halaman Grahadi dengan inspektur upacara Bpk. Gubernur Jawa Timur, kegiatan lainnya adalah Jalan Sehat Gubernur Jawa Timur bersama warga masyarakat yang diikuti ± 7.500 orang, pagelaran wayang kulit dan lain-lain.
- Teraihnya tanda kehormatan samkarya nugraha parasamya purnakarya nugraha karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Gubernur Jawa Timur. Dan tercapainya

kinerja laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan predikat Sangat Tinggi pada 24 kabupaten/Kota dan 14 kabupaten Kota yang berkinerja tinggi.

- Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Terhimpunnya data terkait dengan aset hasil penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) di lingkungan pemerintah kabupaten / kota se-Jawa Timur untuk bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi aset. Terhimpunnya data dan dokumen terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri atas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
- Untuk Tahun 2013 telah diterbitkan 111 Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur, 23 Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur, 24 Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Tahun 2014 telah diterbitkan 29 Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur, 26 Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan 2 Keputusan Menteri Dalam

Negeri RI tentang Peresmian Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2014 juga telah diterbitkan 38 Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014 (karena berakhirnya masa jabatan), 38 Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019, 38 Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019. Dan 100 Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014 (karena berakhir masa jabatan) serta 100 Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019, 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019.

Tabel 4.20.1.2
Capaian Kinerja Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2013-2014

URAIAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
	SATUAN	TAHUN 2013			TAHUN 2014	
		P. HENTI & P. ANGKAT	P. HENTI	P. ANGKAT	P. HENTI	P. ANGKAT
Paw Dprd Prov	Sk/Org (Menda Gri)	1	7	7	2	2
Paw Dprd Kab/Kota	Sk/Org (Gub)	111	23	24	29	26
Peresmian Anggota Dprd Prov (Hsl Pileg)	Sk/Org (Menda Gri)				100	100
Peresmian Pimp Dprd Prov	Sk/Org (Menda Gri)					1
Peresmian Anggota Dprd Kab/Kota (Hsl Pileg)	Sk/Org (Gub)				38	38

URAIAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
	SATUAN	TAHUN 2013			TAHUN 2014	
		P. HENTI & P. ANGKAT	P. HENTI	P. ANGKAT	P. HENTI	P. ANGKAT
Peresmian Pimp Dprd Kab/Kota	Sk/Org (Gub)					38

- Terfasilitasinya penyaluran Bantuan Keuangan Desa (BKD) sebanyak 1.250 desa.
- Terlaksananya monitoring dan rapat koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan di Jawa Timur.
- Pembakuan Nama-Nama Rupabumi merupakan kegiatan prioritas dalam bidang toponimi, berdasarkan data standar dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia ternyata masih banyak bentuk rupabumi yang belum diberi nama. Khusus Provinsi Jawa Timur yang tercatat di 13 (tiga belas) Kabupaten terdapat 445 (empat ratus empat puluh lima) pulau yang sudah bernama sesuai data pulau yang ada di Kementerian Dalam Negeri RI.
- Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XVIII Tahun 2014 yang terdiri atas kegiatan diskusi publik otonomi daerah dan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XVIII Tahun 2014 dan upacara penerimaan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha.
- Terlaksananya sosialisasi UU 24 tahun 2013 atas perubahan UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Serta terlaksananya pencatatan kelahiran dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial melalui system relasi. Selain itu juga terintegrasinya pencatatan pernikahan melalui sistem administrasi kependudukan (SIK) dan pelayanan pencatatan nikah melalui sistem manajemen nikah (SIMK) di Kementerian Agama.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Yang dilakukan :

Permasalahan

- Kurangnya partisipasi pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat umum dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan pada Tanggal 12 Oktober, sehingga kegiatan

sosialisasi dan kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat perlu didorong untuk tetap dilaksanakan.

- Capaian kinerja data agregasi pada LPPD Kab/Kota tidak sesuai dengan data yang ada pada SKPD Provinsi Jawa Timur pelaksana urusan wajib dan pilihan.
- Permasalahan dalam rangka fasilitasi P3D adalah karena banyaknya dokumen yang hilang seiring proses penyerahan yang dilakukan sejak Tahun 2000 dan sebelumnya sehingga pada saat proses sertifikasi mengalami permasalahan, solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan inventarisasi kembali data dan dokumen P3D. Permasalahan terkait NSPK adalah dikarenakan masih banyak kementerian/lembaga yang belum menetapkan NSPK sehingga perlu terus mendorong kementerian/lembaga agar menetapkan NSPK melalui fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
- Ada kesalahan dalam pencatuman Dapil pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 22 Agustus 2014 Nomor 161.35-3355 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Belum optimalnya koordinasi pelaporan pelaksanaan dekosentrasi dan tugas pembantuan.
- Kurang tersosialisasikan maksud dan tujuan penyelenggaraan peringatan Hari Otonomi Daerah sebagai momentum mengapresiasi dan merefleksikan tercapainya otonomi daerah sampai dengan masyarakat.
- Kurangnya partisipasi Kab/Kota dalam melakukan pendataan rentan administrasi kependudukan. Dan masih banyak blangko KTP-el yang belum tercetak, sedangkan permohonan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan masih banyak yang belum tertangani. Kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan, karena masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sirri.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Peran serta masyarakat perlu didorong untuk tetap dilaksanakan.
- Melakukan fasilitasi peningkatan kinerja pada LPPD Kabupaten/Kota dan melaksanakan verifikasi/validasi data agregasi pada LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Inventarisasi kembali data dan dokumen P3D dan mendorong Kementerian/lembaga agar menetapkan NSPK melalui fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
- Gubernur Jawa Timur menyampaikan permohonan perbaikan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 2014 Nomor 161.35-3355 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dimaksud melalui surat tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 171/23621/2014. Dan telah dilakukan perbaikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.35-4635 Tahun 2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.35-3355 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- Dengan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat luas agar turut mencermati dan mengamati serta memberikan saran pendapat yang positif bagi pelaksanaan otonomi daerah.
- Mendorong 38 kab/Kota untuk melakukan kerjasama dengan instansi pelayan public sekaligus pengintegrasian database kependudukan dalam pelayanan pencatatan sipil.
- Mendorong Kab/Kota untuk mempersiapkan pencetakan blangko KTP-el setelah ada penghentian percetakan dari Kementerian Dalam Negeri.

4) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran untuk program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp. 5.815.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.063.492.925,00 (52,67%), secara rinci masing-masing anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16kolom.

b) Hasil pelaksanaan Pembangunan

- Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja kecamatan dan pelaksanaan sosialisasi, koordinasi percepatan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di wilayah Provinsi Jawa Timur
- Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan di wilayah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat. Pelaksanaan PATEN telah berjalan di Kabupaten Sumenep, Sidoarjo, Situbondo, Jember, Tuban dan Kota Probolinggo.
- Terlaksananya Sosialisasi UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang diikuti seluruh Kab/Kota di Jawa Timur.
- Terlaksananya Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Jawa Timur
- Terlaksananya Rakor Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/China dan diserahterimkannya 5 (lima) Aset Bekas Milik Asing/China kepada Pemerintah Daerah.
- Terlaksananya Rakor Penanganan Imigran, Pengungsi, Tenaga Kerja Asing dan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*).

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Masih banyaknya Bupati/Walikota yang belum melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat sehingga pelaksanaan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Provinsi Jawa Timur belum maksimal.

- Masih belum terpenuhinya persyaratan administrasi dalam penyerahan aset bekas milik china/asing dari Pemerintah Daerah.
- Kurangnya sosialisasi masalah penyelundupan manusia di daerah rawan lokasi penyelundupan.

Upaya Pemecahan Yang Dilakukan :

- Dilakukannya fasilitasi dan sosialisasi terhadap Bupati/Walikota agar segera melimpahkan sebagian wewenang kepada Camat sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Dilakukannya fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi penyerahan aset bekas milik asing/china.
- Dilakukan kerja sama antar instansi yang terkait dengan pengawasan masuknya orang asing seperti kantor Imigrasi dan POLDA Jatim.

20.2 BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA

a. Sasaran Tahun 2014

Sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) - Biro Administrasi Kerjasama, serta untuk mendukung efektifitas dan konsistensi perencanaan program, kegiatan dan anggaran Biro Administrasi Kerjasama pada Tahun 2014 telah ditetapkan sasaran, yaitu :

Terselenggaranya fasilitasi, katalisasi, akselerasi dalam kerjasama dengan mitra kerja, baik pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Lembaga Nasional/Internasional, dan pemerintah Luar Negeri;

b. Program

Bahwa sebagai upaya untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut, Biro Administrasi Kerjasama selaku SKPD memperoleh alokasi anggaran sebesar RP. 16.015.000.000,00 yang diimplementasikan melalui program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Untuk mendukung tersedianya *database* kelembagaan pemerintah daerah sebagai penunjang Pusat Data Kerjasama Provinsi Jawa Timur, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 14.649.150,00 atau 48,83%.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan

Hasil pelaksanaan program/ kegiatan adalah tersusunnya database yang up to date sebagai penunjang pusat data.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

Keterbatasan kemampuan sumberdaya, baik biaya maupun SDM dalam memperoleh data untuk *update database*.

Upaya pemecahan masalah:

Untuk mengatasi tersebut, maka diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan dinas/instansi terkait update data.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pagu dan realisasi anggaran

Untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 910.000.000,00 dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 874.694.470,00 atau 96,12%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom

b) Hasil pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan adalah tercapai pelayanan publik yang optimal.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

Rendahnya tingkat kemampuan pegawai terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Hal ini, antara lain disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.

Upaya pemecahan masalah:

Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain selalu meningkatkan kemampuan pegawai terhadap pemahaman ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Program Peningkatan Kerjasama

a) Pagu dan realisasi anggaran

Untuk mendukung terwujudnya kerjasama dalam berbagai bidang antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota dan lembaga di dalam negeri serta dengan pemerintah provinsi/negara bagian dan lembaga di luar negeri, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.075.000.000,00 dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 12.819.430.934,00 atau 83,71%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom

b) Hasil pelaksanaan Pembangunan

Program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Asisten, Biro, Bagian Dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Gubernur Jawa Timur, yang menekankan pentingnya kerja sama daerah dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, program peningkatan kerja sama diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, pembangunan dan teknologi.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Kabupaten/kota dan provinsi sebagai subyek utama kerja sama daerah minim dalam memberikan prioritas terhadap pelaksanaan kerja sama antar daerah dan lembaga internasional.
- Perbedaan sistem pemerintahan, kalender dan pengadministrasian serta penganggaran keuangan, situasi dan kondisi politik, kondisi lingkungan, serta belum optimalnya tindaklanjut dari hasil kunjungan ke negara-negara mitra kerja sama yang melibatkan SKPD terkait atau lembaga sosial lainnya akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri dan lembaga.
- Belum optimalnya kerja sama antar kabupaten/kota dan provinsi yang memberikan dampak peningkatan daya saing dan nilai jual daerah Jawa Timur.
- Masih lemahnya daya dukung sumberdaya manusia yang menangani kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas.

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlu terus dilakukan sosialisasi terhadap peraturan atau perundang-perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan kerjasama.
- Perlu dilakukan komunikasi yang lebih intensif dengan mitra di luar negeri.
- Perlu dilakukan pemetaan data potensi kerjasama pada masing-masing daerah kabupaten/ kotadi Jawa Timur.
- Secara bertahap akan dilakukan pembinaan dan mengikutsertakan pegawai pada pelatihan penyusunan legal drafting.

20.3 BIRO HUKUM

a) Sasaran Tahun 2014

1. Terciptanya penegakan hukum yang bersih, professional adil, konsekuen dan tidak diskriminatif dan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.
2. Terlaksananya penanganan gugatan perkara dan pemberian pertimbangan hukum.
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan HAM

b) Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program sebagai berikut:

1) Program Pembentukan Produk Hukum.

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran.

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 5.997.855.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.632.202.223,00 atau 93,90%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Sesuai dengan target kinerja Tahun 2014, maka realisasi kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20.3.1
Capaian Program Pembentukan Produk Hukum

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya upload produk hukum yang dimiliki pengelola JDIH melalui website http://jdih.jatimprov.go.id	950 produk hukum	950 produk hukum	100%
2.	Jumlah penambahan koleksi buku dan	250 data buku	250 data buku	100%

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	pengelolaan buku pada perpustakaan.			
3.	Jumlah gugatan perkara yang ditangani.	40 perkara	78 perkara	195%
4.	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui siaran di RRI yang terlaksana dan melalui kesenian tradisional.	9 kali	9 kali	100%
5.	Jumlah Peraturan Gubernur Jawa Timur.	100 Pergub	93 pergub	93%
6.	Jumlah Keputusan Gubernur Jawa Timur/Instruksi Gubernur Jawa Timur.	700 Kepgub/Insgub	700 Kepgub/Insgub	100%
7.	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.	23 perda	14 perda	60,9%
8.	Jumlah buku Lembaran Daerah/Berita Daerah	1400 buku	1400 buku	100%
9.	Jumlah produk hukum yang telah diklarifikasi dan dievaluasi	600 Perda/Raperda	435 Perda/Raperda	72,5%

Sumber: Biro Hukum Setda Prov. Jatim

- Terwujudnya upload 950 produk hukum yang dimiliki pengelola JDIIH melalui website <http://jdih.jatimprov.go.id> yang rata-rata perbulan 1.584 pengunjung dari total pengunjung 1.179.143 perawatan jaringan dan software website <http://jdih.jatimprov.go.id>.
- Terlaksananya pengadaan buku peraturan perundang-undangan/literatur hukum/literatur umum untuk koleksi perpustakaan sebanyak 140 buku, 24 eksemplar buku himpunan kliping hukum dan politik.

- Terlaksananya penyelesaian perkara pada tahun 2014 sebanyak 78 perkara (195%) dari target yang direncanakan sebesar 40 perkara.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

1. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan dikarenakan rancangan yang memerlukan pendalaman materi sehingga menyita banyak waktu dan tenaga dan ketidaksiapan SKPD pengusul baik dari segi anggaran biaya maupun penyusunan naskah akademiknya.
2. Masih banyak rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD dalam Prolegda masih berupa judul saja sehingga waktu akan dibahas oleh Komisi Pembahas DPRD, pengusul dari DPRD tidak siap dalam menyusun naskah akademik maupun konsep rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
3. Kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan karena Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin menyebut bahwa pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui dana hibah. Ketentuan ini tidak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
4. Adanya kendala dalam pemeliharaan website yang dipihak ketiga kan, sehingga 9 (Sembilan) Kab/Kota belum dibuatkan web. Serta pemindahan produk hukum Kab./Kota belum selesai seluruhnya.
5. Lokasi/tempat keberadaan perpustakaan yang kurang strategis.
6. Kendala dalam menentukan materi yang akan disosialisasikan.
7. Berdasarkan data Perda Tahun 2013 pelaksanaan klarifikasi dilakukan dengan cara menyampaikan surat permintaan masukan/pertimbangan terhadap materi perda kepada SKPD terkait sesuai dengan substansi materi Perda. Pelaksanaan klarifikasi tersebut tidak ada standar waktu

penyelesaian dan sangat tergantung dari dinas/instansi pemberi pertimbangan, sehingga waktu penyelesaian yg diperlukan bisa sangat lama yaitu 1 (satu) perda memerlukan waktu rata-rata 65 hari, padahal perda tersebut penyelesaiannya sangat ditunggu oleh Kabupaten/Kota untuk bisa segera diimplementasikan di daerah.

Upaya pemecahan masalah :

1. SKPD pengusul dalam mengusulkan rancangan Peraturan Daerah didalam Prolegda harus disertai juga dengan rancangan penganggarannya didalam APBD, karena sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011, bahwa penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi.
2. Anggota DPRD, Komisi DPRD maupun anggota Balegda yang mengusulkan rancangan Peraturan Daerah di dalam Prolegda seharusnya disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda berupa latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan. Jadi tidak hanya mengajukan judul rancangan Peraturan Daerah saja sehingga dapat dinilai kesiapan dari pengusul untuk tahap penyusunan naskah akademik dan draft rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
3. Menteri Dalam Negeri melalui surat kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 11 April 2014 Nomor : 188.34/1839/SJ perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, pada intinya meminta supaya dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012. Dengan demikian apabila Peraturan Daerah dimaksud dapat segera dilakukan perubahan, maka pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat segera dilaksanakan.
4. Konsultasi pemeliharaan website ke Pemerintah Kota Surabaya yang sudah mandiri dan menentukan rekanan IT yang kompeten. Selanjutnya menyelesaikan pemindahan/migrasi produk hukum Kab./Kota secepatnya.

5. Koordinasi dengan Bappeda, BPKAD dan Biro Umum agar diberikan tempat yang representative.
6. Memilih dan memilah peraturan yang akan disosialisasikan.
7. Mulai tahun 2014 pelaksanaan klarifikasi diubah dengan pola tatap muka, yakni Perda dibahas dalam rapat dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan SKPD terkait, Setelah dilakukan perubahan pola klarifikasi membuahkan hasil yang sangat menggembirakan yaitu waktu yang diperlukan menjadi lebih cepat (dari 241 Perda diperlukan waktu penyelesaian selama 6.608 hari sehingga setiap Perda rata-rata memerlukan waktu 27 hari).

2) Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 1.802.145.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.647.064.138,00 atau 91,39%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Sesuai dengan target kinerja Tahun 2014, maka realisasi kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20.3.2
Capaian Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi panitia pelaksana RANHAM Provinsi Jawa Timur.	26 Kab/Kota	26 Kab/Kota	100 %
2.	Jumlah peserta yang mengikuti rakor Pengelola JDIH Kabupaten/Kota.	86 peserta	86 peserta	100%
3.	Jumlah desa yang mendapatkan penyuluhan hukum.	19 desa	19 desa	100%

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4.	Jumlah bantuan/pertimbangan hukum yang diberikan.	95 kasus	110 kasus	115,79%

Sumber: Biro Hukum Setda Prov. Jatim

1. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur, pengadministrasian LHKPN pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta memfasilitasi pelaksanaan verifikasi Kabupaten/Kota peduli HAM di Jawa Timur;
2. Terlaksananya bimbingan teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) guna peningkatan pengetahuan sumber daya manusia sebagai pengelola dokumentasi dan informasi hukum.
3. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan aparat hukum dan lembaga swadaya masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran tentang hukum.
4. Terwujudnya peningkatan tugas bantuan/pertimbangan hukum terhadap pengaduan yang masuk.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Menentukan tempat/lokasi desa sebagai tempat sosialisasi hukum.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam menentukan desa sebagai tempat sosialisasi.

20.4. BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan evaluasi bidang perekonomian

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 756.332.500,00 dengan Realisasi Program sebesar Rp. 716.348.070,00 atau mencapai 94,71%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program ini antara lain didukung oleh kegiatan penerbitan majalah SAREKDA, dengan capaian sebagai berikut :

- Penertiban Majalah SAREKDA, yang memberikan informasi kinerja ekonomi Jawa Timur kepada Kab/Kota/Bakorwil/Badan/Dinas/Instansi dan BUMD di Provinsi Jawa Timur. Majalah SAREKDA memuat informasi antara lain tentang pertumbuhan ekonomi kreatif, investasi, pengembangan BUMD-BUMD di Jawa Timur, UMKM dan pasar produk Jawa Timur, sampai pada informasi pariwisata dan kuliner unggulan yang memang memerlukan media promosi.
- Majalah SAREKDA terbit sebanyak 3 (tiga) edisi dalam 1 (satu) tahun, dimana di setiap edisinya dicetak sebanyak rata-rata 1.000 eksemplar. Dengan memperhatikan aspek efisiensi penyampaian informasi, pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlahnya sebesar 20% menjadi sebanyak 800 eksemplar.

Adapun pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.20.4.1
Jumlah Majalah SAREKDA Tahun 2012 – 2014

No.	Majalah	Satuan	2012	2013	2014
1.	SAREKDA	eks	2 edisi @ 1.000 eks	3 edisi @ 1.000 eks	3 edisi @ 800 eks

a) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Draft tulisan yang sering terlambat, berakibatnya terhambat pula proses cetak dan distribusi majalah.

Upaya Pemecahan Masalah

Membentuk tim liputan yang mampu menyajikan isu strategis perekonomian Jawa Timur secara tepat dan cepat, agar informasi yang disajikan tetap up to date.

2) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

b) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 50.148.897.500,00 dengan Realisasi Program sebesar Rp. 37.616.632.608,00 atau mencapai 75,01%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom

c) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program tersebut antara lain didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada UMKMK, dengan capaian sebagai berikut :
Capaian Dana Bergulir (Dagulir) sampai dengan bulan Nopember 2014 sebesar 860,197 Milyar atau meningkat sebesar 7,70% dibanding capaian tahun 2013 sebesar 798,687 Milyar. Hal ini disebabkan adanya sosialisasi oleh Bank-bank pelaksana Dagulir (Bank Jatim dan Bank BPR Jatim) hingga ke pelosok-pelosok Jawa Timur.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Optimalisasi Pengembangan BUMD di Jatim, dengan capaian sebagai berikut :

Capaian PAD Jawa Timur tahun 2014 sebesar Rp. 340,020 Milyar. Meningkat sebesar 1,52 % dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 334,920 Milyar. Hal ini disebabkan tidak terpenuhi target BUMD-BUMD di Jawa Timur.

3. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian sebagai berikut :

Jumlah pameran dalam dan luar negeri yang diikuti dalam rangka fasilitasi produk unggulan UMKM di Jawa Timur sebanyak 36 pameran, dengan rincian 34 pameran dalam negeri (Surabaya, Malang, Gresik, Jakarta, Sulawesi Tenggara, Medan, dan Batam) dan 2 pameran luar negeri (Korea dan Tianjin). UMKM yang difasilitasi pada tahun 2014 sebanyak 521 UMKM, mengalami peningkatan sebesar 7,20% dibandingkan tahun 2013 yang memfasilitasi 486 UMKM. Hal ini disebabkan oleh jumlah pameran yang diikuti lebih sedikit tetapi dalam skala yang lebih besar sehingga dapat memfasilitasi lebih banyak UMKM.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.20.4.2
Capaian Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1.	Dagulir	Milyar	444,701	798,687	860,197 (Nop 2014)
2.	PAD-BUMD	Milyar	352,816	334,920	340,020
3.	Pameran				
	Jumlah	Kali	37	38	36
	UMKM	UKM	442	486	521

d) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Terbatasnya jangkauan bank pelaksana Dagulir (Bank Jatim dan BPR Jatim) dalam melakukan monitoring dan supervisi
- Dari 12 (dua belas) BUMD di Jawa Timur, 3 (tiga) BUMD tidak dapat memenuhi target PAD, yakni PT. JIM, PT. Jatim Krida Utama dan PT. Jatim Marga Utama
- Minimnya jumlah stand bagi UMKM yang tersedia, sehingga jumlah UMKM yang difasilitasi untuk mengikuti pameran juga terbatas

Upaya Pemecahan Masalah

- Bank-bank pelaksana memiliki tim yang menjangkau debitur ke pelosok-pelosok Jawa Timur
- Pemerintah Provinsi Jatim akan merestrukturisasi melalui penggabungan PT. JIM dan PT. JMU menjadi Holding Company yang bergerak dibidang infrastruktur dan logistik. Sedangkan pendirian PT. JKU tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, tetapi lebih diprioritaskan untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran
- Perlunya monitoring dan evaluasi terhadap UMKM yang telah difasilitasi, untuk mengetahui hasil yang dicapai, serta mengetahui kesulitan yang dialami

20.5. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas system pengadaan barang/jasa
- 2) Meningkatnya tertib administrasi pembangunan
- 3) Meningkatnya percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur di Jawa Timur

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran pada program ini sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.192.147.355,00 atau 74,61%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Persentase pegawai Pemprov yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pada tahun 2014 sebesar 22,78 %, menurun dibanding dengan tahun 2013 sebesar 27,97%. Hal ini disebabkan pegawai yang diikut sertakan untuk ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dari SKPD di lingkungan Pemprov Jatim tidak punya kemauan untuk lulus.
- Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui LPSE pada tahun 2014 sebesar 94,62% meningkat dibanding dengan tahun 2013 sebesar 89,77%. Hal ini disebabkan pada tahun 2014 SKPD di lingkungan Pemprov Jatim sudah memahami tentang regulasi yang tentang pengadaan barang/jasa.
- Persentase penyerapan dana APBD secara online sesuai dengan ketentuan pada tahun 2014 sebesar 95,70% meningkat dibanding

dengan tahun 2013 sebesar 94,74%. Hal ini disebabkan proses pengadaan barang/jasa berjalan dengan baik, sehingga serapan anggaran mengalami peningkatan.

- Persentase penyerapan dana APBN secara online sesuai dengan ketentuan pada tahun 2014 sebesar 81,80% menurun dibanding dengan tahun 2013 sebesar 85%. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan Pileg dan Pilpres sehingga dana APBN untuk sementara dihentikan. Setelah selesainya Pileg dan Pilpres dana baru diluncurkan lagi namun waktunya tidak mencukupi dalam melaksanakan kegiatan.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan table sebagai berikut :

Tabel 4.20.5.1
Persentase Kelulusan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Tahun 2013 - 2014

Tahun	Jumlah Peserta Ujian	Lulus	%
2013	597 Orang	167 orang	27,97
2014	654 Orang	149 orang	22,78

Sumber : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tabel 4.20.5.2
Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP dan
LPSE Tahun 2013 - 2014

No.	Komponen	Satuan	2013	2014
1.	L P S E	Paket	1.374	1.230

Sumber : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tabel 4.20.5.3
Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBD dan APBN
PROV. JATIM Tahun 2013 - 2014

Sumber Dana	Realisasi 2013			Realisasi 2014		
	Fisik	%	Keuangan	Fisik	%	Keuangan
APBN	90	85,00	1.251.498.576.171	85	81,80	1.251.498.576.171
APBD	98	94,74	16.684.665.824.500	98	95,70	16.684.665.824.500

Sumber : SMEP Online Biro Administrasi Pmbangunan

c) Permasalahan dan upaya penyelesaian masalah

Permasalahan :

- Belum semua peserta ujian sertifikasi memiliki kesadaran dan kemauan untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti ujian sertifikasi.
- Belum meratanya personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pada setiap SKPD.
- Kemampuan SDM baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa dalam proses pelelangan kurang memadai.
- Terlambatnya pengajuan pencairan dana dari pihak penyedia barang/jasa pada kegiatan yang didanai dari APBD.
- Adanya pelaksanaan Pileg dan Pilpres sehingga dana APBN untuk sementara dihentikan. Setelah selesainya Pileg dan Pilpres dana baru diluncurkan lagi namun waktunya tidak mencukupi dalam melaksanakan kegiatan.

Upaya pemecahan masalah :

- Memberikan motivasi dan penghargaan kepada peserta yang berhasil lulus ujian sertifikasi serta memberdayakannya.
- Selalu mengadakan bintek dan ujian secara rutin dan berkesinambungan terhadap SKPD yang belum memiliki personil bersertifikat.
- Dilaksanakan pelatihan-pelatihan khusus proses pengadaan barang dan jasa bagi pengguna maupun penyedia jasa.
- Lebih diintensifkan dalam koordinasi dengan Kementrian agar Petunjuk Operasional bisa segera diterbitkan.
- Menghimbau kepada penyedia jasa agar supaya kalau pekerjaan telah selesai segera mencairkan dana.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran pada program ini sebesar Rp. 14.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.123.943.730,00 atau 78,89%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sebesar 99,39%, menurun dibanding dengan tahun 2013 sebesar 100 %. Hal ini disebabkan pengadaan almari untuk ruang kerja pimpinan Setda sudah dicukupi oleh Biro Umum.
- Jumlah buku standar satuan harga yang tersusun tahun 2014 sebanyak 2 buku, meningkat dibanding dengan tahun 2013 sebanyak 1 buku. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 buku standar satuan harga yang disusun hanya buku standar satuan harga barang/jasa, sedangkan pada tahun 2014 ditambah buku harga satuan pokok kegiatan.
- Jumlah buku Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun tahun 2014 sebanyak 3 buku, tetap dibanding dengan tahun 2013 sebanyak 3 buku.

Tabel 4.20.5.4
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Tahun 2013 - 2014

No.	Komponen	Satuan	2013	2014
1.	Sarana dan Prasarana	%	100	99,39

Sumber : Biro Adm. Pembangunan Setda

Tabel 4.20.5.5
Buku Standar Satuan Harga Tahun 2013 - 2014

No.	Komponen	Satuan	2013	2014
1.	Standar Satuan Harga Barang/Jasa	Buku	1	1
2.	Harga Satuan Pokok Kegiatan	Buku	-	1

Sumber : Biro Adm. Pembangunan Setda

Tabel 4.20.5.6
Buku Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Tahun 2013 – 2014

No.	Komponen	Satuan	2013	2014
1.	DKPBMD	Buku	1	1
2.	DKBMD	Buku	1	1
3.	HPB	Buku	1	1

Sumber : Biro Adm. Pembangunan Setda

c) Permasalahan dan upaya penyelesaian masalah

Permasalahan :

- Masih belum sinerginya perencanaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur

Upaya pemecahan masalah :

- Selalu melakukan koordinasi dalam mengalokasikan anggaran dalam perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur

3) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran pada program ini sebesar Rp. 4.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.850.999.463,00 atau 80,23%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan tahun 2014 sebanyak 1 kebijakan tetap dibanding dengan tahun 2013 sebanyak 1 kebijakan.
- Jumlah laporan progress fisik pembangunan infrastruktur di Jawa Timur tahun 2014 sebanyak 8 laporan tetap dibanding dengan tahun 2013 sebanyak 8 laporan.

Tabel 4.20.5.7
Buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2014

No.	Komponen	Satuan	2013	2014
1.	Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Buku	1	1

Sumber : Biro Adm.Pembangunan Setda

Tabel 4.20.5.8
Progres Infrastruktur dan Penetapan Lokasi
Tahun 2013 - 2014

No.	Komponen	Satuan	2013	2014
1.	Progres Infrastruktur	Laporan	6	8
2.	Rekomendasi Penetapan Lokasi	SK	40	40

Sumber : Biro Adm.Pembangunan Setda

c) Permasalahan dan upaya penyelesaian masalah

Permasalahan

- Kendala pembebasan lahan, karena adanya beberapa pemilik lahan yang belum sepakat nilai ganti kerugian tanah, sehingga berakibat molornya pelaksanaan pembangunan fisik.
- Proses pelepasan Tanah Kas Desa sulit mencarikan tanah pengganti dalam satu desa.
- Lamanya pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan oleh instansi yang memerlukan tanah yang sesuai dengan amanah Perpres 71 Tahun 2012.
- Lamanya pemenuhan Peta Lokasi oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- Belum pahamnya instansi pemohon dalam penganggaran seluruh rangkaian kegiatan Tahap Persiapan Pengadaan Tanah sehingga banyak kegiatan tidak dianggarkan.

Upaya pemecahan masalah :

- Mediasi dan fasilitasi dengan mengundang warga yang keberatan terhadap kesepakatan warga untuk dilakukan pendekatan agar ditemukan kesepakatan harga.
- Dicarikan lahan pengganti di desa lain tetapi harus dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- Dilaksanakan ekspose dokumen perencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada sekretariat tim persiapan, untuk dapat diperbaiki sebagaimana amanah perpres 71 tahun 2012.
- Diarahkan agar lebih mencermati Permendagri Nomor 72 Tahun 2012, Permenkeu Nomor 13 PMK 02 Tahun 2013 dalam penganggaran biaya operasional dan biaya pendukung.

20.6. BIRO ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Tersedianya jumlah Rumusan Kebijakan terkair sumber Daya alam;
- 2) Tersedianya Evaluasi Kebijakan bidang Sumber Daya Alam.

b. Program :

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, didukung dengan Kegiatan pelaksanaan pengembangan Aparat Pelayanan Publik,

a) Pagu dan realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 8.594.611.320,00 telah terealisasi sebesar Rp. 4.041.212.860,00 atau sebesar 47,02%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pembangunan (Capaian Program)

meningkatnya jumlah/partisipasi dari kelompok masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui penyaluran dana hibah di Jawa Timur.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Terbatasnya pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap kelompok masyarakat penerima dana dari Pemerintah;
- Masih adanya kurang pemahaman dari kelompok masyarakat akan penggunaan dana hibah dari Pemerintah.

Upaya Pemecahan masalah :

- Meningkatkan jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat mengenai pemanfaatan Bantuan dari Pemerintah dengan menghadirkan narasumber/tenaga ahli dibidangnya.

2) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Bidang Perekonomian,

a) Pagu dan Realisasi Anggaran ;

Pagu Anggaran Program ini adalah sebesar Rp. 33.411.580.140,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.537.121.985,00 atau sebesar 43,51%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pembangunan (Capaian Program)

- Terwujudnya pelaksanaan PENAS ke-XIV di Kabupaten Malang;
- Tersedianya laporan hasil pemantauan tentang kebijakan pengelolaan peternakan, perikanan dan kelautan di Jawa Timur

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Lemahnya koordinasi pelaksanaan kegiatan PENAS ke XIV di Kab. Malang;
- Terbatasnya perangkat database pengelolaan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan di Jawa Timur.

Upaya pemecahan masalah :

- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan PENAS ke depan yang rencananya dilaksanakan di Banda Aceh;
- Menyiapkan perangkat baik Hardware maupun soft ware dalam penyediaan data terkait kebijakan pengelolaan sumber daya peternakan, perikanan dan kelautan di Jawa Timur.

3) Program Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan,

a) Pagu dan Realisasi Anggaran ;

Pagu Anggaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 20.952.408.540,00 realisasi sebesar Rp. 6.464.125.430,00 atau (30,85%), pagu dan realisasi anggaran masing-masing dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pembangunan (Capaian Program)

- Tersusunnya rumusan kebijakan terkait rencana aksi pengelolaan Kali Surabaya sebagai kawasan suaka Ikan ;
- Tersedianya rumusan dan evaluasi pelaksanaan PENAS ke-XIV di Malang;
- Tersedianya rumusan kebijakan pengelolaan Sumberdaya alam di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan di Jawa Timur;
- Tersedianya Laporan pelaksanaan Pergub Nomor 67 tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Timur.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Belum maksimalnya koordinasi terkait pengelolaan Kali Surabaya, baik Instansi Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Masyarakat sekitarnya;
- Kurang maksimalnya kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah yang dilakukan/disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- Belum adanya suatu wadah database terkait pelaksanaan kegiatan Hemat energy di Jawa Timur;

Upaya Pemecahan Masalah :

- Perlunya peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait melalui penetapan kebijakan masing-masing penanggung jawab disekitar Kali Surabaya;
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait tindak lanjut pelaksanaan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Timur.

20.7 BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya Penanganan PMKS dan Kejadian bencana di Jawa Timur
- 2) Meningkatnya fasilitasi dibidang ketenagakerjaan
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan

b. Program

1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spritual.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 15.055.119.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.074.983.109,00 atau 86,85%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Capaian sasaran kinerja meningkatnya penanganan PMKS dan kejadian bencana di Jawa Timur pada tahun 2013 rata-rata persentase capaian sasaran mencapai 78,9%. Berdasarkan skala pengukuran ordinal capaian ini tergolong Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap keseluruhan Indikator Kinerja Sasaran hampir melebihi dengan target yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat akan meningkatkan pada tahun selanjutnya. Jika dilihat dari perkembangan capaian kinerja pada sasaran ini, telah terjadi peningkatan yang signifikan sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, sebagaimana tersaji dalam Tabel di bawah. menurun dibanding dengan tahun 2014 sebesar 40,7%

Tabel 4.20.7.1
Perkembangan Capaian Meningkatnya Penanganan PMKS dan kejadian bencana di Jawa Timur tahun 2012-2014

NO	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
	%Penanganan Wanita Tuna Susila (WTS)	24,7	72,3	40,7
	% Penanganan Kejadian Bencana	75	60,7	65,3

Sumber : Biro Adm Kesra

Tabel 4.20.7.2
Capaian sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS dan Korban
Bencana di Jawa Timur Tahun 2012 – 2014

NO	INDIKATOR	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
		TAR GET (%)	REA LISA SI (%)	%	TAR GET (%)	REA LISA SI (%)	%	TARG ET (%)	REA LISA SI (%)	%
1	Penanganan PMKS Wa- nita Tuna Susila (WTS)	70	24,7	35,3	80	72,3	90,4	100	40,7	40,7
	Jumlah WTS	6254	1543		4711	3406		1.305	531	
2	% Penanganan Kejadian bencana	80	75	93,7	90	60,7	67,4	100	65,3	65,5
	Jumlah kejadian	92	69		372	226		150	98	

Sumber : Biro Adm Kesra

Indikator Kinerja Persentase Penanganan Wanita Tuna Susila (WTS) yang telah ditentukannya itu tahun 2012 ditargetkan 70% realisasinya 24,7% atau tercapai 35,3% dari 6.254 WTS yang tertangani 1.543 WTS dan tahun 2013 di targetkan 80% realisasinya 72,3% tercapainya 90,4% dari 4.711 yang tertangani 3.406 WTS. Pada Tahun 2014 di targetkan 100% realisasinya 40,7% tercapainya 40,7% dari 1.305 WTS yang tertangani 531 WTS.

Indikator Kinerja Persentase Penanganan Kejadian Bencana yang telah ditentukannya itu tahun 2012 ditargetkan 80% realisasinya 75% atau tercapai 93,75% dari 92 kejadian yang difasilitasi 69 kejadian dan tahun 2013 ditargetkan 90 % realisasinya 60,7% sehingga tercapainya 67,4% dari 372 kejadian yang difasilitasi 226 kejadian. Pada Tahun 2014 ditargetkan 100% realisasinya 65,3% sehingga tercapai 65,5% dari 150 kejadian yang difasilitasi 98 kejadian.

- Capaian sasaran meningkatnya fasilitasi di Bidang Ketenagakerjaan untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator :
 1. Persentase jumlah UMSI yang dipromosikan di tingkat Provinsi maupun Nasional,
 2. Persentase kasus pengaduan Hubungan Industrial yang difasilitasi

3. Persentase peningkatan TKI Purna yang difasilitasi untuk mendirikan Koperasi.

Tabel 4.20.7.3
Capaian sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS dan Korban
Bencana di Jawa Timur Tahun 2012 - 2014

N O	INDIKATOR	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
		TARG ET	REALI SASI	%	TARG ET	REAL ISASI	%	TARG ET	REALI SASI	%
1	% UMSI yang difasilitasi ditingkat Prov. Maupun Nasional	5,8	5,8	100	5,8	2,9	50	5,8	2,9	50
	Jumlah	10	5		10	5		10	5	
2	% Kasus pengaduan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	100	25	25	100	35,4	35,4	100	37,5	37,5
	Jumlah	84	21		48	17		96	48	
3	% Peningkatan TKI Purna yang difasilitasi untuk mendirikan Koperasi	0,09	0,09	100	0,1	0,1	100	1	0,1	10
	Jumlah	60	60		60	60		60	60	

Sumber : Biro Adm Kesra

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Meningkatnya fasilitas di Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2013 tergolong *Cukup (rata-rata 61,8%)*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran keseluruhan hampir melebihi dengan target yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat akan mempertahankan dan meningkatkan pada tahun selanjutnya.

Jika dilihat dari perkembangan capaian kinerja pada sasaran ini, telah terjadi peningkatan yang signifikan sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, sebagaimana tersaji dalam Tabel dibawah

Tabel 4.20.7.4
Perkembangan capaian Meningkatnya fasilitasi di Bidang Ketenagakerjaan

N0	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
1	% UMSI yang difasilitasi di tingkat Prov. Maupun Nasional	5,8	2,9	2,9
2	%kasus Pengaduan Hubungan Industrial yang difasilitasi	25	35,4	37,5
3	%Peningkatan TKI Purna yang difasilitasi untuk mendirikan Koperasi	0,09	0,1	0,1

Sumber : Biro Adm Kesra

Indikator Kinerja persentase UMSI yang dipromosikan tingkat Provinsi maupun Nasional yang telah ditentukannya mulai tahun 2012 ditargetkan 5,8% tercapai 5,8% atau tercapai 100% dengan jumlah UMSI 170 yang difasilitasi 10 UMSI dan tahun 2013 ditargetkan 5,8% tercapai 2,9% sehingga tercapainya 50% dengan jumlah UMSI 170 yang difasilitasi 5 UMSI. Pada Tahun 2014 ditargetkan 5,8% tercapai 2,9% tercapai 50% dari jumlah UMSI sebanyak 10 dan terfasilitasi 5 UMSI.

Indikator kinerja % Kasus pengaduan Hubungan Industrial yang difasilitasi yang ditentukan ditahun 2012 ditargetkan 100% realisasinya 25% atau tercapai 25% dari 84 kasus yang difasilitasi 21, ditahun 2013 ditargetkan 100% realisasinya 35,4% atau tercapai 35,4% dari 48 kasus yang difasilitasi 17 kasus. Pada Tahun 2014 ditargetkan 100% realisasinya 37,5% tercapai 37,5% dari 96 kasus yang difasilitasi 48 kasus.

Indikator kinerja % Peningkatan TKI Purna yang difasilitasi untuk mendirikan Koperasi yang difasilitasi yang ditentukan mulai tahun 2012 ditargetkan 0.09% realisasinya 0,09% atau tercapai 100% dari jumlah 68.003 TKI yang mampu difasilitasi 60 koperasi, ditahun 2013 ditargetkan 0,1% realisasinya 0,1% atau tercapai 100% dari jumlah 52.571 TKI yang mampu difasilitasi 60 koperasi. Pada Tahun 2014 ditargetkan 1% realisasinya 0,1% atau tercapai 10% dari 60 Koperasi.

Sasaran Meningkatkan Akseibilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator jumlah penduduk yang mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.20.7.5
Capaian Sasaran Meningkatnya aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2012 - 2014

NO	INDIKATOR	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	% Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Jaminan Pemeliharaan kesehatan	25	25,35	101	60,00	52,51	87,5	100	53,9	53,9

Sumber : Biro Adm Kesra

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Meningkatkan Akseibilitas Pelayanan Kesehatan pada tahun 2013 tergolong *Baik (rata-rata 87,5 %)*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran hampir melebihi dengan target yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat akan mempertahankan dan meningkatkan pada tahun selanjutnya.

Jika dilihat dari perkembangan capaian kinerja pada sasaran ini, telah terjadi peningkatan yang signifikan sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 4.20.7.6
Perkembangan Capaian Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan
Kesehatan Tahun 2012 - 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
1	% peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Jaminan Pemeliharaan kesehatan	25,35	60	100

Sumber : Biro Adm Kesra

Indikator Kinerja % peningkatan jumlah penduduk yang mempunyai jaminan pemeliharaan Kesehatan yang telah ditentukanya itu tahun 2012 ditargetkan 25% tercapai 25,35 atau tercapai 101% dan tahun 2013 ditargetkan 60% realisasinya 52,51% sehingga tercapainya 87,5 %. Pada Tahun 2014 ditargetkan 100% realisasinya 53,9% sehingga tercapainya 53,9%

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Dalam menangani Permasalahan Sosial, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penanganan secara konkrit dan terukur, berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan harapan untuk merealisasikan visi misi Bapak Gubernur.
- Perlunya sinkronisasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan masing-masing bagian pada SKPD dan adanya komitmen dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga dapat terealisasi secara sinergi dan menyeluruh.

Upaya pemecahan masalah :

- Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan koordinasi dan penanganan PMKS di Jawa Timur serta Koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana.
- Persentase Penanganan Wanita Tuna Susila (WTS) serta Presentase Penanganan kejadian bencana didukung kegiatan rapat koordinasi dan penanganan PMKS di Jawa Timur, rapat koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana.

- Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Penanganan Pengangguran dan Pemberdayaan UMSI, Koordinasi, Sosialisasi dan pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan, Koordinasi, pembinaan, Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi. Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi, didukung kegiatan Rapat sinkronisasi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan dan penanganan Transmigrasi dalam rangka Koordinasi Penanganan Hubungan di Jawa timur
- Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan. Fasilitasi Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di dukung kegiatan Fasilitasi Koordinasi JAMKESDA serta Koordinasi dan Konsultasi JAMKESDA.

20.8. BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya koodinasi dan fasilitasi di bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui

1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 28.180.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 24.299.687.422,00 atau 86,23%, dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Secara terinci analisis dan capaian kinerja tahun 2014 Biro Administrasi Kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN
Meningkatnya harmoni sosial dalam kehidupan beragama;

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatnya harmoni sosial dalam kehidupan beragama bagi masyarakat Jawa Timur. Indikator dan capaian kinerja dari Sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.20.8.1
Pengukuran Kinerja Lembaga Sosial Keagamaan
yang ditindaklanjuti sesuai SOP

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI	
				2013	2012
Persentase rekomendasi lembaga sosial keagamaan yg ditindaklanjuti sesuai SOP	2.902	2.706	93,25	94,70	93,38

Sumber: Biro Adm. Kemasyarakatan Prov. Jatim

Dalam rangka meningkatkan peran-serta lembaga/Organisasi sosial masyarakat sebagai agen pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial di Jawa Timur selama tahun 2012-2014 sebagaimana capaian berikut:

- Pada tahun 2012 target : 3.490 lembaga/ormas, realisasinya : 2.428 lembaga/ormas (93,38 %)
- Pada tahun 2013 target : 2.600 lembaga/ormas, realisasinya : 3.305 lembaga/ormas (94,70 %)
- Pada tahun 2014 target : 2.902 lembaga/ormas, realisasinya : 2.706 lembaga/ormas (93,25%)

Penurunan capaian pada tahun 2014 dikarenakan proses pencairan dana hibah mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2014 (Triwulan III).

Tabel 4.20.8.2
Pengukuran Kinerja Guru Madin yang lulus seleksi dan mendapat beasiswa

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI	
				2013	2012
Persentase guru Madin yang lulus seleksi dan mendapat beasiswa	1.150	1.150	100	100	100

Sumber: Biro Adm. Kemasyarakatan Prov. Jatim

- Capaian : - Pada tahun 2012 targetnya sebanyak : 1.000 Guru Madin dan realisasinya sebanyak : 1.000 Guru Madin (100 %) ;
- Pada tahun 2013 targetnya sebanyak : 1.150 Guru Madin dan realisasinya sebanyak : 1.150 Guru Madin (100 %) ;
- Pada tahun 2014 targetnya sebanyak : 1.150 Guru Madin dan realisasinya sebanyak : 1.150 Guru Madin (100 %) ;

Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah sudah dilaksanakan pada Tahun 2006, adapun jumlah Guru Madrasah Diniyah yang telah mendapat beasiswa (S.1) sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 8.670 orang dan yang telah lulus sebanyak 3.370 orang. Program ini untuk meningkatkan kualitas guru Madrasah yang belum memiliki kualifikasi akademik sebagai tenaga pengajar.

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pendidikan tenaga pengajar/guru madin adalah : dengan melakukan kerjasama dengan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Wilayah IV (Kopertais) serta dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta Se Jawa Timur tentang Peningkatan Kualitas Guru Madin di Jawa Timur. Program ini lebih diprioritaskan terhadap daerah yang jumlah pondok pesantrennya cukup besar, seperti daerah tapal kuda, Madura, daerah pesisir utara Jawa Timur dsb. Bantuan beasiswa tersebut langsung diberikankan kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta di Seluruh Jawa Timur, untuk melakukan seleksi dan menerima Guru Madin yang telah lolos seleksi guna melanjutkan pendidikan. Adapun kriteria seleksi dan kelulusan ditetapkan oleh Tim yang terdiri dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Kementerian Agama, Kopertais dan Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD). Jumlah Guru Madin yang lolos seleksi dan telah mendapat bantuan dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

Tabel 4.20.8.3
Pengukuran Kinerja sarana peribadatan yang ditindak-lanjuti
sesuai SOP

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014	REALISASI I 2014	%	REALISASI	
				2013	2012
Persentase rekomendasi sarana peribadatan yang ditindak-lanjuti sesuai SOP	1.462	1.318	90,15	98,30	97,24

Sumber : Biro Administrasi Kemasyarakatan

Capaian :

- Pada tahun 2012 targetnya sebanyak : 980 sarana peribadatan dan realisasinya sebanyak : 953 sarana peribadatan (97,24%) ;

- Pada tahun 2013 targetnya sebanyak : 1.475 sarana peribadatan dan realisasinya sebanyak : 1.450 sarana peribadatan (98,30%) ;
- Pada tahun 2014 targetnya sebanyak : 1.462 sarana peribadatan dan realisasinya sebanyak : 1.318 sarana peribadatan (90,15%) ;

Penurunan capaian pada tahun 2014 dikarenakan proses pencairan dana hibah mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2014 (Triwulan III).

Diharapkan dengan adanya fasilitasi bantuan untuk sarana dan prasarana peribadatan se Jawa Timur akan meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai agama yang dipeluknya, sehingga terpenuhi hak-hak dasar mereka dalam memeluk agamanya masing-masing, dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.

Adapun jumlah pemeluk agama di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 (sumber data dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur) adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| a. Islam sebanyak | : | 39.657.788 orang; |
| b. Kristen sebanyak | : | 1.061.400 orang; |
| c. Katolik sebanyak | : | 490.735 orang; |
| d. Hindu sebanyak | : | 343.551 orang; |
| e. Budha sebanyak | : | 205.701 orang; |
| f. Konghucu sebanyak | : | 10.600 orang. |

Sedangkan jumlah sarana peribadatan di Jawa Timur pada Tahun 2013 (sumber data dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur) adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| a. Masjid sebanyak | : | 39.405 bangunan; |
| b. Musholla sebanyak | : | 106.290 bangunan; |
| c. Gereja (Kristen) sebanyak | : | 2.416 bangunan; |
| d. Gereja (Katolik) sebanyak | : | 512 bangunan; |
| e. Pura sebanyak | : | 390 bangunan; |
| f. Vihara sebanyak | : | 162 bangunan; |
| g. Klenteng sebanyak | : | 50 bangunan. |

SASARAN
Meningkatnya koodinasi dan fasilitasi di bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberika telaahan staf kepada Pimpinan terhadap kebijakan khususnya bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama.

Indikator dan capaian kinerja dari Sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.20.8.4
Pengukuran Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi yang
ditindaklanjuti di Bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata,
pendidikan, pemuda, olahraga dan agama

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI	
				2013	2012
Persentase dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti di Bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama	59	58	98,31	97,10	98,46

Sumber : Biro Administrasi Kemasyarakatan

Diharapkan dengan adanya koordinasi dan fasilitasi khususnya di Bidang Keagamaan, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata akan menghasilkan rumusan kebijakan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Capaian :

- Pada tahun 2012 dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti realisasinya sebesar : 98,46%.
- Pada tahun 2013 dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti realisasinya sebesar : 97,10%.
- Pada tahun 2014 dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti realisasinya sebesar : 98,31%.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Jawa Timur merupakan gudangnya Pondok Pesantren, tetapi di Jawa Timur belum memiliki Pendidikan Tinggi/Ma'ahad Aly Al-Qur'an, apalagi Al-Hadits;
- Data guru madin seringkali mengalami perubahan ;
- Sebagian Perguruan Tinggi Agama belum terakreditasi dan Perguruan Tinggi tersebut tidak bergerak untuk mengurus proses akreditasi, sehingga berakibat terhadap tidak diakuinya lulusan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- Belum dimilikinya Hak paten bidang seni dan budaya;
- Kurangnya dukungan sarana prasarana dilingkungan obyek wisata;
- Rendahnya kompetensi dan kualitas pemuda terhadap daya saing global;
- Terkikisnya jiwa nasionalisme dan cinta budaya bangsa serta jati diri bangsa;
- Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana olahraga di lingkungan permukiman maupun di lembaga pendidikan;
- Lemahnya pembibitan atlet, karena :
 - Semakin terbatasnya ruang/prasarana untuk olahraga masyarakat terutama di perkotaan dan terbatasnya sarana olahraga di pedesaan;
 - Pembinaan olahraga yang berkelanjutan masih terkendala biaya;
- Belum berkembangnya industri olahraga;
- Masih adanya kesenjangan gender diberbagai bidang serta belum terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal;
- Meningkatnya kasus KDRT, trafiking, kekerasan pada anak, eksploitasi seksual komersial anak serta pekerjaan terburuk bagi anak. Data korban KDRT, Non KDRT serta traficking yang telah ditangani PPT Jatim.

Upaya pemecahan masalah

- Diperlukan dialog secara intensif dan berkelanjutan dengan ulama/tokoh agama untuk meningkatkan manajemen dakwah baik dakwah yang bersifat monologis, dialogis, maupun textual;
- Perlu didirikan Pendidikan Tinggi/Ma'ahad Aly Al-Qur'an di Jawa Timur ;
- Perlu dibangun database guru madin di Jawa Timur ;
- Mendorong dan memotivasi perguruan tinggi agama agar segera mengurus akreditasi;
- Penghitungan kembali jumlah siswa, santri dan lembaga yang melaksanakan wajar 9 tahun termasuk salafiyah, diniyah ;
- Dilaksanakan sosialisasi masalah hak paten bidang seni dan budaya (agar kebudayaan kita tidak diambil oleh negara lain);
- Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat;
- Pemberdayaan/pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda terutama pada bidang agrobisnis dan agroindustri;
- Memfasilitasi pemanfaatan potensi lokal yang berbasis pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ;
- Mengintegrasikan upaya menumbuhkembangkan dan menyosialisasikan cinta budaya dan cinta tanah air dalam berbagai kegiatan, diantaranya dalam, Penyelenggaraan Parade Surya Senja ;
- Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional utamanya pada Bab IX tentang Prasarana dan Sarana Olahraga kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Usaha yang bergerak pada bidang pembangunan perumahan;

- Mengoptimalkan pembibitan atlet, melalui upaya :
 - Memperbanyak ruang terbuka hijau di perkotaan dan membantu pengadaan sarana olahraga di pedesaan;
 - Membudayakan olahraga rekreasi dan mendorong event-event olahraga massal.
 - Memfasilitasi mekanisme pembibitan dan pembinaan atlet yang berkelanjutan
- Menstimulasi berkembangnya industri olahraga dg membudayakan olahraga agar semakin banyak orang gemar olahraga;
- Menekan angka kelahiran dengan membumikan program KB terutama di daerah tapal kuda dan Madura belahan barat;
- Memperkuat jejaring dan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kab/Kota, Badan/Dinas/Instansi serta organisasi peduli perempuan dan anak;
- Menekan dan mencegah terjadinya KDRT, trafiking, kekerasan pada anak, eksploitasi seksual komersial anak serta pekerjaan terburuk bagi anak melalui sosialisasi pada masyarakat tentang :
 - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

20.9. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

a. Sasaran:

- a) Penyebarluasan Informasi Kegiatan dan Kebijakan Gubernur, Wagub dan Sekda Provinsi Jawa Timur.
- b) Meningkatnya pelayanan Tamu Kenegaraan secara Protokoler.

b. Program :

1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, mempunyai Pagu sebesar Rp 1.190.000.000,00 terealisasi sebesar 85,63% atau Rp 1.019.047.180,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yaitu terwujudnya Data Base yang online dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.20.9.1

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Uraian	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Peningkatan SDM Kehumasan & Keprotokolan, Rakor Kehumasan & Keprotokolan	Orang	220	220	240
Tersusunnya LAKIP, RENSTRA, ANJAB dan RENJA	Dok	3	3	4

Sumber : DPA Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2012 :

- Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan SDM Kehumasan dan Keprotokolan di SKPD dan Kab / Kota se Jatim sebanyak 220 orang.
- Tersusunnya 3 dokumen, LAKIP 2011, ANJAB dan RENJA 2013.

Tahun 2013 :

- Peningkatan SDM Kehumasan dan Keprotokolan 220 Org dan Rakor Kehumasan dan Keprotokolan Kab/Kota se Jatim 220 Org.
- Tersusunnya 3 dokumen, LAKIP 2012, ANJAB dan RENJA 2014.

Tahun 2014 :

- Peningkatan SDM Kehumasan dan Keprotokolan dan Rakor Kehumasan dan Keprotokolan Kab/Kota se Jatim 240 Org.
- Tersusunnya 4 dokumen, LAKIP 2013, RENSTRA, ANJAB dan RENJA 2015.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Karena tingkat pendidikan SDM Kehumasan dan Keprotokolan baik di Provinsi maupun Kab/Kota bervariasi

Upaya Pemecahannya

Perlu diadakan kegiatan peningkatan SDM untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan serta untuk menjalin koordinasi dengan Kabupaten/kota

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, mempunyai Pagu sebesar Rp 9.964.200.000,00 terealisasi sebesar 93,63% atau Rp 9.329.624.182,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Tabel 4.20.9.2
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Uraian	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Himpunan buku kliping bulanan	Buku	1.440	1.440	1.440
Himpunan Buku kliping tahunan	Buku	600	600	600
Terpublikasinya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kesra di 38 kab/kota melalui website dalam bentuk Pres Rilis dan Foto	Pres Rilis dan foto	2.160	2.160	2.160
Pers Gatering	Orang	420	420	420

Uraian	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Editor Gathering	orang	180	180	180
Pres Tour	Orang	50	59	50
LKTW	orang	50	50	50
Database untuk data dan informasi SKPD dan 38 Kab/Kota se Jatim	Bulan	12	12	12
Keg. Gub, Wagub, Sekda di Media Cetak	Buah	5.300	5.300	5.300
Terkafernya keg. Gub, Wagub, Sekda	Buah	1.212	1.412	1.176
Buku Himpunan Pidato	Buku	970	970	970
Majalah Prasetya	Buku	18.000	18.000	18.000
Buku Foto	Buku	970	970	970
Iklan Display	Iklan	11	11	12
Kalaidoskop	Kali	9	9	9
Publik Expos Kinerja Pemprov	Kali	150	150	150
Advetorial	Kali	103	103	103
Tersedianya data dan informasi serta terlayannya informasi publik	Bln	12	12	12

Sumber : Database dan DPA Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur

Tahun 2012:

- Jumlah himpunan buku klipng bulanan 1.440 buku, buku klipng tahunan 600 buku.
- Jumlah kegiatan Gub, Wagub, Sekda dibid. pemerintahan, pembangunan dan kesra yang dipublikasikan melalui website sebanyak 2.160 Pres Rilis dan Foto.
- Jumlah tindak lanjut atas permintaan data SKPD dan 38 Kab/Kota se Jatim, Termonitornya keg. Gub, Wagub, Sekda sebanyak 5.300 di 14 media cetak, Terkafernya keg. Gubernur, Wagub, Sekda sebanyak 1.212.
- Jumlah penyelenggaraan Pers Gathering 12 kali 420 orang, Editor Gathering 12 kali 180 orang, Pres Tour 50 orang dan LKTW 50 orang.
- Jumlah Buku Himpunan Pidato 970, Majalah Prasetya 18.000, Buku Foto 970, Iklan Display 11, Kalaidoskop 9, Layanan Informasi masyarakat dan publik Expos Kinerja Pemprov 150, Advedtorial sebanyak 103 kali.

- Tersedianya data dan informasi serta terlayannya informasi publik.

Tahun 2013:

- himpunan buku kliping bulanan sebanyak 1.440 buku dan buku kliping tahunan sebanyak 600 buku
- Jumlah keg. Gub, Wagub, Sekda dibid. pemerintahan, pembangunan dan kesra yang dipublikasikan melalui website sebanyak 2.160 Pres Rilis dan Foto.
- Termonitornya keg. Gub, Wagub, Sekda sebanyak 5.300 di 14 media cetak, Terkafernya keg. Gubernur, Wagub, Sekda sebanyak 1.412.
- Terlaksananya penyelenggaraan Pers Gathering 12 kali 420 orang, Editor Gathering 12 kali 180 orang, Pres Tour 59 orang dan LKTW 50 orang.
- Buku Himpunan Pidato 970, Majalah Prasetya 18.000, Buku Foto 970, Iklan Display 11, Kalaidoskop 9, Layanan Informasi masyarakat dan publik Expos Kinerja Pemprov 150, Advedtorial 103, Server 1 unit, komputer multimedia editing 1 buah, printer inkjet format 1 buah, hadr disk eksternal 1 buah
- Semua Permohonan informasi terlayani dengan baik.

Tahun 2014:

- himpunan buku kliping bulanan sebanyak 1.440 buku dan buku kliping tahunan sebanyak 600 buku
- Jumlah keg. Gub, Wagub, Sekda dibid. pemerintahan, pembangunan dan kesra yang dipublikasikan melalui website sebanyak 2.160 Pres Rilis dan Foto.
- Termonitornya keg. Gub, Wagub, Sekda sebanyak 5.300 di 14 media cetak, Terkafernya keg. Gubernur, Wagub, Sekda sebanyak 1.176.
- Terlaksananya penyelenggaraan Pers Gathering 12 kali 420 orang, Editor Gathering 12 kali 180 orang, Pres Tour 50 orang dan LKTW 50 orang.
- Buku Himpunan Pidato 970, Majalah Prasetya 18.000, Buku Foto 970, Iklan Display 12, Kalaidoskop 10, Layanan Informasi masyarakat dan publik Expos Kinerja Pemprov 150, Advedtorial 103, Server 1 unit, komputer multimedia editing 1 buah, printer inkjet format 1 buah, hard disk eksternal 1 buah.

- Semua Permohonan informasi terlayani dengan baik

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Belum adanya kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dengan jurnalis yang bertugas di Pemprov sehingga perlu diselenggarakan kegiatan untuk menepis anggapan tentang bad news is good news namun tetap berorientasi good news is also good news

Upaya Pemecahannya

Meningkatkan penyelenggaraan jumpa pers (pers gathering) dan memesan ruang pemberitaan untuk kegiatan Gubernur, Wagub, Sekda di media cetak dan elektronik berupa advertorial.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/ Asisten Sekda.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekda, mempunyai Pagu sebesar Rp. 445.800.000,00. Terealisasi sebesar 78,43% atau Rp 6.623.739.640,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Tabel 4.20.9.3
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/ Asisten Sekda

Uraian	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Kegiatan Gubernur, Wagub dan Sekda pelayanan kehumasan dan keprotokolan	Kali	1360	1360	1283
VIP	Kali	123	123	94
VVIP	Kali	6	6	14
Pelayanan protokoler dalam penerimaan kunjungan Kenegaraan	Kali	6	6	18

Sumber : Database Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur

Tahun 2012 :

- Jumlah kegiatan protokoler kenegaraan dan acara resmi Kdh/ Wakil Kdh/ Sekda/Sekda sebanyak 1.360 kali
- Jumlah pelayanan protokoler dalam penerimaan kunjungan Kenegaraan VIP sebanyak 123 Kali dan VVIP sebanyak 6 kali.
- Jumlah Pelayanan protokoler dalam penerimaan kunjungan Kenegaraan VVIP 6 kali.

Tahun 2013 :

- Jumlah kegiatan protokoler kenegaraan dan acara resmi Kdh/ Wakil Kdh/ Sekda/Sekda sebanyak 1.360 kali.
- Jumlah pelayanan protokoler dalam penerimaan kunjungan Kenegaraan VIP sebanyak 123 Kali dan VVIP sebanyak 6 kali.
- Jumlah Pelayanan protokoler dalam penerimaan kunjungan Kenegaraan VVIP 6 kali.

Tahun 2014 :

- Jumlah kegiatan protokoler kenegaraan dan acara resmi Kdh/ Wakil Kdh/ Sekda/Sekda sebanyak 1.283 kali.
- Jumlah pelayanan protokoler dalam penerimaan kunjungan Kenegaraan VIP sebanyak 94 Kali dan VVIP sebanyak 14 kali.
- Jumlah Pelayanan protokoler dalam penerimaan kunjungan Kenegaraan VVIP 18 kali.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Sulit memprediksi kegiatan VVIP

Upaya Pemecahannya

Koordinasi dengan Pusat.

d) Penghargaan Yang diterima baik Nasional maupun Provinsi : --

Tabel 4.20.9.4

Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2012 – 2014:

NO	URAIAN PROGRAM	TAHUN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1.20. 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Anggaran	42.000.000	50.000.000	50.000.000
		Realisasi	40.426.500	49.949.000	48.439.000
		%	96,25	99,99	96,88

1.20.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Anggaran	931.480.000	1.050.000.000	988.480.000
		Realisasi	785.525.165	893.774.960	900.150.255
		%	84,33	85,12	91,06
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Anggaran	700.000.000	1.050.000.000	1.190.000.000
		Realisasi	656.318.140	1.006.536.220	1.019.047.180
		%	93,76	95,86	85,63
1.20.75	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Anggaran	9.219.800.000	10.848.000.000	9.964.200.000
		Realisasi	8.798.230.011	10.473.326.197	9.329.624.182
		%	95,43	96,55	93,63
1.20.78	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris daerah/ Asisten Sekda	Anggaran	11.497.200.000	10.090.380.000	8.445.800.000
		Realisasi	9.643.482.155	8.588.236.178	6.623.739.640
		%	83,88	85,11	78,43
	T O T A L	Anggaran	22.390.480.000	23.088.380.000	20.638.480
		Realisasi	19.923.981.971	21.011.822.555	17.921.000.257
		%	88,98	91,01	86,83

20.10 BIRO ORGANISASI

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Penataan kelembagaan yang efisien, efektif, professional, akuntabel dan penataan tatalaksana yang efektif dan efisien;
- 2) Tersusunnya informasi jabatan, peta jabatan, dan informasi kebutuhan pegawai;
- 3) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 4.631.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.914.000.300,00 atau 84,50% dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Sesuai dengan target kinerja Tahun 2014, maka realisasi kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20.10.1
Realisasi Kinerja Tahun 2014

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	% SAKIP SKPD Prov. Jatim berpredikat A (sangat baik)	50	33,89	67,78
2	% SAKIP Kab./ Kota yang berpredikat A (sangat baik)	13	0	0

Pada tahun 2014, hasil evaluasi SAKIP SKPD Provinsi Jawa Timur secara rinci adalah sebagai berikut:

- SKPD Berpredikat A + : 1 SKPD
- SKPD Berpredikat A : 19 SKPD
- SKPD Berpredikat B + : 25 SKPD
- SKPD Berpredikat B : 8 SKPD
- SKPD Berpredikat CC : 5 SKPD
- SKPD Berpredikat C : 1 SKPD
- Terwujudnya sinkronisasi terkait kelembagaan perangkat daerah terutama kelembagaan UPT dan Akademi Tinggi bidang kesehatan serta meningkatnya pemahaman SKPD prov dan Kab/Kota terkait metode evaluasi kelembagaan yang akan bermanfaat untuk persiapan penataan kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang akan diatur pada PP pengganti PP 41 Thn 2007.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Kurangnya tenaga analis yang handal. Jumlah tenaga analis yang dimiliki oleh Biro Organisasi sangat minim dan tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan analisis terhadap seluruh SKPD. Untuk itu dilakukan pelatihan/Bimbingan teknis yang dilakukan beberapa kali guna mencetak tenaga analis yang berkompeten dan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Kurangnya pemberdayaan terhadap tenaga analis yang ada di masing-masing SKPD. Oleh karena setiap pegawai memiliki tugas pokoknya di masing-masing unit kerjanya, maka tugas-tugas tambahan seperti kegiatan analisis ini menjadi terabaikan. Hal ini terbukti dengan beberapa kali surat permintaan hasil Penyusunan Analisis Jabatan yang dikirimkan ke SKPD.

- Kurang perhatian setiap pimpinan SKPD terhadap tenaga analis yang telah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan, antara lain belum diperolehnya penghargaan berupa insentif terhadap kegiatan analisis yang dilakukan. Dengan kata lain, pimpinan SKPD kurang memahami arti pentingnya kegiatan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di instansinya
- Pada dasarnya komitmen Kepala Daerah terhadap pelaksanaan SAKIP telah didukung oleh kepala SKPD secara umum, akan tetapi masih ada kesulitan dalam menggerakkan SKPD secara keseluruhan sebagai entitas pelaksana SAKIP.
- Jika pada tingkat Provinsi, Kepala Daerah sudah berkomitmen, hal itu agak berbeda dengan Bupati/Walikota. Kepala Daerah Kabupaten/Kota belum cukup berkomitmen. Hal itu terlihat dari hasil evaluasi yang belum maksimal, bahkan belum ada Kabupaten/Kota yang memperoleh nilai B (Baik) untuk hasil evaluasi SAKIP Tahun 2014. Pada awal Tahun 2015, Bupati/Walikota mulai berkomitmen untuk melakukan perbaikan dikarenakan telah menerima hasil yang kurang baik dari Kementerian PAN dan RB pada saat penerimaan penghargaan di Balai Kartini tanggal 8 Desember 2014.
- Pelaksanaan SAKIP yang berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nampaknya masih menghadapi banyak kendala pada level implementasi di SKPD masing-masing. Hal tersebut dikarenakan Perencanaan Kinerja sudah terlanjur ditetapkan, yaitu berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2009-2014.

- Adanya jangka waktu yang terbatas, menjadikan usaha dari Tim Evaluator menjadi terbatas pula, terutama dalam rangka perbaikan Sistem yang sudah berjalan.
- Pembentukan UPT di Provinsi maupun di Kab/Kota masih belum seluruhnya mematuhi prosedur yang ada di PP 41 Tahun 2007 sehingga pembentukan UPT tidak dapat dikendalikan. Karena itu ke depan pembentukan UPT akan lebih diperketat di mana pembentukan UPT harus dilakukan melalui rekomendasi dari Pemerintah Pusat. Walaupun begitu, Biro Organisasi tetap melakukan verifikasi dan pendampingan dalam rangka pembentukan UPT.
- Masih sedikit sekali SKPD maupun Kab/Kota yang melakukan evaluasi kelembagaan guna mengetahui kinerja maupun kelemahan lembaganya. Padahal evaluasi kelembagaan ini sangat penting untuk perbaikan kinerja ke depan serta untuk penataan kelembagaan selanjutnya. Karena itu Biro Organisasi berupaya memberikan pemahaman terkait evaluasi kelembagaan berikut dengan metode-metode yang dapat diterapkan di pemerintah daerah maupun SKPD Provinsi.

Upaya Pemecahan Masalah:

- Agar masing-masing SKPD lebih intensif dalam memberdayakan PNS yang telah mengikuti pelatihan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan.
- Agar pimpinan SKPD mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyusunan Analisis Jabatan untuk mendorong tenaga analis yang ada dan menyelesaikan penyusunan Analisis Jabatannya dengan tepat waktu.
- Tetap dilaksanakan dan ditingkatkan kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, ABK dan Standar Kompetensi Jabatan yang telah berjalan di SKPD. Oleh karena masukan hasil analisis dimaksud dapat digunakan untuk mengevaluasi efektifitas organisasi,

penataan kepegawaian serta penyempurnaan sistem remunerasi di masing-masing SKPD.

- Perlu disamakan persepsi pimpinan SKPD terhadap arti penting hasil analisis jabatan yang sangat bermanfaat antara lain untuk : evaluasi tingkat efektifitas dan efisiensi organisasi, penataan kepegawaian serta penyempurnaan sistem tata laksana di masing-masing SKPD.
- Menyampaikan surat ke Kementrian Dalam Negeri untuk lebih menyederhanakan metode perhitungan yang diterapkan pada Analisis Beban Kerja yang diterapkan pada Permendagri nomor 12 Tahun 2008, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan pada semua SKPD.
- Agar Kementrian Dalam Negeri menerbitkan regulasi tersendiri untuk menentukan tingkat kebutuhan tenaga Fungsional Khusus yang harus dimiliki oleh SKPD.
- Sebagai upaya untuk menggerakkan SKPD secara cepat, maka Tim Evaluator selalu melibatkan unsur pimpinan pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan SAKIP, baik pada level SKPD maupun di tingkat Provinsi. Selain itu untuk mempertegas upaya perbaikan SAKIP pada seluruh SKPD, Biro Organisasi juga secara kontinyu melaksanakan tahapan evaluasi yang meliputi help desk (asistensi), pra-evaluasi, dan evaluasi serta sampling oleh Tim evaluator Kementerian PAN dan RB. Selain itu untuk memacu semangat SKPD, Biro Organisasi melaksanakan kegiatan Pemberian Penghargaan Gubernur yang diserahkan kepada seluruh SKPD di hadapan Menteri PAN dan RB. Selain itu diumumkan pula nilai seluruh SKPD, termasuk yang berkategori CC dan C;
- Sebagai langkah untuk menggiatkan komitmen Bupati/Walikota, pada saat pemberian penghargaan SKPD Provinsi, juga mengundang seluruh Bupati/Walikota untuk menyaksikan

kegiatan tersebut sekaligus pemberian pengarahan oleh Menteri PAN dan RB;

- Dikarenakan periode RPJMD sebelumnya telah habis masa berlakunya, maka untuk implementasi SAKIP Tahun 2015 menggunakan RPJMD periode 2014-2019 dan Renstra SKPD 2014-2019 yang telah mengalami perbaikan. Sehingga diharapkan SAKIP Tahun 2015 juga akan berjalan dengan baik;
- Tim evaluator akan dibantu oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dalam rangka melaksanakan evaluasi pada SKPD Provinsi. Tidak hanya itu, sebagai upaya pembinaan Kabupaten/Kota se Jawa Timur juga akan dievaluasi oleh Tim dari Provinsi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerahdi Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya penguatan dari sisi evaluasi SAKIP;
- Selain semua upaya tersebut, Biro Organisasi juga melaksanakan kegiatan Help Desk/Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan hal lainnya yang berhubungan dengan SAKIP yang tidak hanya untuk SKPD Provinsi Jawa Timur, tetapi juga Kabupaten/Kota dengan penekanan pada Bappeda dan Inspektorat.

d) Penghargaan Nasional yang diterima (terkait dengan program)

Gubernur Jawa Timur telah menerima penghargaan SAKIP dengan predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 75,20 pada tanggal 18 september 2014 di Istana Wakil Presiden. Di Indonesia, hanya ada 2 (dua) Provinsi yang memperoleh predikat A (sangat baik) yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Biro Organisasi bukanlah satu-satunya SKPD yang berperan dalam penerimaan penghargaan

tersebut. Penghargaan tersebut merupakan upaya dari seluruh SKPD di Provinsi Jawa Timur dengan Biro Organisasi sebagai leading sektor.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 2.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.762.659.320,00 atau 80,12% dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Jawa Timur dengan tersusunnya Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terlaksananya SPM 9 Bidang untuk provinsi serta terselenggaranya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Selain itu pada tahun 2014 juga dilaksanakan penilaian Unit Pelayanan Percontohan tingkat provinsi.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Pemmasalahan:

- SDM yang menangani pada bidang pelayanan masih sering berganti serta kurangnya koordinasi dengan tim unit layanan.
- Kurangnya pemahaman tentang pemberian layanan dengan baik dan paripurna.

Upaya pemecahan masalah:

- Peningkatan kualitas SDM dalam pemberian layanan dan penguatan political will aparatur pemerintah.
- Disamping itu diperlukan komitmen penyelenggara pelayanan untuk melaksanakan dokumen SPP, SOP, dan pelaksanaan SKM secara berkesinambungan.

d) Penghargaan Nasional yang diterima (terkait dengan program)

Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 yang dilaksanakan di tingkat nasional, Biro Organisasi sebagai leading sektor pelaksanaan pelayanan publik mampu mengantarkan Dinas

Perhubungan dan LLAJ untuk mendapatkan Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik melalui inovasi berupa upaya aksi mewujudkan wilayah bebas korupsi pada jembatan timbang.

3) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 1.693.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.324.182.190,00 atau 78,17% dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Meningkatnya pemahaman SKPD Prov dan Kab/Kota terkait penghitungan skor variabel umum dan variabel teknis yang akan digunakan sebagai dasar melakukan pembentukan dinas/badan beserta eselonisasinya. Selain itu, rekapitulasi penghitungan skor dari masing-masing SKPD Provinsi dapat dijadikan dasar bagi pembentukan dinas/ badan di tingkat Provinsi.
- Tersusunnya Peraturan Gubernur No. 14 Th. 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Pembentukan Sekretariat Gubernur ini dimaksudkan untuk menegaskan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sehingga dapat meningkatkan pengawasan di daerah.
- Tersusunnya Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 38 Th. 2014 tentang Pedoman Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Terlaksananya penyempurnaan ketatalaksanaan pemerintah di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Sosialisasi Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.
- Tersosialisasikannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 37 Th. 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daerah di Lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

- Terkait penghitungan skor variabel umum dan teknis, masih belum seluruh SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang memahami prosedur pengisian dan penghitungannya. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian pada indikator-indikator variabel yang disosialisasikan sehingga menyulitkan pengumpulan data dan juga pengisiannya.
- Walaupun pembentukan Sekretariat Gubernur sudah mengacu pada Undang-Undang namun belum ada Peraturan Menteri yang mengatur petunjuk pelaksanaannya sehingga pengelolaan Sekretariat Gubernur belum berjalan maksimal, untuk itu Biro Organisasi telah berusaha melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna efektifitas pelaksanaan pergub yang telah disusun.
- Implementasi peraturan perundang-undangan tentang ketatalaksanaan khususnya terkait penyusunan SOP administrasi pemerintahan masih perlu ditingkatkan melalui asistensi, monitoring, dan evaluasi secara terus-menerus.
- Perlu adanya peningkatan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 38 Tahun 2014 terkait tata hubungan kerja antar SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sosialisasi berkelanjutan.
- Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 37 Th. 2013.

4) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 1.115.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 978.350.496,00 atau 87,70% dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Gelar Budaya Kerja KBK (Kelompok Budaya Kerja) SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur
- Jumlah Kelompok Budaya Kerja terbaik meningkat
- Jumlah Fasilitator Budaya Kerja bertambah

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Tidak seluruh Kab/Kota dan SKPD Provinsi Jawa Timur mengikuti KBK (Kelompok Budaya Kerja)nya pada acara Gelar Budaya Kerja, karena anggaran yang terbatas serta kurangnya persiapan, dengan demikian perlu adanya petunjuk pelaksanaan agar di tahun-tahun mendatang KAb/Kota menganggarkan dan mengikutsertakan KBK pada instansi mereka masing-masing pada Gelar Budaya Kerja tahun berikutnya, selebihnya agar SKPD Provinsi dan Kab/Kota dapat mengevaluasi prestasi KBK-nya.

20.11. BIRO UMUM

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatkan kualitas layanan di bidang pengurusan surat, sandi telekomunikasi dan administrasi aset.
- 2) Meningkatkan kualitas administrasi arsip inaktif dan pemahaman pengelolaan arsip di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang persandian bagi tenaga sandiman di 38 Kab/Kota.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.190.220.000,00 terealisasi sebesar 95,66% atau Rp. 1.138.517.645,00 secara rinci masing-masing realisasasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik Kolom 16.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Program tersebut dilaksanakan untuk menunjang percepatan pelayanan pendistribusian surat, penataan arsip, pengiriman berita, dan pengoptimalan pengelolaan aset.

Untuk pelayanan pengurusan surat dinas sejak tahun 2006 telah diperkenalkan menggunakan sistem Informasi Teknologi (IT) atau program Sistem Manajemen Surat (SMS).

Sesuai petunjuk Bp. Gubernur Jawa Timur supaya program aplikasi SMS dikembangkan ke sistem berbasis web yaitu Elektronik Sistem Manajemen Surat (e-SMS). Pada tahun 2013 e-SMS berbasis web kini telah disempurnakan lagi, tujuannya agar seluruh pejabat lebih familiar dan memulai penerapan surat online. Pemakaian e-SMS berbasis web dapat diakses di ruangan Gubernur, Sekda, Asisten dan

seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Kelebihan lain dari sistem e-SMS berbasis web yang baru ini adalah proses terhadap penanganan surat menjadi lebih cepat, karena surat setelah didisposisi dari pimpinan dan pada saat itu juga tujuan disposisi langsung bisa mengetahui tanpa perlu menunggu surat diantar oleh kurir.

Kedepan rencananya e-SMS berbasis web ini akan dikembangkan diseluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.20.11.1
Pelayanan Pendistribusian Surat Dinas Dan Berita Sandi
Tahun 2012-2014

No	Uraian	Tahun			Keterangan
		2012	2013	2014	
1	Surat Masuk	59.250	85.229	41.856	
2	Surat Keluar :	96.510	122.262	85.663	
3	Berita Sandi Masuk/RDG	789	931	851	
4	Berita Sandi Keluar/RDG	25.345	27.320	24.141	

c) Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang dihadapi.

- Sistem e-SMS berbasis web ini masih belum maksimal penggunaannya.
- Ada beberapa operator e-SMS/Sekpri ditiap ruangan Pimpinan dan Staf Kepala Biro dilingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang belum membiasakan diri dengan keberadaan program ini.

Solusi terhadap permasalahan diatas.

- Dilakukan bimbingan teknis yang rutin terhadap operator e-SMS.

2) Program Kearsipan.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 329.780.000,00 terealisasi sebesar 98,95% atau Rp. 326.332.450,00 secara rinci masing-masing realisasasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik Kolom 16.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Terselenggaranya pembinaan kearsipan tepat sasaran sehingga tercipta tertib penataan arsip di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.20.11.2

Peserta Bimtek Kearsipan Dilingkungan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014

No	Uraian	Tahun			Keterangan
		2012	2013	2014	
1	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kearsipan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	36 orang	36 orang	36 orang	

c) Permasalahan dan upaya solusi

Permasalahan yang dihadapi :

- Penataan arsip in aktif belum secara rutin dikerjakan
- Minimnyatenaga yang mengelola arsip inaktif

Solusiterhadap permasalahan diatas :

- Dilakukannya kegiatan pembinaan kearsipan di organisasi unit kerja pada Biro –biro di lingkungan Sekretariat Daerah

3) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dengan pagu sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar 96,04% atau Rp. 240.094.630,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Terselenggaranya pembinaan tenaga sandiman untuk meningkatkan kemampuan di bidang sandi dan telekomunikasi dengan peserta dari 38 Kab/Kota

Tabel 4.20.11.3

Peserta Yang Mengikuti Bintek Sandi Se-Jatim Tahun 2012-2014

No	Uraian	Tahun			Keterangan
		2012	2013	2014	
1	Jumlah peserta yang mengikuti bintek sandi se-Jatim	84	80	80	

b) Permasalahan dan upaya solusi

Permasalahan

- Setiap tahun dilakukan perubahan kunci pada sistem sandi

Upaya Pemecahan Masalah

- Dilakukan bintek bagi tenaga sandi terkait perubahan kunci pada sistem sandi dan penambahan fitur-fitur baru pada pengoperasian alat sandi .

20.12 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

Tersedianya dukungan bagi peningkatan kinerja DPRD

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program :

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

a) Pagu dan Realisasi Program

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 94.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 70.859.569.715,00 atau 75,38%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan pembangunan terkait Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yaitu :

- Dibahas dan ditetapkannya rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah pada tahun 2014 sejumlah 14, atau menurun bila dibandingkan capaian tahun 2013 sejumlah 15 (Tabel I).

Tabel 4.20.12.1
Raperda/Perda Provinsi Jawa Timur Yang Telah Dibahas dan
Ditetapkan Menjadi Perda Tahun 2012 - 2014

NO.	RAPERDA/PERDA PROVINSI JAWA TIMUR	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	Prakarsa/inisiatif DPRD	8	6	5
2	Prakarsa/inisiatif Eksekutif	6	9	9
3	Prakarsa bersama (Penggabungan) Eksekutif dan DPRD	1	0	0
Jumlah :		15	15	14

Sumber : Bagian Perundang - Undangan

- Terselenggaranya kegiatan Hearing/Dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang menghasilkan Naskah/Laporan hasil Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur ke Luar Provinsi baik ke Kementrian/Lembaga Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lainnya maupun ke tokoh masyarakat/tokoh agama sepanjang Tahun 2014

sejumlah 223 kegiatan atau menurun bila dibandingkan Tahun 2013 sejumlah 280

Tabel 4.20.12.2
Rekapitulasi Kegiatan Kunjungan Kerja
Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur ke Luar Provinsi
Tahun 2012 - 2014

NO.	PELAKSANA	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	Komisi A s/d E	136	128	125
2	Badan Musyawarah	10	13	8
3	Badan Legislasi	15	14	14
4	Badan Anggaran	9	7	5
5	Panitia Khusus	6	5	13
6	Badan Kehormatan	10	6	5
7	Pimpinan DPRD	147	107	53
	Jumlah :	333	280	223

Sumber : Bagian Persidangan

- Terselenggaranya kegiatan rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD (Rapat Kerja, Audiensi, dan Hearing) tahun 2014 sejumlah 150 kegiatan atau meningkat bila dibandingkan tahun 2013 sejumlah 135 kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.12.3
Rekapitulasi Kegiatan Rapat – rapat
Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2014

NO.	PELAKSANA	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	Komisi A s/d E	146	97	52
2	Badan Musyawarah	17	6	13
3	Badan Legislasi	23	12	31
4	Badan Anggaran	13	6	11
5	Panitia Khusus	4	5	22
6	Badan Kehormatan	-	2	8
7	Pimpinan DPRD	20	7	13
	Jumlah :	230	135	150

Sumber : Bagian Persidangan

- Terselenggaranya kegiatan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sejumlah 120 kegiatan atau menurun bila dibandingkan tahun 2013 sejumlah 153 sejumlah 132 kegiatan dengan menghasilkan keputusan berupa produk-produk hukum DPRD sebagai berikut:

Tabel 4.20.12.4
Produk Hukum DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2014

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	Keputusan DPRD	41	45	39
2	Keputusan Pimpinan DPRD	25	30	21
3	Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Gubernur Jatim	7	8	8
4	Peraturan Daerah	15	15	14
	Jumlah :	88	98	82

Sumber : Bagian Perundang-undangan

- Terselenggaranya kegiatan Reses & Layanan Aspirasi Masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menghasilkan Risalah hasil pelaksanaan reses DPRD dan data pengaduan masyarakat. Sesuai ketentuan yang berlaku pelaksanaan Reseses pada tahun 2014 sejumlah 2 kali atau menurun bila dibandingkan tahun tahun 2012/2013 sejumlah 3 kali Reses.

Terkait layanan aspirasi masyarakat berupa pengaduan langsung (unjuk rasa) tahun 2014 sejumlah 47 atau meningkat bila dibandingkan 2013 sejumlah 33; sedangkan pengaduan tidak langsung (surat) sejumlah 200 pengaduan atau menurun bila dibandingkan Tahun 2013 sejumlah 338; dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.20.12.5
Rekapitulasi Aspirasi Masyarakat (Pengaduan Langsung/Tak Langsung) DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2014

NO.	JENIS PENGADUAN	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	Langsung/Unjuk Rasa	49	33	47
2	Tidak Langsung/Via Surat	424	338	200
	Jumlah :	473	371	247

Sumber : Bagian Persidangan

- Terselenggaranya kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah yang menghasilkan Naskah/Laporan Hasil Kunjungan Kerja (Kunker) dan Inspeksi Mendadak (Sidak) Alat Kelengkapan DPRD ke dalam daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur; pada tahun 2014 sejumlah 215 atau meningkat bila dibandingkan tahun 2013 sejumlah 175 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.20.12.6
Rekapitulasi Kegiatan Kunker dan Sidak Alat Kelengkapan DPRD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2014

NO.	PELAKSANA	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	Komisi A s/d E	140	126	158
2	Badan Musyawarah	-	-	1
3	Badan Legislasi	12	11	7
4	Badan Anggaran	-	-	-
5	Panitia Khusus	3	-	9
6	Badan Kehormatan	9	5	1
7	Pimpinan DPRD	20	35	39
	Jumlah :	182	175	215

Sumber : Bagian Persidangan

- Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur melalui keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam seminar/lokakarya/ bimbingan teknis/study banding yang diselenggarakan di Luar Daerah Provinsi dan Luar Negeri. Pada tahun 2014 sejumlah 116 atau menurun bila dibandingkan tahun 2013 sejumlah 245 sebagaimana Tabel 4.20.12.7 dan 4.20.12.8 berikut ini :

Tabel 4.20.12.7
Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Jawa Timur di Luar Provinsi
Tahun 2012 – 2014

NO.	PELAKSANA	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	Fraksi Partai Demokrat	45	45	15
2	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15	40	20
3	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	26	35	21
4	Fraksi Partai GOLKAR	19	28	12
5	Fraksi Partai GERINDRA	17	22	15

NO.	PELAKSANA	TAHUN		
		2012	2013	2014
6	Fraksi Partai Amanat Nasional	9	17	8
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	12	21	7
8	Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama	11	15	-
9	Fraksi Hanura Damai	6	9	-
10	Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi	7	13	-
11	Fraksi Nasdem Hanura	-	-	7
12	Fraksi PPP	-	-	6
	Jumlah :	167	245	111

Sumber : Bagian Perundang-undangan

Tabel 4.20.12.8
Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Jawa Timur di Luar Negeri Tahun 2012 - 2014

No.	Pelaksana	Jumlah		
		2012	2013	2014
1	Komisi A s/d E	89	80	-
2	Badan Musyawarah	-	-	-
3	Badan Legislasi	-	-	-
4	Badan Anggaran	-	-	-
5	Panitia Khusus	-	-	-
6	Badan Kehormatan	-	-	-
7	Pimpinan DPRD	2	3	5
	Jumlah :	91	83	5

Sumber : Bagian Perundang-undangan

- Terselenggaranya penyebaran informasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan DPRD kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stake holder melalui tatap muka langsung (sosialisasi), media cetak (koran, majalah dan tabloid), dan elektronik (radio dan televisi). Pada tahun 2014 sejumlah 371 atau menurun bila dibandingkan Tahun 2013 sejumlah 403; dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.20.12.9
Penyebarluasan Kegiatan DPRD Provinsi Jawa Timur Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Sosialisasi Tahun 2012 - 2013

Nomor	Uraian	Jumlah Kegiatan		
		2012	2013	2014
I	Media Elektronik			
	1. TVRI	27	45	35
	2. JTV	19	30	21
	3. Arek TV	-	-	
	4. MH TV	2	-	
	5. Metro TV	-	-	
	6. SBO TV	-	-	
	7. RRI	29	-	2
	8. mercury	-	4	4
	Jumlah I :	77	79	62
II	Media Cetak			
	1. Jawa Post	1	1	2
	2. Bhirawa	51	48	42
	3. Harian Bangsa	7	5	13
	4. Metro Jatim	6	3	1
	5. Berita Metro	1	26	30
	6. Jatim Mandiri	-	-	-
	7. Radar	30	39	23
	8. Memo	56	50	43
	9. Surabaya Post	-	-	-
	10. Duta	14	22	21
	11. Surabaya Pagi	35	31	36
	12. Surya	-	-	1
	13. Bisnis Surabaya	7	11	14
	14. Suksesi	-	21	10
	15. Bidik	-	8	14
	16. Jatim Pos	-	12	27
	17. Koran Rakyat	-	3	2
	18. News Week	-	2	-
	19. Profil Magazine	-	2	-
	20. Sindo	-	1	-
	21. Bidik Nasional	-	-	2
	Jumlah I :	208	285	281
III	Media Tatap Muka /Sosialisasi	5	39	28
	Jumlah III :	5	39	28
	Jumlah seluruhnya (I+II+III) :	290	403	371

Sumber : Bagian Perundang-undangan

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Penganggaran Belanja Punanjang Kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah diupayakan sesuai dengan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatannya, sehingga memungkinkan terjadi SiLPA;

Upaya pemecahannya:

permasalahan diatas akan disampaikan dan dibahas pada Rapat Pimpinan DPRD dengan Sekretaris Dewan

20.13 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Sasaran Tahun 2014

Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan profesional di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, SDA, dan Teknologi serta Kemasyarakatan.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 21.225.000.000,00 terealisasi Rp. 21.001.600.563,00 atau 98,95% secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matriks 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Rekomendasi Hasil Penelitian dan pengembangan dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Sumberdaya Alam dan Teknologi, serta Kemasyarakatan sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah (*policy linked science*) Selama periode 2013 - 2014 beberapa program / kegiatan Litbang yang dapat dicatat keberhasilannya dan ditindak lanjuti oleh *Stakeholder* antara lain adalah :
- Pengembangan Inovasi Teknologi Jawa Timur telah diimplementasikan dalam kegiatan Penganugerahan Inovasi Teknologi **Tingkat** Jawa Timur tahun 2014 yang menghasilkan beberapa temuan inovasi teknologi di bidang Energi, Agribisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 6 (enam) kategori yaitu :
- Kategori Inovasi Bidang Energi:

1. “Pembangkitan Energi Listrik Sistem Akua Power” dengan inovator Ir. Suji Kuswahyudi dari Kota Pasuruan sebagai peserta terbaik I.
 2. “Menghemat Energi (BBM/Listrik) Menggunakan Energi Angin” dengan inovator Amin Wahyono dari Kabupaten Trenggalek sebagai peserta terbaik II.
 - Kategori Inovasi Bidang Agribisnis:
 3. “Pemanfaatan Daun Kelor/Marongghi Sebagai Solusi Malnutrisi” dengan inovator Basuki Rachmad dari Kabupaten Sumenep sebagai peserta terbaik I.
 4. “Teknologi Hanspayer Cerdas Elektrik” dengan inovator Susanto dari Kabupaten Nganjuk sebagai peserta terbaik II.
 - Kategori Inovasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):
 - “Pembuatan Papan Tulis Layar Sentuh Dengan Menggunakan Remote Game” dengan inovator Achmad Alfian Majdi, S.Kom, M.Pd dari Kabupaten Bojonegoro sebagai peserta terbaik I.
 - “Pengembangan Website 46 Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri” dengan inovator Andika Kurnia Adi Pradana dari Kota Kediri sebagai peserta terbaik II
- Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Jawa Timur Tahun 2014 telah memfasilitasi Penguatan SIDA Jawa Timur di 7(tujuh) Kabupaten yaitu di Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Ngawi, Kab. Madiun, Kab. Bojonegoro, Kab. Pacitan dan Kab. Sidoarjo
 - Analisis cadangan air tanah terhadap perubahan penggunaan lahan di Jawa Timur yaitu di daerah Kab. Banyuwangi dan Jember
 - Kajian Pengelolaan kebun kopi dan kakao secara terpadu dlm mendukung agribis berbasis Wisata di Jawa Timur yaitu di Kab.Jember, lumajang dan Kab.Malang

- Pengembangan teknologi Pengolahan porang Glukomanan dengan lokasi penelitian di Kab. Madiun dan Nganjuk.
- Potensi unggas dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan nilai tukar petani di Kab.Blitar dan Pasuruan
- Pengelolaan Potensi Tambang yang berwawasan Lingkungan di Kab Lumajang dan Kab Jember.
- Kajian Karakteristik dan Potensi Berbagai Jenis Bawang Merah hasil koleksi dalam rangka Peningkatan Kualitas bibit bawang merah Jawa Timur dengan lokasi penelitian di Kab Malang, Kota BAdu dan Kab Nganjuk.
- Kajian Pengembangan Pemanfaatan Potensi Perikanan di Jawa Timur Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Jawa Timur
- Desain Kebijakan Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2)
- Analisis Daya Dukung Daerah Terhadap Pembangunan Kawasan Industri Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Kajian Potensi UMKM Dengan Dukungan Kucuran Kredit Dalam Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Asean Economic Community
- Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif Untuk Meningkatkan Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja di Daerah Pedesaan
- Kajian Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Pasca Penutupan Lokalisasi Pekerja Sek Komersial (PSK) terhadap Lingkungan dan Kehidupan Masyarakat Kab. Lumajang, Blitar,Kab. Bojonegoro, Nganjuk,Surabaya
- Kajian Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terhadap Budidaya Rumput Laut di Jawa Timur

- Kajian Peningkatan Peran Provinsi dalam Membangun Kerjasama Antar Daerah di Provinsi Jawa Timur dalam Rangka Reformasi Birokrasi 2015-2019
- Kajian Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rangka Penutupan Lokalisasi / Pelacuran di Daerah
- Kajian Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Tenaga Lokal untuk Menghadapi ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Belum banyak hasil-hasil penelitian yang ditindak lanjuti / dimanfaatkan oleh stakeholder maupun sebagai perencanaan dan kebijakan;
- Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna;
- Kurang adanya rasa percaya (*trush*) masyarakat maupun stakeholder terhadap hasil litbang;
- Adanya pesaing (lembaga non litbang) yang melaksanakan kegiatan litbang;

Upaya pemecahan masalah

- Diseminasi & sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian kepada stakeholder dalam rangka mempublikasikan kepada masyarakat luas;
- Mempertajam/meningkatkan kualitas hasil penelitian melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi atau dengan para pakar;
- Menciptakan inovasi-inovasi IPTEK secara profesional dan menjaga citra hubungan yang konsisten dengan kebutuhan pengguna.
- Membangun image kepada masyarakat bahwa pengembangan Hasil Litbang/IPTEK adalah suatu kebutuhan

- Meningkatkan sinergi antar lembaga litbang dan instansi terkait melalui Rapat Koordinasi litbang, kerjasama litbang , Forum Komunikasi kelitbangan, Seminar, Diskusi, Lokakarya atau Work Shop;
- Sosialisasi melalui website, jurnal dan buletin.

d) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program) :

- Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Jawa Timur yang telah mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi pelopor penguatan SIDa dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

20.14 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi oleh SKPD.
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur.
- 4) Menurunnya Kasus Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

b. Program

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut diatas maka, Inspektorat memiliki program-program untuk mendukung tercapainya sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu antara lain :

1) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran Program.

Pagu Anggaran untuk Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah adalah sebesar Rp. 14.676.412.500,00 sedangkan pada pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 10.093.135.261,00. Sehingga anggaran yang terserap pada program ini adalah sebesar 68,77%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Inspektorat dalam menjalankan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah melakukan Evaluasi SAKIP dengan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2010-2012 belum banyak SKPD yang mendapatkan nilai B. Namun pada Tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan dengan jumlah SKPD yang memperoleh nilai B sebanyak 15 orang. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kinerja SKPD dan didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Hasil dari evaluasi SAKIP SKPD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.20.14.1
Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal B dan nilai A
pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Pemerintah

NO	Tahun	SAKIP SKPD dengan nilai minimal B	SAKIP SKPD dengan nilai A
1	2010	0	1
2	2011	1	-
3	2012	6	-
4	2013	15	2
5	2014	15	2

Sumber: Inspektorat Prov. Jatim

Disamping itu Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan diantaranya meliputi Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Bansos/Hibah, EKPPD dan beberapa kegiatan lainnya.

Pada Tahun 2013 jumlah Pemeriksaan Reguler lebih banyak dari Tahun 2014, karena terdapat pemeriksaan diluar yang telah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Pada tahun 2014 terdapat 3 Kegiatan baru program dari Pemerintah Pusat yang dijalankan oleh Inspektorat yaitu :

1. Rencana Aksi Daerah (RAD-PPK)

Rencana Aksi Daerah merupakan program pusat yang didasarkan pada Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tatacara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku APIP daerah melaksanakan kegiatan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang bertujuan:

- a. Memastikan bahwa Aksi PPK Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b. Menevaluasi peran SKPD terkait dalam pelaksanaan RAD-PPK telah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai persoalan dihadapi Pemerintah Daerah dalam kerangka Pelaksanaan Aksi PPK
- d. Mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan Aksi PPK berdasarkan ukuran keberhasilan yang ditetapkan.

2. Evaluasi/supervisi Pelayanan Publik

Evaluasi/supervisi pelayanan publik didasarkan pada pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan sasaran SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat/publik. Dalam pelaksanaannya Pelayanan Publik di Jawa Timur ini Inspektorat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Nota Kesepakatan menjalin kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Sasaran/obyek penilaian pelayanan publik adalah SKPD/Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung antara lain Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Khusus, Pelayanan Perijinan Terpadu dan lain-lain.

3. Perencanaan Penganggaran Responsive Gender.

Kegiatan ini baru dilaksanakan pada Tahun 2014, tujuannya adalah untuk memeriksa pada tiap-tiap SKPD sudah menjalankan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender yang mendukung adanya kesetaraan dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang antara Pria dan Wanita. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian perencanaan Program PUG, menilai

capaian kinerja Perencana Pengarusutamaan Gender (PPRG) dan *Focal Point* SKPD, serta menilai kesesuaian dan ketaatan pada peraturan dalam pelaksanaan Program PUG.

Tabel 4.20.14.2
Capaian Kegiatan Pengawasan Program Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah

No.	Kegiatan Pengawasan	2013	2014
1.	Pemeriksaan Reguler	152	60
2.	Pemeriksaan Khusus	43	29
3.	Reviu	1	1
4	Evaluasi DPA	59	-
5	EKPPD	22	16
6	Evaluasi LAKIP SKPD	5	24
	Evaluasi LAKIP Kab/Kota	-	3
7	Evaluasi SPJ	29	27
8	Pemeriksaan PAMJAB	15	3
9	Pemeriksaan Bansos/ Hibah	58	56
10	RAD PPK	-	38
11	Pelayanan Publik	-	3
11	Pemeriksaan PPRG	-	20

Sumber: Inspektorat Prov. Jatim

Selain itu Inspektorat juga melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di Kabupaten/ Kota. Dari tahun ke tahun Penilaian Kinerja dengan nilai minimal Tinggi semakin meningkat. Pada awalnya tidak semua Kabupaten/ Kota yang memperoleh nilai Tinggi. Namun pada Tahun 2014 ini seluruh Kabupaten/ Kota mendapatkan nilai Tinggi. Hal tersebut dapat tercapai karena Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah membentuk Tim yang terdiri dari Inspektorat dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi, menilai, dan melaporkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masing-masing Kab/Kota. Jumlah Kab/ Kota yang memperoleh nilai Tinggi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.20.14.3
EKPPD pada Program Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur Pemerintah

No	Tahun	Jumlah Kab/ Kota dengan Penilaian Kinerja minimal "Tinggi"
1	2010	36
2	2011	24
3	2012	28
4	2013	29
5	2014	38

Jumlah Kerugian Daerah pada Tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan karena mulai pada tahun 2013 telah dilaksanakan Evaluasi SPJ. Tujuan pelaksanaan Evaluasi SPJ adalah untuk memonitor agar setiap SKPD tertib dalam mengelola keuangannya, serta mencegah terjadinya kebocoran keuangan Negara. Pada Tahun 2014, jumlah kerugian negara mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya beberapa temuan terkait pertanggungjawaban SPJ perjalanan dinas yang tidak tertib, pembayaran belanja honorarium dan barang/jasa tidak sesuai ketentuan dan lain-lain yang merupakan hasil dari Evaluasi SPJ, dan pemeriksaan khusus atas atensi BPK RI terhadap potensi kerugian daerah pada SKPD. Nilai Kerugian Daerah dari Tahun 2012 - 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.20.14.4
Nilai Kerugian Daerah Tahun 2012- 2014

No	Tahun	Nilai Kerugian Daerah (RP)	Nilai Kerugian Daerah (%)
1	2012	15.000.000	0.0001
2	2013	15.000.000	0.0001
3	2014	14.307.153.283	0.042

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada peningkatan yang signifikan. Di sisi lain PNS yang memiliki

keahlian pemeriksaan bidang keuangan memasuki masa purna tugas sedangkan SDM yang ada lebih banyak merupakan tenaga administratif yang masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi auditor yang kompeten di bidangnya.

- Proses penyelesaian LHP yang lamban. Telah dilakukan pengarahannya sebelum pemeriksaan serta paparan hasil pemeriksaan oleh tim yaitu anggota, ketua, pengendali teknis dan penanggungjawab. Namun dalam penulisan laporan termasuk tahap revisi belum tepat waktu. Hal ini sangat berpengaruh pada proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pemecahan masalah

- Dilakukan Pelatihan Sendiri dengan mendatangkan Narasumber dari BPKP maupun tenaga ahli dari SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tema pada hal-hal yang sering dijumpai para auditor.
- Dengan mengikutsertakan Bimtek yang diselenggarakan oleh Bandiklat BPK di Jogjakarta.
- Penulisan laporan diupayakan bersifat ringkas, jelas, dan dapat dipahami oleh Obyek Pemeriksa dalam rangka kecepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran Program

Pagu Anggaran untuk Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah adalah sebesar Rp. 1.735.335.000,00. Kemudian anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 952.811.427,00 atau terealisasi sebesar 54,91 %.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil Pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dapat dilihat dari Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat dan APIP Lainnya dengan Status Selesai

Tabel 4.20.14.5
Target dan Realisasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	2013			2014		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Tindak Lanjut Selesai						
	- Itjen Kemendagri dan Teknis Lainnya	100%	99.16%	99.16%	100%	57.70%	57.70 %
	- Inspektorat	100%	60.90%	60.90%	100%	65.26%	65.26 %
2	Persentase penurunan Nilai Temuan Kerugian Daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI dalam LHA BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (dibawah nilai materialitas 3 %)	0.5%	0.0001%	0.02%	0.5%	0.084%	0.042 %
3	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Berulang Kode 01 dan 02						
	- BPK RI	30%	33.33%	111.11 %	30%	33.33%	111.11 %
	- Itjen Kemendagri	30%	3.08%	10.26%	30%	3.08%	10.26 %
	- Inspektorat	5%	10.28%	205.61 %	20%	25%	125%

Sumber: Inspektorat Prov. Jatim

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014 tidak dapat mencapai target dikarenakan sebagian laporan hasil pemeriksaan tahun 2014 baru terbit pada bulan Desember 2014 sehingga belum dapat dilakukan tindak lanjut kepada SKPD terkait. Tindak lanjut yang belum dapat dilakukan dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu 2015.

Tabel 4.20.14.6**Jumlah Tindak Lanjut yang Selesai**

Tahun	Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	Tindak lanjut selesai	%
2010	2.012	1.991	98,96
2011	841	757	90,01
2012	4552	4426	97,23
2013	156	95	60,90
2014	688	449	65,26

Selanjutnya dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka telah dibentuk Sekretariat Unit Pengendali Program Pengendalian Gratifikasi (UP-PPG) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan PPG SKPD di masing-masing SKPD. UUP-PPG ini baru dibentuk pada Tahun 2013, sehingga masih banyak yang harus dibenahi dalam pelaksanaannya. Masih kurangnya sosialisasi tentang Gratifikasi sehingga banyak orang yang enggan atau takut untuk melaporkan barang yang terkait gratifikasi. Pelapor selama ini hanya Pejabat Eselon II yang memang diwajibkan untuk melaporkan hasil gratifikasi dari pemberian berupa hadiah, uang, dan barang atau juga dapat berupa hadiah pernikahan atau lainnya. Jumlah Pelapor Gratifikasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.20.14.7**Jumlah Pelapor Gratifikasi**

NO	TAHUN	JUMLAH PELAPOR
1	2013	4
2	2014	6

c) Permasalahan dan Solusi**Permasalahan**

- Masih kurangnya tingkat pemahaman PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menginterpretasikan Program Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2013. Hal ini tampak dari jumlah laporan gratifikasi terkait kegiatan hajatan yang diselenggarakan oleh Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur

hanya dilakukan oleh pejabat eselon II saja. Seharusnya juga dapat dilakukan oleh Pejabat Eselon III maupun Eselon IV, bahkan staf.

Pemecahan masalah

- Perlu dilakukan Sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi lebih intensif kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran Program

Pagu Anggaran untuk Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan adalah sebesar Rp. 970.940.000,00. Kemudian anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 828.601.975,00 atau terealisasi sebesar 85.34 %.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Dalam rangka peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, maka dari tahun ke tahun diadakan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor. Pada Tahun 2009 - 2011 terjadi peningkatan jumlah pegawai yang bersertifikat JFA, namun mengalami penurunan pada tahun 2012 - 2014, hal tersebut dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan pindah ke SKPD lain.

Tabel 4.20.14.8

Pegawai yang Bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor

No.	Tahun	Jumlah Pegawai yang bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor
1	2009	46
2	2010	44
3	2011	60
4	2012	56
5	2013	55
6	2014	55

Sumber: Inspektorat Prov. Jatim

Selain itu untuk meningkatkan kapasitas tenaga pemeriksa dan aparaturnya telah dilakukan diklat, workshop, dan *In House*

Training untuk semakin meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang pengawasan, maupun Pengembangan diri pegawai.

Tabel 4.20.14.9
Pelaksanaan Bimtek dan Diklat bagi Pegawai

Uraian	Capaian Kinerja Program						
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pelaksanaan diklat, workshop, <i>in house training</i>	Kegiatan	6	7	7	5	9	515
Jumlah peserta	Orang	560	500	450	400	11	686

Sumber: Inspektorat Prov. Jatim

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Auditor dituntut untuk menguasai berbagai bidang pemeriksaan seperti Bansos/hibah terkait bangunan, dan pemeriksaan keuangan, sedangkan Jumlah Auditor yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan teknik sipil tidak banyak, sedangkan jumlah obyek pemeriksaan dari SKPD dan UPT mencapai kurang lebih 250. Diperlukan banyak tenaga auditor yang menguasai di bidang keuangan dan teknik sipil.

Pemecahan Masalah

- Perlu dilakukan pemerataan pengetahuan di bidang sipil dan keuangan dengan melakukan sharing ilmu antar auditor dan juga sering dilakukan bimtek terkait bidang sipil dan keuangan.

4) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran Program

Pagu Anggaran untuk Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan adalah sebesar Rp. 406.820.000,00. Kemudian anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 110.940.950,00 atau terealisasi sebesar 27.27%.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pada Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan terdiri dari 3 kegiatan yaitu Rakorwasda, Penyusunan Kebijakan Pengawasan, dan Penyusunan Program Kerja Tahunan. Setiap tahun Inspektorat melaksanakan kegiatan tersebut.

Sedangkan untuk SOP Teknis Pengawasan merupakan Pedoman teknis dalam melakukan pengawasan. Pada tahun 2010-2013 sempat tidak berjalan, namun pada tahun 2014 ini terlaksana.

Tabel 4.20.14.10

Capaian Kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Uraian	Capaian Kinerja Program						
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	keg	3	3	3	3	3	3
Paparan temuan hasil pemeriksaan	keg	12	12	12	11	3	6
Sop Teknis Pengawasan	keg	1	-	-	-	-	1

Sumber: Inspektorat Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kelambatan dalam penyusunan kebijakan pengawasan karena menyesuaikan pada kebijakna pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan pada awal tahun anggaran, sehingga penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kelambatan.

Upaya pemecahan Masalah

- Penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibuat dengan mendasarkan pada draf jakwas Kementerian Dalam Negeri melalui upload di situs meskipun hasil belum diterbitkan secara resmi.

20.15 DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai, yang mampu memberikan kontribusi maksimal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga Pembangunan dan Pelayanan Publik dapat dilaksanakan secara berkeadilan serta terwujudnya pelayanan publik yang baik dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan, kesamaan hak dan kewajiban.

b. Program

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Rp 39.775.856.710,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 26.384.125.772,00 atau 66,33 persen. Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom..

b) Hasil/ Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas Pelayanan Masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi didapatkan hasil pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 terdapat kenaikan sebesar 20,37% dan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terdapat kenaikan sebesar 21,92%, sehingga dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan

tahun 2014 terdapat kenaikan rata-rata sebesar 21,15%, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20.15.1
Data Target dan Realisasi PAD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012 – 2014

TAHUN	Target PAD	Realisasi PAD	%
2012	7.751.000.000.000	7.863.071.422.495	101,45
2013	8.617.350.000.000	9.464.416.237.214,37	109,83
2014	11.026.862.243.621	11.539.146.107.394,60	104,65

Sumber: Dinas Pendapatan Prov. Jatim

Pencapaian hasil kinerja pembangunan berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung dengan kegiatan-kegiatan antara lain adalah optimalisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) kepada Wajib Pajak sekaligus validasi status kendaraan, Peningkatan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada KB Samsat , Konsistensi jumlah KB Samsat yang melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Kegiatan operasi simpatik bersama dengan pihak kepolisian dalam rangka menjangkau Wajib Pajak sekaligus sosialisasi taat pajak, dan dalam rangka untuk lebih memudahkan sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat dilakukan pengembangan terhadap jenis maupun jumlah layanan Samsat Unggulan yang berbasis Teknologi Informasi yang sampai dengan tahun 2014 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah berhasil menciptakan Inovasi Layanan Unggulan di bidang Perpajakan berupa Layanan yang berbasis *self service* melalui Anjungan Tunai Mandiri Samsat (ATM Samsat) sejumlah 10 Unit, di samping beberapa tambahan jumlah layanan unggulan yaitu Samsat Payment Point menjadi 68 unit, Samsat corner menjadi 10 unit, Samsat Drive Thru menjadi 28 unit dan Mobil Samsat Keliling

menjadi 47 Unit serta pengembangan kerjasama dengan 4 (empat) perbankan nasional pada layanan e-Samsat.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Terbatasnya Jumlah Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Kinerja Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- Masih tingginya ketidakpatuhan Wajib Pajak, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- Kondisi Ekonomi Makro (inflasi dan tingkat suku bunga bank) yang belum stabil, sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang berdampak kepada Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan;
- Kurang optimalnya Sarana/ Prasarana pada KB Samsat, karena adanya peningkatan Objek Pajak;
- Kurang optimalnya pemanfaatan Aset Daerah, dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Kondisi Ekonomi Mikro (konsumsi rumah tangga) yang pendapatannya lebih mengedepankan untuk konsumsi, sehingga mempengaruhi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui :

- Melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga (perbankan) dalam rangka pelaksanaan Kinerja Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan memperbanyak layanan unggulan yang berbasis IT (Pelayanan Pajak secara self service);

- Optimalisasi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (media cetak dan elektronik) serta Peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait;
- Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Iklim Usaha, melalui pemberian Kebijakan Insentif Perpajakan;
- Memanfaatkan Aset yang potensial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan Pelayanan Publik.

d) Penghargaan Nasional yang diterima

Penghargaan yang telah diterima pada tahun 2014 antara lain :

- Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia, sebagai Samsat pertama yang dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menggunakan ATM berbasis Teknologi Informasi dan berpola *self service*;

20.16. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

a. Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategi-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (Renstra BPKAD 2011-2014), serta untuk mendukung efisiensi, efektifitas dan konsistensi perencanaan program, kegiatan dan anggaran BPKAD pada Tahun 2014 telah ditetapkan sasaran, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- 2) Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota.

b. Program

Bahwa sebagai upaya untuk menunjang tercapainya sasaran tersebut, perlu diimplementasikan melalui program, sebagai berikut :

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Pagu dan realisasi anggaran

Untuk mendukung tercapainya target kinerja dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.858.952.600,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 24.674.478.832,00 atau 85,5%.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan

Bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Daerah Provinsi Jawa Timur, BPKAD mempunyai tugas, antara lain penyusunan rancangan APBD/PAPBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kab/kota. Untuk menunjang kelancaran dan efektifitas pelaksanaannya tugas-tugas tersebut dijabarkan dalam kegiatan pada masing-masing bidang dalam bentuk :

- Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 ;
- Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2014 ;
- Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;
- Tersusunnya kebijakan akuntansi, penatausahaan dan aplikasi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual ;
- Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan aset dan barang daerah dan terlaksananya percepatan sertifikasi aset tanah.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Mekanisme penyusunan Rancangan APBD/PAPBD, Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD, sertifikasi aset tetap tanah dan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kab./kota yang diwujudkan dalam bentuk evaluasi Raperda APBD/PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sangat dipengaruhi oleh stake holder dan instansi terkait. Oleh karena itu, capaian kinerja seringkali tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra-SKPD dan Rencana Kerja-SKPD, misal sertifikasi aset tetap tanah sangat dipengaruhi kesiapan dan kevalidan data, hasil penelusuran jejak status kepemilikan aset tetap tanah (clearing) serta pengukuran yang melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, juga disebabkan adanya kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun anggaran berjalan yang penerapannya dilakukan secara tiba-tiba tanpa diawali dengan sosialisasi dan pemahaman kepada para pelaksana di daerah. Hal ini, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan dan sangat dimungkinkan terjadi stagnasi, antara lain :

- Adanya pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sehingga terdapat sisa mati dan disetorkan ke kas daerah ;

- Implementasi aplikasi akuntansi berbasis akrual masih dalam tahap pemetaan penyusunan kebijakan yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) ;
- Kurangnya data pendukung dari SKPD Pengguna Barang (PB) terkait dengan status kepemilikan aset tetap tanah yang merupakan syarat utama proses sertifikasi.
- Untuk mengantisipasi hal ini, dan agar tidak terulang pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan :
 1. Perencanaan dan penghitungan lebih cermat dan teliti dalam mengalokasikan kebutuhan anggaran pada masing-masing kegiatan baik kelompok, jenis, obyek maupun rincian obyek ;
 2. Langkah-langkah antisipasi dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran untuk memfasilitasi adanya kebutuhan yang sifatnya mendesak melalui mekanisme revisi rincian-rincian obyek ;
 3. Upaya aktif dari SKPD, BPKAD maupun BPN untuk terus berkoordinasi dengan Notaris, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan warga sekitar objek sertifikasi.

2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

a) Pagu anggaran dan realisasi anggaran

Untuk mendukung tercapainya target kinerja dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.220.267.500,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 4.105.119.060,00 atau 97,27%.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 2 Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Daerah Provinsi Jawa Timur, dan dalam rangka mendukung terwujudnya harmonisasi perencanaan pembangunan, program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab./Kota serta menunjang tertib administrasi pengelolaan keuangan kab./kota se Jawa Timur, perlu adanya fasilitasi pembinaan dalam bentuk evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan KDH tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

1. Masih prioritas program/kegiatan dalam Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang belum terintegrasi dengan prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal ini perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stake holder sebagai tindak lanjut hasil MUSRENBANGKAB/KOTA dan MUSRENBANGPROV ;
2. Keterlambatan pembahasan Rancangan Perda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD antara Eksekutif dengan Legislatif yang berakibat pada terlambatnya penyampaian kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi, hal tersebut juga menyebabkan terlambatnya Penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Terhadap keterlambatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengirimkan surat peringatan yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur agar segera

dilakukan pembahasan dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi ;

3. Masih adanya perbedaan persepsi/penafsiran antara Eksekutif dan Legislatif terhadap kebijakan/regulasi, utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga memerlukan waktu pembahasan sebelum menyusun draft bahkan sampai terjadi dead lock yang berakibat mundurnya jadwal pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Sebagai upaya untuk membantu penyelesaian Pemerintah Provinsi Jawa Timar, c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timar telah memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi alternatif dan titik temu, sehingga pembahasan dapat dilanjutkan kembali untuk memperoleh persetujuan bersama.

20.17. KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pejabat Jawa Timur serta fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di JABODETABEK

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kerjasama

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 9.223.711.200,00 terealisasi sebesar 99,43% atau Rp. 9.170.866.955,00, secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Kerjasama merupakan bagian penting dalam mensinergikan kinerja pemerintahan agar berjalan dengan sesuai keinginan publik, kerjasama daerah harus dipakai sebagai instrumen dalam mengatasi keterbatasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah, untuk itu penting sekali adanya peningkatan kerjasama baik yang bersifat koordinasi keprotokolan maupun fasilitasi promosi daerah.

Selama dua tahun terakhir perkembangan kerjasama antara Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun kerjasama fasilitasi promosi daerah dengan Kabupaten/Kota tidak terjadi peningkatan dan tidak mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 berjumlah 240 kali koordinasi dan pelayanan, dan tetap 240 kali koordinasi pada tahun 2014.

Tujuan Program Peningkatan Kerjasama pada kegiatan Peningkatan Koordinasi Keprotokolan dalam rangka kerjasama antara Badan/Dinas/Lembaga/Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif dengan mengacu pada standart pelayanan publik. Sasarannya untuk

mempermudah dan kelancaran urusan pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif yang bertugas di Jakarta hingga menjadikan efektif dan efisien.

Tujuan program kerjasama pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Promosi Daerah di Bidang UKM, Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta adalah memfasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek baik dalam bidang kesenian, pariwisata, serta kerajinan UKM serta mengoptimalkan Anjungan Jawa Timur di TMII Jakarta sebagai “*show window*” Jawa Timur di Jakarta. Sasaran peningkatan kerjasama dalam bidang koordinasi dengan Biro, Dinas, Badan, Kabupaten, Kota yang ada di Jawa Timur dengan lebih ditingkatkan secara kualitatif dan kuantitatif serta keikutsertaan pameran dan pertunjukan seni Jawa Timur.

Tabel 4.20.17.1
Data Kegiatan Koordinasi Dan Keprotokolan
Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur

No.	Sub Kegiatan	2012	2013	2014	Keterangan
1.	Koordinasi, Pelayanan dan Keprotokolan	238 kali	240 kali	240 kali	-

Sumber: Kantor Perwakilan Prov. Jatim

Hasil dari pelaksanaan program kerjasama pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Promosi Daerah di Bidang UKM, Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta, antara lain:

- Penyelenggaraan pentas seni dari Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur dan di event-event pameran serta event khusus pada tahun 2012 sebanyak 65 kali, 2013 sebanyak 92 kali dan tahun 2014 sebanyak 65 kali, terjadi naik dan turun dalam jumlah pelaksanaan dikarenakan pada tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami peningkatan karena antusiasme Kab/Kota dan Sanggar Jawa Timuran yang ada di Jabodetabek untuk pentas di Anjungan Jawa Timur maupun di event-event pameran dan event khusus, sedangkan

tahun 2014 mengalami penurunan karena alokasi jumlah anggaran dan jumlah peserta yang mengisi/tim kesenian ditambah.

- Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kepada Anggota Paguyuban Warga Jakarta Asal Jawa Timur (PAWARTA JATIM) untuk menambah pengetahuan dan harapannya adalah tambahan penghasilan bagi warga Jawa Timur yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya (JABODETABEK), karena dengan persaingan yang ketat di Ibukota Negara, sehingga perlu adanya tambahan pengetahuan dan ketrampilan. Pada tahun 2012 dilaksanakan pelatihan ketrampilan sebanyak 5 kali pelatihan, tahun 2013 sebanyak 8 kali pelatihan dan tahun 2014 sebanyak 4 kali pelatihan, terjadi naik dan turun dalam jumlah pelaksanaan hal ini dikarenakan pada tahun 2012 ke 2013 semakin bertambah minat anggota PAWARTA JATIM mengikuti pelatihan sehingga bertambah jumlah pelatihan, sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan pelaksanaan pelatihan dikarenakan sudah terlalu sering dilakukan pelatihan, sedangkan materi yang sebelumnya diberikan masih dalam tahap realisasi atau penerapan hasil pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya di setiap Paguyuban Kedaerahan yang tergabung dalam wadah PAWARTA JATIM.
- Fasilitasi acara pameran bertaraf Nasional sebagai sarana promosi produk UMKM bagi para pengrajin dari Jawa Timur pada tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 20 kali pameran, tahun 2013 sebanyak 20 kali dan tahun 2014 sebanyak 15 kali, pada tahun 2012 dan 2013 jumlah pelaksanaan pameran sama dikarenakan permintaan keikutsertaan dari Event Organizer Penyelenggara Pameran yang terkait dengan produk UMKM dengan jumlah yang sama, sedangkan tahun 2014 mengalami penurunan karena alokasi dana untuk kegiatan pameran ditambah sedangkan kuantitasnya keikutsertaan sedikit karena banyaknya kegiatan politik (pileg dan pilpres).

Tabel 4.20.17.2
Data Kegiatan
Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur

No.	Sub Kegiatan	2012	2013	2014	Keterangan
1.	Pementasan Kesenian Budaya Jawa Timur	65 kali	92 kali	65 kali	
2.	Fasilitasi Pameran	20 kali	20 kali	15 kali	
3.	Pelatihan Ketrampilan kepada PAWARTA JATIM	5 kali	8 kali	4 kali	

Sumber: Kantor Perwakilan Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Pada aspek pelayanan pada saat saat tertentu keterbatasan personil, transportasi, akomodasi seringkali tidak mampu dalam menghadapi pekerjaan secara bersamaan;
- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait sehingga terjadi kesulitan dalam hal-hal tertentu;
- Kurangnya sinergi dengan pihak-pihak terkait di Jawa Timur, menjadikan tumpang tindih dengan instansi yang lain.
- Lokasi sekretariat Paguyuban Kedaerahan tersebar diwilayah Jabodetabek, sehingga terdapat sedikit kesulitan untuk menyamakan waktu dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) anggota PAWARTA JATIM.
- Jadwal yang telah ditetapkan bisa berubah/terjadi pembatalan dikarenakan faktor internal daerah Kabupaten/Kota.

Upaya pemecahan masalah :

- Pembenahan standar pelayanan kepada pejabat eksekutif dan legislatif dengan mengacu pada prinsip standar pelayanan publik.

- Peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif fasilitas koordinasi antara daerah pusat dan sebaliknya.
- Lebih meningkatkan koordinasi antara Kantor Perwakilan dengan unsur-unsur terkait sehingga terjadi sinergi antara UMKM dengan instansi terkait untuk promosi informasi potensi produk unggulan Jawa Timur.
- Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Anggota Paguyuban Kedaerahan yang tergabung dalam PAWARTA JATIM yang ada di Jabodetabek, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia anggota PAWARTA JATIM.
- Lebih meningkatkan pagelaran seni budaya kabupaten/ kota se Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur TMII dengan menggali potensi kesenian tradisional rakyat dengan terus berupaya melestarikan budaya daerah Jawa Timur.

20.18 BAKORWIL MADIUN

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat dicapai melalui berbagai program dan kegiatan sebagaimana berikut :

1) Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 95.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 91.180.698,00 atau 95,98%, Pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan *In House/On Job Training* berupa kegiatan Bimbingan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bakorwil Madiun (*In door*), Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bakorwil Madiun dan pembinaan staf dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan kerjasama dalam mencapai tujuan agar kualitas sumber daya manusia meningkat dan profesional dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun serta Pegawai mampu menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) baik target kinerja maupun capaian target kinerja agar mampu menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing personal.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah

Permasalahan :

Kemampuan SDM yang terbatas baik jumlah maupun kualitasnya.

Upaya pemecahan masalah :

Perlu pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi PNS agar kualitas SDM meningkat dan professional

2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 951.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 920.145.114,00 atau 96,71%, Pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan kerjasama yang baik, tepat dan saling menguntungkan antar daerah dan memberikan saran, masukan dalam pembangunan daerah maupun peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah yang aman dan kondusif.

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan berupa :

- Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan kantor guna menunjang lingkungan kerja yang representatif,
- Kegiatan *Focus Group Discusion (FGD)* untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 dalam rangka untuk menginventarisir dan mengidentifikasi Gambaran Umum dan profil sektoral Provinsi Jawa Timur, Permasalahan – permasalahan yang terjadi dan isu-isu strategis pembangunan Jawa Timur serta merumuskan usulan rencana pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan 3 (tiga) fokus bidang yaitu Ekonomi, Prasarana Wilayah, dan Sosial pada Kab/Kota di wilayah Bakorwil Madiun.

- Kegiatan Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP) guna menghasilkan laporan atas pencapaian kinerja dan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.
- Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah dalam rangka Penegakan Perda Karismapawirogo, pengamanan Suran Agung Perguruan Pencak Silat dan Pileg serta Pilpres tahun 2014 serta Deklarasi dan Sosialisasi tentang Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Larangan Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) di Jawa Timur di Kabupaten/Kota

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah

Permasalahan :

Rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum pada saat Hari Besar Keagamaan, tradisi Suran Agung dan Pemilukada di Kabupaten/Kota.

Upaya pemecahan masalah :

Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bersama pihak terkait dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban umum

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 212.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 205.243.425,00 atau 96,81%, Pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan peningkatan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah,

yang didukung dua kegiatan berupa Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di wilayah kerja Bakorwil Madiun dengan berbagai rangkaian kegiatan diantaranya pertandingan Bola Voly dan Tenis Meja, senam dan gerak jalan santai, upacara bendera serta kegiatan tasyakuran dengan hiburan ketoprak Humor Kirun Cs. sebagai puncak acara peringatan hari jadi tersebut yang melibatkan unsur UPT Provinsi Jawa Timur, unsur TNI/Polri dan BUMN/BUMD di Kabupaten/Kota Madiun dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, media sosialisasi kepada masyarakat Jawa Timur agar mengetahui sejarah Provinsi Jawa Timur, membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memajukan Jawa Timur serta meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antara unsur pimpinan daerah dalam pengembangan seni dan budaya mataraman yang menjadi ikon Bakorwil Madiun dengan Kegiatan yaitu malam kesenian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur serta rapat koordinasi dan sarasehan budaya mataraman di Bakorwil Madiun tahun 2014 yang dihadiri secara pribadi Sri Sultan Hamengku Buwono X.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

Terbatasnya dukungan anggaran serta kurangnya koordinasi dan sosialisasi terkait persiapan pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur maupun rangkaian kegiatan sarasehan budaya mataraman di Bakorwil Madiun tahun 2014

Upaya pemecahan masalah :

Dukungan dana yang memadai dan peningkatan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur serta pelaksanaan sarasehan budaya mataraman di Bakorwil Madiun dengan beragam kegiatan setiap bersama Kabupaten/Kota dan masyarakat maupun pihak terkait.

4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 48.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 47.109.700,00 atau 98,15%, Pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia anggota Banpol PP di Bakorwil Madiun melalui kegiatan berupa pembinaan Banpol PP, mengikuti Jambore Pol PP maupun upacara HUT Pol PP di Jawa Timur. Hasil kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan keterampilan Banpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

Kurangnya kecakapan dan keterampilan SDM Banpol PP dalam menunjang pelaksanaan tugasnya.

Upaya pemecahan masalah :

Diadakan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Banpol PP agar cakap, terampil, tanggon, trengginas dan profesional.

5) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 296.902.904,00 atau 98,97%, Pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual dimaksudkan untuk meningkatkan

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam penanganan kemiskinan dan bencana alam pada Kabupaten/Kota agar dapat tertangani dengan cepat, akurat dan tepat sasaran.

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual berupa terlaksananya kegiatan rapat koordinasi, fasilitasi dan evaluasi usaha kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yaitu terlaksananya monitoring, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2013 serta Sosialisasi Program Raskin Tahun 2014 Se Wilayah Bakorwil Madiun, Pemantauan PMKS, Sosialisasi SE (Surat Edaran) Gubernur Jatim tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi Serta Woman Trafficking dalam rangka Pemulangan WTS Wanita Harapan "GUDE" Ds. Teguhan Kec. Jiwan Kab, Madiun yang selanjutnya diadakan deklarasi penutupan lokalisasi, Monitoring dan Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat (PUEM) tahun 2014 di wilayah Bakorwil Madiun serta Fasilitasi Penanganan Bencana berupa koordinasi dan pemantauan bencana alam dan Rapat Koordinasi dalam rangka Kesiapsiagaan dan Optimalisasi Penanganan Kebencanaan Secara Terpadu se Bakorwil Madiun Tahun 2014 yang melibatkan pihak terkait dalam penanganan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana guna meminimalisir kerugian akibat terjadinya bencana.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Kurangnya koordinasi dalam penanganan bencana alam dan belum terpadunya penanganan masalah kemiskinan serta penanganan PMKS

Upaya pemecahan masalah :

- Meningkatkan koordinasi secara terpadu dengan pihak terkait dalam penanganan bencana alam

- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi secara terpadu terkait dengan program-program penanganan kemiskinan maupun PMKS

6) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 1.155.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.146.428.574,00 atau 99,26%, Pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Kabupaten/Kota di wilayah.

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan sebagai berikut :

1. Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pemerintahan daerah dengan kegiatan antara lain :
 - Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan terkait persiapan dan kesiapan dalam pelaksanaan Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jawa Timur Tahun 2015
 - Terlaksananya Koordinasi Kesepakatan bersama (MoU) Kerjasama Daerah KARISMAPAWIROGO
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) Tingkat Bakorwil Madiun dalam rangka Pekan KIM Jawa Timur Tahun 2015
 - Terlaksananya Koordinasi dan Pemantuan Perkembangan Politik terkait Persiapan dan Kesiapan serta pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 se Bakorwil Madiun

- Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi Administrasi Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCKK) Tingkat Bakorwil Madiun Tahun 2014
2. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah dengan kegiatan antara lain :
- Terlaksananya Rapat Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis SIPD pada Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun Tahun 2014 sebagai upaya agar ada peningkatan dalam
 - Terlaksananya koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program SIPD Tahun 2014 (untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program SIPD Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun
 - Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program sistem informasi pembangunan daerah kabupaten/kota se wilker bakorwil pemerintahan dan pembangunan Madiun tahun 2014
 - Tersusunnya profil data administrasi wilayah di Bakorwil Madiun.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Dampak pemanfaatan SDA dengan kegiatan antara lain :
- Terlaksananya Koordinasi, monitoring dan tinjau lapangan Penanggulangan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam (kegiatan pertambangan) di Kab/Kota sebagai upaya pemantauan dalam penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah dan menertibkan ijin usaha pertambangan, ijin penggunaan lahan dan kegiatan reklamasi pasca penambangan
 - Terlaksananya Rapat koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan di wilayah Bakorwil Madiun tahun 2014

sebagai upaya sinkronisasi ijin usaha pertambangan, ijin penggunaan lahan dan kegiatan reklamasi pasca penambangan agar lebih tertib dan tidak merusak lingkungan.

4. Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur dengan kegiatan antara lain :

- Terlaksananya, monitoring, pembinaan dan pengawasan di lapangan serta Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2014 dalam rangka mengoptimalkan fungsi Tim Koordinasi Kab/Kota agar pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi secara optimal di Wilayah Bakorwil Madiun
- Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Produk Unggulan UMKM dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang Berpotensi Ekspor Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2014 dan monitoring Kesiapan Kabupaten/Kota terkait ketersediaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2014 Se Wilayah Bakorwil Madiun.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri “Sosialisasi Gerakan Aku Cinta Indonesia dan Gerakan Indonesia Menabung” di Bakorwil Madiun Tahun 2014 agar masyarakat peduli akan pemakaian produk buatan dalam negeri dan meningkatkan industri dalam negeri untuk mampu berkompetisi secara global serta memperluas lapangan pekerjaan.

5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur dengan kegiatan antara lain :

- Terlaksananya Koordinasi dan monitoring Standarisasi Produk UMKM/IKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 Se Wilayah Bakorwil Madiun

sebagai upaya standarisasi produk UMKM/IKM bagi Pelaku UMKM di Wilayah Bakorwil Madiun

- Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Kualitas Kelembagaan Koperasi Wanita di Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2014 untuk mendapatkan gambaran serta data riil dalam upaya Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Kualitas Kelembagaan Koperasi Wanita di Wilayah Bakorwil Madiun
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Se Wilayah Bakorwil Madiun sebagai upaya untuk membangun kemampuan jiwa kewirausahaan dan jejaring usaha antar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga UMKM siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015
6. Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan dengan kegiatan antara lain :
- Terlaksananya Pemantauan Peran Serta Pada Majapahit Travel Fair (MTF) 2014, Pengembangan Pariwisata Tahun 2013 Se Bakorwil Madiun dan Monitoring Pelaksanaan Lomba Implementasi Budaya Baca Melalui Uji Cerdas SLTA Tingkat Provinsi JawaTimur Tahun 2014
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Industri Pariwisata melalui Direct Promotion (MTF) Majapahit Travel Fair Tahun 2014 sebagai upaya menciptakan peluang bisnis, promosi wisata menggerakkan perekonomian daerah dan perekonomian nasional
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Lomba Implementasi Budaya Baca melalui Uji Cerdas SLTA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 untuk memberikan

penjelasan kepada peserta lomba dan Instansi terkait mengenai Teknis Lombanya.

- Terlaksananya Rapat Sosialisasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian.
7. Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana dengan kegiatan antara lain:
- Terlaksananya Koordinasi, identifikasi dan peninjauan lapangan terhadap jalan dan jembatan rawan bencana di Wilayah Bakorwil Madiun
 - Terlaksananya Koordinasi dan Tinjau Lapangan Persiapan penilaian Program Adipura Tahap Tahun 2014 di Wilayah Bakorwil Madiun
 - Terlaksananya Koordinasi terhadap penyelenggaraan infrastruktur jalan/jembatan dan Tugu Batas di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah
 - Terlaksananya Koordinasi dan tinjau lapang proyek APBD/APBN Tahun 2014 di UPT PSDA WS Madiun, Bango Gedangan Malang dan Ponco Kediri
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam rangka pemantapan HIPPA/GHIPPA di wilayah Bakorwil Madiun dan Pembinaan dan Evaluasi HIPPA/GHIPPA Tingkat Bakorwil Madiun Tahun 2014 sebagai upaya persiapan untuk mengikuti evaluasi HIPPA/GHIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur
 - Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan infrastruktur Lebaran serta Persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2014
 - Terlaksananya Rapat koordinasi dan sinkronisasi rencana pengembangan lanud iswahyudi sebagai Bandara Sipil di Bakorwil Madiun tahun 2014

- Terlaksananya Rapat koordinasi persiapan penilaian program Adipura Tahap I tahun 2014-2015 di Wilayah Bakorwil Madiun

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Data administrasi wilayah Kabupaten/Kota belum terupdate dengan baik
- Masih adanya ijin usaha pertambangan, ijin penggunaan lahan dan kegiatan reklamasi pasca penambangan yang illegal
- elum adanya keterpaduan dukungan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lain yang memadai dalam mengembangkan Potensi wisata di wilayah Bakorwil Madiun

Upaya pemecahan masalah :

- Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi data administrasi wilayah bersama Kabupaten/Kota
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung program Promosi Wisata, sarana dan prasarana yang memadai dalam pengembangan potensi pariwisata

7) Program Peningkatan Kerjasama

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 673.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 668.307.120,00 atau 99,23%, Pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Peningkatan Kerjasama dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi perencanaan kerja sama antar

Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil Madiun mengenai bidang-bidang strategis yang perlu dikerjasamakan.

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Peningkatan Kerjasama sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Gedung Kantor :
 - Meningkatkan kualitas fisik sarana dan prasarana bangunan gedung kantor agar terwujud gedung kantor yang layak, sehat dan bersih dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun.
2. Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Provinsi, Provinsi dengan Badan/Dinas/Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri :
 - Terlaksananya Koordinasi Potensi Pengembangan Kawasan Hutan Rakyat dan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Hutan Rakyat dan Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/ Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2014
 - Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Fasilitas Jalur Distribusi Perdagangan di Perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah
 - Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah
 - Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2014
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tema “Inflasi Yang Stabil dan Sinergitas, Koordinasi, Fasilitasi Antar Pemerintah, BUMN dan Swasta Se Wilayah Bakorwil Madiun Dalam Rangka Penguatan Produk-Produk Unggulan Daerah”

- Terlaksananya Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun
3. Identifikasi, perencanaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan :
- Terlaksananya Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi Jawa Timur di Bakorwil I Madiun sebagai upaya untuk mensinkronisasikan semua usulan program dan kegiatan perencanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBN, APBD I Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se wilayah kerja Bakorwil Madiun

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Kondisi gedung kantor kurang representatif
- Belum optimalnya sinkronisasi usulan program dan kegiatan perencanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten/Kota

Upaya pemecahan masalah :

- Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor agar lebih *representatif*
- Perlunya sinkronisasi usulan program dan kegiatan perencanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBN, APBD I Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan skala prioritas.

20.19 BAKORWIL BOJONEGORO

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan, bidang pembangunan ekonomi, bidang kemasyarakatan dan bidang sarana dan prasarana wilayah

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat dicapai melalui berbagai program dan kegiatan sebagaimana berikut :

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran.

Pagu Anggaran Program inipada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.995.400,00 atau (99,99%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian Program).

Tersusunnya data dan informasi SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur yang up to date.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah.

Permasalahan :

Belum sinkronnya data yang ada di BAPPEDA Kab./Kota dengan data yang dimiliki oleh BPS Kab./Kota.

Upaya pemecahan masalah :

Diharapkan kepada BAPPEDA Kab./Kota dapat menjalin hubungan yang sinergi dengan BPS Kab./Kota agar dalam Publis data dapat sinkron.

2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 79.597.275,00 atau (99,50%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian Program)

Meningkatnya keterisian data pada aplikasi SIPD Kabupaten/Kota, sebesar 40% hal ini disebabkan oleh meningkatnya koordinasi Bakorwil dengan Kabupaten/Kota terkait pengelolaan data dan informasi profil daerah.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Aplikasi di SIPD perlu perbaikan dan disesuaikan dengan keadaan data yang ada di Kab/Kota masing-masing;
- Kurang stabilnya aplikasi SIPD online sehingga kesulitan dalam download dan import data;
- Kurangnya ketersediaan data dan kesesuaian data dari SKPD, untuk pengisian data SIPD.

Upaya Pemecahan Masalah

- Diharapkan kepada BAPPEDA Provinsi agar berkoordinasi dengan Pusat dalam penyesuaian/keadaan data masing-masing Kab/Kota;
- Diharapkan kepada BAPPEDA Provinsi agar dapat memiliki server sendiri khusus aplikasi SIPD;
- Perlu ada sosialisasi kepada seluruh SKPD kabupaten/kota dalam kesepahaman akan pentingnya data SIPD.

3) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.880.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.825.567.674,00 atau (97,10%), secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan dapat dilihat pada Lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian Program)

- Terwujudnya Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Tahun 2014;
- Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan

Bojonegoro Tahun 2014 dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja selama tahun 2014;

- Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi kepada SKPD Kabupaten/Kota untuk melakukan Kebijakan Gubernur Jawa Timur dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan;
- Meningkatnya kondisi keamanan yang kondusif di Kabupaten/Kota Wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro;
- Peningkatan pemeliharaan kondisi jalan di Kabupaten/Kota Wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro;
- Tercapainya Inventarisasi dan Tertib Administrasi asset pemerintah provinsi Jawa Timur di Wilayah;
- Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) di Kabupaten/Kota Wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro;
- Meningkatnya Fasilitas dan Antisipasi terhadap korban bencana alam (banjir, tanah longsor dan kekeringan) di Kabupaten/Kota Wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro;
- Terwujudnya Kesepakatan dari masing-masing sidang kelompok untuk menindaklanjuti hasil sinkronisasi terhadap usulan Program / Kegiatan super prioritas dari Kabupaten / Kota Tahun 2015 dengan program / Kegiatannya tertuang dalam Rancangan Renja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim Tahun 2015;
- Meningkatnya Kerjasama antar Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Serta Sosial Ekonomi antar Kabupaten Wilayah RATUBANGNEGORO;
- Tersedianya data pelaporan yang akurat dan tertib administrasi pelaporan dana APBN melalui SIEVAP di Wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro;
- Meningkatnya Pembinaan dan evaluasi kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) maupun Gabungan Himpunan Petani Air (GHIPPA) secara berjenjang;
- Meningkatnya Pelaporan pelaksanaan PUG masing-masing SKPD di Kabupaten/Kota di Wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro;

- Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan bagi kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dilakukan oleh Instansi/Dinas terkait Pemerintah Kab/Kota Wilker Bakorwil Bojonegoro;
- Meningkatnya pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Meningkatnya dukungan yang dapat menunjang kemajuan Koperasi wanita;
- Terwujudnya Pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2014 di Kabupaten / Kota Se Wilker Bakorwil.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah

Permasalahan

- Kurangnya anggaran untuk renovasi dan perawatan gedung kantor;
- Masih adanya laporan yang belum di tindaklanjuti oleh Bapak Gubernur Jawa Timur;
- Masih rendahnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kepada SKPD Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Kebijakan Gubernur dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- Masih ada kegiatan masyarakat yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon yang menjadi peserta pemilu Presiden dan wakil Presiden;
- Penerangan Jalan Umum (PJU) By Pass Mojokerto sampai saat ini belum terpasang dikarenakan jalan dimaksud merupakan perbatasan Kabupaten dan Kota Mojokerto;
- Kondisi asset banyak yang idle atau telah dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah/masyarakat namun secara administrasi belum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terkait Program ADIPURA;
- Belum semua Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro mempunyai BPDB, yaitu Kota Mojokerto dan Kabupaten

Kediri, kedua Pemerintah Daerah tersebut menganggap keberadaan BAKESBANGPOL dan LINMAS sudah cukup untuk mengatasi bencana yang terjadi di wilayahnya;

- Masih ditemukan ketidaktaatan/konsistensi dari Kabupaten/Kota untuk mentaati jadwal memasukkan hasil akhir usulan MUSRENBANG Kab/Kota dalam portal yang disediakan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
- Belum maksimalnya Kerjasama antar Kabupaten/Kota Wilayah RATUBANGNEGORO karena dana sharing yang akan digunakan belum teranggarkan pada APBD masing-masing ;
- penyerapan anggaran yang rendah dan tidak proporsional, Keterlambatan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD/Dinas/Instansi, Penumpukan tagihan kepada Negara pada akhir tahun anggaran;
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaring pengarusutamaan Gender di daerah;
- Masih kurangnya tertib administrasi kelembagaan HIPPA/GHIPPA, misalnya belum ada buku daftar pengurus, buku agenda surat keluar, buku notulen rapat, dll;
- Masih Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah masing-masing;
- Kabupaten/Kota masih belum memiliki kesiapan dalam segala aspek apabila ingin menjadikan obyek wisatanya mampu bersaing ditingkat regional maupun nasional;
- masih kurangnya Pemahaman tentang akuntansi dan permodalanserta kredit macet;
- Masih ditemuinya adanya tunggakan pembayaran raskin di Wilker Kabupaten Bojonegoro.

Upaya Pemecahan Masalah

- Menambah anggaran renovasi dan perawatan gedung kantor pada tahun anggaran berikutnya;
- Mengawal suatu laporan dari hasil kegiatan untuk mengetahui sejauh mana suatu laporan itu agar mendapat tindaklanjut dari Bapak Gubernur Jawa Timur;

- Diharapkan kepada Bupati/Walikota agar dapat memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan;
- Diharapkan kepada PANWASLU bersama Aparat keamanan agar meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan praktek money politik serta menertibkan spanduk dan tanda gambar;
- Diharapkan pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto segera mengambil jalan keluar terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) By Pass Mojokerto;
- segera merumuskan tindakan untuk dapat mengoptimalkan asset yang telah dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah/masyarakat agar dapat bermanfaat dalam kaitannya menumbuhkan investasi daerah;
- melaksanakan koordinasi yang optimal antara Kabupaten/Kota dengan Instansi/Dinas terkait lainnya untuk melaksanakan pengawasan, penertiban dan pengendalian kepada semua masyarakat;
- Diharapkan Pemprov Jatim bersama-sama dengan DPRD Prov.Jatim segera menyusun Perda mengenai Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum tindak lanjut penyusunan Perda di Kabupaten/Kota;
- Diharapkan Bappeda Provinsi Jawa Timur seharusnya agar lebih tegas dan konsisten terkait aturan kesepakatan tentang jadwal dan mekanisme MUSRENBANG;
- Diharapkan Kabupaten Tuban sebagai Sekretariat BKAD Tahun 2013-2014 supaya segera mensinergikan Kabupaten/Kota Wilayah RATUBANGNEGORO mengenai penganggaran kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- diharapkan ketepatan waktu penunjukan pejabat perbendaharaan, penyusunan rencana penarikan dana yang baik, pemahaman terhadap ketentuan dan mekanisme pembayaran serta mekanisme penyelesaian pencairan dana yang cepat, transparan dan modern;
- Diharapkan kualitas hidup dan peranan Perempuan yang ada di Kabupaten/Kota menjadi lebih baik dari sebelumnya;

- Agar segera dilakukan pembenahan administrasi kelembagaan, sehingga HIPPA/GHIPPA mempunyai pijakan yang kuat dalam masyarakat sehingga menjadi organisasi yang terstruktur;
- Diharapkan tumbuh kesadaran bagi Pemerintah Daerah maupun DPRD Kab/Kota bahwa KIM itu ada dan dibentuk sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat;
- Diharapkan masing-masing Kabupaten/Kota mampu membuat daya tarik wisata yang unik dan berbeda sehingga mampu menarik perhatian dari pengunjung.
- Diharapkan kepada Dinas/Instansi yang membidangi koperasi UMKM, untuk lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan serta pelatihan terhadap perkembangan Kopwan di daerahnya secara berkesinambungan;
- Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan koordinasi antara Desa dan Kelurahan untuk memecahkan permasalahan dan hambatan yang dialami dalam penyaluran beras RASKIN di masyarakat.

4) Program Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran.

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.686.720,00 atau (95,58%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian Program).

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan meningkatkan jumlah pembentukan dan pengembangan BUM Desa di Kabupaten/Kota Se Wilker Bakorwil.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah.

Permasalahan :

Masih belum mumpuninya Sumberdaya manusia di perdesaan dalam pemahaman dan pelaksanaan terhadap manajemen kelembagaan dan keuangan.

Upaya pemecahan masalah :

Perlu adanya legalitas dan regulasi yang jelas dan tegas dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUM Desa.

5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 505.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 477.334.570,00 atau (94,52%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) :

Meningkatkan koordinasi pembinaan pelayanan publik di Kabupaten / Kota Se Wilker Bakorwil Bojonegoro.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan Masalah

Permasalahan

Masih Adanya unsur ego sektoral membuat pelayanan publik kadang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Upaya pemecahan Masalah

Untuk membendung ego sektoral, sangat bergantung dari kebijakan yang dibuat oleh pimpinan daerah, diperlukan komunikasi yang baik antara Kepala Daerah dan masing-masing pimpinan instansi, juga kepada masyarakat.

6) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 131.135.320,00 atau (87,42%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan khas daerah yang sehat, beragam, bergizi, berimbang dan aman serta halal untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya, serta Mendorong dan meningkatkan kreativitas dan perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kuliner makanan khas daerah khususnya.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah.

Permasalahan

Sulitnya menanamkan pada masyarakat (generasi muda) rasa cinta terhadap makanan/masakan khas daerah, tradisional dan nasional.

Upaya pemecahan masalah

Memasyarakatkan dan membiasakan keluarga untuk mengkonsumsi aneka menu makanan khas daerah yang sehat, beragam, bergizi, berimbang dan aman untuk kebutuhan sehari-hari, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah yang ada disekitar.

7) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 95.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 94.198.125,00 atau (99,16%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Merumuskan kebijakan Provinsi baik melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur atau Peraturan Gubernur Jawa Timur guna menekan penularan HIV/AIDS baik melalui hubungan seks, penggunaan narkoba, suntik, maupun infeksi menular seks, agar tenaga medis atau Tim penanggulangan HIV/AIDS daerah dapat melakukan pemeriksaan dini secara paksa bagi masyarakat yang diduga berpotensi terjangkit HIV/AIDS.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Masih tingginya angka penderita HIV/AIDS, disamping sulitnya tenaga medis Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan secara paksa bagi masyarakat yang diduga berpotensi penularan HIV, terkait Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Pemecahan Permasalahan

Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran Belanja Daerah didalam APBD Kabupaten/Kota untuk melengkapi sarana dan prasarana shelter yang memadai untuk penempatan sementara hasil razia/penertiban WTS, Gelandangan, Pengemis, Psikotik, Anak Jalanan oleh Satpol PP Kabupaten/Kota berupa rumah singgah, rumah perlindungan sosial dll.

8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 230.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 192.742.550,00 atau (83,80%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai BAKORWIL Bojonegoro dan terciptanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah.

Permasalahan :

Masih banyaknya Pegawai yang belum mengerti tugas-tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Upaya pemecahan masalah :

Diadakan pembinaan pendidikan dan pelatihan pada Pegawai BAKORWIL Bojonegoro serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai.

9) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 170.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 165.645.650,00 atau (97,44%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Terwujudnya pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-69 di BAKORWIL Bojonegoro dengan UPTD Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro dan Masyarakat Bojonegoro

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

Masih kurangnya anggaran untuk peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Bakorwil Bojonegoro.

Upaya pemecahan masalah :

Menjalin kerjasama dengan UPTD Provinsi yang ada di Bojonegoro dan Mitra kerja Bakorwil Bojonegoro dalam penyelenggaraan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur..

10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 70.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 69.814.580,00 atau (99,74%), pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Terwujudnya Forum PPID BAKORWIL Bojonegoro sebagai Penunjang Informasi dan Dokumentasi kepada Publik.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah.

Permasalahan :

Masih adanya informasi dan dokumentasi yang belum di klasifikasikan.

Upaya pemecahan masalah :

Segera mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang belum di klasifikasikan.

20.20 BAKORWIL PAMEKASAN

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan, bidang pembangunan ekonomi, bidang kemasyarakatan dan bidang sarana dan prasarana wilayah.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program :

1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.994.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.803.614.016,00 atau 90,42%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom ;

b) Hasil Pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Capaian pelaksanaan pada tahun 2014, dari pagu sebesar Rp. 1.994.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.803.614.016,00 atau 90,42% menurun dibanding dengan tahun 2013 sebesar Rp. 2.055.120.000,00 yang terealisasi Rp. 1.949.811.954,00 atau 94,88%. hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2014 1 (satu kegiatan) yaitu koordinasi dengan forpimda Kabupaten/Kota.

Adapun hasil pelaksanaan pembangunan, serta capaian kinerja termasuk realisasi anggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kebudayaan Antar Daerah Bakorwil Pamekasan, kegiatan ini untuk menyelenggarakan agenda tahunan pelestarian budaya Kerapan Sapi berupa sosialisasi Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan serta Kerapan Sapi memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI dan Kontes Sapi Sono' Tahun 2014 yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 19-20 Oktober 2014, pelaksanaan Kerapan Sapi dengan pola baru menghasilkan Juara sebagai berikut :

A. Golongan Menang :

- Juara I : Pasangan Sapi “Sonar Muda”
Milik H. Samsudin dari Kabupaten Bangkalan.
- Juara II : Pasangan Sapi “Siliwangi”
Milik R.H. Tohir dari Kabupaten Pamekasan.
- Juara III : Pasangan Sapi “Roket Terbang”
Milik H. Modakir dari Kabupaten Sumenep.

B. Golongan Kalah :

- Juara I : Pasangan Sapi “Cabe Rawit”
Milik Mat Sahid dari Kabupaten Sampang.
- Juara II : Pasangan Sapi “Bintang Madu”
Milik Ahmad Budiyanto dari Kabupaten Pamekasan.
- Juara III : Pasangan Sapi “Salbut”
Milik Kades Groom dari Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan Kontes Sapi Sono’ diikuti oleh 40 pasang sapi, yang merupakan delegasi dari 3 Kabupaten yaitu Pamekasan, Sampang dan Sumenep.

Kontes Sapi Sono’ ini merupakan kontes untuk menunjukan keelokan sapi betina.

2. Fasilitasi, sinkronisasi dan sinergi program pembangunan daerah (Musrenbang), kegiatan ini diarahkan pada pelaksanaan pra musrenbang Provinsi Jawa Timur untuk menentukan usulan prioritas dari Kabupaten/Kota.
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa koordinasi, fasilitasi dan pemantauan tentang :
 - Antisipasi, Penanggulangan dan penanganan bencana alam;
 - Peningkatan Peran Kelompok informasi masyarakat;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - Penegakan Perda Provinsi Jawa Timur;
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Inventarisasi permasalahan umum dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
 - Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - Koordinasi dan evaluasi Penyusunan Renstra 2014-2019;
 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian konflik antar nelayan Gresik dengan Lamongan;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa koordinasi, monitoring dan evaluasi berkaitan dengan :
- Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Tanaman Tebu melalui Perbaikan Jalan Produksi Tebu di Madura;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Mengatasi Penyaluran Kelangkaan Pupuk Bersubsidi;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Peternak Sapi menjadi Komoditi Bisnis;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Koperasi melalui Kerjasama antar kelompok di Madura;
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Penanaman Mangrove Reklamasi Pantai dan Pelestarian Tanaman Mangrove bersama TNI, Polri dan Perum Perhutani untuk mendukung Gerakan Nasional Mengurangi Gas Emisi Rumah Kaca (GRK);
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Ketahanan Pangan;
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Perkembangan Perdagangan;
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Program Raskin;

5. Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan berupa koordinasi dan pemantauan tentang :
 - Penanganan PMKS;
 - Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah;
 - Penanganan pengangguran, ketenagakerjaan dan trafficking;
 - Penanggulangan dan Penanganan narkoba;
 - Koordinasi dan monitoring Kependudukan (e-KTP);
 - Pengarustamaan Gender (PUG);
 - Pengembangan Pariwisata.
6. Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pelestarian Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Alam, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa koordinasi, fasilitasi dan pemantauan tentang Pengelolaan usaha pertambangan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Permasalahan kebudayaan antar daerah
Sejak tahun 2012 kegiatan Kerapan Sapi mengalami perubahan dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan. Masyarakat Madura yang sudah terbiasa melaksanakan Kerapan Sapi dengan kekerasan menyikapinya dengan pemahaman pro dan kontra, hal ini menjadi kendala bagi Bakorwil Pamekasan untuk merealisasikan Instruksi Gubernur tersebut, sehingga pelaksanaan dua versi kekerasan dan tanpa kekerasan. Tahun 2014 dimulai dengan pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa kekerasan.
- Fasilitasi Musyawarah perencanaan pembangunan masih ditemukan ketidaksesuaian antara usulan dari Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan Musrenbang dengan usulan yang dimasukkan pada portal yang disediakan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, serta adanya beberapa Kabupaten yang terlambat memasukkan usulannya sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati.
- Penyelenggaraan bidang Pemerintahan dan Ketertiban

- Masih tumpang tindihnya penanganan bantuan bencana antara Dinas Sosial dan BPBD dan instansi terkait di daerah yang menyebabkan saling tarik ulur penganggaran bantuan bencana daerah.
- Dalam rangka peningkatan Kelompok Informasi Masyarakat banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika/ bagian humas/Dinas Perhubungan namun pada kenyataannya KIM kesulitan untuk mengembangkan diri hal ini dikarenakan tidak mempunyai dana sehingga KIM itu harus kreatif untuk mencari dana sendiri untuk mengembangkan diri; Kurangnya ketersediaan dana untuk peningkatan dan pengembangan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) untuk itu Kabupaten/Kota mengharap agar mendapat dukungan dana dari Pemerintahan Provinsi maupun Pusat.
- Program Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota kurang adanya perhatian yang serius dan sungguh-sungguh sehingga pelayanan publik selama ini tidak hanya lip service saja, perhatian baik dari pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi terutama dalam hal Pembinaan pelayanan publik, belum adanya komitmen yang kuat dari pucuk pimpinan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik oleh karena kurangnya ketersediaan dana/anggaran yang mencukupi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Permasalahan FPI juga memerlukan perhatian yang sewaktu waktu bisa menimbulkan permasalahan dengan keamanan dan ketertiban, kerawanan menjelang Pemilihan legislative yaitu adanya mobilisasi massa, penyusupan massa dari Kelompok tertentu, bentrok massa dan intimidasi, bentrok antar pendukung Parpol, teror serta rusuh massal disertai jahat dan sentra publik yang harus dihindari. Di masa tenang adanya Money Politik, ajakan Golput serta isu negatif terhadap Parpol tertentu serta boikot pemilu.
- Pada kenyataan dilapangan banyak tanah milik pemerintah Propinsi Jawa Timur yang batas/patok lahannya berubah tempat dan dikuasai masyarakat dan belum bersertifikat terutama lahan irigasi. Penanganan Aset Masih kurang profesional, dengan

bimbingan teknis diharapkan dapat memahami agar semua barang milik daerah yang dikelola, dapat dikontrol dengan baik. Kemudian dapat memahami agar barang-barang milik daerah mudah ditata dalam administrasi dan dapat dikelola dengan baik, perlu bimbingan teknis agar dapat memahami semua barang milik daerah yang dikelola, dapat dikontrol dengan baik.

- Inventarisasi Permasalahan Tahun 2014 di Bakorwil Pamekasan bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sosial adalah :
 - Pengelolaan SDM yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan hidup, masih belum tersedianya infrastruktur penunjang keselamatan berlalu lintas yang ada di jalan provinsi, terbatasnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, belum mandirinya pemerintah Kab/Kota dalam membangun daerah, tingginya tingkat polusi udara akibat berkembangnya sektor industri di Kabupaten Gresik dan juga kurangnya sarana edukatif dan rekreatif yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh dan illegal pada beberapa wilayah di Kota Surabaya
 - Pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan, hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, permodalan UMKM oleh Bank pasar masih belum maksimal, kurang tertibnya PKL (pedagang kaki lima) dan asongan, sempitnya kepemilikan lahan pertanian dan skala usaha rata-rata kepemilikan lahan tiap rumah tangga petani < 1 Ha dan kelangkaan pupuk pada saat masa tanam.
 - Kurangnya sarana prasarana di puskesmas, karena puskesmas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang semakin bertambah, belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat utamanya pendidikan dan kesehatan. Dalam menghadapi AEC 2015 perlu dilakukan keselarasan antara kebutuhan tenaga kesehatan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari pendidikan formal ataupun keterampilan.

- Penyelenggaraan bidang Pembangunan Ekonomi
 - Telah terjadi kerusakan lingkungan alam sehingga pada musim kemarau air sungai surut bahkan ada yang kering sedangkan di musim hujan sering terjadi banjir. Adanya pihak yang melakukan pembalakan pada hutan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan, serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap hutan.
 - Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman.
 - Minimnya akses informasi yang dimiliki oleh petani peternak adalah merupakan suatu kendala utama dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menerapkan teknologi dan sistem peternakan yang lebih baik. Ketersediaan pakan hijauan yang terbatas di musim kemarau dan belum optimalnya penerapan teknologi pembuatan hay dan silase di peternak. Peternak tidak mempunyai inisiatif dalam mengadopsi teknologi baru yang disertai peningkatan biaya.
 - Implementasi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan, penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan dosis anjuran, HET yang berlaku kurang realistis, masih lemahnya pengawasan dilapangan, hal ini menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi belum tepat pada sasaran, masih banyaknya petani yang belum bergabung ke dalam Gapoktan, kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga melebihi HET, margin pemasaran lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.
 - Kelemahan manajemen pengelola pasar dan kurang promosi penjualan, rendahnya tingkat keamanan pelanggan pasar. Pasar tradisional mempunyai beban sebagai andalan daerah untuk memenuhi penerimaan retribusi, kebersihan dan

tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara dan buruknya sirkulasi udara, minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional.

- Adanya kerusakan rumpun milik nelayan desa Tambak Bawean Gresik yang dilanggar oleh nelayan dari Brondong Lamongan, adanya jalur penangkapan ikan yang dilanggar oleh nelayan dari Brondong Lamongan, belum pernah ada penyelesaian berupa kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pihak yang menjamin tidak terulangnya peristiwa yang sama di masa-masa mendatang.
 - Adanya degradasi lingkungan pesisir dan laut, hidup nelayan dalam kemiskinan dan tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Keterbatasan daya jangkauan teknologi, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, tidak berfungsinya koperasi nelayan yang ada.
 - Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah, sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani. Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produksi pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.
- Penyelenggaraan bidang Kemasyarakatan
- Perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi terhadap mekanisme didalam pelaksanaan JKN melalui BPJS oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui masing-masing SKPD terkait; regulasi pemerintah dan BPJS belum optimal di dalam menentukan biaya pengobatan dan rawat inap terhadap complain anggaran pengeluaran pendanaan bagi anggota JKN melalui BPJS; rujukan pasien rumah sakit kelas III ke rumah sakit dr. Soetomo dapatnya terstruktur dan berjenjang sehingga semua anggota JKN melalui BPJS dapat memahami terhadap mekanisme pengurusan rujukan; sarana dan prasarana dengan

meningkatnya pasien dari rumah sakit daerah ke rumah sakit dr. Soetomo kurang optimal sehingga diperlukan penambahan sarana prasarana khususnya penambahan kamar pasien yang dirujuk dari RSUD Kabupaten ke RSUD dr. Soetomo Surabaya dapat tertampung dan terlayani secara optimal.

- Dinas dan instansi terkait kurang mensosialisasikan akan pentingnya dokumen resmi untuk menjadi TKI. Perangkat pemerintahan paling bawah yaitu Kepala Desa hendaknya tidak gampang memberikan surat keterangan yang ada sangkut pautnya dengan dokumen TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Pada umumnya pencari kerja lebih banyak berpikir sebagai pencari kerja di sektor formal dibandingkan dengan mencoba berusaha menciptakan lapangan kerja.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang keberatan menjadi saksi ahli dalam proses sidang di Pengadilan Negeri; Indikator P4GN dari keberhasilan operasi penggerebekan di Desa Parseh dari Polres Bangkalan tidak terlepas dari pro aktif informasi dari masyarakat di sekitar lokasi sasaran; Pengedar dan pengguna narkoba dapat disidik oleh BNN dan Kepolisian setempat; Menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam negeri atau luar negeri; di Wilayah Bakorwil Pamekasan yang sudah membentuk kelembagaan BNNK adalah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, Sumenep dalam proses, dan 3 Kabupaten yang belum membentuk kelembagaan BNNK yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. Perkembangan dan peredaran narkoba akhir-akhir ini tidak memakai cara tradisional/konvensional tetapi sudah berkembang dengan cara memakai kemajuan teknologi (Iptek) yang cukup tinggi sehingga dapat mengelabui petugas.
- Di Surabaya banyak E-KTP ganda karena banyak data yang tidak jelas, Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Surabaya masih berlaku karena ada Perdanya mutasi penduduk termasuk dalam Administrasi Kependudukan. Hasil

sensus dari BPS pada umumnya lemah, disebabkan oleh surveyornya yang lemah, untuk itu disarankan BPS agar bekerjasama dengan aparat desa langsung (Lurah/Kepala Desa), sehingga datanya bisa akurat. Pendataan penduduk di tingkat kecamatan masih sering terlambat untuk mengirim laporannya ke kabupaten.

- Yang diperlukan didalam optimalisasi pengembangan pariwisata adalah akses jalan menuju lokasi wisata, paska suramadu didalam percepatan pengembangan pariwisata perlu adanya keterpaduan stakeholder dan dinas/instansi terkait; pengembanngan pariwisata diperlukan riset dan kajian untuk memberikan peluang yang lebih besar terhadap kesuksesan pengembangan wisata, terutama nilai jual wisata kepada wisatawan lokal dan maca Negara; kemajuan pengembanngan pariwisata di daerah tidak terlepas dari rasa aman kepada wisatawan; dan untuk lebih mengoptimalkan daya tarik wisatawan, maka dalam mengemas kegiatan wisata agar lebih baik dan lebih menarik, terutama agar menampilkan seni budaya lokal supaya nilai jualnya lebih tinggi.
- Penyelenggaraan bidang Sarana dan Prasarana
 - Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh prilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini yang menyebabkan adanya perubahan ekosistem, kerusakan hutan yang terjadi karena adanya penebangan liar, kerusakan flora dan fauna akan terus bertambah dan terus berlangsung lama jika dalam penggunaannya masyarakat tidak memperhatikan keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan, selain itu kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh sampah yang semakin banyak.
 - Dampak dari pencemaran tanah, diantaranya dengan remediasi dan bioremediasi. Remediasi yaitu dengan cara membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan

Bioremediasi dengan cara proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).

Upaya Pemecahan Masalah :

- Kebudayaan antar daerah tahun 2014 dilaksanakan Kerapan Sapi tradisional yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, Kerapan Sapi yang sempat terpecah sejak beberapa tahun lalu bisa bersatu kembali yaitu Kerapan Sapi Tradisional dan sekaligus menghapus polimek dalam Pegelaran Kerapan Sapi selama ini, sebagai simbul dimulainya penggunaan aturan/tata tertib dan alat-alat baru ditandai dengan penyerahan alat pemukul lama (Rekeng, Bunthot dan Selop) dari tokoh pengerap kepada Kepala Bakorwil Pamekasan, yang selanjutnya akan disimpan sebagai dokumen sejarah untuk dimusiumkan yang sekaligus merupakan tonggak sejarah kembalinya penyelenggraan Kerapan Sapi dari menggunakan kekerasan kembali ke Tradisional dengan menggunakan alat pemukul baru dan sekaligus Piala Presiden RI yang baru.
- Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2015, menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah. Menjabarkan rencana stretegis kedalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan

pembangunan daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, APBD.

- Penyelenggaraan bidang Pemerintahan dan Ketertiban
 - Di Wilayah Bakorwil Pamekasan 6 Kabupaten telah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kecuali Kota Surabaya yang masih mengandalkan Satlak, hal ini amat disayangkan apabila terjadi bencana akan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan bantuan yang diberikan. Bantuan peralatan kebencanaan mulai dari mobil dapur lapangan, mobil rescue, alkom, motor trail, perahu karet kapasitas 10 orang, tenda posco, tenda pleton, tenda regu, tenda keluarga, velbed, Rig, SSB, lampu senter, genset serta water treatment portable sangat besar artinya guna persiapan kebencanaan dilapangan. Kesiapan Dinas Sosial dalam menghadapi bencana diwujudkan dalam bentuk kesiapsiagaan di daerah berupa buferstock makanan, peralatan evakuasi, kendaraan siaga bencana, personel Tagana dan dana dekonsentrasi kegiatan bencana alam/sosial yang siap dioperasikan pada tahap tanggap darurat pada kesempatan pertama.
 - Meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, meningkatkan kemakmuran, keadilan di masyarakat, Pengembangan KIM di bidang Usaha, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa fasilitas pinjaman ringan maka harusnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
 - Perlunya adanya pembinaan dan peningkatan Skill dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal dan berkualitas. Adanya ketersediaannya dana yang memadai dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh karena sudah menjadi tugas Pemerintah untuk menjadi pelayanan dan melayani masyarakat.
 - Meningkatkan kemampuan dan pemantapan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah Bakorwil Pamekasan dalam

rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Penurunan kejadian kriminal (criminal index) melalui meningkatkan penjagaan, pengawalan dan patroli rutin diruang publik dan wilayah permukiman yang dilaksanakan Polri ataupun Polisi Pamong Praja. Peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik yang terjadi di masyarakat dan masalah lain yang dapat menggagu ketentraman masyarakat guna menangkal sedini mungkin terjadinya konflik dimasyarakat.

- Segera dilakukan Inventarisai Barang Milik Daerah yang ditetapkan sebagai obyek pemanfaatan dan pengamanan administrasi, pengamanan fisik serta pengamanan hukum dan Proses pemanfaatan dilakukan sesuai prosedur. Pemerintah Propinsi Jawa Timur diharapkan lebih pro aktif dalam penanganan Barang milik Propinsi yang ada di Kabupaten/Kota terutama dalam pengurusan bukti kepemilikan/ sertifikat serta kejelasan pemanfaatanya kepada pihak lain bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- Rumusan usulan pemecahan permasalahan di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sosial, adalah :
 - ❖ Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan dasar di bidang infrastruktur pembangunan jembatan, Jalan, pelabuhan dan terminal serta jalan alternatif apabila terjadi banjir, mengoptimalisasi sektor Koperasi, UMKM, BLK dan membuka seluas-luasnya peluang investasi. Relokasi permukiman di kawasan kumuh yang dilengkapi dengan fasilitas sosial ekonomi kemasyarakatan untuk penunjang perekonomian masyarakat. Pengelolaan sanitasi dengan pendekatan insentif dan disinsentif, ekonomis dan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.
 - ❖ Menjadikan sektor pertanian sebagai pusat dari pengembangan sektor lain dalam mencapai

pertumbuhan ekonomi yang direncanakan (misalnya pengembangan agroindustri, agrowisata, wanawisata, sentra UMKM berbasis produk pertanian). Memberikan perhatian secara khusus terhadap komoditas unggulan melalui pemberdayaan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan agribisnis, memberikan kemudahan akses permodalan. Peningkatan pengawasan terhadap produk pertanian hortikultura dan peningkatan kapasitas masyarakat yang bekerja disektor pertanian, bantuan peralatan bagi pedagang mikro dan kecil serta wirausaha baru.

- ❖ Menyelenggarakan sistem pendidikan murah dalam rangka mewujudkan pemerataan dan mencerdaskan masyarakat. Meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam rangka reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial melalui penguatan kelembagaan dalam upaya menurunkan jumlah masyarakat miskin dan kaum rentan sosial yang tepat sasaran, mendorong masyarakat untuk ikut berperan serta aktif.
- Penyelenggaraan bidang Pembangunan Ekonomi
 - Pencegahan di sini dimaksud kegiatan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat lokal akan penting menjaga fungsi dan manfaat hutan agar dapat membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan, perlu dilakukan bimbingan teknis dan aneka usaha bagi masyarakat di sekitar hutan mangrove secara continue dan berkesinambungan, serta adanya dukungan pemasaran dari instansi terkait dari Pemkab guna mendukung produksi aneka usaha olahan dari hutan mangrove.
 - Melalui kebijaksanaan pemerintah, pengintegrasian pengembangan koperasi dengan program pembangunan secara keseluruhan dapat dimungkinkan. Dalam kaitan ini

koperasi akan memperoleh banyak kesempatan untuk berpartisipasi khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi. Alokasi sumber daya dari luar kepada koperasi menjadi sangat mungkin, baik berupa modal maupun SDM yang terampil.

- Perlu adanya kebijakan pembangunan peternakan komersil di wilayahnya masing-masing. Pemerintah sendiri berperan menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan pelayanan seperti penyediaan pelayanan investasi yang cukup dan memberikan porsi perhatian yang tinggi terhadap pembangunan peternakan. Perlu dikembangkan sebuah sistem peternakan yang berwawasan ekologis, ekonomis, dan berkesinambungan. Yaitu dengan mengembangkan peternakan industri dan peternakan rakyat yang dapat mewujudkan ketahanan pangan dan mengantaskan kemiskinan.
- Meningkatkan ketepatan penggunaan pupuk, meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik melalui penggunaan pupuk organik, peningkatan ketepatan dalam penetapan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, peningkatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan, peningkatan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi.
- Menyediakan dan memperbaiki sarana dan prasarana pasar baik yang terdapat di pasar tradisional agar pengunjung merasa nyaman berbelanja dan enggan beralih ke swalayan modern yang sarana prasarana pasarnya lebih baik dari yang terdapat di pasar tradisional tersebut. Pemberian kredit kepada pedagang pasar baik dari lembaga keuangan atau perbankan agar pedagang memiliki modal yang cukup untuk memperlancar uasahnya dalam berdagang di pasar tradisional.
- Adanya perdamaian antara para nelayan yang sedang berkonflik dengan ditandatanganinya kesepakatan oleh pihak yang bertikai oleh instansi pemerintah pemangku kepentingan. Adanya sosialisasi hasil kesepakatan wakil-

wakil yang bertikai kepada para anggota kelompok/masyarakat, adanya sinergi dari para pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah konflik antar nelayan.

- Untuk menompang pelaksanaan otonomi daerah, perlu dikembangkan ekonomi lokal yang kuat dan secara sistemik akan mensinergikan potensi sumber daya lokal dengan basis kemitraan lintas sektor-sektor pembangunan (stakeholders). Dengan cara demikian pertumbuhan ekonomi akan lebih merata antar kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
 - Arah kebijakan umum ketahanan pangan adalah mewujudkan kemandirian untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah dan nasional sepanjang waktu dan merata melalui pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, teknologi inovasi dan peluang pasar, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.
- Penyelenggaraan bidang Kemasyarakatan
- Diharapkan adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait terutama RSUD daerah dengan RSUD dr. Soetomo Surabaya tentang mekanisme rujukan pasien sehingga pasien dapat terlayani secara optimal; perlu peningkatan validasi data yang akurat terhadap peserta JKN melalui BPJS di Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisasi kesalahan data peserta JKN terutama terjadinya kartu ganda dan kesalahan nama dan alamat peserta, diharapkan adanya peningkatan pengawasan terhadap instansi yang berwenang terhadap pelaksanaan dana operasional di masing-masing Puskesmas di Kabupaten/Kota.
 - Kabupaten/Kota agar selalu memberikan informasi tentang lowongan kerja, dan membuka bursa kerja yang bisa bekerjasama dengan pihak swasta, serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada penacari kerja yang mendorong pencari kerja untuk berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja. Kabupaten/Kota hendaknya berkoordinasi secara inten

dengan Kantor Imigrasi, agar data dari TKI betul-betul akurat. Pihak kecamatan agar diberi wewenang yang lebih jelas untuk urusan TKI, karena kecamatan merupakan ujung tombak paling bawah dan kecamatan agar bisa mendata TKI yang akan berangkat ke luar negeri.

- Perlu adanya program pemberdayaan masyarakat secara nyata, agar masyarakat dapat beralih profesi dari hal yang negatif ke bentuk usaha yang positif, bagi orang tua yang berani melaporkan anaknya sebagai pengguna ke BNN maka Rehabilitasi ditanggung BNN / Identitas pemakai dan pelapor dirahasiakan. Pengedar narkoba dapat dituntut hukuman mati, penanggulangan narkoba bukan semata-mata tugas Polisi dan BNN, tetapi secara sinergi Dinas/ Instansi terkait mempunyai tanggung jawab moral untuk lebih meningkatkan koordinasi didalam penanggulangan bahaya narkoba. Sosialisasi P4GN yang paling efektif untuk mencapai sasaran kepada masyarakat adalah melalui PKK dan Karang Taruna serta Tokoh Agama.
- Kabupaten/Kota dan Kecamatan agar lebih aktif untuk jemput bola bagi penduduk yang belum mengurus dokumen kependudukan, pendataan jumlah penduduk hendaknya dilakukan secara berkala, agar data kependudukan selalu solid, untuk laporan jumlah penduduk, kepada Kabupaten/Kota hendaknya mengirimkan tembusannya ke Bakorwil Pamekasan.
- Pengembangan pariwisata di daerah tidak terlepas dari integrasi semua pihak dan stakeholder terkait, terutama antar Kabupaten/Kota agar keterpaduan dan sinergitas pengembangan wisata dapat memudahkan wisatawan untuk berkunjung. Perlu adanya komitmen dalam mengembangkan potensi wisata di daerah, terutama komitmen eksekutif dan legislatif untuk mengembangkan akses pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar lokasi wisata. Pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan dan pendanaan yang didahului dengan riset dan

pamantauan peluang pengembangan pariwisata di Kabupaten/Kota, serta perlu adanya keterpaduan dan keselarasan kesamaan visi dan misi didalam pengembangan wisata tersebut.

- Penyelenggaraan bidang Sarana Prasarana
 - Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam, untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten, memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi, mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.
 - Mendorong dan menggairahkan peran serta masyarakat didalam penanggulangan kerusakan lingkungan; Diharapkan secara proaktif diharapkan adanya sosialisasi terhadap pengusaha dan industri kecil akan arti pentingnya pelestarian lingkungan terhadap kesehatan manusia yang melibatkan Tokoh Masyarakat dan LSM; Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan kawasan pertambangan sebagai salah satu alternatif pertimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menertibkan ijin usaha pertambangan sehingga tidak terjadi integrasi penertiban ijin usaha pertambangan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.032.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.013.674.763,00 atau 98,18%, pagu dan realisasi masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom ;

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Capaian pelaksanaan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.032.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.013.674.763,00 atau 98,18% meningkat dibanding dengan tahun 2013 sebesar Rp. 947.130.000,00 terealisasi sebesar Rp. 866.738.255,00 atau 91,51%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kelancaran tugas dengan pengadaan barang-barang berupa :

- Kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 unit;
- Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga;
- Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi;
- Perbaikan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

Kegiatan program ini diadakan karena ada beberapa permasalahan yang dijumpai, seperti misalnya Karpet, Sprai dan perlengkapan kamar tidur VIP, di rumah jabatan Kepala Bakorwil sudah kurang representative, Laptop, CPU, Printer, kendaraan dinas yang ada sudah tidak layak pakai karena faktor peruntukannya yang sudah terlalu lama, performance kantor yang perlu diubah kearah yang representative.

Upaya Pemecahan Masalah :

Semua hasil pengadaan telah selesai dipenuhi dan kesemuanya sangat tearasakan manfaatnya bagi para pegawai dilingkungan Bakorwil Pamekasan, terutama masalah performance kantor yang kelihatan lebih indah dan berwibawa, pengadaan kendaraan dinas operasional yang lebih memadai serta memperlancar pelaksanaan tugas kantor.

3) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 267.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 231.817.183,00 atau 86,58% secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom ;

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Capaian pelaksanaan pada tahun 2014 sebesar Rp. 267.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 231.817.183,00 atau 86,58% meningkat dibanding dengan tahun 2013 sebesar Rp. 197.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 196.602.500,00 atau 99,42%.

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang diarahkan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi dan evaluasi program pengembangan sarana dan prasarana, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan berupa rapat koordinasi dan monitoring berkaitan dengan :

- Pembinaan lembaga kemasyarakatan bidang pengairan, pembinaan HIPPA dan GHIPPA;
- Pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
- Pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan dan telekomunikasi;
- Pengembangan tata ruang dan pengembangan wilayah;
- Penyusunan data hasil pembangunan se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Pada pembinaan bidang pengairan masih dijumpai permasalahan-permasalahan, antara lain buku administrasi aspek pertanian masih belum nampak, penerapan tehnik teknologi dibidang usaha tani belum dikuasai (peningkatan produksi)/SL, koperasi kelompok belum berjalan. Sedangkan pada pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan wilayah dijumpai permasalahan kurangnya sumber daya manusia, baik dari kualitas maupun kuantitas dalam upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang begitu besar di wilayah Bakorwil Pamekasan, belum termanfaatkannya potensi pasar dan pemasaran yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Bakorwil Pamekasan, pemanfaatan hutan produksi yang melebihi daya dukungnya, sehingga mengganggu fungsi lindung yang ditetapkan.
- Jalan masih bergelombang, karena struktur tanah yang ada kecenderungan bergerak, perlu perhatian dan bila perlu dibuatkan rambu, terutama pengemudi yang belum mengenal medan dengan

baik, adanya beberapa ruas jalan di jalur pantura (wilayah kab.Sumenep) yang menyempit, sehingga perlu mendapat perhatian, lokasi parkir kendaraan berat yang mengerjakan perbaikan ruas jalan Pamekasan-Sampang agar dibuatkan rambu, terutama di malam hari. Pasar Tumpah, sering menimbulkan problematika kelancaran arus lalu lintas;

- Pembangunan menara itu menimbulkan radiasi yang mengganggu terhadap manusia, tumbuhan dan makhluk sekitarnya, apabila ada bangunan menara tidak ada izin dari pemerintah dan masyarakat siapa yang berhak menghentikan pembangunan menara tersebut.
- Bahwa untuk pengembangan kawasan agropolitan tidak melulu ditekankan kegiatan Pemerintah Daerah misalnya Dinas Pertanian, namun harus ada keterpaduan dan sinergi antara Pemerintah, pihak ketiga serta Perguruan Tinggi. Pada dasarnya agropolitan dapat terus berkembang karena ada dana masuk dari nilai tambah ditunjang Pemerintah memberi sarana dan prasarana serta pihak ketiga dalam pengelolaan dan pemasarannya;
- Kurang stabilnya aplikasi SIPD online yang membuat kesulitan dalam mendownload dan import data yang telah diisi melalui excel serta masih lambatnya loading aplikasi SIPD sehingga menghambat updating data. Rendahnya tingkat keterisian data yang disebabkan oleh beragam persepsi dari daerah terhadap pentingnya data untuk pelaksanaan pembangunan, dukungan SDM operator data yang kompeten dan memahami data SIPD di masing-masing daerah.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Perlu peningkatan peran perempuan (gender) dalam setiap kelompok HIPPA / Ghippa / Ihippa; Evaluasi sebaiknya dilakukan kepada seluruh aspek, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan program kerja tahun berikutnya. Harapan dari seluruh peserta agar kegiatan sarasehan HIPPA/GHIPPA harus tetap diadakan oleh BAKORWIL Pamekasan bukan hanya pembinaan dan evaluasi lapangan saja, agar dalam pelaksanaan Pembinaan HIPPA hendaknya tidak terfokus pada aspek pengairan saja tapi aspek produk unggulan harus di kedepankan. Seluruh penyampaian masing-masing Kelompok HIPPA/GHIPPA/ IHIPPA memaparkan profilnya dengan baik.

- Berdasarkan hasil yang dilaksanakan terhadap Pembinaan dan Evaluasi kelompok HIPPA/GHIPPA/IHIPPA di Wilayah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan, memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.20.20.1
Hasil Pembinaan dan Evaluasi kelompok
HIPPA/GHIPPA/IHIPPA di Wilayah Badan Koordinasi Wilayah
Pamekasan

No.	Nama Hipa	Jumlah Nilai	Urutan	No.	Nama Ghippa	Jumlah Nilai	Urutan
1.	Sumber Rejeki Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	87.335	I	1.	Tirta Jokotole Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang	113.379	I
2.	Bunga Tanjung Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan	75.016	II	2.	Trirta Delta Mandiri Desa Segodo Bancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo	102.528	II
3.	Sumber Tirta Tani Desa Asem Nonggal Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang	71.416	III	3.	Anugerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep	10.146	III
4.	Sumber Rejeki Desa Sendir Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep	57.416	IV				

- Adanya pemasangan *Box Culvent* agar jalan kearah Sedati lebih lebar dan pembangunannya sudah diagendakan tahun depan begitu juga ruas jalan lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Memantapkan persiapan sarana prasarana jalan dan jembatan, terutama kesiapan di jalan-jalan yang berlubang di wilayah Tanah Merah Bangkalan hingga Kalianget Sumenep. Mengembangkan SDM didalam melaksanakan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang efektif dan efisien. Mengembangkan teknologi tepat guna dan kompetitif serta meningkatkan keandalan mutu infrastruktur jalan dan jembatan, mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan.

Kondisi Jalan di Wilayah Madura :

- **JALAN NASIONAL :**
 - Panjang jalan = 177,400 km
 - Kondisi baik dan sedang = 102,500 km (57,78%)
 - Kondisi rusak dan rusak berat = 74,900 km (42,22 %)
- **JALAN PROPINSI :**
 - Panjang jalan = 317,733 km
 - Kondisi baik dan sedang = 229,946 km (72,37%)
 - Kondisi rusak dan rusak berat = 87,787 km (27,63 %)
- Jika itu terjadi maka sanksi yang diberikan adalah pembongkaran bangunan menara tersebut. Selalu ada koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi yang di fasilitasi oleh Bakorwil Pamekasan. Pemerintah Daerah selalu mengadakan pengawasan terhadap pembangunan menara yang ilegal dan sesegera mungkin memberikan tindakan dan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku
- Adanya peningkatan penanganan lahan kritis di wilayah Madura secara terpadu dan menyeluruh diberdayakan menjadi kawasan yang mempunyai nilai ekonomis dalam hal ini menjadi kawasan agropolitan Perencanaan pengembangan komoditas unggulan dapat dikembangkan oleh petani untuk peningkatan pendapatan petani serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Bappeda Provinsi Jawa Timur dapat mengusulkan kepada pihak Bank Data agar membuat *mirror site* atau duplikasi aplikasi SIPD khusus untuk Jawa Timur yang nantinya dapat ditempatkan di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, hal ini bertujuan agar dalam pengisian SIPD tidak terganggu dengan trafik bandwidth dari Provinsi lain. Sosialisasi yang lebih tajam (termasuk kepada kepala daerah), sehingga pengisian data didukung semua pihak. Memberikan bimbingan teknis pengisian data kepada operator data SIPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sangat diharapkan segera adanya Dukungan dana bagi Kabupaten/Kota dari Bappeda Provinsi Guna menunjang keterisian data SIPD, perbaikan Bandwith dan Pengadaan Server SIPD.

20.21 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MALANG

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dicapai melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 65.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.987.100,00 atau 99,98% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan Pembangunan

Ketersediaan data dan informasi pembangunan Kabupaten/Kota se wilker Bakorwil Malang dalam buku Profil Daerah yang antara lain memuat gambaran umum, kebijakan pembangunan, visi misi dan potensi daerah di wilayah kerja Bakorwil Malang.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Belum ada standarisasi penyusunan buku profil daerah sebagai acuan.
- Data belum di update.

Upaya pemecahan masalah :

- Rakor perumusan standar Penyusunan Profil Daerah se wilker Bakorwil Malang dan Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- Fasilitasi update data se wilayah kerja Bakorwil Malang.
- Update data ke daerah.

2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 1.070.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.018.753.700,00 atau 95,21% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- 25 SKPD Provinsi telah menginformasikan ke Kabupaten/Kota terkait rencana program/kegiatan tahun 2015 yang akan dilaksanakan di wilayah kerja Bakorwil Malang.
- 494 usulan program disetujui 335 atau 67,81%, sedangkan usulan kegiatan 1.532 disetujui 390 atau 25,46 %.
- Terinventarisirnya permasalahan aset Pemprovinsi yang belum jelas perikatannya secara hukum dan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Tim Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 110.000.000,- / tahun.
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani yang tergabung dalam HIPPA/GHIPPA.
- Terinventarisirnya permasalahan HIPPA/GHIPPA sekaligus memberikan pembinaan terhadap yang menghasilkan nominator HIPPA/GHIPPA masuk dalam kategori terbaik di wilayah kerja Bakorwil Malang yang akan diusulkan ke tingkat provinsi dan nasional.

Hasil evaluasi dan peringkat HIPPA terbaik di wilayah kerja Bakorwil Malang sebagai berikut :

- HIPPA Tirto Mulyo Desa Potang Kecamatan Ambulu Kab. Jember.
- HIPPA Makmur Jaya Desa Pendil Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo.
- HIPPA Arum Wangi Desa Tegalarum Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
- HIPPA Sumber Harapan Desa Kendit Kec. Kendit Kab. Situbondo.

- HIPPA Sido Mukti Desa Selok Besuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- HIPPA Tirta Sari Desa Pakistaji Wonoasih Kot Probolinggo.

Hasil evaluasi dan peringkat GHIPPA terbaik di wilayah kerja Bakorwil Malang sebagai berikut :

- GHIPPA Sumber Arum Desa Parijatak Wetan Kec. Srono Kab. Banyuwangi.
- GHIPPA Rukun Mulyo Desa Ambulu Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo.
- Tersedianya data keikutsertaan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan Desa Berseri. sedangkan yang belum mendapatkan kategori Desa Berseri yaitu : Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab Jember, dan Kab. Probolinggo.
- Merumuskan kesepakatan bersama atas Pengelolaan DAS Brantas berdasarkan rencana pengelolaan DAS yang telah berbasis ekologis dengan menetapkan daya tampung beban DAS Brantas.
- Merumuskan pengendalian pencemaran air melalui instrument izin lingkungan dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik, industri, peternakan, dll.
- Pengembangan program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis di wilayah Malang Raya.
- Pembangunan TPS di sekitar aliran DAS Brantas untuk menghindari pembuangan sampah di sungai.
- Penanaman pohon bambu di sepanjang aliran DAS Brantas sebagai upaya konservasi aliran sungai DAS Brantas.
- Terinventarisirnya permasalahan dan isu-isu strategis di Kabupaten/Kota se wilker Bakorwil Malang.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- SKPD Kabupaten/Kota masih banyak yang belum mengetahui program prioritas Pemerintah/SKPD Provinsi.

- Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota masih belum sinergis dengan program kegiatan SKPD Provinsi.
- Masih terdapat aset Provinsi di wilayah kerja Bakorwil Malang yang belum jelas penggunaannya/perikatannya.
- Belum dilakukan pembinaan HIPPA/GHIPPA yang terstruktur.
- Pemerintah Kabupaten/Kota belum menyediakan anggaran untuk pembinaan HIPPA/GHIPPA.
- Belum ada rumusan perbedaan pemeringkatan penilaian HIPPA/GHIPPA Kabupaten/Kota belum sampai pada kategori Kabupaten dan Kota.
- Belum semua Kabupaten/Kota melaksanakan program Desa/Kelurahan Berseri.
- Adanya Penurunan kualitas dan kuantitas air.
- Adanya Alih guna lahan dari hutan menjadi tanaman sayur.
- Adanya Degradasi lahan.
- Banyaknya permasalahan atau isu-isu strategis yang belum terinventarisir dengan baik sesuai dengan bidangnya.

Upaya pemecahan masalah :

- Memfasilitasi Rapat Koordinasi Informasi, Sinkronisasi dan Sinergis (KISS) Program SKPD Provinsi dengan BAPPEDA Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi kegiatan Pra Musrenbang di tingkat Bakorwil Malang dalam rangka memverifikasi usulan program kegiatan SKPD Kabupaten/Kota.
- Melakukan pertemuan antara Tim aset Provinsi dan Tim Asset Kabupaten/Kota guna penyelesaian masalah.
- Meningkatkan anggaran program/kegiatan sektor pertanian dan pengairan di Kabupaten/Kota guna mendukung keberadaan HIPPA/GHIPPA.
- BAPPEDA Kabupaten/Kota agar mengkomodir program/kegiatan dalam rangka pembinaan HIPPA/GHIPPA.

- Mendukung pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Berseri melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan secara langsung bersama SKPD teknis untuk bersama sama mendukung Program Jawa Timur menuju Provinsi Hijau.
- Membangun kesepakatan bersama mewujudkan kegiatan perlindungan dan pengelolaan hulu DAS Brantas yang holistik dan terintegrasi di wilayah Malang Raya sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan (BA. Arsip SKPD).
- Menginventarisir informasi permasalahan dan isu strategis sesuai bidang terkait.

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 740.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 675.145.544,00 atau 91,24% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Terpantaunya penyebaran WTS dampak penutupan lokalisasi.
- Tersedianya database by name by address WTS di wilayah kerja Bakorwil Malang.
- Adanya dukungan Ikatan Da'i Lokalisasi atas penutupan lokalisasi.
- Adanya kerjasama antar pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi apabila ada dampak penutupan lokasi (pemulangan, pengawasan, pembinaan lanjut).
- Terwujudnya sinergitas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan bencana.
- Meningkatkan kewaspaan terjadinya bencana di daerah.
- Penyediaan akses radio komunikasi menggunakan kanal-kanal yang ditentukan oleh BNPB dan BPBD.

- Tersampainya informasi hasil pembangunan Provinsi Jawa Timur.
- Tersedianya hiburan bagi dan kegiatan sosial masyarakat (jalan sehat).
- Terwujudnya sinergitas kegiatan yang terkait pelaksanaan pemilu.
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemilu di daerah (jumlah pemilih di masing-masing daerah naik).
- Tersedianya dukungan keamanan dari Korem dan masing-masing POLRES tempat penyelenggaraan Pemilu.
- Antisipasi adanya revisi PP 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyiapkan data dan dokumen untuk pembentukan pokja membahas NSPK yang mengacu pada PP 38 Tahun 2007.
- Kreteria besaran organisasi dinas/badan ditetapkan berdasarkan variabel, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan sebagainya.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan menerapkan SOP, SPM, SPP dan inovasi pelayanan.
- Melakukan survey Indek Kepuasan Masyarakat bisa dilakukan oleh Dinas/Badan sendiri atau melibatkan Perguruan Tinggi.
- Menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik dengan baik dan benar.
- Meningkatnya koordinasi KIM dalam rangka persiapan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK).
- Menyiapkan bahan/materi yang diperlukan terkait pelaksanaan LCCK agar peserta dari Bakorwil Malang menjadi yang terbaik.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah

Permasalahan :

- Kabupaten/Kota belum memiliki database WTS by name by address.

- Belum ada kerjasama penanganan WTS antar Kabupaten/Kota.
- Penanganan bencana masih bersifat lokal (kedaerahan) Kabupaten/Kota lain sifatnya insidentil.
- Sarana prasarana, komunikasi terkait penanganan bencana belum memadai.
- Anggaran penanganan bencana di daerah belum mencukupi.
- Partisipasi masyarakat masih rendah.
- Perlunya kegiatan yang langsung menyentuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya naik tetapi tidak signifikan.
- Adanya sengketa hasil pemilu di beberapa wilayah kerja Bakorwil Malang.
- Revisi PP 41 Tahun 2007 masih dalam proses pembahasan.
- Belum semua SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Masih banyak ditemukan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- Koordinasi dilakukan ketika akan menghadapi event atau kegiatan.
- Penyiapan materi.

Upaya pemecahan masalah :

- Mendorong Kabupaten/Kota menyediakan database PMKS khususnya WTS.
- Merevitalisasi kerjasama yang sudah ada atau memperbaharui kerjasama terhadap penanganan WTS.
- Penanganan bencana yang komprehensif.
- Menyiapkan sarana prasarana antisipasi bencana.
- Menambah alokasi anggaran penanganan bencana.
- Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat.
- Kegiatan yang dilaksanakan lebih variatif.

- Memantau pelaksanaan pemilu diarah dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan instansi terkait didukung dengan data yang valid termasuk tingkat kehadiran dan sengketa yang terjadi.
- Mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebagai antisipasi berlakunya revisi PP 41 Tahun 2007.
- Memfasilitasi bintek penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (Narasumber ahli dibidangnya).
- Menidaklanjuti pengaduan masyarakat agar ada peningkatan pelayan yang dibutuhkan.

4) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 530.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 453.954.200,00 atau 85,65% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Mendorong Peningkatan kinerja para penyuluh pertanian kepada masyarakat yang bergerak dibidang usaha agribisnis agar terwujud good agriculture practices dan good handing practices.
- Mendorong terbentuknya kelembagaan yang kuat yang mampu bernegosiasi untuk menentukan harga produk yang dihasilkan.
- Merumuskan upaya pengelolaan dan pemasaran produk perikanan.
- Adanya peningkatan pembinaan dan monitoring terutama daerah yang memiliki produk laut yang potensial.
- Adanya engemasan yang menarik hasil produk laut agar bisa bersaing dipasaran.

- Merumuskan kerjasama antar lembaga dan berbagai kelompok masyarakat sekitar hutan seperti Gapoktan, LMD Hutan, Kelompok Tani Hutan terhadap berbagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan yang akan ditindaklanjuti oleh SKPD teknis Kabupaten/Kota.
- Meningkatkan pemahaman program kementerian pertanian tentang Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wirausaha khususnya terhadap pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Perlunya pelatihan atau bimtek pengembangan BUMDes.
- Mengimplementasikan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015.
- Penyediaan anggaran yang cukup dan memberikan pelatihan teknis untuk peningkatan mutu produk IKM.
- Penyediaan sarana, gedung, teknologi informasi, pameran (insidentil) dan perwakilan perdagangan di beberapa provinsi.
- Pengembangan usaha koperasi, revitalisasi kelembagaan dan memfasilitasi bantuan hibah.
- Perlunya kebijakan mengembangkan industri kreatif berbasis kuliner.
- Melakukan revitalisasi kelembagaan dalam rangka pengembangan koperasi.
- Meningkatkan pembinaan KOPPONTREN terkait pengembangan teknologi dan kelembagaannya (manajemen modern) sehingga menjadi koperasi yang maju.
- Terinventarisirnya jumlah koperasi di wilayah kerja Bakorwil Malang 9.888 yang aktif 7.128 non aktif 2.760 koperasi.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Kualitas hasil produk hortikultura lokal kurang bersaing dengan hortikultura import.

- Minimnya pembinaan petugas kepada petani terutama tentang teknis pengembangan hasil produk unggulan.
- Belum ada kerjasama secara konkrit.
- Belum ada kerjasama antar lembaga dan berbagai kelompok masyarakat sekitar hutan seperti Gapoktan, LMD Hutan, Kelompok Tani Hutan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- Kurangnya pemahaman program kementerian pertanian tentang Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- Kurangnya pembinaan terkait integrasi program KRPL dengan program-program lain telah masuk desa/kelurahan.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wirausaha khususnya terhadap pengelolaan/manajemen Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Pemahaman pengelolaan BUMDes di daerah masih rendah.
- Kurangnya pembinaan kepada pengusaha IKM di daerah.
- Kurangnya sarana prasarana pendukung IKM seperti gedung, teknologi informasi, kegiatan pameran (insidentil).
- Kurangnya terkait pengembangan usaha koperasi, revitalisasi kelembagaan dan memfasilitasi bantuan hibah.
- Kurangnya informasi kebijakan mengembangkan industri kreatif berbasis kuliner.
- Kurangnya pembinaan KOPPONTREN terkait pengembangan teknologi dan kelembagaannya (manajemen modern) sehingga menjadi koperasi yang maju.

Upaya pemecahan masalah :

- Kerjasama dengan SKPD terkait Provinsi untuk memfasilitasi pembinaan/pendampingan dan pengolahan teknis hasil produk holtikultura lokal.
- Memfasilitasi dan merumuskan kerjasama peningkatan pemasaran.

- Melakukan pembinaan/pendampingan oleh dinas terkait (bantuan modal pengembangan)
- Mewujudkan kerjasama antar lembaga dan berbagai kelompok masyarakat sekitar hutan seperti Gapoktan, LMD Hutan, Kelompok Tani Hutan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- Memfasilitasi pengembangan program kementerian pertanian tentang Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- Meningkatkan pembinaan terkait integrasi program KRPL dengan program-program lain telah masuk desakelurahan.
- Memberikan pembinaan terhadap wirausaha khususnya terhadap pengelolaan/manajemen Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Memberikan pembinaan pengelolaan BUMDes dan bimtek atau pelatihan.
- Meningkatkan pembinaan kepada pengusaha IKM di daerah.
- Menyediakan sarana prasarana pendukung IKM seperti gedung, teknologi informasi, kegiatan pameran bersama SKPD terkait.
- Memperluas jangkauan sasaran sosialisasi ke masyarakat terkait pengembangan usaha koperasi, revitalisasi kelembagaan dan memfasilitasi bantuan hibah bersama Dinas Koperasi dan UMKM.
- Mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif berbasis kuliner di daerah.
- Meningkatkan pembinaan KOPPONTREN terkait pengembangan teknologi dan kelembagaannya (manajemen modern) sehingga menjadi koperasi yang maju.

5) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 605.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 543.658.200,00 atau 89,86% pagu dan

realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Berkomitmen melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan dan perlindungan korban tindak kekerasan.
- Mendorong terwujudnya Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota se wilayah kerja Bakorwil Malang.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM P2TP2A bagi pengurus dan Kader Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- Memfasilitasi terbentuknya shelter/Rumah Aman bagi perempuan dan Anak Korban kekerasan dan pendampingan secara hukum.
- Membuat komitmen/kerjasama dengan stake holder/instansi terkait pelaksanaan visum korban kekerasan agar tidak dipungut biaya/gratis.
- Mendukung pelaksanaan program Generasi Emas Indonesia Berkarakter.
- Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program JKN (Juklak dan juknis beberapa rumah sakit belum tersusun) perbedaan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan program JKN.
- Merekomendasikan perlunya Perda tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumahan.
- Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata.
- Merekomendasikan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur kepada daerah terkait dengan Kewajiban Usaha Pondok Wisata harus memiliki tanda daftar usaha pondok wisata dari pemerintah Kabupaten/kota setempat.

- Merumuskan Pembentukan Tim Lintas Sektor Percepatan Penanganan Pasien Bebas Pasung.
- Pembentukan Kader Pengawasan Orang Masalah Dengan Kejiwaan (OMDK) tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan.
- Merumuskan Kesepakatan penggunaan Data penduduk yang dipergunakan adalah hasil sensus penduduk tahun 2010 yang selanjutnya disesuaikan dengan data mutasi penduduk hasil registrasi di desa/kelurahan.
- Meningkatnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan daerahnya bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- Merekomendasikan Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba periode 2014-2019.
- Meningkatnya pemahaman tentang PUG dan PPRG.
- Tersedianya data PPRG SKPD di Kabupaten/Kota.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Minimnya kebijakan program Kota Layak Anak.
- Terbatasnya SDM P2TP2A bagi pengurus dan Kader Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- Belum tersedianya shelter/Rumah Aman bagi perempuan dan Anak Korban kekerasan dan pendampingan secara hukum.
- Program Generasi Emas Indonesia Berkarakter belum didukung dengan anggaran yang mencukupi.
- Pelaksanaan program JKN belum bisa dilaksanakan di semua rumah sakit.
- Belum ada Perda tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumahan.
- Belum tersosialisasikan secara luas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata dan regulasi lain yang mendukungnya.

- Belum ada Tim Lintas Sektor Percepatan Penanganan Pasien Bebas Pasung.
- Belum terbentuknya Kader Pengawasan Orang Masalah Dengan Kejiwaan (OMDK) tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan.
- Adanya Perbedaan data kependudukan yang dipergunakan yang terregistrasi di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.
- Lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan daerahnya bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- Belum ada Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba periode 2014-2019.
- Kurangnya pemahaman tentang PUG dan PPRG.
- Belum terinventarisirnya pelaksanaan PPRG dengan baik.
- Keterbatasan SDM yang memahami program respnsif gender.

Upaya pemecahan masalah :

- Memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan.
- Meningkatkan komitmen dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak.
- Menyediakan shelter/Rumah Aman bagi perempuan dan Anak Korban kekerasan dan pendampingan secara hukum.
- Menyediakan anggaran yang cukup untuk program Generasi Emas Indonesia Berkarakter.
- Menyediakan juklak dan juklis pelaksanaan program JKN.
- Meningkatkan layanan kesehatan melaui program JKN.
- Menyiapkan Perda tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumahan.
- Mengimplementasikan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata di daerah.
- Membentuk Tim Lintas Sektor Percepatan Penanganan Pasien Bebas Pasung.

- Membentuk Kader Pengawasan Orang Masalah Dengan Kejiwaan (OMDK) tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan.
- Mengkoordinasikan dan menyusun kesepakatan bersama dengan daerah terkait Perbedaan data kependudukan yang dipergunakan adalah data hasil registrasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.
- Meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan daerahnya bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- Membentuk Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba periode 2014-2019.
- Melaksanakan bintek bagi perencana tentang PPRG.
- Membentuk Focal Point Gender pada setiap SKPD Kabupaten/Kota.
- Dukungan anggaran untuk program responsif gender.

6) Program Peningkatan Kerjasama

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 435.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 408.521.130,00 atau 93,91% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Mengetahui progres pelaksanaan program dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama yang ada SKPD Kabupaten/Kota fokus pada pelaksanaan TP dan UB di beberapa SKPD.
- Terinventarisirnya permasalahan terkait pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama yang ada di beberapa SKPD Kabupaten/Kota.
- Meningkatnya keterisian data hasil pembangunan.

- Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pengolah data hasil pembangunan.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Pelaksanaan program kegiatan dana Dekonsentrasi, TP, dan UB mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan.
- Adanya Aplikasi baru terkait sistem pelaksanaan APBN di KPPN.
- SKPD penerima dana APBN (Urusan Bersama dan Tugas Pembantuan) tidak melaporkan perkembangan capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan ke BAPPEDA Kabupaten/Kota selaku koordinator pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Minimnya keterisian data hasil pembangunan daerah.
- Minimnya informasi dan dukungan data hasil pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan kedepan.
- Kurangnya kemampuan dan ketrampilan pengolah data hasil pembangunan.

Upaya pemecahan masalah :

- Mengkoordinasikan teknis percepatan pelaksanaan program kegiatan (koordinasi KPPN dan Bappeda).
- Menghadirkan SKPD penerima dana APBN khususnya dana Dekon, UB dan TP didorong untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan serta realisasi anggarannya sebagai bahan evaluasi.
- Melakukan monitoring dan pembinaan ke Kabupaten/Kota terhadap pengisian data hasil pembangunan.
- Memberikan bimtek keterisian data hasil pembangunan.

20.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional, integritas dan berbudaya kerja produktif
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian
- 3) Meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
- 4) Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian daerah di Provinsi Jawa Timur

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, total dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.939.781.896,00 atau 96,99%, secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom

Program ini didukung dengan kegiatan pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik, kegiatan pengembangan mutu pelayanan ISO, kegiatan monitoring dan evaluasi program

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Terwujudnya harmonisasi pelaksanaan pelayanan kepegawaian dengan SKPD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kab/Kota se-Jawa Timur.
- Terwujudnya pengembangan pelayanan kepegawaian melalui penerapan standar manajemen mutu dan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Terwujudnya penyusunan laporan Laporan Kinerja 2014, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013, penyusunan DPA 2014, penyusunan RKA-DPA PAPBD 2014, Rencana Kerja Anggaran

2015, Perjanjian Kinerja Kepala BKD Provinsi Jawa Timur dan laporan-laporan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Skor indeks program peningkatan kualitas pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.1
Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

No	URAIAN	2012	2013	2014
1.	IKM	83,98	83,99	84

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

Dari tabel tersebut diketahui bahwa skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 meningkat sebesar 0,01% atau 84 dari skor tahun sebelumnya yaitu 83,99%.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan :

- Belum semua unit kerja pelayanan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) kepegawaian;
- Belum adanya persamaan persepsi atau multitafsir dalam penerapan peraturan dan perundangan - undangan di bidang kepegawaian;
- Belum semua pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan sesuai dengan target dan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Menyelenggarakan koordinasi, dan evaluasi program kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian untuk penyempurnaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur di bidang kepegawaian;

- Melaksanakan pemantapan koordinasi, dan sosialisasi dalam rangka menyamakan persepsi dan kajian peraturan perundangan undangan di bidang kepegawaian;
- Melaksanakan koordinasi dan pemahaman melalui rapat-rapat focus group diskusi (FGD) dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dengan pihak terkait.

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, total dana sebesar Rp 9.800.000.000,00 dengan realisasi Rp. 8.155.694.904,00 Juta atau 83,22% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Terselenggaranya seleksi calon PNS dari pelamar umum yang transparan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), untuk Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang dan Psikotes oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya dan Universitas Airlangga.
- Tersedianya SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan formasi hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja serta hasil pemetaan PNS;
- Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten melalui jalur formal (tugas belajar) S1, S2, dan S3 sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Meningkatnya keterampilan bagi pegawai yang akan menjelang purnatugas
- Penyematan penghargaan Satyalencana Karya Satya
- Terlaksananya pemberian rekomendasi Taperum bagi PNS yang purna tugas
- Hasil-hasil program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.2
Kegiatan Rekrutmen CPNS Pelamar Umum

SELEKSI	2013	2014
Pendaftar Online	53.762	3.594
Pendaftar yang mengirim berkas lamaran	43.336	3.594
Pendaftar yang memenuhi syarat	32.330	3.091
Tidak hadir	3.545	503
Formasi yang ditetapkan	585	168
Pendaftar yang lulus	560	432 (masih harus TKB)
Pendaftar yang terima Keputusan CPNSD	558	159

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah pendaftar calon PNS pelamar umum pada tahun 2014 mengalami penurunan sangat signifikan, hal ini dimungkinkan karena adanya perubahan sistem pendaftaran satu pintu yaitu melalui portal KemenPAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara (panselnas), selain itu hampir semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga menyelenggarakan pendaftaran penerimaan calon PNS. Selain itu juga sangat dipengaruhi oleh banyaknya alternatif pilihan pendaftar untuk melakukan pendaftaran di tempat yang ketersediaan jumlah formasinya cukup banyak. Hal ini menyebabkan target jumlah pendaftaran tidak tercapai.

Dari 3.594 orang pelamar yang telah mengirimkan berkas lamaran, hanya 3.091 orang yang memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti seleksi tes kompetensi dasar dengan menggunakan sistem *computer assisted tes (CAT)*. Dari hasil penilaian yang disampaikan panselnas kepada panselda maka yang dinyatakan berhak untuk mengikuti tes kompetensi bidang (TKB) sebanyak 432 orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.3
Kegiatan Tes Kompetensi Bidang (TKB), Psikotes dan Wawancara

SELEKSI TKB	2014
Test Potensi Akademik (TPA): Biokes, Rekayasa, Soshumaniora	424
Psikotes	424
Wawancara	424
Tidak hadir TKB (TPA, Psikotes, Wawancara)	8
Formasi yang ditetapkan	168
Formasi yang tidak terisi karena TKD dibawah passing grade	9
Pendaftar yang terima Keputusan CPNSD	159

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

Dari tabel tersebut diketahui bahwa dari 432 orang yang dinyatakan lulus TKD, hanya diikuti oleh 424 orang yang hadir untuk mengikuti TKB, artinya bahwa ada 8 orang yang tidak hadir dan dinyatakan tidak lulus ujian TKB. Dari hasil pengumuman oleh penilaian oleh Panselnas yang disampaikan kepada Panselda diketahui bahwa formasi yang seharusnya tersedia 168 formasi, hanya dapat diisi oleh 159 orang saja, sedangkan ada 9 formasi jabatan yang tidak dapat di isi karena dinyatakan di bawah passing grade.

Di samping pelaksanaan rekrutmen pelamar umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 juga mendapatkan alokasi formasi khusus di bidang kesehatan, khususnya tenaga dokter, dan penyelesaian formasi bagi tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus tes pada tahun 2013, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.4
Rekrutmen Formasi Khusus Tahun 2014

FORMASI	2014	KETERANGAN
Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi	148	Sudah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Calon PNS
Honorer K2	77	Masih dalam proses

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

Dari tabel tersebut diketahui bahwa dari 148 formasi khusus yaitu tenaga dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi seluruh usulan pengangkatan calon PNS pada tahun 2014 sudah ditetapkan keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil-nya, sedangkan usulan pengangkatan Keputusan Calon PNS yang berasal dari tenaga honorer katagori II (K-II) sampai dengan tahun 2014 masih dalam proses penyelesaian di Badan Kepegawaian Negara.

Kegiatan lainnya adalah menghitung jumlah kebutuhan dan kekurangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pemetaan pegawai dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.5
Jumlah Kebutuhan PNS Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

NO.	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	2.	3	4	5	6	7	8
1.	Kebutuhan PNS	30.767	30.767	30.767	33.141	28.830	28.830
2.	Jumlah PNS	23.396	23.230	22.426	21.092	20.187	20.809
3.	Kekurangan PNS	7.396	7.537	8.341	12.049	8.643	8.021

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

Dari tabel tersebut diketahui bahwa mulai tahun 2009-2014, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kekurangan pegawai. Pada 2014 jumlah pegawai yang ada sebanyak 20.809, sedangkan kebutuhan pegawai sebanyak 28.830 sehingga jumlah kekurangan jumlah pegawai sebanyak 8.021.

Hal ini disebabkan karena penetapan formasi yang diberikan pemerintah pusat tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang pindah, berhenti dan pensiun.

Untuk mencukupi kekurangan pegawai khususnya tenaga kesehatan dan tenaga teknis, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara menerima mutasi pelimpahan pegawai ke

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengalihkan jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu melalui proses impassing atau pendiklatan fungsional, dan meningkatkan teknologi informasi, serta mempekerjakan tenaga ahli atau terampil sesuai kebutuhan (pensiunan/tenaga tidak tetap). Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.6
Jumlah Kebutuhan Tenaga Non PNS
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

NO.	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	2.	3	4	5	6	7	8
1.	Tenaga BLUD	0	2.627	3.107	3.120	3.368	3.863
2.	Tenaga Non BLUD	0	2.481	3.024	3.134	3.253	3.581
3.	Jumlah	0	5.108	6.131	6.254	6.621	7.444

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kebutuhan pegawai melalui kontrak kerja untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis selalu meningkat seiring dengan jumlah pegawai yang pindah, berhenti dan pensiun.

Kekurangan kebutuhan pegawai juga dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan pegawai yang dilaksanakan melalui ujian penyesuaian ijazah, kemudahan pemberian izin belajar, dan penugasan pegawai ke perguruan tinggi negeri sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.7
Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur

PENDIDIKAN	% Tingkat Kelulusan Ujian Penyesuaian Ijazah				% Tingkat Pemberian Izin Belajar				% Tingkat Penugasan Tugas Belajar PNS (Kajian Kemiskinan di UB)			
	2013	2014	Total	%	2013	2014	Total	%	2013	2014	Total	%
SMP	28	8	36	0,17	3	0	3	0,01	0	0	0	0
SLTA	73	70	143	0,69	11	18	29	0,14	0	0	0	0
DIPLOMA3	20	1	21	0,10	1	1	2	0,01	0	0	0	0
S-1	41	26	67	0,32	4	0	4	0,02	0	0	0	0
S-2	4	5	9	0,04	226	138	364	1,76	20	18	38	0,18
S-2 (Staf ke Pembina (IV/a))	146	79	225	1,08	67	108	175	0,85	0	0	0	0
S-3	0	0	0	0	3	4	7	0,03	3	0	3	0,03
JUMLAH	271	189	460	2,22	323	271	594	2,87	23	18	41	0,19

N=20.809 (jumlah PNS Provinsi Jawa Timur)

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

Dari tabel tersebut diketahui bahwa persentase tingkat kelulusan ujian penyesuaian ijazah untuk masing-masing jenjang pendidikan bervariasi, sedangkan bila dilihat dari persentase tingkat kelulusan yang paling tinggi adalah jenjang pendidikan Strata-2 atau magister, yaitu 79 orang (sebelumnya 2013=146 orang) atau 1,08% dari jumlah pegawai sebanyak 20.809 orang, sedangkan rata-rata tingkat kelulusan ujian penyesuaian ijazah dari tahun 2013 dan tahun 2014 adalah 2,22% atau 460 orang. Demikian juga untuk tingkat pemberian izin belajar bagi jenjang pendidikan S-2 atau magister sebanyak 138 orang (sebelumnya 2013=226 orang) atau 1,76% dari jumlah pegawai sebanyak 20.809 orang, sedangkan rata-rata tingkat pemberian izin belajar pegawai dari tahun 2013 dan tahun 2014 adalah 2,87% atau 594 orang. Sedangkan untuk penugasan tugas belajar PNS untuk tahun 2014 hanya dilaksanakan di Program Pascasarjana Magister Kajian Kemiskinan di Universitas Brawijaya yaitu sebanyak 18 orang pegawai (sebelumnya 2013=20 orang), sedangkan rata-rata tingkat penugasan belajar tugas belajar PNS dari

tahun 2013 dan tahun 2014 adalah 0,19% atau 41 orang yang terdiri dari program doktoral S-3 di Universitas Airlangga sebanyak 3 orang, dan Magister kajian kemiskinan di Universitas Brawijaya sebanyak 38 orang).

Capaian hasil kegiatan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.8
Hasil Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Kode Etik Pegawai serta Penghargaan

REALISASI PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 2014

Satuan Kerja :

JABATAN	REALISASI 2014						JUMLAH TOTAL	%
	RINGAN		SEDANG		BERAT			
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA		
FUNGSIONAL UMUM								
Golongan IV			5	2	2		9	0.04
Golongan III			5		10	1	16	0.08
Golongan II					5	2	7	0.03
Golongan I								
FUNGSIONAL TERTENTU								
Ahli Utama								
Ahli Madya								
Ahli Muda								
Ahli Pertama								
Penyelia					1		1	0,004
Pelaksana Lanjutan/Mahir						1	1	0,004
Pelaksana / Terampil					1	2	3	0.01
Pemula								
STRUKTURAL								
Eselon I								
Eselon II								
Eselon III					2		2	0,009
Eselon IV			5	2			7	0.03
JUMLAH			15	4	21	6	46	0.22

N=20.809 PNS

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

Dari tabel tersebut diketahui bahwa persentase tingkat penjatuhan hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 46 orang atau 0,22% dari jumlah pegawai sebanyak 20.809.

Hasil-hasil lainnya dari kegiatan ini adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.9

**Hasil Program Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur**

No	URAIAN	2012	2013	2014
1.	2.	3.	4	5
1	Diklatpim II	0	15	12
2	Diklatpim III	0	80	60
3	Diklatpim IV	0	160	60
4	Tugas Belajar			
	1. Strata 1	1	0	0
	2. Strata 2	12	20	18
	3. Strata 3	3	3	0
5	Inhouse Training	11	0	27
6	Izin belajar			
	1. SMP/Paket B	0	3	0
	2. SMA/Paket C	80	11	18
	3. D3	33	0	0
	4. Strata 1 (Sarjana) / Diploma IV	109	4	0
	5. Strata 2 (Magister)	63	226	138
	6. Strata 3 (Doktoral/Spesialis)	16	3	4
7	Wawasan Kepemimpinan	0	0	40
8	Ujian Penyesuaian Ijazah			
	1. Ke Pengatur Muda (II/a)	135	73	70
	2. Ke Pengatur (II/c)	4	20	1
	3. Ke Penata Muda (III/a)	32	41	26
	4. Ke Penata Muda Tingkat I (III/b)	11	5	6
	5. Ke Penata (III/c)	0	0	0
9.	Seleksi Pangkat III/d ke IV/a	96	64	88
10.	Ujian Dinas	188	125	110
11.	Fasilitasi Penerimaan Calon Praja IPDN	109	115	106
12.	Seleksi CPNS			
	1. Pendaftar On-line	22.425	53.762	3.594
	2. Pendaftar yang mengirim berkas lamaran	14.380	43.336	3.594
	3. Pendaftar yang memenuhi syarat	10.304	32.330	3.091
	4. Lulus	114	560	432 (masih harus TKB)
	5. Formasi yang ditetapkan	148	585	168

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

Tabel 4.20.22.10
Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan
Kode Etik Pegawai serta Penghargaan

No	URAIAN	2012	2013	2014
1.	Penjatuhan Hukuman PNS			
	Pelanggaran Disiplin PNS :			
	1. Ringan	0	2	0
	2. Sedang	4	8	10
	3. Berat	7	13	26
	Pelanggaran Pidana			
	PNSD Provinsi Jawa Timur :			
	1. Kriminal	3	2	0
	2. Penyalahgunaan jabatan/wewenang	0	0	0
	3. Korupsi	2	0	0
	4. Narkoba	1	2	1
	PNSD Kabupaten/Kota :			
	1. Kriminal	4	2	1
	2. Penyalahgunaan jabatan/wewenang	0	0	0
	3. Korupsi	4	2	3
	4. Narkoba	1	1	0
2.	Usul Pertimbangan :			
	1. BAPEK	1	0	1
	2. Inspektorat	27	17	10
3.	Perceraian			
	1. Pemberian izin perceraian	22	22	25
	2. Penolakan izin perceraian	3	2	1
4.	Konseling PNS	7	0	0
5.	Izin Perjalanan Dinas ke Luar negeri (Tidak termasuk yang melalui Biro Administrasi Kerjasama)	182	92	138
6.	Ibadah Haji	111	63	62
7.	Ibadah Umroh	117	263	211
8.	Cuti besar/Cuti di luar tanggungan Negara/ bebas tugas	10	18	8
9.	Penyelesaian LP2P	8.305	9.737	10.747
10.	Penghargaan Satyalencana Karya Satya	1.106	1.046	984
11.	Pembekalan kewirausahaan menjelang purnatugas	100	100	80
12.	Pelepasan Purnatugas	106	245	100
13.	Pemberian Rekomendasi Bapeltarum	1.107	463	357
14.	Penyelesaian Kartu Isteri/suami	744	282	348
15.	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS yang purnatugas	1.074	1.384	96

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan Pemecahannya

Permasalahan :

- Pelaksanaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil yang dilakukan melalui panselnas secara nasional masih banyak belum dipahami sepenuhnya oleh pendaftar, hal ini mengingat bahwa pengumuman penetapan formasi untuk setiap instansi atau Pemerintah Daerah tidak diumumkan serentak. Hal ini menyebabkan kekurangsabaran pendaftar dalam menetapkan pilihan formasi, sehingga banyak diantara pendaftar salah menentukan pilihan formasi dan pada akhirnya tidak bisa mendaftar kembali akibat ketentuan bahwa pendaftaran hanya bisa dilaksanakan satu kali saja melalui KTP elektronik. Selain itu banyak pendaftaran yang belum memiliki atau hilang KTP elektronik juga mengalami kesulitan mendaftar, termasuk dibolehkannya untuk memilih lebih dari satu pilihan formasi dengan standar penilaian passing grade yang ditentukan setelah pendaftaran.
- Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih belum dapat segera dilaksanakan mengingat bahwa Peraturan Pemerintah sebagai turunan petunjuk dan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut masih belum ditetapkan.
- Kurangnya motivasi PNS yang akan purna tugas untuk diberi pelatihan dan pembekalan kewirausahaan.
- Belum ada standar kesejahteraan yang sesuai prestasi/kinerja masing-masing PNS

Pemecahan Masalah :

- Upaya untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pendaftaran satu pintu pendaftaran calon PNS, salah satunya akan diusulkan kepada KemenPAN dan RB/panselnas terkait dengan proses pengumuman formasi untuk masing-masing instansi dan pemerintah daerah dilakukan serentak, sehingga para pelamar langsung mengetahui ketersediaan pilihan formasi di instansi atau

Pemerintah secara nasional yang serentak. Selain itu juga mekanisme penilaian kelulusan bagi pendaftar yang memilih lebih dari satu pilihan formasi sebaiknya ditetapkan sebelumnya dilakukan proses pendaftaran.

- Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Sosialisasi tentang manfaat pembekalan, serta pemberian bantuan modal untuk digunakan wirausaha
- Mengkaji Standar pemberian tunjangan kinerja dan perbaikan penghasilan bagi kesejahteraan PNS yang terukur untuk menghilangkan honor-honor yang sifatnya kurang jelas.

3) Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu program Pengelolaan sumber daya aparatur, total dana sebesar Rp 2.900.000.000,00 dengan realisasi Rp. 2.842.457.378,00 atau 98,02%. pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Rekomendasi keputusan dalam menentukan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Sosialisasi Penilaian/evaluasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Sosialisasi penilaian kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Pengusulan nota pertimbangan teknis dan penetapan keputusan kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional (umum dan tertentu) sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Hasil-hasil kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.11
Data hasil program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

No	URAIAN	2012	2013	2014
1.	Penyelesaian Kenaikan Pangkat:			
	PNS Provinsi Jawa Timur			
	1. Pilihan	322	983	84
	2. Reguler	4.062	2.043	4.077
	3. Usul ke Presiden	84	82	0
	PNS Kab/Kota (IV/a-IV/b)			
	1. Pilihan	22.252	9.961	13.560
	2. Reguler	0	0	0
	3. Usul ke Presiden	902	785	0
2.	Perpindahan			
	1. Antar SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim	86	90	77
	2. Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur	556	571	527
	3. Antar Provinsi (usulan)	419	560	323
	4. Mutasi masuk menjadi PNSD Prov. Jatim	120	171	124
3.	Pemberhentian Pensiun			
	PNSD Provinsi Jawa Timur			
	1. Mencapai BUP (usulan)	1.257	1.176	122
	2. Meninggal Dunia (usulan)	121	72	109
	3. Atas Permintaan Sendiri	8	7	26
	4. Usulan ke Presiden	14	57	33
	PNSD Kabupaten/Kota			
	1. Atas Permintaan Sendiri	232	173	204
	2. Mencapai BUP/Atas Permintaan Sendiri (usulan)	866	385	0
4.	Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD	462	27	558
5.	Penerbitan Karpeg (usulan)	462	27	80
6.	Pengangkatan dalam jabatan:			
	1. Fungsional Tertentu	782	1.131	845
	2. Struktural	582	262	666
	3. Konsultasi Jabatan eselon II (Kab/Kota)	75	501	264
	4. Konsultasi pengangkatan Sekda/Sekkota	7	9	6
	5. Alih jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu	124	103	55
7.	Penetapan angka kredit	79	171	231

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Pemecahannya

Permasalahan

- Pelaksanaan penataan dan pendistribusian pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan di masing-masing SKPD.
- Belum semua PNS ditetapkan dalam jabatan fungsional umum yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Timur atau pejabat yang berwenang;
- Adanya keterlambatan pengiriman usulan kenaikan pangkat khususnya pangkat golongan ruang (IV/c) ke atas yang disebabkan tidak lengkapnya persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Banyaknya PNSD dalam jabatan fungsional tertentu yang pensiun

Upaya Pemecahan Masalah

- Perbaikan berkelanjutan penerapan sistem dan prosedur pelayanan dan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian
- Perlu adanya penetapan batas waktu pengusulan, dan sosialisasi persyaratan untuk kenaikan pangkat yang menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) khususnya pertimbangan teknis kenaikan pangkat;
- Perlu adanya usulan standar baku penilaian kinerja bagi PNS dalam menentukan Sasaran Kerja PNS (SKP) bagi pejabat struktural dan PNS. Namun hal ini sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PNS.
- Alih jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu yang disertai dengan diklat jabatan fungsional tertentu.

4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran ini sebesar Rp 2.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.851.635.700,00 rupiah atau 92,58%. pagu dan realisasi

anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20.22.12
Data hasil kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi Kepegawaian

No	URAIAN	2013	2014	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan sistem informasi kepegawaian			
	1. Aplikasi layanan front desk	0	0	Paket
	2. Pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis web	1	1	Paket
	3. Updating data PNSD di lingkungan Pemprov. Jawa Timur	20.314	20.809	PNSD
2.	Penyajian data pegawai			
	1. Batas Usia Pensiun	1	1	Buku/dokumen
	2. Kenaikan Pangkat	1	1	Buku/dokumen
	3. DUK	1	1	Buku/dokumen
	4. Profil Kepegawaian Dalam Angka	1	1	Buku/dokumen
3.	Validasi dan sinkronisasi data PNSD	20.314	20.809	PNSD

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

Tabel 4.20.22.13
Data Pertumbuhan PNS 2009-2014 Pemerintah
Provinsi Jawa Timur

TAHUN	GOL I	PERTUM-BUHAN	GOL II	PERTUM-BUHAN	GOL III	PERTUM-BUHAN	GOL IV	PERTUM-BUHAN	TOTAL	PERTUM-BUHAN
2009	1.142	-	7.728	-	12.736	-	1.765	-	21,065	-
2010	1.059	-7,26	7.861	1,72	12.356	-2,98	1,954	10,71	23,230	10,27
2011	990	-6,52	7.379	-6,13	11.956	-3,24	2.100	7,47	22,425	-3,47
2012	755	-23,74	7.089	-3,93	11,078	-7,34	2,170	3,33	21,092	-5,94
2013	669	-11,39	6.906	-2,58	10,490	-5,31	2,249	3,64	20,314	-3,69
2014	582	-13,00	6.908	0,02	10.760	2,57	2.438	8,40	20.809	1,84

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim, Desember 2014

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pertumbuhan pegawai golongan I pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 13% atau 582 orang. Untuk golongan II meningkat 0,02% atau 6.908, golongan III meningkat 2,57% atau 10.760. sedangkan untuk golongan IV tingkat pertumbuhannya paling tinggi yaitu 8,40% atau 2.438 PNS.

Tabel 4.20.22.14
Data Distribusi PNS menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2014

DISTRIBUSI JUMLAH PNS MENURUT KELOMPOK JENIS JABATAN DAN JENIS KELAMIN 2014						
Satuan Kerja/Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Timur						
NO	JABATAN	PRIA	PERSEN (%)	WANITA	PERSEN(%)	JUMLAH
	FUNGSIONAL UMUM					
	Golongan IV	199	0,96	179	0,87	378
	Golongan III	4098	19,83	2947	14,26	7045
	Golongan II	4405	21,32	1650	7,99	6055
	Golongan I	502	2,43	72	0,35	574
	FUNGSIONAL TERTENTU					
	Ahli Utama	27	0,13	16	0,08	43
	Ahli Madya	349	1,69	221	1,07	570
	Ahli Muda	368	1,78	269	1,30	637
	Ahli Pertama	97	0,47	117	0,57	214
	Penyelia	486	2,35	495	2,40	981
	Pelaksana Lanjutan/Mahir	434	2,10	478	2,31	912
	Pelaksana / Terampil	316	1,53	616	2,98	932
	Pemula	11	0,05	8	0,04	19
	Lain-lain	151	0,73	225	1,09	376
	STRUKTURAL					
	Eselon I	1	0,00	0	0,00	1
	Eselon II	68	0,33	11	0,05	79
	Eselon III	372	1,80	131	0,63	503
	Eselon IV	895	4,33	449	2,17	1344
	JUMLAH PEGAWAI	12779	61,84	7884	38,16	20663

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Database belum diberdayakan sebagai bahan analisis, informasi maupun proses dalam pembuatan keputusan manajemen pegawai negeri sipil

- Pengolahan data belum seluruhnya terintegrasi secara online dengan SKPD dan Kabupaten/Kota
- Petugas pengelola data sudah terlalu lama menangani;

Upaya Pemecahan Masalah:

- Menyusun penyempurnaan regulasi mekanisme laporan peremajaan data kepegawaian;
- Membuat aplikasi online data kepegawaian yang mengintegrasikan data seluruh SKPD dan Kabupaten/Kota;
- Peningkatan kualitas sistem dan pelayanan informasi kepegawaian berbasis web;
- Penyebaran petugas pengolah data kepegawaian.

20.23. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan program-program sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan Diklat

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Pengembangan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan Diklat total dana sebesar Rp. 16.398.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.663.873.675,00 atau sebesar (71,13%) pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Program Pengembangan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan Diklat terdiri dari kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat, Evaluasi Pasca Diklat dan Pemeliharaan ISO 9001 : 2008. Adapun sasaran kegiatan adalah untuk mengetahui data kualitas penyelenggaraan diklat, data perkembangan hasil belajar peserta diklat serta dampak diklat terhadap alumni.

1. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Data laporan Evaluasi penyelenggaraan diklat diperoleh peserta Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Pim. Tk. III dan IV. Adapun respon peserta terhadap indikator evaluasi penyelenggaraan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20.23.1
Respon Peserta Terhadap Penyelenggaraan Diklat

No	Indikator	Kriteria	Tahun (dalam %)		
			2012	2013	2014
1	Kesesuaian diklat dengan harapan peserta	a. Sangat sesuai	51,18	53,55	52,60
		b. Cukup sesuai	43,93	39,41	43,70
2	Waktu pelaksanaan	a. Sangat Cukup	31,31	38,60	31,80

No	Indikator	Kriteria	Tahun (dalam %)		
			2012	2013	2014
	diklat	b. Cukup	51,00	42,37	29,80
3	Penyelenggaraan	a. Sangat baik	29,83	36,17	31,80
		b. Cukup baik	60,23	54,87	60,10
4	Dukungan terhadap tugas peserta	a. Sangat mendukung	60,86	65,46	60,10
		b. Cukup mendukung	32,54	29,75	36,40
5	Manfaat bagi peserta	a. Sangat bermanfaat	45,84	69,16	51,80
		b. Cukup bermanfaat	29,55	26,12	46,50
6	Persentase materi yang dapat diserap peserta	a. 100%	9,52	10,56	19,00
		b. 75%	56,34	67,84	73,25
		c. 50%	16,64	14,75	7,13

Sumber : Badan Diklat Prov. Jatim

Dari data di atas, menunjukkan bahwa lebih dari 50 % peserta yang mengikuti diklat, menyatakan bahwa diklat yang diikuti adalah sesuai dengan harapan baik dari segi materi maupun kecukupan durasi penyelenggaraan, serta mendukung terhadap tugas peserta.

2. Evaluasi Pasca Diklat

Evaluasi Pasca Diklat diperoleh dari data dampak diklat terhadap alumni diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional mulai tahun 2012 – 2014, sebagai berikut:

Tabel 4.20.23.2
Evaluasi Pasca Diklat Terhadap Alumni

NO	INDIKATOR	RESPON ALUMNI	TAHUN (dalam %)		
			2012	2013	2014
1.	Penerapan materi diklat dalam tugas alumni	Yang menyatakan DITERAPKAN	81,00	84,00	92,00
2.	Dampak diklat terhadap peningkatan kinerja alumni	Yang menyatakan BERDAMPAK secara individual	87,50	78,33	91,00
3.	Dampak diklat terhadap kinerja instansi asal alumni	Yang menyatakan BERDAMPAK secara institusional	73,50	78,00	78,50

Sumber : Badan Diklat Prov. Jatim

Dari data evaluasi pasca diklat tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2012 peserta yang menyatakan menerapkan materi yang diperoleh pada waktu diklat sebesar 81 % mengalami peningkatan menjadi 84 % di tahun 2013 dan meningkat menjadi 92 % di tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa materi yang diperoleh selama mengikuti diklat dapat diterapkan dalam menjalankan tugas, sedangkan dampaknya secara individual pada tahun 2012 sebesar 87,50 %, dan turun menjadi 78,33 % di tahun 2013, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2014 menjadi 91 %. Secara institusional dampak diklat terhadap kinerja instansi asal alumni pada tahun 2012 adalah sebesar 73,50 % dan meningkat menjadi 78 % di tahun 2013, naik menjadi 78,15 % di tahun 2014. Peningkatan ini menunjukkan bahwa keikutsertaan peserta dari instansi untuk mengikuti diklat, berdampak terhadap kinerja instansi.

3. Evaluasi Perkembangan Hasil Belajar

Laporan Perkembangan Hasil Belajar (*Pre-Test dan Post Test*) dari masing-masing jenis diklat ditunjukkan dengan data rata-rata perkembangan hasil belajar sebagai berikut :

Tabel 4.20.23.3
Perkembangan Hasil Belajar Peserta Diklat

Jenis Diklat	Tahun (dalam %)		
	2012	2013	2014
1. Teknis	26,82	37,82	40,76
2. Fungsional	29,82	37,95	31,44
3. Kepemimpinan	51,29	51,57	68,67
Rata-rata	40,55	42,45	46,96

Sumber : Badan Diklat Prov. Jatim

Dari data perkembangan hasil belajar tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2012 perkembangan belajar sebesar 40,55% mengalami peningkatan menjadi 42,45 % di tahun 2013 hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan diklat melalui metode joyfull learning peserta dapat menyerap materi dengan baik dan dengan adanya diklat pola baru di tahun 2014 perkembangan belajar meningkat menjadi 46,96 %.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Belum terstandarnya pelaksanaan diklat aparatur yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga terjadi kesenjangan kualitas penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota
- Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur menyelenggarakan semua tahapan dalam siklus diklat secara konsisten, terutama tahapan pra diklat berupa analisa kebutuhan diklat dan pasca diklat berupa evaluasi dampak diklat

Pemecahan Masalah

- Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar level pemerintahan melalui sistem yang terpadu mengenai berbagai hal tentang kediklatan, khususnya hal-hal yang menjadi isu strategis dan fokus peningkatan SDM aparatur;
- Meningkatkan kapasitas evaluasi diklat yang dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui kualitas peserta, efektifitas proses, manfaat dan dampak pelatihan bagi organisasi dan individu.

d) Penghargaan yang diterima pada Tahun 2014

Sertifikat Pengakuan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008/SNI ISO-9001: 2008 dari Indah Karya *Register Certification Services (IKRCS)* sejak 14 September 2005, dengan nomor sertifikat 3705031, dan telah dilakukan kegiatan pemeliharaan secara berkala, melalui audit mutu external pada bulan Desember 2014.

20.24 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya daya dukung kepada DP KORPRI Provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan kualitas SDM anggota KORPRI Provinsi Jawa Timur

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program :

1) Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 149.277.000,00 atau sebesar 99% secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dimaksudkan sebagai suatu laporan atas pelaksanaan program-program kegiatan yang disesuaikan dengan visi , misi , tujuan dan sasaran, sehingga dari hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dapat digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur pada tahun berikutnya.

c) Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Sulitnya mendapatkan data kegiatan dari dewan pengurus KORPRI kabupaten/Kota karena factor belum terbentuknya kelembagaan secretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota

Pemecahan Masalah

- Perlu dibentuk secretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota untuk memudahkan koordinasi dalam hal pengumpulan data kegiatan.

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 167.514.400,00 atau sebesar 83,76% secara rinci masing-

masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Sosialisasi dibidang peraturan perundang-undangan , yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum dan konstitusi bagi anggota KORPRI di Jawa Timur, disamping itu melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI juga berupaya memberikan fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota KORPRI yang tersangkut masalah hukum dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pada tahun 2014 pendampingan yang dilakukan oleh LKBH bagi anggota KORPRI yang terkena masalah hukum sebanyak 6 kasus dan berlanjut hingga tahun 2015.

c) Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Masih rendahnya anggota KORPRI yang bermasalah hukum melaporkan ke LKBH Korpri Jawa Timur untuk diberikan bantuan hukum.

Pemecahan Masalah

- Meningkatkan jumlah anggota KORPRI yang bermasalah hukum yang melapor ke LKBH Korpri Provinsi Jawa Timur untuk diberikan bantuan hukum melalui sosialisasi dan Koordinasi.

3) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 10.350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.054.570.910,00 atau sebesar 87,48% secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Penguatan Kelembagaan KORPRI
Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota hingga tahun 2014 sudah terbentuk 12 Sekretariat yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan,

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Malang, Kota Probolinggo Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik atau sekitar 30 % dari jumlah 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur , untuk Dewan Pengurus KORPRI unit SKPD Provinsi pada tahun 2014 telah terbentuk sebanyak 41 Dewan Pengurus unit KORPRI SKPD atau telah tercapai 90% sedangkan sisanya 2 SKPD yang belum membentuk Dewan Pengurus KORPRI adalah BPKAD Provinsi Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

- Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur bahwa realisasi pembentukan (Dewan Pengurus KORPRI di Tingkat Kabupaten/Kota telah mencapai angka 98% pada kurun waktu 2010 – 2014 melalui pelaksanaan Musyawarah yang dilaksanakan oleh 36 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, sedangkan sisanya 2 Kabupaten/Kota yaitu Kab. Pamekasan dan Kab. Jember belum membentuk Dewan Pengurus KORPRI).
- Penilaian Profesional Award
- Merupakan kegiatan penganugerahan penghargaan dalam bidang kinerja dan profesionalisme kelembagaan Dewan Pengurus KORPRI Unit SKPD dan kinerja kelembagaan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Peserta terdiri dari 32 unit SKPD Provinsi dari 47 Unit SKPD dengan aspek yang dinilai meliputi :
 - a. Aspek kelembagaan dan kinerja KORPRI Unit kerja SKPD
 - b. Aspek Program/kegiatan KORPRI Unit kerja SKPD
 - c. Aspek kebijakan, kelembagaan dan kinerja SKPD
- Sedangkan pemenang lomba Profesional Award KORPRI tahun 2014 untuk 3 aspek diatas adalah :
 - 1. Juara I RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang
 - 2. Juara II RSUD Dr. Soedono Madiun
 - 3. Juara III RSU Haji Surabaya

4. Harapan I Dinas Koperasi dan UMKM

5. Harapan II Dinas Kesehatan

– Peningkatan kualitas kinerja KORPRI

Dalam upaya mewujudkan aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kreatif dan profesional telah diselenggarakan Rapat Peningkatan Kualitas Kinerja KORPRI khususnya bagi anggota KORPRI Unit SKPD Provinsi dan anggota KORPRI Kabupaten/ Kota, rapat diikuti oleh 120 peserta dengan harapan agar pembinaan anggota KORPRI yang telah dilaksanakan dapat diarahkan pada terbangunnya kreatifitas dan pola pikir yang demokratis , professional dan produktif

– Untuk kegiatan kesejahteraan jasmani bagi anggota KORPRI seperti penyelenggaraan Pekan Olah Raga dan Seni Daerah (PORSENIDA) KORPRI , gerak jalan sehat dalam rangka HUT KORPRI yang diikuti oleh 2.300 peserta, disamping itu adanya kegiatan untuk peningkatan daya apresiasi dan kreasi seni aparatur, seperti penyelenggaraan lomba karaoke, lomba paduan suara dan pagelaran atraksi seni Anggota KORPRI hingga memperoleh beberapa penghargaan dibidang olah raga dan seni

– Untuk Pembinaan Anggota KORPRI, dilaksanakan dengan penyelenggaraan MTQ KORPRI tingkat Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 276 peserta dari SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jenis lomba meliputi :

1. Tilawah Putra dan Putri
2. Khath Al Qur'an Putra dan Putri
3. Syarh Al Qur'an Putri
4. Tartil dan Putra dan Putri
5. Hifdz Al Qur'an Putra dan Putri

– Lomba MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur ini menghasilkan 17 juara yang terdiri dari :

1. Tilawah
 - Tilawah putra :

- a. Juara I dari Kab. Banyuwangi
- b. Juara II dari UINSA Kota Surabaya
- c. Juara III dari Kab. Sumenep

➤ Tilawah putri :

- a. Juara I dari Kota Surabaya
- b. Juara II dari Kab. Magetan
- c. Juara III dari Kab. Jombang

2. Khath Al Qur'an

➤ Khath Al Qur'an putra :

- a. Juara I dari Kab. Lamongan
- b. Juara II dari Kab. Lumajang
- c. Juara III dari Kab. Sidoarjo

➤ Kahth Al Qur'an putri :

- a. Juara I dari Kab. Pasuruan
- b. Juara II dari Kab. Sidoarjo
- c. Juara III dari Kab. Bondowoso

3. Syarh Al Qur'an

➤ Syarh Al Qur'an putri :

- a. Juara I dari Kab. Lamongan
- b. Juara II dari Kota Blitar
- c. Juara III dari Kab. Tuban

4. Tartil

➤ Tartil putra :

- a. Juara I dari Kab. Mojokerto
- b. Juara II dari Kab. Jombang
- c. Juara III dari Kab. Situbondo

➤ Tartil putri :

- a. Juara I dari Kota Surabaya
- b. Juara II dari Kab. Banyuwangi
- c. Juara III dari Kab. Nganjuk

6. Hifdz Al Qur'an

- Hifdz Al Qur'an putra :
 - a. Juara I dari Kab. Madiun
 - b. Juara II dari Kab. Gresik
 - c. Juara III dari Kab. Nganjuk
- Hifdz Al Qur'an putri :
 - a. Juara I dari Kab. Mojokerto
 - b. Juara II dari Kab. Ponorogo
 - c. Juara III dari Kab. Blitar

dilanjutkan dengan keikutsertaan Jawa Timur pada lomba MTQ KORPRI tingkat Nasional di Banda Aceh.

Adapun hasil yang diperoleh sebagai juara peringkat 7, yaitu :

1. Juara I Hifdz Al Qur'an
2. Juara Harapan I Syarh Al Qur'an putri
3. Juara Harapan II Tilawah putri
4. Juara Harapan III Tartil putra.

Selanjutnya dalam rangka memperingati HUT KORPRI yang ke 43 , salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Upacara bendera dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) 10 Nopember Surabaya yang diikuti oleh 420 peserta ziarah dari KORPRI unit SKPD Provinsi , kegiatan ziarah ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk penghormatan anggota KORPRI kepada jasa para Pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa sehingga patut diteladani oleh segenap anggota KORPRI dalam melaksanakan tugas kedinasan

Kegiatan lainnya adalah lomba cerdas cermat yang diikuti oleh 250 peserta anggota KORPRI dari 25 Unit SKPD Provinsi, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi segenap anggota KORPRI di bidang Pemerintahan dan administrasi

Kegiatan bakti sosial anggota KORPRI dilaksanakan dengan penyelenggaraan khitanan masal bagi keluarga anggota KORPRI dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Penguatan kelembagaan KORPRI Masih ada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI unit SKPD yang belum terbentuk.
 - Masih terbentuk (12 dari 38 Kabupaten/Kota)
- Penilaian Profesional Award
 - Masih rendahnya peserta Profesional Award (32 dari 47 unit SKPD Provinsi).
- MTQ KORPRI Tingkat Provinsi yang dilanjutkan MTQ KORPRI Tingkat Nasional di Provinsi Aceh. Masih rendahnya posisi kontingen KORPRI Provinsi Jawa Timur (Peringkat ke 7) ditingkat Nasional
- Lomba Cerdas Cermat
 - Masih rendahnya peserta KORPRI Unit SKPD Provinsi yang mengikuti lomba Cerdas Cermat (29 dari 47 KORPRI Umnit SKPD)

Pemecahan masalah

- Penguatan Kelembagaan KORPRI
 - Meningkatkan jumlah Sekretariat DP KORPRI Unit SKPD dan Kabupaten/Kota yang terbentuk melalui sosialisasi dan Koordinasi.
- Penilaian Profesional Award
 - Meningkatkan jumlah peserta Profesional Award Unit SKPD melalui sosialisasi dan koordinasi.
- MTQ KORPRI Provinsi Jawa Timu
 - Meningkatkan kualitas peserta lomba MTQ Provinsi Jawa Timur melalui pembinaan secara rutin.
- Lomba Cerdas Cermat
 - Meningkatkan jumlah peserta lomba Cerdas Cermat melalui sosialisasi dan koordinasi.

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

21.1. BADAN KETAHANAN PANGAN.

Pembangunan bidang Ketahanan Pangan ditujukan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya pengembangan usaha pangan
- 2) Meningkatnya penanganan percepatan pengembangan konsumsi pangan
- 3) Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi
- 4) Meningkatnya kelancaran distribusi pangan
- 5) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan
- 6) Meningkatnya pengembangan teknologi pangan.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program peningkatan kesejahteraan petani;

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Program sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.447.568.225,00 atau 96,50% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program).

Penurunan konsumsi beras merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan adanya Program Percepatan Penganekaragaman Pangan, kita dapat menurunkan konsumsi beras masyarakat Jawa Timur dan beralih ke umbi-umbian. Mengingat

potensi umbi-umbian di Jawa Timur cukup banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Pada tahun 2014 konsumsi beras mengalami penurunan 1,5 kg/kap/th atau sebesar 89,0 kg/kap/th dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 89,38 kg/kap/th, dan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 90,5 kg/kap/th sedangkan konsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan umbi lainnya cenderung mengalami peningkatan (Data diolah oleh BKP Jatim), seperti pada tabel 4.21.1.1 sebagai berikut :

Tabel 4.21.1.1
Perubahan konsumsi kelompok pangan padi-padian dan umbi-umbian di Jawa Timur tahun 2012-2014.

NO.	KELOMPOK/KOMODITAS	2012	2013	2014
1	Padi-padian			
	- Beras	90,5	89,38	89,0
	- Jagung	3,6	4,22	4,24
2	Umbi-umbian			
	- Ubi kayu	8,32	8,42	10,89
	- Ubi Jalar	1,2	1,54	1,89
	- Sagu	0,0	0,98	1,27
	- Kentang	0,03	0,03	0,04
	- Umbi lainnya	0,10	0,12	0,16

Sumber : Data Olahan BKP Jawa Timur.

Penyebab menurunnya konsumsi beras disebabkan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian dengan penggunaan teknologi tepat guna dan mensosialisasikan program diversifikasi pangan dan gizi sehingga masyarakat tidak bergantung pada jenis pangan pokok beras dan terigu. Dalam rangka meningkatkan apresiasi masyarakat terutama untuk pengusaha pangan olahan (UMKM) pangan lokal, guna menumbuhkan minat dan kecintaan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal dilakukan berbagai kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional telah disalurkan bantuan Hibah alat pengolahan pangan olahan sebanyak 60 paket dengan nilai per paket sebesar Rp. 6.000.000,-, dengan total Rp. 360.000.000,- setelah PAK ada perubahan 33 paket

dengan nilai Rp. 10.000.000,-/paket, menjadi Rp. 330.000.000,- secara keseluruhan anggaran menjadi Rp. 690.000.000,- untuk sasaran 93 Kelompok. Realisasi pelaksanaan bantuan hibah berupa mesin penepung, perajang ubi, mesin pamarut dan continuous sealer, telah di salurkan ke 33 Kelompok Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan tradisional, di 11 Kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo, Lamongan, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Ngawi, Jombang, Tuban, Bojonegoro dan Pasuruan masing-masing kelompok mendapatkan 1 paket, senilai Rp. 9.900.000,-, total bantuan hibah sebesar Rp. 326.700.000,- atau terealisasi 99 % dan fisik 100%.

- 2) Pelatihan Peningkatan Produk Pangan Olahan berbahan baku lokal . Sebagai penunjang kegiatan Hibah tersebut diatas, dilaksanakan pula Pelatihan Peningkatan Produk Pangan Olahan berbahan baku lokal dan Workshop pengembangan jaringan usaha pangan olahan berbahan baku lokal untuk meningkatkan kemampuan pengusaha pangan olahan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahannya serta memperluas jaringan usaha demi kelancaran usahanya.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

Permasalahan

- Produk-produk pangan olahan berbahan baku lokal kurang diminati masyarakat karena belum sepenuhnya tersentuh oleh teknologi modern seperti (pengemasan, pengolahan, standarisasi produk) serta sarana promosi.
- Lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, sosial, citra dan daya terima.
- Belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal.

- Semakin gencarnya promosi produk pangan siap saji yang sebagian besar berbahan baku tepung terigu di berbagai media baik televisi, radio, koran dll yang dapat mempengaruhi gaya hidup terutama anak-anak sekolah, sehingga pangan lokal kurang dikenal dan kurang diminati anak-anak.

Solusi terhadap permasalahan :

- Pengembangan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal yang mempunyai nilai gizi, ekonomi, sosial, citra dan daya terima sehingga dapat menarik minat masyarakat terhadap pangan lokal.
- Pemberian bantuan modal kerja atau kredit lunak bagi dunia usaha pengembangan aneka produk olahan pangan lokal.
- Sosialisasi pangan lokal kepada Siswa dan Guru SD/MI secara berjenjang dan berkesinambungan, bahwa masih banyak makanan pokok berasal dari bahan baku lokal selain beras.
- Berbagai gerakan kegiatan yang perlu ditingkatkan/digalakkan di masyarakat antara lain : Gerakan Kampanye, Sosialisasi dan kegiatan Terpadu (dari hulu sampai dengan Hilir), meliputi budidaya pangan lokal, penanganan pasca panen, pengolahan pangan lokal dan lainnya yang dapat menunjang pengembangan produksi pangan lokal.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran.

Pagu anggaran Program sebesar Rp. 47.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.162.836.490,00 atau 94,48% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program).

– Ketersediaan Pangan

Ketersediaan bahan pangan Jawa Timur Th. 2014 mengalami surplus secara keseluruhan. Beras surplus 3.903.952 ton, jagung surplus 4.982.146 ton, kedelai defisit 100.790 ton. Rincian

ketersediaan dan konsumsi pangan strategis disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.21.1.2
Ketersediaan dan konsumsi pangan strategis di Jatim
Tahun 2012 - 2014.

NO.	KOMODITAS/PANGAN		2012	2013	2014*)
1.	Beras	- Ketersediaan	7.291.033	7.199.536	7.354.546
		- Konsumsi	3.339.123	3.424.550	3.450.594
		- Surplus	3.951.910	3.774.986	3.903.952
		- Ketersediaan	5.568.307	5.096.065	5.121.143
2.	Jagung	- Konsumsi	139.905	137.948	138.997
		- Surplus	5.428.402	4.958.118	4.982.146
		- Ketersediaan	296.163	301.558	305.003
3.	Kedelai	- Konsumsi	472.522	402.730	405.793
		- Surplus	-176.359	-101.172	-100.790
		- Ketersediaan	196.514	191.495	185.186
4.	Kacang Tanah	- Konsumsi	15.075	50.964	51.352
		- Surplus	181.439	140.531	133.834
		- Ketersediaan	60.701	52.427	50.661
5.	Kacang Hijau	- Konsumsi	7.562	7.664	7.722
		- Surplus	53.139	44.763	42.939
		- Ketersediaan	4.070.625	3.452.350	3.178.266
6.	Ubi Kayu	- Konsumsi	550.239	417.675	420.851
		- Surplus	3.520.386	3.304.675	2.757.415
		- Ketersediaan	362.367	346.015	299.313
7.	Ubi Jalar	- Konsumsi	71.606	45.983	46.332
		- Surplus	290.761	300.033	252.980
		- Ketersediaan	351.433	333.082	234.015
8.	Daging	- Konsumsi	226.873	245.240	185.329
		- Surplus	124.560	87.842	48.686
		- Ketersediaan	301.785	323.221	275.683
9.	Telur	- Konsumsi	272.248	229.913	173.746
		- Surplus	29.537	93.308	101.937
		- Ketersediaan	479.224	396.995	593.250
10.	Susu	- Konsumsi	71.843	72.806	55.020
		- Surplus	407.381	324.190	538.230
		- Ketersediaan	1.257.824	1.321.928	1.386.776
11.	Ikan	- Konsumsi	631.464	674.411	679.540
		- Surplus	626.360	647.517	707.237
		- Ketersediaan	1.252.788	1.232.090	1.227.898
12.	Gula	- Konsumsi	385.684	392.384	395.368
		- Surplus	867.104	839.706	832.529
Jumlah Penduduk			37.812.200	38.363.200	38.610.200

Ketersediaan total energi untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 3.589 kkal/kap/hr atau 149,54% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan energi tahun 2014 didominasi oleh pangan nabati 97,06% sedangkan pangan hewani 10,56%. Apabila dibandingkan dengan AKE tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 1.189,25 kkal/kap/hr (49,54%).

Demikian juga total ketersediaan protein untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur sebesar 99,40 gram/kap/hari atau 148,36% dari Angka Kecukupan Protein (AKP) 63 gram/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan protein tahun 2014 masih didominasi oleh pangan nabati 99,40% sedangkan pangan hewani 10,56%. Apabila dibandingkan dengan AKP tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 0,69 gr/kap/hr (6,1%). Ketersediaan pangan penduduk untuk proporsi Nabati dan Hewani Jawa Timur tahun 2012–2014 seperti pada tabel 4.21.1.3 sebagai berikut :

Tabel 4.21.1.3
Ketersediaan Energi, Protein Penduduk Jawa Timur
Tahun 2012 – 2014.

No.	Uraian	Tahun 2012				2013				2014			
		Energi		Protein		Energi		Protein		Energi		Protein	
		Kkal/kap/hr	%	Gr/kap/hr	%	Kkal/kap/hr	%	Gr/kap/hr	%	Kkal/kap/hr	%	Gr/kap/hr	%
1	Proporsi Nabati	4,397,98	96,54	113,63	86,73	6.544	98,10	145,22	92,64	3.478	97,06	99,40	88,75
2	Proporsi Hewani	3,46	3,46	17,39	13,27	127	1,90	11,54	7,36	111	2,94	10,56	11,25
	Total	4.555,75	100	131,02	100	6.671	100	156,76	100	3.589	100	99,40	100

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

Sedangkan untuk Konsumsi energi penduduk Jawa Timur Tahun 2013 sebesar 1.847 Kka/Kap/hari atau mencapai 92% dari anjuran AKE berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.000 Kkal/kap/hr. Perhitungan secara perwilayahan menunjukkan bahwa wilayah perkotaan konsumsi

energi sebesar 1832 Kkal/kap/hr, sedangkan untuk pedesaan konsumsi energi mencapai 1.858 Kkal/kap/hr, ini artinya bahwa konsumsi energi masih terarah ke karbohidrat. Berbeda dengan konsumsi protein, tahun 2013 mencapai 52,9 Gram/kap/hr atau 102% dari Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan sebesar 52 Gram/kap/hr. Perhitungan secara perwilayahan menunjukkan bahwa perkotaan konsumsi protein mencapai 53,7 gram/kap/hr atau 103% sedangkan pedesaan mencapai 52,2 gram/kap/hr atau 100,4% dari Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan.

Tingkat konsumsi dan kualitas pangan tahun 2014 ditunjukkan oleh keragaman konsumsi pangan penduduk yang dianalisis melalui pendekatan perhitungan Pola Pangan Harapan (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dicerminkan dengan nilai skor PPH ideal 100 yang diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2025.

Skor PPH Jawa Timur mencapai 81,6 pada tahun 2014, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 80,5 atau lebih tinggi 1,1%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk mengoptimalkan dan mengumandakan Panganku Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk Percepatan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan.

Tabel 4.21.1.4
Rata-Rata Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Penduduk
Jawa Timur Tahun 2013 – 2014.

No.	Kelompok Pangan	Wilayah Perkotaan			Wilayah Perdesaan		
		Gr/Kap/ Hr	Energi (KKal)	% AKE	Gr/Kap/ Hr	Energi (KKal)	% AKE
1.	Padi-padian	269.4	1070.4	53.5	296.5	1156.6	57.8
2.	Umbi-umbian	23.8	26.0	1.3	32.2	36.0	1.8
3.	Pangan Hewani	85.4	160.0	8.0	64.9	103.9	5.2
4.	Lemak & Minyak	24.3	218.2	11.0	23.2	208.6	10.4

No.	Kelompok Pangan	Wilayah Perkotaan			Wilayah Perdesaan		
		Gr/Kap/ Hr	Energi (KKal)	% AKE	Gr/Kap/ Hr	Energi (KKal)	% AKE
5.	Buah/Biji Minyak	6.9	38.3	2.0	9.0	49.6	2.5
6.	Kacang-kacangan	33.2	84.1	4.2	31.6	81.4	4.1
7.	Gula	27.4	100.0	5.0	27.0	98.5	5.0
8.	Sayur & Buah	241.5	97.0	5.0	216.1	85.6	4.3
9.	Lainnya	63.7	38.0	1.9	52.4	37.9	1.9
	Jumlah	-	1.832	92	-	1858	93

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

Dari hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa ketersediaan untuk dikonsumsi penduduk sebagai berikut :

1. Energi sebesar 3.589 kkal/kapita/hari, terdiri dari :
 - Nabati sebesar 3.478 kkal/kapita/hari
 - Hewani sebesar 111 kkal/kapita/hari
2. Protein sebesar 99,40 gram/kapita/hari, terdiri dari :
 - Nabati sebesar 88,38 gram/kapita/hari
 - Hewani sebesar 10,56 gram/kapita/hari
3. Lemak sebesar 84,27 gram/kapita/hari, terdiri dari :
 - Nabati sebesar 77,45 gram/kapita/hari
 - Hewani sebesar 6,82 gram/kapita/hari

Keragaman ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2014 skor Pola Pangan Harapan yang dicapai sebesar 85,4. Dari kelompok pangan yang sudah mencapai target pada kelompok padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacanga, buah dan biji berminyak, gula sayur dan buah – buahan sudah berlebih, sedang yang belum mencapai target adalah pada kelompok pangan hewani sehingga perlu ada peningkatan.

1) CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung

penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.

Pentingnya pengembangan cadangan pangan disebabkan beberapa hal sebagai berikut: (a) masih adanya penduduk miskin dan rawan pangan, (b) situasi iklim saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat yang telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan; (c) masa panen dan tidak panen yang mencolok mengharuskan adanya cadangan pangan, untuk mengatasi distribusi pangan antar waktu; (d) cadangan pangan dapat dijadikan instrumen untuk stabilisasi harga khususnya untuk mengatasi pola pangan musiman, serta mengantisipasi goncangan dari pasar; dan (e) banyaknya kejadian darurat sehingga memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah.

Upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat perlu dilakukan pengembangan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengembangan ini akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap cadangan pangan pemerintah pusat.

Tujuan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah rumah tangga miskin/atau rawan pangan yang mengalami :

1. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat;
2. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari Harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu;
3. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Memahami pentingnya cadangan pangan, pemerintah mengatur hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pengembangan cadangan pangan pemerintah di daerah mengacu kepada Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa cadangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah provinsi. Sedangkan Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa penyaluran cadangan pemerintah dilakukan untuk

menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau menghadapi keadaan darurat.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi juga didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Standar Pelayanan Minimum tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras.

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1.500.000.000,-.

Harga beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Rp. 8.047,69 per kg af gudang Bulog (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 94/PMK-02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), sehingga realisasi sebesar $186.375 \text{ kg} \times \text{Rp. } 8.047,69 = \text{Rp. } 1.499.888.224,-$. Pada Tahun 2014 ini Tidak terpenuhinya penyediaan sebagaimana tersebut dalam SPM bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras ini dikarenakan ada kenaikan harga beras.

2) PEMANTAPAN KETERSEDIAAN PANGAN DITINGKAT RUMAH TANGGA,

Pagu kegiatan sebesar Rp. 4.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.177.774.685,- atau 99,47% dan fisik mencapai 100%.

Permasalahan pangan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan kompleks, perkembangan lingkungan yang global, seperti global climate change, meningkatnya harga minyak dunia, telah mendorong kompetisi penggunaan hasil petanian untuk pangan (food), bahan energy (fuel) dan pakan ternak (feed) yang semakin tajam, disamping itu terjadi pengabaian terhadap good agricultural practices dan sumber pangan lokal (biodiversitif) dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan regional maupun nasional.

Salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor dapat dilakukan dengan pengembangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu. Sumber karbohidrat non beras dan non terigu ini mempunyai potensi dikembangkan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap import dengan memanfaatkan umbi-umbian.

Pengembangan umbi-umbian diyakini dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi beberapa masalah pokok seperti :

- a. Potensi sumberdaya lahan produktif dan sumberdaya air semakin menurun.
- b. Konsumsi beras terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.
- c. Import gandum terus meningkat.

Untuk mengatasi hal tersebut tentunya kita harus mengembangkan kembali bahan pangan sumber karbohidrat yang sudah lama dikenal oleh masyarakat kita utamanya umbi-umbian.

- a. Hasil kegiatan
 - Tumbuh dan berkembangnya tanaman umbi-umbian di setiap desa/kelurahan lokasi
 - Meningkatnya aktifitas seluruh masyarakat desa dalam mengelola umbi-umbian mulai dari Tim Penggerak PKK

Desa, Aparat Desa maupun lembaga masyarakat yang ada di desa.

- Tumbuh dan berkembangnya unit-unit usaha pangan olahan berbasis umbi-umbian
- Meningkatnya minat masyarakat untuk mengembangkan tanaman umbi-umbian
- Meningkatnya minat dan kesukaan masyarakat mengkonsumsi umbi-umbian

Persyaratan untuk calon lokasi Pengembangan Ketersediaan Pangan Berbasis Non Beras (Umbi-Umbian) Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Desa yang berada di wilayah dengan agroekosistem kering.
- Penduduk miskinnya relatif tinggi dibandingkan desa-desa disekitarnya dalam satu kecamatan.
- Mempunyai lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan (lahan pekarangan, lahan sekitar rumah, lahan dibawah tegakan pohon, lahan kritis maupun lahan lain milik desa)
- Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahannya aktif.

Tabel 4.21.1.5
Lokasi Pengembangan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-Umbian di 29 Kabupaten Tahun 2014

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	Pacitan	Tulakan	Ngumbul, Wonosidi, Bungur
2	Ponorogo	Sooko	Ngadirojo, Sooko, Jurug
3	Magetan	Poncol	Plangkronan, Cileng, Sombo
4	Ngawi	Jogorogo	Jogorogo, Brubuh, Jaten
5	Trenggalek	Suruh	Suruh, Puru, Wonokerto
6	Tulungagung	Kalidawir	Kalidawir, Sukorejo, Karangtalun
7	Blitar	Wlingi	Tembalang, Ngadirenggo, Tegalsari

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
8	Madiun	Pilangkenceng	Kenongrejo, Kedungmaron, Kedungrejo
9	Kediri	Mojo	Jugo, Tambibendo, Pamongan
10	Nganjuk	Sawahan	Margopanut, Sidorejo, Bareng
11	Jombang	Kudu	Tapen, Sidokaton, Kudubanjari
12	Bojonegoro	Trucuk	Pagerwesi, Sumbangtimun, Kanten
13	Tuban	Plumpang	Kedungsuko, Plandirejo, Sembungrejo
14	Lamongan	Ngimbang	Girik, Munungrejo, Purwokerto
15	Gresik	Kebomas	Kembangan, Kedayang, Daharejo
16	Bangkalan	Bangkalan	Kramat, Ujung Piring, Sembilangan
17	Sampang	Torjun	Torjun, Dulang, Pangogseyan
18	Pamekasan	Palengaan	Poto'an Laok, Palengaan Laok, Kacok
19	Sumenep	Batuan	Batuan, Gelugur, Torbang
20	Sidoarjo	Krian	Sidomulyo, Tempel, Watugolong
21	Mojokerto	Dawarblandong	Bangeran, Suru, Brayublandong
22	Malang	Tainan	Tajinan, Gunungronggo, Purwosekar
23	Pasuruan	Purwosari	Sekarmojo, Tejowangi, Pager
24	Probolinggo	Tiris	Randu Agung, Ranu Gedang, Jangkang
25	Lumajang	Senduro	Burno, Kandangan, Kandang Tepus
26	Jember	Wuluhan	Keselir, Tanjungrejo, Lojejer
27	Bondowoso	Grujugan	Dadapan, Dawuhan, Wonosari
28	Situbondo	Sumbermalang	Taman, Alas Tengah, Baderan
29	Banyuwangi	Glenmore	Tegalarjo, Sumbergondo, Bumiharjo

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

1) *Pengembangan lumbung pangan.*

Untuk memperkuat cadangan pangan di daerah perlu dilakukan pengisian lumbung pangan (pembelian gabah/beras/bahan pangan pokok strategis) sekaligus memfasilitasi dengan dana perguliran yang akan dikelola oleh masyarakat secara berkesinambungan. Lumbung Pangan sebagai cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan sekaligus untuk penyediaan depo logistik di tingkat desa. Untuk penyediaan cadangan pangan di masyarakat dalam mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi rawan pangan/keadaan darurat, karena situasi iklim anomali yang tidak menentu akhir-akhir ini.

Oleh karenanya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 telah memberikan bantuan isi lumbung pangan (pembelian gabah/beras/bahan pangan pokok strategis) sejumlah 100 unit lumbung pangan yang ada di 100 Desa di 29 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Malang, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Kota Batu).

Realisasi dari kegiatan ini adalah bantuan pembangunan fisik lumbung pada 100 kelompok lumbung yang di 29 Kabupaten/kota se Jawa Timur. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.873.451.824,- atau 95,78% dari anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

pembangunan fisik lumbung pangan sebanyak 347 unit lumbung, secara rinci dilihat pada

Tabel 4.21.1.6
Penerima Bantuan Hibah Pembangunan Fisik Lumbung
Pangan Tahun 2012 dan 2013 serta bantuan
pengisian Th. 2014 dari APBD Provinsi.

NO	KAB./NAMA KELOMPOK	JUMLAH UNIT LUMBUNG	2012	2013	2014
			PENGISIAN	FISIK LUMBUNG	PENGISIAN
1.	Kab. Jombang	5	100.000.000	-	-
2.	Kab. Madiun	7	100.000.000	100.000.000	40.000.000
3.	Kab. Ngawi	7	100.000.000	100.000.000	20.000.000
4.	Kab. Ponorogo	7	100.000.000	100.000.000	40.000.000
5.	Kab. Tulungagung	7	100.000.000	100.000.000	40.000.000
6.	Kab. Blitar	7	100.000.000	100.000.000	40.000.000
7.	Kab. Lamongan	7	100.000.000	100.000.000	40.000.000
8.	Kab. Bojonegoro	10	100.000.000	250.000.000	100.000.000
9.	Kab. Pasuruan	6	100.000.000	50.000.000	20.000.000
10.	Kab. Lumajang	7	100.000.000	100.000.000	40.000.000
11.	Kab. Bondowoso	8	100.000.000	150.000.000	60.000.000
12.	Kab. Situbondo	7	100.000.000	100.000.000	40.000.000
13.	Kab. Sidoarjo	3	-	150.000.000	60.000.000
14.	Kab. Gresik	5	-	250.000.000	100.000.000
15.	Kab. Mojokerto	4	-	200.000.000	80.000.000
16.	Kab. Tuban	5	-	250.000.000	100.000.000
17.	Kab. Nganjuk	5	-	250.000.000	100.000.000
18.	Kab. Kediri	4	-	200.000.000	80.000.000
19.	Kab. Trenggalek	5	250.000.000	-	100.000.000
20.	Kab. Magetan	5	250.000.000	-	100.000.000
21.	Kab. Pacitan	4	200.000.000	-	80.000.000
22.	Kab. Malang	5	250.000.000	-	100.000.000
23.	Kab. Probolinggo	5	250.000.000	-	100.000.000
24.	Kab. Banyuwangi	4	200.000.000	-	80.000.000
25.	Kab. Jember	4	200.000.000	-	80.000.000
26.	Kab. Bangkalan	4	200.000.000	-	80.000.000
27.	Kab. Sampang	4	200.000.000	-	80.000.000
28.	Kab. Pamekasan	4	200.000.000	-	80.000.000
29.	Kab. Sumenep	4	200.000.000	-	80.000.000
30.	Kota Batu	1	50.000.000	-	20.000.000
J U M L A H		162	3.000.000.000		2.000.000.000

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

2) Pembelian Gabah/Bahan Pangan lainnya.

a. Dana bergulir

Fluktuasi harga antar musim dalam sistem agribisnis pangan seringkali tidak menguntungkan bagi petani selaku produsen. Petani tidak dapat

menikmati harga yang layak pada saat panen raya, karena harga jualnya turun akibat melimpahnya barang dipasaran. Sedangkan pada musim paceklik, petani ikut kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya karena kepemilikan lahan pertanian yang kecil (rata-rata kurang dari 0,25 Ha) serta terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan penyimpanan hasil produksinya.

Melalui kegiatan Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya ini, LPG diwajibkan melakukan pembelian gabah secara langsung dari petani/kelompok tani (Poktan)/gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan mengacu HPP sesuai Inpres nomor 3 Tahun 2012. Sedangkan diluar panen raya padi, LPG dapat memanfaatkan dana tersebut untuk membeli bahan pangan lain (jagung dan kedele) dengan harga yang layak bagi petani sehingga petani (produsen) dapat memperoleh pendapatan usahanya lebih banyak.

- *Alokasi Kredit Dagulir*

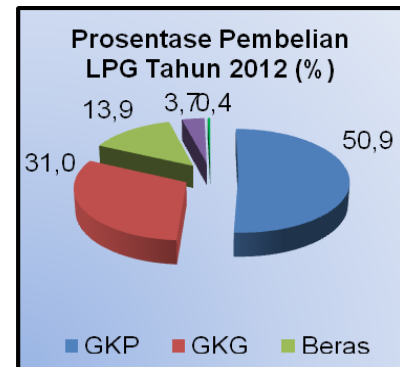
Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya merupakan salah satu kegiatan Provinsi Jawa Timur yang bersifat komplementer (saling melengkapi) dengan kegiatan lainnya, seperti Dagulir : Sistem Tunda Jual, Lumbung Pangan, Raskin dan Pemupukan Cadangan Pangan Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001. Pada awal pelaksanaan kegiatan ini hanya untuk pembelian komoditas gabah/beras, maka sejak tahun 2002 komoditasnya diperluas meliputi gabah/beras, jagung dan kedele.

Alokasi Dagulir Pembelian

Gabah/Pangan lainnya pada tahun 2013 – 2014 sebesar Rp. 26,55 Milyar yang digulirkan kepada 98 LPG tersebar di 16 Kabupaten sentra produksi (Tulungagung, Lamongan, Ngawi, Jombang, Bangkalan, Lumajang, Ponorogo, Madiun, Magetan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Malang, Sidoarjo).

▪ *Kinerja LPG Penyaluran Dagulir Tahun 2013*
Pembelian

Pada tahun 2013 telah digulirkan dana untuk kegiatan pembelian gabah/bahan pangan lainnya



sebesar Rp. 13,25 Milyar yang dialokasikan kepada 49 LPG di 7 kabupaten (Tulungagung, Lamongan, Ngawi, Jombang, Bangkalan, Lumajang, Bojonegoro).

Secara umum realisasi pembelian gabah/beras/ jagung/kedele oleh LPG tahun 2013 posisi sampai dengan Desember 2014 sebagai berikut :

1. Dari total nilai pembelian di tahun 2013, dapat dirinci pembelian oleh LPG berupa: 25.842 ton GKP; 15.740 ton GKG; 7.067 ton beras; 1.867 ton jagung dan 205 ton kedele.
2. Dilihat dari kualitas gabah yang dibeli oleh LPG, menunjukkan bahwa pembelian didominasi dalam bentuk gabah kering

panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG). Kondisi ini memberikan indikasi bahwa pada dasarnya kegiatan ini sudah bersentuhan langsung dengan petani/ Poktan/Gapoktan, yang biasanya menjual produksi usahanya dalam bentuk gabah, baik GKP ataupun GKG.

▪ *Kinerja LPG Penyaluran Dagulir Tahun 2014*

Pembelian

Pada tahun 2014 telah digulirkan dana sebesar Rp. 13,3 Milyar yang dialokasikan kepada 49 LPG di 11 kabupaten (Bangkalan, Lumajang, Madiun, Magetan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Malang, Sidoarjo). Penerima Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain tahun 2014 melakukan pembelian lebih kecil dibandingkan LPG penerima Dagulir tahun 2013. Pada tahun pertama pemanfaatan Dagulir telah melakukan pembelian sebesar Rp. 73.488.150.000,- (tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau berputar 5,53 kali.

Secara umum realisasi pembelian gabah/beras/ jagung/kedele oleh LPG tahun 2014 posisi sampai dengan bulan Desember 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dari nilai pembelian oleh LPG dapat dirinci sebagai berikut : 8.168 ton GKP; 2.727 ton GKG, 779 ton beras, 178,4 ton jagung dan 155 ton kedelai.

2. Pembelian terbesar yang dilakukan LPG masih dalam bentuk gabah baik GKP (49%) maupun

GKG (44%),

Beras

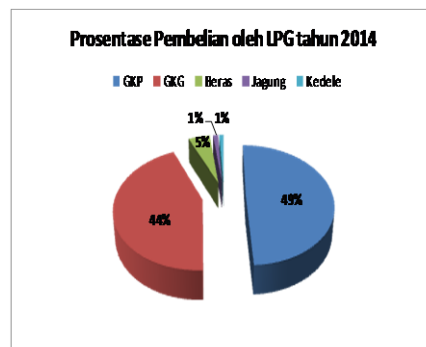
(5%),

Jagung dan

Kedelai

masing-

masing 1%. Hal ini menunjukkan semakin banyak gabah petani yang terserap oleh LPG melalui kegiatan ini, sehingga petani tidak merasa kesulitan dalam memasarkan hasil usaha taninya.



b. Hibah/bansos pada masyarakat

Untuk mendukung pelaksanaan gapoktan dalam melakukan usahanya pada tahun 2014 telah direalisasikan bantuan penguatan modal berupa gabah/beras sebanyak 16 paket yang disalurkan kepada 16 gapoktan yang tersebar di 13 Kabupaten sentra produksi, seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.21.1.7
Bantuan Penguatan Modal pada 16 Gapoktan di 13 Kabupaten

No.	Kabupaten/ Gapoktan	Alamat		Jml Paket
		Desa	Kecamatan	
1	Ngawi			
	Ngudi Rahayu	Kwadungan lor	Padas	1
2	Nganjuk			
	Sidoayem	Kerep	Loceret	1
3	Magetan			
	Sumber Mulyo	Sumbersawit	Sidorejo	1
4	Trenggalek			
	Agri Raya	Sawahan	Watulimo	1
5	Jombang			

No.	Kabupaten/ Gapoktan	Alamat		Jml Paket
		Desa	Kecamatan	
	Plandi	Plandi	Jombang	1
	Ploso genuk	Ploso genuk	Perak	1
6	Lumajang			
	Bejo Makmur	Denok	Lumajang	1
	Yoso Adil	Yosowilangun Lor	Yosowilang un	1
7	Tulungagung			
	Guyub rukun	Penggirsari	Ngantru	1
8	Blitar			
	Marsudi Tani	Bajang	Talun	1
9	Malang			
	Margo Rukun	Karang duren	Pakisaji	1
10	Bondowoso			
	Darussolah	Jambesari	Jambesari	1
11	Pasuruan			
	Sumber rejeki	Siyar	Rembang	1
12	Lamongan			
	Pangestu	Kedungkumpul	Sarirejo	1
13	Ponorogo			
	Bekare Makmur	Bekare	Bungkal	1
	Sri Sedono	Ngadi	Mojo	1

Sumber : Data diolah BKP Jatim.

Selain itu, telah direalisasikan bantuan hibah alat berupa timbangan duduk dan mesin jahit karung sebanyak 31 paket yang disalurkan kepada 31 gapoktan yang tersebar di 23 Kabupaten sentra produksi yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.21.1.8
Bantuan Hibah Alat Timbangan duduk dan mesin jahit karung pada 31 Gapoktan di 23 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.

No.	Kabupaten/ Gapoktan	Alamat		Jml Paket
		Desa	Kecamatan	
1	Bangkalan			
	Al Wahidin	Manonggal	Klampis	1
	Rukun Maju	Pacentan	Tanah Merah	1
2	Banyuwangi			
	Tri Sakti	Suko Maju	Srono	1
	Tri Tunggal	Tambakrejo	Muncar	1
3	Blitar			
	Mekarsari	Gadungan	Gandusari	1

No.	Kabupaten/ Gapoktan	Alamat		Jml Paket
		Desa	Kecamatan	
4	Bojonegoro			
	Tani Rahayu	Kepoh	Kepoh baru	1
5	Bondowoso			
	Al-Barokah	Jebung lor	Tlogosari	1
6	Gresik			
	Dapet	Dapet	Balongpang gang	1
7	Jombang			
	Daditunggal	Daditunggal	Ploso	1
	Pojok kulon	Pojok kulon	Kesamben	1
8	Kediri			
	Manunggal Abadi	Tanon	Papar	1
	Tawang Jaya	Ketawang	Pumrwosari	1
9	Lamongan			
	Mitra Tani II	Kedungwaras	Modo	1
10	Lumajang			
	Mitra Bakti	Kloposawit	Candipuro	1
11	Madiun			
	Mojopurno	Mojopurno	Wungu	1
12	Magetan			
	Sumberurip	Sugihrejo	Kawedanan	1
13	Malang			
	Alamsari	Pamotan	Dampit	1
14	Mojokerto			
	Tani Makmur	Kuripansari	Pacet	1
	Tani Mulyo	Beloh	Trowulan	1
15	Nganjuk			
	Ibu Bumi	Candirejo	Loceret	1
16	Ngawi			
	Baroto	Kuniran	Sine	1
17	Pasuruan			
	Sinar Tani	Kebonwaris	Pandaan	1
18	Ponorogo			
	Manunggal	Karanggebang	Jetis	1
	Ngudi Makmur	Duri	Slahung	1
19	Probolinggo			
	Sidorukun	Alas tengah	Paiton	1
20	Sidoarjo			
	Sejahtera	Gedungrowo	Prambon	1
	Sidomakmur	Pilang	Wonoayu	1
21	Situbondo			
	Sumbermakmur	Langkap	Besuki	1
22	Trenggalek			
	Jaya Mulya	Suruh	Suruh	1

No.	Kabupaten/ Gapoktan	Alamat		Jml Paket
		Desa	Kecamatan	
	Sido Mekar	Jati	Karangan	1
23	Tulungagung			
	Dadi Mulyo	Sumberdadi	Sumbergem pol	1

Sumber : Data diolah BKP Jatim.

1) *Pengembangan Sistim Tunda Jual*

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan sistem tunda jual sesuai dengan kondisi wilayahnya, meningkatkan posisi tawar dan nilai jual hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani.

a. Dana Bergulir

Penyempurnaan Dana Bergulir terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2006 yang diganti menjadi Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 kemudian mengalami revisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 66 Tahun 2009 pada tanggal 4 Nopember 2009. Perubahan tersebut bertujuan untuk penyempurnaan Manajemen Keuangan Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007. Pada Tahun 2012 mengalami revisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

- *Penyaluran Dana*

Bantuan dana bergulir pengembangan kelompok tunda jual dilaksanakan mulai tahun 2004 – 2014.

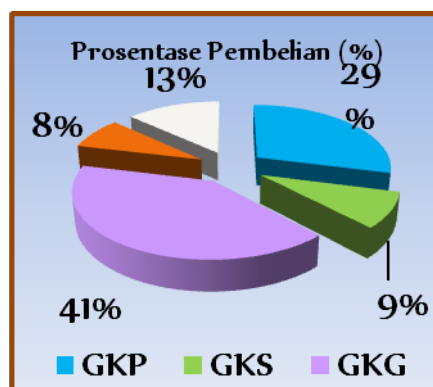
Dana penguatan modal kelembagaan kelompok sistem tunda jual pada tahun 2004 sampai dengan 2005 merupakan dana pinjaman lunak tanpa adanya jaminan yang pengelolaannya dibuat secara bergulir di kelompok, perguliran dana dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sehingga dalam waktu 1 (satu) tahun kelompok yang mendapatkan dana penguatan modal wajib mengembalikan dana tersebut ke rekening Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sesuai dengan penerapan Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2006 tentang pengelolaan dana bergulir maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan kelompok sistem tunda jual melalui penguatan modal ini harus mengacu pada perda tersebut dan dikategorikan dalam kegiatan sosial dengan penyaluran dana secara channeling. PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah bank pelaksana yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai penyalur (channeling) dan penerima pengembalian pinjaman dana bergulir peserta kegiatan penguatan modal kelembagaan sistem tunda jual. Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan modal kelembagaan kelompok tunda jual mulai tahun 2006 telah dikenakan

jasa/bunga selama 1 (satu) tahun sebesar 3% dan disetor secara bruto ke Kasda sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- *Alokasi dana tahun 2013*

Pada tahun 2013, alokasi dana yang digulirkan ke kelompok pengembangan system tunda jual sebesar Rp.



3,75 Milyar yang dialokasikan kepada 75 kelompok di 13 kabupaten sentra produksi (Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Malang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo).

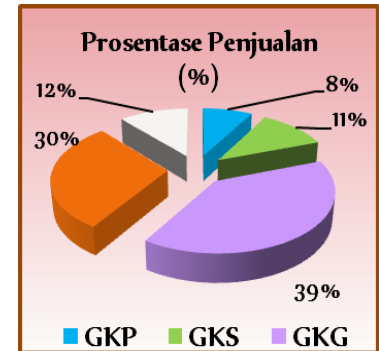
- *Pembelian*

Berdasarkan laporan yang masuk realisasi pembelian gabah/beras/ jagung/kedele oleh kelompok tunda jual sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 4.013.107.550,- dapat digambarkan sebagai berikut : 78,1 ton GKP; 399,7 ton GKG dan 76,9 ton beras dan 126,6 ton jagung .

- *Penjualan*

Total penjualan gabah/ beras/ jagung yang dilaksanakan oleh 75 kelompok tunda jual penerima dagulir tahun 2014 senilai Rp. 3.839.785.400,- dengan rincian penjualan : 63,3 ton GKP, 87,1 ton GKS, 303,6 ton GKG, 228,1 ton Beras dan 88 ton Jagung.

Penjualan
 terbesar yang
 dilaksanakan oleh
 kelompok dalam
 bentuk GKG sebesar
 39%, ini
 menunjukkan bahwa



kelompok tersebut hanya melakukan proses pengeringan dan penyimpanan belum melakukan proses selanjutnya yaitu mengolah dalam bentuk beras dan melakukan pengepakan. Hal ini karena terbatasnya sarana dan prasarana yang di miliki kelompok.

b. Bantuan hibah/bansos kepada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan gapoktan dalam melakukan usahanya pada tahun 2014 telah direalisasikan bantuan hibah berupa gabah/beras kepada gapoktan 4 paket yang disalurkan kepada 4 gapoktan yaitu :

- Gapoktan Sri Rejeki, Ds. Sidorejo, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi.
- Gapoktan Wringin Tani, Ds. Wringin Anom, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo.
- Gapoktan Karya Tani, Ds. Jolotundo, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto. Gapoktan Wahas, Ds. Wahas, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik.

3) *Peningkatan Akses Pangan Masyarakat*

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang

cukup dalam jumlah maupun kualitas sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan mengingat masih ada sebagian masyarakat tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagian besar petani bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala kecil bahkan sebagai buruh tani.

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan sesuai dengan Permentan 65 tahun 2010, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan.

Capaian informasi harga, pasokan dan akses pangan tahun 2014

Tabel 4.21.1.9
Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Distrbusi Pangan dan Akses Pangan berdasarkan Permentan 65 tahun 2010, untuk capaian informasi harga dan Akses Pangan Tahun 2014.

I J	1 = Harga			2 = Pasokan			3 = Akses		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1. Komoditas	8	8	100	13	13	100	13	13	100
2. Lokasi	17	17	100	18	18	100	17	17	100
3. Waktu (Minggu)	50	50	100	50	42	84	50	42	84
	100%			94,67%			94,67%		

I J	1 = Harga			2 = Pasokan			3 = Akses		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Capaian Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan	96,45%								

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian ketersediaan informasi harga sebesar 100 %, informasi pasokan sebesar 94,67 % dan informasi akses pangan sebesar 94,67 % sehingga rata-rata ketersediaan ketiga indikator tersebut mencapai 96,45 %.

Pada tahun 2014, pemantauan akses pangan strategis dilaksanakan mingguan yaitu 50 minggu, di 18 kabupaten (Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Lamongan, Kota Surabaya).

Tabel 4.21.1.10
Pemantauan akses pangan Strategis dalam mingguan di 18 Kabupaten Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur.

I J	1 = Akses		
	T	R	%
1. Komoditas	13	13	100
2. Lokasi	18	18	100
3. Waktu (Minggu)	50	42	84
Jumlah	284% / 3 = 94,67%		

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

Sedangkan komoditas yang dipantau ada 12 komoditas yaitu : beras (termurah, medium, premium), cabe merah keriting, jagung pipilan kering, minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir lokal, biji kedelai kering, daging sapi tingkat pemotong, tepung terigu.

– **Kewaspadaan (Kerawanan dan Keamanan Pangan)**

1) Penanganan Daerah Rawan Pangan.

Kerentanan terhadap kerawanan pangan mengacu pada suatu kondisi yang membuat suatu masyarakat yang beresiko rawan pangan menjadi rawan pangan. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh tingkat keterpaparan mereka terhadap faktor-faktor resiko/goncangan dan kemampuan mereka untuk mengatasi situasi tersebut baik dalam kondisi tertekan maupun tidak. Kerawanan pangan dapat bersifat kronis atau sementara/transien. Rawan pangan yang bersifat kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan untuk rawan pangan transien diperlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

Aplikasi Pelaksanaan Penanganan Daerah Rawan telah diwujudkan dalam upaya penurunan tingkat kerawanan pangan masyarakat di Jawa Timur. Salah satu ukuran yang banyak digunakan untuk akses pangan adalah kerawanan pangan masyarakat. Tingkat rawan pangan masyarakat di Jawa Timur khususnya penduduk rawan berat ($< 70\%$ AKG) terus mengalami penurunan, dan pada tahun 2009 sekitar 15.33 persen. Tingkat kerawanan pangan ini terus menurun sejalan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2013 jumlah masyarakat rawan pangan sebesar 13,25%, terjadi penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 2,08% dibandingkan tahun 2009 (15,33%). Pencapaian realisasi berkurangnya penduduk rawan pangan di Jawa Timur tahun 2014 ini merupakan salah satu perwujudan dari konsistensi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan, pengawalan dan pelaksanaan program kegiatan yang secara

langsung mempengaruhi pencapaian penurunan penduduk rawan pangan yang meliputi :

- a. Penguatan desa mandiri pangan tahap pengembangan, tahap kemandirian dan tahap inti di 60 desa dengan pemberian bantuan hibah alat olahan pangan.
- b. Penguatan Desa mandiri pangan tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian di 24 desa dengan pemberian bantuan hibah alat non olahan pangan.
- c. Penanganan daerah rawan pangan transien dengan pemberian bantuan sosial bahan pangan untuk 4 desa di kabupaten Blitar dan Kediri.
- d. Bantuan sosial bahan pangan untuk masyarakat miskin dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia sebanyak 1000 paket untuk 1000 orang pada 9 desa/kelurahan yang tersebar di Sidoarjo dan Surabaya.
- e. Bantuan Sosial bahan pangan untuk masyarakat miskin dalam rangka peringatan Hari Bakti Gotong Royong sebanyak 500 paket di 4 desa pada kabupaten Ngawi.

Capaian target pelaksanaan kegiatan sesuai renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2014. Penanganan daerah rawan pangan, mulai tahun 2009-2014 telah ditangani sebanyak 633 desa realisasi capaian 85,77% (target 738 desa). Dari hasil capaian kita sudah diatas capaian target SPM dimana sampai dengan tahun 2014 kita harus menangani daerah rawan pangan sebanyak 60% dari target 738 desa.

Permasalahan :

- Jumlah masyarakat rawan pangan (< 70% AKG) cukup besar sebanyak 13,25%
- Masih ditemui daerah rawan pangan di beberapa daerah terutama akibat dari bencana meletusnya gunung kelud

Upaya pemecahan masalah :

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka menangani daerah rawan pangan.
- Peningkatan jumlah penanganan daerah rawan pangan dengan memperluas cakupan desa rawan pangan dan perluasan program kegiatan.
- Mengoptimalkan peranan Dewan Ketahanan Pangan sampai dengan tingkat daerah.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2013 jumlah masyarakat rawan pangan sebesar 13,25%, terjadi penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 2,08% dibandingkan tahun 2009 (15,33%). Pencapaian realisasi berkurangnya penduduk rawan pangan di Jawa Timur tahun 2013 ini merupakan salah satu perwujudan dari konsistensi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan, pengawalan dan pelaksanaan program kegiatan yang secara langsung mempengaruhi pencapaian penurunan penduduk rawan pangan yang meliputi :

- a. Penguatan desa mandiri pangan tahap pengembangan, tahap kemandirian dan tahap inti di 60 desa dengan pemberian bantuan hibah alat olahan pangan.
- b. Penguatan Desa mandiri pangan tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian di 24 desa dengan pemberian bantuan hibah alat non olahan pangan.
- c. Penanganan daerah rawan pangan transien dengan pemberian bantuan sosial bahan pangan untuk 4 desa di kabupaten Blitar dan Kediri.
- d. Bantuan sosial bahan pangan untuk masyarakat miskin dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia sebanyak 1000 paket untuk 1000 orang pada 9 desa/kelurahan yang tersebar di Sidoarjo dan Surabaya.

- e. Bantuan Sosial bahan pangan untuk masyarakat miskin dalam rangka peringatan Hari Bakti Gotong Royong sebanyak 500 paket di 4 desa pada kabupaten Ngawi.

2) *Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Pariwisata Dan Bio Energi.*

Pelaksanaan kegiatan ini terealisasi Rp. 1.083,859.685,00 atau 98,53 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dan fisik mencapai 100%. sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.083.859.685,00 atau 98,53%. Adapun hasil capaiannya dari Target Desa Mandiri Pangan, Pariwisata dan Bio Energy sebanyak 50 desa, terealisasi 84 desa dan realisasi tahun 2013 sebanyak 74 desa jadi ada peningkatan 38%. Salahsatu penyebab kenaikan tersebut, terlaksannya kegiatan koordinasi lintas sektor, yaitu Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata, dimana masing-masing sektor telah memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa Mandiri Pangan Pariwisata dan Bio Energi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

3) *Pemberdayaan Kelompok Usaha Pangan di Wilayah Lahan Kering.*

Pemberdayaan kelompok usaha lahan kering dengan pemberian bantuan alat pengolahan pangan dan alat kemas pada 17 kelompok di 6 kabupaten (Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Trenggalek, Pacitan). Capaian target pelaksanaan kegiatan sesuai renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2014. Penanganan daerah rawan pangan, mulai tahun 2009-2014 telah ditangani sebanyak 633 desa realisasi capaian 85,77% (target 738

desa). Dari hasil capaian kita sudah diatas capaian target SPM dimana sampai dengan tahun 2014 kita harus menangani daerah rawan pangan sebanyak 60% dari target 738 desa.

4) *Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan,*

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu prosentase jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi ditingkat pedagang pengumpul dibanding jumlah total sample pangan yang diambil dipedagang pengumpul, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.21.1.11
Prosentase Perbandingan sample pangan yang aman dikonsumsi di Tingkat Pedagang pengumpul dengan total sampel.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPIAN %
1. Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdaya lokal	20. Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan	- % Jumlah Sample Pangan yang aman dikonsumsi	%	75	87,13	116,17

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

Tahun 2013 jumlah pengambilan sample pangan segar sebanyak 46 sample terdiri dari 35 sample sayuran dan 11 sample buah-buahan, dari sample yang diambil 38 sample (82,61) dinyatakan aman.

Tahun 2014 pengambilan sample sebanyak 280 Sample terdiri dari sample pangan olahan sebanyak 227 sample dan sample pangan segar sebanyak 53 sample. Dari 227 sample

pangan olahan, 196 sample (86,34%) dinyatakan aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung bahan aktif/residu yang berbahaya. Sedangkan sample pangan segar 87,92% dinyatakan aman untuk dikonsumsi dari 53 sample yang diambil terdiri dari 48 Sample sayuran dan 5 sample buah-buahan.

Dewasa ini masih banyak ditengarai makanan jajanan/kudapan maupun olahan yang beredar/diperdagangkan di masyarakat yang kurang aman/mengandung bahan kimia berbahaya dan bahan tambahan pangan (BTP) melebihi dosis takaran, di lapangan kondisinya sangat memprihatinkan.

Pada tahun 2011-2014, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan PT. Angler Biochemlab Surabaya menguji kandungan residu pestisida, logam berat, dan mikrobial pada produk pangan segar (buah dan sayuran). Berdasarkan hasil pengujian tahun 2011 terhadap 40 sampel Pangan Segar (khususnya buah dan sayuran), terdapat 1 sampel yang dinyatakan tidak aman dari residu pestisida, sehingga pada tahun 2011, persentase pangan aman untuk produk pangan segar adalah 97,5%. Sedangkan tahun 2012, persentase produk pangan segar sebanyak 75%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uji laboratorium terhadap produk pangan olahan secara sampling, sebanyak 3 dari 33 sampel atau persentase aman produk pangan olahan sebanyak 90,9%. Produk pangan olahan yang tidak aman dikarenakan mengandung bahan kimia berbahaya (formalin dan rhodamin) dan bahan tambahan pangan yang melebihi dosis (Sakarin). Pada tahun 2013, persentase pangan segar yang aman meningkat lagi dari tahun sebelumnya (2012) sebanyak 82,6%. Pada Tahun 2014 prosentase sample pangan segar

yang aman dikonsumsi 80% sedangkan dari sample pangan olahan 72,69% yang aman dikonsumsi.

Oleh karena pentingnya keamanan pangan, perlu adanya jaminan mutu dan keamanan pangan. Jaminan mutu dan keamanan pangan merupakan program yang harus diwujudkan, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, pendistribusian, sampai dengan penyajian memenuhi memenuhi standard keamanan pangan suatu produk dan diharapkan dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat berkeyakinan bahwa produk yang dikonsumsi, bermutu dan aman bagi kesehatan.

Metode yang digunakan meliputi hal sebagai berikut :

- a. Penyampaian materi keamanan pangan.
- b. Diskusi/ pembahasan dan perumusan
- c. Uji Laboratorium
- d. Pembinaan/ Pemantauan dan Pengawasan.
- e. Menampung saran dan masukan dari Wilayah Kab/ Kota.

Mutu dan Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu :

- **Uji Laboratorium Terhadap Pangan Segar**

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 53 sampel komoditas pangan segar terdiri dari 48 sample sayuran dan 5 sample buah-buahan. Dari 53 sample pangan segar yang dilakukan uji laboratorium 74,38% dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

- **Uji Laboratorium terhadap Pangan Olahan**

Sedangkan Pangan Olahan adalah pangan yang sudah mengalami pengolahan dan biasanya pada prosesnya dicampur dengan Bahan Tambahan Pangan (BPT). Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pewarna pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 227 sampel pangan olahan (mie basah, getuk pisang, tahu pong, pentol bakso dll.) 165 sample (72,69%) dinyatakan aman untuk dikonsumsi, sedangkan 47 sample (27,31%) pangan olahan terdapat kandungan bahan tambahan makanan yang berbahaya seperti Rodhamin B, Boraks, Formalin dll.

Kegiatan Keamanan Pangan yang dilakukan tahun 2014 :

- Hibah Alat Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 15 Paket
- Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan 1.450 orang
- Hibah Alat/Bahan Peningkatan Gizi, Mutu dan Keamanan Pangan untuk PAUD 40 Paket.
- Uji Laboratorium Pangan Segar 5 Paket.
- Uji Lab.Pangan Olahan/Makanan Jajanan anak sekolah 5 Paket.
- Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
- Workshop Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan Tingkat Provinsi.
- Workshop Mitra Praja Utama (MPU) dalam rangka keamanan pangan.
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan melalui kegiatan pembuatan Tahun Nigarin.

- Workshop Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan melalui Pangan Olahan/Jajanan Makanan anak sekolah.

– **Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

Mengingat tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur (0,76%), menyebabkan kompleksnya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sementara kapasitas produksi pangan pertumbuhannya masih lambat dan stagnan yang disebabkan adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya lahan dan air serta stagnannya pertumbuhan produktifitas lahan dan tenaga kerja pertanian.

Program Percepatan Penganekaragaman Pangan kegiatan Pengembangan pangan lokal dan tradisional merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan alternatif masyarakat Jawa Timur, mengingat konsumsi pangan penduduk Jawa Timur masih didominasi oleh kelompok pangan serealisa terutama beras yang diharapkan dapat menurunkan konsumsi beras masyarakat Jawa Timur dan beralih ke umbi-umbian, mengingat potensi umbi-umbian di Jawa Timur cukup banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Sedangkan konsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan umbi lainnya cenderung mengalami fluktuasi. Upaya untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian dengan penggunaan teknologi tepat guna dan mensosialisasikan program diversifikasi pangan dan gizi guna masyarakat tidak bergantung pada beras dan terigu, serta untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk pangan olahan guna menumbuhkan minat dan kecintaan untuk mengkonsumsi pangan lokal.

Senyampang dengan kondisi diatas, maka dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan ketrampilan masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi

pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman (B2SA) yang berbasis sumberdaya lokal, serta menurunkan tingkat konsumsi beras penduduk dengan sasaran seluruh masyarakat Jawa Timur, maka telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Kantin Sekolah Sehat berbasis pangan lokal se Jawa Timur, Guna meningkatkan pemahaman pentingnya berbagai jenis makanan jajanan yang terbuat dari bahan pangan lokal dan tradisional yang bebas dari bahan tambahan pangan yang membahayakan jika dikonsumsi, disamping menambah pengetahuan/wawasan dan memberikan pembekalan peserta dalam mengelola bantuan hibah yang berupa peralatan dan bahan pangan untuk kantin sekolah. Adapun sasarannya adalah Kepala Sekolah, Guru , Pengelola kantin sekolah dan petugas Institusi Ketahanan Pangan di 15 Kabupaten sebanyak 78 orang. Realisasi pelaksanaan fisik tercapai 100%.
- b. Sosialisasi konsumsi pangan B2SA bagi Guru se Jawa Timur.
Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, kepada para pelaku pendidikan/perguruan dan petugas Ketahanan Pangan Kabupaten/kota di 38 kabupten/Kota se Jawa Timur sebanyak 131 orang. Realisasi pelaksanaan sosialisasi tercapai 100%.
- c. Pemasyarakatan Teknologi MP-ASI, BUMIL dan BUSUI .
Penyebarluasan penganekaragaman konsumsi pangan pada masyarakat, yang Beragam Bergizi Seimbang Dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal dan mempersiapkan peserta sebagai calon penerima stimulan berupa Bantuan Hibah Peralatan dan Bahan Pangan Lokal bagi MP-ASI, BUMIL dan BUSUI. Keluarannya adalah tersalurnya bantuan hibah peralatan bagi Taman Posyandu sesuai dengan sasaran, sebanyak 75 orang terdiri dari Ketua/Kader Posyandu sebanyak 60 orang dan

petugas Ketahanan Pangan Kab/Kota 15 orang. Realisasi pelaksanaan fisik mencapai 100%.

- d. Pertemuan Apresiasi Pengembangan Karangkitri dalam rangka penyamaan persepsi tentang kegiatan Karangkitri pada 20 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebanyak 50 orang, yang dilaksanakan tanggal 20 s/d 21 Oktober 2014 bertempat di Hotel Royal Tretes View - Prigen kabupaten Pasuruan. Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Pertemuan Apresiasi Pengembangan Karangkitri Tahun 2014 adalah kesamaan persepsi mengenai pelaksanaan kegiatan Pengembangan karangkitri tahun 2014 di kabupaten dan kota. Realisasi pelaksanaan fisik mencapai 100%.
- e. Pelaksanaan Pekan Sarapan Nasional untuk memasyarakatkan B2SA serta konsumsi pangan yang memenuhi standart mutu dan keamanan pangan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14-20 Pebruari sebagai Pekan Sarapan Nasional (PESAN) dengan tujuan mulia untuk selalu mengingatkan dan mendorong masyarakat agar melakukan kebiasaan sarapan sehat setiap hari sebagai bagian dari upaya mewujudkan gizi seimbang. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Panganekaragaman dan Konsumsi Pangan dengan dana APBD Tahun 2014 telah menyelenggarakan kegiatan Pekan Sarapan Naional pada Sekolah Dasar di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Dengan Sasaran siswa siswi SDN sebanyak 550 anak, dan terealisasi 100%.
- f. Pengembangan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) berbasis sumberdaya lokal untuk Balita gizi kurang. Terealisasi 100%.
- g. Pemberian Hibah kepada Taman Posyandu @ Rp. 40 Juta/Kab di 38 Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.520.000.000,00 hibah

berupa Bantuan Peralatan berupa Statur Meter, Alat Peraga, Kompor gas, Regulator Tabung, Blender dan mangkok dan Bahan Pangan berupa Gula pasir, Kacang Hijau, Susu Kental Manis, Tepung Beras Merah, Mentega, Tepung Maizena dan Agar-Agar bagi Taman Posyandu sebanyak 190 kelompok, terealisasi 187 kelompok, dan 3 kelompok mengundurkan diri yaitu 2 kelompok Taman Posyandu Jember dan 1 kelompok Taman Posyandu Kota Surabaya.

- h. Pemberian Hibah kepada Kantin Sekolah Sehat, kegiatan hibah berupa bantuan peralatan dan bahan pangan bagi Kantin Sekolah sehat berbasis pangan lokal di 15 Kabupaten, yaitu : Tulungagung, Sidoarjo, Ngawi, Magetan, Sampang, Kediri, Situbondo, Probolinggo, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Tuban, Gresik, Pamekasan dan Lumajang, di 15 Kantin sebesar Rp. 825.000.000,00 masing-masing 1 kantin mendapatkan bantuan sebesar Rp. 45.000.000,00 s/d Rp. 60.000.000,00. Bantuan Hibah peralatan berbentuk Lemari es, kompor gas, regulator, tabung, etalase, blender, macig com, mangkok, sendok, sedangkan bahan pangan berupa Beras Cerdas, gatot instant, tiwul instant, tepung maizena, tepung mocav, agar-agar, kacang hijau, kedele, tepung tapioka. Realisasi fisik 100%.
- i. Pemberian Hibah dalam rangka Pengembangan Karangkitri, dengan nilai bantuan sebesar Rp. 4.150.000.000,00 @ 50 Juta Rupiah yang diarahkan ke 83 dasawisma Desa di 20 Kab/Kota, berbentuk Saprodi berupa : Kebun Bibit Desa/Green house, pompa air dan kelengkapannya, pupuk kandang, pupuk organik, pupuk NPK, polybag, pipa paralon dan selang air. Bantuan hibah berbentuk benih/bibit sayuran dan buah, dan tanaman toga berupa binahong hijau, brotowali, daun, encok, daun dewa, daun salam, gondomono, gondosuli, dandang gendis, ilir-ilir, kletesan, jinten, tapak liman, tapak dara, lem;uyung, temulawak, dll.

3) KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)

Jawa Timur memiliki potensi pekarangan yang cukup luas sebesar ± 626.740 ha dengan jumlah KK sebanyak 10.385.261 KK. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan usaha bidang pertanian masih relatif kecil. Sedangkan disisi yang lain setiap tahun terjadi alih fungsi lahan ± 10.000 ha dari lahan pertanian ke non pertanian, sedangkan tuntutan akan pangan dari tahun ketahun terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk.

- a. Tujuan Pengembangan KRPL adalah :
 - Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga.
 - Meningkatkan penganekaragaman pangan.
 - Meningkatkan kualitas gizi keluarga.
 - Meningkatkan pendapatan keluarga.
 - Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di setiap desa.
- b. Sasaran pengembangan KRPL adalah anggota Tim Penggerak PKK Desa di 35 Kabupaten/Kota, 37 Kecamatan, dan 122 Desa/Kelurahan, dengan catatan desa/kelurahan yang berdekatan.

Pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari diintegrasikan dengan kegiatan antara lain :

- a. Tim Penggerak PKK
- b. Koperasi Wanita (KOPWAN)
- c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- d. Poskesdes (Posyandu)
- e. Pembinaan dan Penyuluhan
 - Kebun Bibit Desa (KBD)
 - Pasar Desa

Bantuan hibah diberikan kepada Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan lokasi KRPL berupa :

- Sarana Produksi terdiri dari : Greenhouse, Kolam ikan dari terpal, Selang plastik, pompa air, alat penetas telur ayam, pipa paralon, pupuk bokasi, pupuk NPK, polybag, pakan ayam, pakan itik, pakan ikan.
- Benih sayuran : kacang panjang, terong ungu, tomat buah, bayam cabut, cabe rawit, cabe besar, sawi hijau, mentimun, kacang panjang, paria.
- Bibit buah-buahan : pepaya, dan pisang.
- Bibit Unggas: Itik, ayam buras.
- Bibit ternak : kelinci.
- Bibit ikan : lele.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan hibah pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, melalui Penggerak PKK Desa di 35 Kabupaten/Kota, 37 Kecamatan, dan 122 Desa/Kelurahan, kecuali kota Surabaya, Mojokerto dan kota Madiun mencapai Rp. 6.270.000.000,00 dan terealisasi 100%.

1) Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ketahanan Pangan.

Pelaksanaan Program Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2014 merupakan pendalaman, penyempurnaan, perluasan, pengembangan dan konsolidasi dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan diperlukan keharmonisan dan sinergi yang baik antar program yang difasilitasi APBN, APBD Provinsi dan kabupaten/kota serta swadaya masyarakat. Untuk memperoleh kesamaan persepsi, gerak dan langkah pelaksanaan program pembangunan, telah dikoordinasikan dengan seluruh institusi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota dalam forum pertemuan dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- Program pembelian gabah dan bahan pangan lainnya, penumbuhan dan pengembangan Desa Mandiri Pangan, pengendalian rawan pangan dengan Gerduaskin dan kegiatan strategis lainnya terus ditingkatkan melalui dukungan APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota, sehingga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian wilayah.
- Pengembangan lumbung pangan dan sistem tunda jual ditingkatkan melalui penguatan jaringan kerjasama, pemantapan manajemen, dan pengembangan usaha dengan komoditas non padi.
- Peningkatan keamanan dan mutu pangan masyarakat dilaksanakan melalui pemantauan keamanan pangan yang diprioritaskan pada : bahan pangan segar (daging, sayuran dan buah-buahan); bahan pangan olahan primer; makanan jajanan anak sekolah dan warung.
- Kegiatan Percepatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memberdayakan masyarakat melalui dukungan Ibu-Ibu PKK dari Provinsi sampai ke Pedesaan.
- Percepatan penganekagaman pangan ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memberdayakan masyarakat melalui gelar, sosialisasi, media cetak, televisi dan radio yang didukung pengembangan pengolahan pangan dan pengembangan makanan khas nusantara.
- Dalam perencanaan dan perumusan kegiatan program pembangunan ketahanan pangan diperlukan data dan informasi ketahanan pangan yang akurat dan terkini. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pangan sesuai format baku setiap bulan dan tahunan secara terus menerus dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Dalam rangka untuk mengetahui dan mengendalikan proses pelaksanaan kegiatan program agar berjalan sesuai dengan rencana, dilaksanakan monitoring melalui proses pengamatan lapangan yang dilakukan secara berkala. Dengan demikian, laporan perkembangan pelaksanaan program pembangunan setiap bulan dalam format SMEP (Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) untuk APBD Propinsi dapat disusun dan dikirimkan secara tepat waktu sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan APBN melalui MONEV tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan mengingat Software dari Pusat sampai dengan saat ini belum ada kepastian, sehingga pelaporan dilaksanakan dengan sistim manual.

2) Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan.

Dalam upaya peningkatan pengentasan kemiskinan, maka pemerintah secara bertahap selalu memperbaharui program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, melalui program/ kegiatan Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan . Salah satu keberhasilan pemerintah propinsi Jawa Timur telah berhasil mengurangi angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Jatim pada September 2013 tercatat 4.865 juta orang. Pada periode yang sama, di tahun 2012, tercatat 4.961.000 atau 13,08 persen dari total penduduk Jawa Timur. Dengan demikian, hingga September 2013, jumlah penduduk miskin turun 0,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari Target kinerja 600 orang Realisasi tahun pada tahun 2014 mencapai 500 orang (83,33%), sedangkan tahun 2013 mencapai 250 orang atau 50%. Kedepan diharapkan Intensitas pemuda ketahanan pangan dapat lebih jauh mengenal dan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan yang mengarah ke Kawasan Rumah Pangan Lestari, dengan kegiatan antara lain Dem farm dan Demplot dll.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan terserap sebesar Rp. 880.276.700,- atau 80,03 % dari pagu sebesar Rp. 1.100.000,- dan realisasi fisik mencapai 100%.

3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 13.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.418.353.770,00 atau 91,99% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program).

Evaluasi capaian kinerja tahun 2014 untuk Program adalah sebagai berikut :

- Tercapainya jumlah Penyuluh Bersertifikasi sebanyak 300 orang atau 97% dari target sejumlah 310 orang.
- Tercapainya Peningkatan Kelas kelompok Tani terealisasi 376 kelompok dari target 396 atau 94,4%.

Adapun dukungan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi KWT, di 33 kabupaten/kota.
- Sosialisasi Dem Area Pekarangan, sebanyak 66 Orang peserta.
- Pelatihan TOT Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT ,sebanyak 66 Orang peserta.
- Temu Lapang Pelaksanaan Dem KRPL, sebanyak (33 X 50) = 3300 Orang peserta.
- Pelatihan Penyuluh se WK BPP dalam rangka optimalisasi pekarangan di 33 Kabupaten.
- Lokakarya Optimalisasi Pekarangan sebanyak 76 Orang.

- Pelaksanaan Kegiatan Demfarm Usahatani Terpadu (Mix Farming), di 5 kab/kota.
- Sosialisasi Mix Farming, sebanyak (5 X 10) Orang
- Pelatihan TOT Mix Farming, sebanyak (5 X 10) Orang
- Temu Lapang Pelaksanaan Mix Farming, sebanyak (5 X 40) Orang
- Lokakarya Mix Farming, sebanyak (5 X 10) Orang
- Pelaksanaan Kegiatan Demplot/Demfarm Pertanian, di 29 kab/kota
- Sosialisasi Demfarm, sebanyak (2 9 X 2) Orang peserta
- TOT Demfarm, sebanyak (29 X 2) Orang peserta
- Temu Lapang Pelaksanaan Demfarm, sebanyak (29 X40) Orang.
- Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kelompok Pangan olahan, di 1 kab/kota.
- TOT Kelompok Pangan Olahan, sebanyak 40 Orang.
- Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Kelompok Pemuda Tani, di 5 kab/kota.
- Sosialisasi Dem Area Pekarangan bagi Pemuda Tani,
- Lokakarya Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat
- Temu Lapang Pelaksanaan Dem Area bagi Taruna Tani.
- Temu Teknis Penyuluhan Pertanian.
- Temu Teknis Penyuluh sebanyak 76 Orang.
- Lokakarya Peningkatan Kelembagaan Masyarakat, sebanyak 48 Orang.
- Rakor Komisi Penyuluhan Pertanian
- Workshop Peningkatan Kapasitas Penyuluh sebanyak 48 Orang
- Pertemuan Koordinasi Komisi Penyuluh sebanyak 48 Orang
- Pemantapan Sistem Penyuluhan
- -Sosialisasi Programa Penyuluhan Pertanian provinsi Jawa Timur
- -Pertemuan Evaluasi Programa Penyuluhan Pertanian Provinsi Jawa Timur
- Sosialisasi Penilaian Penyuluh dan Kapasitas BPP
- Bantuan Saprodi untuk Demplot/Demfarm sebanyak 20 paket, di 20 kabupaten/kota

- Bantuan alat pengolah pangan sebanyak 10 paket, di 10 kabupaten/kota
- Penghargaan/pemberian hadiah untuk ;
- Penyuluh PNS, 3 Orang
- THT-TB, sebanyak 3 Orang
- Penyuluh swadaya , sebanyak 3 Orang
- Kapasitas BPP, sebanyak 3 Orang
- Gapoktan, sebanyak 3 Orang
- Petani Teladan, sebanyak 3 Orang
- UP-FMA, sebanyak 3 Orang
- Kelembagaan Ekonomi Petani, sebanyak 3 Orang
- Workshop P4S
- Penas
- Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Penas ke XIV, sebanyak 61 Orang
- Pertemuan Koordinasi Liaison Officer (LO) dalam Rangka Penas ke XIV, sebanyak 70 Orang
- Dekorasi kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penas ke XIV
- Pembuatan Pergola

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Minimnya pengetahuan Penyuluh Pertanian tentang Program Ketahanan Pangan dengan segala aspeknya
- Kondisi otonom daerah saat ini, menyebabkan kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota sangat bervariasi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah masing-masing dalam pelaksanaan program pembangunan Ketahanan Pangan

Upaya pemecahan masalah

- Perlu adanya pelatihan tentang Ketahanan Pangan bagi para penyuluh pertanian misalnya workshop, pertemuan bimbingan teknis penyuluhan dll
- Perlu adanya tambahan materi bagi penyuluh pertanian baik dalam bentuk pelatihan maupun berupa media cetak (brosur, folder, poster dll).

4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 4.865.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.666,196.600,00 atau 95,91% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program).

1. Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan

Pelaksanaan Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan telah direalisasikan dalam bentukl Pameran, Promosi Pangan Olahan melalui media elektronik (TV) dan media cetak serta Sosialisasi Produk Pangan lokal. Secara rinci :

- Sosialisasi Beras Cerdas kepada Ibu-Ibu PKK.
- Sosialisasi Beras Cerdas kepada pengusaha pangan olahan.
- Pameran pangan olahan Tingkat Nasional dan dalam Provinsi
- Promosi pangan olahan melalui media elektronik (Tayangan TV).
- Promosi pangan olahan melalui media cetak : Baliho, Rotary Banner.

Promosi dan pameran produk olahan sebagai sarana untuk mengenalkan produk yang dikembangkan di daerah agar lebih berkembang di daerah luar.

2. *Distribusi Pangan.*

Distribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya ketahanan pangan. Harga pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi pasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses pangan oleh masyarakat. Harga pangan yang stabil disepanjang waktu, terjangkau dan merata diseluruh wilayah, mengindikasikan kondisi pasokan pangan cukup aman dengan distribusi lancar.

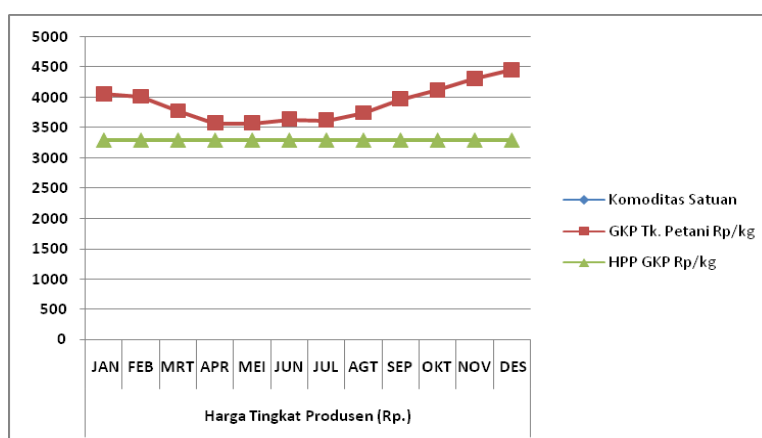
Salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi distribusi pangan di suatu wilayah adalah harga pangan. Pemantauan terhadap kondisi harga pangan dapat memberikan gambaran berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di wilayah tersebut, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, kesejahteraan petani/produsen dan sebagainya. Dengan pemantauan dan analisis terhadap harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi berbagai masalah pangan baik dalam aspek ketersediaan, distribusi dan stabilisasi pangan. Hal ini juga dilakukan untuk mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa pemerintah (baik pusat maupun daerah) perlu melakukan pengendalian harga khususnya terhadap pangan tertentu yang bersifat pokok untuk menghindari terjadinya gejolak harga yang berakibat resahnya masyarakat, keadaan darurat karena bencana dan/atau paceklik yang berkepanjangan. Berikut disajikan harga pangan strategis ditingkat produsen pada tahun 2014.

Tabel 4.21.1.12
Daftar Harga pangan strategis di tingkat produsen posisi
Januari s/d Desember 2014 Provinsi Jawa Timur

No	Komoditas	Stuan	Harga Tingkat Produsen (Rp.)											
			JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	GKP Tk. Petani	Rp/kg	4.060	4.015	3.775	3.575	3.580	3.645	3.625	3.745	3.975	4.120	4.310	4.459
2	GKG	Rp/kg	4.705	4.730	4.570	4.395	4.405	4.460	4.490	4.475	4.515	4.675	4.885	5.135
3	Beras Medium	Rp/kg	7.720	7.580	7.545	7.320	7.170	7.300	7.340	7.385	7.395	7.505	7.730	8.099
4	Beras Premium	Rp/kg	8.415	8.395	8.315	8.200	8.135	8.125	8.025	8.145	8.195	8.315	8.545	8.818
5	Jagung Tk. Petani	Rp/kg	3.045	2.915	3.050	3.090	3.210	3.315	3.280	3.150	3.070	3.010	3.065	3.098
6	Kedele Tk. Petani	Rp/kg	8.345	8.315	8.190	8.180	8.130	8.020	8.190	8.150	7.940	7.475	7.505	7.689
7	Bawang Merah	Rp/kg	15.865	13.750	13.020	13.580	14.115	15.400	18.230	10.675	8.780	9.865	13.055	10.361
8	Cabe Merah	Rp/kg	19.825	20.990	20.355	13.895	10.090	9.575	9.340	8.625	11.215	18.340	36.835	50.345

Sumber: Laporan SMS Panel Harga Pangan (data diolah BKP Jatim)

Gabah Kering Panen (GKP)



Tren harga GKP selama tahun 2014 hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya dimana harga gabah mengalami penurunan pada saat musim panen raya padi (Maret – Mei) dan secara perlahan akan bergerak naik hingga akhir tahun. Perkembangan harga rata-rata GKP tingkat petani di Jawa Timur selama tahun 2014 dapat ditunjukkan sebagaimana pada grafik berikut.

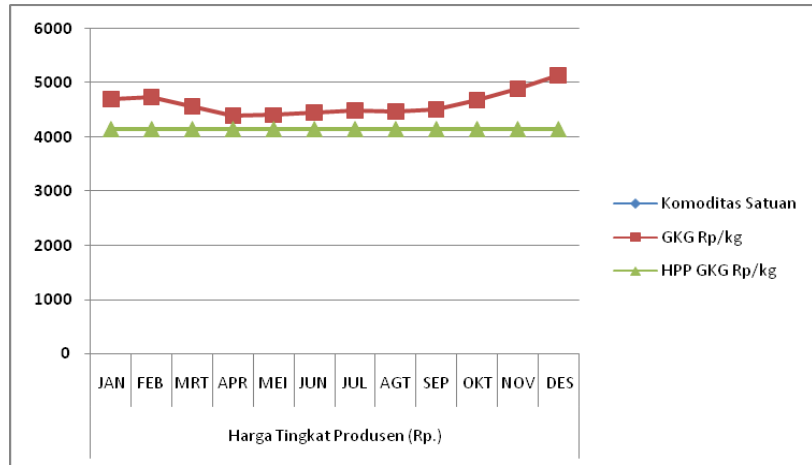
Harga GKP tingkat petani di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2014 cenderung cukup stabil dengan nilai koefisien variasi (CV) sebesar kurang dari 10% yaitu sebesar 7,56%. Sebagaimana

pada Gambar diatas, bahwa harga GKP tingkat petani Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren menurun sejak awal tahun 2014 dari bulan Januari hingga mencapai harga terendah yang terjadi pada bulan April 2014 sebesar Rp. 3.575,-/kg. Namun demikian harga terendah pada bulan April tersebut masih berada di atas Harga Pembelian Pemerintah HPP. Menjelang berakhirnya panen raya padi (bulan Mei 2014), harga rata-rata GKP di tingkat petani terlihat mulai sedikit mengalami kenaikan. Memasuki bulan Juni 2014, harga rata-rata GKP di tingkat petani Provinsi Jawa Timur terus bergerak naik secara signifikan setiap bulannya hingga mencapai harga rata-rata tertinggi untuk GKP sebesar Rp 4.459,-/kg pada bulan Desember 2014, yang semakin jauh dari HPP GKP sebesar Rp 3.300,-/kg (Inpres nomor 3 tahun 2012).

Harga GKP tingkat petani di Jawa Timur selama tahun 2014 berfluktuatif dan cukup stabil dengan selisih harga tertinggi dan harga terendah mencapai Rp. 884,-/kg. Perkembangan harga GKP di tingkat petani sepanjang tahun 2014 mencapai rata-rata sebesar Rp. 3.907,-/kg, naik sedikit dari rata-rata harga GKP di tahun 2013 yang sebesar Rp. 3.710,-/kg. Akan tetapi, harga tersebut tentunya masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan HPP GKP yang ditetapkan yaitu Rp. 3.300,-/kg (Inpres 3 Th. 2012).

Gabah Kering Giling (GKG)

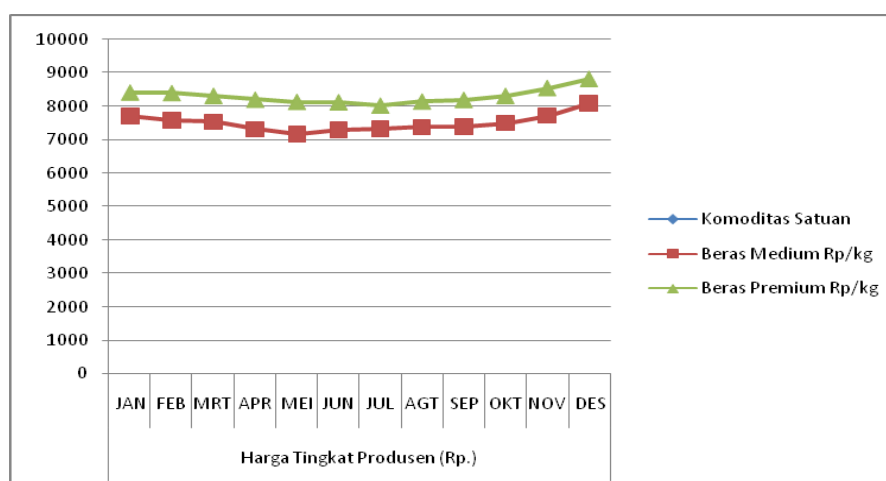
Tidak banyak berbeda, tren harga GKG tingkat penggilingan Provinsi Jawa Timur juga memperlihatkan kondisi yang hampir sama dengan tren harga GKP. Sebagai gambaran jelasnya, perkembangan harga rata-rata GKG tingkat penggilingan di Jawa Timur sepanjang tahun 2014 dapat ditunjukkan seperti grafik pada berikut :



Perkembangan harga GKG tingkat penggilingan di Jawa Timur tahun 2013 cukup berfluktuatif dan relatif cukup stabil ($CV = 4,76\%$) dengan selisih harga tertinggi dan terendah sebesar Rp. 740,-. Harga rata-rata GKG tingkat penggilingan dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember 2014 selalu berada di atas HPP yang ditetapkan sebesar Rp. 4.150,-/kg (Inpres 3 Th. 2012) di penggilingan, bahkan untuk harga rata-rata terendah di bulan April 2014 masih sedikit berada diatas HPP. Untuk rata-rata harga GKG di penggilingan pada tahun 2014 mencapai Rp. 4.620,- atau mengalami kenaikan sebesar 2,23% dari rata-rata harga GKG di tahun 2013 sebesar Rp. 4.517,

Grafik diatas menunjukkan bahwa di awal tahun 2014, harga rata-rata GKG mengalami penurunan hingga mencapai harga terendah pada bulan April 2014 (sebesar Rp. 4.395,-/kg) dikarenakan adanya panen raya padi di daerah-daerah sentra produksi padi di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya harga GKG terus bergerak naik hingga saat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah di bulan Agustus 2014 yang mencapai Rp. 4.475,-/kg. Tren kenaikan harga GKG ini masih terus berlangsung dan mencapai puncaknya pada bulan Desember 2014 sebesar Rp. 5.135,-.

Harga Beras



Perkembangan harga beras tingkat penggilingan di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2014 relatif stabil meskipun ada perubahan harga setiap bulannya seperti ditunjukkan pada grafik berikut.

Sebagaimana terlihat pada grafik diatas, harga rata-rata beras di tingkat penggilingan pada tahun 2014 cukup stabii akan tetapi relatif lebih stabil ($CV = 3,36\%$ untuk beras medium dan $CV = 2,64\%$ untuk beras premium) bila dibandingkan dengan harga rata-rata gabah. Sepanjang tahun 2014, harga rata-rata beras baik kualitas medium maupun premium selalu berada di atas HPP. Hal tersebut dapat diartikan harga yang ditawarkan pemerintah melalui Perum Bulog belum mampu menarik minat pengusaha perberasan/ penggilingan untuk menjual hasilnya ke Bulog dan lebih memilih pasar umum yang memberikan harga lebih tinggi.

Memasuki puncak panen raya padi (bulan Mei - Juni 2014) harga rata-rata beras tingkat penggilingan turun drastis seiring dengan harga gabah hingga mencapai kondisi harga terendah sepanjang tahun 2014, dimana harga rata-rata beras medium Rp. 7.170,-/kg dan harga rata-rata beras premium Rp. 8.025,-/kg. Hal ini dapat disebabkan karena saat puncak panen raya, stok gabah melimpah di gudang-gudang penggilingan padi sehingga

penggilingan mulai memproses gabahnya menjadi beras dan pasokan beras di pasaran umum sangat berlebih sehingga harga turun.

Selepas panen raya padi (bulan Juli 2014), harga rata-rata beras di penggilingan mulai beranjak naik dan terus berlangsung hingga bulan Desember 2014 yang mencapai harga rata-rata tertinggi di sepanjang tahun 2014, yaitu sebesar Rp. 8.099,-/kg untuk beras medium dan Rp. 8.818,-/kg untuk beras premium. Kenaikan harga rata-rata beras di penggilingan setelah panen raya tidak terlepas dari kenaikan harga gabah di tingkat petani, disamping faktor menjelang hari raya Idul Fitri 1434 H. Hal seperti sudah menjadi hal yang umum ketika menjelang hari besar keagamaan nasional, komoditas pangan mengalami peningkatan permintaan sehingga harga-harga beranjak naik. Harga beras di tingkat penggilingan dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013 mencapai rata-rata Rp. 7.507,-/kg untuk beras medium dan Rp. 8.302,-/kg untuk beras premium

Tabel 4.21.1.13
Harga pangan strategis ditingkat produsen.

No.	Komoditas	CV	Rerata	MAX	MIN	Selisih MAX-MIN
1	GKP Tk. Petani	7,56	3.907	4.459	3.575	884
2	GKG	4,76	4.620	5.135	4.395	740
3	Beras Medium	3,36	7.507	8.099	7.170	929
4	Beras Premium	2,64	8.302	8.818	8.025	793
5	Jagung Tk. Petani	3,66	3.108	3.315	2.915	400
6	Kedele Tk. Petani	3,73	8.011	8.345	7.475	870
7	Bawang Merah	21,09	13.058	18.230	8.780	9.450
8	Cabe Merah	66,22	19.119	50.345	8.625	41.720

Sumber: Laporan SMS Panel Harga Pangan (diolah BKP Jatim)

Berdasarkan data di atas, perkembangan harga komoditas pangan pada tingkat produsen selama tahun 2014 untuk komoditas (GKP, GKG, beras, jagung, dan kedele) terjadi kenaikan

dan penurunan harga relatif kecil $CV < 10\%$. Sedangkan pada 2 komoditas, yaitu cabe merah dan bawang merah, mengalami gejolak harga yang ditandai dengan $CV > 10\%$, hal ini disebabkan pada beberapa daerah di Jawa Timur sentra produksi cabai dan bawang merah kurang stabil, sedangkan permintaan cabai dan bawang merah cukup tinggi.

5. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan.

a) Pagu dan Realisasi Anggaran.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 1.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.480.015.100,00 atau 95,48% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program).

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pengembangan dan pementapan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan lokal yang dikembangkan melalui mata rantai agrobisnis hulu, on farm (budidaya), hilir (agroindustri) dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu. Untuk mendukung program telah dilaksanakan Kegiatan fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan telah disalurkan alat pengolahan pangan terdiri dari ; alat penepung, s[inner, continues sealer, oven, dan perajang ubi senilai @ Rp. 7.000.000,- kepada 45 kelompok usaha pangan olahan berbahan baku lokal di kawasan Agropolitan. Jenis alat yang dihibahkan kepada kelompok tidak hanya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan tetapi juga sesuai dengan kebutuhan kelompok. Dengan demikian adanya bantuan hibah alat pengolahan pangan dapat memberikan dampak positif pada pengembangan kualitas dan kuantitas produk pangan olahan yang dihasilkan. Selanjutnya sebagai penunjang kegiatan, dilaksanakan pula pelatihan dan workshop.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas produk pangan olahan kawasan agropolitan.
- Kurangnya informasi pasar bagi kelompok usaha pangan lokal kawasan agropolitan .
- Rendahnya modal usaha kelompok usaha pangan lokal kawasan agropolitan .

Upaya Pemecahan Masalah

- Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok usaha pangan olahan mulai dari ragam bahan baku dan cara penanganannya, teknik pengolahan yang mengacu pada Good Manufacturing Practice.
- Fasilitasi pemasaran hasil produk pangan olahan kawasan agropolitan .
- Mendekatkan kelompok usaha pangan olahan kawasan agropolitan dengan perbankan.

6. Program Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan/Peternakan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 731.096.875,00 atau 97,48% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program).

Dalam rangka pengembangan teknologi pangan olahan telah dilaksanakan kegiatan yaitu :

- Pemasyarakatan teknologi pangan melalui Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada Balita oleh 300 orang (ibu-ibu yang mempunyai Balita, tim penggerak PKK dan Posyandu berupa pelatihan penyiapan dan pembuatan MP-ASI).
- Pemasyarakatan menu makanan tradisional oleh 76 orang.

- Sosialisasi Konsumsi Pangan 3BA oleh 76 kelompok wanita.
- Bantuan bahan pangan berupa kacang hijau, pentol bakso, telur, bihun jagung, dan gula pada 15 posyandu dalam rangka pemasyarakatan MP-ASI kepada Balita dilaksanakan di Pamekasan, Bojonegoro, Nganjuk, Probolinggo.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

Permasalahan.

- Masih ditemui balita penderita gizi kurang maupun penderita gizi buruk pada beberapa daerah di Jawa Timur.

Upaya pemecahan masalah

- Intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada Balita.
- Diperlukan sosialisasi dan pembinaan terus menerus mulai dari penyiapan bahan MP-ASI, cara mengolah dan menghidangkan dll.
- Pemberian bahan Makanan Pendamping Asi kepada Balita selama 3 bulan.

d) Penghargaan Ketahanan Pangan

- Tingkat Nasional

Pada tahun 2014 Gubernur Jawa Timur sebagai Pembina Ketahanan Pangan menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN), sebagai peringkat I, pada Bupati Kabupaten Malang Drs. H. Rendra Kresna Bc.Ku, SH, MM;MPM, Untuk Peringkat II diberikan kepada Bupati Ngawi, Sedangkan peringkat III diterimakan pada Bupati Gresik, selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2014 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1289/kpts/KP.450/12/2014 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur 188/595/Kpts/013/2014.

Tabel 4.21.1.14
Daftar Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara
(APN) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

NO	KATEGORI/NAMA	JABATAN/ALAMAT	KETERANGAN
I PELOPOR KETAHANAN PANGAN			
1.	Drs. H. JOKO UTOMO	1.Des. Sukolilo. Kec. Bancar, Kab. Tuban.	Peringkat I
2.	BASUKI RAHMAD	2.Des. Pekandangan Sangra, Kec. Bluto, Kab. Sumenep.	Peringkat II
3.	HENDRO WIDODO	3.Des. Ngaglik, Kec. Srengat, Kab. Blitar	Peringkat III
II PEMANGKU KETAHANAN PANGAN			
1.	RIRIN, SP	1. Desa. Tenaru, Kec. Driyorejo, Kab Gresik.	Peringkat I
2.	YASIN		Peringkat II
3.	ABDUL KARIM	2. Desa. Tasikmadu, Kec. Palang, Kab Tuban. 3. Desa Ledug, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan.	Peringkat III
III PELAKU PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN			
A.	KEGIATAN PRODUKSI PANGAN	1. Desa. Paberasan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep.	Peringkat I
	1. KELOMPOK TANI "SUMBER HASIL"	2. Desa. Karang Mojo, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan.	Peringkat II
	2. GAPOKTAN "MOJO MAKMUR"	3. Desa. Benyior, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan.	Peringkat III
B.	3. KELOMPOK TANI "BAROKAH IV"	1. Desa. Bandungrejoso, Kec. Sukun, Kota Malang.	Peringkat I
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2. Desa. Mekikis, Kec. Purwosari, Kab. Kediri.	Peringkat II
		3. Desa. Widorokandang, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan.	Peringkat III
C.	1. KELOMPOK TANI "MELATI PUTIH II"	1. Desa. Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan.	Peringkat I
	2. GAPOKTAN "MANUNGGAL SEJATI"	2. Desa. Prigi, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek.	Peringkat II
	3. GAPOKTAN "JAYA"	3. Desa. Dukuhklopo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang.	Peringkat III
	KEGIATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN OLAHAN		
	1. PRANSPUL (Irayati, SP.d)		
	2. KELIMPOK WANITA TANI		

NO	KETEGORI/NAMA	JABATAN/ALAMAT	KETERANGAN
	“ANEKA BAHARI” 3. UD. DUA PUTRA (Sulistiyowati)		
IV	PELAYANAN KETAHANAN PANGAN		
1.	LILI, SP	1. Kabupaten Lumajang.	Peringkat I
2.	SAUDAH, SP	2. Kabupaten Bangkalan.	Peringkat II
3.	Ir. CLARITA PUSPA WARDANI	3. Kabupaten Magetan.	Peringkat III
V	PEMBINA KETAHANAN PANGAN		
A.	KEPALA DAERAH (BUPATI)	1. Bupati Malang	Peringkat I
	1. Drs. H. RENDRA KRESNA, Bcku, SH, MM, MPM.	2. Bupati Ngawi	Peringkat II
	2. Ir. BUDI SULISTYONO.	3. Bupati Gresik	Peringkat III
B.	3. Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.	4. Bupati Blitar	Peringkat IV
	4. H. HERRY NOEGROHO, SE, MH	1. KepalaDesa Mojokrapak, Kab. Jombang. 2. Kepala Desa Puhjarak, Kab. Kediri. 3. Kepala Desa Wonoanti, Kab. Trenggalek	Peringkat I Peringkat II Peringkat III
	KEPALA DESA 1. H. WARSUBI, SH, M.Si 2. Drs. SUGIYO 3. MUJIANTO		

NAMA PENGHARGAAN : ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA (APN)
2014

YANG MENYERAHKAN : PRESIDEN RI (DJOKO WIDODO)

TANGGAL PENYERAHAN : Desembber 2014, di Subang Jawa Barat.



Tabel 4.21.1.15

Daftar penerima bantuan hibah alat Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014.

NO.	NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK	ALAMAT	NAMA ALAT	JUMLAH	NILAI/Rp.
1	2	3	4	5	6	7
	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN LOKAL DAN TRADISIONAL					
1	KT. SUMBER MAKMURI	SYAFI'I	Ds. Wedusan, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
2.	KT. SEJAHTERA I	JARWONO	Ds. Pesawahan, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
3.	KT. SUKA MAJU	SUJONO ARDI	Ds. Andungsari, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
4.	KELOMPOK SUBUR ALAMI	MUASEH	Ds. Klagen Srampat, Kec. Maduran, Kabupaten Lamongan	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
5.	KELOMPOK MADU ASRI	UMIYATI	Ds. Maduran, Kec. Maduran, Kab. Lamongan	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
6.	KEL. SUMBER MANDIRI	SENIOK ISWATI	Ds. Sukomalo, Kec. Kedungpring, Kabupaten Lamongan	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
7.	KWT. IDAMAN HATI	SITI AMSARIYAH	Ds. Kalimo'ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000
8.	KEL. PASCA KARYA I	RISNO HAJAR	Ds. Lanjuk, Kec. Manding, Kab. Sumenep	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000
9.	KT. TUNAS MUDA	SUPARMIN	Ds. Gedungan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000
10.	KOP. SELERA RASA	HANAWI	Ds. Palengaan Laok, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000
11.	KELOMPOK HAL HAF	ALI RIDO	Desa Bendungan, Kec. Pakong,	Contonuous Sealer	1 paket	9.900.000

NO.	NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK	ALAMAT	NAMA ALAT	JUMLAH	NILAI/Rp.
			Kab.Pamekasan			
12.	KEL. TERANG BULANG	NASRIFAH	Ds. Waru Barat, Kec. Waru, Kab. Pamekasan	Contonuous Sealer	1 paket	9.900.000
13.	KT. KARYA BAKTI	ARISTIKA JULI ASTUTI	Ds. Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kab. Ngawi	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
14.	KT. NGUDI RAHAYU II	SUPARNA	Ds. Kandangan, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
15.	KWT. SRI REJEKI	SUN JUNIATUN	Ds. Jururejo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
16.	KTW. RUMPUT LAUT	Hj. RAHMAH	DS. Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000
17.	KU. POTRE TANE	SULEHA	Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan	Contonuous Sealer	1 paket	9.900.000
18.	KWT. KENANGA	MESNA	Ds. Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000
19.	KEL. MEKAR SARI	WAHYU SULISTINI	Ds. Sengon, Kec.Ngambon, Kab. Bojonegoro	Mesin Pamarut	1 paket	9.900.000
20.	KUOM. BANGKIT BERSAMA	SISWANTO	Ds. Kanten, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro	Perajang Ubi	1 Paket	9.900.000
21.	KT. AMONG TANI I	SUKARYANTO	Ds. Sumbang Timun, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro	Perajang Ubi	1 Paket	9.900.000
22.	KWT. SEKAR GAYAM	ERNA YULIA	Ds. Prambon tergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000
23.	KWT. MAWAR	TUNIK	Ds. Pakel, Kec. Montong, Kab. Tuban	Contonuous Sealer	1 paket	9.900.000
24.	KWT. MAWAR PUTIH	DWI ROHJAYANTI	Ds. Simo, Kec. Soko, Kab. Tuban	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
25.	KWT. ANGGREK	DAYATIN	Ds. Sumberrejo, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000
26.	KWT. JAYA MAKMUR	IKA PURWATINING SIH	Ds. Karang sentul, Kec. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000

NO.	NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK	ALAMAT	NAMA ALAT	JUMLAH	NILAI/Rp.
27.	KWT. CEMPAKA	SARIATI	Ds. gunting, kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan	Mesin Pamarut	1 paket	9.900.000
28.	KW. SUMBER MUTIARA	Hj. SITI FATIMAH	Kel. Banyuanyar, Kec. Sampang, kab. Sampang	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000
29.	KW. BUNGA MUTIARA	Hj. SAHRIYA	Kel. Banyuanyar, Kec. Sampang, kab. Sampang	Continuous Sealer	1 paket	9.900.000
30.	KW. MELATI	NIYAH	Kel. Rong Tengah, Kec. Sampang, kab. Sampang	Continuous Sealer	1 paket	9.900.000
31.	KWT. SRIKANDI	UMROTUL AMAROH	Ds. Tugu Sumberejo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
32.	KWT. KUSUMA	ANIS FAHRUNNISA,S .P.si.	Ds. Jombang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang	Mesin Penepung	1 paket	9.900.000
33.	KWT. BOUGENVIL	HALIMATUS SA'DIYAH,S.Pdi	Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang	Perajang Ubi	1 paket	9.900.000
JUMLAH						326.700.000

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

22.1. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Sasaran

- 1) Meningkatnya kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel.
- 2) Meningkatnya pusat layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar;
- 3) Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel yang menerapkan manajemen pembangunan yang partisipatif dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
- 4) Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel. yang memiliki Klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan di Jawa Timur.;

b. Program

Sasaran diwujudkan melalui pelaksanaan 4 (empat) program Pemberdayaan Masyarakat yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, adapun capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran untuk Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 20.192.655.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.656.606.357,00 (87,44%), pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian program)

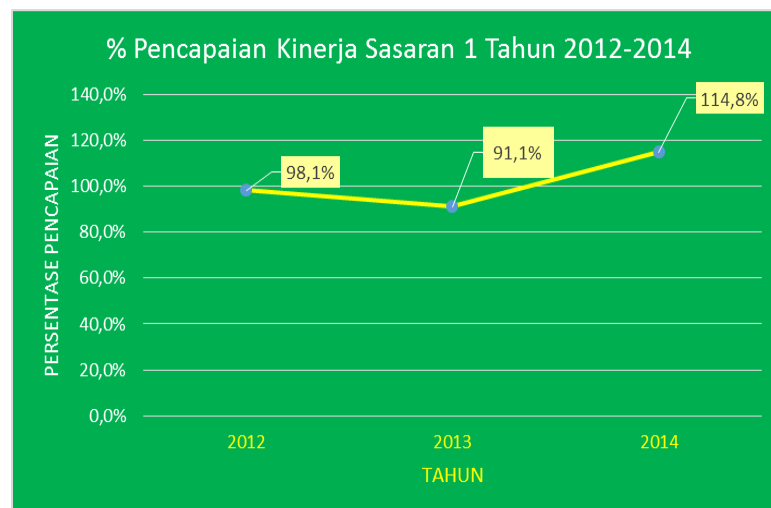
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan kemudahan akses permodalan,

fasilitasi Pengembangan usaha, yang dapat membuka lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program ini mendukung pencapaian tujuan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan permodalan dan usaha ekonomi produktif, dijabarkan dalam sasaran strategis yaitu meningkatnya kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kelurahan dengan Indikator kinerja sasaran prosentase peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kelurahan.

Pencapaian kinerja tahun 2014 dari target sebesar 3,1% telah tercapai sebesar 3,5% atau tingkat pencapaian sebesar 114,8%. Pencapaian kinerja ini meningkat dari tahun 2013 (91,1%), sebagaimana grafik capaian kinerja dibawah ini.

Gambar 4.22.1.1
Prosentase Capaian Kinerja Sasaran 1
Tahun 2012 - 2014



Sumber ; Bappemas Prov. Jatim

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama 2 tahun yang lalu, pada tahun 2012 dari target 4,2% terealisasi 4,1% atau tingkat pencapaian sebesar 98%. Pada tahun 2013 dari target 3,6% terealisasi 3,3% atau tingkat pencapaian sebesar 91,1%,

maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 menunjukkan progress kinerja yang baik yaitu meningkat dari 2 tahun yang lalu dengan prosentase tingkat pencapaian 114,8%, selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.22.1.1
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel.

TAHUN	2012	2013	2014
Target Kinerja	4,2% (2507 Kelompok UEP/LEM)	3,6% (2597 Kelompok UEP/LEM)	3,1% (2677 Kelompok UEP/LEM)
Realisasi kinerja	4,1% (2629 Kelompok UEP/LEM)	3,3% (2715 Kelompok UEP/LEM)	3,5% (2811 Kelompok UEP/LEM)
% Capaian Kinerja	98,1%	91,1%	114,8%

Sumber ; Bappemas Prov. Jatim

Capaian kinerja dimaksud didukung oleh pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu), Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan BUMDesa dan Pengembangan Pasar Desa. Pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 telah terfasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat sebanyak 2715 lembaga dan pada Tahun 2014 menjadi 2811 lembaga atau bertambah sebanyak 96 lembaga (meningkat 3,5%).

Melalui UPKu dilakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan permodalan bagi RTM secara mudah, murah dan cepat serta pengembangan ekonomi produktif masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, adapun kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat yang diberikan fasilitasi usaha ekonomi produktif adalah sebanyak 22 UPKu, 4 Forum UPKu, 8 UED-SP dan 17 UEM. Kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat perlu terus ditumbuhkan, dalam rangka penguatan kapasitas

perekonomian di desa, terutama masyarakat hampir miskin yang masih mempunyai kemampuan untuk berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kelembagaan masyarakat dalam bentuk komunitas usaha ini menjadi penting untuk terus dikembangkan guna memberikan posisi tawar yang lebih kuat dalam pengelolaan usahanya dan memudahkan akses permodalan yang mudah, murah dan cepat bagi masyarakat desa, utamanya bagi rumah tangga miskin.

Melalui Pengembangan BUMDesa (20 BUMDesa) diharapkan dimaksudkan untuk mewadahi lembaga ekonomi desa yang bersumber dari program pemerintah atau sumber lain yang dikelola oleh masyarakat diharapkan menjadi unit usaha milik desa dan juga sebagai sarana pintu masuk (*entry point*) program-program Pemerintah/non Pemerintah.

Fasilitasi pengembangan pasar desa (25 pasar desa) adalah mengoptimalkan fungsi dan peran Pasar Desa untuk mendukung pengembangan perekonomian di desa, yakni melalui pemberdayaan pengelolaan pasar desa serta pembangunan dan pengembangan sarana/ prasarana fisik pasar desa. Kegiatan pembangunan untuk Pengembangan Pasar Desa dimaksudkan untuk memberikan landasan dalam pengembangan perekonomian pedesaan melalui pengembangan sarana pasar desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pasar Desa.

Fasilitasi pemberdayaan terhadap Pengembangan Pasar Desa dalam tahun 2014 dapat memicu terpilihnya 4 pasar desa terbaik di Jawa Timur yaitu Terbaik I Pasar Desa Sumber Rejeki Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kecamatan Bojonegoro; Terbaik II Pasar Desa Selopuro, Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar; Terbaik III Pasar Desa Ujung Pangkah, Desa Ujung Pangkah, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik dan Terbaik IV Pasar Desa Raya Kemlagi Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.

Khusus bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), melalui Program Jalan Lain Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA) kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika jumlah penduduk wanita di Jawa Timur ternyata lebih didominasi oleh perempuan. Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Timur 37,47 juta, terdiri dari 18,5 juta laki-laki (49,37%) dan 18,97 juta perempuan (50,63%), Hal tersebut diperkuat oleh rilis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) Juli 2012, menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 30% terendah di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 2.864.364 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan jumlah KRTP sebanyak 700.160 atau 24,4%.

Sasaran dari Kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan pada Tahun 2014 sebanyak 76.283 Kepala Rumah Tangga Perempuan dari data Desil 1 PPLS 2011 yang terverifikasi dan teridentifikasi kebutuhannya. Sedangkan sasaran untuk bantuan keuangan Pilot Project Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan diserahkan kepada 3.309 KRTP di 54 Desa 36 Kecamatan 10 Kabupaten.

Pilot Project Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Tahun 2014 dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun model yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan dengan pola pembiayaan bantuan keuangan yang dikelola melalui pokmas RTSM dengan lokasi sasaran Program Jalin Matra Bantuan RTSM diprioritaskan pada Desa/Kelurahan yang belum pernah memperoleh Program Jalin Kesra . Untuk Tahun 2014, dilaksanakan Pilot Proyek Program Jalin Matra Bantuan RTSM di 33 Desa, di 32 Kecamatan pada 10 Kabupaten yaitu; Kabupaten Tulungagung, Kediri, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Ngawi, Bojonegoro dan Pamekasan dengan Rumah tangga sasaran (*target*

group) Program Jalin Matra Bantuan RTSM sebanyak 2.961 RTSM , Program ini dilaksanakan untuk membidik rumah tangga sangat miskin dengan status kesejahteraan 5% terendah berdasarkan data PPLS 11.

c) Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan secara umum yang dihadapi Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah minimnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten baik dalam bentuk kebijakan, program dan pembinaan manajemen lembaga. Disamping itu juga terbatasnya kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa dan BUM Desa. Untuk kondisi sarana dan prasarana kantor pasar desa terabaikan dan kurang memadai, selain itu sumberdaya manusia pengelola Pasar Desa, BUM Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang umumnya kurang mumpuni dan kompeten.
- Pada umumnya permasalahan BUM Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat juga kesulitan dalam mengakses sumber daya produktif, terutama permodalan. Pihak perbankan juga memandang usaha ekonomi masyarakat sebagai kelompok usaha yang beresiko tinggi, sehingga menjadi salah satu kendala dalam pemberian kredit.

Menghadapi permasalahan dimaksud, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

- Memberikan Fasilitas terkait dengan Pasar Desa, BUM Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat meliputi : a) pembinaan, b) peningkatan kapasitas dan kelembagaan pasar desa, c) penguatan peran pemerintah desa, d) perlindungan aset/kekayaan desa, e) perlindungan usaha mikro dan kecil serta, f) memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pengusaha kecil dan pedagang pasar.
- Perlu untuk dilakukan Orientasi Pengembangan Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Usaha Ekonomi

Masyarakat, selain itu juga perlu diupayakan Pemetaan Profil Pasar Desa dan BUMDesa untuk mengetahui perkembangan dan kinerja masing-masing BUMDesa sebagai kegiatan perekonomian di pedesaan.

- Perlu mengikutkan hasil produk-produk kerajinan ataupun makanan dari kelompok usaha ekonomi masyarakat melalui berbagai Pameran Usaha Ekonomi Pedesaan sehingga diharapkan dapat mengundang investor yang pada akhirnya meningkatkan potensi dan pendapatan masyarakat desa setempat.

2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 8.726.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.155.892.685,00 (93,47%), pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian program)

Melalui program ini telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap komunitas masyarakat miskin dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan potensi/sumber daya lokal desa/kelurahan, yang dapat menumbuhkan perekonomian lokal, sehingga dapat mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin (antara lain melalui pembangunan MCK/WC Keluarga dan sarana prasarana air bersih/bak penampungan) dengan tetap memperhatikan kelestarian SDA dan penggunaan serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

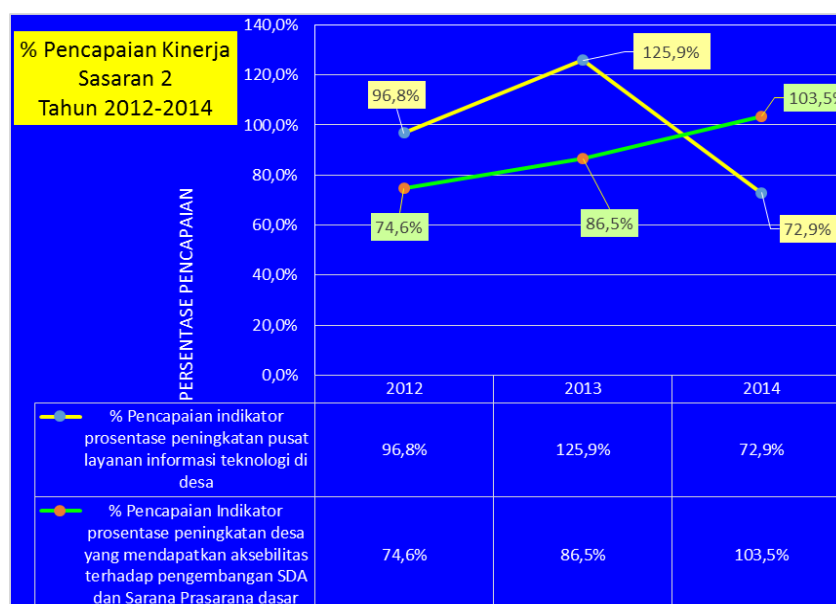
Program ini mendukung pencapaian tujuan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan TTG dan sarana prasarana dasar masyarakat, yang dijabarkan dalam 1 sasaran strategis, yaitu meningkatnya Pusat Layanan informasi teknologi dan

akesebilitas masyarakat miskin terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar.

Capaian kinerja Tahun 2014 pada sasaran ini didukung pencapaian kinerja indikator prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa sebesar 26,7% dari target sebesar 36,6% atau tingkat pencapaian sebesar 72,9%, dan pencapaian target indikator prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan Sarana Prasarana dasar sebesar 16,8% dari target sebesar 16,2% atau tingkat pencapaian sebesar 103,5 %.

Capaian kinerja sasaran ini rata-rata meningkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 (sebagaimana gambar grafik prosentase pencapaian kinerja sasaran 2 tahun 2012-2014 di bawah ini), walaupun pada indikator prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013.

Gambar 4.22.1.2
Prosentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2012 - 2014



Sumber ; Bappemas Prov. Jatim

Pada tahun 2012 telah terfasilitasi peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa sebanyak 32 Posyantek/Wartek, dan pada tahun 2013 dari target 32,3%, terealisasi sebesar 40,63% atau menjadi 45 Posyantek/Wartek dan sampai dengan Tahun 2014

menjadi 57 Posyantek/Wartek atau meningkat 26,7% dari tahun 2013. Peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa ini diupayakan melalui kerjasama rancang bangun alat-alat TTG dengan pendampingan dari perguruan tinggi dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berusaha dengan pengenalan alat-alat teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.22.1.2
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pusat layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar (Indikator 1)

TAHUN	2012	2013	2014
Target Kinerja Indikator % Peningkatan Pusat layanan informasi teknologi di desa	3,3% (31 Wartek/ Posyantek)	32,3% (41 Wartek/ Posyantek)	36,6% (56 Wartek/ Posyantek)
Realisasi Kinerja Indikator % Peningkatan Pusat layanan informasi teknologi di desa	3,2% (32 Wartek/ Posyantek)	40,6% (45 Wartek/ Posyantek)	26,7% (57 Wartek/ Posyantek)
% Capaian Kinerja	96,8%	125,9%	72,9%

Sumber ; Bappemas Prov. Jatim

Pencapaian target prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar, secara operasional direalisasikan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai, potensi desa, pengembangan sumberdaya lokal berbasis kawasan, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan peningkatan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian Sumber Mata Air (SMA).

Pada tahun 2012 terdapat 233 desa dengan komunitas masyarakat yang telah mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dan pada tahun 2013 menjadi 280 desa atau meningkat 20,2% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2014 menjadi sebanyak 327 desa/komunitas masyarakat

atau bertambah sebanyak 47 desa sehingga terdapat peningkatan sebesar 16,8%, selengkapnya capaian kinerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.22.1.3
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pusat layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar (Indikator 2)

TAHUN	2012	2013	2014
Target Kinerja indikator % peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan Sarana Prasarana dasar	15,4% (150 desa)	23,3% (185 desa)	16,2% (215 desa)
Realisasi Kinerja indikator % peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan Sarana Prasarana dasar	11,5% (233 desa)	20,2% (280 desa)	16,8% (327 desa)
% Capaian Kinerja	74,6%	86,5%	103,5%

Sumber ; Bappemas Prov. Jatim

Output kegiatan pada tahun 2014 antara lain rehab dinding/lantai/jamban adalah sebanyak 17 rumah dan 153 jamban, sedangkan pemanfaat air bersih melalui fasilitasi pembangunan sarpras yaitu 5 tandon air, 180 m perpipaan, 4 Kamar Mandi, dan 2 sumur pompa, jumlah pemanfaatnya adalah sebanyak 775 RTS.

Melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yaitu Bantuan Modal Usaha bagi masyarakat di 6 Desa pesisir pantai melalui Usaha simpan pinjam kepada 20 Pokmas (195 orang RTM) dan terlatihnya 147 RTM di Desa Pesisir Pantai yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan produksi, Kegiatan Konservasi Alam dengan Penanaman pohon Bakau sebanyak 5.300 batang di 2 Desa (Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kab. Pamekasan dan Desa Curah Dringu Kec. Tongas Kabupaten Pobolinggo) yang dipergunakan untuk pengembangan usaha pengelolaan potensi pesisir pantai. Melalui kegiatan pengembangan sumberdaya lokal berbasis kawasan, Terealisasinya Pengembangan Sumber Daya Ekonomi (PSDE) yang

dikelola oleh 6 BKAD pada 6 Kabupaten (Sidoarjo, Trenggalek, Probolinggo, Bondowoso, Sampang dan Jember) yang peruntukannya digunakan untuk usaha simpan pinjam yang dimanfaatkan oleh 74 Pokmas dengan anggota 649 orang, usaha kemitraan yang kemitraannya yaitu pada peternakan, pertanian dan wirausaha yang dimanfaatkan oleh 33 Pokmas dengan anggota 245 orang, swakelola oleh UPKu dan dimanfaatkan oleh 6 Pokmas dengan anggota 61 orang.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pengembangan produk unggulan kawasan P2SLBK terkendala dengan permasalahan pemasaran hasil produk unggulan yang ada.

Solusi Pemecahan Masalah

Perlu adanya upaya terobosan dalam pemasaran hasil produksi BKAD, baik melalui upaya peningkatan kualitas hasil produksi (sesuai dengan kebutuhan konsumen), promosi maupun perlu adanya kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan besar.

d) Penghargaan Nasional Tahun 2014

Gelar TTG Nasional XVI Tahun 2014 di Kota Samarinda–Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Juara Harapan Ke I Stand Terbaik Provinsi

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 12.249.186.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.471.039.306,00 (93,65 %), pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian program)

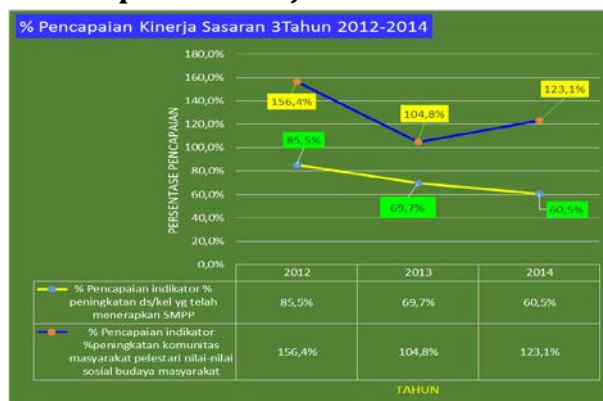
Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa merupakan suatu upaya Pemberdayaan Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan pengembangan modal sosial serta budaya masyarakat lokal.

Program ini mendukung pencapaian tujuan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dengan sasaran terwujudnya peningkatan jumlah desa/kelurahan yang menerapkan sistem manajemen pembangunan partisipatif dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.

Pencapaian kinerja indikator Prosentase peningkatan jumlah desa/kelurahan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) pada tahun 2014 dengan target peningkatan sebesar 16,1%, terealisasi sebesar 9,8% atau tingkat pencapaiannya adalah sebesar 60,5%. Pencapaian kinerja indikator prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat Tahun 2014 dari target peningkatan sebesar 13,8% dapat terealisasi sebesar 17% sehingga tingkat pencapaian kinerja sebesar 123,1%, pencapaian ini meningkat apabila dibandingkan tahun 2013, selengkapnya pencapaian selama 3 tahun sebagaimana gambar grafik di bawah ini.

Gambar 4.22.1.3

Prosentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2012-2014



Sumber ; Bappemas Prov. Jatim

Pada Tahun 2012 jumlah desa kelurahan yang telah menerapkan SMPP sebanyak 305 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 338 desa demikian pula meningkat pada Tahun 2014 menjadi 371 desa/kelurahan atau bertambah 33 desa (meningkat 9,8%) sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.22.1.4
Capaian Kinerja Sasaran terwujudnya peningkatan jumlah desa/kelurahan yang menerapkan sistem manajemen pembangunan partisipatif dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat (Indikator 1)

TAHUN	2012	2013	2014
Target Kinerja	14,2% (161 desa)	15,5% (186 desa)	16,1% (216 desa)
Realisasi kinerja	12,1% 305 (desa)	10,8% (338 desa)	9,8% (371 desa)
% Capaian Kinerja	85,5%	69,7%	60,5%

Sumber ; Bappemas Prov. Jatim

Selain itu pada Tahun 2014 telah ada peningkatan komunitas masyarakat pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat dimana Pada tahun 2012 terdapat 266 komunitas masyarakat pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat dan meningkat pada Tahun 2013 menjadi 329 komunitas masyarakat pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat demikian pula pada Tahun 2014 menjadi 385 atau bertambah 56 komunitas (meningkat sebesar 17%) peningkatan capaian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.22.1.5
Capaian Kinerja Sasaran terwujudnya peningkatan jumlah desa/kelurahan yang menerapkan sistem manajemen pembangunan partisipatif dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat (Indikator 2).

TAHUN	2012	2013	2014
Target Kinerja	24,6% (177 komunitas)	22,6% (217 komunitas)	13,8% (247 komunitas)
Realisasi kinerja	38,5% (266 komunitas)	23,7% (329 komunitas)	17,0% (385 komunitas)
% Capaian Kinerja	156,4%	104,8%	123,1%

Sumber ; Bappemas Prov. Jatim

Peningkatan Partisipasi Masyarakat didukung melalui pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 antara lain Identifikasi dan Implementasi serta Pendampingan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP), 10 Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu), 29 Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan penerima manfaat 260 orang, perempuan 166 orang, laki-laki 94 orang, Evaluasi dalam pelaksanaan Desa dan Kelurahan Berhasil, serta pengembangan wilayah terpadu antar desa 5 Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), 16 Kelompok Masyarakat (Pokmas), penerima manfaat 168 orang, perempuan 85 orang, laki-laki 83 orang;. Sedangkan pada pengembangan modal sosial budaya didukung melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keswadayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Community Capacity Building), 8 Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu), 27 Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan penerima manfaat 217 orang, perempuan 163 orang, laki-laki 55 orang;; Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)-Demam Berdarah, Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat pondok pesantren serta Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Pengembangan budaya gotong royong masyarakat dimana di dalam pelaksanaannya diselenggarakan pameran/gelar karya pembangunan pada puncak acara pencahangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 42 Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 di Kab. Ngawi Pengembangan budaya gotong royong masyarakat dimana di dalam pelaksanaannya diselenggarakan pameran/gelar karya pembangunan pada puncak acara pencahangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 42

Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 di Kab. Ngawi dengan dukungan dana Bantuan Keuangan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) telah direalisasikan keseluruhan. Melalui agenda nasional ini telah dapat dipromosikan antara lain produk unggulan dari UMKM binaan SKPD dari Kab./Kota dan TP PKK se Jawa Timur dan kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan bertujuan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melihat pada orisinalitas gagasan, kreativitas, aktivitas, dan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi serta semangat swadaya gotong royong masyarakat serta terlaksananya perlombaan Desa dan Kelurahan Berhasil Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, dengan Pemenang Perlombaan masing-masing sebagai berikut:

A. TINGKAT DESA

Pemenang I : Desa Ketro, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;

Pemenang II : Desa Tawang Agung, Kec. Ampel gading,
Kab. Malang;

Pemenang III : Desa Wedani, Kec. Cerme, Kab. Gresik;

Pemenang IV : Desa Kedungsoko, Kec. Plumpang, Kab.
Tuban

B. TINGKAT KELURAHAN

Pemenang I : Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang;

Pemenang II : Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota
Kediri;

Pemenang III : Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota. Madiun;

Pemenang IV : Kel. Blandongan, Kec. Bugul, Kota Pasuruan.

c) Permasalahan dan Solusi

Dalam pengembangan komunitas masyarakat bidang kinerja sosial budaya, masih belum optimal, diantaranya belum semua Kabupaten/Kota membentuk Pokjanal Posyandu atau Pokja PMT AS, adapun yang terbentuk kelompok kerja ini masih belum berjalan secara optimal, sehingga Sistem Informasi Posyandu (SIP) belum

berjalan sesuai harapan dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan Posyandu belum berjalan maksimal. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perlu diupayakan optimalisasi kinerja pokjanal Posyandu dan Pokja PMT AS serta SIP, dengan dukungan sarana prasarana APBD Provinsi maupun Kab./Kota yang memadai, agar pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar dapat terpenuhi, sehingga mampu menciptakan generasi penerus yang lebih berkualitas.

d) Penghargaan Nasional Tahun 2014 yang diterima

- Pemenang I tingkat Nasional Perlombaan Desa dan Kelurahan Nasional Tahun 2014, yaitu Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Malang;
- Juara I Tingkat Nasional Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kategori Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Juara I Tingkat Nasional Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kategori Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

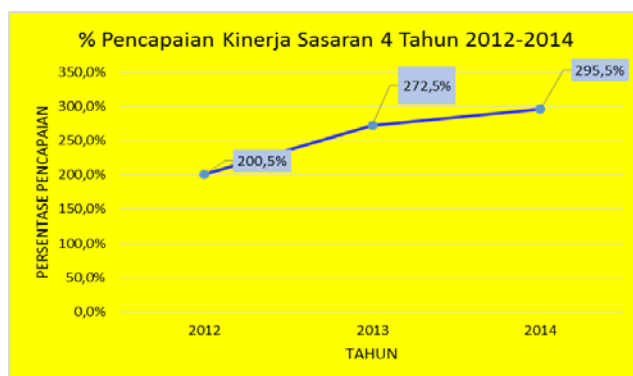
Pagu Anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 6.325.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.860.879.201,00 (92,66%), pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada matrik 16 Kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian program)

Melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dilaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta kemandirian masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Program ini mendukung pencapaian tujuan meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang dijabarkan dalam sasaran strategis terwujudnya peningkatan jumlah desa/kelurahan yang memiliki klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan di Jawa Timur. Melalui program ini telah dicapai outcome pada tahun 2014 peningkatan desa/kelurahan yang telah memiliki klasifikasi TPD/Kelurahan sebesar 70,8% (sampai dengan Tahun 2013 terdapat 3.394 desa/kelurahan yang telah memiliki klarifikasi TPD/kelurahan dan pada Tahun 2014 bertambah menjadi 5.796 desa/kelurahan). Secara signifikan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdapat peningkatan kinerja, hal ini didorong oleh fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang intens melalui kader KPM, dan kelompok-kelompok kerja (Pokja) pendataan profil desa baik di tingkat desa/kel, kecamatan, kab./kota dan provinsi selengkapnya peningkatan kinerja dapat digambarkan sebagaimana Gambar 4. berikut ini.

Gambar 4.22.1.4.
Prosentase Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2012 – 2014



Pencapaian realisasi target pada tahun ini lebih baik daripada 2 tahun sebelumnya. Pada Tahun 2012 dari target 34,5% (1170 ds/kel) telah terealisasi sebesar 69,1% (1568 ds/kel). Pada Tahun 2013 dari target 42,7% (1670 ds/kel) telah terealisasi 116,5% (3.394 ds/kel) dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi 5796 desa yang telah memiliki klasifikasi TPD/K atau meningkat sebesar 295%, selengkapnya sebagaimana Tabel 4.22.1.6 berikut ini.

Tabel 4.22.1.6
Capaian Kinerja Sasaran terwujudnya peningkatan jumlah
desa/kelurahan yang memiliki klasifikasi tingkat
perkembangan desa/kelurahan di Jawa Timur

TAHUN	2012	2013	2014
Target Kinerja	34,5% (1.170 ds/kel)	42,7% (1.670 ds/kel)	24,0% (2070 ds/kel)
Realisasi kinerja	69,1% (1.568 ds/kel)	116,5% (3.394 ds/kel)	70,8% (5.796 ds/kel)
% Capaian Kinerja	200,5%	272,5%	295,5%

Sumber ; Bappemas Prov. Jatim

Capaian kinerja yang melampaui target ini didukung sarana prasarana teknologi informasi penunjang pendataan dan pengolahan data yang ada pada setiap jenjang tingkatan, mulai dari tingkat desa/kel, Kab./Kota dan Provinsi, dan telah berfungsinya Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Profil Desa/Kel. Pengolahan data telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi dan dapat dilakukan secara online melalui website menjadi memudahkan pelaksanaan pendataan dan penyusunan profil desa/kelurahan.

Output yang mendukung pencapaian outcome tersebut antara lain : telah terlatihnya 250 Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang diharapkan dapat menjadi motivator pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan. Melalui Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Dalam Rangka Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa/Kelurahan (PKPKM) terfasilitasinya 15 UPKu pada 15 Kabupaten dan terlatihnya 150 orang untuk Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Dalam rangka penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang ada di desa telah difasilitasi melalui Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pemerintah Desa dari unsur LKMD/K sebanyak 156 orang.

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika.

25.1. Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya pelayanan informasi dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK
- 3) Meningkatnya keterbukaan informasi publik pada badan publik

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi diatas memiliki pagu sebesar Rp. 11.491.744.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.970.931.781,00 atau 95% yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program) :

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Jawa Timur yang sangat pesat, membuat semua masyarakat dan badan publik memanfaatkan TIK khususnya melalui internet. Dengan adanya pengembangan jaringan TIK internet yang pesat itu hingga ke kecamatan, diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2014, jumlah kecamatan yang tersambung jaringan internet sebanyak 55 kecamatan dengan kebutuhan bandwidth setiap kecamatan sebesar 512 kbps sehingga totalnya sebesar 28 Mbps.

Jaringan VPN SKPD Pemprov Jatim merupakan jaringan internal yang secara teknis lebih aman dibanding dengan

penggunaan jaringan internet. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) SKPD di Pemprov Jatim telah terintegrasi pada VPN dengan menggunakan media *Fiber Optic (FO)*.

Mengingat belum semua SKPD di Pemprov Jatim terkoneksi dengan jaringan Fiber Optic, maka untuk SKPD yang belum menggunakan Fiber Optic supaya dapat terintegrasi dengan VPN Pemprov Jatim digunakanlah teknologi VPNS Instan. Adapun SKPD yang menggunakan teknologi VPN Instan sebanyak 15 (lima belas).

Tabel 4.25.1.1
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprov. Jatim
yang Menggunakan Teknologi VPN Instan

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	Inspektorat Provinsi Jawa Timur
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Jatim
3	Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim
4	Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim
5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Jatim
6	Kantor Perwakilan Prov. Jatim
7	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim
8	Sekretariat KPID Prov. Jatim
9	RSU Dr. Saiful Anwar Malang
10	RSU Dr. Soedono Madiun
11	RSU Haji
12	Bakorwil Madiun
13	Bakorwil Malang
14	Bakorwil Pamekasan
15	Bakorwil Bojonegoro

Fasilitasi untuk jaringan internet tidak hanya dilakukan pada SKPD, namun juga pada kegiatan yang sifatnya temporer baik yang berskala lokal maupun nasional.

Pengendalian dan monitoring bandwidth mencakup SKPD yang telah tekoneksi dengan VPN Pemprov Jatim dengan total bandwidth internet sebesar 211 Mbps untuk SKPD Pemprov Jatim beserta besaran bandwidth. Sebagai upaya dalam memberikan

informasi terutama untuk keamanan jaringan serta monitoring bandwidth kepada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur, dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Monitoring Bandwidth dan Jaringan TIK SKPD. Kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman pentingnya keamanan jaringan serta bagaimana cara monitoring bandwidth untuk akses internet dalam menunjang kinerja pemerintahan.

Untuk Tahun 2014 telah melakukan kegiatan pemeliharaan yang terkait dengan jaringan maupun perangkat, baik yang dilakukan oleh staf teknis maupun dengan pihak ke-3. Di samping pemeliharaan di internal Dinas Kominfo Prov. Jatim, *troubleshooting* juga dilakukan di SKPD lingkungan Pemprov Jatim. Usaha peningkatan kemampuan teknis juga dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK dengan melakukan kegiatan bimbingan teknis (bimteks) dan sertifikasi profesi bagi staf teknis.

Tabel 4.25.1.2
Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi

NO.	PELATIHAN/BERSERTIFIKASI
1.	Mikrotik Essential
2.	Sertifikasi Networking (BNSP)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi

Penyebarluasan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan. Semakin terbukanya akses informasi tentang pemerintahan, maka masyarakat semakin kritis menyikapi pemerintahan termasuk politik. Tetapi, manakala pemerintahan menganggap hal tersebut merupakan ancaman bagi roda pemerintahan, maka sikap yang muncul adalah membatasi informasi kepada masyarakat. Tetapi jika pemerintah menganggap kondisi demikian adalah suatu *sparring partner* dalam menjalankan roda pemerintahan maka akan membuat aparatur pemerintahan akan terus melakukan proses pembelajaran, sehingga akses

informasi mengenai pemerintahan akan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat.

Paradigma dalam pemerintahan daerah bahwa penyebarluasan informasi mengenai pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat memang sangat diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik (*good governance*), maka proses pembelajaran antara pemerintah daerah dan masyarakat akan terbentuk dan akhirnya bersama-sama menuju masyarakat pembelajar dan membentuk keunggulan kompetitif.

Kegiatan Dinas Kominfo Prov. Jatim yakni kajian isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat yang diolah sebagai bahan masukan dan disampaikan kepada Pimpinan Pemprov. Jatim (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli dan Asisten) dalam rangka pengambilan kebijakan. Kegiatan ini adalah menyusun kajian atas pelaksanaan program pemerintah secara berkala dan komprehensif. Hasil kajian yang dilakukan sebanyak 2 kali setiap bulan ini sangat aktual, karena langsung membahas isu yang sedang berkembang di masyarakat. Materi dalam kajian isu tersebut meliputi ekonomi, politik, hukum dan kemasyarakatan yang langsung menyentuh permasalahan terkini yang dihadapi masyarakat untuk kemudian dicarikan pemecahan masalahnya melalui berbagai program pemerintah.

Kegiatan Dinas Kominfo Prov Jatim yang lain adalah kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi yakni penyebarluasan informasi melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang yang memiliki fungsi dukungan terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan di Jawa Timur. Dalam tahun 2015 memasuki era *ASEAN Economy Community*/Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), negara anggota ASEAN akan mengalami arus bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing

negara. Melalui MEA tersebut akan terjadi integrasi yang berupa *"free trade area"* (area perdagangan bebas) yang meliputi penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas yang akan memiliki dampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tiap negara.

Upaya strategis dalam menyongsong pemberlakuan MEA ini, salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang kesiapan dalam rangka menghadapi MEA 2015. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Dialog Interaktif melalui Televisi dan Radio di wilayah Jatim dan bekerjasama dengan instansi/SKPD terkait seperti Disperindag Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Kadin Jatim, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan para pelaku usaha di Jatim.

Untuk Media Luar Ruang meliputi Baliho, Spanduk, Umbul-umbul, Banner dan Balon udara. Pada tahun 2014 publikasi melalui spanduk mengalami penurunan sekitar 90,8 % dibanding tahun 2013. Karena di tahun 2013 Bidang Diseminasi mencetak 697 spanduk ucapan terima kasih atas diterimanya penghargaan Adipura Kencana dan dipasang di Seluruh Kecamatan di Jatim. Umbu-umbul juga mengalami penurunan di tahun 2014, karena di tahun 2013 ada kegiatan Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertempat di Sumenep, sehingga banyak dilakukan pemasangan umbul-umbul.

Sementara media luar ruang dalam bentuk banner tahun 2014 mengalami kenaikan sekitar 71 % (215 buah), karena pada peringatan Hari Jadi tahun 2014 dilakukan pemasangan banner di sepanjang jalan-jalan protokol untuk menyemarakkan Hari Jadi Jatim.

Adapun kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas pelayanan informasi dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.25.1.3
Pelayanan Informasi Tahun 2012 – 2014

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1.	Pengembangan Infrastruktur TIK pada Unit Kerja Pemprov dan Kab./Kota				
	Koneksi jaringan infrastruktur Tk. Kecamatan di Jatim	kecamatan	60	55	55
	Koneksi jaringan internet bakorwil	bakorwil	4	4	4
	Kegiatan rapat evaluasi jaringan TIK kecamatan	kali	-	1	1
2.	Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK				
	Koneksi jaringan FO antar unit kerja dan SKPD Pemerintah Prov. Jatim	SKPD/ unit kerja	38 dan 18	32 dan 10	32 dan 10
	Rangka fasilitasi NOC keliling	kali	-	12	12
3.	Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan pada Unit Kerja Pemprov				
	Kegiatan sosialisasi monitoring bandwith	SKPD	30	45	45
	Pengendalian bandwith	Unit kerja	11	15	15
4.	Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras				
	Kebutuhan jaringan TIK	SKPD/ unit kerja	38 dan 18	45 dan 15	45 dan 15
	Pemeliharaan infrastruktur TIK	kali	6	9	6
	Rangka setting/monitoring jaringan	kali	15	12	2
5.	Fasilitasi Teknis Tik Aparatur Pemprov. Jatim dan Kab./Kota				
	Layanan TIK di lingkungan Pemprov. Jatim	kali	6	4	4

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
6.	Kajian Issue Aktual				
	Bahan rekomendasi untuk penyusun kegiatan	kegiatan	24	24	24
7.	Penyebarluasan Informasi melalui Media				
	Media elektronik :				
	Jatim online	News	5280	6600	7200
	Radio	Kali	34	34	36
	Televisi	Kali	48	30	47
	Iklan Layanan Masyarakat	Kali	2	2	8
	Media Cetak :				
	Majalah/Tabloid	Expl	6000	6000	6000
	Leaflet	Buah	2000	2000	2000
	Media luar ruang :				
	Sosialisasi PPID	Kali	2	2	-
	Spanduk	Buah	240	750	69
	Baliho	Buah	69	50	57
	Umbul-umbul	Buah	-	400	42
	Balon udara	Buah	2	2	2
	Backdrop	Buah	-	3	-
	Banner	Buah	100	300	515
8.	Workshop dan Sosialisasi di Bidang Telematika				
	Rangka sosialisasi TIK bagi aparatur pemerintah	Kali	1	1	1
	Rangka workshop TIK	Kali	9	9	4
9.	Pemberdayaan lembaga kehumasan pemerintah/bakohumas				
	Pertemuan bakohumas	Kali	4	5	4
	Literasi media	Kali	-	1	1
10.	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat				
	Pekan KIM	Kali	-	1	-
	Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCKK)	Kali	4	4	4
	Panggung sosialisasi	Kali	4	4	-
	Jumlah KIM	kelompok	752	1047	1019
11.	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Forum Koordinasi Media Tradisional (FK Metra) dan Pemberdayaan Media Tradisional				
	Ngopi Bareng Pak De	Kali	12	12	12
	Pembinaan Pertunjukan Rakyat	Kali	4	1	2
	Forum koordinasi media tradisional	Kali	-	1	-
	Gelar Media	Kali	-	1	-

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
12.	Fasilitasi Komisi Informasi Publik (KIP)				
	Forum komunikasi dan sosialisasi	Kali	6	1	1
	Forum informasi dan akuntabilitas	Kali	1	1	1
	Focus group discussion	Kali	4	2	2
	Forum komunikasi PPID	Kali	2	1	2
	Press and gathering	Kali	2	4	2
	Interaktif melalui televisi dan radio	Kali	12	16	12
	Jumpa pers dan mediasi, adjudikasi non litigasi terhadap keterbukaan informasi publik	Kali	2	6	3
	Keterbukaan Informasi	kali	1	1	1
	Bimbingan Teknis PPID	Kali	1	1	1
	Rakor PPID se Jatim	Kali	1	1	1
	Rapat Monitoring dan Evaluasi	Kali	1	1	1
	PPID Award	kali	1	1	1

Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim

Kegiatan lainnya yakni Pertemuan Bakohumas yang merupakan forum diskusi dan sharing informasi antar pejabat humas instansi pemerintah di lingkup Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut permasalahan yang menjadi topik bahasan adalah isu-isu tertentu yang dilaksanakan di berbagai tempat anggota Bakohumas secara bergiliran.

Kegiatan Pertemuan Bakohumas ini dilaksanakan sebagai bentuk pencerdasan Aparatur Pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan media, karena pejabat kehumasan merupakan ujung tombak institusi dalam berhadapan dengan media. Agar dapat dengan cermat merancang program strategis kemitraan dengan media, maka kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bakohumas bagi seluruh pejabat humas seluruh institusi di Jawa Timur yang tergabung dalam Bakohumas Jawa Timur.

Kegiatan lainnya adalah Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yakni salah satu upaya pemberdayaan KIM adalah melalui kegiatan Workshop TIK bagi KIM sebagai sarana peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengolah, menyebarkan dan mengkonsumsi informasi, karena KIM merupakan agen penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Meningkatnya arus informasi dan teknologi, memberikan peluang dan hambatan bagi KIM sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi di wilayahnya, sehingga membutuhkan adanya pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke dalam suatu organisasi yang lebih besar ke dalam FORUM KIM Jawa Timur agar lebih berdaya guna dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi di Jawa Timur. Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diadakan tahun 2 (dua) sekali dan merupakan agenda kegiatan Dinas Kominfo Prov Jatim secara rutin. Panggung sosialisasi sebagai kegiatan pendukung Pekan KIM dilaksanakan dalam tahun 2015, oleh karena itu panggung sosialisasi pada tahun 2014 tidak dilaksanakan.

Kegiatan Temu Wicara KIM se Jawa Timur Tahun 2014 diikuti oleh 1 (satu) orang anggota KIM dan Pembina KIM Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai langkah awal persiapan penyelenggaraan Pekan KIM tahun 2015. Pada tahun 2014 salah satu aktivitas KIM yakni telah dilaksanakan kegiatan Lomba Cerdik Cermak Komun ikatif (LCKK) tingkat Bakorwil se Jawa Timur yang diawali dengan kegiatan verifikasi administrasi peserta lomba di 4 (empat) Bakorwil. Pemenang dari hasil LCKK tingkat Bakorwil ini akan maju dalam Grand Final LCKK di tingkat Provinsi pada Pekan KIM tahun 2015 yang direncanakan di Kabupaten Nganjuk.

Dinas Kominfo Prov Jatim ikut dalam Festival Pertunjukan Rakyat pada tahun 2014 di kota Padang Provinsi Sumatra Barat, sehingga pada tahun 2013 diadakan kegiatan Forum koordinasi media tradisional dan kegiatan gelar media sebagai persiapan keikutsertaan Festival Pertunjukan Rakyat pada tahun 2014.

Kegiatan lainnya adalah Festival Pertunjukan Rakyat, yakni seni media tradisional pertunjukan rakyat (pertura) yang merupakan media penyebarluasan informasi berbasis kesenian rakyat. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan Workshop Pertura sebanyak dua kali yakni pada Pekan Informasi Nasional (PIN) yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Dinas Kominfo ikut berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan PIN tersebut antara lain Forum Bakohumas Regional Barat, Sarasehan KIM tingkat Nasional dan Festival Pertura Tingkat Nasional. Dalam festival Pertura Nasional tersebut, Provinsi Jawa Timur meraih Juara Harapan II.

Kegiatan Dinas Kominfo Prov Jatim lainnya adalah Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jatim tahun 2014 terhadap Badan Publik/SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur pada umumnya cukup baik. Meskipun belum semua Badan Publik menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban mereka untuk menampilkan keterbukaan informasi pada situs resmi (website), namun sejumlah badan publik pemerintah sudah menunjukkan kinerja cukup menggembirakan.

Dalam rangka PPID Award, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 melakukan kegiatan evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur

maupun Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang penilaiannya melalui tahapan antara lain :

1. Pemberitahuan rencana evaluasi Badan Publik melalui Forum Komunikasi dan Bimtek PPID
2. Evaluasi Awal/Supervisi : Administrasi
3. Menentukan Nominator
4. Evaluasi lanjutan : Website dan Layanan Informasi
5. Pengumuman Hasil Evaluasi.

Akhir tahun 2014, PPID di Jatim (Provinsi dan Kab/Kota) sudah terbentuk mencapai 100 persen. Pada tahap evaluasi awal, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan langsung pada PPID/Badan Publik SKPD Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur seberapa jauh dalam mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang meliputi: keberadaan SK PPID, SK Atasan PPID, SK Atasan PPID, Struktur PPID, SOP, DIP, Meja Layanan Informasi, Administrasi PPID/Atasan PPID dan Regulasi (Khusus Kab/Kota).

Dalam kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan PPID, secara kualitas sudah meningkat dalam hal layanan informasi. Beberapa SKPD telah memberikan layanan yang memenuhi standar layanan informasi sebagaimana diamanatkan dalam UU KIP maupun Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pada tahap evaluasi lanjutan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian dengan cara peninjauan mendadak melalui Mysterious Guest yakni melihat seberapa jauh pelayanan terhadap pemohon informasi dan melakukan penilaian website resmi Badan Publik. Dalam penilaian website, Komisi Informasi melakukan evaluasi terhadap informasi publik sebagaimana amanat dalam pasal 9 UUI KIP yakni Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, pasal 10

tentang Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta, pasal 11 tentang Informasi yang Wajib tersedia setiap saat, dan pasal 12 tentang kewajiban Badan Publik mengumumkan layanan informasi setiap tahun serta Informasi Pengecualian sebagaimana pasal 6 dan 17.

Pada tingkat Kabupaten/Kota perkembangan PPID pada tahun 2014 Kab/Kota sudah semuanya membentuk PPID. Hasil evaluasi dari Kabupaten/Kota yang sudah membentuk PPID, sekitar 15 persen Badan Publik yang memasukkan data di website sesuai standar sebagaimana amanat pasal 9 UU KIP junto pasal 11 Perki No 1 Tahun 2010.

Dalam upaya meningkatkan kualitas PPID, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mendorong agar kewajiban Badan Publik yang dilaksanakan PPID terus ditingkatkan kualitasnya dalam hal memberikan layanan informasi yang memberi peluang masyarakat berperan aktif dalam proses kebijakan publik sesuai dengan standart peraturan perundang-undangan yang ada.

Peningkatan kualitas PPID ini sangat diperlukan guna mengurangi timbulnya sengketa informasi. Selama tahun 2014, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sejumlah 161 kasus dengan rincian sebagai berikut :

- Penanganan kasus sampai pada tahap Putusan Mediasi sejumlah 71 kasus (44 %),
- Sampai pada tahap Putusan Ajudikasi sejumlah 35 kasus (22 %),
- Sengketa Informasi dalam proses sejumlah 55 kasus (34 %),
- Sengketa Informasi dikembalikan sejumlah 2 kasus (1%),
- Sengketa Informasi dilimpahkan sejumlah 0 kasus (0 %).

Secara garis besar program Komisi Informasi Provisnsi Jawa Timur dalam menjalankan amanat UU KIP terbagi dalam 3 bidang. Pertama, Bidang Kelembagaan, dengan Program :

Konsolidasi Program, Penguatan PPID KI Jatim, Penguatan Kelembagaan PPID Badan Publik, Akuntabilitas Publik, Studi Banding, PPID Award, Monev PPID, Peningkatan Fasilitas PPSI, dan Kerjasama AIPD. Kedua, Bidang Sosialisasi dan Edukasi, dengan Program: Sosialisasi Media Massa, Edukasi Publik, Monev Badan Publik, dan Right to Know Day (Peringatan Hari Hak untuk Tahu). Ketiga, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, dengan Program: Penguatan Kapasitas SDM dan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Namun pada tahap awal hasil evaluasi KIP Jatim di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur masih belum menggembirakan, mengingat pada tahun 2013 baru 36 Kabupaten/Kota sudah membentuk PPID, dan tinggal 2 kab/kota yang belum membentuk PPID. Pada Tahun 2014 hasil evaluasi KIP Jatim di kabupaten/kota telah terbentuk PPID sebanyak 38 kabupaten/kota, sehingga dalam tahun 2014 tidak ada kegiatan Sosialisasi pada PPID kabupaten/kota Se-Jatim.

Seiring dengan berakhirnya anggota KIP Masa Bhakti 2010-2014 maka pada bulan Januari s/d Agustus 2014, telah dilaksanakan rekrutmen Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur Masa Bhakti 2014-2018 dengan tahapan : Pembentukan Panitia Tim Seleksi dan Panitia Pembantu Tim Seleksi, Pengumuman Pendaftaran melalui media cetak maupun elektronik dan website www.jatimprov.go.id, Seleksi Administrasi, Ujian Tertulis, Pelaksanaan Tes Psikologi, Uji Publik, hingga Fit and Proper Test dan Hasil Pengumuman Anggota terpilih sebanyak sebanyak 5 (lima) orang Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/463/KPTS/013/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, dan telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Bpk. H. Soekarwo terhadap 5 Anggota KIP Jawa Timur Masa Bhakti 2014-2018 yakni Dra. Isrowi Farida M.Si, Ketty Tri Setyorini, SS, M.Si, Dra. Zulaikha, M.Si, Mahbub Junaidi, SS, Wahyu Kuncoro, SIP, M.Si, MIP.

c) **Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah**

Permasalahan

- Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika khususnya wilayah miskin/blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK). Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi;
- Tidak adanya lembaga penyebar informasi publik yang bersifat struktural hingga jajaran tingkat pemerintahan kecamatan;
- Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan Komunikasi dan Informatika. Serta Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang masih terbatas.
- Kemampuan dari Sumber Daya Manusia kurang merata sehingga berpotensi mengganggu jalannya aktivitas kantor terutama yang berhubungan dengan jaringan.
- Dalam rangka penerapan e-Government Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum mempunyai Rencana Strategi Sistem dan Teknologi Informasi (IT Master Plan), yang belum adanya kebijakan mengikat yang mengatur Tata Kelola TIK di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Solusi dari permasalahan

- Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat;
- Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Jatim dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan;
- Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi untuk masyarakat umum guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi;
- Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- Menetapkan Master Plan TIK sebagai payung hukum pengelolaan TIK

d) Penghargaan Nasional Tahun 2014 yang Diterima :

- Penghargaan pada Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional meraih Juara Harapan II, dalam Rangka Pekan Informasi Nasional Tahun 2014 dari Menteri Komunikasi dan Informasi pada tanggal 25 Mei 2014 di Padang
- Penghargaan pada acara Penganugerahan Antara Award Tahun 2014, pada tanggal 18 Desember 2014 di Auditorium Adhiyana Wisma Lantai 2 jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta Pusat

2. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi

a) Pagu dan realisasi anggaran

Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi memiliki pagu sebesar Rp. 550.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 512.425.100,00 atau 93% yang secara rinci masing-masing realiasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan

Perkembangan pemanfaatan website dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, sampai dengan akhir tahun 2014 dari sudah memiliki 59 SKPD yang mempunyai website. Untuk perkembangan Pemerintah Kab/kota se Jatim dari 38 kab/kota sudah semuanya memiliki website sebanyak 38 kab/kota.

Penggunaan nama domain go.id juga sudah dilakukan sebagian besar SKPD, dari 59 website SKPD ada 56 website telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain go.id. Untuk SKPD yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 sebanyak 3 website SKPD pada tahun 2014. Pada tahun 2013 dari 59 website

SKPD ada 51 website yang memenuhi ketentuan dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 8 website SKPD

Jumlah pengunjung website www.jatimprov.go.id rata-rata 13.056.924 pengunjung pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 13.164.555 pengunjung. Untuk jumlah pengunjung website kominfo-jatimprov.go.id rata-rata 10.027.772 pengunjung pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 9.684.765 pengunjung.

Tabel 4.25.1.4
Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan
Teknologi Informasi Komunikasi Tahun 2012 – 2014

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1.	Pengembangan Pengelolaan Website Pemprov				
	Rangka pengembangan pengelolaan website Pemprov	kali	4	4	4
	Pengelolaan website Pemprov	kali	12	12	12
2.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK				
	Bertambahnya masyarakat yang paham TIK	kali/peserta	360	413	400

Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah :

Permasalahan

- Masih ada beberapa SKPD yang belum memiliki website
- Masih kurangnya bimbingan teknis mengenai website terhadap SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim.
- Pengelolaan website di kabupaten/kota dari data yang terkumpul, belum seluruhnya menerapkan fungsi pelayanan Government to Government, Government to Business dan Government to Citizen. Sementara SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam fungsi pelayanan yang bersifat Government to Government, Government to Business dan Government to Citizen, sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Upaya pemecahan masalah

- Update data dan informasi website www.jatimprov.go.id dan kominfo.jatimprov.go.id serta update aplikasi website www.jatimprov.go.id
- Memberikan bimbingan teknis pengelolaan website dan melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan website
- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait SKPD, kabupaten/kota di Jawa Timur.

3. Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program tersebut memiliki pagu sebesar Rp. 4.303.900.000,00 Terealisasi sebesar Rp. 4.017.858.665,00 atau 93% yang secara rinci masing-masing realiasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program):

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi peluang dalam meningkatkan kapasitas masyarakat diberbagai bidang, diantaranya sebagai instrumen peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola potensi dan sumberdaya lokal yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat. Untuk kegiatan Sosialisasi standardisasi perangkat telekomunikasi pada tahun 2014 menjadi kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana pitalebar Indonesia 2014-2019.

Kondisi geografis, tingkat pendidikan dan penghasilan masyarakat serta kurangnya pengetahuan akan potensi teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan munculnya permasalahan kesenjangan digital dan kesenjangan informasi. Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak merata.

Beberapa sektor telah memanfaatkan dan berkembang dengan baik, tetapi di sektor lain belum berkembang terutama di wilayah pedesaan.

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2014 di Jawa Timur telah memiliki 39 Telecenter yang dibentuk dan dibiayai APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada awalnya telecenter oleh Telecenter Semeru di Kabupaten Lumajang dibiayai oleh UNDP dan BAPPENAS kecuali Telecenter Semeru di Kabupaten Lumajang dibiayai oleh UNDP dan BAPPENAS. Selain itu, terdapat 2 Telecenter yang dibiayai APBD Kabupaten, yaitu Telecenter Sakti di Kabupaten Malang dan Telecenter Meteor di Kabupaten Tuban. Dengan demikian jumlah Telecenter di Jawa Timur seluruhnya berjumlah 41 Telecenter .

Adapun tujuan telecenter adalah pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang melalui peningkatan kemampuan memperoleh dan menyebarkan informasi berbasis teknologi informasi komunikasi.

Sedangkan sasarannya : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang kewirausahaan, kesehatan dan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, berdemokrasi dan pembangunan; Meningkatnya komunikasi dialogis dan kerjasama antar kelompok masyarakat, masyarakat dengan pemerintah maupun dengan dunia usaha; Mengurangi keterisolasian dan kesenjangan digital;

Tahapan pengembangan telecenter meliputi :

- Penyiapan tempat, infrastruktur pokok dan sarana pendukungnya
- Penguatan manajemen pengelolaan
- Penyiapan bahan pemberdayaan, pelatihan dan pelayanan
- Penyiapan peresmian dan sosialisasi
- Pemberdayaan dan diskusi

- Pelatihan dan pelayanan Telecenter untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi kelompok masyarakat
- Dokumentasi dan pencatatan hasil kegiatan
- Evaluasi dan pelaporan kegiatan

Tabel 4.25.1.5
Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Tahun 2012 - 2014

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi				
	Meningkatnya tertib administrasi perijinan pelenggaraan pos, stardardisasi perangkat dan tersedianya data menara telekomunikasi, serta evaluasi hasil pengawasan dan penertiban	Kab/kota	16	12	12
2	Pembinaan Bidang Pos dan Filateli				
	Sosialisasi penyelenggara Pos dan Filateli	kali	2	2	1
	Evaluasi penyelenggara pos dan filateli	kali	6	4	4
	Bertambahnya pengetahuan mengenai filateli serta terwujudnya serta terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pos	Orang	50	175	75
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Hardware dan Software, Layanan Hosting dan Colocation				
	Meningkatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan e-gov di jatim	Hosting dan colocation	44	143	212

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
4	Pembinaan Bidang Telekomunikasi				
	Pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika	Kegiatan	4	4	4
	Sosialisasi implementasi TV digital dan workshop	Kali	1	1	1
	Sosialisasi standardisasi perangkat telekomunikasi	Kali	1	1	1
5	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter				
	Pembangunan telecenter baru	telecenter	7	2	1
	Peningkatan pemahan dan ketrampilan masyarakat terdapat TIK melalui pemanfaatan telecenter di daerah	Kab/kota	38	38	38
	Pembinaan telecenter lama	telecenter	29	36	38
	Pelatihan pengutan teknis telecenter lama	telecenter	31	36	38
	Pelatihan pengutan manajemen telecenter lama	telecenter	31	36	38
	Pembina telecenter dan pengelola telecenter lama	kali	1	1	1
	Pelatihan teknis pengelola telecenter baru	kali	1	1	2

Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah :

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek)
- Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang masih terbatas.

Upaya pemecahan masalah

- Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat.
- Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk masyarakat umum guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi.
- Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program tersebut memiliki pagu sebesar Rp. 3.451.136.000,00 Terealisasi sebesar Rp. 3.218.888.948,00 atau 93%. Secara rinci masing-masing realiasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program) :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk melayani masyarakat dengan memberikan berbagai informasi terkait program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan itu diharapkan terbangun partisipasi masyarakat Jawa Timur dalam setiap upaya memajukan pemerintahan dan pembangunan serta mensejahterakan masyarakat Jawa Timur.

Selama tiga tahun terakhir perkembangan jumlah pengaduan pada tahun 2012 sebanyak 995 pengaduan menurun menjadi 969 pengaduan pada tahun 2013 pada tahun 2014 juga mengalami

penurunan menjadi 557. Penurunan ini memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur seperti rincian sebagai berikut :

Tabel 4.25.1.6
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tahun 2012 - 2014

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1.	Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat :				
	- Fasilitasi Ajang Wadul di TVRI Jawa Timur	Pengaduan	995	969	826
	- Pengelolaan informasi publik	kali	3	12	12
	- Forum Group Diskusi PPID	kali	1	6	6
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan				
	Koordinasi dan sinkronisasi program dengan kab/kota se jatim	Kab/kota	38	38	38
	Penyusunan renja tahunan	kali	1	1	1
	Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan Diskominfo	Kali	1	1	-
3.	Monitoring dan Evaluasi Program				
	Tersediannya dokumen laporan sebagai bahan evaluasi bidang kominfo	Program/ kegiatan	33	33	5

Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim

Penurunan jumlah angka pengaduan pada tahun 2014 atau kurang lebih 4% merupakan bukti tindak lanjut program kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung 4 strategi yaitu *Pro Growth, Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment*.

Dengan adanya penyelenggaraan acara Ajang Wadul ini memberikan dampak positif terhadap penyebarluasan informasi atas segala keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Jawa Timur dengan dipublikasikannya/ sosialisasi program dan kegiatan yang terkait dari masing-masing SKPD.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah :

Permasalahan

- Belum semua pengaduan masyarakat yang masuk pada acara Ajang Wadul bisa dijawab secara langsung dikarenakan jam tayang hanya 1 (satu) jam.
- Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespon pengaduan masyarakat melalui forum Ajang Wadul, akan tetapi sering dijawab secara langsung ke penanya/pengadu (masyarakat) pada saat acara berlangsung, sehingga masih ada 27 pengaduan masyarakat yang tidak direspon dengan baik oleh SKPD. Narasumber yang hadir pada saat acara Ajang Wadul masih dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan IV sehingga masih kurang maksimal dalam pemaparan program kegiatan yang terkait pada saat disampaikan ke publik.
- Kurangnya dukungan dari anggaran sehingga kegiatan Ajang Wadul masih belum optimal, diharapkan tahun berikutnya dapat memberikan suport yang lebih besar sehingga hasil-hasil dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan dengan adanya acara Ajang Wadul bisa memberikan pelayanan terkait penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat.
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jatim sebagai akibat dari perbedaan nomenklatur yang menangani Kominfo di tiap-tiap kabupaten/kota.

Upaya pemecahan masalah

- Jumlah acara Ajang Wadul dalam 1 bulan agar di tambah serta jam tayang, sehingga pelayanan informasi publik lebih optimal.
- Penanganan pengaduan masyarakat akan dioptimalkan selain melalui surat menyurat yang berlangsung bersentuhan dengan SKPD terkait, BUMN/BUMD serta adanya layanan melalui website.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan nomenklatur yang sama karena lembaga/instansi yang menangani urusan pemerintahan bidang Kominfo di kabupaten/kota masih berstatus bagian dalam rangka memudahkan koordinasi pembangunan dan pengembangan bidang Kominfo.

d) Penghargaan Nasional Tahun 2014 yang Diterima :

- Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Provinsi Tahun 2014 Peringkat ke-10 dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang diberikan pada acara Anugerah Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2014 pada tanggal 12 Desember 2014 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Kebun Sirih No. 14 Jakarta
- Kategori " B Plus" dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 yang diberikan pada saat penilaian SAKIP Tahun 2014 pada tanggal 1 Oktober 2014 di Surabaya

25.2. SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JATIM

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya jumlah surat rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan tepat waktu
- 2) Meningkatnya jumlah lembaga penyiaran yang memperoleh ijin penyiaran
- 3) Menurunnya jumlah pelanggaran isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran
- 4) Meningkatnya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 3.266.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.172.723.047,00 atau sebesar 97,13%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Selama tahun 2014 selain dipergunakan sebagai peningkatan kinerja SKPD juga untuk penataan dokumen penyiaran dan tata arsip kesekretariatan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai;
- Masih kurang tertibnya administrasi kesekretariatan;
- Pengelolaan arsip baik hardcopy maupun softcopy masih belum optimal;
- Masih terbatasnya tingkat kemampuan pegawai terutama mengenai penyiaran dan teknologi informasi;
- Pengolahan data terutama tentang Data Penyiaran masih belum optimal.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi

- Memberikan motivasi dengan melakukan pembinaan;
- Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data secara bertahap;
- Melakukan penataan arsip secara bertahap.

2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.280.000,00 atau sebesar 98,56%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan tahun ini diperuntukkan untuk menyediakan infrastruktur guna membantu KPID Jatim dalam melaksanakan tugasnya dengan baik menggunakan perangkat berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Ketersediaan data masih belum mencukupi/memadai untuk pengisian sistem yang diperlukan.

Solusinya

Dilakukan pengisian data secara bertahap.

3) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.931.061.252,00 atau sebesar 97,70%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Sebagai SKPD yang tugas, pokok dan fungsi secara garis besar memberikan fasilitasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai lembaga independen yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajibannya antara lain menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, menetapkan dan menyusun standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran serta mengawasi pelaksanaannya, menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesionalitas di bidang penyiaran. Dari wewenang, tugas dan kewajiban yang dilakukan adalah menerbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan kepada lembaga penyiaran yang mengurus perijinan, melakukan pengawasan terhadap isi/conten siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, melakukan bimbingan teknis pada lembaga penyiaran, menindak lanjuti aduan dari masyarakat, serta melakukan sosialisasi peraturan perundangan dibidang penyiaran, dan sebagainya.

Tahun ini (2014) Surat Rekomendasi Kelayakan yang diterbitkan sebanyak 28 Surat dengan capaian kinerja 5,97% dari 30% Rekomendasi Kelayakan yang ditargetkan.

Untuk tahun ini (2014) Sanksi administrasi yang dikeluarkan sebanyak 53 surat pemanggilan dengan 47 lembaga yang menindaklanjuti pemanggilan (klarifikasi) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,68% dari 100% target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk pengaduan masyarakat tahun 2014 ini sebanyak 31 pengaduan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 31 tindaklanjut dengan capaian kinerja 100% dari 100% yang ditargetkan.

Dibandingkan dengan tahun 2013 Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan mengalami penurunan hal ini disebabkan karena

adanya perubahan peraturan di bidang penyiaran. Untuk klarifikasi pelanggaran mengalami penurunan capaian kinerja karena lembaga penyiaran tidak menghadiri klarifikasi, hal ini akan tetap ditindaklanjuti dengan pemanggilan berikutnya.

Adapun data-data dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25.2.1

Rekomendasi Kelayakan yang diterbitkan pada tahun 2013

URAIAN	TAHUN 2013				KET.
	Yang dikeluarkan	% CAPAIAN KINERJA			
		Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan	Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP)		
			Target	Realisasi	
Tanda Terima	67				
Rekomendasi Kelayakan	61	91,04%	30%	5,97%	

Tabel 4.25.2.2

Rekomendasi Kelayakan yang diterbitkan pada tahun 2014

URAIAN	TAHUN 2014				KET.
	Yang dikeluarkan	% CAPAIAN KINERJA			
		Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan	Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP)		
			Target	Realisasi	
Tanda Terima	89				
Rekomendasi Kelayakan	28	31,46%	45%	5,62%	

Tabel 4.25.2.3

Sanksi Administrasi (Klarifikasi) yang dikeluarkan pada tahun 2013

URAIAN	TAHUN 2013			KET.
	YANG DIKELUARKAN	% CAPAIAN KINERJA		
		Target	Realisasi	
Surat Pemanggilan	111			
Klarifikasi terhadap Surat Pemanggilan	106			
Tindak Lanjut terhadap pelanggaran isi siaran yang disiarkan		100%	95,50%	

Tabel 4.25.2.4

Sanksi Administrasi (Klarifikasi) yang dikeluarkan pada tahun 2014

URAIAN	TAHUN 2014			KET.
	YANG DIKELUARKAN	% CAPAIAN KINERJA		
		Target	Realisasi	
Surat Pemanggilan	53			
Klarifikasi terhadap Surat Pemanggilan	47			
Tindak Lanjut terhadap pelanggaran isi siaran yang disiarkan		100%	88,68%	

Tabel 4.25.2.5

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk pada tahun 2013

URAIAN	TAHUN 2013			KET.
	YANG MASUK	% CAPAIAN KINERJA		
		Target	Realisasi	
Pengaduan Masyarakat	39			
Pengaduan yang ditindak lanjuti	39	100%	100%	

Tabel 4.25.2.6

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk pada tahun 2014

URAIAN	TAHUN 2014			KET.
	YANG MASUK	% CAPAIAN KINERJA		
		Target	Realisasi	
Pengaduan Masyarakat	31			
Pengaduan yang ditindak lanjuti	31	100%	100%	

Tabel 4.25.2.7

Data Lembaga Penyiaran Jawa Timur Tahun 2014**Lembaga Penyiaran Televisi**

Jenis Lembaga Penyiaran	Tahun 2014			Keterangan
	Dalam Proses Pengurusan Perizinan (Tts, Va, Vf, Pra Edp & Edp)	Rekomendasi Kelayakan (Rk)	Yang Telah Berizin (Ipp)	
Lps - Tv Lokal Analog	12	12	21	
Lps - Tv Lokal Analog Terrestrial	8	0	0	

Jenis Lembaga Penyiaran	Tahun 2014			Keterangan
	Dalam Proses Pengurusan Perizinan (Tts, Va, Vf, Pra Edp & Edp)	Rekomendasi Kelayakan (Rk)	Yang Telah Berizin (Ipp)	
Lps - Tv Ssj	31	0	1	
Lppl - Tv	1	1	0	
Lpk - Tv	5	0	1	
Lpb - Tv	8	8	19	
Lps - Tv Digital	0	0	2	
Lps - Tv Digital Terrestrial	52	0	0	
Total	117	21	44	

Tabel 4.25.2.8
Lembaga Penyiaran Radio

Jenis Lembaga Penyiaran	TAHUN 2014			Keterangan
	Dalam Proses Pengurusan Perizinan (TTS, VA, VF, PRA EDP & EDP)	Rekomendasi Kelayakan (RK)	Yang Telah Berizin (IPP)	
LPS - Radio	54	45	179	
LPPL - Radio	15	6	11	
LPK - Radio	237	62	45	
TOTAL	306	113	235	

Tabel 4.25.2.9

DATA LEMBAGA PENYIARAN JAWA TIMUR YANG DIPANTAU TAHUN 2014

NAMA KABUPATEN/KOTA	NAMA LEMBAGA PENYIARAN (TV)
Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sbo Tv 2. Rtv 3. Kompas Tv 4. Tv 9 5. Arek Tv 6. Net Tv 7. Jtv 8. M&H Tv 9. Surabaya Tv 10. Bbs Tv 11. Tvri Jatim 12. Metro Tv Jatim 13. Mnc Tv Jatim
PACITAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jitu Pacitan Tv / Pacitan Tv

NAMA KABUPATEN/KOTA	NAMA LEMBAGA PENYIARAN (TV)
KEDIRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jtv Kediri 2. Tv Anak Kediri 3. Ks - Tv 4. Inspirasi Tv Kediri (Sigi Tv) 5. Dhoho Media Tv
BATU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tv Anak Kota Malang 2. Dhamma Joti Tv 3. Batu Tv 4. Agropolitan Tv / Atv
MALANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nusantara Damai / Nd Tv 2. Malang Tv 3. Jannah Batu Tv / Jtv Malang 4. Syiar Media / Cr Tv 5. Mega Vision 6. Malang Kabel Tv / Skynindo Tv 7. Ub Tv
BOJONEGORO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bojonegoro Lintas Network/B-One 2. Matoh Tv/ Jtv Bojonegoro
MADIUN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madiun Sakti / Madiun Tv 2. Jati Magetan Tv / Jtv Madiun 3. Tv Anak Madiun 4. Anugrah Madiun Kabel / Centro Tv
JEMBER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plus Media Tv 2. Saluran Bintang Cemerlang / Sbc Tv 3. Tv Anak Jember 4. Jember Mutiara Nunggalresti / Jm Tv 5. Jujur Jember Tv / Jtv
BANYUWANGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duta Media Entertainment 2. Jago Banyuwangi Tv / Jtv 3. Media Visual Banyuwangi
PAMEKASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hikmah Multivision 2. Jumlah Sumenep Tv / Jtv
SUMENEP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaber Azeze Mediatel / Madura Channel

Tabel 4.25.2.10
Data Monitoring Atau Pengawasan Isi Siaran Tahun 2013 - 2014
Tiap Kali Tayang

URAIAN	2013	2014	KETERANGAN
Kekerasan	695	356	Hasil Monitoring Isi Siaran dari 47 lembaga penyiaran televisi yang dipantau dari sejumlah 65 lembaga penyiaran televisi yang ada (yang sudah mengantongi ijin IPP dan RK)
Merokok	164	47	
Pornografi	606	317	
Kata-kata Jorok	181	160	
Pemilu	-	51	
Mistik	6	4	
Minum-minuman Keras	75	18	

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Sarana Prasarana yang ada dalam mendukung kegiatan utama (Pengawasan Isi/Conten Siaran) belum menjangkau disemua titik layanan dan masih pada lembaga penyiaran televisi, yaitu masih dilakukan di 8 (delapan) titik layanan dengan pemantauan pada 47 lembaga penyiaran televisi;
- Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk pengawasan isi/conten siaran pada lembaga penyiaran radio masih belum ada (belum punya alat monitoring);
- Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan masih kurang sesuai dengan perencanaan;

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, dengan :

- Melakukan dan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan utama penyiaran (alat monitoring) secara bertahap;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
- Melakukan Real Time schedule.

26. URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pembangunan bidang kearsipan ditujukan untuk meningkatkan SDM pengelola kearsipan dan sistem tertib administrasi kearsipan di Jawa Timur dan meningkatkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna.

26.1. BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

URUSAN KEARSIPAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya sistem administrasi kearsipan dan pengembangan SDM kearsipan;
- 2) Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip;
- 3) Meningkatnya masyarakat sadar arsip

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan sebesar Rp. 3.833.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.750.664.514,00 atau 97,83%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sejak 2012 – 2014 dapat dilihat dari rincian berikut.

Tabel 4.26.1.1

**Realisasi Indikator Kinerja Utama Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur tahun 2012 – 2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi			Capaian Tahun 2014 %
			Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	
Pengembangan jumlah	- Jumlah peraturan / pedoman	2 ranca ngan	2 ranca ngan	2 ranca ngan	2 ranca ngan	100 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi			Capaian Tahun 2014 %
			Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	
SDM Kearsipan dan meningkatnya sistem tertib administrasi kearsipan yang digunakan oleh unit kerja	standar kearsipan					
	- Jumlah kegiatan dan peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan	6 kali / 349 orang	4 kali / 366 orang	6 kali / 756 orang	6 kali / 389 orang	100 %
	- Jumlah unit kerja yang mendapatkan pendampingan dan yang menerapkan sistem kearsipan	69 unit kerja	50 unit kerja	62 unit kerja	69 unit kerja	100 %

Sumber : *Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya program kerja 2014, Rencana Strategis 2014-2019, Rencana Kerja Tahun 2015
- Laporan Program dan Kegiatan Tahun 2013, Laporan Kinerja 2013
- Tersusunnya 2 (dua) Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Standar Pengelolaan Arsip Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Rancangan Peraturan Daerah Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- Bimbingan Teknis Kearsipan (4 kali) dengan peserta sebanyak 235 Sekretaris Desa/Kelurahan se-Jawa Timur
- Bimbingan Teknis Arsip Pemilu 119 orang

c) **Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah**

Permasalahan

- Munculnya Kepmenpan No. Per/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, makin menghambat menambah jumlah arsiparis tingkat terampil.
- Masih terbatasnya tenaga pengelola arsip ditinjau dari sudut kualitas dan kuantitas, serta pemahaman terhadap kearsipan

- Sekretaris Desa/Kelurahan dan aparatur yang sudah mendapatkan Bimbingan Teknis seringkali dimutasi
- Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur bidang Kearsipan di Jawa Timur

Upaya pemecahan masalah

- Mengupayakan produk-produk hukum kearsipan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan
- Program Arsip masuk desa menjadi upaya pemerintah untuk memperdayakan masyarakat desa, hal ini dilakukan melalui pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa maupun pengelola kearsipan di Provinsi Jawa Timur

d) Penghargaan Nasional yang diterima

- AKREDITASI KEARSIPAN KATEGORI “A”

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah mendapat dana sebesar Rp. 4.570.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.527.988.961,00 atau 99,08%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sejak 2012–2014 dapat dilihat dari rincian berikut.

Tabel 4.26.1.2

Realisasi Indikator Kinerja Utama Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2012 - 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi			Capaian Tahun 2014 %
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
Meningkatnya penyelama	-Jumlah luasan / penambahan khasanah	14.500 berkas	4.387 berkas	4.353 berkas	30.782 berkas	212

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi			Capaian Tahun 2014 %
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
tan dan pelestarian arsip statis	arsip statis					
	- Jumlah arsip yang diperbaiki	4.500 berkas	6.000 berkas	6.500 berkas	4.692 berkas	104
	- Jumlah arsip inaktif yang diolah	7.000 berkas	5.000 berkas	5.000 berkas	7.500 berkas	107
	- Jumlah arsip yang disusutkan	9.000 berkas	1.500 berkas	9.000 berkas	15.730 berkas	175

Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis dan Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Penduplikatan atau alih media 1.000 arsip dari Diskominfo, Bakesbang, PT. GARAM, Biro Humas dan Protokol
- Akuisisi arsip dokumenter sebanyak 30.782 berkas dari Biro Humas dan Protokol, Dinas ESDM, Bakesbangpol
- Perawatan dan Pemeliharaan arsip sebanyak 4.692 berkas
- Terlaksananya pemusnahan arsip 21 SKPD Provinsi Jatim
- Terlaksananya pendampingan penilaian arsip di 10 SKPD Provinsi Jawa Timur
- Terlaksananya pendampingan penataan arsip di 20 SKPD Provinsi
- Terlaksananya penarikan arsip Pemilu Legislatif di 9 KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota (40 buku, 2.925 berkas)

c) **Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah**

Permasalahan

- Masih banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit unit kerja / SKPD
- Kurang memadainya sarana prasarana kearsipan
- Munculnya peraturan perundangan yang berdampak pada pengelolaan kearsipan, juga banyak jasa yang dikelola pihak

swasta, sehingga mengurangi peran penting lembaga kearsipan.

Upaya pemecahan masalah :

- Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan
- Menjalin kerjasama dengan instansi Pemerintah, BUMN/D, Orsospol/Ormas, Swasta maupun Perorangan
- Akuisisi arsip statis baik instansi Pemerintah, BUMN/D, Orsospol/Ormas, Swasta maupun Perorangan.
- Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis
- Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan)

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program peningkatan kualitas pelayanan informasi sebesar Rp. 1.520.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.506.963.900,00 atau 99,11%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan Pembangunan

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sejak 2012–2014 dapat dilihat dari rincian berikut.

Tabel 4.26.1.3

Realisasi Indikator Kinerja Utama Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2012 - 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi			Capaian Tahun 2014 %
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
Meningkatnya masyarakat sadar arsip	Jumlah pengguna arsip	3.000 orang	1.250 orang	778 orang	2.841 orang	97,71

*Sumber : Bidang Publikasi, Promosi Perpustakaan dan Jasa Kearsipan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi Pergub Jatim tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim dengan peserta 70 orang
- Pembentukan Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip (FKMSA) yang diikuti oleh 100 peserta
- Jumlah kunjungan layanan kearsipan sebanyak 2.841 orang
- IKM Layanan Kearsipan sebesar 77,52

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Kurang minatnya pengguna arsip
- Masih terbatasnya pedoman teknis pengelolaan tentang tata kearsipan
- Kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi serta bimbingan teknis tentang kearsipan

Upaya Pemecahannya

- Optimalisasi SDM dan pelayanan publik
- Penerbitan naskah sumber arsip dan buletin kearsipan
- Mengembangkan kearah sistem administrasi kearsipan digital

URUSAN PERPUSTAKAAN

Pembangunan bidang perpustakaan ditujukan untuk meningkatkan Sumber Daya Perpustakaan di Jawa Timur, meningkatkan Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka Tercetak/Non Cetak dan meningkatkan Gemar dan Budaya Baca Masyarakat di Jawa Timur.

a. Sasaran Tahun 2014

Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp. 39.575.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.337.360.626,00 atau 96,87%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sejak 2012-2014 dapat dilihat dari rincian berikut.

Tabel 4.26.1.4
Realisasi Indikator Kinerja Utama Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2012 - 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi			Capaian Tahun 2014 %
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	- Jumlah kegiatan dan peserta peningkatan SDM perpustakaan	15 kali / 1.501 orang	2 kali / 220 orang	4 kali / 641 orang	15 kali / 1.661 orang	102,86

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi			Capaian Tahun 2014 %
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
	- Jumlah pemustaka	1.000.000 orang	866.294 orang	1.061.005 orang	1.162.582 orang	116,25
	- IKM	78,50	78,11	78,45	78,80	101
	- Jumlah koleksi perpustakaan	20.000 eksemplar	6.000 eksemplar	19.851 eksemplar	23.788 eksemplar	118,94
	- Jumlah pengembangan koleksi perpustakaan desa/kelurahan	392.120 eksemplar	156.000 eksemplar	125.000 eksemplar	392.120 eksemplar	100

Sumber : Bidang Publikasi, Promosi Perpustakaan dan Jasa Kearsipan, Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi, Bidang Pembinaan Perpustakaan
Bidang Deposit, Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- Peningkatan jumlah pemustaka 1.162.582 orang
- IKM Layanan Perpustakaan sebesar 78,80
- Jumlah penambahan koleksi buku sebanyak 23.788 eksemplar (6.133 judul) terdiri atas :
 - Koleksi Buku 5.449 judul 22.230 eksemplar
 - Koleksi Audio 674 judul 1.558 keping
- Perbaikan buku rusak sebanyak 5.500 eksemplar
- Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah/Desa (LTPS/LTPD) sebanyak 120 titik
- Mobil Perpustakaan Keliling sebanyak 25 titik
- Penambahan koleksi E-Book sebanyak 819 judul/4.147 halaman
- Perpustakaan Desa/Kelurahan sebanyak 388 Perpustakaan Desa / Kelurahan dan 10 desa TMMD
- Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan perpustakaan

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas bangsa
- Kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan
- Belum maksimalnya pengelolaan perpustakaan dan terbatasnya pedoman teknis pengelolaan perpustakaan

Upaya Pemecahannya

- Memaksimalkan sosialisasi tentang minat baca kepada masyarakat
- Pengembangan ruang koleksi maupun ruang baca bagi pemustaka
- Melaksanakan kegiatan pameran/promosi tentang perpustakaan bekerja sama dengan pihak terkait

d) Penghargaan Nasional yang diterima

Penghargaan yang diterima dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2014, antara lain :

- Nugra Jasadarma Pustaloka (Kategori Ketua PKK Provinsi)
- Juara I Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan (Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh, Lumajang)
- Juara III Perpustakaan Tingkat SLTA (SMUN I Dampit, Malang)
- Nugra Jasadarma Pustaloka (Kategori Tokoh Masyarakat)

URUSAN PILIHAN

1. BIDANG URUSAN PERTANIAN

1.1. DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Berkembangnya usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang ramah lingkungan melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Sekolah Lapangan *Good Agriculture Practices (SLGAP)* sehingga mendukung Peningkatan luas panen (ha), produksi (ton), produktivitas (ku/ha) tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur;
- 2) Tersedianya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat dan memenuhi sesuai syarat 6 tepat (tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, harga);
- 3) Peningkatan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura yang berdaya saing tinggi untuk mencukupi pasar domestik dan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan petani.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

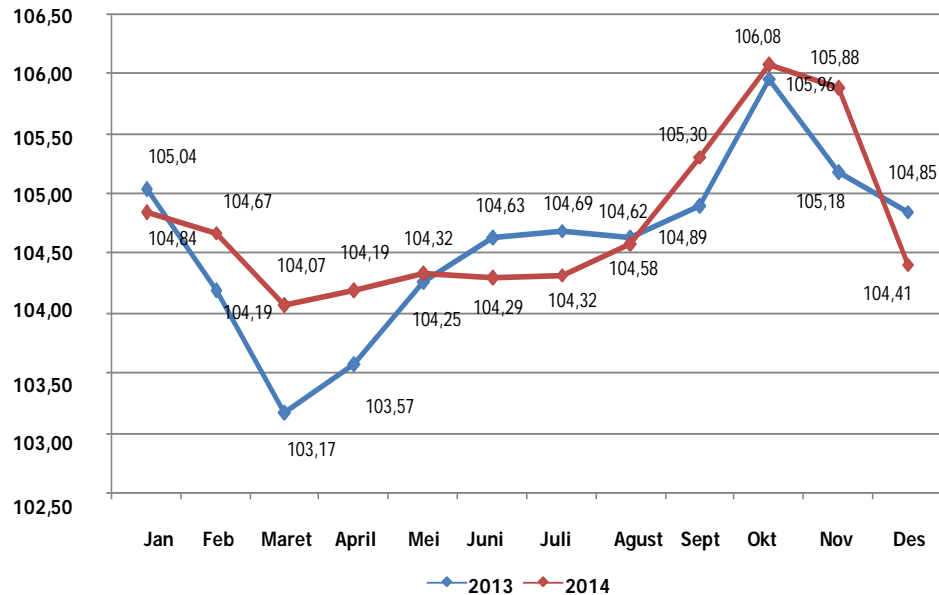
Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 9.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.051.325.615,00 atau 87,99%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Capaian dari sasaran pada RENSTRA, yaitu peningkatan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura yang berdaya saing tinggi untuk mencukupi pasar domestik dan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan petani yang terukur dari Nilai Tukar Petani (NTP).

Gambar 4.1.1.1

Nilai Tukar Petani Jawa Timur Tahun 2013 - 2014 (2012 = 100)



Rata-rata NTP Jawa Timur tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen dibanding tahun 2013 yaitu dari 104,60 menjadi 104,75. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (7,35 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (7,20 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2014, secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2013.

Grafik NTP Jawa Timur menunjukkan bahwa selama tahun 2014 Nilai Tukar Petani Jawa Timur secara umum lebih tinggi dibanding dengan bulan yang sama tahun 2013. Jika dilihat besarnya perubahan di tahun 2014, kenaikan NTP terbesar terjadi pada bulan Oktober sebesar 0,73 persen karena indeks harga yang diterima petani pada bulan yang sama mengalami kenaikan sebesar 1,02 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani hanya

naik sebesar 0,28 persen. Penurunan NTP terbesar terjadi pada bulan Desember sebesar 1,39 persen karena indeks yang diterima petani naik sebesar 1,52 persen sedangkan indeks yang dibayar petani naik 2,95 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Tanaman Pangan sebesar 99,57 dan jika dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,97 dari capaian 103,54 yang disebabkan rendahnya index yang diterima petani pada bulan April hingga September. Demikian pula untuk Subsektor Hortikultura pada tahun 2014 sebesar 104,86 juga menunjukkan penurunan sebesar 3,26 dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 108,12. Meskipun mengalami penurunan tetapi upaya meningkatkan pendapatan petani telah dilakukan tahun 2014:

- ❖ Upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan mengubah sikap bagi petani, penangkar dan petugas kabupaten agar menerapkan sistem agribisnis dalam melakukan usahatannya melalui pelatihan bagi 1.350 peserta :
 - Pelatihan Teknis Agribisnis Bawang Merah bagi 60 Petani;
 - Pelatihan Teknis Agribisnis Produk di Benih Padi Palawija Pemula bagi 60 Petani/Penangkar Pemula;
 - Pelatihan Teknis Agribisnis Pisang bagi 30 Petani;
 - Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Berbasis SRI bagi 60 Petani/Penangkar Pemula;
 - Pelatihan Teknis Agribisnis Penanganan Pasca Panen Hortikultura bagi 30 Petani;
 - Pelatihan Teknis Produksi Cabai bagi 60 Petani;
 - Pelatihan Teknis Agribisnis Jeruk bagi 30 Petani;
 - Pelatihan Teknis Agribisnis Durian bagi 30 Petani;
 - Pelatihan Pengelolaan Tata Guna Air (TGA) bagi 30 Petani;
 - Pelatihan Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Kelompok Tani bagi 60 Petani;

- Pelatihan Teknis Agribisnis Tanaman Pangan Pada Anomali Iklim bagi 60 Petani;
- Pelatihan Teknis Agribisnis Pembuatan Pupuk Organik dan Pupuk Hayati bagi 60 Petani;
- Pelatihan Teknis Manajemen Nutrisi Pada Tanaman Pangan dan Hortikultura bagi 30 Petani;
- Pelatihan Teknis Pertanian Ramah Lingkungan bagi 30 Petani;
- Pelatihan Teknis Pembuatan Pestisida Nabati bagi 30 Petani;
- Pelatihan Teknis Perbanyak Agens Hayati Entomopatogen bagi 30 Petani;
- Pelatihan Teknis Perbanyak Agens Hayati Antagonis bagi 30 Petani;
- Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Produsen Benih Padi Palawija bagi 30 Penangkar;
- TOT Pemandu Lapang II SLPTT Padi bagi 150 Petugas;
- TOT Pemandu Lapang II SLPTT Kedelai bagi 90 Petugas;
- TOT Pemandu Lapang II GAP Hortikultura bagi 90 Petugas;
- Pelatihan Operator Alat Mesin Pasca Panen Tanaman Pangan (Rice Milling Unit) bagi 90 Petugas;
- TOT Pemandu Lapang II SLPTT Jagung bagi 90 Petugas;
- TOT Pemandu Lapang II PPHP bagi 60 Petugas;
- ❖ Upaya pemberdayaan usaha bagi 50 kelompok masyarakat miskin dengan pola kemitraan yang berbasis cluster dengan mengembangkan kemampuan dan peluang usaha berupa penyaluran handtractor sebanyak 100 unit dan pompa air sebanyak 50 unit.

Secara umum, capaian kinerja Program ini telah menunjukkan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang tercermin dari kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan:

- Perkembangan tenaga kerja yang terserap sektor pertanian pada Februari 2014 berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 79/11/35/Th. XII, 5 November 2014, jumlah tenaga kerja yang terserap pada Agustus 2014 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 7,26 juta orang sektor Pertanian atau menyerap tenaga kerja sebanyak 37,61 persen;
- Berdasarkan Berita Resmi Statistik bulan September 2014, 15,92 persen dari jumlah penduduk Jawa Timur merupakan penduduk miskin yang berada di pedesaan atau sebanyak 67,75 persen dari 4,748 juta jiwa penduduk miskin Jawa Timur yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani / peternak dan pekebun.

c) **Permasalahan dan Upaya Pemecahannya**

Permasalahan

- Produktivitas dan mutu produksi tanaman pangan belum optimal dengan tingkat efisiensi usaha tani relatif rendah sehingga mengakibatkan biaya produk yang relatif tinggi dan berdampak harga produk menjadi kurang kompetitif;
- Masih lemahnya posisi tawar (*bargaining-position*) Petani / Kelompok Tani, yang antara lain disebabkan oleh rendahnya kemampuan berwirausaha pada pelaku agribisnis;

Upaya Pemecahan

- Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan melalui fasilitasi alat dan mesin pertanian berupa handtractor sebanyak 100 unit dan pompa air sebanyak 50 unit;
- Melalui pelatihan agribisnis dapat ditingkatkan pengetahuan petani tentang daya saing produk pertanian yang meliputi mutu produk, keamanan pangan dan tingkat efisiensi usaha tani karena biaya produksi yang relatif tinggi berdampak harga produk menjadi kurang kompetitif;
- Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi petani sebagai pelaku agribisnis dan kemitraan usaha;

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 47.253.319.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.144.938.730,00 atau 82,84%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Hasil Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan terhadap sasaran pada RENSTRA, yaitu : Berkembangnya usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang ramah lingkungan melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Sekolah Lapangan Good Agriculture Practices (SLGAP).

Tabel 4.1.1.1
Usaha Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Ramah Lingkungan Jawa Timur Tahun 2014

Indikator Kinerja Utama	Sasaran sesuai Renstra			Realisasi		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
SLPHT (kelompok)	252	299	305	236	276	165
SLPTT (kelompok)	45.380	46.741	48.143	26.340	23.619	17.329
SLGAP (kelompok)	83	88	95	80	86	442

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2014

Berkembangnya usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang ramah lingkungan terukur dari : luas areal pertanaman pangan dan hortikultura yang aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tahun 2014 sebesar terlihat pada luas panen berikut ini.

Tabel 4.1.1.2
Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa
Timur Tahun 2014

Komoditas	Luas Panen (ha)			Produktivitas (ku/ha)			Produksi (ton)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Padi	1.975.719	2.037.021	2.072.822	61,74	59,15	59,94	12.198.707	12.049.342	12.398.312
Jagung	1.232.523	1.199.544	1.202.300	51,08	48,03	47,67	6.295.301	5.760.959	5.737.382
Kedelai	220.815	210.618	214.880	16,39	15,64	16,48	361.986	329.461	355.464
Kc. Tanah	163.513	150.017	139.891	13,07	13,86	13,48	213.792	207.971	188.491
Kc. Hijau	55.881	48.845	50.105	11,95	11,81	12,04	66.772	57.686	60.310
Ubi Kayu	189.982	168.194	157.091	223,50	214,10	231,41	4.246.028	3.601.074	3.635.170
Ubi Jalar	14.264	19.139	13.484	288,81	205,44	231,72	411.957	393.199	312.449
Sayuran ¹⁾	170.119	167.758	159.092	102,21	98,35	214,62	1.738.838	1.649.926	3.414.369
Buah ¹⁾²⁾	172.141.236	155.081.287	143.177.612	23,48	27,68	28,59	4.042.257	4.292.384	4.094.032

Sumber : BPS Jawa Timur, 2014 (ATAP 2013 dan ASEM 2014, BRS no 22/03/35/ThXIII, 2 Maret 2015);

Keterangan : ¹⁾ Data bulanan s/d Desember 2014 (RKSP); ²⁾ Luas panen buah-buahan (rb pohon/rumpun), produktivitas buah-buahan (kg per pohon/rumpun)

Pertumbuhan produksi tanaman pangan dan hortikultura selama 3 tahun (2012 s/d 2014) mengalami pertumbuhan negatif pada sebagian besar komoditas. Pertumbuhan positif terjadi pada komoditas padi sebesar 0,84 persen, sayuran sebesar 50,91 persen, dan buah-buahan sebesar 0,78 persen. Sedangkan pertumbuhan negatif pada komoditas jagung sebesar 4,45 persen, kedelai sebesar 0,55 persen, kacang tanah sebesar 6,04 persen, kacang hijau sebesar 4,53 persen, ubi kayu sebesar 7,12 persen, ubi jalar sebesar 12,55 persen. Pertumbuhan negatif disebabkan angka produksi tanaman pangan yang fluktuatif selama tiga tahun.

Produksi Padi Jawa Timur tahun 2014 berdasarkan Angka Sementara (ASEM) BPS Jawa Timur dalam Berita Resmi Statistik Nomor 22/03/35/ThXIII, 2 Maret 2015) sebesar 12,05 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami peningkatan sebesar 348,97 ribu ton (naik 2,90 persen) dibanding tahun 2013 (ATAP) dengan produksi padi sebesar 12,05 juta ton. Peningkatan produksi ini disebabkan luas panen yang meningkat 35,80 ribu hektar dari 2,04 juta hektar tahun 2013 menjadi 2,07 juta hektar

di tahun 2014 (Kab. Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Pasuruan, dan Kota Mojokerto) dan meningkatnya produktivitas di 38 kabupaten/kota sebesar 0,66 kuintal/hektar dari 59,15 kuintal/hektar menjadi 59,81 kuintal/hektar (1,12 persen).

Untuk produksi Jagung, terjadi penurunan 23,58 ribu ton (0,41) persen dari 5,76 juta ton pada tahun 2013 menjadi sebesar 5,74 juta ton di tahun 2014 (ASEM). Menurunnya produksi jagung pada tahun 2014 disebabkan menurunnya produktivitas jagung sebesar 0,31 kuintal/hektar di kab. Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Lumajang, Jember, Situbondo, Probolinggo, Mojokerto, Nganjuk, Madiun, Magetan, Tuban, Sumenep, Kota Kediri dan Kota Malang, meskipun terjadi peningkatan luas panen seluas 2,76 ribu hektar (0,23 persen) dari 1,199 juta hektar menjadi 1,202 juta hektar.

Penurunan produksi Jagung di Jawa Timur tahun 2014 terjadi pada subround Januari-April sebesar 128,24 ribu ton dan pada subround September-Desember sebesar 34,26 ribu ton, sedangkan pada subround Mei-Agustus terjadi kenaikan produksi sebesar 138,93 ribu, bila masing-masing dibandingkan dengan produksi pada subround yang sama tahun 2013 (year on year).

Demikian pula pada komoditas Kedelai, produksi ASEM 2014 Kedelai Jawa Timur sebesar 355,46 ribu ton ose atau mengalami peningkatan sebesar 26 ribu ton (7,89 persen) dibanding produksi Kedelai tahun 2013 (ATAP) sebesar 329,46 ribu ton ose. Peningkatan produksi Kedelai tahun 2014 karena mengalami peningkatan luas panen sebesar 4,26 ribu hektar (2,02 persen) dan produktivitas sebesar 0,90 kuintal/hektar (5,75 persen) dari 15,64 kuintal/hektar menjadi 16,54 kuintal/hektar.

Realisasi produksi kedelai Jawa Timur pada subround I (Januari-April 2014) sebesar 63,06 ribu ton biji kering. Bila dibandingkan dengan SR I 2013 (64,84 ribu ton biji kering) terjadi penurunan sebesar 1,78 ribu ton biji kering atau turun 2,75 persen. Penurunan produksi pada SR I 2014 terhadap SR I 2013 karena adanya penurunan luas panen sebesar 5,89 ribu hektar (13,07 persen) sedangkan tingkat produktivitas naik sebesar 1,71 kuintal/hektar (11,88 persen). Untuk produksi kedelai SR II 2014 terjadi kenaikan sebesar 12,18 ribu ton biji kering (11,12 persen), dan pada SR III 2014 juga terjadi kenaikan produksi sebesar 15,60 ribu ton biji kering (10,06 persen) bila masing-masing dibandingkan dengan produksi kedelai pada subround yang sama tahun 2013 (year on year).

Produksi Ubi Jalar berdasarkan data ASEM tahun 2014 sebesar 312,45 ribu ton Umbi Basah dan jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 393,20 ribu ton mengalami penurunan sebesar 80,75 ribu ton (20,54 persen) dibandingkan tahun 2013, meskipun terjadi peningkatan produktivitas sebesar 26,28 kuintal per hektar. Terjadinya penurunan produksi disebabkan adanya penurunan luas panen sebesar 5,66 ribu hektar di Jawa Timur kecuali kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan ASEM tahun 2014, produksi Ubi Kayu sebesar 3,64 juta ton dan terjadi peningkatan 34,09 ribu ton umbi basah atau sebesar 0,95 persen dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 3,60 juta ton. Peningkatan produksi Ubi Kayu karena peningkatan produktivitas sebesar 17,31 kuintal/hektar meskipun terjadi penurunan luas panen sebesar 11,10 ribu hektar.

Produksi (ASEM 2014) Kacang Tanah mencapai 188,49 ribu ton biji kering dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 19,48 ribu ton atau sebesar 9,37 persen dibandingkan

produksi ATAP tahun 2013 yang mencapai 207,97 ribu ton. Penurunan produksi Kacang Tanah karena terjadi penurunan luas panen 10,13 ribu hektar dan penurunan produktivitas sebesar 0,39 kuintal/hektar.

Selanjutnya menurut ASEM tahun 2014 produksi Kacang Hijau sebesar 60,31 ribu ton biji kering dan jika dibandingkan tahun 2013 menunjukkan peningkatan 2,62 ribu ton atau 4,55 persen. Peningkatan produksi Kacang Hijau karena peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan luas panen seluas 1,26 ribu hektar dari 48.845 hektar pada tahun 2013 menjadi 50.105 hektar di tahun 2014. Sedangkan peningkatan produktivitas sebesar 0,23 kuintal/hektar dari 11,81 kuintal/hektar menjadi 12,04 kuintal/hektar.

Sedangkan untuk tanaman hortikultura pertumbuhan produksi tahun 2012 ~ 2014 sebesar 50,19 persen pertahunnya dan pertumbuhan produksi buah mencapai 0,78 persen pertahunnya. Realisasi produksi sayuran pada tahun 2014 sebesar 3.414.369 ton meningkat sebesar 1.764.443 ton disebabkan peningkatan produktivitas sebesar 116,27 ku/ha meskipun terjadi penurunan luas panen seluas 8.666 hektar dibandingkan tahun 2013. Untuk komoditas buah-buahan capaian produksi sebesar 4.094.032 terjadi penurunan produksi sebesar 198.362 ton disebabkan penurunan luas panen seluas 11.903.675 pohon meskipun terjadi peningkatan produktivitas sebesar 0,92 kg/pohon.

Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura juga akan berdampak pada peningkatan kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Subsektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB ADHB Sektor Pertanian pada tahun 2014. Untuk tahun 2014 ini,

perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan dengan menggunakan tahun dasar 2010 dengan menyertakan 17 jenis sektor lapangan usaha serta mengimplementasikan system of national accounts 2008 (SNA 2008). Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung PDRB menggunakan tahun dasar 2000 dengan 9 jenis sektor lapangan usaha.

Kontribusi Tanaman Pangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2014 sebesar 4,52 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,04 dibanding tahun 2013 sebesar 4,49 persen. Adapun kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 3,95 persen mengalami penurunan sebesar 0,09 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 4,04 persen. Selanjutnya kontribusi Tanaman Pangan Jawa Timur terhadap Tanaman Pangan Nasional sebesar 20,26 persen pada tahun 2014 (ADHB) dan sebesar 18,57 persen untuk ADHK.

Kontribusi Tanaman Hortikultura terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2014 sebesar 1,20 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,04 dibanding tahun 2013 sebesar 1,16 persen. Adapun kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 1,16 persen mengalami penurunan sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 1,20 persen. Sedangkan kontribusi Tanaman Hortikultura Jawa Timur terhadap Tanaman Hortikultura Nasional sebesar 11,62 persen pada tahun 2014 (ADHB) dan sebesar 11,88 persen untuk ADHK.

Tabel 4.1.1.3
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Tahun 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014 *)	%
Atas Dasar Harga Berlaku						
PDRB JAWA TIMUR	990.649,44	1.119.877,16	1.247.767,29	1.382.434,85	1.540.696,53	11,68
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133.504,56	148.768,80	168.232,62	186.038,31	211.517,66	12,20
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	108.672,39	121.326,74	134.184,78	146.635,06	165.814,01	11,15
a. Tanaman Pangan	46.010,26	50.379,83	56.484,23	62.031,96	69.697,38	10,95
b. Tanaman Hortikultura	13.372,87	14.931,59	15.278,16	16.022,99	18.540,44	8,64
PDB Nasional	6.864.133,10	7.831.726,00	8.615.704,50	9.524.736,50	7.507.938,10	3,37
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	956.119,70	1.058.245,30	1.152.262,10	1.275.048,40	1.410.657,10	10,21
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	754.434,40	832.513,60	902.125,90	994.778,40	1.088.944,90	9,61
a. Tanaman Pangan	253.326,60	270.977,40	305.670,50	332.111,90	343.952,20	8,00
b. Tanaman Hortikultura	110.395,30	125.286,10	125.107,90	137.368,80	159.520,60	9,82
Atas Dasar Harga Konstan						
PDRB Jawa Timur	990.648,84	1.054.401,77	1.124.464,64	1.192.841,86	1.262.700,21	6,25
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133.504,56	138.870,09	146.002,57	150.463,72	155.924,12	3,96
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	108.672,39	112.521,77	116.214,18	117.512,83	121.145,30	2,76
a. Tanaman Pangan	46.010,26	46.435,34	47.585,49	48.241,23	49.931,73	2,07
b. Tanaman Hortikultura	13.372,87	14.305,89	14.461,71	14.298,05	14.635,69	2,32
PDB Nasional	6.864.133,10	7.287.635,30	7.727.083,40	8.158.193,70	8.568.115,60	5,70
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	956.119,70	993.857,30	1.039.440,70	1.083.141,80	1.128.448,00	4,23
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	754.434,40	780.581,10	816.304,40	847.763,70	879.231,20	3,90
a. Tanaman Pangan	253.326,60	250.787,40	263.076,20	268.268,20	268.917,90	1,53
b. Tanaman Hortikultura	110.395,30	120.079,30	117.424,50	118.207,70	123.158,80	2,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2014

Capaian kinerja peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas tersebut melalui beberapa upaya pada tahun 2014 :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana bagi petani sebanyak 509 unit terdiri : Handtraktor (223 unit), Pompa Air (82 unit), Cultivator (17 unit), APPO (86 unit), Handtraktor, Transplanter (101 unit)
- 2) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) berupa pembinaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Desa (JITUT, JIDES) bagi 70 petugas kabupaten / kota;
- 3) Peningkatan kemampuan petani untuk mengantisipasi fenomena iklim dalam berusahatani melalui Sekolah Lapangan Iklim (SLI) bagi 50 petugas kabupaten/kota;
- 4) Peningkatan kemampuan petani untuk melakukan tata guna pengairan melalui Sekolah Lapangan Tata Guna Air (SLTGA) bagi 50 petugas kabupaten / kota;

- 5) Pemberdayaan kelompok HIPPA bagi 110 petani;
- 6) Peningkatan kemampuan petani melalui *System Of Rice Intensification (SRI)* bagi 50 petugas kabupaten/kota;
- 7) Pembinaan stok pestisida di 7 SOP;
- 8) Uji mutu bahan pupuk organik sebanyak 5 unit;
- 9) 50 petani peserta yang dapat membuat pupuk organik;
- 10) Pembinaan pencatatan analisa usahatani di 15 kabupaten;
- 11) Penyusunan dokumen perencanaan dan informasi (DPA Tahun 2014, RENJA Tahun 2014, LAKIP Tahun 2013, dan Laporan Tahunan 2013 serta terdistribusinya Buletin Pertanian setiap triwulan Tahun 2014);
- 12) Upaya meningkatkan kemampuan petugas yang menangani OPT tanaman pangan dan hortikultura bagi 375 petugas;
- 13) Upaya meningkatkan kinerja Mantri Tani yang tersebar di 662 kecamatan sebagai upaya pengelolaan data statistik tanaman pangan dan hortikultura;
- 14) Luas areal pengembangan teknologi guna meningkatkan produktivitas padi, jagung kacang hijau seluas 23 hektar untuk komoditas padi, jagung dan kedelai ;
- 15) Upaya pemberian stimulan untuk pengembangan tanaman pangan untuk padi varietas baru, akselerasi ubi kayu, ubi jalar dan pengembangan jagung di lahan marginal, serta pengembangan shorgum sebagai berikut :
 - 50 hektar areal pengembangan padi Jatim ;
 - 19 hektar stimulan fasilitasi pengembangan shorgum;
 - 15 hektar stimulan fasilitasi pengembangan jagung;
 - 38 hektar stimulan fasilitasi pengembangan komoditas aneka kacang dan ubi;
- 16) Tersedia 300.000 kg padi, 47.500 kg jagung dan 1.600 Kg kedelai sebagai Cadangan Benih Provinsi;

- 17) Upaya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) secara terpadu melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) komoditas tanaman pangan hortikultura bagi 860 kelompok;
- 18) Tersedianya agens hayati untuk 96 kelompoktani padi, 58 kelompoktani jagung tanaman pangan, dan 58 kelompoktani kedelai.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Masih terjadi mutasi lahan sawah irigasi;
- Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK
- Ketersediaan benih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, dan harga
- Kebutuhan alsintan terutama untuk proses pengolahan tanah, dan tanam masih tinggi terutama dengan semakin terbatasnya tenaga kerja di pedesaan;
- Kondisi jaringan irigasi (JITUT/JIDES) banyak mengalami kerusakan dan sekitar 30 persen memerlukan rehabilitasi.

Upaya pemecahan masalah

Untuk mengantisipasi beberapa masalah yang masih ditemui pada pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2014, maka upaya pemecahan masalah yang ditempuh pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan serta strategi dasar pembangunan agribisnis sebagai berikut :

- Meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan sesuai RTRW kabupaten/kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur tahun 2011-2031 telah ditetapkan Rancangan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031;

- Penyediaan benih padi dan jagung di Jawa Timur sudah terpenuhi di tingkat usaha tani. Permasalahan hanya pada benih kedelai yang ketersediaannya terbatas dan telah diupayakan peningkatan produksi benih kedelai bersertifikat melalui industri perbenihan (swasta/penangkar) sehingga ketersediaan benih kedelai di tingkat petani memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu jenis, mutu, waktu, jumlah, tempat, dan harga;
 - a. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida/KP3 Provinsi Jawa Timur terhadap distribusi pupuk di Jawa Timur;
 - b. Meningkatkan koordinasi, melakukan evaluasi dan pelaporan perencanaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
 - c. Meningkatkan koordinasi bagi petugas kabupaten untuk mengintensifkan pembinaan penggunaan pupuk organik dan anorganik ditingkat petani;
- Meningkatkan fasilitasi sarana prasarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian dikawasan sentra produksi pangan sesuai komitmen pemerintah pusat dan provinsi;
- Perbaiki jaringan irigasi sesuai komitmen pemerintah pusat dan provinsi dan melakukan optimalisasi pemanfaatan air irigasi.

d) Penghargaan Nasional yang diterima

Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 (sesuai Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 1289/Kpts/KP.450/12/2014 Tanggal : 15 Desember 2014)

1. Kategori Pembina Ketahanan Pangan dan Penerima Penghargaan Khusus bagi Pembina (Gubernur dan Bupati / Walikota) Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur
2. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Pelaku Produksi
 - Kelompok Sumber Hasil, Ketua Drs. H. Abdurrahman, Dusun Padaringan Timur, Desa Paberasan, Kecamatan Kelamasan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur

3) **Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan**

Peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian semakin penting, dan harus diawali dengan penggunaan benih/bibit bermutu. Saat ini benih berperan sebagai paket keunggulan teknologi bagi petani dan konsumen lainnya oleh karena itu benih harus terus berkembang dan dapat tersedia secara 6 (enam) tepat yaitu : tepat varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi dan harga bagi petani dan pengguna lainnya.

Di Jawa Timur, sekitar 74,00 persen petani telah menggunakan benih bersertifikat terutama petani tanaman pangan, jadi pengembangan perbenihan dituntut semakin ditingkatkan untuk menghasilkan benih bermutu dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani penangkar. Sasaran Program adalah tercukupinya kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat dan memenuhi syarat 6 tepat sesuai sasaran luas tanam (ha).

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 42.617.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.258.835.225,00 atau 92,12%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Hasil pelaksanaan pembangunan sesuai sasaran RENSTRA Dinas Pertanian adalah tersedianya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat dan memenuhi sesuai syarat 6 tepat (tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, harga) sebagai berikut :

Tabel 4.1.1.4
Ketersediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Bersertifikat Jawa Timur Tahun 2014

Komoditas	Realisasi Produksi Benih 2014 (Kilogram)			%
	2012	2013	2014	
Padi	73.178.040,00	59.484.990,00	61.359.144,00	(7,78)
Jagung	66.565.900,00	51.877.300,00	39.842.794,00	(22,63)
Kedelai	7.116.170,00	2.343.860,00	2.086.642,00	(39,02)
Buah-buahan ¹⁾	2.918.959,00	3.200.348,00	1.182.786,00	(26,70)
Sayuran	508.821,00	525.796,00	896.852,00	36,95

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2014

Keterangan : ¹⁾ batang

Capaian Kinerja Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 melalui :

- Upaya pembinaan kawasan hortikultura pada tahun 2014 sebanyak 60 peserta Pembinaan Kawasan Buah – Buahan;
- Perbanyak benih hortikultura varietas unggul bermutu yang dihasilkan 14.100 kilogram benih sayur dan 24.750 batang benih buah-buahan dengan rincian :

Tabel 4.1.1.5
Perbanyakan Benih Hortikultura yang Bersertifikat Tahun 2014

Perbanyakan Benih	Kebun Bibit Hortikultura	Varietas	Calon Benih (kg)	Benih (kg)	Keterangan
Kentang G0-G2	Tosari	Granola Lembang	5.045	4.500	
Kentang G2-G3	Sapikerep	Granola Lembang	500	-	Tidak lulus sertifikasi

Perbanyakan Benih	Kebun Bibit Hortikultura	Varietas	Calon Benih (kg)	Benih (kg)	Keterangan
Kentang G3-G4	Sarangsari	Granola Lembang	11.560	8.000	
Bawang Merah	Lebo	Batu Ijo	1.290	600	
		Super Philips	1.788	1.000	
		Bauji	752		Kempos
Mangga	Pohjentrek	Arumanis, Lalijiwo,	11.250	11.250	
		Manalagi, Golek		-	
	Sukorame	Arumanis, Lalijiwo,	8.000	8.000	
		Manalagi, Golek		-	
	Jampirogo	Lalijiwo 61	4.000	1.500	Tersambung
Rambutan ¹⁾	Patrang	Binjai	4.000	4.000	

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2014

Keterangan : ¹⁾ batang

- Terbangun dan terpeliharanya sarana prasarana pengembangan benih tanaman pangan dan hortikultura sebanyak 17 unit bangunan : gedung kantor, tandon air, pagar kebun;
- Upaya penyediaan benih padi varietas unggul bermutu tercapai 1.911.344 kg, terdiri : benih padi kelas SS sebanyak 1.853.685 kg; benih padi kelas FS sebanyak 57.060 kg dan benih padi hibrida sebanyak 599 kg;
- Tersedianya benih sumber, yaitu benih dasar (foundation seed/FS/BD), dan benih pokok (stock seed/SS/BP) hasil perbanyakan terdiri : i) benih kedelai (BS-FS) sebanyak 10 ton; ii) benih kedelai FS-SS sebanyak 60 ton; iii) benih kacang tanah (BS-FS) sebanyak 4 ton dan iv) benih kedelai FS-SS sebanyak 6 ton;
- Jumlah benih bersertifikat dari kegiatan yang bersumber APBD tahun 2014 sebagai berikut : Padi sebanyak 22.220,38 ton, Jagung sebanyak 14.428,53 ton, Kedelai sebanyak 755,65 ton, Sayuran sebanyak 248.550,89 kilogram, Buah-buahan sebanyak 287.360,33 batang, Biofarmaka sebanyak 16.122,31 kilogram;

- Terbangun dan terpeliharanya sarana prasarana melalui DAK beserta pendampingannya tahun 2014 : i) pengembangan benih tanaman pangan dan hortikultura; ii) proteksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengawasan dan sertifikasi benih sebagai berikut :

UPT. Pengembangan Benih Padi

- Gedung Benih	:	17 unit
- Lantai jemur	:	17 unit
- Gedung UPT	:	1 unit
- Hand Tractor	:	18 unit
- Power Thresher	:	10 unit
- Combine Harvester	:	1 unit
- Pompa Air	:	11 unit
- Seed Cleaner	:	8 unit
- Moisture Tester	:	15 unit
- Roda hand tractor	:	3 unit
- Mesinjahit karung	:	50 unit
- Knapsack power sprayer	:	37 unit
- Mesin potong rumput	:	10 unit
- Kendaraan roda tiga	:	10 unit

UPT. Pengembangan Benih Palawija

- Rehab pagar kebun	:	7 unit
- Four Wheel Tractor	:	1 unit
- Vacuum Plastik Sealer	:	5 unit
- Pompa Air Gas	:	14 unit
- Alat Lubang Tanam	:	10 unit
- Hand Pallet Angkut Hidrolik	:	14 unit

UPT. Pengembangan Benih Hortikultura

- Gedung Lab. Kultur Jaringan	:	1 unit
- Pagar dan pos jaga	:	3 unit
- Gedung UPT	:	2 unit
- Rehabilitasi screen house	:	1 unit

- Rehabilitasi jalan usahatani : 1 unit
- Pembangunan embung : 2 unit
- Pembangunan Sumur dalam : 3 unit
- Pembangunan jaringan irigasi : 1 unit
- Kendaraan roda tiga : 2 unit
- Steam boiler, inkas, shaker : 5 unit

UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Rehabilitasi screen house : 6 unit
- Peralatan laboratorium : 1 unit

UPT. Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Rehab Prasarana Laboratorium : 3 unit
- Rehab Gedung Laboratorium : 1 unit
- Rehab Gedung Laboratorium : 1 unit
- Pengujian Pestisida dan Pupuk

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan teknis perbenihan tanaman pangan di Jawa Timur adalah produsen benih dihadapkan pada keterbatasan sarana prosesing benih antara lain lantai jemur, terpal, blower, grader. Upaya Pemecahan yang telah dilakukan melalui fasilitasi sarana prosesing perbenihan, sehingga tingkat keberhasilan benih yang dihasilkan mempunyai kualitas dan kuantitas yang memenuhi standar sertifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT/140/8/2006, tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.

Terkait dengan ketersediaan benih yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, dan harga. Perkembangan ketersediaan benih padi dan jagung di Jawa Timur sangat cukup, bahkan benih padi mengalami surplus. Namun untuk benih jagung hibrida masih dirasa mahal bagi petani,

sedangkan benih kedelai masih kurang karena sifat benih kedelai mudah rusak. Apabila rerata kebutuhan benih kedelai sebesar 40 kg/ha, maka dengan luas sasaran tanam 340.183 ha dibutuhkan benih sebanyak 13.607.320 kg. Sedangkan produksi benih kedelai bersertifikat Jawa Timur sebesar 2.086.642 kg, kurang 11. 520.678 kg.

4) Program Pengembangan Agribisnis

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 56.369.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.855.257.713,00 atau 68,93%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis

Hasil pelaksanaan pembangunan sesuai sasaran RENSTRA Dinas Pertanian adalah Peningkatan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura yang berdaya saing tinggi untuk mencukupi pasar domestik dan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan petani:

- ❖ Tersalurnya bantuan sarana pendukung Pengembangan sistem agribisnis melalui Cooperatif Farming :
 - Saprodi 78 Kelompok
 - Lantaijemur 20 Unit
 - Hand Traktor 24 Unit
 - Paddy Mower 78 Unit
 - Power Thresher 23 Unit
 - Pompa Air 20 Unit
- ❖ Jumlah petani yang mampu menerapkan (*Good Agriculture Practices – GAP*) Buah sebanyak 150 orang, Sayur sebanyak 140 orang serta Tanaman Hias Dan Biofarmaka sebanyak 152 orang;

- ❖ Jumlah bantuan alat pasca panen dan pengolahan hasil :
 - Lantai Jemur 27 Unit
 - Pedal Thresher Bermotor 145 Unit
 - Alat Pengolahan Kedelai 7 Unit
 - Alat Pengolahan Jagung 5 Unit
 - Soybean Thresher 8 Unit
 - Power Thresher Long Size 5 Unit
 - Alat Pembuatan Kripik Penggoreng Biasa 8 Unit
 - Mesin Pemipil Jagung 8 Unit
 - Packing House 15 Unit
 - Combine Harvester Kecil 181 Unit
 - Alat Pembuat Kripik Penggoreng Vacum 4 Unit
 - Sarana Pengolahan P3HP 3 Unit
 - Sarana Packing House 15 Unit
- ❖ Jumlah produk hasil pertanian bersertifikat melalui peningkatan standar mutu produk
 - 27 Sertifikasi Prima 3 terdiri komoditas : Buah Naga, Pisang Mas Kirana, Melon, Jamur Tiram, Salak, Durian, Manggis, Paprika, Padi, Beras, Baby Buncis, Beras Merah, Beras Putih, Butterhead, Central, Rocket Aragula, Lettuce Green Rapid, New Romain, Cristin, Oakleaf Monday, Red Aragula, Red Romain
 - Sertifikasi Prima 2 pada komoditas Mangga
- ❖ 21 Produk Hasil Pertanian Terdaftar Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
 - Register JMKP dengan komoditas : Kacang Mente, Lada Hitam, Edamame, Merica, Mukimame, Ketumbar, Biji Sawi, Bunga Pala, Jinten, Adas Biji, Kapulaga, Kayu Manis, Cengkeh, Klabet, Pekak, Beras
 - Register Non JMKP dengan komoditas : Beras, Beras Merah, Kacang Tanah, Kacang Mente, Emping Blinjo,

- Sayuran Sop dalam Kemasan, Sayuran Sayur Asam dalam Kemasan, Sayuran Cap Cay, Kemiri, Lada, Asam, Ketumbar
- ❖ 5 Komoditas dalam 108 Rekomendasi Ekspor dengan komoditas : Pala (Biji, Bunga, Kulit, Bubuk), Kopi (Biji);
 - ❖ 1 Registrasi Packing House Cabe (Koperasi Hortikultura Sri Lestari Kec. Pasirian Kab. Lumajang);
 - ❖ Pendampingan dan Penilaian Sertifikasi Standar Internasional Global GAP pada Asosiasi Petani Pedagang Salak Pronojiwo (APPSP) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;
 - ❖ Terpantaunya harga komoditas di sentra produksi 53 komoditas;
 - ❖ Terpantaunya stock gabah/beras di penggilingan 38 penggilingan;
 - ❖ Terlaksananya 7 Promosi/Display oleh 21 gapoktan
 - ❖ 3 Pertemuan Koordinasi Sekber Mitra Praja Utama (MPU) dan Promosi Bersama 6 gapoktan dalam rangka Pengembangan Kerjasama Antar Daerah
 - ❖ Pengusahaan Kebun Agribisnis dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip budidaya yang baik dan benar (*Good Agriculture Practices – GAP*) pada tahun 2014 diperoleh hasil panen tanaman pangan dari masing – masing kebun, yaitu Kebun Cemengkalang - Sidoarjo memperoleh hasil panen padi sebanyak 8.250 kg GKS. Kebun Dau- Malang memperoleh hasil panen padi sebanyak 1.050 kg GKS, Jagung sebanyak 1.500 kg glondong dan kedelai 1.250 kg. Kebun Kalianyar memperoleh hasil panen padi sebanyak 1.500 kg GKS. Sedangkan Kebun Bedali memperoleh hasil jagung sebanyak 3.144 kg glondong. Selain itu juga melalui pengoperasian unit penggilingan padi (RMU) dihasilkan produk sekunder berupa beras, sebesar 6.100 kg dan bekatul sebesar 1.220 kg. Sedangkan untuk Kebun Agribisnis Hortikultura diperoleh hasil penanaman aneka komoditas buah dan sayuran yaitu Jambu biji kristal,

Melon, Semangka, Jeruk Keprok Batu 55, Jeruk Pacitan, Mangga, Apel, Buah Naga, Jambu Biji Merah, Roseli, Bawang Merah, Rebung, Pare, Mentimun, Jagung Manis, Tomat, Terong, Cabe, Bayam, Kangkung, Sawi, dan Jamur Tiram.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan yang ditemui dalam mengimplementasi Program Pengembangan Agribisnis adalah tingkat kehilangan / susut hasil masih tinggi (BPS 2008 : 10,82 %, FAO 2010 : 14,53 %).

Sedangkan upaya pemecahan masalah dalam implementasi Program Pengembangan Agribisnis berupa : Fasilitasi sarana prasarana untuk meningkatkan efektifitas penanganan pasca panen, mengingat penggunaan mesin panen, selain dapat dapat menekan sebesar 1 persen tingkat kehilangan hasil, meningkatkan efisiensi kerja, juga menghasilkan gabah yang lebih bersih dan bermutu baik. Kebutuhan rantai jemur dan combine harvester masih sangat tinggi. Untuk pemanenan, dibutuhkan sebanyak 16.281 unit combine harvester sedangkan ketersediaan sebanyak 204 unit.

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008 Tahun 2014, sebagai bukti bahwa Sistem Manajemen Mutu di UPT PSHP dilaksanakan secara efektif.

5) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 330.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 302.050.000,00 atau 91,53%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Fasilitasi alsintan yang dialokasikan pada tahun 2014 sebanyak 8 unit Cultivator telah tersalur.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan umum kawasan agropolitan yang timbul selama ini ialah faktor sumber daya manusia termasuk petugas, sarana dan prasarana serta informasi tentang agribisnisnya.

Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan koordinasi provinsi dan kabupaten untuk segera membentuk Tim Teknis dalam melakukan pembinaan dan evaluasi

6) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan

Implementasi Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan diantaranya dimaksudkan Untuk meningkatkan konsumsi buah-buahan, dan sayuran di Jawa Timur sekaligus memperkenalkan dan mempromosikan berbagai peran dan prestasi produk pertanian baik segar, olahan maupun turunannya yang bermutu dan berdaya saing disamping Meningkatkan citra pertanian, petani dan pelaku pembangunan.

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 2.560.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.281.198.873 atau 89,08%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan Program

Program ini didukung kegiatan pokok yaitu : i) Gebyar *Good Agricultural Practices (GAP)* Hortikultura serta Gebyar Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura; ii) Lomba-Lomba Agribisnis.

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Jawa Timur Tahun 2014 berupa:

- Gebyar *Good Agricultural Practices (GAP)* Hortikultura serta Gebyar Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 di Kabupaten Malang dalam bentuk: i) Pameran dalam rangka Gebyar Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura; ii) Gelar Potensi Produk Pertanian; iii) Gelar Olahan Produk Pertanian;
- Lomba-Lomba Agribisnis dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sesuai Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Nomor 903/3324/113.16/2014, tanggal 10 September 2014 :

A. Penghargaan Lomba Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Komoditi Padi

- Kelompok Tani Sumber Urip (Ketua : Moch. Sayidi) Desa Watukebo, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi
- Kelompok Tani Sri Sedhono (Ketua : Wiwik Nurochaman) Desa Baderan, Kec. Geneng, Kab. Ngawi
- Kelompok Tani Sari Rukun I (Ketua : Nasirin) Desa Sekar Bagus, Kec. Sugio, Kab. Lamongan

Komoditi Jagung

- Kelompok Tani Darungan Tani (Ketua : Slamet) Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Kelompok Tani Gemah Ripah (Ketua : Ali Asikin) Desa Bluri, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
- Gapoktan Kebun Jaya (Ketua : M. Ramly) Desa Tarogan, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep

Komoditi kedelai

- Kelompok Tani Kedung Makmur (Ketua : Muji Hartono) Desa Ngadiboyo, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk
- Kelompok Wanita Tani Pelita Hati (Siti Aisyah) Desa Lenteng, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep
- Kelompok Tani Umat (Ketua : Achmad Widodo) Desa Yosowilangun, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang

Komoditas Sayuran

- Gapoktan Duta Flora (Ketua : Rudy) Desa Blarang Krajan, Kec. Tukur, Kab. Pasuruan
- Kelompok Tani Karya Tani I (Ketua : H. Imam) Desa Sukosari Lor, Kec. Sukosari, Kab. Bondowoso
- Kelompok Tani Karya Makmur (Ketua : Seniman) Desa Kedungrejo, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang

Komoditas Buah

- Kelompok Tani Ngudi Makmur (Ketua : Sugiyo) Desa Sidorejo, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi
- Kelompok Tani Tunas Muda (Ketua : Totok Susilo) Desa Kandangan, Kec. Senduro, Kab. Lumajang
- Gapoktan Lintang (Ketua : Yahya) Desa Tasikmadu, Kec. Palang, Kab. Tuban

Komoditas Tanaman Hias

- Kelompok Tani Sekar Wilis (Ketua : Ratijo) Desa Geger, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung
- Kelompok Tani Onchi Orchid (Ketua : Yenny R) Desa Sumberjo, Kec. Sanan Kulon, Kab. Blitar
- Gapoktan Gunungsari Makmur (Ketua : Sayadi Wibowo) Desa Gunungsari, Kec. Bumiaji, Kota Batu

Komoditas Biofarmaka

- Kelompok Tani Moro Seneng Tegal 8 (Ketua : Karim) Desa Palalangan, Kec. Cermee, Kab. Bondowoso

- Kelompok Tani Karya Usaha (Ketua : Suparno)
Desa Puyung, Kec. Pule, Kab. Trenggalek
- Kelompok Tani Jaya Tani (Ketua : Jusmanto)
Desa Batukerbuy, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan

B. Penghargaan Mantri Tani Teladan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

- Sukadi,SP.,MM. (Kec. Mantup, Kab. Lamongan)
- Sukemi (Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk)
- Jamawi (Kec. Kendal, Kab. Ngawi)

C. Penghargaan Pelaku Usaha Pasca Panen Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

- Kelompok Tani Tani Mandiri (Ketua : Mulyono)
Desa Lombok Kulon, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso
- Kelompok Tani Jaya Mulya (Sarwi Priyanto)
Desa Kedungbunder, Kec. Sutajayan, Kab. Blitar
- Gapoktan Tani Makmur Jaya (Ketua : Tulam)
Desa Rojopolo, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang

D. Penghargaan Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

- Pondok Pesantren An Nawari (Ketua : Syaraful Anam)
Desa Seratengah, Kec. Bluto, Kab. Sumenep
- LPIS Darussalam (Ketua : Achmad Cholik)
Desa Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk
- Pondok Pesantren Darul Mutaqqin (Ketua : Abdul Halim)
Desa Sukamalo, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan

E. Penghargaan UP3HP/Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

- Pelaku Usaha Winna Sari (Ketua : Winarno)
Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang
- Pelaku Usaha UD. Sari Murni (Lasimun)
Desa Boyolangu, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
- Pelaku Usaha Indra Ayu (Ketua : Supardjo)
Dsn. Sambirejo, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom,
Kab. Nganjuk

F. Penghargaan Eksportir Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

- CV. Pan Jaya Abadi, Kab. Malang
- Asosiasi Pisang Seroja, Kab. Lumajang
- PT. Selektani Hortikultura (Tunggal Aprilia), Kota Batu

G. Penghargaan Petugas Informasi Pertanian (PIP) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

- Herdi Herisandi,SP (Kab. Sumenep)
- Vinorita,SP. (Kab. Kediri)
- Linna Dwi Handayani,SP. (Kab. Ngawi)

H. Penghargaan Gapoktan PUAP Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

- Gapoktan Bangun Makmur (Ketua : Sarana)
Desa Asmorobangun, Kec. Puncu, Kab. Kediri
- Gapoktan Duta Tani (Ketua : Demiyanto)
Desa Mlorah, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk
- Gapoktan Langgeng (Bendahara : Hartini)
Desa Prigi, Kec. Watulimo, Kec. Trenggalek

c) **Permasalahan dan Upaya Pemecahannya**

Permasalahan

Terselenggaranya Gebyar *Good Agricultural Practices (GAP)* Hortikultura serta Gebyar Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai bhakti krida dan bhakti sosial yang merupakan perwujudan keberpihakan terhadap pertanian, juga merupakan promosi kepada masyarakat agar lebih mencintai produk dalam negeri sekaligus sebagai apresiasi kepada pelaku usaha yang menerapkan *Good Agricultural Practices (GAP)*. Dalam pelaksanaan kegiatan Gebyar GAP Hortikultura serta Gebyar Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut masih belum sepenuhnya mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, hanya diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota dan terdapat 3 Kabupaten/Kota yang belum turut berpartisipasi meskipun telah difasilitasi sarana diantaranya : gedung berikut tenda untuk stand, serta materi promosi.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan permasalahan dalam penyelenggaraan Gebyar GAP Hortikultura serta Gebyar Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura (Gebyar Hari Krida Pertanian) kedepan perlu dilakukan pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota supaya berpartisipasi pada penyelenggaraan tahun-tahun selanjutnya.

1.2 DINAS PERKEBUNAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator prosentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan ;
- 2) Meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produksi tanaman;
- 3) Meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan ;

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 5.314.000.000,00 dan realisasi Rp. 4.822.939.660,00 atau 90,76%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan

- Pemberdayaan kelompok, pemberdayaan kelembagaan dan sekolah lapang agribisnis untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani perkebunan ;
- Bantuan sarana dan prasarana perkebunan, untuk sarana aktifitas meningkatkan pendapatan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar perkebunan.

Tabel 4.1.2.1
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Uraian	Capaian Kinerja Program			
	Satuan	2012	2013	2014
Pemberdayaan petani	orang	1.040	1.468	2.507

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Jatim

Kegiatan pemberdayaan di program peningkatan kesejahteraan petani pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kegiatan di tahun 2013. Realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sebagai output target program yang mencapai 100%.

Dengan adanya kontinuitas pelatihan di kelompok tani tiap tahun diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok dalam melaksanakan agribisnis perkebunan serta penguatan kelembagaan kelompok tani yang dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan petani untuk masyarakat di sekitar perkebunan selain pemberdayaan juga diikuti dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana perkebunan yang diutamakan bagi petani miskin dan telah terealisasi bantuan meliputi UPH Kopi olah basah, alat pengolah gula merah kelapa, alat sangrai dan pembubuk kopi, unit pengering biji kakao, nira kelapa, kopi ose, kakao gelondong, kopi gelondong basah dan bibit nilam.

Program peningkatan kesejahteraan petani mendukung tercapainya sasaran meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator prosentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan dan meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produksi tanaman serta meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 78.385.513.000,00 dan realisasi Rp. 64.215.311.194,00 atau 81,92%, pagu dan realisasi

anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan

- Meningkatnya produksi komoditi perkebunan Jawa Timur melalui pengembangan kakao, kopi arabika, kelapa dan komoditi lainnya yang diarahkan pada pembentukan kawasan-kawasan sebagai basis produksi perkebunan ;
- Meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan melalui kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi sehingga dapat membantu peningkatan produksi perkebunan.

Tabel 4.1.2.2
Capaian Kinerja Program Peningkatan
Produksi Pertanian/Perkebunan

Uraian	Capaian Kinerja Program			
	Satuan	2012	2013	2014
Pengembangan areal tanaman perkebunan	Ha	16.343	19.225	15.157
Rehabilitasi tanaman perkebunan	Ha	250	250	250
Intensifikasi tanaman perkebunan	Ha	7.000	8.950	11.450
Bantuan sarana prasarana perkebunan (<i>on farm</i>)	Unit	862	1.764	4.859

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Jatim

Capaian kinerja program peningkatan produksi tanaman pertanian/perkebunan tahun 2014 terealisasi sesuai target yang direncanakan dalam DPA.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan mendukung tercapainya sasaran meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator prosentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan dan meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produksi tanaman serta meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

Perkembangan capaian kinerja pembangunan perkebunan khususnya untuk 4 komoditi unggulan melalui program peningkatan produksi pertanian/perkebunan pada tahun 2013 dan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut :

- Komoditi tebu pada tahun giling 2014, luas areal mencapai 219.111 hektar dengan produksi gula sebesar 1.261.964 ton atau meningkat sebesar 1,42 % dibanding produksi gula tahun 2013 sebesar 1.244.284 ton dengan luas areal mencapai 211.830 hektar.
- Komoditi tembakau pada tahun 2014, luas areal tanam mencapai 118.267 hektar dengan produksi sebesar 109.948 ton. Sedangkan untuk luas areal tahun 2013 seluas 95.651 hektar dengan produksi sebesar 73.929 ton. Secara nasional, Jawa Timur merupakan penghasil utama tembakau dan rokok. Tanaman tembakau berkembang di 30 Kabupaten, terdiri dari dua jenis, yaitu tembakau Voor Oogst (sigaret/kretek) dan tembakau Besuki Na Oogst (cerutu). Tembakau Voor Oogst kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik rokok dalam negeri, sedangkan tembakau Na Oogst seluruhnya merupakan produk ekspor.
- Untuk komoditi kopi, luas areal tahun 2014 mencapai 103.000 hektar dan produksi sebesar 58.260 ton. Pada tahun 2013 produksi sebesar 56.525. Secara nasional areal kopi seluas 1,3 juta hektar dengan produksi 721 ribu ton berada di urutan ke-3 produk kopi dunia setelah Brazilia (2,1 juta ton) dan Vietnam 990 ribu ton. Kontribusi produksi kopi Jawa Timur hanya sebesar 5 - 7 % dan masih dapat ditingkatkan. Mulai tahun 2012 Jawa Timur mengembangkan kopi arabika sampai dengan tahun 2014 total luas pengembangan 6.000 ha.
- Produksi kakao secara total Jawa Timur pada tahun 2014 mencapai 41.000 ton dan luas areal 67.500 hektar, dan di tahun

2013 luas areal 65.125 hektar dengan dan produksi 39.200 ton. Pengembangan kakao sangat berpeluang besar untuk diusahakan di Provinsi Jawa Timur, karena masih banyak terdapat lahan potensial yang dapat ditanami kakao, terutama di Zona Pantai Selatan mulai Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi serta di Zona Tengah yang sudah berkembang baik, mulai Kabupaten Jombang, Nganjuk, Kediri, Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Magetan.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

- Kondisi pasar gula tahun 2014 yang kurang menggemburkan, dimana harga lelang lebih rendah dari HPP yang ditetapkan pemerintah, dikawatirkan berdampak pada lesunya gairah petani dalam berusahatani tebu. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi, program swasembada gula akan semakin sulit untuk dicapai.
- Memperhatikan pasar gula yang kurang kondusif tersebut, maka kedepan perlu langkah-langkah yang strategis agar petani tetap memiliki semangat yang tinggi untuk menanam tebu. Untuk tahun 2015, diprediksi akan mengalami kesulitan untuk menambah areal baru, upaya yang memungkinkan untuk dilakukan adalah mempertahankan existing areal tahun 2014 yang mencapai luas 219.111 ha. Oleh karena itu, peningkatan produksi dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi, utamanya bongkar ratoon dan rawat ratoon, agar produktivitas gula dapat ditingkatkan.

3) Program Pengembangan Agribisnis

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 42.768.457.000,00 dan realisasi Rp. 29.044.657.464,00 atau 67,91%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan

- Meningkatkan sumberdaya petani perkebunan melalui pelatihan dan fasilitasi pengembangan agribisnis di kelompok tani ;
- Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk perkebunan dengan bantuan sarana dan prasarana agribisnis perkebunan.

Tabel 4.1.2.3
Capaian Kinerja Program Pengembangan Agribisnis

Uraian	Capaian Kinerja Program			
	Satuan	2012	2013	2014
Bantuan sarana prasarana asahatani agribisnis perkebunan (<i>off farm</i>)	Unit	3.390	4.994	20.208

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Jatim

Adapun capaian kinerja program pengembangan agribisnis tidak dapat dicapai sesuai dengan target sasaran yang telah direncanakan dalam DPA dikarenakan ada kegiatan yang bersumber dari alokasi anggaran Dana Alokasi Kegiatan (DAK) Tahun 2014 untuk pembangunan gedung laboratorium benih yang tidak dapat direalisasikan karena adanya gugatan dari ahli waris pemilik tanah semula.

Program pengembangan agribisnis mendukung tercapainya sasaran meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator prosentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan dan meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produksi tanaman serta meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

c) Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Pemasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya sarana produksi, kurangnya sarana irigasi, keterbatasan alat pengolah tanah/traktor untuk lahan kering, kerusakan jalan/jembatan. Sedangkan guna mengatasi hal tersebut, maka yang dilakukan yaitu dengan pemberian meningkatkan volume bantuan sarana prasarana yang cukup untuk pembangunan perkebunan di Jawa Timur.

4) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 900.000.000,00 dan realisasi Rp. 826.661.725,00 atau 91,85%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan

Fasilitasi sarana prasarana pembentukan kawasan agropolitan perkebunan

Tabel 4.1.2.4
Capaian Kinerja Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Uraian	Capaian Kinerja Program			
	Satuan	2012	2013	2014
Bantuan sarana prasarana pengembangan kawasan agropolitan perkebunan	paket	12	12	7

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Jatim

Adapun capaian kinerja program pengembangan pengembangan kawasan agropolitan dapat dicapai sesuai dengan target sasaran yang telah direncanakan dalam DPA.

Kawasan pengembangan agropolitan diarahkan untuk terbentuknya kawasan wilayah yang terintegasi mulai dari *on farm* sampai dengan *off farm* serta sarana prasarana penunjang lainnya.

Program pengembangan kawasan agropolitan mendukung tercapainya sasaran meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator prosentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan dan meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produksi tanaman serta meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 1.975.000.000,00 dan realisasi Rp. 1.681.593.550,00 atau 85,14% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Fasilitasi kemitraan petani dan pengusaha pemasaran serta promosi dalam maupun luar provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.1.2.5
Capaian Kinerja Program Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan

Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Program		
		2012	2013	2014
Pelaksanaan promosi hasil perkebunan	Paket	10	9	10

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Jatim

Adapun capaian kinerja program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dapat dicapai sesuai dengan target sasaran yang telah direncanakan.

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan jejaring perdagangan dengan membuka stan perkebunan di Puspo Agro (Pusat Pasar Agrobisnis) di Jemundo serta mengikutkan kelompok tani perkebunan dalam lelang komoditi perkebunan setiap bulan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan mendukung tercapainya sasaran meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator prosentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan dan meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produksi tanaman serta meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu sebesar Rp. 475.000.000,00 dan realisasi Rp. 370.613.500,00 atau 78,02% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Fasilitasi pengembangan kawasan ketahanan pangan dengan bantuan bibit tanaman perkebunan.

Tabel 4.1.2.6
Capaian Kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Uraian	Capaian Kinerja Program			
	Satuan	2012	2013	2014
Bantuan bibit komoditi perkebunan pengembangan kawasan ketahanan pangan	Batang	40.000	41.500	29.500

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Jatim

Adapun capaian kinerja program peningkatan ketahanan pangan dapat dicapai sesuai dengan target sasaran yang telah direncanakan.

Total bantuan bibit program peningkatan ketahanan pangan dengan komoditi perkebunan berupa bibit kelapa mulai dari tahun awal RPJMD Sampai dengan tahun 2014. Dengan digunakannya komoditi kelapa diharapkan dapat dikembangkan di lahan tegalan maupun pekarangan yang berada di wilayah kota. Selain bantuan bibit juga dilaksanakan pelatihan alih teknologi proses pengolahan hasil produksi perkebunan.

Program peningkatan ketahanan pangan mendukung tercapainya sasaran meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator prosentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan dan meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produksi tanaman serta meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

1.3. DINAS PETERNAKAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan;
- 2) Meningkatnya status kesehatan hewan dan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi;
- 3) Meningkatnya pendapatan peternak.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Agribisnis

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 6.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.037.119.164,00 atau 64,08% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Pengembangan Agribisnis dimaksudkan untuk mengembangkan usaha peternakan yang dapat meningkatkan populasi ternak. Dengan hasil/outcome yaitu meningkatnya populasi ternak dan penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan. Peningkatan populasi ternak diukur melalui satu indikator capaian kinerja yaitu jumlah populasi ternak terdiri dari ternak (1) sapi potong, (2) sapi perah, (3) kerbau, (4) kuda, (5) kambing, (6) domba, (7) babi, (8) ayam buras, (9) ayam ras petelur, (10) ayam ras pedaging, (11) itik dan (12) entok.

Capaian peningkatan jumlah populasi ternak yang terdiri dari (1) sapi potong, (2) sapi perah, (3) kerbau, (4) kuda, (5) kambing, (6) domba, (7) babi, (8) ayam buras, (9) ayam ras petelur, (10) ayam pedaging, (11) itik, (12) entok pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 kecuali pada ternak kuda, babi dan ayam petelur. Peningkatan jumlah populasi ternak di tahun 2014 dibanding tahun 2013 dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan guna meningkatkan populasi, antara lain : hal ini didukung dengan kegiatan

fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan dan kegiatan pengembangan kawasan sentra perbibitan ternak di pedesaan. Untuk penurunan jumlah populasi ternak kuda, babi dan ayam petelur pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penurunan jumlah populasi ternak kuda sebesar 1,35% disebabkan oleh pola pemeliharaannya yang masih tradisional yang tidak memperhatikan kualitas bibit, hal ini dipengaruhi penggunaan kuda hanya sebagai alat transportasi dan saat ini jarang digunakan;
- Jumlah populasi ternak babi yang mengalami penurunan sebesar 10,23% disebabkan tempat pemeliharaan dan konsumen yang terbatas/tertentu;
- Selain penurunan jumlah populasi ternak kuda dan babi, ternak ayam petelur juga mengalami penurunan jumlah populasi yaitu sebesar 7,09%. Ternak ayam petelur mengalami penurunan jumlah karena disebabkan harga telur yang jatuh sehingga peternak untuk sementara menurunkan produksinya dengan tidak menambah populasi. Harga telur yang jatuh disebabkan adanya peredaran telur breeding di pasar telur konsumsi, untuk itu dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan surat edaran pelarangan penjualan telur breeding untuk telur konsumsi dan mencabut ijin produksi telur breeding bagi perusahaan breeding ayam petelur yang melanggar aturan.
- Perkembangan Peningkatan jumlah ternak dari tahun 2012 ke tahun 2014, menunjukkan perkembangan yang beragam namun untuk sebagian besar komoditas ternak menunjukkan perkembangan dengan trend peningkatan. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan peternakan yang telah dilakukan dan permasalahan yang ada, selanjutnya akan melakukan langkah-langkah konkrit dan solutif pengembangan peternakan di tahun anggaran berikutnya.

Perkembangan capaian kinerja program tersebut diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.1.3.1
Jumlah populasi ternak Tahun 2012-2014

No	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	Prosentase peningkatan capaian th 2013-2014 (%)
	Jumlah populasi ternak (ekor)	Capaian	Capaian	Capaian	
1.	Sapi potong	4.957.477	3.949.097	4.113.443	4,16
2.	Sapi perah	308.841	237.673	241.645	1,67
3.	Kerbau	33.498	28.118	28.906	2,80
4.	Kuda	11.632	10.581	10.438	(-1,35)
5.	Kambing	2.879.369	2.937.980	2.968.795	1,05
6.	Domba	1.088.602	1.185.472	1.216.024	2,58
7.	Babi	37.312	46.090	41.376	(-10,23)
8.	Ayam buras	32.143.678	33.806.963	34.099.410	0,87
9.	Ayam ras petelur	40.268.631	43.066.361	40.012.547	(-7,09)
10.	Ayam ras pedaging	51.981.780	52.288.598	52.379.452	0,17
11.	Itik	3.853.128	4.213.379	4.568.487	8,43
12.	Entok	875.135	946.323	966.948	2,18

Sumber data : Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan permasalahan

Permasalahan :

- Masih terbatasnya sumber daya manusia karena masih beranggapan bahwa menjadi petani ternak adalah pekerjaan sampingan;
- pemotongan ternak ruminansia betina produktif yang masih tinggi;
- Banyaknya pengeluaran hewan ternak secara ilegal ;
- Pemotongan ternak diluar RPH.

Upaya pemecahan permasalahan

- Melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas dalam upaya meningkatkan kualitas bibit, permodalan, diversifikasi produk dan pemasaran hasil peternakan sehingga diharapkan adanya perubahan pola pikir dan gairah masyarakat untuk menjadikan petani ternak sebagai pekerjaan utama;

- Adanya larangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif melalui penerbitan PERDA No 3 Tahun 2012 dengan tujuan menjaga keberlangsungan kuantitas bibit ternak yang pada akhirnya berpengaruh terhadap populasi;
- Melakukan penguatan di kawasan check point dengan bantuan pihak terkait (dinas kabupaten/kota dan kepolisian) untuk meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya ternak melalui jalur-jalur ilegal.

2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 34.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 33.305.610.255,00 atau 95,98% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi hasil peternakan. Dengan Hasil/outcome meningkatnya produksi hasil peternakan. Hasil meningkatnya produksi hasil ternak diukur melalui satu capaian indikator kinerja yaitu Jumlah produksi hasil ternak terdiri dari produksi (1) daging, (2) telur dan (3) susu.

Capaian jumlah produksi hasil ternak terdiri dari produksi (1) daging, (2) telur dan (3) susu pada tahun 2014 meningkat dibanding dengan tahun 2013 yaitu sebesar 7,27% (daging), 7,80% (telur) dan 1.32% (susu), hal ini didukung dengan kegiatan (1) Pemberdayaan Laboratorium dan pengembangan alsin peternakan; (2) pemberdayaan UPTD Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak; (3) kegiatan Optimalisasi Inseminasi Buatan. Perkembangan capaian jumlah produksi hasil ternak dari tahun 2012 sampai tahun 2014 menunjukkan trend yang terus meningkat, walaupun pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan untuk produksi daging dan susu. Penurunan produksi daging pada tahun 2013 disebabkan berkurangnya

jumlah populasi ternak penghasil daging dan berkurangnya pemotongan, sedangkan penurunan produksi susu dipengaruhi penurunan jumlah populasi komoditas ternak penghasil susu dan gangguan reproduksi yang masih cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan perbaikan bibit dan penanganan gangguan reproduksi, selain itu dilakukan penyuluhan good breeding practices kepada kelompok ternak secara intensif. Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.3.2
jumlah produksi hasil ternak terdiri dari konsumsi (1) daging, (2) telur dan (3) susu (ton/tahun) Tahun 2012-2014

No	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	Prosentase Peningkatan capaian th 2013-2014 (%)
		Capaian	Capaian	Capaian	
1.	jumlah produksi hasil ternak (ton) daging	351.493	350.613	376.131	7,27
2.	telur	320.384	340.232	366.789	7,80
3.	susu	554.312	416.418	421.924	1.32

Sumber data : Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan permasalahan

Permasalahan :

- Masih tingginya pemotongan sapi betina produktif;
- Kurangnya petugas IB dan dokter hewan dilapangan.

Upaya pemecahan permasalahan

- Adanya larangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif melalui penerbitan PERDA No 3 Tahun 2012 dan dalam penegakannya telah dilakukan koordinasi dengan dinas Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan serta pihak berwajib/kepolisian;
- Melakukan pemeriksaan terhadap sapi betina yang mengalami gangguan reproduksi dan dilakukan pengobatan;

- Melakukan pelatihan ATR dan IB untuk menambah petugas IB dan ATR dilapangan serta merekrut dokter hewan untuk ditempatkan di puskesmas.

d) Penghargaan Nasional Tahun 2014 yang diterima adalah

- Peringkat Harapan I Tingkat Nasional Kategori Inseminator Berprestasi diraih oleh Bambang, S.Pt, Wajak Kab. Malang.

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 28.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 26.266.712.331,00 atau 92,49% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dimaksudkan untuk meningkatkan status kesehatan hewan dan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi. Dengan hasil/outcome yaitu menurunnya kasus penyakit *brucellosis* dan avian influenza serta meningkatnya jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan produk asal hewan. Hasil menurunnya kejadian penyakit Brucellosis pada sapi diukur melalui satu indikator capaian kinerja, yaitu Rasio kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah dan Hasil menurunnya kejadian penyakit Avian Influenza pada unggas diukur melalui satu indikator capaian kinerja, yaitu Jumlah kasus penyakit Avian Influenza pada unggas. Peningkatan jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan produk asal hewan diukur melalui indikator capaian kinerja, yaitu Jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol *Veteriner*.

Capaian menurunnya kasus penyakit Brucellosis pada sapi diukur melalui satu indikator capaian kinerja, yaitu Rasio kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah. Capaian Rasio kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah tahun 2014 dibanding tahun 2013

menunjukkan penurunan sebesar 52,00% dan perkembangan capaian Rasio kasus penyakit *Brucellosis* pada sapi perah dari tahun 2012 sampai tahun 2014 menunjukkan trend yang terus menurun (tabel 3.1.). Hal ini artinya, pengendalian penyakit brucellosis berjalan secara efektif. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengendalikan penyakit *Brucellosis* pada sapi agar dapat mendukung pencapaian target produksi susu dengan meningkat pengawasan lalu lintas ternak dengan menambah jumlah cek point dan bekerja sama dengan pihak berwajib serta melakukan vaksinasi pada calon indukan dan indukan sapi betina.

Capaian menurunnya kasus penyakit Avian Influenza pada unggas diukur melalui satu indikator capaian kinerja, yaitu Jumlah kasus penyakit Avian Influenza pada unggas. Perkembangan capaian Jumlah kasus penyakit Avian Influenza pada unggas dari tahun 2012 sampai tahun 2014 menunjukkan trend angka yang naik turun. Jumlah kasus penyakit Avian Influenza pada tahun 2013 meningkat dibanding tahun 2012 yang disebabkan adanya wabah penyakit Avian Influenza pada unggas itik di beberapa wilayah di Jawa Timur. Untuk itu Dinas Peternakan telah melakukan langkah penanggulangan di wilayah yang terkena wabah Avian Influenza dan melakukan pencegahan masuknya penyakit Avian Influenza di wilayah yang bebas, hal ini ditunjukkan dengan capaian penurunan jumlah kasus penyakit Avian Influenza pada unggas tahun 2014 dibanding tahun 2013 yang menunjukkan penurunan sebesar 78,57%. Meski capaian Kinerja menunjukkan hasil yang baik, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengendalikan penyakit Avian Influenza pada unggas agar dapat mendukung pencapaian target populasi ternak unggas dan produksi daging. Pencapaian sasaran menurunnya kejadian penyakit Avian Influenza pada unggas dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan: (1) Pengamatan penyakit hewan menular; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan

Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban. Perkembangan capaian kinerja diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.3.3
Rasio kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah dan
Jumlah kasus penyakit Avian Influenza pada unggas
Tahun 2012-2014

No	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	Prosentase penurunan capaian th 2013-2014 (%)
		Capaian	Capaian	Capaian	
1.	Rasio kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah	0,0755	0,0325	0,0156	52,00
2.	Jumlah kasus penyakit Avian Influenza pada unggas (kasus)	31	70	15	78,57

Sumber data : Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur

Capaian Peningkatan jumlah unit usaha yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan diukur dari Jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol *Veteriner*. Jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol *Veteriner* tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 9,50%, sedangkan perkembangan capaiannya dari tahun 2012 sampai tahun 2014 menunjukkan trend terus meningkat. Peningkatan capaian jumlah unit usaha dilaksanakan melalui kegiatan : (1) Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan (2) Pengawasan dan pengendalian kesejahteraan hewan; dan (3) Pengawasan peredaran produk hewan nonpangan. Perkembangan capaian kinerja diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.3.4
Jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh
sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
Tahun 2012 – 2014

Indikator Kinerja	2012	2013	2014	Prosentase peningkatan capaian th 2013-2014 (%)
	Capaian	Capaian	Capaian	
Jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (unit)	191	221	242	9,50

Sumber data : Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan permasalahan

Permasalahan :

- Masih banyaknya TPH (tempat pemotongan hewan) yang tidak mempunyai ijin dan tidak memenuhi standar;
- Masih kurangnya perhatian dan ketidaktahuan peternak/masyarakat dan petugas lapangan terhadap penyakit-penyakit hewan menular sehingga kesadaran untuk melapor kepada pihak dinas terkait masih minim.

Upaya pemecahan permasalahan

- Melakukan Pengawasan dan bimbingan terhadap TPH sehingga TPH yang tidak sesuai standar akan ditutup sedangkan TPH yang memenuhi standar dapat ditingkatkan menjadi RPH;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan kepada petugas lapangan sehingga sistem pengawasan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dapat berjalan lebih efektif;
- Memberikan bantuan obat-obatan dan vaksin.

d) Penghargaan Nasional Tahun 2014 yang diterima :

- Peringkat I Tingkat Nasional Kategori Dokter Hewan Puskesmas diraih oleh drh. Eko Yuli, Puskesmas Kab. Situbondo;
- Peringkat I Tingkat Nasional Kategori Paramedik Puskesmas diraih oleh Komarudin, Puskesmas Pasrepan Kab. Pasuruan.

4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 65.571.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 59.084.231.651,00 atau 90,11% pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dimaksudkan untuk mengembangkan usaha peternakan yang dapat meningkatkan pendapatan peternak. Dengan hasil/outcome yaitu meningkatnya pendapatan peternak. Peningkatan pendapatan peternak diukur melalui satu indikator capaian kinerja, yaitu jumlah pendapatan ternak.

Capaian peningkatan pendapatan peternak pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 6,34%. Peningkatan jumlah populasi ternak di tahun 2014 dibanding tahun 2013 dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan guna meningkatkan pendapatan peternak, antara lain : (1) Peningkatan prestasi kelompok tani ternak, Sumber daya manusia dan Gemarampai; (2) Pengembangan kawasan peternakan dan pembibitan; (3) Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hasil peternakan; (4) Peningkatan populasi ternak (Integrasi ternak dan komoditas pertanian lainnya); (5) Pengembangan budidaya ternak; (6) Penguatan kelembagaan petani tembakau; (7) Peningkatan Populasi Sapi di Madura. Perkembangan Peningkatan jumlah ternak dari tahun 2012 ke tahun 2014, menunjukkan perkembangan dengan trend terus meningkat. Perkembangan capaian kinerja program tersebut diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.3.5
Jumlah Pendapatan Peternak Tahun 2012-2014

Indikator Kinerja	2012	2013	2014	Prosentase peningkatan capaian th 2013-2014 (%)
	Capaian	Capaian	Capaian	
Jumlah pendapatan peternak (Rp)	17.140.200	18.046.698	19.190.704	6,34

Sumber data : Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan permasalahan

Permasalahan :

- Kelompok peternak penerima bantuan yang sebagian masih pemula sedikit banyak sudah memperoleh pengetahuan dasar dalam beternak;
- Peternak menghendaki diadakan pelatihan tentang beternak yang baik secara berkala;
- Permintaan peternak agar paket bantuan perlu ditambah.

Upaya pemecahan permasalahan

- Melakukan pembinaan kepada peternak secara berkala dengan mengadakan pelatihan dan workshop;
- Mengintensifkan frekuensi kunjungan lapangan untuk monitoring, pembinaan dan evaluasi;
- Untuk penambahan paket bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada.

d) Penghargaan Nasional Tahun 2014 yang diterima :

- Peringkat I Tingkat Nasional Kategori Kelompok Peternak Sapi Potong diraih Kelompok Peternak Bangun Jaya, Wonoasih Kota Probolinggo;
- Peringkat IV Tingkat Nasional Kategori Kelompok Peternak Kambing diraih Kelompok Peternak Etawa Jaya, Kab. Lumajang;

- Peringkat II Tingkat Nasional Kategori Kelompok Peternak Ayam Buras diraih Kelompok Peternak Buras Jaya, Kawedanan Kab. Magetan
- Peringkat II Tingkat Nasional Kategori Kelompok Peternak Itik diraih Kelompok Peternak Manunggal Lestari, Kab. Kediri.

Selain penghargaan diatas, prestasi lain yang didapat Jawa Timur adalah dengan ditetapkannya rumpun/galur ternak ayam gaok (keputusan nomor 1055/Kpts/SR.211/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014) dan Domba ekor gemuk/Domba Sapudi (Kepmentan 1056/Kpts/SR.211/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014) sebagai galur ternak asli Jawa Timur.

5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 4.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.707.978.125,00 atau 84,27%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan peternak. Dengan hasil/outcome yaitu meningkatnya pendapatan peternak. Peningkatan pendapatan peternak diukur melalui capaian kinerja yaitu jumlah konsumsi hasil ternak terdiri dari konsumsi (1) daging, (2) telur dan (3) susu.

Capaian jumlah konsumsi hasil ternak terdiri dari konsumsi (1) daging, (2) telur dan (3) susu pada tahun 2014 meningkat dibanding dengan tahun 2013 sebesar 1,33% (daging) dan 1,25% (telur) kecuali pada konsumsi susu yg sedikit turun sebesar 0,29%, capaian jumlah konsumsi hasil ternak didukung dengan kegiatan Promosi pemasaran hasil gerdu taskin dan koordinasi asosiasi peternakan. Perkembangan capaian jumlah konsumsi hasil ternak dari tahun 2012 sampai tahun

2014 menunjukkan trend yang terus meningkat, walaupun pada tahun 2013 terjadi penurunan konsumsi untuk komoditas daging hal ini disebabkan adanya harga daging yang cenderung terus naik dan jumlah produksi komoditas daging yang turun. Untuk menstabilkan harga komoditas daging tersebut Dinas Peternakan telah berkoodinasi dengan dinas Disperindag mengenai *supply demand* daging di pasar dan Dinas Peternakan akan terus meningkatkan produktifitas komoditas ternak, sehingga dari pemenuhan jumlah produksi dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.3.6
Jumlah konsumsi hasil ternak terdiri dari konsumsi (1) daging, (2) telur dan (3) susu (kg/kapita/tahun) Tahun 2012-2014

No	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	Prosentase peningkatan capaian th 2013-2014 (%)
		Capaian	Capaian	Capaian	
	jumlah konsumsi hasil ternak(kg/kapita /tahun)				
1.	daging	9,25	9,00	9,12	1,33
2.	telur	6,96	7,21	7,30	1,25
3.	susu	10,35	10,46	10,43	(-0,29)

Sumber data : Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur

c) **Permasalahan dan Upaya pemecahan permasalahan**

Permasalahan :

- Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti tentang pentingnya bahan pangan hewani untuk peningkatan nilai gizi masyarakat dan kecemasan masyarakat terhadap penyakit yang dapat ditularkan melalui bahan pangan hewani;
- Harga dari beberapa bahan pangan hewani yang masih mahal seperti daging sapi;

Upaya pemecahan permasalahan

- Melakukan penyuluhan tentang pentingnya gizi dari bahan pangan asal hewani;
- Memperbaiki dan meningkatkan standar dari RPH sehingga produk yng dihasilkan ASUH (aman, sehat, utuh dan halal);
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga harga bahan pangan hewani bisa dijangkau masyarakat.

2. URUSAN KEHUTANAN

Pembangunan Kehutanan ditujukan untuk meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan

2.1 DINAS KEHUTANAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis
- 2) Meningkatnya perlindungan hutan dan hasil hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilakukan melalui program-program sebagai berikut

1) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp 20.459.224.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.257.025.521,00 atau 89,24%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program)

Perkembangan capaian kinerja program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.1.1
Capaian Kinerja Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2012 s.d 2014

No	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase penurunan pencurian hasil hutan	%	5,73	43,67	11,52
	- Jumlah pencurian hasil hutan	Batang	37.565	21.159	18.720
2.	Persentase peningkatan	%	2,58	7,64	7,47

No	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	produksi kayu hutan rakyat				
	- Jumlah produksi hutan rakyat	M3	2.509.523,51	2.701.283,79	2.903.304,97
3.	Persentase peningkatan kayu masuk melalui pelabuhan	%	17,86	-10,72	13,32
	- Jumlah kayu masuk melalui pelabuhan	M3	1.506.053,01	1.344.666,73	1.523.778,83
4.	Persentase peningkatan partisipan (kelompok) dalam pengelolaan hutan	%	1	0,22	0,27
	- Jumlah partisipan dalam Pengelolaan hutan	Kelompok	1.816	1.820	1.825

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jatim

- Pencurian hasil hutan secara garis besar cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai 2014. Pencapaian persentase penurunan pencurian hasil hutan didukung kegiatan Perencanaan, pemantauan dan pemantapan status kawasan, perlindungan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang dilaksanakan dalam bentuk penanaman batas kawasan Tahura R. Soerjo sepanjang 14 km, monitoring pengukuhan kawasan hutan Provinsi Jawa Timur, monitoring dan evaluasi lahan kompensasi di Jawa Timur, monitoring penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan, monitoring perubahan fungsi kawasan hutan, monitoring penggunaan kawasan hutan untuk Jalur Lintas Selatan (JLS), koordinasi penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan, koordinasi pinjam pakai kawasan hutan untuk JLS, percepatan pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan, serta penyelesaian pinjam pakai kawasan hutan.

- Jumlah produksi hasil hutan rakyat secara umum menunjukkan tren meningkat dari tahun 2012 sampai 2014. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan kayu bulat sebagai bahan baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Kayu bulat yang berasal dari hutan Negara (Perum Perhutani) dan luar Jawa belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan IPHHK. Kekurangan pasokan bahan baku untuk IPHHK tersebut ditangkap oleh masyarakat sebagai peluang untuk pengembangan hutan rakyat. Pencapaian produksi hasil hutan rakyat didukung oleh 6 kegiatan, yaitu :
 - Sosialisasi ecolabelling hutan rakyat yang dilaksanakan dalam bentuk : temu usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan *Forest Management Unit* (FMU), peningkatan produktivitas lahan hutan rakyat, peningkatan kemandirian masyarakat hutan rakyat, serta identifikasi pemegang sertifikasi pengelolaan hutan lestari pada hutan hak dan hutan negara.
 - Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan dilaksanakan dalam bentuk rekonsiliasi produksi kayu dan non kayu Divisi Regional II Jawa Timur Perum Perhutani Tahun 2014, monitoring Rencana Teknik Tahunan (RTT) Tahun 2014, serta evaluasi RTT Tahun 2013.
 - Penatausahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan dilaksanakan dalam bentuk : pembekalan teknis penatausahaan hasil hutan untuk penerbit FAKO/FAKB dan SKAU, rekonsiliasi penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), rekonsiliasi pengusulan Dana Bagi Hasil (DBH) PSDH, fasilitasi verifikasi legalitas kayu, serta uji petik penerbitan dokumen angkutan kayu.
 - Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis kebijakan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), workshop proses perijinan IPHHK, pemantauan kepada pemegang Izin Usaha IPHHK dan inventarisasi IPHHK

- Pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan dan tanaman Hutan yang dilaksanakan dalam bentuk : identifikasi calon sumber benih tanaman hutan, pembinaan pengelola sumber benih tanaman hutan, temu usaha perbenihan tanaman hutan, pembinaan pengada/ pengedar benih/bibit tanaman hutan, serta sosialisasi sertifikasi perbenihan tanaman hutan.
 - Kerjasama antar daerah dan peningkatan investasi bidang kehutanan dilaksanakan dalam bentuk : kerjasama antar daerah, koordinasi pengembangan investasi daerah bidang kehutanan melalui pemanfaatan SDH lokal, serta pengentasan kemiskinan sekitar hutan dalam rangka percepatan MDGs
- Jumlah kayu masuk melalui pelabuhan menunjukkan tren meningkat dari tahun 2012 sampai 2014. Namun demikian, pada Tahun 2013 kayu masuk melalui pelabuhan mengalami penurunan yang disebabkan oleh pengesahan Rencana Kerja Tahunan dari daerah asal yang mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada tidak tercapainya jumlah produksi kayu bulat. Pencapaian jumlah kayu masuk melalui pelabuhan didukung oleh kegiatan Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyegaran wasganis PHPL RP2HH, serta bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan.
- Jumlah partisipan dalam pengelolaan hutan secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2014. Namun demikian, peningkatan jumlah kelompok partisipan tidak cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
- masa Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap 3 tahun sekali,
 - transisi masa pembaharuan akta notarial PKS,
 - pendataan penetapan kelompok baru untuk PKS
- Pencapaian jumlah partisipan (kelompok) dalam pengelolaan hutan didukung oleh 6 kegiatan, yaitu :

- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pelatihan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis LMDH
- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pembinaan kelembagaan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan teknis kelompok tani, pembinaan teknis LMDH, studi lapang kelompok masyarakat desa hutan, pembentukan jalinan pemasaran antara KPH dan LMDH, dan pertemuan rutin masyarakat desa hutan
- Rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat) dilaksanakan dalam bentuk penanaman pada hutan rakyat seluas 75 Ha, pemanfaatan lahan di bawah tegakan seluas 60 Ha, penghijauan lingkungan dalam rangka HMPI dan inventarisasi hutan rakyat.
- Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) peningkatan penyuluhan kehutanan dan aneka usaha kehutanan yang dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan kawasan hutan perum perhutani melalui PHBM seluas 30 Ha, pengelolaan lahan di luar kawasan hutan melalui pengembangan aneka usaha kehutanan, inventarisasi pengembangan aneka usaha kehutanan, bimbingan teknis pengembangan aneka usaha kehutanan dan PHBM, monitoring dan evaluasi pengembangan aneka usaha kehutanan dan PHBM.
- Monitoring evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan
- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung manajemen dan pemasaran pasca produksi hasil hutan masyarakat sekitar hutan dilaksanakan dalam bentuk

lokakarya manajemen dan pemasaran pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Terdapat kesulitan mencari calon lahan kompensasi dengan luasannya yang memenuhi syarat untuk dikelola secara penuh dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan untuk Jalur Lintas Selatan (JLS).
- Terkait dengan pembangunan JLS di Kabupaten Trenggalek, Biro Perencanaan SDH dan Perusahaan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur belum bisa melaksanakan pengukuran di Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut disebabkan Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim belum merencanakan perubahan trace pelaksanaan JLS di Kabupaten Trenggalek.
- Kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun menyebabkan kerusakan kawasan hutan.
- Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun belum seluruhnya tertib administrasi terutama pelaporan.
- Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30/Menhut-II/2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak membawa konsekuensi terhadap pemenuhan data dan informasi mengenai hasil hutan kayu rakyat di Jawa Timur yang belum seluruhnya dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Prov. Jatim. Hal ini terkait dengan berkurangnya kewenangan Dinas Kehutanan Prov. Jatim dan Dinas yang menangani kehutanan di Kabupaten/Kota dalam hal penerbitan dokumen sehingga jumlah kayu yang beredar sulit untuk dipantau.

Upaya Pemecahan Masalah

- Melakukan koordinasi kepada para pemangku kepentingan terkait calon lahan kompensasi dan melaksanakan konsultasi kepada Menteri Kehutanan.
- Membangun koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur agar segera merencanakan perubahan trace pelaksanaan JLS di Kabupaten Trenggalek.
- Membangun kemitraan dengan LMDH maupun kelompok masyarakat (pokmas) dalam kegiatan pemanfaatan lahan di bawah tegakan. Dengan pola tersebut diharapkan anggota LMDH dan pokmas memiliki tanggung jawab menjaga kelangsungan hutan dari gangguan keamanan baik yang ditimbulkan oleh manusia maupun faktor alam (kebakaran).
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap industri pemegang IUIPHHK yang belum tertib melaporkan kemajuan kegiatannya secara berkala.
- Merumuskan kebijakan yang bersifat revisi terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30/Menhut-II/2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak terkait dengan kewenangan provinsi maupun kabupaten untuk memantau peredaran hasil hutan kayu rakyat.

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran:

Pagu anggaran program ini setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp 5.849.070.550,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.647.714.520,00 atau 96,56%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (capaian program)

Perkembangan capaian kinerja program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.1.2
Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Tahun 2012 s.d. 2014

No	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	
1.	Persentase penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo	%	35,25	54,43	100
	Luas rehabilitasi lahan kritis di Tahura R. Soerjo	Ha	350	350	315
2.	Persentase penurunan lahan kritis di luar kawasan hutan	%	34,09	77,37	100
	Luas rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan	Ha	101.289,32	151.480,6	67.286

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jatim

- Rehabilitasi lahan kritis di Tahura R. Soerjo umumnya dilaksanakan pada lokasi bekas kebakaran hutan yang terjadi sepanjang tahun.
Rehabilitasi lahan kritis di Tahura R. Soerjo didukung oleh 3 kegiatan:
 - Pelestarian dan penataan kawasan Tahura R. Soerjo
 - Operasi perlindungan dan pengamanan hutan
 - Pendampingan pelaksanaan kegiatan operasi perlindungan dan pengamanan hutan
- Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan dilaksanakan dalam bentuk penanaman hutan rakyat, pengkayaan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pemeliharaan hutan rakyat, pengembangan tanaman bawah tegakan hutan rakyat, pengembangan tanaman bambu, dan Kebun Bibit Rakyat (KBR).
Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan didukung oleh 2 kegiatan :

- Rehabilitasi lahan kritis/potensial kritis
- Penanaman pohon sepanjang jalan nasional dan jalan provinsi

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Jumlah Satuan Pengamanan Hutan dirasa masih minim untuk melakukan pengamanan kawasan Tahura R. Soerjo yang mencakup 44 desa penyangga yang tersebar di 5 kabupaten/kota.
- Terkait dengan upaya reboisasi dihadapkan pada beberapa kendala, yaitu : lokasi reboisasi yang cukup jauh dengan kondisi medan yang sulit serta ketergantungan penanaman pada musim hujan yang umumnya jatuh di triwulan IV.
- Jumlah obyek wisata alam yang ditawarkan dan jumlah wisatawan yang meningkat tidak diimbangi dengan jumlah petugas pelayanan sehingga berimplikasi pada penurunan mutu layanan
- Sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan kurang memadai baik dari jumlah maupun fungsinya sehingga berdampak pada efektifitas dan efisiensi upaya pemadaman kebakaran.
- Pemahaman masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya menjaga keberadaan hutan khususnya kawasan konservasi cukup baik namun kondisi tersebut berbenturan dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi hidupnya sehingga mendorong mereka melakukan pencurian hasil hutan.
- Kasus pencurian kayu di wilayah Tahura R. Soerjo oleh masyarakat sekitar hutan masih rawan terjadi.

Upaya Pemecahan Masalah

- Minimnya jumlah Satuan Pengamanan Hutan dapat diselesaikan salah satunya dengan membentuk/merekrut Satuan Pengamanan Hutan pada Desa Penyangga yang belum mempunyai Satuan Pengamanan Hutan

- Operasi rutin dan gabungan yang melibatkan polisi dan kelompok tani hutan perlu ditingkatkan dengan harapan dapat meminimalisir angka pencurian kayu.
- Menambah jumlah petugas pelayanan obyek wisata alam yang dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap para pengunjung.
- Untuk medan yang cukup sulit kegiatan reboisasi dilaksanakan dengan penaburan benih secara manual
- Pemerintah Provinsi sekiranya menjalin kerja sama dengan instansi/Dinas lain yang memiliki fasilitas untuk pengendalian kebakaran hutan (TNI, BBKSDA, BASARNAS)
- Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan secara rutin pada masing-masing desa penyangga dan sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pemahaman. Khusus kepada masyarakat desa penyangga, perlu diberikan stimulan dalam bentuk hibah dan pendampingan untuk meningkatkan taraf hidup.

3) Program Perencanaan dan pengembangan Hutan

a) Pagu anggaran dan realisasi anggaran:

Pagu anggaran program ini setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp 3.144.505.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.729.673.491,00 atau 86,81%. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom.

d) Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program)

Perkembangan capaian kinerja program Perencanaan dan Pengembangan Hutan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.1.3
Capaian Kinerja Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

No	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	- Terbangunnya data dan informasi pembangunan kehutanan serta perencanaan kehutanan				
	a. Buku statistik Dishut	Buku	100	100	100
	b. Buku Data Strategis	Buku	100	100	100
	c. Review Renstra Dishut	Dokumen	-	1	-
	d. Pameran Kehutanan	event	4	4	4
	e. Rencana Kerja	Dokumen	1	1	1
	f. Laporan Tahunan	Dokumen	3	3	3

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jatim

Pelaporan kinerja sebagai instrument untuk menilai hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan secara efektif atau bahkan sebaliknya. Laporan tahunan kegiatan dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI). Laporan dimaksud dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan perencanaan tahun berikutnya. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan dihimpun dalam bentuk buku statistik Dinas Kehutanan dan Buku Data Strategis yang telah dipublikasikan kepada masyarakat luas. Dalam rangka memperlancar dan mempermudah permintaan dan pertukaran data dan informasi kepada lembaga/instansi lain, Dinas Kehutanan telah membangun alamat situs yang dapat diakses oleh masyarakat.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Proses penghimpunan data dan informasi pembangunan kehutanan Jawa Timur mengalami kendala. Hal tersebut disebabkan karena koordinasi antar instansi terkait di tingkat kabupaten/kota masih belum optimal.

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlu dibangun koordinasi yang baik di tingkat kabupaten/kota sehingga permasalahan terkait penghimpunan data dan informasi dapat ditekan. Untuk memudahkan koordinasi tersebut dapat dilaksanakan pertemuan langsung atau melalui website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral ditujukan untuk Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat;meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, serta meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko akibat bencana geologi.

3.1. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a. Sasaran tahun 2014

- 1) Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk masyarakat di daerah terpencil
- 2) Meningkatnya kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan
- 3) Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang menggunakan air bersih dari air tanah.
- 4) Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi

a) Pagu dan realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 6.230.810.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.477.768.978,00 atau 87,91%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran 16 kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian program)

Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan kelayakan energi baru terbarukan yang banyak tersebar di wilayah Jawa Timur, energi baru terbarukan dapat berupa energi mikro hidro yang berasal dari arus sungai, dan biogas yang berasal dari kotoran ternak.

Potensi Mikro Hidro di Jawa Timur yang sudah dilakukan studi baik studi kelayakan (FS) atau perencanaan teknis (DED) antara lain di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek (2012) dan Kabupaten Lumajang, Ponorogo, Bondowoso dan Jember (2013) serta tahun 2014 dilaksanakan Estimasi Design PLTMH di Kabupaten Probolinggo 2 lokasi dan Pacitan serta Redesign PLTMH di Kabupaten Bondowoso

Tabel 4.3.1.1
Daerah yg sudah dilakukan DED-PLTMH

Tahun	Lokasi Penelitian
2012	Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek
2013	Kab. Banyuwangi dan Kab. Bondowoso
2014	Kab. Probolinggo, Kab. Bondowoso, Kab. Pacitan

Sumber: Dinas ESDM Prov. Jatim

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan dan Penyediaan Pembangkit Listrik menggunakan sumber energi alternatif berupa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); tahun 2014 dibangun 1 Unit PLTMH di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi yang dapat mengaliri listrik bagi 185 KK; Tahun 2013 dibangun 2 unit PLTMH di Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dan Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4.3.1.2
Jumlah PLTMH dan KK yang Teraliri Listrik
Tahun 2012-2014

Tahun	Jumlah PLTMH	Rumah Tangga yang teraliri listrik	Lokasi
2012	2	244 KK	<ul style="list-style-type: none"> Desa kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo Desa Kandangan Kecamatan Kare kabupaten Madiun
2013	2	30 KK	<ul style="list-style-type: none"> Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso.
2014	1	185 KK	<ul style="list-style-type: none"> Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas ESDM Prov. Jatim

Pemanfaatan Biogas yang berasal dari kotoran ternak banyak membantu masyarakat pedesaan dalam memenuhi energi rumah tangga terutama untuk keperluan memasak. Tahun 2012 dibangun 2 unit Biogas yang dimanfaatkan untuk 10 KK di Kabupaten Blitar, tahun 2013 dibangun 27 Unit di Kab. Blitar dan Gresik yang dimanfaatkan untuk 56 KK, dan tahun 2014 dibangun 192 unit Biogas yang dimanfaatkan untuk 192 KK di kab. Tulungagung, Trenggalek dan Blitar. Peningkatan capaian tersebut disebabkan karena pemerintah hanya memberikan bantuan material untuk pembangunan biogas yang selama ini dibangun secara total oleh pemerintah, untuk tahun 2014 pembangunan biogas dilaksanakan bekerja sama/*sharing* pembiayaan dengan masyarakat dan pihak ketiga dengan pertimbangan adanya keberlanjutan pengelolaan biogas lebih optimal sekaligus dalam rangka pemberdayaan modal usaha masyarakat.

Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3
Capaian Kinerja Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi

Indikator Kinerja	Capaian			
	Satuan	2012	2013	2014
Penelitian (FS /DED) Potensi Mikro Hidro	Lokasi (Kab)	Tulungagung Trenggalek	Lumajang Ponorogo Bondowoso Jember	Probolinggo, Pacitan Bondowoso
Penyediaan Listrik untuk masyarakat melalui PLTMH	KK	244	30	185
Pembangunan Biogas	KK	10	56	192

Sumber: Dinas ESDM Prov. Jatim

c) **Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah**

Permasalahan :

- Masih terdapat desa/dusun di Jawa Timur yang belum terjangkau listrik terutama di daerah terpencil dan kepulauan.
- Potensi energi baru terbarukan sudah banyak dikenal oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaan pemanfaatannya terutama pada instalasi biogas. Dalam hal tertentu masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa biogas adalah kotor dan bau, sehingga pemanfaatan biogas belum bisa maksimal.
- Kelompok pengelola PLTMH belum memahami secara teknis dengan baik

Upaya pemecahan masalah :

- Membangun Pembangkit Listrik dengan memanfaatkan potensi energi setempat yaitu energi air, energi surya dan energi angin.
- Memberikan pelatihan dan sosialisasi pada pengelola PLTMH dan pengguna biogas serta Aparat setempat
- Dalam pengelolaan PLTMH perlu dibentuk Petugas Teknis yang mengoperasikannya.

2) Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.019.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 908.451.875,00 atau 89,13%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran 16 kolom

Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik didukung oleh kegiatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan listrik. Pada kegiatan ini dilaksanakan upaya penghematan energi melalui audit pemanfaatan energi listrik pada instansi-instansi pemerintah dan workshop hemat energy

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian program)

Pada tahun 2014 telah dilakukan Audit Energi (pengguna energi listrik) pada kantor-kantor pemerintah. Demikian juga sosialisasi hemat energi dalam rangka pembinaan, pengawasan pelaksanaan hemat energi dan konservasi energi.

Dalam kegiatan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan berupa Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) tahun 2014 sebagai Juara 1 (satu). Kategori Penghematan Energi dan Air dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Penghargaan sejenis diperoleh Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebagai Juara 1 dan tahun 2012 meraih juara 2. Capaian penghargaan tertinggi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempertahankan dan meningkatkan penghematan energi dan air. Peningkatan Capaian tersebut karena adanya sosialisasi hemat energi baik melalui workshop maupun penyebaran leaflet dan stiker yang intensif dan usaha semua pihak untuk sadar akan pentingnya hemat energi dan air.

c) Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Masih terdapat SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlebihan dalam menggunakan energi, karena pemakaian peralatan dan pemanfaatan peralatan elektrik yang tidak tepat.

Upaya pemecahan masalah :

- Untuk membudayakan hemat energi dan air, masih perlu dilakukan peringatan (mengingatkan) secara terus menerus, karena hal tersebut terkait dengan kebiasaan, maka perlu dilakukan sosialisasi hemat energi dan pembinaan secara kontinyu baik melalui workshop maupun penyebaran leaflet tentang hemat energi dan air.

3) Program Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.547.955.249,00 atau 88,70%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran 16 kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Program Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

1. Tersedianya data Inventarisasi Geologi, Kawasan karst dan Kawasan Lindung Geologi Potensi-potensi geologi didaerah/kabupaten di Jawa Timur, sehingga dapat diketahui dan dikembangkan sesuai potensi dan peruntukannya dengan tidak merubah kondisi/bentuk aslinya, seperti keberadaan goa-goa, kawasan karst yang bisa dikembangkan untuk wisata alam (geologi). Pada tahun 2014 dilaksanakan Kajian potensi geowisata dan kawasan lindung geologi di Kab. Sumenep; Inventarisasi potensi wisata kawasan geowisata dan kawasan lindung geologi di Bakorwil Madiun, serta Identifikasi potensi Geopark Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek.
2. Tersusunnya data Inventarisasi Geologi, Kawasan karst dan Kawasan Lindung Geologi Potensi-potensi geologi didaerah/kabupaten di Jawa Timur, sehingga dapat diketahui dan dikembangkan sesuai potensi dan peruntukannya dengan tidak merubah kondisi/bentuk aslinya, seperti keberadaan goa-goa, kawasan karst yang bisa dikembangkan untuk wisata alam (geologi). Pada tahun 2014 dilaksanakan Kajian potensi geowisata dan kawasan lindung geologi di Kab. Sumenep; Inventarisasi potensi wisata kawasan geowisata dan kawasan lindung geologi di Bakorwil Madiun, serta Identifikasi potensi Geopark Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek.

3. Terlaksananya Sosialisasi, Simulasi dan Mitigasi Bencana Gegeologian, untuk mengurangi resiko bencana yang timbul akibat bencana geologi, seperti gempa letusan gunung api, tsunami dan tanah longsor, sosialisasi disampaikan kepada aparat daerah, tokoh masyarakat, unsur kepemudaan dan masyarakat umum lainnya. Sosialisasi dilaksanakan di wilayah yang rawan bencana geologi. Capaian Tahun 2104 dilaksanakan sosialisasi untuk aparat dan masyarakat di 2 lokasi dengan jumlah peserta sebanyak 197 orang, meningkat dibanding tahun 2013 sebanyak 195 orang, hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti sosialisasi.
4. Manfaat sosialisasi bagi masyarakat adalah masyarakat menjadi lebih tahu macam/bentuk bencana geologi sekaligus mengetahui cara menghindari/antisipasi terjadinya bencana geologi. Selain sosialisasi pada tahun 2014 dilakukan pemasangan alat deteksi longsor di 5 lokasi, tahun 2013 di 40 lokasi, sedangkan tahun 2012 dipasang 2 unit di 2 lokasi. Demikian juga telah dipasang Rambu-rambu peringatan seperti bahaya longsor di 72 titik lokasi, sementara tahun 2012 hanya 8 titik lokasi yang dipasang ditempat-tempat strategis dan bisa dibaca/diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Sementara pada tahun 2014 dilaksanakan pemasangan alat peringatan / rambu rawan longsor di 16 titik lokasi di kab. Jombang dan Tulungagung, serta pemasangan alat deteksi longsor sebanyak 5 unit di Kabupaten Pacitan, Nganjuk, Ponorogo, Blitar dan Kota Batu.

Tabel 4.3.1.4
Capaian Kinerja Program Inventarisasi Pengembangan
Potensi Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi

No	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1.	Kajian/Penelitian Kawasan Karst, Geologi Lingkungan dan Kawasan Rentan Gerakan tanah	Dok.	6	5	4
2.	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Geologi dan pengembangan Geologi Lingkungan	Org.	150	195	197
3.	Pemasangan Rambu Peringatan Bahaya longsor	Titik Lokasi	8	72	16
4.	Pemasangan Alat Deteksi Longsor	Unit	2	40	5

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Pada sebagian wilayah di Jawa Timur, sering terjadi bencana alam kegeologian seperti gunung meletus, longsor dan banjir bandang yang banyak menimbulkan kerugian harta benda maupun jiwa.
- Pemanfaatan lahan belum memperhatikan kondisi geologi wilayahnya.

Upaya pemecahan :

- Melaksanakan sosialisasi tentang Penanggulangan bencana kegeologian untuk aparat dan masyarakat di daerah yang rawan bencana agar dapat mengetahui secara dini gejala-gejala bencana kegeologian.
- Melakukan pemasangan/ penyebaran poster-poster, booklet dan leaflet bahaya longsor di kabupaten/kota sebagai upaya antisipasi penyelamatan bila terjadi bencana alam tanah longsor dibawah koordinasi satkorlak Penanggulangan Bencana Jawa Timur.
- Pemasangan papan peringatan bahaya tanah longsor di lokasi-lokasi yang rawan longsor.

- Pada wilayah rawan bencana perlu dilakukan sosialisasi tentang penanggulangan bencana.
- Kajian geologi lingkungan perlu dimasukkan dalam RTRW pengembangan perkotaan, wilayah industri dan permukiman.

4) Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah.

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.058.789.357,00 atau 86,55%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran 16 kolom.

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah terdiri dari 6 kegiatan yang mendukung diantaranya adalah:

- 1) Diketuainya potensi airtanah di Jawa Timur melalui kegiatan Inventarisasi Potensi Air tanah. Kegiatan ini menginventarisir potensi air tanah di Jawa Timur, baik yang melalui sumur pantau, maupun penelitian teknis semacam geolistrik. Geolistrik adalah salah satu metode untuk mengetahui jenis lapisan tanah yang mengandung air tanah. Metode ini memberikan kemudahan dalam menentukan lapisan pembawa air karena dengan metode ini dapat diketahui jarak kedalaman dan jenis lapisan batuan. Capaian daerah yang telah dilakukan geolistrik tahun 2014 sebesar 2 lokasi, menurun dibanding tahun 2013 sebesar 3 lokasi, hal ini disebabkan hampir semua kabupaten sudah dilakukan geolistrik.
- 2) Diketuainya potensi mineral batuan, mineral logam dan non logam di Jawa Timur, sekaligus meningkatkan informasi pengelolaan data pertambangan dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

- 3) Bertambahnya jumlah penduduk/keluarga di daerah sulit air yang dapat terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Serta terlaksananya penerbitan rekomendasi teknis ijin pengambilan air tanah, kegiatan ini meliputi pembuatan Sumur Bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air.

Capaian target masyarakat yang mendapat air bersih tahun 2014 sebesar 747 KK meningkat dibanding dengan tahun 2013 sebesar 700 KK Hal ini disebabkan jumlah KK yang terlayani di masing-masing desa/dusun semakin banyak.

- 4) Peningkatan Usaha kelompok usaha pertambangan rakyat, dengan meningkatkan produksi pertambangan melalui bantuan alat pertambangan

Capaian target kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat tambang tahun 2014 sebanyak 7 kelompok, menurun dibanding tahun 2013 sebanyak 9 kelompok. Hal ini disebabkan pada tahun 2014 hanya diberikan alat pemecah batu mekanis, tidak termasuk pemecah batu tradisional.

Tabel 4.3.1.5
Bantuan Alat Pertambangan untuk Kelompok
Pertambangan Rakyat/Pertambangan Skala Kecil

Tahun	Jenis Alat	Lokasi
2012	4 Unit Pemotong Batu Dolomit	Kabupaten Gresik dan Situbondo
2013	4 Unit Pemecah batu	Kabupaten Blitar, Ponorogo, Tulungagung dan Trenggalek
2014	7 Unit Pemecah Batu	Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Nganjuk, Malang, Lumajang dan Banyuwangi

Sumber: Dinas ESDM Prov. Jatim

Tabel 4.3.1.6
Capaian Kinerja Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan
Pengelolaan Air Tanah

No.	Komponen	Satuan	2012	2013	2014
1.	Penelitian Potensi Air tanah (Geolistrik)	Kab.	2	3	2
2.	Masyarakat yg mendapat air bersih dari air tanah	Unit/KK	8 Unit / 800 KK	7 Unit / 700 KK	4 Unit / 747 KK
3.	Rekomendasi Teknis Ijin Pengambilan Air Tanah	Rekomtek			
4.	Kelompok Usaha pertambangan rakyat yg mendapat bantuan	Kelompok	3	9	7
5.	Penelitian Potensi Mineral Logam dan Non logam	Dok.	3	3	4

Sumber: Dinas ESDM Prov. Jatim

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah :

Permasalahan

- Pengelolaan bidang pertambangan umum di Kabupaten/Kota se Jawa Timur belum dapat dilakukan secara utuh dan terpadu, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, karena persepsi terhadap peraturan perundang-undangan dan struktur kelembagaan yang ada berbeda di masing-masing kabupaten/kota.
- Sumber daya manusia/aparatur yang menangani bidang pertambangan di kabupaten/kota terbatas.
- Teknik penambangan yang tidak benar dan aman menyebabkan kerusakan lingkungan karena para pelaksana usaha tambang kurang peduli terhadap teknik dan tata cara penambangan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungannya.
- Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) masih saja berlangsung.

Permasalahan Air Tanah.

- Pengambilan air tanah yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan kegiatan konservasi secara memadai, serta kesadaran masyarakat terhadap pelestarian air tanah masih sangat rendah.
- Jumlah penduduk semakin meningkat, maka semakin bertambah pula konsumsi air; Pengambilan air yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan kegiatan konservasi yang memadai berdampak negatif pada lingkungan dan penurunan muka air tanah.
- Terjadinya perubahan lahan daerah imbuhan air tanah, sehingga tidak dapat lagi meresapkan air.
- Masih terdapat masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih.

Upaya Pemecahan Masalah

- Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat lebih diintensifkan dalam rangka pelaksanaan program secara sinergis.
- Pembinaan teknik terhadap aparat pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam bidang pertambangan umum.
- Memberikan fasilitasi kepada instansi terkait di kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan.
- Melakukan sosialisasi/pembekalan teknik dan tata cara penambangan, K3 Pertambangan dan lingkungan kepada Kepala teknik dan pekerja tambang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Melakukan pendataan, pembinaan dan penertiban pelaku PETI di wilayah kabupaten/kota bersama-sama dengan instansi terkait di daerah.

- Melakukan Koordinasi dengan kabupaten/kota dalam rangka menyamakan persepsi terhadap peraturan yang berlaku tentang pengelolaan air tanah perlu ditingkatkan, sehingga terdapat pembagian kewenangan yang jelas dan hubungan kerja yang sinergis.
- Memberikan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan teknis untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis dan pengambilan air tanah bersama-sama instansi terkait di kabupaten/kota
- Meningkatkan penelitian potensi air tanah pada setiap Cekungan Air Tanah lintas kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai dasar acuan pemberian rekomendasi teknik dalam penerbitan SIPA.
- Melaksanakan pemantauan muka airtanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Jawa Timur.
- Membangun Sumur Bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di daerah sulit air dengan membangun sumur bor.

5) Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran.

Program Pengembangan Pengelolaan kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.250.000.000,00 dengan realisasi Rp. 2.703.117.841,00 (83,17 %), Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Formulir Matrik 16 kolom.

Program Pengembangan Pengelolaan kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas, Fasilitas didukung oleh kegiatan :

1. Sosialisasi dan publikasi pengelolaan kelistrikan, energi, mineral dan migas.
2. Pendataan dan sistimatisasi data kelistrikan, energi mineral dan migas.
3. Peningkatan kinerja pembangunan kelistrikan, energi, mineral dan migas.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Program Pengembangan, Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas meliputi 4 kegiatan , yaitu :

1. Terwujudnya kesesuaian program/kegiatan di sektor ESDM antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang lebih. Pada tahun 2012 terlaksana 12 kegiatan yang dapat dikerjasamakan dengan kabupaten/kota, dan pada tahun 2013 terlaksana 12 kegiatan.
2. Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas di Jawa Timur melalui pameran yang diikuti setiap tahun dengan mengundang instansi terkait di sektor energi dan sumber daya mineral di provinsi anggota Mitra Praja Utama, pembuatan website, buklet dan leaflet tentang PLTMH, Biogas, panas bumi, Profil Dinas ESDM serta publikasi di media massa yang pada tahun 2014 terlaksana 4 kali, tahun 2013 terlaksana sebanyak 4 kali sedangkan pada tahun 2012 hanya 1 kali.
3. Terkumpulnya data sektor ESDM melalui rapat klarifikasi sekaligus konfirmasi tentang data sektor ESDM yang diperoleh dari Kabupaten/Kota, sedangkan penyusunan database sektor ESDM dan data potensi bahan galian dimaksudkan untuk mendukung pelayanan informasi sektor ESDM di Jawa Timur.

4. Dapat diketahui kegiatan yang berjalan dengan baik dan perlu dilanjutkan, serta kegiatan mana yang masih perlu ditingkatkan performanya. Disamping monitoring dan evaluasi, pada kegiatan ini juga melaksanakan/membuat Laporan Pertanggung jawaban kinerja SKPD (Dinas ESDM) berupa LAKIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Masih sering terjadi tumpang tindih antara kabupaten/kota dengan provinsi dalam perencanaan program/kegiatan.
- Pemerintah kabupaten/kota masih kurang dalam penyajian data yang akurat di sektor energi dan sumberdaya mineral, karena dalam pengelolaan di daerah dilaksanakan oleh banyak instansi.

Upaya Pemecahan Masalah

- Untuk mengatasi adanya tumpang tindih perencanaan antara kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi dengan kabupaten/kota, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kegiatan untuk tahun yang akan datang. Kegiatan tersebut meliputi semua bidang yang ada di sektor ESDM meliputi, pertambangan umum, air tanah, energi dan kelistrikan maupun kegeologian.
- Dibentuk tim penyusun data yang beranggotakan aparatur di kabupaten/kota, yang bertugas memberikan informasi yang akurat secara periodik ke pemerintah provinsi.

4. BIDANG URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pembangunan perikanan dan kelautan ditujukan untuk :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan keamanan pangan dari sektor Perikanan dan Kelautan
- b. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari dan berkelanjutan

4.1. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
- 2) Meningkatnya produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu
- 3) Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program

1) Program Pengembangan Agroindustri / Agrobisnis

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 3.421.100.000,00 dengan realisasi Rp. 2.735.118.349,00 atau (79,95 %) , pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan tahun 2015, dokumen statistik serta dokumen evaluasi pembangunan perikanan dan kelautan tahun 2014.

Adapun perkembangan hasil pelaksanaan pada tahun 2012-2014 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4.1.1
Perkembangan hasil penyusunan dokumen
tahun 2012-2014

No.	Uraian	Satuan	2012	2013	2014
1.	Dokumen	dokumen	1	1	1
2.	perencanaan	dokumen	1	1	1
3.	Dokumen statistik	dokumen	1	1	1
	Dokumen evaluasi				

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov.Jawa Timur

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan :

- Adanya keterlambatan dalam penyusunan dan publikasi buku laporan tahunan statistik perikanan dan kelautan di Provinsi. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan pengiriman data oleh petugas statistik di Kabupaten/Kota.

Upaya Pemecahan Masalah

- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui jaringan internet untuk mempercepat arus pengiriman data dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.
- Peningkatan SDM yang menangani statistik melalui pelatihan.

2) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 13.155.600.000,00 dengan realisasi Rp. 11.902.692.861,00 atau (90,48 %), pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) :

- Terealisasinya pencapaian penurunan tingkat kerusakan mangrove sebesar 0,062 % (52 ha) dan penurunan tingkat kerusakan terumbu karang sebesar 0,002 % (10 ha)
- Tercapainya produksi garam sebanyak 1.025 ribu ton
- Beroperasionalnya 37 unit SPDN (Solar Package Dealer Nelayan)
- Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebanyak 230 kelompok
- Terealisasinya pemberian paket bantuan kepada 583 Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR)
- Dilaksanakannya perawatan Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu (POSKAMLADU) di Kabupaten/Kota sebanyak 14 unit

- Terlaksananya pembinaan, pelatihan, sosialisasi, sinkronisasi, lokakarya dan bimtek bidang kelautan, pesisir dan pengawasan bagi masyarakat pesisir sebanyak 4.475. orang

Hasil pelaksanaan pembangunan pada tahun 2012-2014 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4.1.2
Perkembangan hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun 2012 - 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014
1.	Kawasan Konservasi				
	a. Mangrove	Ha	360	400	452
	b. Terumbu Karang	Ha	125	150	160
2.	Produksi garam	Ribu Ton	952,3	620,9	1.025,0
3.	SPDN	Unit	24	28	37
4.	Penyusunan dokumen rencana pengelolaan WP3K/Perda	Dok	1	1	2
5.	POKMASWAS	Kelp	177	215	230
6.	KUGAR	Kelp	1.070	1.034	583
7.	POSKAMLADU	Unit	14	14	14
8.	Jalin Kesra bantuan RTSM di wilayah pesisir	Paket	3.284	1.890	-
9.	Pembinaan, pelatihan, sosialisasi, sinkronisasi, lokakarya dan bimtek	Org	4.613	2.980	4.475

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Timur

Mangrove dan terumbu karang merupakan salah satu potensi sumberdaya laut yang sangat penting. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan utama dan bagian hidup nelayan, selain mempunyai nilai estetika yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata. Secara fisik, mangrove dan terumbu karang melindungi pantai dari degradasi dan abrasi. Disamping itu juga mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai tempat memijah, mencari makan, daerah asuhan dari berbagai biota laut. Namun demikian mangrove dan terumbu karang yang ada di wilayah pesisir sangat rentan terhadap gangguan atau kerusakan, baik karena faktor alam maupun akibat tekanan kepentingan di wilayah pesisir.

Tekanan pertambahan penduduk, utamanya di daerah pantai serta meningkatnya aktivitas pembangunan sektoral, regional, swasta dan masyarakat yang memanfaatkan kawasan di wilayah pesisir dan lautan yang cukup pesat mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan. Mengingat potensi multiguna sumber daya alam ini, maka pengelolaan hutan mangrove dan terumbu karang menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi Jawa Timur melalui upaya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang bertujuan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir sebagai tempat berlindung dan berkembangnya hewan-hewan laut.

Sampai dengan tahun 2014, rehabilitasi mangrove di Jawa Timur mencapai luasan 452 ha atau meningkat sebesar 13 % dari tahun 2013 seluas 400 Ha. Peningkatan pengelolaan wilayah mangrove dan vegetasi pantai dilakukan melalui penanaman bibit mangrove dan cemara udang di 15 (lima belas) lokasi, yaitu di kabupaten Banyuwangi, Blitar, Situbondo, Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Pasuruan, Kota Pasuruan, Gresik, Tulungagung, Sampang, Lamongan, Sidoarjo dan Sumenep. Sedangkan konservasi ekosistem terumbu karang di Jawa Timur secara umum dilakukan melalui upaya pengembangan rehabilitasi kawasan terumbu karang yang pada tahun 2014 dilaksanakan di 5 (lima) lokasi, yaitu Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Sampang dengan penambahan luasan \pm 10 ha dibanding tahun 2013 atau naik 6,7 %.

Kinerja produksi garam di Jawa Timur pada tahun 2014 mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun lalu. Pada tahun 2013 produksi garam Jatim hanya dikisaran 620,95 ribu ton dan pada tahun 2014 produksinya mencapai 1.025 ribu ton. Kondisi ini, dipicu oleh iklim yang sangat mendukung terhadap produksi garam. Meski musim kemarau lebih pendek, hanya 4,5 bulan namun intensitas matahari sangat maksimal dan sepanjang musim kemarau

tidak ada hujan yang turun. Sehingga memberikan dampak positif terhadap produktivitas lahan garam. Rata-rata produktivitas sebesar 95 ton per hektar, baik tambak garam yang masih menggunakan cara konvensional maupun yang sudah menerapkan sistem geo membrane dan teknologi ulir filter.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan dasar bagi nelayan untuk melaut. Kebutuhan BBM, khususnya jenis solar bagi nelayan sangat penting karena 60 % persen biaya produksi hanya untuk membeli BBM. Kebutuhan penyediaan BBM bersubsidi bagi nelayan akan melonjak drastis pada waktu musim ikan. Untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan nelayan, Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat nelayan dengan menambah jumlah Solar Packed Dealer Nelayan atau SPDN di Jawa Timur seiring dengan semakin meluasnya wilayah tangkapan nelayan. Sampai dengan tahun 2014 jumlah SPDN yang telah dibangun sebanyak 37 unit yang tersebar di 16 lokasi dimana 31 unit sudah beroperasi, 4 unit masih belum beroperasi karena belum terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana sesuai standart yang telah ditetapkan dan 2 unit masih dalam proses perijinan.

Kondisi kepemilikan bersama terhadap sumberdaya perikanan laut, jumlah nelayan dengan alat tangkap yang beragam serta semakin menurunnya jumlah populasi ikan merupakan faktor pendorong munculnya konflik nelayan. Dalam upaya meminimalisir terhadap berbagai persoalan yang muncul dikalangan nelayan serta meminimalisir terjadinya pelanggaran/tindak pidana yang sering dialami oleh nelayan, Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur meningkatkan peran Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu (POSKAMLADU) terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Personil POSKAMLADU terdiri dari unsur TNI-AL, POLAIR dan PPNS Daerah yang dalam melaksanakan

perannya, dilengkapi sarana seperti GPS, kapal pengawasan, SSB, HT, jaket pelampung dll. Sampai dengan tahun 2014 telah dibangun sebanyak 14 unit yang lokasinya terletak di 14 Kabupaten/Kota, berpantai, yaitu: Tambakboyo-Tuban. Brondong-Lamongan, Lumpur-Gresik, Arosbaya-Bangkalan, Camplong-Sampang, Sapeken-Sumenep, Lekok-Pasuruan, Paiton-Probolinggo, Jangkar-Situbondo, Grajagan-Banyuwangi, Tambakrejo- Blitar, Prigi-Trenggalek, Tamperan-Pacitan dan Mayangan Kota Probolinggo. Mulai tahun 2013 tidak ada pembangunan POSKAMLADU baru, namun demikian kegiatan diarahkan pada peningkatan operasional dan sarana pengawasan untuk operasional pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

Sumberdaya ikan merupakan sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*) namun apabila dieksploitasi tanpa terkendali dapat mengalami degradasi bahkan kelangkaan. Pelibatan masyarakat secara penuh dalam pemanfaatan sumber daya ikan (perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan termasuk rehabilitasi dan konservasi) diperlukan bagi kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh *stakeholders* merasa memiliki dan bertanggung jawab. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) merupakan sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab, agar diperoleh manfaat secara berkelanjutan. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di berbagai daerah keanggotaannya terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh nelayan, nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat maritim lainnya. Pokmaswas merupakan Kelompok/organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dan partisipasi masyarakat pantai di dalam pembangunan perikanan sehingga terwujud

masyarakat pantai yang sejahtera. Salah satu tugas Pokmaswas adalah melakukan usaha penyadaran masyarakat tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara arif dan bijaksana untuk menjaga pelestarian dan perlindungan sumberdaya. Jumlah Pokmaswas yang terbentuk pada tahun 2013 sebanyak 215 kelompok dan pada tahun 2014 menjadi 230 kelompok. Keberadaan Pokmaswas memberikan manfaat langsung pada kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, terutama dalam mencegah dan menanggulangi illegal fishing. Masyarakat pesisir dapat meningkatkan hasil tangkapannya dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimum, jika sumber daya tersebut dapat dijaga dari tindakan pencurian dan perusakan.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan di Jawa Timur didukung dengan adanya kegiatan sosialisasi Siswasmas , pembinaan Pokmaswas di Kabupaten/Kota serta dilaksanakannya pelatihan peningkatan pengetahuan bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Permasalahan

Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan :

Permasalahan :

- Masih belum tertibnya pelaku usaha perikanan dalam perijinan
- Kinerja Poskamladu dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan masih belum optimal
- Masih maraknya penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk perikanan serta konflik nelayan yang berlatar belakang perebutan fishing ground dan pelanggaran terhadap penggunaan alat tangkap yang dilarang, seperti halnya penggunaan bahan peledak yang dapat merusak lingkungan
- Kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah pesisir sebagai akibat dari penebangan bakau, penambangan

terumbu karang, padang lamun, pengeboman, penggunaan kompresor dan potassium, pencemaran perairan, penambangan pasir laut dsb

Upaya pemecahan masalah :

- Mengoptimalkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan (usaha budidaya, penangkapan, pengolahan, importasi ikan dan garam) serta pengawasan pemanfaatan bakau, terumbu karang, pasir laut dll
- Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) melalui pelatihan, pembinaan, sosialisasi peraturan perundangan, penyuluhan serta bimtek kepada masyarakat. Fasilitasi sarana/prasarana Poskamkladu berupa kapal pengawasan (*speed boat*), sarana komunikasi (SSB) dan meubelair
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik nelayan
- Sinergitas kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan secara terpadu antara Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota

Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil :

Permasalahan

- Target rehabilitasi mangrove dan terumbu karang masih belum berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa Timur karena dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi cukup besar.
- Belum semua pemerintah daerah menginisiasi penyusunan dokumen Rencana Strategis WP3K dengan peraturan Bupati/Peraturan Walikota dan Rencana Zonasi WP3K dengan Peraturan Daerah

- Kegiatan Pendayagunaan pesisir dan lautan (rehabilitasi, mitigasi) masih terkendala karena minimnya data tentang kerusakan sumberdaya pesisir (mangrove , terumbu karang, abrasi, sedimentasi dll) di Kabupaten/Kota
- Kualitas mutu garam masih belum terstandarisasi

Upaya Pemecahan Masalah :

- Selain melaksanakan kegiatan rehabilitasi, juga dilakukan upaya konservasi dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan bimtek dan sosialisasi konservasi mangrove dan terumbu karang berkelanjutan
- Memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis WP3K dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota dan Rencana Zonasi WP3K dengan Peraturan Daerah
- Melaksanakan monitoring dan pendataan terhadap kerusakan kawasan pesisir dan melakukan upaya-upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem di wilayah pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut
- Peningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas usaha garam melalui pembuatan unit pengolah garam, pelatihan teknis dan manajemen bagi kelompok PUGAR serta pengembangan teknologi geomembran

d) Penghargaan yang diterima

- Juara I, Kategori Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Paguyuban PUGAR Sidoagung Kabupaten Probolinggo;
- Juara II, Kategori Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Kelompok Usaha Garam Rakyat KAPEHA II Kabupaten Pamekasan;
- Juara II, Kategori Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), Kepala Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan;

3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 30.121.900.000,00 dengan realisasi Rp. 28.456.742.479,00 atau (94,47%), pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

- Tercapainya produksi perikanan budidaya sebesar 1.040.848,8 ton
- Tercapainya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 106,43
- Berkembangnya usaha budidaya ikan yang dilakukan oleh 285.000 orang pembudidaya ikan.
- Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terakses sebanyak 3.531 kelompok.
- Jumlah perusahaan/pelaku usaha budidaya perikanan yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) sebanyak 691 unit dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) sebanyak 52 unit
- Tersedianya benih ikan sebanyak 23.811.598 ekor dan induk ikan sebanyak 761.042 ekor
- Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, apresiasi dan bimtek bidang perikanan budidaya bagi 1.662 orang pembudidaya ikan

Hasil pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu tahun 2012-2014 terjadi perkembangan seperti pada tabel berikut

Tabel 4.4.1.3
Perkembangan hasil pelaksanaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tahun 2012-2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2012	2013	2014
1.	Produksi perikanan budidaya		929.173,9	995.962,4	1.040.848,8
	a. Kolam	Ton	110.269,2	124.621,2	191.728,1
	b. Tambak	Ton	170.433,8	177.077,0	190.060,7
	c. Sawah tambak	Ton	66.101,7	92.540,7	-
	d. Karamba	Ton	428,0	347,5	582,6

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2012	2013	2014
	e. Jaring Apung	Ton	11.700,5	12.726,5	11.685,4
	f. Mina Padi	Ton	7.153,3	7.968,3	45.443,1
	g. Budidaya laut	Ton	563.087,4	580.683,0	601.348,9
	h. Budidaya ikan hias	Ribu Ekor	454.351,6	688.284,8	643.914,0
2.	NTP-Pi (Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan)		99,53	99,79* 105,67**	106,43***
3.	Pembudidaya ikan	Orang	279.690	283.571	285.000
4.	Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok	2.774	3.308	3.531
5.	Unit usaha budidaya yg bersertifikat CBIB	Unit	327	463	691
6.	Unit usaha budidaya yg bersertifikat CPIB	Unit	32	38	52
7.	Benih ikan	Ribu Ekor	21.622.667	29.492.124	23.811.598
8.	Ketersediaan Induk ikan	Ekor	867.254	869.741	761.042
9.	Jalinkesra bantuan RTSM	Paket	1.095	1.620	-
10.	Pembinaan, sosialisasi, apresiasi dan bimtek bid. Perikanan budidaya	Orang	2.280	949	1.662

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Timur dan BPS Prov. Jawa Timur

Ket : * Penghitungan menggunakan Tahun dasar 2007 (Rata-rata Januari s/d Nopember)

** Penghitungan menggunakan Tahun dasar 2012 (Bulan desember)

*** Penghitungan menggunakan Tahun Dasar 2012 (Rata-rata Januari s/d Desember)

Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi yang cukup besar dalam pengembangan perikanan khususnya perikanan budidaya. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terus berusaha meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan menerapkan berbagai strategi pengembangan seperti peningkatan SDM, aplikasi teknologi, pemberian paket-paket budidaya, peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), pengembangan kluster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor, fasilitasi program anti kemiskinan dengan pemberian paket-paket bantuan berupa sarana budidaya perikanan, pengembangan induk dan benih unggul, fasilitasi program pakan mandiri, monitoring HPI, sosialisasi dan pelatihan/bimtek. Hasil dari pengembangan tersebut dapat dilihat dari capaian produksi yang mengalami peningkatan sebesar 44.886,4 ton dari 995.962,4 ton ditahun 2013 menjadi 1.040.848,8

ton di tahun 2014 atau meningkat 4,51 %. Dari total produksi, budidaya laut menyumbangkan angka hingga 601.302,2 ton, sisanya adalah budidaya tambak air payau, budidaya ikan di kolam, budidaya dalam karamba, budidaya jaring apung serta mina padi. Beberapa komoditas yang dapat di andalkan sebagai produk unggulan antara lain rumput laut, bandeng, udang vaname, nila, lele dan gurami. Komoditas-komoditas unggulan tersebut di harapkan dapat meningkatkan produksi perikanan Jawa Timur, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pembudidaya yang dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan budidaya ikan di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran dan partisipasi pembudidaya. Jumlah pembudidaya ikan pada tahun 2013 sebanyak 283.571 orang. Dan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 285.000 orang. Peningkatan jumlah pembudidaya sebagian besar ada di wilayah pengembangan perikanan budidaya, seperti kawasan minapolitan dan kawasan kluster komoditas unggulan.

Pembangunan Perikanan dan Kelautan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya pelaku usaha perikanan, dalam setiap tahapan pembangunan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama. Melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah telah berupaya dalam hal peningkatan produksi perikanan dan meningkatkan pendapatan/kesejahteraan petani, nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya. Salah satu alat ukur/indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan, baik nelayan maupun pembudidaya ikan adalah NTP-Pi. Tahun 2014, NTP-Pi Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif, sebagai dampak dari program/kegiatan pemerintah yang banyak diarahkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Dengan menggunakan

penghitungan tahun dasar 2012, diperoleh nilai NTP-PI sebesar 106,43 point di tahun 2014, sedangkan tahun 2013 dengan dasar penghitungan yang sama Desember 2013 diperoleh angka NTP-Pi sebesar 105,67. Terdapat peningkatan sebesar 0,76 point, artinya nelayan/pembudidaya ikan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahanya, setelah digunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan hidup sehari-harinya.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia khususnya perdagangan bebas maka masalah standardisasi, sertifikasi dan akreditasi memegang peranan penting dalam menjamin kepercayaan mutu produk yang diperdagangkan. Demikian juga yang berlaku pada produk perikanan budidaya, dalam melaksanakan kegiatan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan (*sustainable*) penerapan tata cara budidaya ikan yang bertanggung jawab harus dimulai dari kegiatan pembenihan sampai pembesarannya. Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) merupakan suatu tindakan konkrit dalam meningkatkan mutu dan daya saing produk perikanan, yaitu bebas kontaminasi bahan kimia maupun biologi dan aman untuk dikonsumsi. Sama halnya dengan CBIB, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) juga tidak kalah penting, karena benih ikan yang berkualitas merupakan salah satu hal penting dan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan budidaya ikan. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan saat ini tengah mendorong pelaku usaha budidaya/pembenihan ikan untuk menerapkan CBIB dan CPIB. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya usaha budidaya perikanan yang bersertifikat CBIB / CPIB, dari 463/38 unit pada tahun 2013, menjadi 691/52 unit pada tahun 2014.

Kegiatan budidaya tidak hanya mencakup kegiatan pembesaran, akan tetapi juga produksi benih. Perdagangan global yang sangat kompetitif mengharuskan produk benih yang

dihasilkan sesuai dengan tuntutan pasar global terhadap produk perikanan yang ramah lingkungan, tidak mengandung residu antibiotik dan bahan kimia serta mampu telusur, persyaratan mutu yang ketat dan keamanan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan benih berkualitas dan perbanyakkan induk unggul dalam rangka mendukung penyediaan benih sebar yang berkualitas, maka UPTD Provinsi telah melakukan kegiatan inovatif seperti halnya pemuliaan ikan mas dan nila serta perbanyakkan/produksi calon induk lele dan patin. Disamping itu juga melakukan bimtek kepada masyarakat pembudidaya, kaji terap teknologi, monitoring dan pengawasan.

Produk benih maupun induk yang dihasilkan, selain berasal dari UPTD juga berasal dari petani pembudidaya. Tahun 2014, produksi induk maupun benih yang dihasilkan mengalami penurunan. Pada tahun 2013 benih ikan yang dihasilkan sebanyak 29.492.124 ribu ekor dan ketersediaan induk ikan sebanyak 869.741 ekor. Tahun 2014 benih ikan menurun menjadi 23.811.598 ribu ekor sedangkan induk ikan 761.042 ekor. Masing-masing menurun 12,5 % untuk induk dan 19,3 % untuk benih. Hal tersebut sebagai dampak dari abu vulkanik letusan Gunung Kelud di Jawa Timur yang hampir merambah semua sektor, yang salah satunya adalah perikanan. Akibat dari erupsi gunung Kelud, ribuan benih ikan milik kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) mengalami kematian, utamanya di wilayah yang terdampak langsung oleh abu vulkanik, seperti Kabupaten/Kota Kediri, Malang dan Blitar. yang merupakan penghasil terbesar benih ikan jenis Lele, Nila dan Gurami. Untuk meminimalisir dampak bencana alam terhadap penurunan pendapatan pembudidaya ikan di lokasi tersebut, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan menyalurkan paket-paket budidaya/pembenihan berupa kolam terpal, induk/benih serta pakan induk/benih dengan

harapan dapat memulihkan kembali usaha para pembudidaya di wilayah terdampak.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian paket hibah berupa mesin pelet masih belum ke semua pembudidaya ikan air tawar;
- Ketersediaan benih maupun induk yang bermutu masih belum mampu mencukupi kebutuhan pembudidaya;
- Masih banyaknya unit budidaya pembesaran maupun pembenihan yang belum tersertifikasi CBIB maupun CPIB;
- Masih adanya kendala dalam pemasaran hasil produksi budidaya;
- Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidayanya

Upaya Pemecahannya

- Pemberian paket bantuan berupa mesin pelet dan bahan baku formulasi pakan disertai dengan pelatihan dan pendampingan dari Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- Program pemuliaan serta perbanyakkan calon induk ikan yang sudah dilaunching UPT Pusat;
- Melakukan serangkaian kegiatan proses sertifikasi CBIB yang sudah didelegasikan ke provinsi Jawa Timur meliputi sosialisasi, verifikasi, penilaian dan pengawasan serta pelatihan auditor;
- Menyiapkan manajer Pengendali Mutu (MPM) bagi unit pembenihan untuk selanjutnya diproses sertifikasi CPIB;
- Sosialisasi dan alih teknologi baru kepada pembudidaya yang dilakukan oleh UPT Dinas Perikanan dan Kelautan maupun instalasi budidaya dan juga dengan pemberian paket hibah untuk teknologi baru yang akan diterapkan sebagai contoh budidaya lele sistem bioflok.

d) Penghargaan yang diterima

- Juara III Kategori Kelompok Pembudidaya Udang, Kelompok Mina Mas Kabupaten Probolinggo.
- Juara III Kategori Kelompok Pembudidaya Rumput Laut, Kelompok Si Ragil Kabupaten Banyuwangi.
- Juara I Kategori Pembudidaya Ikan Hias, Kelompok Tirta Kencana Agung Kabupaten Tulungagung.
- Juara III Kategori Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT), HSRT Mina Laut Jaya Kabupaten Situbondo
- Juara II Kategori Kinerja UPP, UPP BUPEDES Kabupaten Magetan

4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 133.346.910.000,00 dengan realisasi Rp. 118.506.070.214,00 atau (88,87%) pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunn (Capaian Program)

- Tercapainya produksi perikanan tangkap sebesar 399.372,2 ton
- Tercapainya NTN pada level 106,54
- Jumlah nelayan 255.319 orang
- Jumlah armada perikanan tangkap 59.602 unit dan alat penangkapan ikan 172.984 unit
- Restocking sebanyak 3.897,4 ribu ekor
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap sebanyak 1.687 kelompok
- Sertifikasi Hasil Penangkapan Ikan (SHTI) sebanyak 1.703 buah
- Penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 303 buah
- Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi dan pengawasan di 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan (PP) dan PPI (PP : Muncar, Tamperan, Pondok dadap, Mayangan, Puger, Paiton dan PPI : Bulu, Pasongsongan, Tambakrejo, Pancer serta PPP : Lekok)

- Terlaksananya pembinaan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi dan bimtek bagi 660 orang nelayan

Hasil pelaksanaan pembangunan (capaian program) pada kurun waktu tahun 2012 - 2014 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4.1.4
Perkembangan hasil pelaksanaan program Pengembangan
Perikanan Tangkap Tahun 2012-2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014
1.	Produksi perikanan tangkap		381.802,7	395.046,8	399.372,2
	a. Laut	Ton	367.921,1	381.573,9	383.623,0
	b. Perairan Umum	Ton	13.881,6	13.472,9	15.749,2
2.	NTN (Nilai Tukar Nelayan)		151,15	156,34* 102,5**	106,54***
3.	Nelayan Laut dan Per. Umum	Orang	251.849	251.353	255.319
4.	Armada Laut dan Per. Umum	Unit	57.993	58.768	59.602
5.	Alat Penangkap ikan Laut dan Per. Umum	Unit	171.502	177.125	172.984
6.	Restocking	Ribu Ek	2.092,6	3.598,9	3.897,4
	- Laut		942,6	56,0	37,2
	- PUD		1.150,0	3.542,9	3.860,2
7.	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Kelp	1.118	1.414	1.687
8.	Sertifikasi Hasil Penangkapan Ikan (SHTI)	Buah	326	394	1.703
9.	Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Dok	61	4	27
10.	Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	Dok	642	681	496
11.	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)	Buah	664	672	303
12.	Pembinaan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi dan bimtek bid. perikanan tangkap	Orang	630	1.260	660

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov.Jawa Timur dan BPS Prov. Jawa Timur

Ket : * Penghitungan menggunakan Tahun dasar 2007 (Rata-rata Januari s/d Nopember)

** Penghitungan menggunakan Tahun dasar 2012 (Bulan Desember)

*** Penghitungan menggunakan Tahun Dasar 2012 (Rata-rata Januari s/d Desember)

Upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dilakukan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan sumber bahan pangan hewani sebagai penyedia protein untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Peningkatan produksi juga diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi domestik dan mendukung penyediaan bahan baku bagi industri pangan, khususnya industri pengolahan hasil perikanan, baik yang berorientasi pasar domestik maupun pasar luar negeri.

Volume produksi perikanan tangkap yang berasal dari produksi di perairan laut dan perairan umum daratan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4.325,4 ton dari 395.046,8 ton pada tahun 2013 menjadi 399.372,2 ton di tahun 2014 atau naik 1,08 %. Meski sumberdaya ikan merupakan potensi sumberdaya alam yang dapat terbarukan/terpulihkan namun memiliki keterbatasan dalam beregenerasi sehingga apabila penangkapan di laut sudah melebihi MSY (Maximum Sustainable Yield) justru akan menyebabkan penurunan produksi. Sehingga dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan peningkatan produksi hasil tangkapan, lebih diorientasikan pada peningkatan nilai produksi. Upaya strategis yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kesejahteraan nelayan melalui peningkatan mutu/kualitas hasil tangkapan untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi di pasaran adalah dengan menerapkan sistim rantai dingin (Cold Chain System/CCS), yaitu melengkapi palka di kapal nelayan dan penggunaan es batu pada hasil tangkapan serta fasilitasi sarana/prasarana pelabuhan, dengan demikian ikan hasil tangkapan sejak ditangkap di atas kapal hingga didaratkan di pelabuhan perikanan tetap terjaga kualitasnya . Upaya yang ditempuh untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan melalui kegiatan pengkayaan stok/*restocking* di laut dan PUD serta pembuatan rumah ikan. Sedangkan untuk meningkatkan keberdayaan nelayan, upaya yang telah ditempuh adalah penguatan

kelembagaan nelayan, pelatihan/bimtek peningkatan SDM serta penyediaan mata pencaharian alternatif bagi wanita/istri nelayan.

Kegiatan usaha perikanan tangkap mampu menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah cukup besar. Lapangan pekerjaan yang tercipta dari kegiatan usaha perikanan tangkap sebagian besar berasal dari kegiatan usaha penangkapan ikan (profesi nelayan) sebagai kegiatan utama. Selain itu banyak tenaga kerja yang terserap dari kegiatan usaha pendukung perikanan tangkap seperti usaha galangan kapal, perbengkelan, pembuatan dan penyediaan bahan dan alat penangkapan ikan, perdagangan kebutuhan logistik melaut serta usaha terkait lainnya. Penyerapan tenaga kerja dari usaha penangkapan ikan (profesi nelayan) tercatat sebanyak 251.353 orang pada tahun 2013 dan tumbuh menjadi 255.319 orang pada tahun 2014.

Dalam rangka optimalisasi pembinaan terhadap nelayan sekaligus melindungi profesi nelayan, provinsi Jawa Timur telah melaksanakan inventarisasi identitas profesi bagi nelayan melalui Kartu Nelayan. Sampai dengan akhir tahun 2014 telah dicetak lebih dari 100.000 Kartu Nelayan.

Salah satu wadah kelembagaan nelayan dalam menjalankan usahanya secara berkelompok adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap. Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah KUB perikanan tangkap tercatat sebanyak 1.687 KUB, mengalami kenaikan sebesar 19,3 % dibanding tahun 2013 sebanyak 1.414 KUB. Semakin meningkatnya jumlah KUB diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha nelayan, daya saing nelayan dalam pemasaran hasil perikanan serta meningkatkan skala ekonomi usaha nelayan.

Sebagaimana halnya dengan tingkat pendapatan nelayan, nilai tukar nelayan (NTN) menjadi salah satu indikator sebagai pendekatan (*proxy*) untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan rasio antara indeks harga

yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Secara konsepsinya, NTN adalah pengukur kemampuan tukar produksi ikan hasil tangkapan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan. Perkembangan NTN bulan Desember Tahun 2014 terhadap bulan Desember Tahun 2013 (secara y on y) terdapat peningkatan sebesar 0,08 point, dimana pada Desember 2013 nilai NTN mencapai 102,5 dan Desember 2014 mencapai 102,58. Sedangkan rata-rata NTN selama tahun 2014 mencapai 106,54. Nilai Tukar Nelayan lebih besar dari 100 menunjukkan daya beli nelayan yang sudah cukup baik.

Masih maraknya kasus penangkapan ikan secara liar (illegal fishing) benar-benar telah memukul masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perekonomian di laut seperti halnya nelayan. Dampak kegiatan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing dirasakan semakin mempercepat kerusakan lingkungan dan penurunan stock sumberdaya ikan. Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) merupakan upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk merespon regulasi tentang Catch Certificate yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa melalui COUNCIL REGULATION (EC) No.1005/2008 tanggal 29 September 2008 yang secara tegas melarang masuknya produk perikanan yang berasal dari kegiatan IUU Fishing kedalam wilayah teritorial Komunitas Eropa. Sertifikat Hasil Tangkapan (*Catch Certificate*) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan bukan dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. SHTI dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten. Sampai dengan tahun 2014 pelayanan SHTI telah dilakukan di 3 (tiga) pelabuhan perikanan dan mencapai 1.703 dokumen.

Untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari kegiatan usaha perikanan tangkap, selain ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, juga harus

didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap yang merupakan salah satu ujung tombak dalam pengembangan usaha perikanan tangkap. Berbagai upaya dilakukan agar pelayanan perizinan semakin prima, baik dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas SDM, maupun dari sistem pelayanan itu sendiri. Dokumen ijin usaha perikanan tangkap meliputi SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan). Tahun 2013 telah berhasil merealisasikan 672 SIUP dan menerbitkan 681 SIPI serta 4 SIKPI, dan pada tahun 2014 dokumen ijin yang meliputi 303 SIUP, 496 SIPI dan 27 SIKPI.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Permasalahan utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) adalah ketersediaan stok SDI yang semakin menurun;
- Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup, khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan kurang optimal;
- Menurunnya dokumen ijin yang diterbitkan dikarenakan adanya persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh nelayan saat proses pengurusan ijin sudah berjalan, yaitu “Surat Keterangan Pemasangan Mesin dan NPWP”
- Masih rendahnya kesadaran nelayan dalam upaya menjaga keberlanjutan ketersediaan/kelestarian sumberdaya ikan.

Upaya Pemecahan Masalah

- Upaya yang dilakukan untuk memulihkan SDI adalah dengan pembangunan rumah ikan serta pengkayaan ikan melalui penebaran benih ikan (*restocking*);
- Pemberian bantuan/hibah sarana penangkapan berupa alat tangkap jaring dan pancing serta alat bantu penangkapan berupa GPS untuk mempermudah mencari lokasi penangkapan (fishing

ground), penyediaan modal usaha dan kemudahan usaha melalui pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan.

- Melakukan pendekatan kepada pemohon untuk segera melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna pengurusan dokumen izin;
- Sosialisasi pentingnya kelestarian sumberdaya ikan dan sumberdaya habitat untuk meningkatkan dan mengembalikan potensi sumberdaya ikan .

d) Penghargaan yang diterima

- Juara I Lomba Kategori Nelayan Teladan An. Subaktiono Ds Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo
- Juara I Kategori Pelabuhan Perikanan Teladan An. PPP Mayangan Kota Probolinggo

5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 17.091.800.000,00 dengan realisasi Rp. 12.938.263.389,00 atau (75,70%), pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Tercapainya ekspor hasil perikanan dan kelautan sebesar 360,8 ribu ton dengan nilai 1.437,05 juta US\$
- Tercapainya tingkat konsumsi ikan sebesar 27,7 Kg/kap/th
- Berkembangnya jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tradisional sebanyak 11.490 unit
- Terlaksananya penerapan jaminan mutu keamanan hasil perikanan dan kelautan melalui sertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) sebanyak 610 SKP dan sertifikasi HACCP sebanyak 531 HACCP.
- Menguatnya kelembagaan UMKM perikanan dan kelautan 3.142 unit

- Meningkatnya jumlah POKLAHSAR sebanyak 664
- Meningkatnya peran suplier bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan hasil perikanan sebanyak 353 orang
- Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan tradisional sebanyak 615,18 ton
- Terlaksananya pembinaan, pelatihan, rakor, sosialisasi, apresiasi dan bimtek bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) sebanyak 1.650 orang.

Hasil pelaksanaan pada kurun waktu tahun 2012-2014 terjadi perkembangan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4.1.5
Perkembangan hasil pelaksanaan Program Optimalisasi
Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
tahun 2012-2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014
1.	Ekspor : - Volume - Nilai	Ribu Ton Juta US\$	306,9 1.027,8	343,64 1.305,00	360,8 1.437,05
2.	Konsumsi ikan	Kg/Kap/Th	23,1	24,30	27,7
3.	Unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tradisional	Unit	10.868	11.165	11.490
4.	UPI (Unit Pengolahan Ikan) bersertifikat SKP	Unit	278	440	610
5.	UPI (Unit Pengolahan Ikan) bersertifikat HACCP	Unit	261	361	531
6.	UMKM perikanan dan kelautan	Orang	2.971	3.000	3.142
7.	POKLAHSAR	kelompok	387	532	664
8.	Suplier ikan	Orang	272	310	353
9.	Produksi pengolahan hasil perikanan tradisional	Ton	499,2	586.18	615,18
10.	Pembinaan, pelatihan, rakor, sosialisasi, apresiasi dan bimtek bidang P2HP	Orang	1.485	1.590	1.650
11.	Jalinkesra bantuan RTSM	Paket	1.094	1.890	-

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov.Jawa Timur

Pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam kerangka pembangunan perikanan dan kelautan dilakukan

dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produksi, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Produksi Perikanan dan Kelautan Jawa Timur selain untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri juga untuk kebutuhan pasar luar negeri melalui kegiatan ekspor. Tahun 2014 ekspor volume perikanan mengalami peningkatan sebesar 5 % dari 343,6 ton pada tahun 2013 menjadi 360,8 ton ditahun 2014. Sedangkan dari nilai ekspor hasil perikanan mengalami kenaikan yang lebih besar, yakni dari 1.305,5 juta US\$ pada tahun 2013 menjadi 1.437,05 juta US\$ pada tahun 2014 atau naik sebesar 10,08 %. Terjadi kenaikan nilai ekspor yang lebih tinggi dibanding dengan kenaikan volumenya menunjukkan adanya peningkatan rata-rata harga produk perikanan yang diekspor, antara lain disebabkan sebagian besar komoditas ekspor hasil perikanan telah mengarah pada produk bernilai tambah. Hasil yang telah dicapai tersebut tidak terlepas dari sinergitas antara pemerintah dengan para pengusaha perikanan untuk terus meningkatkan sistem pengendalian guna menjaga mutu dan memberikan jaminan keamanan hasil perikanan melalui pembinaan dan pelatihan mutu bagi UPI (Unit Pengolah Ikan). Pada tahun 2014 tercatat 610 UPI yang bersertifikat SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) dan 531 UPI yang telah bersertifikat HACCP sehingga dapat melakukan ekspor ke manca negara.

Upaya meningkatkan gizi masyarakat Indonesia serta minat untuk mengkonsumsi ikan perlu terus ditingkatkan, karena ikan diharapkan menjadi salah satu sumber protein utama dalam pola konsumsi dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan konsumsi ikan mempunyai peran yang sangat strategis. Pertama, sebagai pendorong produksi perikanan yang diharapkan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, sebagai pendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia

yang berkualitas, mandiri serta sejahtera melalui peningkatan asupan protein bersumber dari ikan. Keberhasilan kampanye Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) melalui pemberian edukasi dan sosialisasi dengan target anak-anak usia sekolah ditunjukkan dengan semakin meningkatnya animo masyarakat terhadap konsumsi ikan. Tahun 2014 konsumsi ikan Jawa Timur mencapai 27,7 kg/kapita/th atau naik 14% dibandingkan tahun lalu sebesar 24,3 kg/kap/th. Pembentukan FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional) yang beranggotakan unsur pemerintah, assosiasi perikanan, perguruan tinggi maupun swasta turut mendorong peningkatan konsumsi ikan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat. Perbaikan gizi melalui konsumsi ikan akan berdampak langsung kepada perbaikan kualitas sumberdaya manusia dan sekaligus peningkatan ekonomi para pihak yang terlibat, seperti halnya nelayan, pembudidaya serta pelaku usaha perikanan lainnya.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, terus memberikan dukungan dan motivasi kepada pengolah untuk lebih meningkatkan nilai tambah pada produksi hasil perikanan, baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya. Melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), digelar kegiatan promosi setiap tahunnya berupa Pameran Produk Perikanan , Bimtek Pengembangan Pengolahan Produk Bernilai Tambah (PPNT) kepada Wanita Pengolah Tradisional dan anggota PKK maupun Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.

Upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM untuk meningkatkan peranannya melalui pendampingan usaha, bimtek maupun pelatihan. Jumlah UMKM perikanan dan kelautan pada tahun 2013 mencapai 3.000 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.142 UMKM.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan ikan di Jawa Timur
- Kualitas produk yang dihasilkan oleh pengolah dan pemasar hasil perikanan masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar keamanan pangan karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk hygiene masih rendah.
- Kompetensi pelaku industri perikanan belum memadai untuk menghadapi persaingan di pasar global
- Kesenjangan sosial masyarakat sehingga kurangnya kesadaran mengkonsumsi ikan antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan capaian angka konsumsi ikan belum mencapai target konsumsi nasional (31,60) oleh karenanya upaya menaikkan tingkat konsumsi ikan masih relevan dilakukan.

Upaya Pemecahannya

- Lebih mendorong Unit Pengolahan Ikan untuk mencari bahan baku ikan ke Provinsi lain di luar Jawa dan menjalin kerjasama dengan provinsi lain.
- Fasilitasi penerapan Sistem Rantai Dingin dan Sanitasi Higienis dan pelatihan diversifikasi produk olahan agar mempunyai nilai jual yang lebih tinggi serta penyaluran hibah paket bantuan alat pengolahan ikan.
- Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan Bimtek, pelatihan dan sosialisasi terkait pengendalian mutu,

keamanan hasil olahan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan SDM.

- Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, pameran dan promosi agar dapat meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan

d) Penghargaan yang diterima

- Juara I Lomba Masak Tingkat nasional Kategori Menu Kudapan
- Juara II Lomba Masak Tingkat nasional Kategori Menu Keluarga
- Juara I Petualangan Samudera 2014
- Juara II Industri Bahari

6) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.000.000.000 ,00 dengan realisasi Rp. 971.618.980,00 atau (97,16%), pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan pada kurun waktu tahun 2012 - 2014 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4.1.6
Perkembangan hasil Program Pengembangan Kawasan Agropolitan tahun 2012-2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014
1.	Bantuan kolam beton	Unit	6	3	12
2.	Bantuan sarana budidaya	Paket	1	4	12

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov.Jawa Timur

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah pedesaan yang bertujuan untuk memberikan stimulan pada sentra produksi potensial di kawasan agropolitan/minapolitan.

Pada tahun 2014, pengembangan kawasan agropolitan melalui pemberian paket bantuan sarana budidaya berupa kolam

beton, benih, pakan, pompa air, obat-obatan dan peralatan panen yang diberikan kepada 12 (dua belas) kabupaten di Jawa Timur.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Kawasan agropolitan ditetapkan oleh keputusan Gubernur Jawa Timur berdasar master plan yang telah disusun oleh Kab/Kota dan disahkan oleh Bupati serta diverifikasi oleh tim pokja Provinsi. Namun demikian masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki potensi perikanan dan belum di masukkan dalam SK.

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlu koordinasi lintas sektoral untuk dapat merealisasikan kawasan agropolitan dengan membuat usulan melalui Bappeda di Kab/Kota masing-masing.

7) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.396.293.125,00 atau (93,09%), pagu dan realisasi anggaran kegiatan serta capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Terlaksananya penyaluran bantuan 40 unit kolam beton budidaya ikan di 8 (delapan) kabupaten, yaitu Kabupaten Bondowoso, Blitar, Ponorogo, Tulungagung, Tuban, Madiun, Bojonegoro dan Probolinggo. Masing-masing kabupaten menerima 5 unit kolam beton beserta sarana prasarana budidaya ikan berupa benih, pakan, obat-obatan dan peralatan yang diterimakan kepada 5 orang anggota kelompok tersebut.

Langkah pemberdayaan masyarakat melalui Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program/APP*) merupakan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang terfokus pada aspek pemberdayaan usaha dengan basis

usaha ekonomi produktif pola kluster dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur

Adapun pelaksanaan pada kurun waktu tahun 2012 - 2014 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4.1.7
Perkembangan hasil pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani tahun 2012-2014

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014
1.	Bantuan kolam permanen	Unit	40	40	40
2.	Bantuan sarana budidaya	Paket	40	40	40

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov.Jawa Timur

Penyaluran paket bantuan tetap diupayakan dilaksanakan setiap tahun karena dapat menyerap tenaga kerja baru untuk pengembangan usaha ekonomi produktif serta meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin.

c) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Pemberian paket diberikan kepada masyarakat miskin yang merupakan pembudidaya pemula, sehingga pemberian paket masih belum mampu dioptimalkan karena keterbatasan pengetahuan teknis budidaya.

Pemecahannya

- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penerima paket bantuan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan/temu teknis, pelatihan dan pendampingan teknis secara langsung melalui penyuluh Dinas Perikanan dan Kelautan setempat.

5. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

5.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. JAWA TIMUR

URUSAN PERINDUSTRIAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya perkembangan Industri Kecil dan Menengah, Nilai Tambah Industri berbasis Sumber Daya Alam, Kapasitas Teknologi Industri dan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- 2) Meningkatnya standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing.

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 36.863.545.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32.308.444.837,00 atau 87,64%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk mengembangkan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah Provinsi Jawa Timur dikarenakan industri yang berada di Jawa Timur didominasi oleh industri tersebut. Pelaksanaan program ini telah meningkatkan jumlah unit usaha industri sebanyak 4.024 unit usaha atau sebesar 0,50 % yaitu dari 803.454 unit usaha di tahun 2013 menjadi 807.478 unit usaha. Pada Industri Kecil dan Menengah meningkat sebesar 4.013 unit usaha dari 802.390 unit usaha menjadi 806.403 unit usaha.
- Penyerapan tenaga kerja industri di Jawa Timur juga mengalami peningkatan dari 3.115.681 orang di tahun 2013 atau mengalami penambahan sebanyak 17.368 orang atau

meningkat 0,56 %. Pada Industri Kecil dan Menengah meningkat sebesar 13.789 orang dari 2.757.711 orang menjadi 2.771.500 orang.

- Nilai produksi pada industri juga mengalami peningkatan dimana tahun 2014 ini sebesar 0,70 % atau senilai 1.473 milyar rupiah, dari 211.159 milyar rupiah menjadi 212.632 milyar rupiah. Pada Industri Kecil dan Menengah meningkat sebesar 640 milyar rupiah dari 127.868 milyar rupiah menjadi 128.508 milyar rupiah. Hal ini merupakan hasil fasilitasi pemerintah berupa upaya menciptakan kemitraan IKM dengan menyuplai bahan baku dan kemitraan dagang serta fasilitasi pameran bagi IKM.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Program pengembangan IKM yang dilakukan oleh Provinsi tidak selaras dengan program pengembangan di kabupaten/kota karena program pengembangan IKM mengacu kepada Pusat dan Provinsi sementara kabupaten/kota memiliki agenda tersendiri dalam pengembangan IKM.
- Belum adanya kesadaran dari kabupaten/kota bahwa pendataan yang *valid* dan *up to date* sangat berperan dalam proses perencanaan pembangunan dibidang pengembangan IKM.
- Kerjasama yang dilaksanakan melalui Program Mitra Praja Utama (MPU) belum cukup mampu menciptakan kemitraan antara dunia usaha pada kesepuluh Provinsi anggota MPU dalam pengembangan industri khususnya IKM.
- Kurang dan belum adanya sinkronisasi antara program/kegiatan pembangunan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pelatihan ataupun pembinaan yang dilaksanakan di wilayah

kabupaten/kota tidak dapat didukung oleh dana kabupaten/kota.

- Program Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki, Industri Perhiasan, Industri Berbasis Gula, Industri Perkapalan, Industri Kimia dan Kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi belum sepenuhnya berjalan optimal.
- Peta Panduan atau *Roadmap* untuk Klaster Industri Perhiasan, Industri Berbasis Gula, Industri Kimia dan Kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi belum tersusun.
- Pengembangan industri melalui pendekatan Klaster, OVOP, Komoditi Potensial/Kompetensi Inti Daerah dan Industri Kreatif belum sepenuhnya didukung oleh kabupaten/kota.

Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota sebelum ataupun pada tahun pembangunan yang sedang berjalan, agar pada saat tahun pembangunan berjalan sudah ada kesepakatan dalam pengembangan komoditi industri.
- Proses pendataan tahun 2014 dilakukan melalui 3 cara yaitu melalui pendataan industri oleh kabupaten/kota, kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan melalui pemanfaatan Tenaga Penyuluh Lapangan Kementerian Perindustrian serta Pendamping Industri Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Kerjasama melalui Program Mitra Praja Utama (MPU) akan ditingkatkan melalui optimalisasi potensi industri Jawa Timur.
- Sinkronisasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota masih akan terus dilakukan dan diikuti dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi pada pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung program pengembangan industri yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Atau sebaliknya Pemerintah Provinsi

dapat mendukung kegiatan pengembangan industri yang diprioritaskan oleh kabupaten / kota.

- Temu bisnis masih harus terus dilaksanakan agar terjadi kesamaan visi dan pandangan dalam pengembangan Klaster Industri Alas Kaki, Industri Perhiasan, Industri Berbasis Gula, Industri Perkapalan, Industri Kimia dan Kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi.
- Peta panduan/*Roadmap* untuk Klaster Industri Perhiasan, Industri Berbasis Gula, Industri Kimia dan Kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi perlu disusun agar setiap Pihak yang terkait dapat mengetahui dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengembangan klaster.
- Komitmen dalam pengembangan industri melalui pendekatan klaster OVOP, komoditi potensial/kompetensi inti daerah dan industri kreatif perlu diperkuat lagi baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga masing – masing pihak dapat menjalankan perannya dengan baik.

2) Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 33.877.965.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.432.835.210,00 atau 92,78%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Peningkatan nilai produksi pada Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2014 meningkat sebesar 640 milyar rupiah dari 127.868 milyar rupiah menjadi 128.508 milyar rupiah. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pelaksanaan program dan kegiatan ini dimana tahun ini sebanyak 5.962 IKM mendapatkan pembinaan secara langsung.

c) **Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah**

Permasalahan:

- Masih banyak IKM yang melakukan produksi dengan tanpa memperhatikan lingkungan terutama pengrajin batik dan penyamakan kulit maupun pengrajin alas kaki.
- Kurangnya pengembangan desain yang dikembangkan oleh IKM terhadap produk yang dihasilkan.
- Kurang optimalnya pemanfaatan sisa buangan produksi industri yang mengakibatkan tingginya pemakaian bahan baku.

Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan pendampingan yang berkonsep *clean and green production* supaya IKM nantinya mampu merubah kebiasaan lamanya yang kurang peduli terhadap lingkungan.
- Setiap Unit Pelaksana Teknis diarahkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap desain produk industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia IKM, revitalisasi alat dan mesin produksi maupun pembuatan *prototype* produk guna meningkatkan mutu dan daya saing industri.
- Melakukan pelatihan teknik produksi yang memanfaatkan hasil sisa buangan industri.

3) **Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 11.783.929.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.294.419.304,00 atau 75,89 %, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Pelaksanaan fasilitasi peningkatan dan pengembangan SDM Industri di Jawa Timur berupa pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif sebanyak 1.680 IKM

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Terbatasnya jumlah pegawai yang menguasai bidang – bidang teknis sehingga pendampingan kurang optimal.

Upaya pemecahan masalah :

- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Disperindag guna meningkatkan kemampuan dibidang teknis.
- Melakukan outsourcing dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga pendampingan bagi IKM

4) Program Peningkatan Standardisasi Industri

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 9.255.255.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.401.343.830,00 atau 79,97%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Pada tahun 2014 ini impor Jawa Timur mengalami peningkatan dimana penyebabnya masih juga terletak pada permintaan bahan baku dan barang konsumsi yang semakin tinggi. Akan tetapi pada barang konsumsi hanya mengalami peningkatan yang sangat relatif rendah dibandingkan tahun lalu yang sebesar 0,30%. Hal ini dikarenakan salah satu faktornya adalah barrier impor yang diciptakan melalui peningkatan standardisasi industri terhadap 2.454 IKM yaitu dengan fasilitasi pengembangan standardisasi dan HKI industri sebanyak 2.044 IKM dan fasilitasi pengembangan desain produk industri sebanyak 410 IKM.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki IKM untuk mendapatkan SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industri
- Masih kurangnya informasi atau persepsi yang diterima oleh masyarakat tentang produk SNI, sehingga masih banyak

masyarakat yang menggunakan produk yang tidak memiliki SNI.

- Masih kurangnya kesadaran pelaku industri untuk menerapkan Gugus Kendali Mutu, Produktivitas, HACCP dan GMP dalam proses produksi.
- Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak tahu caranya untuk mendapatkan paten terhadap produknya.

Upaya pemecahan masalah :

- Sosialisasi dan pendampingan ISO dan SNI kepada IKM masih perlu selalu dilakukan. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak – pihak lain yang dapat memberikan fasilitasi SNI dan ISO kepada IKM.
- Sosialisasi SNI juga perlu dilakukan kepada masyarakat beserta dengan komoditi – komoditi yang sudah memiliki SNI, agar masyarakat dapat mengkonsumsi produk ber-SNI yang sudah jelas keamanannya.
- Sosialisasi dan fasilitasi HKI akan terus dilakukan, dengan melibatkan pihak – pihak lain yang terkait.
- Pembinaan dan pendampingan kepada Industri Kecil Rokok akan terus dilakukan. Selain itu, kerjasama dengan Pihak – Pihak terkait akan ditingkatkan.
- Untuk meningkatkan desain produk industri maka pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan desain akan dilakukan. Dalam upaya peningkatan desain ini, akan melibatkan Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil Menengah (TPL-IKM) karena mereka ini merupakan agent di lapangan. Selain itu, untuk memberikan penghargaan kepada IKM yang telah melakukan peningkatan desain, maka lomba desain produk industri akan tetap dilaksanakan.

5) Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 44.444.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.611.106.410,00 atau 91,38%, pagu dan

realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Pada tahun 2014 ini pelaksanaannya adalah kegiatan fasilitasi pameran meubel dan produk kayu bagi 25 IKM dan peningkatan keterampilan pengrajin industri agro di kawasan agropolitan bagi 260 IKM

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan IKM pangan dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditi hasil pertanian, perkebunan maupun kehutanan baik dalam rasa, jenis, bentuk maupun kemasan.
- Masih banyaknya sumberdaya pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan belum diolah.
- Belum adanya diversifikasi bahan baku agro untuk mengganti bahan baku impor.

Upaya pemecahan masalah :

- Pelatihan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan terus dilakukan, terutama di sentra sentra hasil pertanian.
- Dilakukannya pelatihan teknik produksi industri kepada masyarakat di daerah-daerah yang kaya dengan hasil pertanian, perikanan, perkebunan maupun kehutanan untuk menciptakan wira usaha baru dan meningkatkan nilai tambah produksi.
- Perlunya kerjasama dengan instansi pendidikan yang membantu IKM dalam pengembangan industri.
- Perlunya dikembangkan bahan baku industri yang dapat menggantikan bahan baku impor terutama pengembangan industri porang untuk mengganti bahan baku terigu.

URUSAN PERDAGANGAN

a. Sasaran Tahun 2014

- 1) Meningkatnya kinerja ekspor non migas yang berdaya saing dan terciptanya pengendalian impor
- 2) Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, serta wira usaha baru sektor perdagangan
- 3) Meningkatnya penguatan kelembagaan pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrolagian serta pengawasan perdagangan barang dan jasa ilegal

b. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 20.791.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.711.176.247,00 atau 89,99%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa total nilai ekspor Jawa Timur pada tahun 2014 mencapai 18,767 milyar US \$ atau mengalami kenaikan sebesar 21,01% bila dibandingkan pada tahun 2013 lalu yang mencapai 15,508 milyar US \$ sedangkan nilai ekspor non migas Jawa Timur pada tahun 2014 mencapai 17,984 milyar US \$ atau mengalami kenaikan sebesar 19,45% bila dibanding tahun 2013 yang mencapai 15,055 milyar US \$. Hal ini dipicu dari salah satu kegiatan dari program ini yaitu Kegiatan Pengembangan pelayanan Ekspor dimana jumlah permintaan terhadap penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) pada tahun 2014 ini sebanyak 139.485 SKA atau meningkat sebesar 3,95 % dibanding tahun 2013 yang sejumlah 134.183 SKA.

- Promosi produk Jawa Timur melalui gelar produk dan pameran berskala nasional maupun internasional sebanyak 17 kali yang mengikutsertakan serta fasilitasi pameran kepada 191 IKM, telah meningkatkan kemampuan ekspor yang diindikasikan dari meningkatnya eksportir dari 3.735 eksportir di tahun 2013 menjadi 4.523 eksportir.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

Total nilai impor Jawa Timur pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 lalu yaitu 25,21 milyar US \$ dari 25,046 milyar US \$ di tahun 2013 lalu atau meningkat 0,66 %, meski nilai impor non miga Jawa Timur tahun 2014 lebih rendah dari tahun 2013 yaitu 17,91milyar US \$ dari 18,22 milyar US \$ atau menurun 1,7 % hal ini dikarenakan masih sulitnya mengendalikan laju impor, dimana impor masih dominan pada bahan baku, bahan penolong, komponen industri, dan komoditi pertanian.

Upaya pemecahan masalah :

- Perlu upaya strategis untuk meningkatkan nilai ekspor, berupa pembukaan pasar ekspor baru di daerah Afrika dan Amerika Selatan, maupun peningkatan daya saing komoditi industri potensial untuk diekspor.
- Melakukan temu bisnis dengan provinsi lain guna menekan impor bahan baku, bahan penolong, dan komoditi agro yang tersedia di nusantara.
- Mengembangkan industri intermediate guna menekan impor bahan baku industri yang permintaannya masih cukup tinggi

d) Penghargaan Nasional yang diperoleh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan tingkat nasional berupa Primaniyarta Award melalui Pameran Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta International Expo pad Oktober 2014 lalu. Primaniyarta Award ini diberikan kepada para

eksportir yang mengalami peningkatan ekspor selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Berikut penerima award dengan kategorinya:

1. Kategori Eksportir Berkinerja : PT. Sekar Bumi, Tbk.
2. Kategori Eksportir Pembangun Merk Global : PT. Inera Sena
3. Kategori Eksportir Potensi Unggulan : PT. Karunia Catur Perkasa
4. Kategori Eksportir Pelopor Pasar Baru : PT. Zenith Allimart Precisindo

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 26.834.396.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.627.498.304,00 atau 84,32%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

- Untuk meningkatkan perdagangan antar wilayah/pulau/provinsi, Disperindag Prov. Jatim telah mengadakan temu usaha dan melakukan kontak dagang dengan provinsi lain. Kegiatan ini telah berkontribusi terhadap peningkatan perdagangan pada tahun 2014 sebesar 325.548,40 milyar rupiah atau meningkat 18,12 % dari tahun 2013 lalu yang mencapai 275.604,83 milyar rupiah, dimana net ekspor antar wilayah/pulau/ provinsi pada tahun 2014 ini sebesar 90.237,14 milyar rupiah.
- Inflasi Jawa Timur berfluktuasi cukup terkendali yaitu 7,77 nilai tersebut masih dibawah nilai inflasi nasional yaitu 8,36, hal tersebut terjadi salah satunya akibat dampak kebijakan pemerintah mencabut subsidi pada Bahan Bakar Minyak, tarif dasar listrik, dan gas, yang menyebabkan beberapa komoditi mengalami inflasi meskipun ada komoditi yang mengalami deflasi antara lain cabe merah, cabe rawit, bayam, dan sayuran lainnya.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Meskipun koordinasi dalam rangka pengendalian telah dilakukan tetapi inflasi masih mengalami fluktuasi yang elastis dikarenakan adanya beberapa faktor penyumbang inflasi diluar kendali Disperindag Prov. Jatim seperti tarif angkutan, tarif dasar listrik, dan harga bahan bakar minyak.
- Pelaksanaan temu usaha dagang dengan provinsi mitra dirasa belum optimal dikarenakan kurang siapnya provinsi mitra dalam melaksanakan temu usaha dengan kita.
- Data bongkar dan muat di pelabuhan – pelabuhan laut di Jawa Timur belum dapat diketahui secara detail dikarenakan tidak adanya kerjasama informasi dengan pihak-pihak yang berwenang.
- Sistem Resi Gudang belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh para petani Jawa Timur, dan komoditi yang dapat disimpan juga masih terbatas.

Upaya pemecahan masalah :

- Tim Pengendali Inflasi Jawa Timur perlu melibatkan berbagai pihak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap inflasi.
- Guna menjamin tingkat keberhasilan pelaksanaan temu usaha dengan provinsi mitra, diharapkan pelaksanaannya dilakukan setelah data mitra usaha dikedua provinsi tersedia.
- Perlu adanya koordinasi yang sifatnya vertikal antar pemangku kepentingan guna mendapatkan data yang detail dan akurat seperti BPS, Bank Indonesia, Bea Cukai, PT. Pelindo, Dinas Perhubungan, dan Disperindag.
- Agar resi gudang benar-benar bermanfaat bagi petani dalam menyimpan barang dan bermanfaat dalam menjaga keseimbangan stock barang, maka selain sosialisasi, kemauan petani dalam pemanfaatan Sistim Resi Gudang perlu ditumbuhkan.

3) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 59.815.439.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.427.139.316,00 atau 85,98%, pagu dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran matrik 16 Kolom

b) Hasil pelaksanaan pembangunan (Capaian Program)

Meningkatnya penerbitan SKA oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dari 134.183 di tahun 2013 menjadi 139.485 SKA di tahun 2014 atau mengalami peningkatan sebesar sebesar 3,95 %, atau sebanyak 5.302 SKA. Ini menunjukkan adanya peningkatan minat eksportir dan importir untuk menjadikan pelabuhan dan bandara di Jawa Timur sebagai pelabuhan ekspor dan impor. Salah satu hal yang menjadi kepercayaan ini, dikarenakan meningkatnya kemampuan UPT Pengujian dan Standardisasi Mutu Barang dalam melaksanakan pengujian terhadap barang ekspor impor Jawa Timur.

c) Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- Perusahaan besar dan menengah sudah memiliki kesadaran untuk menjaga standardisasi alat ukurnya. Namun perusahaan kecil yang langsung berinteraksi dengan konsumen belum memiliki kesadaran untuk menera alat ukurnya.
- Masyarakat belum menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporkan.
- Belum adanya partisipasi dari dinas Perindustrian Kabupaten/Kota karena keterbatasan dana, sarana dan SDM. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap barang – barang beredar menjadi terbatas.

- Masih banyaknya masyarakat yang membeli rokok tanpa cukai, karena harganya murah.
- Penerapan standardisasi mutu produk masih terkendali oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang informasi standardisasi produk.
- Masih banyaknya beredar barang produksi China.
- Masih banyaknya komoditi lokal maupun impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Banyaknya barang tiruan/ palsu yang beredar di Pasar.

Upaya pemecahan masalah :

- Sosialisasi terhadap standardisasi masih akan dilakukan sampai timbul kesadaran bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan maupun standar ukur dan masyarakat mendapatkan informasi tentang hak-haknya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.
- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan penertiban alat takar dan ukur sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang takar dan ukur serta dapat melaporkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika terjadi kecurangan pengukuran.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar melalui penyediaan dana pengawasan maupun peningkatan SDM pengawasan.
- Perlunya dilakukan pembatasan dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran rokok tanpa cukai.
- Perlunya sosialisasi tentang standardisasi mutu produk sesuai Standar Nasional Indonesia bagi beberapa produk terutama produk-produk elektronik, sehingga konsumen tetap terjaga..
- Sosialisasi Aku Cinta Indonesia (ACI), perlu terus dilakukan kepada para pelajar. Selain itu Pengawasan terhadap peredaran komoditi impor China akan terus dilakukan untuk menjamin bahwa barang yang beredar sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.